



Buku 1

**Laporan
Riset Ketenagaan
di Bidang Kesehatan
(RISNAKES) 2017**

Puskesmas

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2018

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr.wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) tahun 2017 telah dapat diselesaikan. Buku laporan Risnakes disusun menjadi dua buku laporan, yakni laporan Risnakes 2017: Puskesmas dan laporan Risnakes 2017: Rumah Sakit. Dalam laporan ini disampaikan gambaran ketenagaan di bidang kesehatan yang ada di seluruh puskesmas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Persiapan Risnakes 2017 sudah dilakukan sejak tahun 2016. Pelaksanaan pengumpulan data Risnakes 2017 dilakukan pada Bulan Agustus – September 2017 di 2.325 unit rumah sakit dan 9.699 puskesmas yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan 5.602 enumerator, serta para Penanggung Jawab Teknis (PJT) kabupaten/kota/provinsi yang terdiri dari peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dosen Politeknik Kesehatan (Poltekkes), jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi. Khusus untuk ketanggapan dan produktivitas tenaga di bidang kesehatan (*time study*), pengumpulan data dilakukan secara sub sampel terhadap 380 rumah sakit dan 425 puskesmas.

Keseluruhan proses memerlukan waktu serta menguras tenaga dan pikiran dari segenap pihak terkait, sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja keras dan kerja cerdas yang penuh dedikasi dari seluruh peneliti, struktural, dan staf Balitbangkes, para pakar dari dalam dan luar Balitbangkes, mitra kerja dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, PERSI, Adinkes, Penanggung Jawab Operasional Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan Risnakes 2017.

Secara khusus kami keluarga besar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk dapat menunjukkan sumbangsih dalam pembangunan kesehatan khususnya melalui penyampaian informasi sumber daya manusia kesehatan seperti yang ditunjukkan dalam hasil Risnakes 2017 ini.

Kendati upaya maksimal telah dilakukan, tentu masih ada kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang dilakukan. Kami sangat menantikan kritik, masukan, dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan Risnakes maupun pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang akan kami lakukan selanjutnya. Semoga hasil Risnakes 2017 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan sumber daya manusia kesehatan di Indonesia.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, 1 Desember 2017
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,



dr. Siswanto, MHP, DTM

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Riset ketenagaan di bidang kesehatan (Risnakes) Tahun 2017 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Hasil Risnakes 2017 diharapkan dapat menjadi sumber dukungan data yang memadai mengenai ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, untuk menunjang pengambilan keputusan ketenagaan yang berdasarkan bukti. Pengumpulan data Risnakes 2017 dilakukan di seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, puskesmas, serta rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Secara lebih khusus, dari Risnakes 2017 diperoleh data pemetaan ketenagaan per jenis tenaga di seluruh puskesmas, dinas kesehatan serta rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, gambaran mengenai manajemen SDM Kesehatan, gambaran permasalahan ketenagaan di bidang kesehatan (*bottleneck*), gambaran motivasi sumber daya tenaga, gambaran insentif tenaga, gambaran mengenai distribusi dan kondisi penugasan lain (*multi tasking* dan *task shifting*), gambaran mengenai produktivitas tenaga, gambaran ketanggapan pasien mengenai pelayanan rumah sakit dan puskesmas, gambaran mengenai implementasi pengembangan kapasitas dan kebijakan tugas belajar, serta gambaran kesiapan SDM Kesehatan dalam menjalankan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Rancangan Risnakes 2017 adalah studi potong lintang (*cross sectional*). Pengumpulan data dilakukan di 2.325 rumah sakit (pemerintah, TNI/Polri, serta swasta) dan 9.699 puskesmas yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, Politeknik Kesehatan (Poltekkes), Universitas, atau pun institusi penelitian kesehatan lainnya, serta melibatkan Tim Enumerator yang direkrut oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat, dimana semua tenaga yang terlibat dalam pengumpulan data harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Kegiatan yang dilakukan dalam Risnakes 2017 adalah : 1.) Pembahasan indikator dengan BPPSDM dan masing-masing unit terkait lainnya di lingkungan Kemenkes, 2.) Lokakarya dengan mengundang Unit Utama di lingkungan Kemenkes, TNI/Polri, Organisasi Profesi, serta Lintas Sektor terkait, 3.) Pembentukan tim teknis yang melibatkan unit utama terkait di lingkungan Kemenkes, TNI/Polri, serta lintas sektor, 4.) Pembahasan draft instrumen dan definisi operasional masing-masing indikator dengan lintas program dan lintas sektor terkait, 5.) Pertemuan pakar, 6.) Penyusunan instrumen dan pedoman pengisiannya, 7.) Ujicoba instrumen (2 kali), 8.) Perbaikan instrumen dan pedomannya, 9.) Rapat koordinasi teknis tingkat provinsi, 10.) Pelatihan pengisian instrumen bagi penanggung jawab teknis (PJT) provinsi/kabupaten/kota, 11.) Pembuatan program *entry* oleh Tim Laboratorium Manajemen Data Badan Litbangkes, 12.) Pelatihan pengisian instrumen bagi enumerator, 13.) Pengumpulan data di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh PJT dan pengumpulan data di rumah sakit dan puskesmas oleh Tim Enumerator, sekaligus *entry* data di lapangan, 14.) Proses validasi data oleh APKESI yang dilakukan sejak Rakornis Provinsi hingga pengumpulan data lapangan, 15.) Penyusunan *dummy table* oleh Tim Teknis, 16.) Pengiriman data ke Laboratorium Manajemen Data, editing dan cleaning data, 17.) Analisis data, 18.) Penyusunan laporan, dan 19. Diseminasi.

Pengorganisasian Risnakes 2017 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) I – V (1 korwil bertanggung jawab atas 6 – 7 provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Risnakes 2017 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pakar, Penanggung Jawab, Tim Teknis, Tim Manajemen Data, serta Tim Manajemen dan Keuangan.

Validasi studi ini dilaksanakan oleh APKESI (Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia). Proses validasi dilakukan untuk memperoleh informasi derajat kesesuaian pada aspek manajemen, teknis, dan logistik pada pelaksanaan pelatihan PJT provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan enumerator, pengumpulan data di rumah sakit, serta pengumpulan data di puskesmas. Hasil validasi Risnakes 2017 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kesesuaian 93,04%; dengan rincian hasil validasi pelatihan PJT provinsi dan kab/kota, pelatihan enumerator, pengumpulan data rumah sakit, dan pengumpulan data puskesmas secara berturut-turut nilainya adalah 87,5%, 92,0%, 94,7%, dan 92,9%.

Dengan menggunakan kerangka teori dari Modifikasi *Human Resources for Health Overcoming the Crisis (2004) Joint Learning Initiative*, yang menyatakan bahwa Status Kesehatan Masyarakat sebagai *Health Outcomes* dipengaruhi oleh manajemen tenaga kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan, serta kinerja dalam sistem, maka hasil Risnakes 2017 dibagi menjadi garis besar sebagai berikut : ketenagaan, manajemen sumber daya manusia kesehatan, pendelegasian wewenang, insentif, motivasi dan kepuasan staf, kepuasan pasien, waktu kerja efektif, serta sebagai tambahan sesuai dengan program Kemenkes saat ini adalah kesiapan puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2017 telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dengan rasio tertinggi adalah bidan dan perawat, namun ketidakmerataan juga semakin meningkat, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur; Rasio dokter berbanding puskesmas adalah 2,08, artinya bahwa rata-rata secara nasional terdapat 2 dokter di setiap puskesmas. Provinsi dengan dokter berbanding puskesmas yang terbesar adalah DKI Jakarta (4,9) dan yang paling rendah Provinsi Maluku (0,7). Hasil Risnakes 2017 juga menunjukkan bahwa masih ada 748 puskesmas (7,7%) tanpa tenaga dokter, dimana puskesmas tersebut terdapat di Provinsi Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Tenaga dokter gigi, tidak terdapat di 3.637 puskesmas (37,5%), dimana puskesmas tanpa dokter gigi terbesar adalah di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tenaga perawat tidak terdapat di 56 puskesmas (0,8%), sedangkan puskesmas tanpa bidan adalah 106 puskesmas (1,1%), dimana mayoritas puskesmas tanpa perawat dan bidan terdapat di Provinsi Papua.

Tenaga kesehatan masyarakat tidak terdapat di 2.325 puskesmas (24,0%), dengan rasio 2,1. Sedangkan puskesmas tanpa tenaga kesehatan lingkungan adalah 2.933 (30,2%), puskesmas tanpa tenaga laboratorium medik 5.851 (60,3%), puskesmas tanpa tenaga gizi 2.528 (26,1%), dan puskesmas tanpa tenaga farmasi 3.185 (32,8%).

Status kepegawaian tenaga kesehatan dikategorikan ke dalam tenaga PNS/CPNS, PTT, Kontrak/BLU, Sukarela, serta Nusantara Sehat. Hasil Risnakes 2017 mendapatkan tenaga kesehatan yang berstatus sebagai PNS/CPNS masih menempati proporsi yang terbesar di puskesmas untuk seluruh jenis tenaga, antara 56,5% (tenaga farmasi) sampai dengan 79,5% (tenaga dokter gigi). Sedangkan proporsi sumber daya manusia sukarela cukup signifikan, khususnya tenaga bidan (28,6%) dan perawat (28,4%) dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), bahkan ada yang dibayar dengan ala kadarnya, serta tanpa perlindungan hukum yang jelas atas keberadaannya. Keberadaan tenaga sukarela ini dapat menjadi peringatan bagi pengambil kebijakan atas lemahnya daya serap tenaga kesehatan pada lapangan kerja.

Sesuai dengan Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, terdapat 11 jenis tenaga yang harus dimiliki oleh puskesmas, yang jumlahnya disesuaikan dengan kriteria puskesmas perkotaan, perdesaan, terpencil/sangat terpencil, serta rawat inap dan non rawat inap, yaitu : dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, tenaga administrasi, dan pekarya. Kesesuaian sumber daya manusia sesuai dengan Permenkes No. 75 tahun 2014 masih belum memenuhi, terutama untuk puskesmas

terpencil/sangat terpencil. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik merupakan jenis tenaga yang keberadaannya paling tidak sesuai dengan standar Permenkes No. 75 tahun 2014.

Bila dilakukan analisa secara komposit untuk seluruh jenis tenaga, maka hanya 0,5% puskesmas non rawat inap dan 1,4% puskesmas rawat inap di puskesmas perkotaan yang memenuhi standar Permenkes No. 75 tahun 2014. Kondisi ini lebih buruk lagi pada puskesmas perdesaan dan puskesmas terpencil/sangat terpencil. Sebagian besar provinsi bahkan tidak memiliki satu pun puskesmas yang memenuhi standar Permenkes tersebut.

Sebanyak 79,8% puskesmas menyusun rencana kebutuhan SDM, dan 89,5% di antaranya mendokumentasikan perencanaan tersebut. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM yang dipakai oleh 52,6% puskesmas adalah metode WISN atau Analisis Beban Kerja dengan mengacu pada Permenkes No. 33 tahun 2015. Kondisi ketenagaan puskesmas menurut persepsi puskesmas menyatakan bahwa 12,7% sudah sesuai, 82,5% kurang, dan 4,9% puskesmas menyatakan bahwa jumlah tenaganya berlebih.

Tingkat kehadiran dan penggunaan waktu efektif sumber daya tenaga belum optimal. Proporsi puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran adalah 98,3% (9.538 puskesmas), dimana yang melakukan rekapitulasi kehadiran adalah 9.224 puskesmas (96,7%). Sebanyak 1.678 puskesmas (18,2%) terdapat petugas tidak hadir 5-30 hari tanpa keterangan, sedangkan puskesmas terdapat petugas tidak hadir lebih dari 30 hari tanpa keterangan ada sebanyak 1.060 puskesmas (11,5%).

Diketemukannya fakta masih ada tenaga di luar fungsional medis melayani pelayanan yang bersifat medis (*task shifting*). Sebanyak $\leq 5\%$ puskesmas terdapat tenaga farmasi, analis, gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat yang melakukan tindakan medis umum yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Sebanyak 66,1% puskesmas mengakui ada tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien.

Penugasan ganda (*multi tasking*) atau penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen umum dilakukan di 95,9% puskesmas, dan sebagian besar adalah penugasan sebagai bendahara (90,1% di puskesmas rawat inap dan 90,0% di puskesmas non rawat inap). Penugasan ganda tersebut sudah diperkuat dengan surat tugas/surat keputusan (71,7%). Jumlah tenaga yang kurang disebut sebagai salah satu penyebab penugasan ganda yang terjadi di puskesmas.

Terdapat ketimpangan insentif lintas wilayah. Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa 34,5% tenaga puskesmas di Indonesia memperoleh penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dimana Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan proporsi terbesar (61,2%) pegawai puskesmas yang memiliki penghasilan di bawah UMK, sedangkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan proporsi terkecil (13,1%) pegawai puskesmas yang memiliki penghasilan di bawah UMK. Rata-rata insentif dokter puskesmas tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta (Rp 11.203.819,60) sedangkan rata-rata insentif dokter yang terendah ada di Provinsi Bengkulu (Rp 1.299.212,72).

Insentif non finansial tenaga puskesmas antara lain adalah rumah dinas, kendaraan dinas, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan. Terdapat 78,0% puskesmas memberikan rumah dinas dan 93,1% puskesmas memberikan kendaraan dinas bagi pegawainya. Sebanyak 63,9% puskesmas memiliki kebijakan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Diketemukannya fakta bahwa komponen kepuasan pasien tentang kehandalan, ketanggapan, dan *tangible* layanan tenaga puskesmas yang masih rendah, sedangkan untuk jaminan dan empati sudah cukup tinggi. Secara umum kepuasan pasien rawat inap puskesmas lebih baik daripada kepuasan pasien rawat jalan puskesmas.

Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa 44,3% petugas puskesmas memiliki motivasi tinggi, 55,7% motivasi sedang, dan tidak ada petugas puskesmas yang memiliki motivasi rendah. Proporsi tertinggi provinsi dengan petugas puskesmas memiliki motivasi tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (60,1%), sedangkan proporsi terendah provinsi dengan petugas puskesmas memiliki motivasi tinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (35,2%).

Secara nasional skor kepuasan kerja staf adalah 72,0. Provinsi dengan rata-rata skor kepuasan kerja staf tertinggi adalah DKI Jakarta (73,4), terendah Provinsi Banten (68,9%). Proporsi terbesar kepuasan kerja petugas puskesmas ada pada kepuasan kerja sedang (52%), diikuti oleh kepuasan kerja rendah (24,7%), dan tinggi (23,2%).

Pada Risnakes 2017 dilakukan *time motion study* tenaga kesehatan di 425 puskesmas yang diambil secara *random sampling* dengan perhitungan sampel, untuk mengetahui waktu kerja efektif dari tenaga puskesmas. Hasil Risnakes menunjukkan bahwa dari 218 orang dokter yang diamati selama jam kerja, sebanyak 27,6% dokter tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai fungsional dan penugasannya; dari 66 orang dokter gigi, sebanyak 32,1% dokter gigi tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai fungsional dan penugasannya; dari 141 orang bidan yang diamati, sebanyak 32,6% bidan tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai fungsional dan penugasannya; dan dari 139 orang perawat yang diamati, sebanyak 27,1% perawat tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai fungsional dan penugasannya.

Kesiapan puskesmas dalam menjalankan PIS-PK menurut hasil Risnakes 2017 adalah 61,9% puskesmas belum dilatih PIS-PK, dimana tiga proporsi tertinggi provinsi dengan puskesmas belum dilatih PIS-PK adalah Provinsi Papua (94,6%), Provinsi Nusa Tenggara Timur (88,7%), dan Provinsi Maluku (87,9%). Tingkat kesiapan puskesmas dalam melaksanakan PIS-PK baru terdapat di 33,5% puskesmas, baik dalam hal kesiapan tenaga, manajemen, maupun sarana dan prasarana pendukung PIS-PK.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tahun 2017 adalah : 1. Diperlukan perencanaan yang holistik dan terpadu sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan melibatkan Kemenkes, KemenPAN/RB, Dinkes Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Nasional dan Badan Kepegawaian Daerah; 2. Diperlukan skema khusus untuk penempatan sumber daya di daerah yang timpang, misalnya dengan penempatan Tim Nusantara Sehat, Nusantara Sehat Individual, atau pun pengangkatan tenaga sukarela; 3. Diperlukan revisi Permenkes No. 75 tahun 2014 mengenai syarat dan kriteria jenis dan jumlah tenaga di puskesmas; 4. Diperlukan penetapan prioritas pemenuhan sumber daya tenaga di bidang kesehatan dikaitkan dengan PIS-PK, Germas, dan pencegahan stunting (dokter, kesehatan masyarakat, tenaga gizi, serta tenaga laboratorium); 5. Diperlukan peningkatan kepemimpinan dan perbaikan manajemen puskesmas (uraian tugas sumber daya manusia, rencana kerja bulanan); 6. Diperlukan penyusunan standar profesi dan kewenangan tenaga kesehatan, serta surat edaran terkait dengan kewenangan tenaga kesehatan; 7. diperlukan pembuatan skema yang lebih adil untuk tenaga di daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, misalnya dengan pemberian subsidi dari Pemerintah Pusat; 8. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RANGKUMAN EKSEKUTIF.....	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xx
Daftar Skema.....	xxi
Daftar Singkatan.....	xxii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Pertanyaan Penelitian	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat penelitian.....	3
1.6 Ruang lingkup.....	3
1.7 Tentang Buku 2. Laporan Risnakes 2017	4
2 METODE DAN BESAR SAMPEL	5
2.1 Populasi dan sampel	5
2.2 Responden	9
2.3 Kuesioner	9
2.4 Cara Pengumpulan Data	10
2.5 Kegiatan	10
2.6 Pengorganisasian	11
2.7 Pengumpulan data	12
2.8 Manajemen data	14
2.9 Analisis data	15
2.10 Validasi	15
2.11 Klirens Etik.....	19
3 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS	20
3.1 Keberadaan tenaga kesehatan di Puskesmas	20
3.2 Pendidikan tertinggi tenaga kesehatan di Puskesmas	33
3.3 Status kepegawaian tenaga kesehatan di Puskesmas	42

4	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS	55
4.1	Perencanaan SDM Kesehatan	55
4.2	Pengelolaan Ketenagaan.....	63
4.3	Pendidikan dan Pelatihan	78
5	PENDELEGASIAN WEWENANG.....	130
5.1	Pendelegasian wewenang (<i>task shifting</i>) dan penugasan ganda (<i>multitasking</i>) di puskesmas.....	130
5.2	Hasil Risnakes 2017 terkait pendelegasian wewenang (<i>task shifting</i>) dan penugasan ganda (<i>multi tasking</i>).	131
6	INSENTIF SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS	176
6.1	Faktor-faktor penentu kebijakan kompensasi (termasuk insentif)	177
6.2	Insentif dalam konteks manajemen SDM	177
6.3	Pengaruh insentif terhadap perilaku dan kinerja para dokter.....	178
6.4	Penentuan paket insentif.....	178
6.5	Hubungan persepsi keadilan dengan kepuasan, retensi, dan lainnya.....	178
6.6	Kesejahteraan SDM Kesehatan.....	180
6.7	Kesenjangan Penghasilan.....	180
6.8	Insentif Non Finansial.....	181
6.9	Insentif Finansial	182
6.10	Hasil Risnakes 2017	183
7	KETANGGAPAN (<i>RESPONSIVENESS</i>) DAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS	223
7.1	Ketanggapan pelayanan kesehatan (<i>Responsiveness</i>).....	223
7.2	Kepuasan Pasien	227
7.3	Hasil Analisis.....	229
8	MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA STAF PUSKESMAS	235
8.1	Motivasi Kerja	235
8.2	Kepuasan kerja staf puskesmas	245
9	TIME STUDY DAN WAKTU KERJA PRODUKTIF	250
9.1	Waktu kerja.....	250
9.2	Sampel Time Study.....	250
9.3	Hasil Risnakes 2017	250
10	PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)	255
10.1	Sampel.....	256
10.2	Analisis Kesiapan Puskesmas menjalankan PIS-PK	256

11	DAFTAR PUSTAKA.....	297
12	LAMPIRAN	299

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Distribusi sampel rumah sakit menurut provinsi, Risnakes 2017	6
Tabel 2.2.	Distribusi sampel puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017	7
Tabel 2.3.	Unit analisa dan jumlah sampel puskesmas dan rumah sakit, Risnakes 2017	8
Tabel 2.5.	Jenis kuesioner, Risnakes 2017	9
Tabel 2.6.	Lokasi validasi Risnakes 2017	16
Tabel 2.7.	Tahapan esensial dan bobot validasi, Risnakes 2017	17
Tabel 2.8.	Daftar temuan dan perbaikan validasi saat workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) dan Enumerator, Risnakes 2017	17
Tabel 2.9.	Daftar temuan dan saran perbaikan validasi pengumpulan data di rumah sakit dan puskesmas, Risnakes 2017	18
Tabel 2.10.	Nilai total validasi, Risnakes 2017	19
Tabel 3.1.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga dokter menurut provinsi, Risnakes 2017	24
Tabel 3.2.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga dokter gigi menurut provinsi.....	25
Tabel 3.3.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga perawat menurut provinsi.	26
Tabel 3.4.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga bidan menurut provinsi, Risnakes 2017	27
Tabel 3.5.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga kesehatan masyarakat menurut provinsi.	28
Tabel 3.6.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga kesehatan lingkungan menurut provinsi.	29
Tabel 3.7.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga laboratorium medik menurut provinsi.....	30
Tabel 3.8.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga gizi menurut provinsi, Risnakes 2017	31
Tabel 3.9.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga farmasi menurut provinsi, Risnakes 2017	32
Tabel 3.10.	Distribusi tenaga dokter di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi.	34
Tabel 3.11.	Distribusi tenaga dokter gigi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017.....	35
Tabel 3.12.	Distribusi tenaga perawat di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017.....	36
Tabel 3.13.	Distribusi tenaga bidan di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, ...	37
Tabel 3.14.	Distribusi tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017.....	38
Tabel 3.15.	Distribusi tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017.....	39
Tabel 3.16.	Distribusi tenaga gizi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, ...	40
Tabel 3.17.	Distribusi tenaga farmasi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi.	41
Tabel 3.18.	Distribusi status kepegawaian tenaga dokter puskesmas menurut provinsi.	43
Tabel 3.19.	Distribusi status kepegawaian tenaga dokter gigi puskesmas menurut provinsi.....	44
Tabel 3.20.	Distribusi status kepegawaian tenaga perawat puskesmas menurut provinsi.	45
Tabel 3.21.	Distribusi status kepegawaian tenaga bidan puskesmas menurut provinsi.....	46
Tabel 3.22.	Distribusi status kepegawaian tenaga kesehatan masyarakat puskesmas menurut provinsi.....	47
Tabel 3.23.	Distribusi status kepegawaian tenaga kesehatan lingkungan puskesmas menurut provinsi.....	48
Tabel 3.24.	Distribusi status kepegawaian tenaga laboratorium puskesmas menurut provinsi.	49
Tabel 3.25.	Distribusi status kepegawaian tenaga gizi puskesmas menurut provinsi.....	50
Tabel 3.26.	Distribusi status kepegawaian tenaga farmasi puskesmas menurut provinsi.....	51

Tabel 3.27.	Standar ketenagaan di puskesmas berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014.	52
Tabel 3.28.	Jumlah puskesmas berdasarkan kategori menurut pengakuan Kepala Puskesmas.....	52
Tabel 3.29.	Kesesuaian Ketenagaan Puskesmas dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 menurut Jenis tenaga kesehatan, Risnakes 2017	53
Tabel 3.30.	Kesesuaian tenaga kesehatan di Puskesmas menurut Permenkes 75 tahun 2014.....	54
Tabel 4.1.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyusunan dan pendokumentasian perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017	56
Tabel 4.2.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyusunan dan pendokumentasian perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan menurut kategori Puskesmas, Risnakes 2017	57
Tabel 4.3.	Distribusi puskesmas berdasarkan cara perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017	58
Tabel 4.4.	Distribusi puskesmas berdasarkan persepsi kondisi ketenagaan menurut provinsi.....	59
Tabel 4.5.	Distribusi puskesmas berdasarkan Institusi yang mendapat laporan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017.....	60
Tabel 4.6.	Distribusi puskesmas berdasarkan jenis pengajuan kebutuhan dengan menggunakan dokumen perencanaan menurut provinsi, Risnakes 2017.....	61
Tabel 4.7.	Distribusi puskesmas berdasarkan jenis perubahan positif yang didapatkan dari pengajuan kebutuhan menurut provinsi, Risnakes 2017	62
Tabel 4.8.	Distribusi puskesmas berdasarkan pencatatan kehadiran tenaga puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017	64
Tabel 4.9.	Distribusi puskesmas berdasarkan jenis pencatatan kehadiran tenaga menurut provinsi.....	65
Tabel 4.10.	Distribusi puskesmas berdasarkan rekapitulasi kehadiran tenaga menurut provinsi.....	66
Tabel 4.11.	Distribusi puskesmas berdasarkan frekuensi pencatatan kehadiran tenaga puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017.....	67
Tabel 4.12.	Distribusi puskesmas berdasarkan ketersediaan evaluasi kehadiran tenaga menurut provinsi.....	68
Tabel 4.13.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas tidak masuk kerja tanpa keterangan 5-30 hari kerja pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017	69
Tabel 4.14.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas tidak masuk kerja tanpa keterangan >30 hari kerja tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017	70
Tabel 4.15.	Distribusi puskesmas berdasarkan sanksi pelanggaran disiplin kehadiran petugas menurut provinsi, Risnakes 2017.....	71
Tabel 4.16.	Distribusi puskesmas berdasarkan jenis sanksi terhadap pelanggaran disiplin kehadiran petugas pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017	72
Tabel 4.17.	Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan data jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja menurut provinsi, Risnakes 2017.....	73
Tabel 4.18.	Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan data jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	74
Tabel 4.19.	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017	75
Tabel 4.20.	Distribusi puskesmas berdasarkan mutasi pegawai tetap (PNS dan CPNS) sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017.....	76
Tabel 4.21.	Distribusi puskesmas berdasarkan mutasi pegawai tidak tetap (selain PNS dan CPNS) sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017	77
Tabel 4.22.	Rerata jumlah pegawai tetap (PNS dan CPNS) dan tidak tetap (selain PNS dan CPNS) puskesmas yang akan pensiun tahun 2018 menurut provinsi, Risnakes 2017.....	78

Tabel 4.23.	Distribusi puskesmas berdasarkan pembuatan perencanaan kebutuhan tugas belajar pegawai menurut provinsi, Risnakes 2017	80
Tabel 4.24.	Distribusi puskesmas berdasarkan pembuatan perencanaan kebutuhan tugas belajar pegawai menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	81
Tabel 4.25.	Distribusi puskesmas berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kebutuhan tugas belajar pegawai dengan perencanaan menurut provinsi, Risnakes 2017	82
Tabel 4.26.	Distribusi puskesmas berdasarkan penerimaan manfaat program tugas belajar menurut provinsi, Risnakes 2017.....	83
Tabel 4.27.	Jumlah SDM Kesehatan puskesmas yang akan melaksanakan tugas belajar tahun 2018 menurut provinsi, Risnakes 2017.....	84
Tabel 4.28.	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi.....	85
Tabel 4.29.	Jumlah pegawai puskesmas yang mengikuti tugas belajar sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	87
Tabel 4.30.	Jumlah pegawai yang mengikuti ijin belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi.....	88
Tabel 4.31.	Jumlah pegawai yang mengikuti ijin belajar sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas.....	90
Tabel 4.32.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari Kemenkes sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017	91
Tabel 4.33.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari Kemenkes sejak tahun 2014	93
Tabel 4.34.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017.....	94
Tabel 4.35.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sejak tahun 2014.....	96
Tabel 4.36.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari swasta/yayasan/donor lain sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017	97
Tabel 4.37.	Pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari swasta/yayasan/donor lain sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	99
Tabel 4.38.	Jumlah peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017.....	100
Tabel 4.39.	Jumlah peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	102
Tabel 4.40.	Distribusi puskesmas yang melakukan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training need analysis</i>) menurut provinsi, Risnakes 2017.....	103
Tabel 4.41.	Distribusi puskesmas yang melakukan analisis kebutuhan pelatihan (<i>training need analysis</i>) menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	104
Tabel 4.42.	Distribusi puskesmas yang membuat perencanaan anggaran pelatihan dan pegawai yang akan mengikuti pelatihan menurut provinsi, Risnakes 2017.....	105
Tabel 4.43.	Distribusi puskesmas yang membuat perencanaan anggaran pelatihan dan pegawai yang akan mengikuti pelatihan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017.....	106
Tabel 4.44.	Distribusi puskesmas berdasarkan proses perencanaan pelatihan bagi pegawai puskesmas untuk puskesmas yang tidak membuat perencanaan pelatihan menurut provinsi.	107
Tabel 4.45.	Distribusi puskesmas berdasarkan proses perencanaan pelatihan bagi pegawai untuk puskesmas yang tidak membuat perencanaan pelatihan menurut kategori puskesmas.	108
Tabel 4.46.	Distribusi pegawai puskesmas yang mengikuti pelatihan tahun 2015 menurut provinsi.	109

Tabel 4.47.	Distribusi pegawai puskesmas yang mengikuti pelatihan tahun 2015 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	110
Tabel 4.48.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2015 menurut provinsi, Risnakes 2017	111
Tabel 4.49.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2015 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	112
Tabel 4.50.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017	113
Tabel 4.51.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2016 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	114
Tabel 4.52.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan informasi mengenai peluang Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017	115
Tabel 4.53.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	116
Tabel 4.54.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan pilihan program studi peserta tugas belajar sesuai dengan kebutuhan puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017.....	117
Tabel 4.55.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan pilihan program studi peserta tugas belajar sesuai dengan kebutuhan puskesmas menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	118
Tabel 4.56.	Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan kesempatan tenaga kesehatan mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah berdasarkan provinsi, Risnakes 2017	119
Tabel 4.57.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian kesempatan tenaga kesehatan mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah berdasarkan kategori puskesmas, Risnakes 2017	120
Tabel 4.58.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis menurut provinsi, Risnakes 2017	121
Tabel 4.59.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	122
Tabel 4.60.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian peringatan dan tindak lanjutnya terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR/SIP/SIK menurut provinsi, Risnakes 2017	123
Tabel 4.61.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian peringatan dan tindak lanjutnya terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR/SIP/SIK menurut kategori puskesmas.....	124
Tabel 4.62.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian sanksi berupa rekomendasi pencabutan SIP bagi tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin	125
Tabel 4.63.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian sanksi rekomendasi pencabutan SIP bagi tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menurut kategori puskesmas.	126
Tabel 4.64.	Distribusi puskesmas berdasarkan pengawasan mutu tenaga kesehatan menurut provinsi.	127
Tabel 4.65.	Distribusi puskesmas berdasarkan pengawasan mutu tenaga kesehatan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017	129
Tabel 5.1.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas diluar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki menurut provinsi.	133
Tabel 5.2.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi untuk penugasan manajemen dan tatalaksana pasien menurut provinsi, Risnakes 2017	134
Tabel 5.3.	Distribusi puskesmas berdasarkan bidang penugasan menurut karakteristik puskesmas.	135

Tabel 5.4.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang melakukan kegiatan tindakan medis umum, gigi, dan Keluarga Berencana menurut jenis tindakan, Risnakes 2017	136
Tabel 5.5.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan sumber daya manusia kesehatan yang melakukan kegiatan tindakan farmasi, laboratorium, dan kesehatan masyarakat di puskesmas menurut jenis tindakan, Risnakes 2017	137
Tabel 5.6.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki berdasarkan bentuk penugasan bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	140
Tabel 5.7.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen yang dikuatkan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) tertulis menurut provinsi, Risnakes 2017	141
Tabel 5.8.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen yang dikuatkan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) tertulis menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	142
Tabel 5.9.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penugasan menurut provinsi, Risnakes 2017	143
Tabel 5.10.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	144
Tabel 5.11.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pejabat yang menandatangani Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) Penugasan menurut provinsi	145
Tabel 5.12.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pejabat yang menandatangani Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) Penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	146
Tabel 5.13.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan penolakan penerima tugas menurut provinsi, Risnakes 2017	147
Tabel 5.14.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan penolakan penerima tugas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	148
Tabel 5.15.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penolakan penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017	149
Tabel 5.16.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penolakan penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas.	150
Tabel 5.17.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan di bidang manajemen menurut provinsi	151

Tabel 5.18.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	152
Tabel 5.19.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017	153
Tabel 5.20.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan jenis imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut provinsi	154
Tabel 5.21.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas.	155
Tabel 5.22	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut provinsi, Risnakes 2017	156
Tabel 5.23.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017.....	157
Tabel 5.24.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut provinsi, Risnakes 2017	158
Tabel 5.25.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	159
Tabel 5.26.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penguatan Surat Tugas/Surat Keputusan tertulis menurut karakteristik puskesmas.....	162
Tabel 5.27.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan alasan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	163
Tabel 5.28.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penandatanganan surat tugas/Surat Keputusan menurut karakteristik puskesmas.	163
Tabel 5.29.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penolakan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	164
Tabel 5.30.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan alasan penolakan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	165
Tabel 5.31.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	166

Tabel 5.32.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan bentuk imbalan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	167
Tabel 5.33.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	168
Tabel 5.34.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas.....	168
Tabel 5.35.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan adanya kasus yang tidak diharapkan yang terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	169
Tabel 5.36.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis dampak dari kasus yang tidak diharapkan yang terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	170
Tabel 5.37.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan akibat dari kecelakaan Kerja menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017.....	171
Tabel 5.38.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis penyakit akibat dari kecelakaan Kerja menurut karakteristik puskesmas	172
Tabel 5.39.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan keberadaan dampak yang berujung pada tuntutan hukum menurut karakteristik puskesmas.	173
Tabel 5.40.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penyediaan bantuan pembiayaan pada kasus(komplain) yang berujung pada tuntutan hukum menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017.....	173
Tabel 5.41.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam penugasan ganda menurut karakteristik puskesmas.....	174
Tabel 5.42.	Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas.....	175
Tabel 6.1.	Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan penghasilan dibawah UMK dan diatas UMK menurut provinsi, Risnakes 2017.....	186
Tabel 6.2.	Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan penghasilan dibawah UMK dan diatas UMK menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017.....	187
Tabel 6.3.	Distribusi puskesmas berdasarkan permasalahan kesenjangan penghasilan dan pengaruh terhadap kinerja petugas menurut provinsi, Risnakes 2017	188
Tabel 6.4.	Distribusi puskesmas berdasarkan permasalahan kesenjangan penghasilan dan pengaruh terhadap kinerja petugas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	189

Tabel 6.5.	Distribusi tenaga kesehatan berdasarkan kecukupan penghasilan tenaga kesehatan puskesmas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	190
Tabel 6.6.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian jenis insentif finansial menurut provinsi.	191
Tabel 6.7.	Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian insentif finansial menurut karakteristik puskesmas. Risnakes 2017.....	192
Tabel 6.8.	Distribusi besaran insentif total tenaga spesialis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	193
Tabel 6.9.	Distribusi besaran insentif total tenaga dokter di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	194
Tabel 6.10.	Distribusi besaran insentif total tenaga dokter gigi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	195
Tabel 6.11.	Distribusi besaran insentif total tenaga bidan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	196
Tabel 6.12.	Distribusi besaran insentif total tenaga perawat di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	197
Tabel 6.13.	Distribusi besaran insentif total tenaga farmasi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	198
Tabel 6.14.	Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	199
Tabel 6.15.	Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	200
Tabel 6.16.	Distribusi besaran insentif total tenaga gizi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	201
Tabel 6.17.	Distribusi besaran insentif total tenaga keterampilan fisik di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	202
Tabel 6.18.	Distribusi besaran insentif total tenaga keteknisian medis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	203
Tabel 6.19.	Distribusi besaran insentif total tenaga teknis biomedis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	204
Tabel 6.20.	Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan tradisional di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	205
Tabel 6.21.	Distribusi besaran insentif total tenaga non tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017	206
Tabel 6.22.	Distribusi nominal penghasilan minimum dan median tenaga kesehatan tertentu (dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat) berdasarkan menurut provinsi, Risnakes 2017	207
Tabel 6.23.	Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas rumah dinas menurut provinsi.	209
Tabel 6.24.	Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas rumah dinas menurut karakteristik.....	210
Tabel 6.25.	Distribusi puskesmas berdasarkan tenaga kesehatan yang memanfaatkan rumah dinas menurut provinsi, Risnakes 2017.....	211
Tabel 6.26.	Distribusi puskesmas berdasarkan tenaga kesehatan yang memanfaatkan rumah dinas menurut karakteristik, Risnakes 2017	212
Tabel 6.27.	Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas kendaraan dinas menurut provinsi.	213
Tabel 6.28.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan fasilitas kendaraan dinas menurut karakteristik.	214
Tabel 6.29.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan dan dasar penetapannya menurut provinsi, Risnakes 2017	215

Tabel 6.30.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan dan dasar penetapannya menurut karakteristik, Risnakes 2017	216
Tabel 6.31.	Distribusi puskesmas berdasarkan kebijakan pemberian jaminan kesehatan bagi tenaga non PNS dan jenis pembiayaannya menurut provinsi, Risnakes 2017	217
Tabel 6.32.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kepemilikan jaminan kesehatan dan pembiayaan premi jaminan kesehatan untuk tenaga non PNS menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	218
Tabel 6.33.	Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan aturan tertulis pembagian jasa medis dan penerapan pembagian jasa medis menurut provinsi, Risnakes 2017	219
Tabel 6.34.	Distribusi puskesmas dengan keberadaan aturan pembagian jasa medis dan penerapan aturan pembagian jasa medis menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	220
Tabel 6.35.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan perolehan insentif non finansial menurut provinsi, Risnakes 2017	221
Tabel 6.36.	Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan perolehan insentif non finansial menurut karakteristik, Risnakes 2017	222
Tabel 7.1.	Distribusi responden menurut kemampuan pelayanan puskesmas berdasarkan alasan memilih fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, dan sumber biaya, Risnakes 2017	229
Tabel 7.2.	Distribusi responden rawat inap puskesmas dengan penilaian ketanggapan kategori baik menurut karakteristik, Risnakes 2017	231
Tabel 7.3.	Distribusi responden rawat jalan puskesmas dengan penilaian kepuasan kategori baik berdasarkan karakteristik, Risnakes 2017	233
Tabel 7.4.	Distribusi responden rawat inap puskesmas dengan penilaian kepuasan kategori baik berdasarkan karakteristik, Risnakes 2017	234
Tabel 9.1.	Distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas menurut waktu kerja yang digunakan	251
Tabel 9.2.	Median jumlah pasien dalam gedung dan luar Gedung yang dilayani setiap jenis tenaga kesehatan UKP puskesmas, Risnakes 2017	251
Tabel 9.3.	Distribusi Jenis tenaga kesehatan puskesmas rawat inap dan non rawat inap (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien	252
Tabel 9.4.	Distribusi Jenis tenaga kesehatan puskesmas perkotaan, perdesaan, terpencil/sangat terpencil (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien, Risnakes 2017	253
Tabel 9.5.	Distribusi jenis tenaga kesehatan puskesmas BLUD dan non BLUD (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien, Risnakes 2017	254
Tabel 10.1	Persentase Puskesmas dilatih PIS PK dan Puskesmas belum dilatih PIS PK berdasarkan provinsi, Risnakes 2017	258
Tabel 10.2	Persentase Puskesmas dengan sumber informasi tentang PIS PK, Risnakes 2017	259
Tabel 10.3	Persentase Puskesmas yang memiliki penanggung jawab PIS PK, Risnakes 2017	260
Tabel 10.4	Persentase Puskesmas menurut penyelenggara pelatihan PIS PK, Risnakes 2017	261
Tabel 10.5	Persentase Puskesmas menurut tahun pelaksanaan pelatihan PIS PK, Risnakes 2017	262
Tabel 10.6	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut keikutsertaan petugas dalam pelatihan PIS PK, Risnakes 2017	263
Tabel 10.7	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang memiliki penanggung jawab yg sudah dilatih PIS PK, ...	264
Tabel 10.8	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan sosialisasi PIS PK	265

Tabel 10.9	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah memasukkan PIS PK dalam RUK dan RPK Puskesmas, Risnakes 2017.....	266
Tabel 10.10	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut sumber anggaran PIS PK.	267
Tabel 10.11	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan dan jenis instrumen pendataan PIS PK, Risnakes 2017	268
Tabel 10.12	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan PINKESGA dan sumber pengadaannya, Risnakes 2017.....	269
Tabel 10.13	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan pembagian wilayah binaan, Risnakes 2017.....	270
Tabel 10.14	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan pengumpulan data dan petugas pengumpul data PIS PK, Risnakes 2017	271
Tabel 10.15	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan petugas khusus untuk analisis data PIS PK, Risnakes 2017	272
Tabel 10.16	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan interpretasi data	273
Tabel 10.17	Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang melaksanakan lokakarya mini bulanan.	274
Tabel 10.18	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan rencana kerja tahunan.....	275
Tabel 10.19	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan dokumen perencanaan tahunan, Risnakes 2017	276
Tabel 10.20	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sumber anggaran kegiatan Puskesmas.	277
Tabel 10.21	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sumber data yang digunakan untuk perencanaan kegiatan Puskesmas, Risnakes 2017	278
Tabel 10.22	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut tenaga pengumpul data PIS PK.....	279
Tabel 10.23	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan petugas khusus analisis data PIS PK dan keterlibatan PJ program dalam perencanaan, Risnakes 2017	280
Tabel 10.24	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan pembahasan perencanaan kegiatan Puskesmas, Risnakes 2017	281
Tabel 10.25	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan kegiatan apel pagi dan apel sore, Risnakes 2017.....	282
Tabel 10.26	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang membahas kegiatan PIS-PK dalam lokakarya mini bulanan dan triwulan, Risnakes 2017.....	283
Tabel 10.27	Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas, Risnakes 2017	284
Tabel 10.28	Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan peralatan dasar yang masih berfungsi.	285
Tabel 10.29	Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan peralatan dasar yang masih berfungsi.	286
Tabel 10.30	Persentase seluruh Puskesmas menurut kemampuan pemeriksaan laboratorium.....	287
Tabel 10.31	Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan obat tuberkulosis.....	288
Tabel 10.32	Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan obat anti hipertensi.	289
Tabel 10.33	Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan dan kecukupan obat gangguan jiwa berat, Risnakes 2017	290
Tabel 10.34	Persentase Puskesmas dilatih PIS PK menurut kesiapan P1. P2. P3 dan kesiapan manajemen....	292
Tabel 10.35	Persentase puskesmas belum dilatih PIS PK menurut kesiapan P1. P2. P3 dan kesiapan manajemen. Risnakes 2017	293
Tabel 10.36	Persentase Puskesmas dilatih PIS PK menurut sarana prasarana, Risnakes 2017	294
Tabel 10.37	Persentase puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sarana prasarana, Risnakes 2017	295

Tabel 10.38	Persentase Puskesmas Dilatih PIS PK dan Belum Dilatih PIS PK Berdasarkan Kesiapan Penyelenggaraan PIS-PK (Manajemen dan Sarana Prasarana Puskesmas), Risnakes 2017	296
-------------	--	-----

Daftar Gambar

Gambar 3.1.	Rasio dokter berbanding puskesmas menurut provinsi	20
Gambar 3.2.	Proporsi puskesmas dengan ketiadaan dokter menurut provinsi, Risnakes 2017	21
Gambar 3.3.	Perbandingan rasio dokter per puskesmas antara Rifaskes 2011 dengan Risnakes 2017	21
Gambar 3.4.	Perbandingan rasio dokter per puskesmas antara Rifaskes 2011 dengan Risnakes 2017 untuk Indonesia dan provinsi dengan rasio terendah berdasarkan hasil Risnakes 2017	22
Gambar 3.5.	Komposisi ketenagaan kesehatan di puskesmas menurut jenis, Risnakes 2017.....	33
Gambar 3.6.	Distribusi tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan struktur kepegawaian.....	42
Gambar 6.1.	Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan proporsi pegawai yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum kabupaten/kota menurut provinsi	184
Gambar 6.2.	Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan proporsi pegawai yang memiliki penghasilan puskesmas mencukupi kebutuhan keluarga selama sebulan dan kemampuan menabung menurut provinsi, Risnakes 2017	185
Gambar 7.1.	Ketanggapan pasien rawat jalan puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017 ...	230
Gambar 7.2.	Ketanggapan pasien rawat inap puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017	230
Gambar 7.3.	Kepuasan pasien rawat jalan puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017	232
Gambar 7.4.	Kepuasan pasien rawat inap puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017.....	232
Gambar 8.1.	Distribusi persentase motivasi kerja staf puskesmas menurut klasifikasi motivasi (sedang dan tinggi) berdasarkan provinsi, Risnakes 2017	241
Gambar 8.2.	Distribusi proporsi motivasi kerja staf puskesmas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	243
Gambar 8.3.	Distribusi persentase kepuasan kerja staf puskesmas menurut klasifikasi kepuasan kerja (rendah, sedang dan tinggi) berdasarkan provinsi, Risnakes 2017	247
Gambar 8.4.	Distribusi proporsi kepuasan kerja staf puskesmas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017	247

Daftar Skema

Skema 4.1. Alur Hasil Risnakes 2017: Kehadiran pegawai puskesmas, Risnakes 2017	63
---	----

Daftar Singkatan

Adinkes	: Asosiasi Dinas Kesehatan
AHCPR	: <i>Agency for Health Care Policy and Research</i>
ANC	: <i>antenatal care</i>
APKESI	: Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia
ASI	: Air Susu Ibu
AUT	: <i>Autonomy</i>
B2P2TOOT	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
B2P2VRP	: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
BA	: <i>Basic Amenities</i>
Bapelkes	: Balai Pelatihan Kesehatan
BBPK	: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPPSDM	: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
CAHPS	: <i>Consumer Assessment of Health Plans Survey</i>
COM	: <i>Communication</i>
CON/CI	: <i>Confidentially</i>
COP/CH	: <i>Choice Of Provider</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CPZ	: <i>chlorpromazine</i>
DI	: Diploma satu
DIG	: <i>Dignity</i>
DII	: Diploma dua
DIII	: Diploma tiga
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DIV	: Diploma empat
dsb	: dan sebagainya
ENV	: <i>Quality Basic Amenities</i>
Fasyankes	: Fasilitas pelayanan kesehatan
FDC	: <i>Fixed Doze Combination</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
ISO	: <i>Organization for Standardization</i>
IUD	: <i>intrauterine device</i>
Jamkesda	: Jaminan kesehatan daerah
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JKN-KIS	: Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat
KB	: Keluarga Berencana
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
KemenPAN/RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemas	: Kesehatan Masyarakat
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
Maks	: Maksimal

MAO	: <i>monoamine oxidase</i>
Menkes	: Menteri Kesehatan
mg	: miligram
Min	: Minimum
MoE	: <i>Margin of Error</i>
MSDM	: Manajemen Sumber Daya Manusia
N/A	: <i>Not available</i>
Nakes	: Tenaga kesehatan
NRI	: Non Rawat Inap
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PA	: <i>Prompt Attention</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah*
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
Pemda	: Pemerintah Daerah
PERSI	: Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia
PINKESGA	: Paket Informasi Keluarga
PIS-PK	: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
PJT	: Penanggung Jawa Teknis
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perguruan Tinggi
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
RAND	: <i>Research AND Development</i>
RI	: Rawat Inap
Rifaskes	: Riset Fasilitas Kesehatan
RPK	: rencana pelaksanaan kegiatan
RS	: Rumah Sakit
RSK TNI	: Rumah Sakit Khusus Tentara Nasional Indonesia
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RUK	: rencana usulan kegiatan
S1	: Strata satu
S2	: Strata dua
S3	: Strata tiga
Sarpras	: Sarana prasarana
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDMK	: Sumber Daya Manusia Kesehatan
SERQUAL	: <i>Service Quality</i>
SIK	: Suart Ijin Kerja
SIP	: Surat Ijin Praktek
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SS	: <i>Acces Social Network</i>
STR	: Surat Tanda Registrasi
TB	: tuberkulosis
TC	: <i>Training Centre</i>
TNI/Polri	: Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia
TTS	: Timor Tengah Selatan

UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia
UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	: Upaya Kesehatan Perorangan
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMR	: Upah Minimum Regional
UU	: Undang-undang
VCD	: <i>video compact disc</i>
VIP	: <i>Very Important Person</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WISN	: <i>Workload Indicator Staffing Need</i>

1.1 Latar belakang

Memasuki abad ke-21, kemajuan besar terjadi dalam dunia kesehatan, baik dalam hal ditemukannya obat-obatan baru maupun lompatan teknologi kedokteran. Sebaliknya, tantangan dan kekhawatiran juga semakin besar, ditandai dengan kerusakan akibat HIV/AIDS, ancaman infeksi baru seperti SARS dan flu burung, *New* dan *Re-emerging disease*, masalah perilaku dan gangguan mental, kekerasan dalam rumah tangga, serta cedera dan kecelakaan.

Penyedia layanan kesehatan merupakan inti dari sistem kesehatan; mengurangi rasa sakit dan penderitaan, mencegah penyakit dan mengurangi risiko. Jumlah tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan berhubungan positif dengan cakupan imunisasi, jangkauan perawatan primer, dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Kapasitas dan kepadatan distribusi dokter telah terbukti berkorelasi dengan hasil positif pada penyakit kardiovaskular.

Secara kontekstual, tenaga kesehatan juga dihadapkan pada tantangan menghadapi pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta; bagaimana menjamin efektifitas pelaksanaan paket manfaat, peningkatan cakupan pelayanan, serta bagaimana Negara menghasilkan, mendistribusikan dan mempertahankan tenaga kesehatan yang mendukung *Universal Health Coverage*.

Pada dasarnya, permasalahan terkait tenaga kesehatan meliputi aspek ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (aksesibilitas), penerimaan (*acceptability*), dan mutu (*quality*). Ketersediaan tenaga kesehatan berarti bahwa terdapat kecukupan tenaga kesehatan dengan kompetensi relevan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Keterjangkauan dapat diartikan bahwa masyarakat dapat menjangkau tenaga kesehatan tersebut baik terkait waktu tempuh dan transport, jam buka pelayanan, mekanisme rujukan, dan biaya pelayanan (*direct dan indirect*). Aspek penerimaan (*acceptability*) meliputi karakteristik dan kemampuan tenaga kesehatan untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat, serta mampu dipercaya. Dalam aspek mutu terkandung komponen kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku tenaga kesehatan sesuai norma profesional dan sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menilai aspek ketersediaan (*availability*) adalah ketersediaan data yang valid mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada. Tidak banyak Negara yang memiliki data yang memadai mengenai jumlah tenaga kesehatan di wilayahnya. Dalam hal aksesibilitas, dijumpai pula lebarnya disparitas keberadaan tenaga kesehatan secara geografis.

Permasalahan global ini juga terjadi di Indonesia. Tidak diketahui pasti berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, sebaran, produksi, serta kapasitasnya. Kondisi ini berdampak pada sulitnya membuat satu kebijakan ketenagaan yang adekuat serta pengalokasian peran setiap jenjang administrasi Pemerintahan yang tepat. Kondisi ini juga akan mempengaruhi optimalitas perencanaan, rekrutmen, distribusi, dan retensi ketenagaan.

Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Kementerian Kesehatan tahun 2011 menunjukkan masih banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat (termasuk promosi kesehatan), kesehatan lingkungan, kefarmasian, gizi dan sebagainya. Kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit, banyak rumah sakit umum milik Pemerintah yang tidak memiliki tenaga spesialis khususnya spesialis bedah, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, anak, dan anestesi.

Studi tersebut juga menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam hal ketenagaan antar wilayah di Indonesia, dimana rasio tenaga kesehatan di puskesmas di wilayah Indonesia bagian timur secara umum lebih rendah daripada di wilayah Indonesia bagian barat. Banyak puskesmas di Papua, Papua Barat, dan Maluku tidak memiliki dokter dan atau bidan. Demikian pula dengan ketiadaan tenaga medis, khususnya spesialis tertentu di rumah sakit umum milik Pemerintah di wilayah timur Indonesia.

Dalam hal kapasitas tenaga juga ditemukan adanya berbagai masalah. Studi Evaluasi Pelayanan Bidan (2014) menunjukkan masih rendahnya implementasi pemeriksaan ANC yang dilakukan oleh bidan koordinator puskesmas dalam hal kesesuaian terhadap standar, serta pengetahuan yang kurang. Studi lain juga menunjukkan terjadinya perbedaan secara statistik dalam hal pengetahuan bidan antar wilayah (Badan Litbangkes dan BPPSDM Kesehatan, 2013).

Kendati Riset Fasilitas Kesehatan 2011 telah mampu memberikan gambaran masalah ketersediaan dan aksesibilitas ketenagaan kesehatan secara umum, namun belum dapat memberikan gambaran dalam hal mutu dan ketanggapan (*responsivitas*). Berbagai permasalahan ketenagaan kesehatan terkait produksi tenaga kesehatan serta keberadaan tenaga kesehatan di luar jalur Pemerintah juga belum dapat dinilai. Selain itu, pada tahun 2014 Indonesia juga telah menerapkan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam upaya pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta. Upaya ini membutuhkan dukungan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kapasitas yang memadai. Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan 2017 (Risnakes 2017) diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dan dapat memberikan informasi yang memadai untuk penajaman perencanaan, rekrutmen, dan distribusi ketenagaan kesehatan.

1.2 Permasalahan

Perlunya dukungan data ketenagaan kesehatan yang memadai untuk membuat kebijakan yang tepat berdasarkan bukti (*evidence*).

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana jumlah, sebaran, jenis, kualifikasi ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas), dan dinas kesehatan?
- b. Bagaimana regulasi/kebijakan ketenagaan di bidang kesehatan dalam hal rekrutmen, retensi, pendidikan dan pelatihan, insentif, dan aplikasinya di tingkat pusat sampai dengan daerah?
- c. Bagaimana proses manajemen ketenagaan di bidang kesehatan (perencanaan, rekrutmen, penugasan, pengembangan, sistem imbalan) di fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) dan dinas kesehatan?
- d. Bagaimana output/dampak manajemen ketenagaan di bidang kesehatan terhadap kepuasan dan motivasi staf di Puskesmas dan RS?
- e. Bagaimana tanggapan terhadap pelayanan kesehatan puskesmas dan RS?
- f. Bagaimana kesiapan tenaga di bidang kesehatan dalam menjalankan Keluarga Sehat?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Diperolehnya gambaran ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), kabupaten/kota, provinsi, dan Nasional.

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya data ketenagaan per jenis tenaga di bidang kesehatan di fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (dinas kesehatan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus milik Pemerintah dan Swasta, dan puskesmas)
- b. Diperolehnya gambaran mengenai manajemen SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas) dan dinas kesehatan
- c. Diidentifikasinya permasalahan ketenagaan di bidang kesehatan (*bottleneck*)
- d. Diperolehnya gambaran motivasi tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
- e. Diperolehnya gambaran insentif tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
- f. Diperolehnya gambaran mengenai distribusi dan kondisi penugasan lain (*multi tasking* dan *task shifting*) tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
- g. Diperolehnya gambaran mengenai produktivitas tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
- h. Diperolehnya gambaran mengenai kepuasan pelayanan rumah sakit dan puskesmas.
- i. Diperolehnya gambaran mengenai implementasi pengembangan kapasitas dan kebijakan tugas belajar.
- j. Diperolehnya gambaran kesiapan tenaga di bidang Kesehatan dalam menjalankan Program Keluarga Sehat.

1.5 Manfaat penelitian

- a. Pemetaan tenaga di bidang kesehatan
- b. Dasar penetapan kebutuhan dan re-distribusi tenaga di bidang Kesehatan
- c. Mengalokasikan peran yang lebih tajam
- d. Bahan formulasi kebijakan ketenagaan di bidang kesehatan

1.6 Ruang lingkup

Penelitian dilakukan di seluruh puskesmas dan rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, baik rumah sakit milik Pemerintah dan milik Swasta) di seluruh Indonesia. Khusus untuk kepuasan pasien dan produktivitas tenaga di bidang kesehatan, pengumpulan data dilakukan secara sub sampel terhadap rumah sakit dan puskesmas yang terpilih secara acak dengan sesuai dengan besar sampel yang telah ditetapkan. Data yang diambil meliputi data input (regulasi ketenagaan di bidang kesehatan; jenis, kualifikasi, jumlah tenaga di bidang kesehatan di institusi dan fasilitas pelayanan kesehatan: rumah sakit milik Pemerintah dan Swasta, puskesmas), data proses (manajemen ketenagaan di bidang kesehatan: perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan), dan data output (motivasi, retensi, dan ketanggapan)

1.7 Tentang Buku 2. Laporan Risnakes 2017

Buku ini merupakan salah satu laporan Risnakes 2017. Secara keseluruhan terdapat 2 buah buku laporan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan 2017 (Risnakes 2017) yang terdiri dari:

- a. Buku 1. Laporan Risnakes 2017: Puskesmas
- b. Buku 2. Laporan Risnakes 2017: Rumah Sakit

2.1 Populasi dan sampel

Variabel konstruk di dalam Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan 2017 (Risnakes 2017), meliputi Pemetaan Ketenagaan di Bidang Kesehatan, Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan, Insentif, *Task Shifting*, Motivasi, Kepuasan, dan Kesiapan SDM dalam menjalankan Keluarga Sehat.

Populasi adalah seluruh puskesmas dan Rumah sakit (RS Umum dan RS Khusus) di seluruh Indonesia. Khusus untuk variabel kepuasan dan pengukuran produktifitas (*time study*) dilakukan pemilihan lokasi secara acak (*sampling*).

Perhitungan besar sampel untuk variabel ketanggapan dilakukan dengan mempertimbangkan minimal sampel yang dibutuhkan untuk memperoleh angka representasi Nasional berdasarkan referensi WHO sebesar 10.000 responden. Jumlah tersebut akan didistribusikan ke seluruh puskesmas dan rumah sakit yang terpilih. Pemilihan puskesmas dan rumah sakit yang akan menjadi lokasi sampel dilakukan dengan mempertimbangkan *Margin of Error* (MoE) sebesar 5% dengan antisipasi *non response* 10% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 425 puskesmas dan 380 rumah sakit (daftar rumah sakit dan puskesmas terpilih dapat dilihat pada lampiran). Berdasarkan hal tersebut, maka di setiap rumah sakit dan puskesmas yang terpilih menjadi lokasi sampel akan dilakukan penyebaran responden, sehingga akan terdapat 30 responden di setiap rumah sakit dan puskesmas terpilih.

Menurut Roscoe (1975), beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel adalah Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

2.1.1. Pemilihan Sampel Rumah Sakit

Pemilihan rumah sakit yang menjadi lokasi sampel dilakukan 2 tahap. Tahap pertama mengidentifikasi kepemilikan rumah sakit menjadi rumah sakit Pemerintah dan Swasta berdasarkan data rumah sakit yang diterima dari Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan pada pertengahan tahun 2016. Pembagian menurut kepemilikan rumah sakit didasarkan pada pertimbangan kemungkinan terjadinya perbedaan ketanggapan pelayanan antara rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta. Selanjutnya, masing-masing rumah sakit tersebut didistribusikan menurut lokasi provinsi.

Sejumlah 380 rumah sakit yang sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan besar sampel didistribusikan secara proporsional ke dalam setiap provinsi menurut kepemilikannya. Hal ini memungkinkan jumlah rumah sakit yang terpilih akan berbeda-beda untuk setiap provinsi, bahkan juga akan berbeda jumlahnya untuk setiap kepemilikan di dalam setiap provinsi. Penetapan rumah sakit terpilih di setiap provinsi dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*).

Tabel 2.1.
Distribusi sampel rumah sakit menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah RS	Jumlah RS Pemerintah	Jumlah RS Pemerintah Terpilih	Jumlah RS Swasta	Jumlah RS Swasta Terpilih
1	Aceh	67	35	5	32	5
2	Sumatera Utara	178	61	9	117	18
3	Riau	70	26	4	44	7
4	Sumatera Selatan	64	34	5	29	4
5	Sumatera Barat	62	27	4	35	6
6	Jambi	34	16	2	18	3
7	Bengkulu	21	16	2	5	1
8	Lampung	61	16	2	45	7
9	Bangka Belitung	17	10	2	7	1
10	Kepulauan Riau	26	14	2	12	2
11	DKI Jakarta	181	56	8	125	19
12	Jawa Barat	317	68	10	249	38
13	Jawa Tengah	285	78	12	207	31
14	DI Yogyakarta	73	15	2	58	9
15	Jawa Timur	348	108	16	240	37
16	Banten	90	14	2	76	12
17	Bali	53	15	2	38	6
18	Nusa Tenggara Barat	28	15	2	13	2
19	Nusa Tenggara Timur	45	25	4	20	3
20	Kalimantan Barat	44	25	4	19	3
21	Kalimantan Tengah	20	19	3	1	0
22	Kalimantan Selatan	36	23	4	13	2
23	Kalimantan Timur	47	21	3	26	4
24	Kalimantan Utara	7	6	1	1	0
25	Sulawesi Utara	39	21	3	18	3
26	Sulawesi Tengah	26	19	3	7	1
27	Sulawesi Selatan	85	40	6	45	7
28	Sulawesi Tenggara	29	21	3	8	1
29	Gorontalo	13	9	1	4	1
30	Sulawesi Barat	10	8	2	2	0
31	Maluku	27	20	3	7	1
32	Maluku Utara	18	15	2	3	1
33	Papua Barat	16	14	2	2	0
34	Papua	38	30	5	8	1

2.1.2. Pemilihan sampel puskesmas

Pemilihan puskesmas yang menjadi lokasi sampel dilakukan berdasarkan data puskesmas yang diterima dari Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan pada akhir tahun 2016. Selanjutnya, masing-masing puskesmas tersebut didistribusikan menurut lokasi provinsi.

Sejumlah 425 puskesmas yang sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan besar sampel didistribusikan secara proporsional ke dalam setiap provinsi. Hal ini memungkinkan jumlah puskesmas yang terpilih akan berbeda-beda untuk setiap provinsi. Berbeda dengan pengambilan sampel rumah sakit yang memperhitungkan kepemilikan rumah sakit, pada penetapan sampel puskesmas langsung dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) tanpa mempertimbangkan apakah puskesmas tersebut puskesmas rawat inap ataupun non rawat inap.

Tabel 2.2.
Distribusi sampel puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas terpilih	No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas terpilih
1	Aceh	339	15	18	Nusa Tenggara Barat	158	7
2	Sumatera Utara	571	25	19	Nusa Tenggara Timur	371	16
3	Riau	212	9	20	Kalimantan Barat	238	10
4	Sumatera Selatan	322	14	21	Kalimantan Tengah	195	8
5	Sumatera Barat	264	11	22	Kalimantan Selatan	231	10
6	Jambi	176	8	23	Kalimantan Timur	174	8
7	Bengkulu	180	8	24	Kalimantan Utara	49	2
8	Lampung	291	13	25	Sulawesi Utara	187	8
9	Bangka Belitung	62	3	26	Sulawesi Tengah	189	8
10	Kepulauan Riau	72	3	27	Sulawesi Selatan	448	20
11	DKI Jakarta	340	15	28	Sulawesi Tenggara	269	12
12	Jawa Barat	1049	46	29	Gorontalo	93	4
13	Jawa Tengah	875	38	30	Sulawesi Barat	94	4
14	DI Yogyakarta	121	5	31	Maluku	199	9
15	Jawa Timur	960	42	32	Maluku Utara	127	9
16	Banten	233	10	33	Papua Barat	152	7
17	Bali	120	5	34	Papua	349	17

2.1.3. Unit Analisa dan Jumlah sampel Risnakes 2017

Tabel 2.3 memperlihatkan unit analisa dan jumlah sampel Risnakes 2017 di puskesmas dan rumah sakit.

Tabel 2.3.

Unit analisa dan jumlah sampel puskesmas dan rumah sakit, Risnakes 2017

VARIABEL	SAMPEL	UNIT ANALISA	JUMLAH SAMPEL
1. SAMPEL PUSKESMAS			
Variabel Ketenagaan	Sensus seluruh puskesmas	Institusi Puskesmas	9699 puskesmas
Variabel Manajemen SDM	Sensus seluruh puskesmas	Institusi puskesmas	9699 puskesmas
Variabel Ketanggapan Pelayanan	30 orang pasien rawat jalan	Individu pasien rawat jalan	11.550 pasien
	Pasien rawat inap saat pengumpulan data.	Individu pasien rawat inap	597 pasien
	Sampel 425 puskesmas		
Variabel Kepuasan Pelayanan	30 orang pasien rawat jalan	Individu pasien rawat jalan	11.550 pasien
	Pasien rawat inap saat pengumpulan data.	Individu pasien rawat inap	597 pasien
	Sampel 425 puskesmas		
Variabel Insentif	30 orang staf puskesmas di setiap puskesmas.	Institusi puskesmas	9699 puskesmas
	Sensus seluruh puskesmas.		249.920 orang
Variabel Kepuasan Staf	30 orang staf di setiap puskesmas.	Institusi puskesmas	9699 puskesmas
	Sensus seluruh puskesmas		249.914 orang
Variabel Motivasi Staf	30 orang staf di setiap puskesmas. Sensus seluruh puskesmas	Institusi puskesmas	9699 puskesmas, 249.914 orang
Variabel Retensi	30 orang staf di setiap puskesmas.	Institusi puskesmas	9699 puskesmas
	Sensus seluruh puskesmas		249.919 orang
Variabel Waktu Kerja	Sampel 425 puskesmas	Individu tenaga kesehatan	218 dokter66 dokter gigi 141
			bidan 139 perawat
Variabel Keluarga Sehat	Sensus seluruh puskesmas	Institusi puskesmas	9697 puskesmas
VARIABEL	SAMPEL	UNIT ANALISA	JUMLAH SAMPEL
2. SAMPEL RUMAH SAKIT			
Variabel Ketenagaan	Sensus seluruh rumah sakit	Institusi rumah sakit	2325Rumah sakit: 657 RSU Pemerintah, 79 RS Khusus Pemerintah, 1097 RSU Swasta, 339 RS Khusus Swasta, 151 RS TNI-Polri, 2 RSK TNI-Polri
Variabel Manajemen SDM	Sensus seluruh rumah sakit	Institusi rumah sakit	2325 rumah sakit
Variabel Ketanggapan Pelayanan	30 orang pasien rawat jalan	Individu pasien rawat jalan	10552 pasien
	30 orang pasien rawat inap	Individu pasien rawat inap	9605 pasien
	Sampel 380 rumah sakit		
Variabel Kepuasan Pelayanan	30 orang pasien rawat jalan	Individu pasien rawat jalan	10.552 pasien
	Pasien rawat inap saat pengumpulan data.	Individu pasien rawat inap	9605 pasien
	Sampel 380 rumah sakit		
Variabel Insentif	30 orang staf rumah sakit di setiap rumah sakit.	Institusi rumah sakit	2325 Rumah sakit
	Sensus seluruh rumah sakit.		67.094orang
Variabel Kepuasan Staf	30 orang staf di setiap rumah sakit.	Institusi rumah sakit	2325 Rumah sakit
	Sensus seluruh rumah sakit		66.971 orang
Variabel Motivasi Staf	30 orang staf di setiap rumah sakit. Sensus seluruh rumah sakit	Institusi rumah sakit	2325 Rumah sakit 66.971 orang
Variabel Retensi	30 orang staf di setiap rumah sakit.	Institusi rumah sakit	2325 Rumah sakit
	Sensus seluruh rumah sakit		orang
Variabel Waktu Kerja	Sampel 380 rumah sakit	Individu tenaga kesehatan	241 dokter spesialis dasar 114 dokter spesialis lainnya 315 dokter 59 dokter gigi 101 bidan 283 perawat

2.2 Responden

Responden meliputi :

1. Kepala dinas kesehatan provinsi beserta staf terkait
2. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota beserta staf terkait
3. Direktur rumah sakit milik Pemerintah dan Swasta beserta staf terkait
4. Kepala puskesmas beserta staf terkait
5. Ketanggapan pasien rumah sakit: pasien rawat inap dan pasien rawat jalan terpilih
6. Ketanggapan pasien puskesmas: pasien rawat inap dan pasien rawat jalan terpilih
7. *Time study*: staf rumah sakit dan puskesmas terpilih.

2.3 Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan 2017 (Risnakes 2017), meliputi kuesioner untuk dinas kesehatan, kuesioner rumah sakit, dan kuesioner puskesmas. Kuesioner disusun menurut jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi subyek penelitian. Masing-masing kuesioner tersebut kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis kuesioner mempertimbangkan variabel yang diteliti, sebagaimana pada tabel 2.5.

Tabel 2.4.
Jenis kuesioner, Risnakes 2017

JENIS KUESIONER RISNAKES 2017

1. Kuesioner dinas kesehatan
 - 1.1. Kuesioner dinas kesehatan provinsi
 - 1.2. Kuesioner dinas kesehatan kabupaten/kota
 2. Rumah Sakit
 - 2.1. Kuesioner Rumah Sakit Induk
 - 2.2. Kuesioner Rumah sakit Individu
 - 2.3. Kuesioner ketanggapan rawat jalan
 - 2.4. Kuesioner ketanggapan rawat inap
 - 2.5. Kuesioner *time study*
 - 2.6. Kuesioner individu dokter spesialis
 3. Puskesmas
 - 3.1. Kuesioner Puskesmas Induk
 - 3.2. Kuesioner Puskesmas Individu
 - 3.3. Kuesioner ketanggapan rawat jalan puskesmas
 - 3.4. Kuesioner ketanggapan rawat inap puskesmas
 - 3.5. Kuesioner *time study*
-

2.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan data yang dikumpulkan :

- a. Data jenis, kualifikasi, jumlah tenaga kesehatan di institusi dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik milik Pemerintah maupun Swasta. Pengumpulan data dilakukan melalui sensus terhadap seluruh dinas kesehatan, rumah sakit milik Pemerintah, rumah sakit milik Swasta, dan puskesmas
- b. Regulasi dan kebijakan ketenagaan di bidang kesehatan : dinas kesehatan
- c. Manajemen ketenagaan di bidang kesehatan : dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit
 - Manajemen tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (perencanaan, pengadaan, pendayagunaan). Data yang dikumpulkan meliputi proses perencanaan ketenagaan di bidang kesehatan (jenis, kualifikasi, jumlah), rekrutmen tenaga kesehatan (Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Kontrak, Tenaga Sukarela).
 - Migrasi, atrisi
 - *Reward system* (finansial/remunerasi, kapitasi, honor, non finansial)
 - Pembinaan dan Pengembangan (*team building*, motivasi, pendidikan dan pelatihan)
 - Lingkungan kerja (kepemimpinan lembaga, kelengkapan alat, sarana)
 - Kesejahteraan (rumah, sandang, pangan, rekreasi, sekolah anak, dan lain lain)
- d. Output manajemen tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan: sampling
 - Produktivitas dan kinerja/*performance* (alokasi waktu efektif/ *motion study*, *out put* per tenaga)
 - Ketanggapan (responsivitas) pelayanan

2.5 Kegiatan

Kegiatan Riset Ketenagaan di bidang Kesehatan (Risnakes) meliputi :

- a. Penyusunan proposal
- b. Penyusunan kuesioner
- c. Pembentukan tim
- d. Pengembangan modul: pengorganisasian lapangan, puldat, manajemen data, analisis data
- e. Penyiapan regulasi
- f. Penyusunan protokol
- g. Uji coba
- h. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pusat dan Provinsi
- i. Pengadaan barang dan jasa
- j. Distribusi barang dan alat
- k. Workshop Tim Teknis dan Pelaksana
- l. Workshop Tim Enumerator
- m. Pengumpulan data
- n. Pengolahan data
- o. Analisis data
- p. Penyusunan laporan

2.6 Pengorganisasian

2.6.1. Tim Pusat

Penasehat : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah : Eselon I Kementerian Kesehatan, Eselon I dan II kementerian lain terkait

Tim Pakar :

Ketua : Dr. dr. Trihono, MS

Anggota :

1. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH
2. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Ph.D
3. Prof. Dr. drs. Wasis Budiarto, MS
4. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med (PH)
5. Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH
6. dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD
7. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, Ph.D
8. Prof. Dr. dra. Ida Yustina, M.Si
9. Yogi Suwarno, SIP., M.A
10. Dr. Falih Suaedi
11. dr. Fedri Ruluwendrata Rinawan, M.Sc.PH., Ph.D

2.6.2. Tim Riset Wilayah

Tim Riset Wilayah, meliputi :

- Koordinator Wilayah 1 : Pusat 2, meliputi Provinsi Aceh, Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan
- Koordinator Wilayah 2 : Pusat 3, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Maluku.
- Koordinator Wilayah 3 : Pusat 4, meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua
- Koordinator Wilayah 4 : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT), meliputi Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat.
- Koordinator Wilayah 5 : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP), meliputi Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat.

Masing-masing Korwil bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyusunan laporan Risnakes di wilayahnya.

2.6.3. Tim Pengumpul Data

Tim pengumpul data terdiri dari tim pengumpul data rumah sakit dan tim pengumpul data puskesmas. Setiap tim terdiri dari 2 (dua) orang enumerator. Enumerator rumah sakit direkrut di tingkat provinsi, sedangkan enumerator puskesmas direkrut di tingkat kabupaten/kota.

Persyaratan Tim Enumerator Rumah Sakit:

1. Latar belakang pendidikan minimal S1 bidang kesehatan, diutamakan bidang perumahsakitian atau memiliki pengalaman kerja atau survey di rumah sakit
2. Usia < 45 tahun saat pelaksanaan pengumpulan data Rinakes
3. Non PNS, non Pegawai swasta

4. Tidak sedang terlibat dalam riset lain
5. Tidak sedang menjalani pendidikan
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas
7. Tidak hamil dan bersedia tidak hamil selama pengumpulan data untuk wanita
8. Bersedia ditempatkan dimanapun
9. Memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan lain)
10. Bukan anggota tim manajemen data dan bukan pegawai (PNS/honorar) non peneliti
11. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian

Persyaratan Tim Enumerator Puskesmas :

1. Latar belakang pendidikan minimal D3 bidang kesehatan
2. Usia < 45 tahun saat pelaksanaan pengumpulan data Risnakes
3. Non PNS, non pegawai swasta
4. Tidak sedang terlibat dalam riset lain
5. Tidak sedang menjalani pendidikan
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas
7. Tidak hamil dan bersedia tidak hamil selama pengumpulan data untuk wanita
8. Bersedia ditempatkan dimanapun
9. Memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan lain)
10. Bukan anggota tim manajemen data dan bukan pegawai (PNS/honorar) non peneliti
11. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian

2.7 Pengumpulan data

2.7.1. Pengumpulan data di Puskesmas

Pengumpulan data ketenagaan, motivasi, kepuasan, insentif, penugasan ganda dan pendelegasian wewenang (*multitasking* dan *task shifting*), kesiapan Keluarga Sehat dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia. Pengumpulan data di setiap puskesmas akan berlangsung selama 3 hari. Data ketenagaan akan langsung diambil dari data kepegawaian puskesmas, sedangkan data lainnya diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh tenaga kesehatan yang berada di puskesmas pada saat pengumpulan data.

Terhadap puskesmas yang terpilih menjadi lokasi sampel pengambilan data kepuasan pasien dan produktifitas akan mendapatkan tambahan waktu pengumpulan data selama 4 hari. Data kepuasan pasien diperoleh melalui *exit interview* pasien rawat jalan dan pasien rawat inap di puskesmas, sejumlah 30 orang pasien rawat jalan dan seluruh pasien yang dirawat di puskesmas pada saat pengumpulan data di puskesmas tersebut.

Pengumpulan data kepuasan pasien rawat jalan dilakukan dengan menggunakan *systematic random sampling*, dan dilakukan dalam 3 hari di hari-hari awal pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut maka setiap hari dilakukan pengumpulan data terhadap sekitar 10 pasien rawat jalan. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah rata-rata pasien rawat jalan dalam sehari. Kemudian enumerator membagi antara jumlah rata-rata pasien harian dengan target 10 pasien, sehingga di dapat rentang tertentu. Misalkan terdapat rata-rata pasien harian sebanyak 90 orang, maka rentangnya adalah 9. Selanjutnya pengumpul data menentukan bilangan awal secara acak, kemudian ditambahkan kelipatan rentangnya. Bila angka awal acak yang keluar adalah 3, maka selanjutnya yang keluar adalah 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84. Pasien yang selesai mengambil obat di apotik

dengan nomor urut seperti tersebut maka menjadi responden. Demikian selanjutnya untuk hari ke 2 dan ke 3.

Pengumpulan data kepuasan pasien rawat inap dilakukan selama hari pengumpulan data, terhadap pasien yang minimal telah menjalani perawatan selama 2 hari. Diperkirakan jumlah pasien rawat inap di puskesmas tidak banyak, maka diambil seluruh pasien rawat inap yang telah menjalani perawatan selama minimal 2 hari yang ada selama pengumpulan data berlangsung.

Dieksklusikan untuk tidak diambil datanya adalah pasien gawat darurat (*emergency*) dan pasien *Intensive Care Unit* (ICU). Bila pasien tidak memungkinkan untuk menjawab kuesioner maka dapat diwakilkan pada keluarga yang paling sering menunggu.

Produktivitas diukur berdasarkan jumlah output dengan waktu kerja efektif staf puskesmas yang dilakukan melalui pengamatan (*time study*) selama satu hari kerja terhadap masing-masing satu orang dokter dan dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, analis kesehatan, dan gizi.

2.7.2. Pengumpulan data di Rumah sakit

Pengumpulan data ketenagaan, motivasi, kepuasan, insentif, penugasan ganda dan pendelegasian wewenang (*multitasking* dan *task shifting*) dilaksanakan di seluruh rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit umum, rumah sakit khusus, milik Pemerintah maupun Swasta. Pengumpulan data di setiap rumah sakit akan berlangsung selama 5 hari. Dimana data ketenagaan akan langsung diambil dari data kepegawaian rumah sakit, sedangkan data lainnya diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh 30 orang tenaga di bidang kesehatan yang berada di rumah sakit sewaktu pengumpulan data dan dipilih secara acak dari daftar ketenagaan dengan mengakomodir keterwakilan dari masing-masing jenis tenaga secara proporsional.

Terhadap rumah sakit yang terpilih menjadi lokasi sampel pengambilan data kepuasan pasien dan produktifitas akan mendapatkan tambahan waktu pengumpulan data selama 4 hari. Data kepuasan pasien diperoleh melalui *exit interview* pasien rawat jalan dan pasien rawat inap di RS, sejumlah 30 orang pasien rawat jalan dan 30 orang pasien rawat inap.

Pengumpulan data kepuasan pasien rawat jalan dilakukan dengan menggunakan *systematic random sampling*, dan dilakukan dalam 3 hari di hari-hari awal pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut maka setiap hari dilakukan pengumpulan data terhadap sekitar 10 pasien rawat jalan. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah rata-rata pasien rawat jalan dalam sehari. Kemudian pengumpul data membagi antara jumlah rata-rata pasien harian dengan target 10 pasien, sehingga di dapat rentang tertentu. Misalkan terdapat rata-rata pasien harian sebanyak 300 orang, maka rentangnya adalah 30. Selanjutnya pengumpul data menentukan bilangan awal secara acak, kemudian ditambahkan kelipatan rentangnya. Bila angka awal acak yang keluar adalah 5, maka selanjutnya yang keluar adalah 35, 65, 95, 125, 155, 185, 215, 245, 275. Pasien yang selesai mengambil obat di apotik dengan nomor urut seperti tersebut maka menjadi responden. Demikian selanjutnya untuk hari ke 2 dan ke 3.

Pengumpulan data kepuasan pasien rawat inap dilakukan dalam 6 hari pengumpulan data, terhadap pasien yang minimal telah menjalani perawatan selama 2 hari. Penetapan responden dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah pasien rawat inap yang sudah dirawat selama 2 hari di masing-masing kelas RS. Misalkan di suatu rumah sakit terdapat 300 orang pasien yang sudah dirawat selama minimal 2 hari, terbagi atas 30 pasien di kelas VIP, 60 pasien di kelas 1, 90 pasien di kelas 2, dan 120 pasien di kelas 3. Maka

Berdasarkan hal tersebut, terlokasikan sebagai responden 3 pasien di kelas VIP, 6 pasien di kelas 1, 9 pasien di kelas 2, dan 12 pasien di kelas 3. Selanjutnya dilakukan pemilihan responden secara *systematic random* sampling di setiap kelas rawat inap.

Pada rumah sakit-rumah sakit tertentu, bisa saja jumlah sampel tidak dapat memenuhi target sebanyak 30 pasien rawat jalan dan 30 pasien rawat inap, maka diambil semaksimal mungkin selama hari pengumpulan data.

Dieksklusikan untuk tidak diambil datanya adalah pasien gawat darurat (*emergency*) dan pasien ICU. Bila pasien tidak memungkinkan untuk menjawab kuesioner maka dapat diwakilkan pada keluarga yang paling sering menunggu.

Produktivitas diukur berdasarkan jumlah output dengan waktu kerja efektif tenaga yang dilakukan melalui pengamatan (*time study*) selama satu hari kerja terhadap masing-masing satu orang dokter poliklinik, dokter spesialis dasar, dokter spesialis non-dasar, perawat poliklinik, bidan poliklinik, dan apoteker.

2.8 Manajemen data

Proses manajemen data Risnakes 2017 terdiri dari dua tahap, tahap pertama dilakukan di kabupaten/kota yang terdiri dari kegiatan: pengumpulan data, *receiving-batching* (penerimaan-pembukuan), *editing* (kontrol kualitas data), *data entry*, dan pengiriman data elektronik. Tahap kedua dilakukan di satuan kerja Badan Litbangkes pusat yang terdiri dari kegiatan: penerimaan dan penggabungan data seluruh kabupaten/kota, *cleaning data*, penggabungan data provinsi, penggabungan data nasional, *cleaning data* nasional, imputasi, pembobotan, dan penyimpanan data elektronik. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih lima bulan. Tim Manajemen Data yang di pusatkan di Jakarta mengkoordinir manajemen data Risnakes 2017 secara keseluruhan. Urutan kegiatan manajemen data secara rinci sebagai berikut.

2.8.1. Receiving batching

Proses *receiving-batching* adalah pencatatan penerimaan kuesioner. Manfaat dari proses ini untuk menilai konsistensi jumlah data responden yang diwawancarai, dientri, dikirim, dan diterima oleh tim manajemen data, dan juga untuk memantau sampel yang belum diwawancarai. Hal ini untuk menghindari adanya data yang hilang karena proses-proses input atau pengiriman elektronik.

2.8.2 Editing data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data Risnakes 2017, *editing* merupakan salah satu mata rantai yang secara potensial dapat menjadi kontrol kualitas data. *Editing* mulai dilakukan oleh ketua tim dilanjutkan oleh supervisor atau PJT Kabupaten/Kota semenjak enumerator selesai melakukan wawancara dengan responden. PJT Kabupaten/Kota harus memahami makna dan alur pertanyaan.

PJT Kabupaten/Kota melakukan editing kuesioner meliputi pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban, termasuk konsistensi alur jawaban, untuk setiap responden. Kelengkapan jawaban dan konsistensi alur jawaban, antara lain seperti semua pertanyaan terisi sesuai dengan kelompok kriteria yang ditentukan.

2.8.3 Entri data

Entri data dilakukan oleh tim pengumpul data di lokasi pengumpulan data. Kuesioner disusun dengan beberapa lompatan pertanyaan (*skip questions*) yang secara teknis

memerlukan ketelitian untuk menjaga konsistensi data dari satu blok pertanyaan ke blok pertanyaan berikutnya. Oleh karena itu maka dibuat program entri yang diperkuat dengan batasan entri secara komputerisasi. Hasil entri data ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses manajemen data, khususnya yang berkaitan dengan *cleaning* data.

2.8.4. Penggabungan data

File data yang telah dikirim oleh PJT Kabupaten/Kota, digabung oleh tim manajemen data pusat. Langkah selanjutnya dilakukan penggabungan data dan *cleaning* sementara agar dapat segera memberi umpan balik pada tim pewawancara untuk memperbaiki data, dilanjutkan dengan penggabungan data elektronik secara nasional.

2.8.5 Cleaning data

Tahapan *cleaning* dalam manajemen data merupakan proses yang penting untuk menunjang kualitas data. Tim manajemen data di pusat sudah melakukan *cleaning* awal pada data elektronik setiap provinsi pada saat menerima data elektronik dari PJT Kabupaten/Kota. Apabila ada data yang perlu dikonfirmasi ke tim pengumpul data di kabupaten, maka tim manajemen data pusat akan berkoordinasi dengan PJT Kabupaten untuk entri ulang dan mengirimkan kembali yang sudah diperbaiki melalui email.

Cleaning sementara hanya dilakukan pada variabel-variabel tertentu yang dianggap sangat berisiko untuk salah. Setelah penggabungan keseluruhan provinsi, dilakukan *cleaning* variabel secara keseluruhan. Hanya data yang sudah dinyatakan *clean* yang dianalisis lebih lanjut.

Tim Manajemen Data menyediakan pedoman khusus untuk melakukan *cleaning* data Risnakesdas. Perlakuan terhadap *missing values*, *no responses*, *outliers* amat menentukan akurasi dan presisi dari analisis yang dihasilkan Risnakes 2017.

2.8.6 Imputasi data

Imputasi adalah proses untuk penanganan data *missing* dan *outlier*. Tim Manajemen Data melakukan imputasi data elektronik secara nasional. Pada data Risnakes 2017 imputasi dilakukan untuk data kontinyu yang *outlier*, sedangkan jika responden tidak bersedia menjawab maka diberikan kode sebagai data *missing*.

2.9 Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan keadaan masing-masing blok.

2.10 Validasi

Validasi Risnakes 2017 dilakukan sebagai salah satu bagian dari *quality assurance* untuk menjamin kualitas data Risnakes 2017. Pelaksanaan validasi Risnakes 2013 dilakukan oleh tim independen dari Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia (APKESI) yang diketuai oleh Prof. Dr.dr. Agus Purwadianto, SpF.

Tujuan validasi Risnakes 2017 adalah memantau dan menilai derajat kesesuaian pelaksanaan Risnakes 2017 dengan pedoman dan protokol yang ditetapkan. Lingkup validasi adalah diperolehnya informasi derajat kesesuaian pada aspek “manajemen, teknis, dan logistik” pada pelaksanaan Workshop PJT, Workshop Enumerator, dan kegiatan pengumpulan

data. Validasi dilakukan di 8 provinsi, meliputi 19 rumah sakit (2 rumah sakit Kelas A, 6 rumah sakit Kelas B, 8 rumah sakit Kelas C, 1 rumah sakit Kelas D, 2 tidak disebut kelas, serta 22 puskesmas.

Tabel 2.5.
Lokasi validasi Risnakes 2017

No	Provinsi	Korwil	Regional/Pulau	Nama Rumah Sakit	Kelas	Lokasi RS	Nama Puskesmas	Lokasi/Kec	Kab/Kota
1	NTT	1	Indonesia Tengah/Gugus Pulau	RS Tk. IV Wirasakti Kupang	C	Kupang	Baumata	Taebanu	Kupang
				RS Siloam Kupang	-	Kupang	Kolbano	Kolbano	TTS
2	Sumatera Utara	2	Indonesia Barat/Sumatera	Rumkit Bhayangkara Medan	C	Medan	Satria	Padang Hilir	Tebing Tinggi
				RS Sari Mutiara	B	Medan	HAH Hasan	Binjai Barat	Binjai
3	Jawa Barat	2	Indonesia Barat/Pulau Jawa	RS. AU dr. Salamun	B	Bandung	Babatan	Andir	Bandung
				RS Sentra Medika	B	Bekasi	Sukajaya	Cibitung	Bekasi
				RS Family Med Center	C	Bogor	Mekarwangi	Cimanggu	Bogor
				RSU Santoso	A	Bandung	Jelekong	Bale Endah	Kab. Bandung
				RSUD Majalengka	C	Majalengka	Munjul	Majalengka	Majalengka
4	Jawa Timur	3	Indonesia Barat/Pulau Jawa	RSU dr. Saiful Anwar	A	Malang	UPTD Kesehatan Kec. Sukorejo	Sukorejo	Blitar
				RSB Permata Hati	C	Malang	Dukuh Klopo	Peterongan	Jombang
							Gampeng Rejo	Gampeng Rejo	Kediri
							Taman Krocok	Taman Krocok	Bondowoso
5	Maluku Utara	3	Indonesia Timur/Gugus Pulau			Temayang	Temayang	Temayang	Bojonegoro
				RSU Ternate	B	Ternate	Kalumpang	Ternate Tengah	Ternate
				RS Bethesda GMIH Tobelo	D	Tobello	Pitu	Tobello Tengah	Halmahera Utara
6	Sulawesi Barat	4	Indonesia Tengah/Sulawesi	RSU Provinsi SulBar	C	Mamuju	Tampapadang	Kalukku	Mamuju
				RS Mitra Manakarra	-	Mamuju	Mesawa	Mesawa	Mamasa
7	Kepulauan Riau	4	Indonesia Barat/Gugus Pulau	RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib, Tanjungpinang	B	Tanjung Pinang	Sei Lekop	Bintan Timur	Bintan
				RS Budi Kemuliaan, Batam	B	Batam	Tanjung Buntung	Bengkong	Kota Batam
8	Kalimantan Barat	5	Indonesia Barat/Kalimantan	RSU dr. Rubini Mempawah	C	Mempawah	Perumnas I	Pontianak Barat	Kota Pontianak
				RSIA Anugerah Bunda Katulistiwa	C	Pontianak	Wajok	Kab. Pontianak	Kab. Pontianak

Perhitungan nilai validitas dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$(0,1 \times \text{Val. PJT}) + (0,15 \times \text{Val. TC}) + (0,30 \times \text{Val. Puldat PKM}) + (0,45 \times \text{Val. Puldat RS})$$

Masing-masing tahapan yang esensial dinilai dan diberi bobot tersendiri. Bobot yang paling besar adalah saat pengumpulan data. Tahapan esensial tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Tahapan esensial dan bobot validasi, Risnakes 2017

KEGIATAN	BOBOT (%)
Workshop Penanggung Jawab Teknis (PJT)	10
Workshop Enumerator	15
Pengumpulan data puskesmas-Risnakes	30
Pengumpulan data rumah sakit– Risnakes	45
Nilai Validitas Risnakes 2017 = $(0,1 \times \text{Val. PJT}) + (0,15 \times \text{Val. TC}) + (0,30 \times \text{Val. Puldat PKM}) + (0,45 \times \text{Val. Puldat RS})$	

2.10.1. Validasi terhadap workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) dan Enumerator

Validasi yang dilakukan saat workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) dan Enumerator menghasilkan beberapa temuan. Beberapa temuan tersebut telah diantisipasi dan direspons oleh tim teknis dan Penanggung Jawab Teknis (PJT).

Tabel 2.7.
Daftar temuan dan perbaikan validasi saat workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) dan Enumerator, Risnakes 2017

No	Temuan	Perbaikan
1	Ketidaksesuaian Materi Workshop Pada Workshop PJT ditemukan ketidaksesuaian antara buku pedoman, materi presentasi, dan instrumen kuesioner. Hal ini menyebabkan PJT kebingungan.	Perbaikan pada Materi Presentasi saat TC Dilakukan Tim Teknis Risnakes dan PJT memperbaiki materi presentasi sehingga pada saat TC materi presentasi di slide sudah sesuai dengan buku pedoman
2	Kurangnya Simulasi Kelas Kurangnya porsi simulasi wawancara kepada responden, kurangnya simulasi penyampaian <i>informed consent</i> pada awal penelitian, dan kurangnya simulasi telaah dokumen	Perbaikan Pada Simulasi Wawancara Pada saat TC terdapat perbaikan pada simulasi wawancara kepada responden. Namun, sebagian peserta TC masih menganggap kurang
3	Kekurangan pada Buku Pedoman Masih ditemukan kurang tepatnya beberapa definisi operasional dan lompatan kuesioner. Sebagian fasilitator Workshop PJT dirasa kurang dalam menjelaskan cara pengelompokan dan cara menjumlahkan SDM kesehatan	Perbaikan Pada Ambiguitas Pada saat TC, ambiguitas pada definisi operasional, cara pengelompokan dan penjumlahan SDM Kesehatan sudah berhasil terjawab dengan konsisten

Hasil validasi terhadap Workshop PJT berdasarkan 24 butir penilaian mendapatkan skor 21 atau 87,5%. Hasil Validasi terhadap *Workshop* Enumerator dengan menggunakan butir yang sama memperoleh nilai 22,125 (92%).

2.10.2. Validasi terhadap pengumpulan data rumah sakit dan puskesmas

Validasi yang dilakukan terhadap pengumpulan data di rumah sakit dan puskesmas menghasilkan beberapa temuan. Terhadap temuan tersebut diberikan saran perbaikan.

Tabel 2.8.
Daftar temuan dan saran perbaikan validasi pengumpulan data di rumah sakit dan puskesmas, Risnakes 2017

No	Temuan	Saran Perbaikan
1	Aspek Manajemen Jadwal puldat yang selalu tentatif menyebabkan tim validator harus menugaskan validator baru secara mendadak. Akibatnya, ada validator yang kesulitan dibiayai perjalanan dinas Terdapat beberapa RS yang merasa tidak diinformasikan adanya Risnakes pada hari pelaksanaan puldat	Aspek Manajemen Sebaiknya penjadwalan Puldat bisa fix dari jauh hari Perlu dipastikan bahwa RS dan Puskesmas mendapatkan surat resmi dan penjelasan maksud, tujuan, dan lingkup Risnakes dari Dinkes atau Pemda setempat
2	Aspek Logistik 1. Ditemukan beberapa enumerator yang lupa menjelaskan <i>informed consent</i> sebelum Puldat. Beberapa <i>informed consent</i> baru ditandatangani setelah Puldat selesai 2. Terdapat komplain dari responden pasien mengenai penghargaan responden yang bernilai Rp. 10.000 3. Kendala geografis dan cuaca sempat menghambat pelaksanaan puldat	Aspek Logistik 1. Seharusnya perlu ada simulasi <i>informed consent</i> pada saat TC enumerator dan workshop PJT 2. Seharusnya PJT memastikan <i>informed consent</i> dijelaskan sebelum dilakukan wawancara pengumpulan data 3. Sebaiknya tim logistik Risnakes membelanjakan souvenir yang standard untuk penghargaan responden, tidak berupa uang cash 4. Enumerator perlu dilengkapi transportasi, jas hujan, dsb untuk menanggulangi risiko geografis dan cuaca
3	Aspek Teknis 1. Enumerator jarang menggali lebih lanjut jawaban setuju / sangat setuju; tidak setuju / sangat tidak setuju. Hal ini berakibat pada kualitas data yang seharusnya skala likert-5 menjadi cenderung skala likert-3. 2. Pasien menjawab tidak konsisten pada kuesioner P4 dan P5 tentang "Kecepatan Pelayanan". Hal ini karena pertanyaan di kuesioner tidak berurutan 3. Listing ketenagaan (SDM) untuk sampling di sebagian RS dilaksanakan oleh pihak RS sendiri, sedangkan di tempat lain dilaksanakan oleh enumerator secara random sampling	Aspek Teknis 1. Jika responden menjawab setuju atau tidak setuju, seharusnya enumerator menggali lebih lanjut apakah sangat setuju atau setuju saja / sangat tidak setuju atau tidak setuju saja 2. Seharusnya pertanyaan "Kecepatan Pelayanan" ditanyakan enum secara runut berdasarkan tahap-tahap pasien mendapatkan pelayanan

Hasil validasi terhadap pengumpulan data di puskesmas mendapatkan skor 92,9% dan pengumpulan data di rumah sakit memperoleh skor 94,7%.

2.10.3. Nilai keseluruhan dan kesimpulan validasi

Nilai total validasi Risnakes 2017 adalah 93,04 (sangat baik). Terdapat adanya peningkatan skor validasi mulai dari tahap pertama workshop PJT (87,55%) ke tahap kedua workshop enumerator (93,8%) serta ke tahap ketiga pengumpulan data rumah sakit (94,77%) dan puskesmas (92,9%). Menurut tim validasi, hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan dari tim Risnakes dan para PJT, serta tim validator yang selalu memberikan *feedback* setelah ditemukannya kekurangan pada saat pelaksanaan *workshop*.

Tim validasi menemukan masih terdapat kesalahan pada buku pedoman dan kuesioner. Skor validitas puldat rumah sakit dan puskesmas juga dipengaruhi sumber daya dari sampel yang dipilih serta kondisi lapangan, cuaca, dan jadwal pengumpulan data.

Tabel 2.9.
Nilai total validasi, Risnakes 2017

KEGIATAN	Skor Validasi (%)	Bobot (%)	Skor Akhir
Workshop Penanggung Jawab Teknis (PJT)	87,5	10	08,75
Workshop Enumerator	92	15	13,80
Pengumpulan data puskesmas – Risnakes	92,9	30	27,87
Pengumpulan data rumah sakit – Risnakes	94,7	45	42,62
Total			93,04

2.11 Klirens Etik

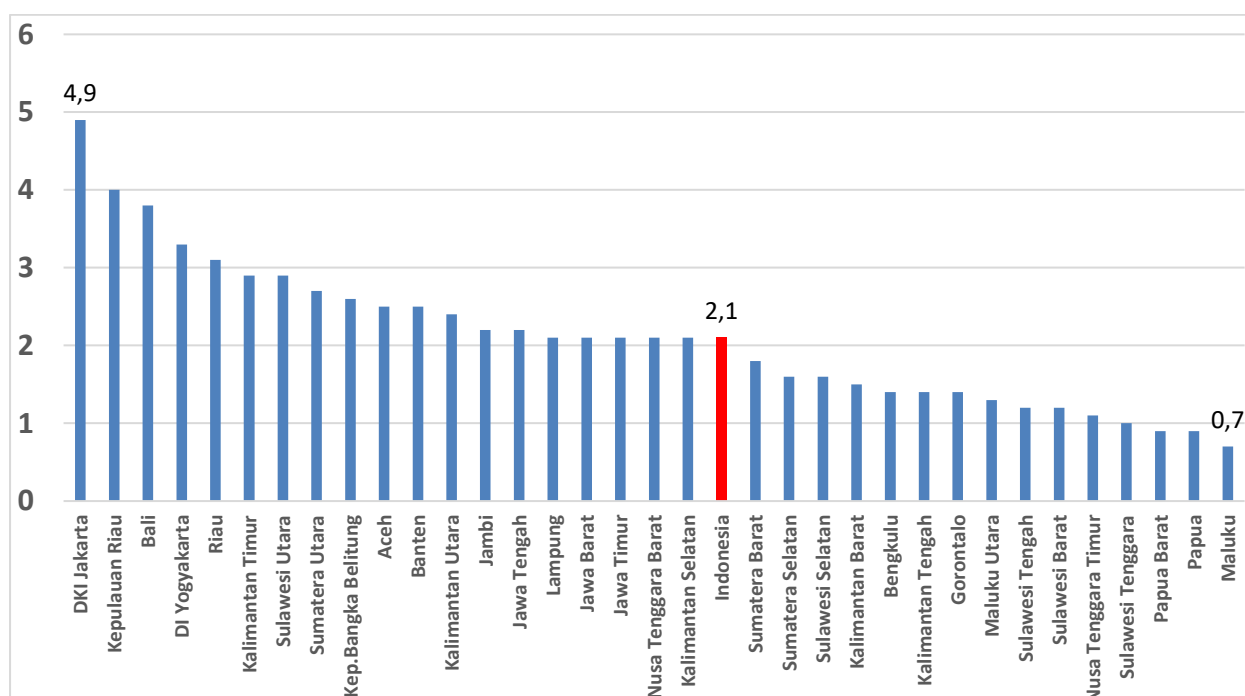
Ethical clearance dimintakan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS

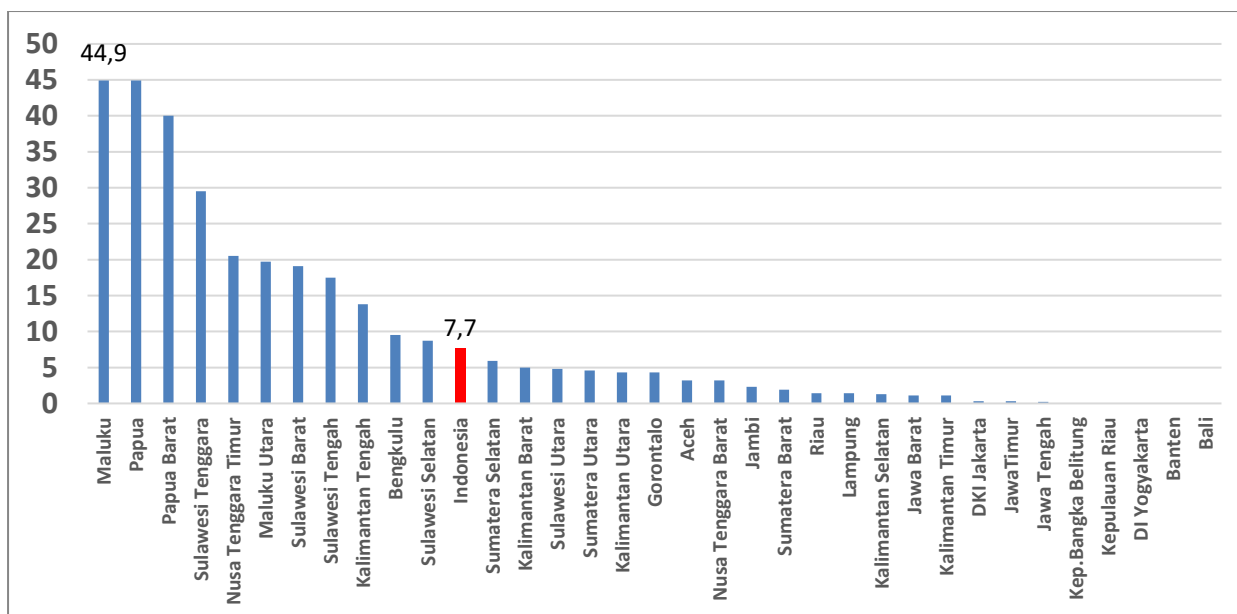
3.1 Keberadaan tenaga kesehatan di Puskesmas

Puskesmas yang didatangi dan dilakukan pengumpulan data variabel Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Risnakes 2017 adalah sejumlah 9.669 puskesmas. Hasil Risnakes 2017 menunjukkan rasio dokter berbanding puskesmas adalah 2,08, artinya rata-rata terdapat 2 dokter di setiap puskesmas. Provinsi dengan rasio dokter berbanding puskesmas yang terbesar adalah DKI Jakarta dan yang paling rendah Provinsi Maluku.



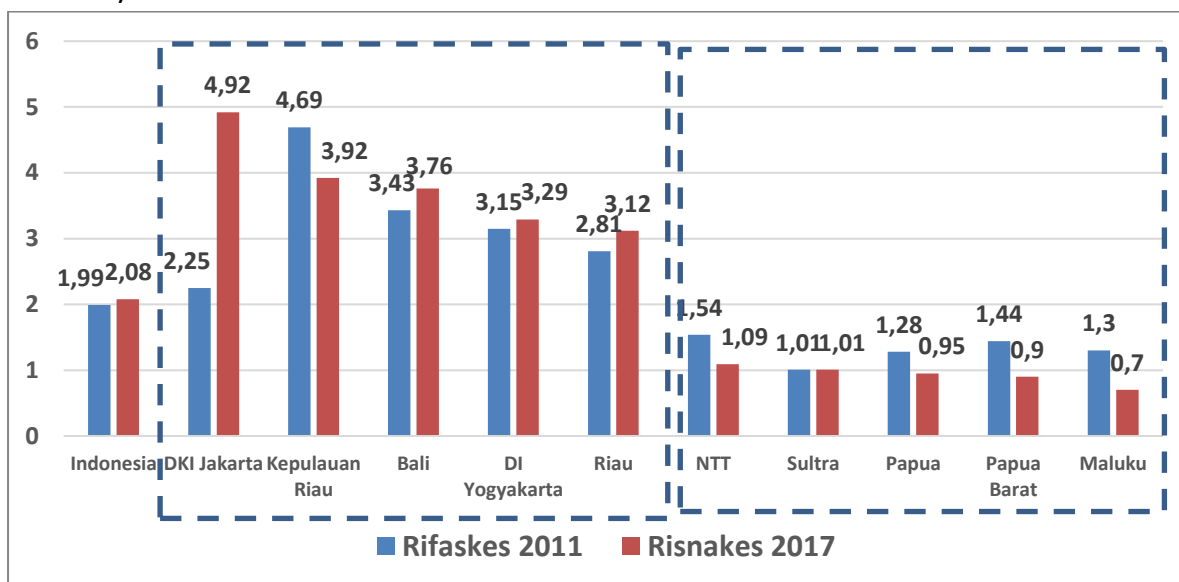
Gambar 3.1.
Rasio dokter berbanding puskesmas menurut provinsi

Data Risnakes 2017 juga menunjukkan masih terdapat 748 (7,7%) puskesmas tanpa tenaga dokter. Terdapat sebanyak 168 puskesmas dari 372 puskesmas di Provinsi Papua (45,2%) tanpa tenaga dokter, disusul kemudian oleh Provinsi Maluku (44,9%), Papua Barat (40%), Sulawesi Tenggara (29,5%), dan Nusa Tenggara Timur (20,5%).



Gambar 3.2.
Proporsi puskesmas dengan ketiadaan dokter menurut provinsi, Risnakes 2017

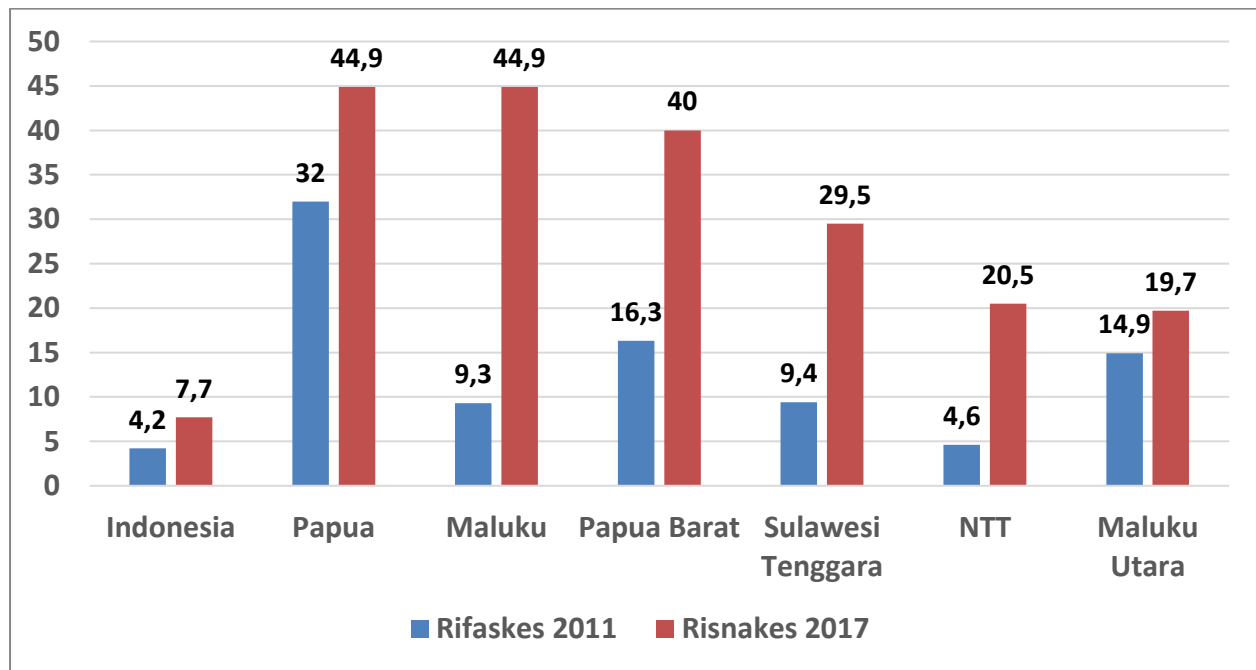
Bila dibandingkan dengan hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011 (Rifaskes 2011), terjadi peningkatan rasio dokter per puskesmas dari 1,99 menjadi 2,08 dokter per puskesmas. Rasio dokter per puskesmas di provinsi-provinsi dengan rasio terbaik di wilayah barat Indonesia menunjukkan peningkatan, sebaliknya di wilayah timur justru menunjukkan hal yang sebaliknya.



Gambar 3.3.
Perbandingan rasio dokter per puskesmas antara Rifaskes 2011 dengan Risnakes 2017

Seiring dengan kondisi tersebut, hasil analisis data juga menunjukkan terjadinya peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas dari hanya 4,2% per puskesmas (Rifaskes, 2011) menjadi 7,7% (Risnakes, 2017). Terjadi pula peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas di provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia.

Kedua kondisi ini, penurunan rasio dokter di puskesmas dan peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas di wilayah timur Indonesia, serta peningkatan rasio dokter di puskesmas di wilayah barat Indonesia harus diwaspadai sebagai satu peringatan kemungkinan terjadinya disparitas tenaga dokter di puskesmas yang kian melebar antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia.



Gambar 3.4.
Perbandingan rasio dokter per puskesmas antara Rifaskes 2011 dengan Risnakes 2017 untuk Indonesia dan provinsi dengan rasio terendah berdasarkan hasil Risnakes 2017

Secara Nasional, tenaga dokter gigi tidak terdapat di 3637 puskesmas (37,5%). Provinsi dengan proporsi puskesmas tanpa tenaga dokter gigi terbesar adalah Provinsi Papua (86,3%), Papua Barat (80%), Maluku (79,8), Maluku Utara (73,2), dan Nusa Tenggara Timur (68,2%).

Tenaga perawat tidak terdapat di 56 puskesmas (0,8%). Sekitar 5,1% puskesmas (19 puskesmas) di Provinsi Papua tidak memiliki perawat. Secara keseluruhan terdapat 132.316 perawat yang bertugas di puskesmas di Indonesia. Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada tenaga bidan, 106 puskesmas di Indonesia (1,1 %) tanpa bidan, sebanyak 62 diantaranya di Provinsi Papua.

Dalam hal ketiadaan tenaga kesehatan masyarakat, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dimana sebanyak 183 puskesmas yang berada di DKI Jakarta (80,6%) tidak memiliki tenaga kesehatan masyarakat, diikuti oleh Papua (49,2%), Provinsi Jawa Timur (45%), Papua Barat (38,7%), Maluku (37,4%), dan Sulawesi Utara (36,0%). Tingginya ketiadaan tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas di DKI Jakarta dikarenakan puskesmas kelurahan di wilayah DKI masuk ke dalam perhitungan ini. Sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan masyarakat disini adalah epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku,

pembimbing kesehatan kerja, administrasi dan kebijakan kesehatan, biostatistika dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Kondisi tenaga kesehatan lingkungan menunjukkan gambaran yang agak berbeda, Provinsi Bengkulu menempati urutan pertama proporsi puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan lingkungan (57%), diikuti oleh Sumatera Utara (55,3%), Papua (55,1%), Papua Barat (48%), dan DKI Jakarta (47%). Tingginya ketiadaan tenaga kesehatan lingkungan di DKI Jakarta dikarenakan puskesmas kelurahan di wilayah DKI masuk ke dalam perhitungan ini. Sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan lingkungan disini adalah sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan proporsi terbesar ketiadaan tenaga laboratorium medik di puskesmas (93,5%), disusul kemudian Sulawesi Utara (90,9%), DKI Jakarta (89,2), Maluku (88,9%), dan Sulawesi Tengah (88,4%).

Provinsi Papua dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan proporsi terbesar ketiadaan tenaga gizi di puskesmas (50%), disusul Lampung (48,8%), Sumatera Utara (44,5%), dan Bengkulu (43,6%). Termasuk tenaga gizi disini adalah nutrisionis dan dietisien.

Sebanyak 32,8% puskesmas di Indonesia tidak memiliki tenaga farmasi, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan proporsi ketiadaan tenaga farmasi yang terbesar (63,7%), disusul kemudian oleh Provinsi Papua (61,8%), Provinsi Bali (60%), Maluku (59,1%), dan Sulawesi Utara (48,9%). Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dikelompokkan ke dalam tenaga farmasi.

Tabel 3.1.

Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga dokter menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Propinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga dokter di puskesmas					Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	
1	Aceh	340	329	96.8	11	3.2	864	2,5
2	Sumatera Utara	571	545	95.4	26	4.6	1,539	2,7
3	Sumatera Barat	264	259	98.1	5	1.9	486	1,8
4	Riau	212	209	98.6	3	1.4	661	3,1
5	Jambi	176	172	97.7	4	2.3	387	2,2
6	Sumatera Selatan	322	303	94.1	19	5.9	526	1,6
7	Bengkulu	179	162	90.5	17	9.5	247	1,4
8	Lampung	291	287	98.6	4	1.4	616	2,1
9	Kep.Bangka Belitung	62	62	100.0	0	0.0	160	2,6
10	Kepulauan Riau	72	72	100.0	0	0.0	286	4,0
11	DKI Jakarta	314	314	100.0	0	0.0	1,541	4,9
12	Jawa Barat	1,050	1,038	98.9	12	1.1	2,203	2,1
13	Jawa Tengah	875	873	99.8	2	0.2	1,926	2,2
14	DI Yogyakarta	121	121	100.0	0	0.0	398	3,3
15	Jawa Timur	960	957	99.7	3	0.3	2,042	2,1
16	Banten	233	233	100.0	0	0.0	588	2,5
17	Bali	120	120	100.0	0	0.0	451	3,8
18	Nusa Tenggara Barat	158	153	96.8	5	3.2	339	2,1
19	Nusa Tenggara Timur	371	295	79.5	76	20.5	405	1,1
20	Kalimantan Barat	238	226	95.0	12	5.0	352	1,5
21	Kalimantan Tengah	195	168	86.2	27	13.8	273	1,4
22	Kalimantan Selatan	230	227	98.7	3	1.3	475	2,1
23	Kalimantan Timur	174	172	98.9	2	1.1	496	2,9
24	Kalimantan Utara	46	44	95.7	2	4.3	110	2,4
25	Sulawesi Utara	186	177	95.2	9	4.8	532	2,9
26	Sulawesi Tengah	189	156	82.5	33	17.5	223	1,2
27	Sulawesi Selatan	448	418	93.3	30	6.7	738	1,6
28	Sulawesi Tenggara	268	189	70.5	79	29.5	270	1,0
29	Gorontalo	93	89	95.7	4	4.3	133	1,4
30	Sulawesi Barat	94	76	80.9	18	19.1	111	1,2
31	Maluku	198	109	55.1	89	44.9	138	0,7
32	Maluku Utara	127	102	80.3	25	19.7	162	1,3
33	Papua Barat	150	90	60.0	60	40.0	135	0,9
34	Papua	372	204	54.8	168	45.2	331	0,9
INDONESIA		9,699	8,951	92.3	748	7.7	20,144	2,08

Tabel 3.2.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga dokter gigi menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga dokter gigi di puskesmas				Jumlah	Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%		
1	Aceh	340	210	61.8	130	38.2	245	0.7
2	Sumatera Utara	571	379	66.4	192	33.6	557	1.0
3	Sumatera Barat	264	237	89.8	27	10.2	303	1.1
4	Riau	212	178	84.0	34	16.0	255	1.2
5	Jambi	176	123	69.9	53	30.1	135	0.8
6	Sumatera Selatan	322	141	43.8	181	56.2	151	0.5
7	Bengkulu	179	71	39.7	108	60.3	73	0.4
8	Lampung	291	116	39.9	175	60.1	136	0.5
9	Kep.Bangka Belitung	62	51	82.3	11	17.7	64	1.0
10	Kepulauan Riau	72	61	84.7	11	15.3	89	1.2
11	DKI Jakarta	314	300	95.5	14	4.5	499	1.6
12	Jawa Barat	1,050	668	63.6	382	36.4	832	0.8
13	Jawa Tengah	875	639	73.0	236	27.0	708	0.8
14	DI Yogyakarta	121	119	98.3	2	1.7	167	1.4
15	Jawa Timur	960	850	88.5	110	11.5	1,086	1.1
16	Banten	233	177	76.0	56	24.0	287	1.2
17	Bali	120	119	99.2	1	0.8	283	2.4
18	Nusa Tenggara Barat	158	102	64.6	56	35.4	108	0.7
19	Nusa Tenggara Timur	371	118	31.8	253	68.2	130	0.4
20	Kalimantan Barat	238	89	37.4	149	62.6	91	0.4
21	Kalimantan Tengah	195	70	35.9	125	64.1	73	0.4
22	Kalimantan Selatan	230	145	63.0	85	37.0	161	0.7
23	Kalimantan Timur	174	149	85.6	25	14.4	207	1.2
24	Kalimantan Utara	46	39	84.8	7	15.2	45	1.0
25	Sulawesi Utara	186	64	34.4	122	65.6	70	0.4
26	Sulawesi Tengah	189	90	47.6	99	52.4	96	0.5
27	Sulawesi Selatan	448	373	83.3	75	16.7	480	1.0
28	Sulawesi Tenggara	268	128	47.8	140	52.2	136	0.5
29	Gorontalo	93	45	48.4	48	51.6	46	0.5
30	Sulawesi Barat	94	56	59.6	38	40.4	58	0.6
31	Maluku	198	40	20.2	158	79.8	41	0.2
32	Maluku Utara	127	34	26.8	93	73.2	36	0.3
33	Papua Barat	150	30	20.0	120	80.0	32	0.2
34	Papua	372	51	13.7	321	86.3	56	0.2
INDONESIA		9,699	6,062	62.5	3,637	37.5	7,736	0.8

Tabel 3.3.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga perawat menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga perawat di puskesmas				Jumlah	Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%		
1	Aceh	340	338	99.4	2	0.6	8,244	24.2
2	Sumatera Utara	571	565	98.9	6	1.1	6,897	12.1
3	Sumatera Barat	264	264	100.0	0	0.0	3,141	11.9
4	Riau	212	212	100.0	0	0.0	3,498	16.5
5	Jambi	176	176	100.0	0	0.0	2,916	16.6
6	Sumatera Selatan	322	322	100.0	0	0.0	5,987	18.6
7	Bengkulu	179	179	100.0	0	0.0	1,855	10.4
8	Lampung	291	289	99.3	2	0.7	3,567	12.2
9	Kep.Bangka Belitung	62	62	100.0	0	0.0	877	14.1
10	Kepulauan Riau	72	72	100.0	0	0.0	1,095	15.2
11	DKI Jakarta	314	307	97.8	7	2.2	1,769	5.6
12	Jawa Barat	1,050	1,042	99.2	8	0.8	10,148	9.7
13	Jawa Tengah	875	874	99.9	1	0.1	8,334	9.5
14	DI Yogyakarta	121	121	100.0	0	0.0	800	6.6
15	Jawa Timur	960	960	100.0	0	0.0	15,118	15.7
16	Banten	233	230	98.7	3	1.3	2,245	9.6
17	Bali	120	120	100.0	0	0.0	1,133	9.4
18	Nusa Tenggara Barat	158	158	100.0	0	0.0	4,771	30.2
19	Nusa Tenggara Timur	371	371	100.0	0	0.0	6,358	17.1
20	Kalimantan Barat	238	238	100.0	0	0.0	3,497	14.7
21	Kalimantan Tengah	195	195	100.0	0	0.0	2,673	13.7
22	Kalimantan Selatan	230	230	100.0	0	0.0	2,851	12.4
23	Kalimantan Timur	174	173	99.4	1	0.6	2,177	12.5
24	Kalimantan Utara	46	46	100.0	0	0.0	786	17.1
25	Sulawesi Utara	186	183	98.4	3	1.6	2,011	10.8
26	Sulawesi Tengah	189	189	100.0	0	0.0	3,034	16.1
27	Sulawesi Selatan	448	448	100.0	0	0.0	10,509	23.5
28	Sulawesi Tenggara	268	268	100.0	0	0.0	4,778	17.8
29	Gorontalo	93	93	100.0	0	0.0	846	9.1
30	Sulawesi Barat	94	94	100.0	0	0.0	2,083	22.2
31	Maluku	198	194	98.0	4	2.0	2,073	10.5
32	Maluku Utara	127	127	100.0	0	0.0	1,256	9.9
33	Papua Barat	150	150	100.0	0	0.0	1,605	10.7
34	Papua	372	353	94.9	19	5.1	3,384	9.1
INDONESIA		9,699	9,643	99.4	56	0.6	132,316	13.6

Tabel 3.4.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga bidan menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga bidan di puskesmas					Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	
1	Aceh	340	340	100.0	0	0.0	13,563	39.9
2	Sumatera Utara	571	569	99.6	2	0.4	14,345	25.1
3	Sumatera Barat	264	264	100.0	0	0.0	6,169	23.4
4	Riau	212	212	100.0	0	0.0	5,069	23.9
5	Jambi	176	176	100.0	0	0.0	3,286	18.7
6	Sumatera Selatan	322	322	100.0	0	0.0	8,895	27.7
7	Bengkulu	179	178	99.4	1	0.6	2,815	15.7
8	Lampung	291	290	99.7	1	0.3	6,504	22.4
9	Kep.Bangka Belitung	62	61	98.4	1	1.6	815	13.1
10	Kepulauan Riau	72	72	100.0	0	0.0	1,131	15.7
11	DKI Jakarta	314	306	97.5	8	2.5	1,725	5.5
12	Jawa Barat	1,050	1,046	99.6	4	0.4	15,770	15.0
13	Jawa Tengah	875	874	99.9	1	0.1	15,314	17.5
14	DI Yogyakarta	121	121	100.0	0	0.0	911	7.5
15	Jawa Timur	960	959	99.9	1	0.1	17,124	17.8
16	Banten	233	233	100.0	0	0.0	4,099	17.6
17	Bali	120	120	100.0	0	0.0	2,185	18.2
18	Nusa Tenggara Barat	158	158	100.0	0	0.0	4,837	30.6
19	Nusa Tenggara Timur	371	368	99.2	3	0.8	5,838	15.7
20	Kalimantan Barat	238	238	100.0	0	0.0	3,128	13.1
21	Kalimantan Tengah	195	195	100.0	0	0.0	2,030	10.4
22	Kalimantan Selatan	230	229	99.6	1	0.4	3,872	16.8
23	Kalimantan Timur	174	173	99.4	1	0.6	2,067	11.9
24	Kalimantan Utara	46	46	100.0	0	0.0	526	11.4
25	Sulawesi Utara	186	184	98.9	2	1.1	1,234	6.6
26	Sulawesi Tengah	189	188	99.5	1	0.5	3,513	18.6
27	Sulawesi Selatan	448	448	100.0	0	0.0	13,111	29.3
28	Sulawesi Tenggara	268	268	100.0	0	0.0	5,599	20.9
29	Gorontalo	93	93	100.0	0	0.0	1,063	11.4
30	Sulawesi Barat	94	94	100.0	0	0.0	2,725	29.0
31	Maluku	198	182	91.9	16	8.1	1,117	5.6
32	Maluku Utara	127	127	100.0	0	0.0	1,848	14.6
33	Papua Barat	150	149	99.3	1	0.7	1,198	8.0
34	Papua	372	310	83.3	62	16.7	1,978	5.3
INDONESIA		9,699	9,593	98.9	106	1.1	175,404	18.1

Tabel 3.5.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga kesehatan masyarakat menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas				Jumlah	Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%		
1	Aceh	340	314	92.4	26	7.6	1,672	4.9
2	Sumatera Utara	571	457	80.0	114	20.0	1,173	2.1
3	Sumatera Barat	264	233	88.3	31	11.7	572	2.2
4	Riau	212	177	83.5	35	16.5	512	2.4
5	Jambi	176	152	86.4	24	13.6	398	2.3
6	Sumatera Selatan	322	296	91.9	26	8.1	1,241	3.9
7	Bengkulu	179	169	94.4	10	5.6	694	3.9
8	Lampung	291	228	78.4	63	21.6	498	1.7
9	Kep.Bangka Belitung	62	56	90.3	6	9.7	151	2.4
10	Kepulauan Riau	72	52	72.2	20	27.8	135	1.9
11	DKI Jakarta	314	61	19.4	253	80.6	166	0.5
12	Jawa Barat	1,050	757	72.1	293	27.9	1,452	1.4
13	Jawa Tengah	875	681	77.8	194	22.2	1,200	1.4
14	DI Yogyakarta	121	106	87.6	15	12.4	202	1.7
15	Jawa Timur	960	528	55.0	432	45.0	828	0.9
16	Banten	233	175	75.1	58	24.9	330	1.4
17	Bali	120	82	68.3	38	31.7	138	1.2
18	Nusa Tenggara Barat	158	145	91.8	13	8.2	501	3.2
19	Nusa Tenggara Timur	371	320	86.3	51	13.7	830	2.2
20	Kalimantan Barat	238	189	79.4	49	20.6	351	1.5
21	Kalimantan Tengah	195	135	69.2	60	30.8	257	1.3
22	Kalimantan Selatan	230	204	88.7	26	11.3	429	1.9
23	Kalimantan Timur	174	140	80.5	34	19.5	365	2.1
24	Kalimantan Utara	46	45	97.8	1	2.2	125	2.7
25	Sulawesi Utara	186	119	64.0	67	36.0	227	1.2
26	Sulawesi Tengah	189	183	96.8	6	3.2	873	4.6
27	Sulawesi Selatan	448	414	92.4	34	7.6	1,645	3.7
28	Sulawesi Tenggara	268	261	97.4	7	2.6	1,377	5.1
29	Gorontalo	93	91	97.8	2	2.2	485	5.2
30	Sulawesi Barat	94	81	86.2	13	13.8	285	3.0
31	Maluku	198	124	62.6	74	37.4	273	1.4
32	Maluku Utara	127	118	92.9	9	7.1	448	3.5
33	Papua Barat	150	92	61.3	58	38.7	185	1.2
34	Papua	372	189	50.8	183	49.2	374	1.0
INDONESIA		9,699	7,374	76.0	2,325	24.0	20,392	2.1

Tabel 3.6.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga kesehatan lingkungan menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas					
			Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	Rasio
1	Aceh	340	258	75.9	82	24.1	850	2.5
2	Sumatera Utara	571	255	44.7	316	55.3	318	0.6
3	Sumatera Barat	264	212	80.3	52	19.7	285	1.1
4	Riau	212	127	59.9	85	40.1	161	0.8
5	Jambi	176	124	70.5	52	29.5	211	1.2
6	Sumatera Selatan	322	233	72.4	89	27.6	394	1.2
7	Bengkulu	179	77	43.0	102	57.0	94	0.5
8	Lampung	291	196	67.4	95	32.6	274	0.9
9	Kep.Bangka Belitung	62	56	90.3	6	9.7	72	1.2
10	Kepulauan Riau	72	55	76.4	17	23.6	80	1.1
11	DKI Jakarta	314	164	52.2	150	47.8	249	0.8
12	Jawa Barat	1,050	685	65.2	365	34.8	774	0.7
13	Jawa Tengah	875	721	82.4	154	17.6	855	1.0
14	DI Yogyakarta	121	116	95.9	5	4.1	153	1.3
15	Jawa Timur	960	621	64.7	339	35.3	694	0.7
16	Banten	233	150	64.4	83	35.6	172	0.7
17	Bali	120	100	83.3	20	16.7	190	1.6
18	Nusa Tenggara Barat	158	148	93.7	10	6.3	422	2.7
19	Nusa Tenggara Timur	371	336	90.6	35	9.4	681	1.8
20	Kalimantan Barat	238	189	79.4	49	20.6	286	1.2
21	Kalimantan Tengah	195	114	58.5	81	41.5	138	0.7
22	Kalimantan Selatan	230	169	73.5	61	26.5	254	1.1
23	Kalimantan Timur	174	139	79.9	35	20.1	172	1.0
24	Kalimantan Utara	46	44	95.7	2	4.3	61	1.3
25	Sulawesi Utara	186	146	78.5	40	21.5	265	1.4
26	Sulawesi Tengah	189	135	71.4	54	28.6	252	1.3
27	Sulawesi Selatan	448	392	87.5	56	12.5	853	1.9
28	Sulawesi Tenggara	268	203	75.7	65	24.3	373	1.4
29	Gorontalo	93	65	69.9	28	30.1	111	1.2
30	Sulawesi Barat	94	68	72.3	26	27.7	114	1.2
31	Maluku	198	146	73.7	52	26.3	260	1.3
32	Maluku Utara	127	77	60.6	50	39.4	105	0.8
33	Papua Barat	150	78	52.0	72	48.0	110	0.7
34	Papua	372	167	44.9	205	55.1	249	0.7
INDONESIA		9,699	6,766	69.8	2,933	30.2	10,532	1.1

Tabel 3.7.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga laboratorium medik menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga laboratorium medik di puskesmas				Jumlah	Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%		
1	Aceh	340	68	20.0	272	80.0	125	0.4
2	Sumatera Utara	571	122	21.4	449	78.6	149	0.3
3	Sumatera Barat	264	146	55.3	118	44.7	205	0.8
4	Riau	212	43	20.3	169	79.7	67	0.3
5	Jambi	176	65	36.9	111	63.1	94	0.5
6	Sumatera Selatan	322	144	44.7	178	55.3	206	0.6
7	Bengkulu	179	73	40.8	106	59.2	103	0.6
8	Lampung	291	112	38.5	179	61.5	143	0.5
9	Kep.Bangka Belitung	62	47	75.8	15	24.2	62	1.0
10	Kepulauan Riau	72	32	44.4	40	55.6	37	0.5
11	DKI Jakarta	314	34	10.8	280	89.2	136	0.4
12	Jawa Barat	1,050	358	34.1	692	65.9	456	0.4
13	Jawa Tengah	875	514	58.7	361	41.3	634	0.7
14	DI Yogyakarta	121	86	71.1	35	28.9	134	1.1
15	Jawa Timur	960	542	56.5	418	43.5	707	0.7
16	Banten	233	94	40.3	139	59.7	102	0.4
17	Bali	120	78	65.0	42	35.0	99	0.8
18	Nusa Tenggara Barat	158	110	69.6	48	30.4	248	1.6
19	Nusa Tenggara Timur	371	186	50.1	185	49.9	384	1.0
20	Kalimantan Barat	238	102	42.9	136	57.1	127	0.5
21	Kalimantan Tengah	195	61	31.3	134	68.7	87	0.4
22	Kalimantan Selatan	230	182	79.1	48	20.9	262	1.1
23	Kalimantan Timur	174	112	64.4	62	35.6	155	0.9
24	Kalimantan Utara	46	29	63.0	17	37.0	38	0.8
25	Sulawesi Utara	186	17	9.1	169	90.9	18	0.1
26	Sulawesi Tengah	189	22	11.6	167	88.4	24	0.1
27	Sulawesi Selatan	448	220	49.1	228	50.9	404	0.9
28	Sulawesi Tenggara	268	67	25.0	201	75.0	115	0.4
29	Gorontalo	93	6	6.5	87	93.5	6	0.1
30	Sulawesi Barat	94	31	33.0	63	67.0	36	0.4
31	Maluku	198	22	11.1	176	88.9	27	0.1
32	Maluku Utara	127	38	29.9	89	70.1	65	0.5
33	Papua Barat	150	32	21.3	118	78.7	44	0.3
34	Papua	372	53	14.2	319	85.8	94	0.3
INDONESIA		9,699	3,848	39.7	5,851	60.3	5,593	0.6

Tabel 3.8.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga gizi menurut provinsi,
Risnakes 2017

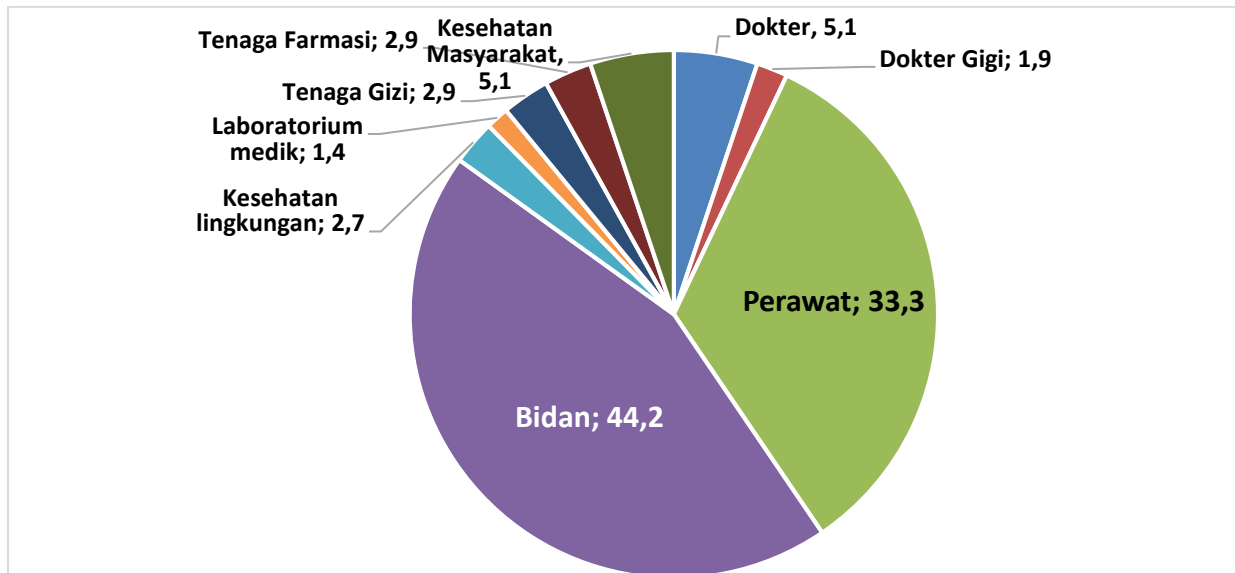
No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga gizi di puskesmas				Jumlah	Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%		
1	Aceh	340	260	76.5	80	23.5	444	1.3
2	Sumatera Utara	571	317	55.5	254	44.5	437	0.8
3	Sumatera Barat	264	239	90.5	25	9.5	359	1.4
4	Riau	212	137	64.6	75	35.4	201	1.0
5	Jambi	176	104	59.1	72	40.9	137	0.8
6	Sumatera Selatan	322	217	67.4	105	32.6	304	0.9
7	Bengkulu	179	101	56.4	78	43.6	138	0.8
8	Lampung	291	149	51.2	142	48.8	166	0.6
9	Kep.Bangka Belitung	62	57	91.9	5	8.1	80	1.3
10	Kepulauan Riau	72	49	68.1	23	31.9	56	0.8
11	DKI Jakarta	314	157	50.0	157	50.0	256	0.8
12	Jawa Barat	1,050	606	57.7	444	42.3	664	0.6
13	Jawa Tengah	875	747	85.4	128	14.6	856	1.0
14	DI Yogyakarta	121	120	99.2	1	0.8	181	1.5
15	Jawa Timur	960	748	77.9	212	22.1	928	1.0
16	Banten	233	148	63.5	85	36.5	161	0.7
17	Bali	120	101	84.2	19	15.8	141	1.1
18	Nusa Tenggara Barat	158	150	94.9	8	5.1	507	3.2
19	Nusa Tenggara Timur	371	341	91.9	30	8.1	771	2.1
20	Kalimantan Barat	238	209	87.8	29	12.2	317	1.3
21	Kalimantan Tengah	195	173	88.7	22	11.3	243	1.2
22	Kalimantan Selatan	230	222	96.5	8	3.5	534	2.3
23	Kalimantan Timur	174	132	75.9	42	24.1	169	1.0
24	Kalimantan Utara	46	41	89.1	5	10.9	59	1.3
25	Sulawesi Utara	186	148	79.6	38	20.4	239	1.3
26	Sulawesi Tengah	189	124	65.6	65	34.4	190	1.0
27	Sulawesi Selatan	448	414	92.4	34	7.6	870	1.9
28	Sulawesi Tenggara	268	228	85.1	40	14.9	536	2.0
29	Gorontalo	93	92	98.9	1	1.1	289	3.1
30	Sulawesi Barat	94	81	86.2	13	13.8	152	1.6
31	Maluku	198	156	78.8	42	21.2	328	1.7
32	Maluku Utara	127	109	85.8	18	14.2	259	2.0
33	Papua Barat	150	110	73.3	40	26.7	180	1.2
34	Papua	372	184	49.5	188	50.5	308	0.8
INDONESIA		9,699	7,171	73.9	2,528	26.1	11,460	1.2

Tabel 3.9.
Distribusi puskesmas dengan keberadaan tenaga farmasi menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas (N)	Keberadaan tenaga farmasi di puskesmas					Rasio
			Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah	
1	Aceh	340	274	80.6	66	19.4	634	1.9
2	Sumatera Utara	571	307	53.8	264	46.2	472	0.8
3	Sumatera Barat	264	210	79.5	54	20.5	329	1.2
4	Riau	212	158	74.5	54	25.5	333	1.6
5	Jambi	176	120	68.2	56	31.8	226	1.3
6	Sumatera Selatan	322	226	70.2	96	29.8	462	1.4
7	Bengkulu	179	65	36.3	114	63.7	86	0.5
8	Lampung	291	154	52.9	137	47.1	232	0.8
9	Kep.Bangka Belitung	62	55	88.7	7	11.3	88	1.4
10	Kepulauan Riau	72	59	81.9	13	18.1	92	1.3
11	DKI Jakarta	314	237	75.5	77	24.5	583	1.9
12	Jawa Barat	1,050	650	61.9	400	38.1	960	0.9
13	Jawa Tengah	875	637	72.8	238	27.2	916	1.0
14	DI Yogyakarta	121	99	81.8	22	18.2	139	1.1
15	Jawa Timur	960	591	61.6	369	38.4	818	0.9
16	Banten	233	156	67.0	77	33.0	215	0.9
17	Bali	120	48	40.0	72	60.0	59	0.5
18	Nusa Tenggara Barat	158	134	84.8	24	15.2	350	2.2
19	Nusa Tenggara Timur	371	291	78.4	80	21.6	498	1.3
20	Kalimantan Barat	238	183	76.9	55	23.1	272	1.1
21	Kalimantan Tengah	195	126	64.6	69	35.4	193	1.0
22	Kalimantan Selatan	230	157	68.3	73	31.7	247	1.1
23	Kalimantan Timur	174	144	82.8	30	17.2	283	1.6
24	Kalimantan Utara	46	46	100.0	0	0.0	99	2.2
25	Sulawesi Utara	186	95	51.1	91	48.9	152	0.8
26	Sulawesi Tengah	189	160	84.7	29	15.3	380	2.0
27	Sulawesi Selatan	448	400	89.3	48	10.7	944	2.1
28	Sulawesi Tenggara	268	191	71.3	77	28.7	396	1.5
29	Gorontalo	93	75	80.6	18	19.4	103	1.1
30	Sulawesi Barat	94	85	90.4	9	9.6	172	1.8
31	Maluku	198	81	40.9	117	59.1	100	0.5
32	Maluku Utara	127	79	62.2	48	37.8	130	1.0
33	Papua Barat	150	79	52.7	71	47.3	126	0.8
34	Papua	372	142	38.2	230	61.8	230	0.6
INDONESIA		9,699	6,514	67.2	3,185	32.8	11,319	1.2

3.2 Pendidikan tertinggi tenaga kesehatan di Puskesmas

Secara nasional, terdapat 20,136 tenaga dokter yang berdinasi di puskesmas, 7,722 dokter gigi, 132.316 tenaga perawat, 175,404 orang bidan, 20,392 tenaga kesehatan masyarakat, 10,532 kesehatan lingkungan, 11,460 tenaga gizi, 11,319 tenaga farmasi. Tenaga bidan menempati proporsi terbesar tenaga kesehatan di puskesmas (44,2%).



Gambar 3.5.
Komposisi ketenagaan kesehatan di puskesmas menurut jenis, Risnakes 2017

Terdapat 87 orang dokter spesialis dan 133 dokter gigi spesialis yang bertugas di puskesmas. Dilihat dari pendidikannya, umumnya dokter di puskesmas (95%) berlatar belakang pendidikan S1, 3% S2 Kesehatan, 0,8% S2 Non Kesehatan, dan 0,4% spesialis. Kondisi yang kurang lebih tidak jauh berbeda juga terjadi pada dokter gigi, umumnya dokter gigi berlatar belakang Pendidikan S1 (92,6%), 3,16% S2 Kesehatan, 0,5% S2 Non Kesehatan, dan 1,7% dokter gigi spesialis. Masih terdapat tenaga puskesmas yang berlatar belakang pendidikan < D3, 10% perawat, 4,6% bidan, 0,7% tenaga kesehatan masyarakat, 14,4% kesehatan lingkungan, 8% tenaga gizi, dan 21% tenaga farmasi.

Tabel 3.10.
Distribusi tenaga dokter di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah dokter	Pendidikan terakhir tenaga dokter di puskesmas			Dokter
			Spesialis	S2 Kesehatan	S2 Non kesehatan	
1	Aceh	870	0	15	3	852
2	Sumatera Utara	1,556	12	81	15	1,448
3	Sumatera Barat	484	1	12	1	470
4	Riau	668	13	16	6	633
5	Jambi	390	1	10	4	375
6	Sumatera Selatan	539	12	42	6	479
7	Bengkulu	246	3	14	2	227
8	Lampung	617	3	22	2	590
9	Kep.Bangka Belitung	160	1	2	0	157
10	Kepulauan Riau	288	2	4	0	282
11	DKI Jakarta	1,561	0	9	10	1,542
12	Jawa Barat	2,202	4	126	29	2,043
13	Jawa Tengah	1,906	3	104	32	1,767
14	DI Yogyakarta	398	2	24	4	368
15	Jawa Timur	2,021	4	57	19	1,941
16	Banten	582	0	19	2	561
17	Bali	451	1	19	5	426
18	Nusa Tenggara Barat	340	0	4	1	335
19	Nusa Tenggara Timur	409	0	7	0	402
20	Kalimantan Barat	351	2	4	1	344
21	Kalimantan Tengah	273	3	4	0	266
22	Kalimantan Selatan	474	0	7	9	458
23	Kalimantan Timur	493	0	5	3	485
24	Kalimantan Utara	110	0	0	1	109
25	Sulawesi Utara	533	4	29	0	500
26	Sulawesi Tengah	224	3	12	1	208
27	Sulawesi Selatan	736	9	54	3	670
28	Sulawesi Tenggara	270	0	13	3	254
29	Gorontalo	127	0	6	1	120
30	Sulawesi Barat	102	1	4	0	97
31	Maluku	138	0	6	0	132
32	Maluku Utara	153	2	6	0	145
33	Papua Barat	133	0	3	0	130
34	Papua	331	1	7	0	323
INDONESIA		20,136	87	747	163	19,139

Tabel 3.11.
Distribusi tenaga dokter gigi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Dokter Gigi	Pendidikan terakhir tenaga dokter gigi di puskesmas			
			Spesialis	S2 Kesehatan	S2 Non kesehatan	Dokter Gigi
1	Aceh	244	1	9	1	229
2	Sumatera Utara	554	15	33	0	493
3	Sumatera Barat	301	2	8	0	284
4	Riau	256	7	7	3	231
5	Jambi	135	0	1	0	131
6	Sumatera Selatan	151	0	3	2	143
7	Bengkulu	72	3	1	0	66
8	Lampung	132	5	6	1	115
9	Kep.Bangka Belitung	64	0	2	0	61
10	Kepulauan Riau	90	4	1	0	82
11	DKI Jakarta	491	3	8	4	461
12	Jawa Barat	829	16	24	4	775
13	Jawa Tengah	713	26	22	9	638
14	DI Yogyakarta	169	5	6	1	157
15	Jawa Timur	1,089	10	30	2	1,032
16	Banten	286	1	14	1	266
17	Bali	283	0	7	2	269
18	Nusa Tenggara Barat	108	0	1	0	104
19	Nusa Tenggara Timur	130	2	2	1	123
20	Kalimantan Barat	94	5	3	0	84
21	Kalimantan Tengah	73	1	0	0	70
22	Kalimantan Selatan	160	1	4	0	151
23	Kalimantan Timur	205	0	4	2	200
24	Kalimantan Utara	45	0	0	0	44
25	Sulawesi Utara	68	1	2	0	61
26	Sulawesi Tengah	96	1	2	2	87
27	Sulawesi Selatan	478	7	35	2	427
28	Sulawesi Tenggara	138	4	5	0	127
29	Gorontalo	46	1	0	0	42
30	Sulawesi Barat	59	4	2	0	48
31	Maluku	42	3	0	0	39
32	Maluku Utara	35	5	0	0	30
33	Papua Barat	32	0	0	0	32
34	Papua	54	0	2	0	50
INDONESIA		7,722	133	244	37	7,152

Tabel 3.12.
Distribusi tenaga perawat di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Perawat	Pendidikan terakhir tenaga perawat di puskesmas					
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Perawat D3	Perawat <D3
1	Aceh	8,244	3	0	797	79	7,299	1,054
2	Sumatera Utara	6,897	6	3	648	80	6,017	1,097
3	Sumatera Barat	3,141	2	0	755	44	2,333	322
4	Riau	3,498	1	1	443	76	2,938	174
5	Jambi	2,916	0	0	390	73	2,457	162
6	Sumatera Selatan	5,987	23	1	566	46	5,290	628
7	Bengkulu	1,855	1	0	590	49	1,187	231
8	Lampung	3,567	8	5	694	83	2,690	316
9	Kep.Bangka Belitung	877	0	0	59	5	834	229
10	Kepulauan Riau	1,095	0	0	114	18	955	50
11	DKI Jakarta	1,769	1	0	130	56	1,578	128
12	Jawa Barat	10,148	39	13	2,361	158	7,369	860
13	Jawa Tengah	8,334	13	8	1,641	139	6,416	717
14	DI Yogyakarta	800	0	4	106	3	676	167
15	Jawa Timur	15,118	10	5	2,959	283	11,551	745
16	Banten	2,245	7	2	413	33	1,761	176
17	Bali	1,133	1	0	299	18	807	347
18	Nusa Tenggara Barat	4,771	1	0	1,508	4	3,199	196
19	Nusa Tenggara Timur	6,358	2	3	1,298	51	4,913	697
20	Kalimantan Barat	3,497	2	1	288	23	3,084	544
21	Kalimantan Tengah	2,673	2	1	451	43	2,111	282
22	Kalimantan Selatan	2,851	2	3	613	35	2,185	265
23	Kalimantan Timur	2,177	0	0	115	17	1,992	182
24	Kalimantan Utara	786	0	0	34	0	738	60
25	Sulawesi Utara	2,011	5	0	521	6	1,423	466
26	Sulawesi Tengah	3,034	1	1	308	12	2,674	505
27	Sulawesi Selatan	10,509	30	1	3,472	201	6,577	268
28	Sulawesi Tenggara	4,778	10	0	974	84	3,615	351
29	Gorontalo	846	0	0	179	14	640	108
30	Sulawesi Barat	2,083	2	0	460	16	1,298	97
31	Maluku	2,073	1	0	302	43	1,707	908
32	Maluku Utara	1,256	0	1	230	11	979	73
33	Papua Barat	1,605	0	0	179	4	1,389	406
34	Papua	3,384	1	1	251	9	2,963	770
INDONESIA		132,316	174	54	24,148	1,816	103,645	13,581

Tabel 3.13.
Distribusi tenaga bidan di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Bidan	Pendidikan terakhir tenaga bidan di puskesmas					Bidan <D3
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Bidan D3	
1	Aceh	13,563	2	5	468	66	12,804	876
2	Sumatera Utara	14,345	34	0	355	93	13,411	1,337
3	Sumatera Barat	6,169	2	0	445	86	5,585	245
4	Riau	5,069	0	0	210	92	4,769	118
5	Jambi	3,286	0	1	116	48	3,203	178
6	Sumatera Selatan	8,895	8	0	411	283	8,041	443
7	Bengkulu	2,815	0	0	288	34	2,447	235
8	Lampung	6,504	15	2	723	70	5,506	197
9	Kep.Bangka Belitung	815	1	0	28	16	764	69
10	Kepulauan Riau	1,131	0	0	58	42	1,020	32
11	DKI Jakarta	1,725	4	0	46	5	1,643	79
12	Jawa Barat	15,770	38	14	2,095	207	13,328	247
13	Jawa Tengah	15,314	18	1	1,231	227	13,827	342
14	DI Yogyakarta	911	2	0	65	3	842	59
15	Jawa Timur	17,124	23	11	1,986	345	14,502	395
16	Banten	4,099	18	1	793	73	3,183	70
17	Bali	2,185	0	0	61	21	2,095	116
18	Nusa Tenggara Barat	4,837	1	0	172	38	4,541	56
19	Nusa Tenggara Timur	5,838	8	0	233	10	5,597	698
20	Kalimantan Barat	3,128	2	0	86	19	2,993	193
21	Kalimantan Tengah	2,030	1	1	93	13	1,896	160
22	Kalimantan Selatan	3,872	2	0	300	44	3,483	109
23	Kalimantan Timur	2,067	0	0	51	4	1,999	38
24	Kalimantan Utara	526	0	0	13	0	508	34
25	Sulawesi Utara	1,234	1	0	94	0	1,057	234
26	Sulawesi Tengah	3,513	1	0	104	7	3,368	440
27	Sulawesi Selatan	13,111	29	2	1,525	370	11,061	68
28	Sulawesi Tenggara	5,599	9	0	199	9	5,343	122
29	Gorontalo	1,063	4	0	103	14	931	41
30	Sulawesi Barat	2,725	0	0	102	109	2,228	11
31	Maluku	1,117	0	0	20	0	1,068	412
32	Maluku Utara	1,848	1	0	53	20	1,736	33
33	Papua Barat	1,198	0	0	13	0	1,164	123
34	Papua	1,978	4	0	65	2	1,835	312
INDONESIA		175,404	228	38	12,605	2,370	157,778	8,122

Tabel 3.14.

Distribusi tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kemas	Pendidikan terakhir tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas					
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Kemas D3	Kemas <D3
1	Aceh	1,672	14	10	1,571	65	79	5
2	Sumatera Utara	1,173	30	7	1,095	45	19	13
3	Sumatera Barat	572	17	5	503	10	10	2
4	Riau	512	16	0	473	10	19	5
5	Jambi	398	5	0	359	13	17	0
6	Sumatera Selatan	1,241	36	5	1,131	49	34	1
7	Bengkulu	694	5	6	639	26	1	8
8	Lampung	498	41	7	417	14	19	0
9	Kep. Bangka Belitung	151	4	1	134	8	5	0
10	Kepulauan Riau	135	2	0	131	1	0	0
11	DKI Jakarta	166	2	0	115	4	36	3
12	Jawa Barat	1,452	90	24	1,234	43	51	24
13	Jawa Tengah	1,200	48	11	943	36	101	15
14	DI Yogyakarta	202	9	2	125	3	35	11
15	Jawa Timur	828	27	1	613	34	58	22
16	Banten	330	31	4	285	0	8	0
17	Bali	138	2	1	126	4	2	0
18	Nusa Tenggara Barat	501	4	1	450	13	10	1
19	Nusa Tenggara Timur	830	6	7	789	16	30	2
20	Kalimantan Barat	351	9	0	304	4	20	2
21	Kalimantan Tengah	257	4	6	223	5	10	1
22	Kalimantan Selatan	429	6	4	399	11	10	4
23	Kalimantan Timur	365	5	1	350	9	8	0
24	Kalimantan Utara	125	0	0	123	0	2	0
25	Sulawesi Utara	227	3	0	207	4	16	0
26	Sulawesi Tengah	873	12	0	819	19	8	4
27	Sulawesi Selatan	1,645	97	10	1,505	19	18	6
28	Sulawesi Tenggara	1,377	20	2	1,319	19	8	0
29	Gorontalo	485	11	1	451	11	2	0
30	Sulawesi Barat	285	0	0	238	11	11	3
31	Maluku	273	2	0	258	11	8	0
32	Maluku Utara	448	3	1	395	32	5	0
33	Papua Barat	185	5	0	152	8	9	3
34	Papua	374	3	0	339	12	28	13
INDONESIA		20,392	569	117	18,215	569	697	148

Tabel 3.15.
Distribusi tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesling	Pendidikan terakhir tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas					
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Kesling D3	Kesling <D3
1	Aceh	850	0	0	67	9	776	87
2	Sumatera Utara	318	1	0	98	13	178	84
3	Sumatera Barat	285	0	1	61	6	217	20
4	Riau	161	1	0	91	4	65	13
5	Jambi	211	0	0	24	2	171	54
6	Sumatera Selatan	394	0	1	42	4	334	96
7	Bengkulu	94	0	0	16	1	52	31
8	Lampung	274	1	0	39	6	220	42
9	Kep.Bangka Belitung	72	0	0	12	1	55	6
10	Kepulauan Riau	80	0	0	8	0	72	2
11	DKI Jakarta	249	0	0	51	1	201	23
12	Jawa Barat	774	6	2	257	16	438	112
13	Jawa Tengah	855	3	1	311	32	495	75
14	DI Yogyakarta	153	3	0	29	0	111	8
15	Jawa Timur	694	3	0	179	14	447	154
16	Banten	172	2	1	77	3	96	4
17	Bali	190	0	0	35	1	144	57
18	Nusa Tenggara Barat	422	0	0	82	6	262	37
19	Nusa Tenggara Timur	681	0	0	82	4	580	36
20	Kalimantan Barat	286	1	0	77	6	184	69
21	Kalimantan Tengah	138	0	0	36	0	87	28
22	Kalimantan Selatan	254	2	0	32	6	189	95
23	Kalimantan Timur	172	0	0	28	3	135	24
24	Kalimantan Utara	61	0	0	8	0	52	3
25	Sulawesi Utara	265	0	0	47	2	194	72
26	Sulawesi Tengah	252	1	0	69	5	170	106
27	Sulawesi Selatan	853	9	0	539	7	259	39
28	Sulawesi Tenggara	373	1	1	126	5	236	14
29	Gorontalo	111	0	0	42	5	49	34
30	Sulawesi Barat	114	1	0	44	0	52	11
31	Maluku	260	0	0	15	2	227	52
32	Maluku Utara	105	0	0	28	8	70	7
33	Papua Barat	110	0	0	33	4	81	2
34	Papua	249	0	1	69	4	166	18
INDONESIA		10,532	35	8	2,754	180	7,065	1,515

Tabel 3.16.
Distribusi tenaga gizi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Gizi	Pendidikan terakhir tenaga gizi di puskesmas					
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Gizi D3	Gizi <D3
1	Aceh	444	0	0	46	12	379	36
2	Sumatera Utara	437	3	0	66	4	344	116
3	Sumatera Barat	359	1	1	69	4	282	9
4	Riau	201	0	4	47	4	137	18
5	Jambi	137	0	0	56	2	70	21
6	Sumatera Selatan	304	1	0	24	1	275	25
7	Bengkulu	138	0	0	26	1	141	14
8	Lampung	166	0	0	37	2	137	29
9	Kep.Bangka Belitung	80	0	0	10	0	66	13
10	Kepulauan Riau	56	0	0	12	2	44	5
11	DKI Jakarta	256	0	0	46	6	203	24
12	Jawa Barat	664	6	2	183	10	440	125
13	Jawa Tengah	856	5	1	191	11	617	67
14	DI Yogyakarta	181	1	0	48	2	125	1
15	Jawa Timur	928	4	0	192	9	682	126
16	Banten	161	1	0	70	1	81	13
17	Bali	141	0	0	24	1	117	19
18	Nusa Tenggara Barat	507	2	0	67	12	417	9
19	Nusa Tenggara Timur	771	2	3	191	16	557	12
20	Kalimantan Barat	317	0	0	39	4	258	32
21	Kalimantan Tengah	243	0	0	29	3	202	22
22	Kalimantan Selatan	534	0	1	121	5	408	26
23	Kalimantan Timur	169	0	1	22	2	139	10
24	Kalimantan Utara	59	0	0	9	0	49	3
25	Sulawesi Utara	239	0	1	45	1	191	7
26	Sulawesi Tengah	190	0	0	51	4	137	7
27	Sulawesi Selatan	870	13	0	532	15	304	14
28	Sulawesi Tenggara	536	0	0	127	12	392	56
29	Gorontalo	289	0	0	19	12	258	2
30	Sulawesi Barat	152	2	0	52	4	71	2
31	Maluku	328	1	0	15	1	296	34
32	Maluku Utara	259	0	0	57	1	195	5
33	Papua Barat	180	0	0	19	0	168	4
34	Papua	308	0	0	87	4	211	16
INDONESIA		11,460	42	14	2,629	168	8,393	922

Tabel 3.17.
Distribusi tenaga farmasi di puskesmas berdasarkan pendidikan terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017

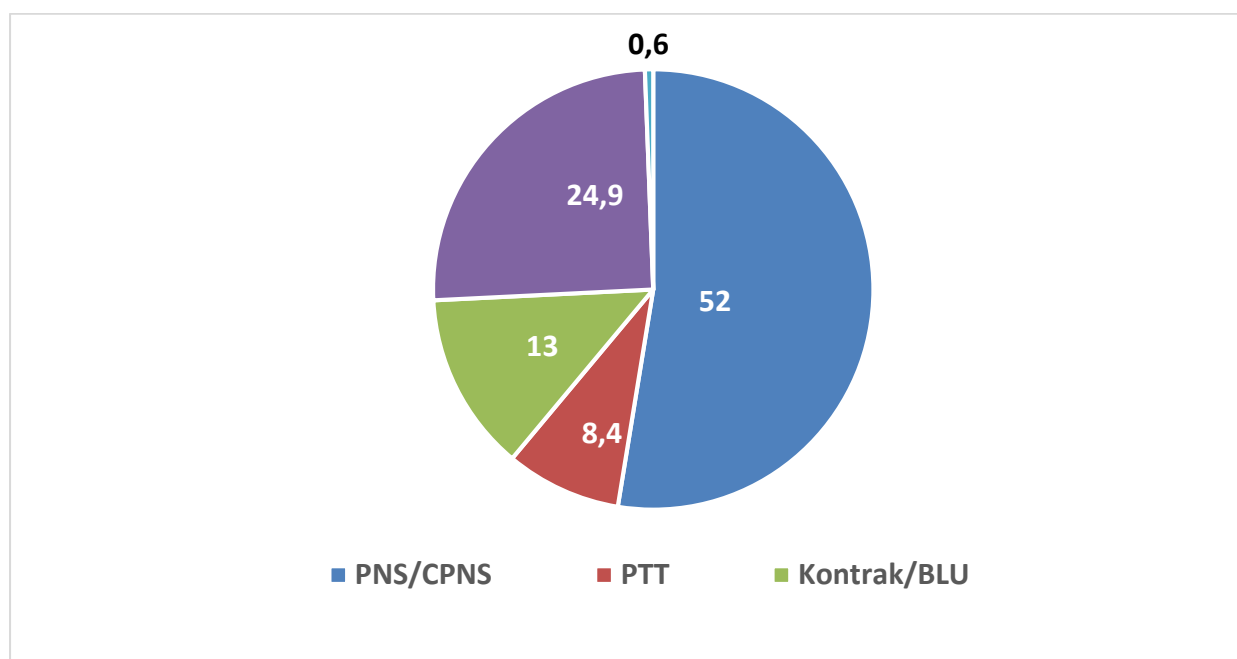
No	Provinsi	Jumlah Tenaga Farmasi	Pendidikan terakhir tenaga farmasi di puskesmas					
			S2 Kesehatan	S2 Non Kesehatan	S1/D4 Kesehatan	S1/D4 Non Kesehatan	Farmasi D3	Farmasi <D3
1	Aceh	634	1	0	90	10	479	110
2	Sumatera Utara	472	1	0	108	9	316	165
3	Sumatera Barat	329	1	1	74	2	246	121
4	Riau	333	0	0	106	3	207	63
5	Jambi	226	0	0	60	5	153	49
6	Sumatera Selatan	462	3	0	121	6	314	96
7	Bengkulu	86	2	0	31	1	46	59
8	Lampung	232	1	0	66	3	131	55
9	Kep.Bangka Belitung	88	0	0	27	1	56	15
10	Kepulauan Riau	92	0	0	39	2	50	8
11	DKI Jakarta	583	1	0	131	7	420	73
12	Jawa Barat	960	6	0	513	12	384	308
13	Jawa Tengah	916	4	0	246	7	592	270
14	DI Yogyakarta	139	1	0	80	2	57	63
15	Jawa Timur	818	5	1	230	6	540	327
16	Banten	215	2	1	131	0	91	14
17	Bali	59	0	0	35	0	22	106
18	Nusa Tenggara Barat	350	1	0	131	1	196	40
19	Nusa Tenggara Timur	498	3	2	136	4	345	60
20	Kalimantan Barat	272	2	1	56	0	202	28
21	Kalimantan Tengah	193	0	0	55	3	123	27
22	Kalimantan Selatan	247	2	1	87	1	148	153
23	Kalimantan Timur	283	3	0	112	1	164	62
24	Kalimantan Utara	99	0	0	52	0	48	13
25	Sulawesi Utara	152	0	0	60	1	85	29
26	Sulawesi Tengah	380	3	0	156	2	214	15
27	Sulawesi Selatan	944	21	4	608	11	314	37
28	Sulawesi Tenggara	396	4	1	205	6	170	11
29	Gorontalo	103	0	0	54	2	43	3
30	Sulawesi Barat	172	5	0	87	2	52	4
31	Maluku	100	0	0	73	3	22	5
32	Maluku Utara	130	1	0	73	7	43	1
33	Papua Barat	126	1	0	78	0	41	17
34	Papua	230	2	0	89	6	109	28
INDONESIA		11,319	76	12	4,200	126	6,423	2,435

3.3 Status kepegawaian tenaga kesehatan di Puskesmas

Tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Calon Pegawai Negeri Sipil) masih menempati proporsi yang terbesar di puskesmas untuk seluruh jenis tenaga kesehatan, antara 56,5% (tenaga farmasi) sampai 79,5% (dokter gigi).

Khusus untuk tenaga dokter, proporsi status kepegawaian kedua terbesar adalah tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disusul kemudian tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini agak berbeda dengan dokter gigi, dimana tenaga PTT menempati urutan nomor 2, baru kemudian disusul oleh tenaga BLUD.

Menarik untuk diperhatikan adalah keberadaan tenaga sukarela di puskesmas, yakni tenaga yang bekerja di puskesmas dengan status yang non permanen, honor yang minim (bahkan ada yang dibayar ala kadarnya), serta tanpa perlindungan hukum yang jelas atas keberadaannya. Melihat proporsinya, tenaga kesehatan dengan status kepegawaian ini menempati urutan ke 2 terbanyak setelah PNS dan CPNS untuk tenaga perawat (28,4%), bidan (28,6%), kesehatan masyarakat (17,9%), kesehatan lingkungan (14,2%), laboratorium (19,7%), gizi (14,3%), dan farmasi (18,4%). Keberadaan tenaga sukarela ini dapat menjadi peringatan bagi pengambil kebijakan atas lemahnya daya serap tenaga kesehatan pada lapangan kerja.



Gambar 3.6.
Distribusi tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan struktur kepegawaian, Risnakes 2017

Di beberapa wilayah terdapat tenaga kesehatan yang berstatus sebagai tenaga Nusantara Sehat. Beberapa jenis tenaga kesehatan berstatus Nusantara Sehat memiliki proporsi >1% dibanding seluruh tenaga kesehatan dengan jenis yang sama yang bertugas di puskesmas, yakni tenaga kesehatan lingkungan (1,86%), laboratorium (2,0%), gizi (1,95%) dan farmasi (1,45%).

Tabel 3.18.
Distribusi status kepegawaian tenaga dokter puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Dokter	Status kepegawaian tenaga dokter puskesmas				
			PNS/ CPNS	PTT	Kontrak/ BLU	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	870	603	84	86	76	4
2	Sumatera Utara	1,556	1,303	100	108	21	4
3	Sumatera Barat	484	413	22	34	15	1
4	Riau	668	507	74	57	21	2
5	Jambi	390	294	22	41	14	0
6	Sumatera Selatan	539	359	129	20	18	0
7	Bengkulu	246	191	20	7	22	1
8	Lampung	617	402	117	61	43	0
9	Kep.Bangka Belitung	160	109	27	16	0	0
10	Kepulauan Riau	288	189	63	28	0	1
11	DKI Jakarta	1,561	520	11	1,001	0	0
12	Jawa Barat	2,202	1,649	229	195	108	0
13	Jawa Tengah	1,906	1,729	9	168	14	0
14	DI Yogyakarta	398	292	9	88	1	0
15	Jawa Timur	2,021	1,532	171	241	43	1
16	Banten	582	377	54	137	13	0
17	Bali	451	385	16	50	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	340	209	39	73	12	0
19	Nusa Tenggara Timur	409	150	216	26	1	5
20	Kalimantan Barat	351	231	82	33	2	1
21	Kalimantan Tengah	273	200	35	19	3	2
22	Kalimantan Selatan	474	367	52	45	1	0
23	Kalimantan Timur	493	357	54	74	1	0
24	Kalimantan Utara	110	82	17	9	0	0
25	Sulawesi Utara	533	417	78	41	6	1
26	Sulawesi Tengah	224	129	74	11	6	2
27	Sulawesi Selatan	736	599	45	51	29	3
28	Sulawesi Tenggara	270	170	69	6	16	1
29	Gorontalo	127	81	14	31	0	6
30	Sulawesi Barat	102	67	12	16	1	3
31	Maluku	138	58	71	4	0	4
32	Maluku Utara	153	71	80	7	1	1
33	Papua Barat	133	58	50	21	1	4
34	Papua	331	180	118	22	6	6
INDONESIA		20,136	14,280	2,263	2,827	495	53

Tabel 3.19.
Distribusi status kepegawaian tenaga dokter gigi puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Dokter Gigi	Status kepegawaian tenaga dokter gigi puskesmas				
			PNS/ CPNS	PTT	Kontrak/ BLU	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	244	131	52	21	39	2
2	Sumatera Utara	554	503	30	19	5	6
3	Sumatera Barat	301	273	14	9	7	0
4	Riau	256	231	7	12	4	1
5	Jambi	135	107	14	3	3	1
6	Sumatera Selatan	151	109	27	7	5	2
7	Bengkulu	72	54	13	1	3	1
8	Lampung	132	118	10	2	0	5
9	Kep.Bangka Belitung	64	41	14	8	0	1
10	Kepulauan Riau	90	72	15	1	0	0
11	DKI Jakarta	491	335	4	151	0	0
12	Jawa Barat	829	662	83	63	19	2
13	Jawa Tengah	713	642	3	54	6	0
14	DI Yogyakarta	169	157	4	6	0	0
15	Jawa Timur	1,089	840	75	134	28	2
16	Banten	286	209	43	32	3	0
17	Bali	283	247	12	23	1	0
18	Nusa Tenggara Barat	108	93	5	6	2	0
19	Nusa Tenggara Timur	130	75	44	6	0	5
20	Kalimantan Barat	94	63	17	5	0	5
21	Kalimantan Tengah	73	57	13	3	0	0
22	Kalimantan Selatan	160	125	23	9	2	2
23	Kalimantan Timur	205	186	9	9	1	2
24	Kalimantan Utara	45	36	6	3	0	0
25	Sulawesi Utara	68	40	18	6	5	1
26	Sulawesi Tengah	96	54	37	3	0	2
27	Sulawesi Selatan	478	415	27	13	20	5
28	Sulawesi Tenggara	138	99	30	2	3	1
29	Gorontalo	46	31	7	7	0	1
30	Sulawesi Barat	59	41	5	5	2	5
31	Maluku	42	24	14	1	0	2
32	Maluku Utara	35	20	13	3	0	0
33	Papua Barat	32	13	9	4	1	4
34	Papua	54	35	13	5	3	0
INDONESIA		7,722	6,138	710	636	162	58

Tabel 3.20.
Distribusi status kepegawaian tenaga perawat puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Perawat	Status kepegawaian tenaga perawat puskesmas				
			PNS/ CPNS	PTT	Kontrak/ BLU	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	8,244	3,283	171	697	3,785	121
2	Sumatera Utara	6,897	3,799	954	710	1,430	33
3	Sumatera Barat	3,141	1,676	26	391	1,027	14
4	Riau	3,498	1,781	223	888	541	13
5	Jambi	2,916	1,255	47	566	1,030	9
6	Sumatera Selatan	5,987	2,493	156	1,029	2,264	12
7	Bengkulu	1,855	1,199	81	115	473	10
8	Lampung	3,567	1,918	15	414	1,200	9
9	Kep.Bangka Belitung	877	596	68	154	59	1
10	Kepulauan Riau	1,095	647	136	262	30	6
11	DKI Jakarta	1,769	668	1	1,094	2	0
12	Jawa Barat	10,148	5,627	208	1,105	2,950	94
13	Jawa Tengah	8,334	5,514	132	1,705	807	2
14	DI Yogyakarta	800	646	8	96	8	0
15	Jawa Timur	15,118	6,237	2,123	2,567	3,958	7
16	Banten	2,245	1,039	17	737	432	8
17	Bali	1,133	821	25	226	61	0
18	Nusa Tenggara Barat	4,771	1,516	201	761	1,830	15
19	Nusa Tenggara Timur	6,358	2,829	131	1,341	1,968	49
20	Kalimantan Barat	3,497	1,715	335	645	717	23
21	Kalimantan Tengah	2,673	1,531	65	686	367	11
22	Kalimantan Selatan	2,851	1,548	414	181	679	1
23	Kalimantan Timur	2,177	1,152	341	621	51	2
24	Kalimantan Utara	786	432	193	134	9	10
25	Sulawesi Utara	2,011	1,594	70	160	188	10
26	Sulawesi Tengah	3,034	1,420	302	173	1,138	8
27	Sulawesi Selatan	10,509	3,708	310	616	5,733	52
28	Sulawesi Tenggara	4,778	1,457	218	647	2,453	16
29	Gorontalo	846	469	50	149	174	2
30	Sulawesi Barat	2,083	664	32	449	919	20
31	Maluku	2,073	1,028	326	263	420	21
32	Maluku Utara	1,256	649	249	30	305	5
33	Papua Barat	1,605	997	60	373	146	22
34	Papua	3,384	1,737	201	1,044	386	23
INDONESIA		132,316	63,645	7,889	21,029	37,540	629

Tabel 3.21.
Distribusi status kepegawaian tenaga bidan puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Bidan	Status kepegawaian tenaga bidan puskesmas				
			PNS / CPNS	PTT	BLUD	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	13,563	4,540	2,960	580	5,317	128
2	Sumatera Utara	14,345	7,314	3,263	1,076	2,661	31
3	Sumatera Barat	6,169	3,073	670	422	1,993	1
4	Riau	5,069	2,293	685	1,038	941	26
5	Jambi	3,286	1,313	300	552	1,079	21
6	Sumatera Selatan	8,895	3,113	1,198	1,175	3,299	47
7	Bengkulu	2,815	1,818	259	87	640	3
8	Lampung	6,504	3,616	221	549	2,098	20
9	Kep.Bangka Belitung	815	514	75	155	70	1
10	Kepulauan Riau	1,131	544	290	222	38	8
11	DKI Jakarta	1,725	455	3	1,262	0	0
12	Jawa Barat	15,770	7,877	2,075	1,282	4,166	30
13	Jawa Tengah	15,314	11,366	806	1,706	1,147	11
14	DI Yogyakarta	911	703	110	66	11	0
15	Jawa Timur	17,124	9,895	1,257	1,356	4,389	22
16	Banten	4,099	2,205	418	635	808	4
17	Bali	2,185	1,334	193	465	193	0
18	Nusa Tenggara Barat	4,837	1,505	283	531	2,166	26
19	Nusa Tenggara Timur	5,838	2,482	256	880	2,139	38
20	Kalimantan Barat	3,128	1,954	278	216	615	20
21	Kalimantan Tengah	2,030	1,194	92	423	291	12
22	Kalimantan Selatan	3,872	2,177	456	223	991	13
23	Kalimantan Timur	2,067	1,001	380	628	48	3
24	Kalimantan Utara	526	258	120	128	5	10
25	Sulawesi Utara	1,234	922	65	110	102	17
26	Sulawesi Tengah	3,513	1,451	760	72	1,222	8
27	Sulawesi Selatan	13,111	3,264	880	614	8,182	104
28	Sulawesi Tenggara	5,599	1,941	382	354	2,918	9
29	Gorontalo	1,063	699	37	96	226	4
30	Sulawesi Barat	2,725	779	99	383	1,384	9
31	Maluku	1,117	569	226	68	226	23
32	Maluku Utara	1,848	1,038	334	46	392	16
33	Papua Barat	1,198	531	237	215	185	19
34	Papua	1,978	905	262	508	261	27
INDONESIA		175,404	84,643	19,930	18,123	50,203	711

Tabel 3.22.
Distribusi status kepegawaian tenaga kesehatan masyarakat puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Kemas	Status kepegawaian tenaga kesehatan masyarakat puskesmas				
			PNS / CPNS	PTT	Kontrak/ BLUD	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	1,672	1,034	23	135	444	5
2	Sumatera Utara	1,173	938	41	123	53	10
3	Sumatera Barat	572	395	0	80	95	2
4	Riau	512	314	15	89	77	8
5	Jambi	398	280	13	37	67	0
6	Sumatera Selatan	1,241	842	19	174	197	5
7	Bengkulu	694	534	18	80	60	2
8	Lampung	498	420	5	28	41	4
9	Kep.Bangka Belitung	151	95	3	47	6	0
10	Kepulauan Riau	135	108	1	14	2	7
11	DKI Jakarta	166	74	0	92	0	0
12	Jawa Barat	1,452	923	13	283	218	1
13	Jawa Tengah	1,200	686	21	421	44	0
14	DI Yogyakarta	202	125	6	59	0	0
15	Jawa Timur	828	452	17	244	103	0
16	Banten	330	211	8	84	27	0
17	Bali	138	104	0	31	2	0
18	Nusa Tenggara Barat	501	224	11	50	197	0
19	Nusa Tenggara Timur	830	308	27	237	215	34
20	Kalimantan Barat	351	223	23	63	20	15
21	Kalimantan Tengah	257	188	5	52	13	1
22	Kalimantan Selatan	429	264	69	61	28	2
23	Kalimantan Timur	365	178	70	103	11	2
24	Kalimantan Utara	125	58	26	29	1	8
25	Sulawesi Utara	227	151	18	28	18	10
26	Sulawesi Tengah	873	437	78	74	281	3
27	Sulawesi Selatan	1,645	942	14	87	572	9
28	Sulawesi Tenggara	1,377	722	22	159	465	8
29	Gorontalo	485	230	29	112	106	4
30	Sulawesi Barat	285	119	0	40	117	7
31	Maluku	273	143	35	43	35	16
32	Maluku Utara	448	199	121	20	91	5
33	Papua Barat	185	121	3	37	13	10
34	Papua	374	222	26	68	38	16
INDONESIA		20,392	12,264	780	3,284	3,657	194

Tabel 3.23.
Distribusi status kepegawaian tenaga kesehatan lingkungan puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga Kesling	Status kepegawaian tenaga Kesehatan Lingkungan puskesmas				
			PNS / CPNS	PTT	Kontrak/ BLUD	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	850	439	10	43	336	13
2	Sumatera Utara	318	265	9	20	9	13
3	Sumatera Barat	285	225	0	26	32	2
4	Riau	161	127	5	12	10	6
5	Jambi	211	156	1	18	32	4
6	Sumatera Selatan	394	269	16	29	77	2
7	Bengkulu	94	77	3	1	12	1
8	Lampung	274	205	2	7	53	5
9	Kep.Bangka Belitung	72	60	1	8	1	1
10	Kepulauan Riau	80	46	4	18	3	8
11	DKI Jakarta	249	60	1	186	3	0
12	Jawa Barat	774	571	41	97	56	0
13	Jawa Tengah	855	743	8	67	25	0
14	DI Yogyakarta	153	130	0	16	0	0
15	Jawa Timur	694	565	7	65	51	1
16	Banten	172	119	1	37	15	0
17	Bali	190	169	0	20	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	422	279	6	61	45	1
19	Nusa Tenggara Timur	681	420	16	105	105	30
20	Kalimantan Barat	286	214	9	34	16	12
21	Kalimantan Tengah	138	124	2	8	2	2
22	Kalimantan Selatan	254	207	13	10	22	0
23	Kalimantan Timur	172	108	23	34	4	2
24	Kalimantan Utara	61	38	13	1	0	7
25	Sulawesi Utara	265	232	6	12	6	9
26	Sulawesi Tengah	252	140	28	13	68	3
27	Sulawesi Selatan	853	521	13	39	262	9
28	Sulawesi Tenggara	373	215	8	35	105	8
29	Gorontalo	111	79	6	12	13	1
30	Sulawesi Barat	114	48	1	21	38	5
31	Maluku	260	149	24	34	44	17
32	Maluku Utara	105	51	25	5	19	4
33	Papua Barat	110	70	5	19	5	11
34	Papua	249	140	9	51	29	19
INDONESIA		10,532	7,261	316	1,164	1,498	196

Tabel 3.24.
Distribusi status kepegawaian tenaga laboratorium puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga Laboratorium	Status kepegawaian tenaga laboratorium puskesmas				
			PNS / CPNS	PTT	Kontrak/ BLUD	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	125	82	0	5	35	1
2	Sumatera Utara	149	126	3	4	9	4
3	Sumatera Barat	205	162	0	16	27	0
4	Riau	67	40	3	7	15	2
5	Jambi	94	67	0	4	20	3
6	Sumatera Selatan	206	116	4	33	48	5
7	Bengkulu	103	44	11	8	36	3
8	Lampung	143	93	1	7	39	3
9	Kep.Bangka Belitung	62	51	3	3	4	1
10	Kepulauan Riau	37	20	1	12	0	4
11	DKI Jakarta	136	23	0	107	6	0
12	Jawa Barat	456	242	22	100	86	0
13	Jawa Tengah	634	486	3	84	50	1
14	DI Yogyakarta	134	101	1	21	3	0
15	Jawa Timur	707	444	7	124	114	5
16	Banten	102	63	3	27	8	0
17	Bali	99	47	1	47	4	0
18	Nusa Tenggara Barat	248	120	14	25	79	1
19	Nusa Tenggara Timur	384	153	5	79	131	16
20	Kalimantan Barat	127	90	8	9	8	10
21	Kalimantan Tengah	87	53	2	16	13	0
22	Kalimantan Selatan	262	195	15	13	38	0
23	Kalimantan Timur	155	85	29	36	4	1
24	Kalimantan Utara	38	17	7	6	0	8
25	Sulawesi Utara	18	3	2	2	3	8
26	Sulawesi Tengah	24	9	8	2	4	1
27	Sulawesi Selatan	404	167	7	6	206	4
28	Sulawesi Tenggara	115	21	7	16	65	6
29	Gorontalo	6	1	0	0	5	0
30	Sulawesi Barat	36	15	2	8	9	2
31	Maluku	27	7	4	6	6	4
32	Maluku Utara	65	21	21	3	17	1
33	Papua Barat	44	16	0	22	1	5
34	Papua	94	46	7	16	11	13
INDONESIA		5,593	3,226	201	874	1,104	112

Tabel 3.25.
Distribusi status kepegawaian tenaga gizi puskesmas menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga gizi	Status kepegawaian tenaga gizi puskesmas				
			PNS / CPNS	PTT	Kontrak/ BLUD	Sukarela	Nusantara Sehat
1	Aceh	444	268	2	29	137	3
2	Sumatera Utara	437	398	2	10	9	15
3	Sumatera Barat	359	267	0	19	67	4
4	Riau	201	131	8	18	37	6
5	Jambi	137	83	2	17	34	1
6	Sumatera Selatan	304	241	9	16	36	2
7	Bengkulu	138	98	11	6	20	3
8	Lampung	166	126	0	6	22	11
9	Kep.Bangka Belitung	80	61	2	12	4	0
10	Kepulauan Riau	56	43	4	3	0	6
11	DKI Jakarta	256	66	1	183	5	0
12	Jawa Barat	664	530	35	57	49	0
13	Jawa Tengah	856	740	12	76	20	1
14	DI Yogyakarta	181	157	1	13	1	0
15	Jawa Timur	928	705	6	99	107	2
16	Banten	161	118	8	28	7	0
17	Bali	141	106	0	33	1	0
18	Nusa Tenggara Barat	507	281	14	83	101	1
19	Nusa Tenggara Timur	771	301	21	171	239	36
20	Kalimantan Barat	317	254	10	25	14	14
21	Kalimantan Tengah	243	205	5	22	10	1
22	Kalimantan Selatan	534	268	226	8	18	2
23	Kalimantan Timur	169	122	9	34	3	1
24	Kalimantan Utara	59	39	11	1	0	9
25	Sulawesi Utara	239	209	2	17	0	11
26	Sulawesi Tengah	190	70	42	16	52	8
27	Sulawesi Selatan	870	563	7	31	247	12
28	Sulawesi Tenggara	536	300	9	43	176	7
29	Gorontalo	289	145	9	66	63	3
30	Sulawesi Barat	152	65	2	32	47	6
31	Maluku	328	205	28	37	42	21
32	Maluku Utara	259	145	58	15	38	3
33	Papua Barat	180	91	12	44	14	15
34	Papua	308	197	17	49	22	20
INDONESIA		11,460	7,598	585	1,319	1,642	224

Tabel 3.26.

Distribusi status kepegawaian tenaga farmasi puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga Farmasi	Status kepegawaian tenaga farmasi puskesmas				Nusantara Sehat
			PNS / CPNS	PTT	Kontrak/ BLUD	Sukarela	
1	Aceh	634	283	26	56	249	5
2	Sumatera Utara	472	369	13	32	43	14
3	Sumatera Barat	329	261	0	24	42	2
4	Riau	333	202	18	57	45	7
5	Jambi	226	173	1	14	36	2
6	Sumatera Selatan	462	251	26	55	128	1
7	Bengkulu	86	62	2	7	14	1
8	Lampung	232	164	2	12	46	6
9	Kep.Bangka Belitung	88	72	4	9	2	0
10	Kepulauan Riau	92	58	2	24	1	6
11	DKI Jakarta	583	103	0	477	3	0
12	Jawa Barat	960	445	56	223	216	1
13	Jawa Tengah	916	680	3	170	56	0
14	DI Yogyakarta	139	77	0	53	0	0
15	Jawa Timur	818	551	13	161	87	0
16	Banten	215	92	10	87	24	0
17	Bali	59	38	0	20	1	0
18	Nusa Tenggara Barat	350	109	24	51	137	2
19	Nusa Tenggara Timur	498	310	10	84	80	15
20	Kalimantan Barat	272	219	8	29	8	6
21	Kalimantan Tengah	193	135	4	41	11	1
22	Kalimantan Selatan	247	181	19	21	26	0
23	Kalimantan Timur	283	131	59	85	5	3
24	Kalimantan Utara	99	50	24	20	0	5
25	Sulawesi Utara	152	129	6	6	6	5
26	Sulawesi Tengah	380	170	43	13	149	4
27	Sulawesi Selatan	944	466	29	41	388	10
28	Sulawesi Tenggara	396	197	18	36	138	7
29	Gorontalo	103	46	5	29	18	4
30	Sulawesi Barat	172	72	4	33	51	11
31	Maluku	100	48	10	13	12	17
32	Maluku Utara	130	72	29	2	25	2
33	Papua Barat	126	59	6	40	12	9
34	Papua	230	116	14	52	28	18
INDONESIA		11,319	6,391	488	2,077	2,087	164

3.1.4. Kesesuaian tenaga kesehatan Puskesmas dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Ketetapan ini mengatur antara lain standar ketenagaan di puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 75 tahun 2014, kategori puskesmas dibagi menjadi puskesmas perkotaan, pedesaan, dan puskesmas daerah terpencil. Setiap kategori tersebut dikelompokkan lagi ke dalam puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Masing-masing jenis puskesmas tersebut memiliki standar jumlah yang berbeda-beda, baik secara total maupun berdasarkan jumlah setiap jenis tenaga. Secara rinci, jumlah tenaga tersebut dapat dilihat pada tabel 3.27.

Tabel 3.27.
Standar ketenagaan di puskesmas berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014, Risnakes 2017

No	Jenis Tenaga	Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Pedesaan		Puskesmas Daerah Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1	Dokter atau Dokter Layanan Primer	1	2	1	2	1	2
2	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
3	Perawat	5	8	5	8	5	8
4	Bidan	4	7	4	7	4	7
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1	1	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1	1	1
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	1	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	1	2	1	2	1	2
9	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1	1	1
Total		22	31	19	27	19	27

Di dalam analisis ini, klasifikasi puskesmas ditentukan berdasarkan pengakuan kepala puskesmas dan SK Bupati/Walikota, sehingga diperoleh sebanyak 2.989 puskesmas perkotaan, 4.890 puskesmas pedesaan, serta 1.772 puskesmas terpencil/sangat terpencil. Terdapat 48 puskesmas yang tidak dapat ditentukan kelompoknya dikarenakan kepala puskesmas tidak dapat menentukan klasifikasi puskesmasnya dan tidak ditemukan SK Bupati/Walikota yang menyatakan kelompok dari puskesmas tersebut.

Tabel 3.28.
Jumlah puskesmas berdasarkan kategori menurut pengakuan Kepala Puskesmas, Risnakes 2017

Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Pedesaan		Puskesmas Terpencil/ Sangat Terpencil		Tidak Tahu	
NRI	RI	NRI	RI	NRI	RI	NRI	RI
2.182	807	2.709	2.181	1.055	717	31	17

Berdasarkan hasil Risnakes 2017, maka secara umum puskesmas perkotaan memiliki kesesuaian tenaga dengan Permenkes 75 tahun 2014 yang lebih baik daripada puskesmas pedesaan dan puskesmas terpencil/sangat terpencil pada hampir seluruh jenis tenaga (kecuali tenaga perawat). Puskesmas rawat inap juga memiliki kesesuaian yang lebih baik bila dibandingkan dengan puskesmas non rawat inap.

Tenaga ahli teknologi laboratorium medik merupakan jenis tenaga yang keberadaannya di puskesmas paling tidak sesuai dengan standar Permenkes 75 tahun 2014.

Tabel 3.29.
Kesesuaian Ketenagaan Puskesmas dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 menurut Jenis tenaga kesehatan, Risnakes 2017

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Pedesaan		Puskesmas Terpencil/ Sangat Terpencil	
		NRI	RI	NRI	RI	NRI	RI
1	Dokter Umum	99,0%	99,0%	92,9%	96,7%	65,3%	86,5%
2	Dokter Gigi	85,7%	86,1%	52,2%	68,9%	22,7%	40,4%
3	Perawat	99,4%	99,6%	99,7%	99,7%	99,9%	99,6%
4	Bidan	99,8%	99,9%	99,7%	99,9%	95,2%	99,7%
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	73,9%	82,0%	77,8%	78,9%	71,5%	84,8%
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	80,3%	84,6%	71,2%	76,5%	57,3%	74,6%
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	50,0%	56,5%	42,5%	49,9%	23,6%	40,4%
8	Tenaga Gizi	85,2%	92,1%	70,3%	81,5%	62,6%	77,8%
9	Tenaga Farmasi	89,8%	92,2%	66,0%	80,2%	50,3%	71,3%

Bila dilakukan analisa secara komposit untuk seluruh jenis tenaga, maka 0,5% puskesmas non rawat inap dan 1,4% puskesmas rawat inap di puskesmas perkotaan yang memenuhi standar Permenkes 75 tahun 2014. Kondisi ini lebih buruk pada puskesmas pedesaan dan puskesmas terpencil/sangat terpencil. Sebagian besar provinsi bahkan tidak memiliki satupun puskesmas yang memenuhi standar Permenkes 75 tahun 2014 tersebut (Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua).

Tabel 3.30.
Kesesuaian tenaga kesehatan di Puskesmas menurut Permenkes 75 tahun 2014,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Pedesaan		Puskesmas Terpencil	
		NRI	RI	NRI	RI	NRI	RI
1	Aceh	11,1%	14,3%	3,0%	8,1%	0,0%	2,4%
2	Sumatera Utara	0,8%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Sumatera Barat	0,0%	6,3%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%
4	Riau	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	Jambi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6	Sumatera Selatan	2,6%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%
7	Bengkulu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Lampung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Kep.Bangka Belitung	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	Kepulauan Riau	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	DKI Jakarta	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	N/A	N/A
12	Jawa Barat	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	Jawa Tengah	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
14	DI Yogyakarta	0,0%	0,0%	0,0%	6,1%	N/A	N/A
15	Jawa Timur	0,7%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%
16	Banten	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17	Bali	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18	Nusa Tenggara Barat	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%
19	Nusa Tenggara Timur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Kalimantan Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	Kalimantan Tengah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Kalimantan Selatan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	Kalimantan Timur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	Kalimantan Utara	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	Sulawesi Utara	3,8%	8,7%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%
26	Sulawesi Tengah	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	Sulawesi Selatan	0,0%	3,3%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%
28	Sulawesi Tenggara	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29	Gorontalo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30	Sulawesi Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
31	Maluku	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
32	Maluku Utara	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%
33	Papua Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
34	Papua	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	INDONESIA	0,5%	1,4%	0,1%	0,7%	0,0%	0,1%

Keterangan :

N/A = *Not available* = Tidak ada satupun puskesmas di provinsi tersebut yang dikategorikan sesuai kelompok yang dimaksud



MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Kesehatan dalam Risnakes 2017 dibagi dalam sub bab pengelolaan ketenagaan serta pendidikan dan pelatihan. Perencanaan SDM kesehatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan pengadaan yang disusun secara berjenjang dengan pendekatan “*bottom up planning*” atau perencanaan dari bawah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pengelolaan ketenagaan yang dilihat meliputi kehadiran, ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah kerja, mutasi dan pensiun. Pendidikan dan pelatihan termasuk didalamnya pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

4.1 Perencanaan SDM Kesehatan

Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 79,8% puskesmas menyusun rencana kebutuhan SDM, dan 89,5% diantaranya mendokumentasikan perencanaan tersebut. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM yang dipakai oleh lebih dari setengahnya (52,6%) adalah metode WISN atau Analisis Beban Kerja dengan mengacu pada Permenkes 33 tahun 2015 (56,7%). Kondisi ketenagaan berdasarkan hasil perhitungan sebanyak 80,4% masih kurang, sedangkan kondisi ketenagaan berdasarkan persepsi 82,5% masih kurang. Sebagian besar (78,0%) puskesmas melaporkan dokumen perencanaan tersebut kepada Dinkes kab/kota.

Tabel 4.1.
Distribusi puskesmas berdasarkan penyusunan dan pendokumentasian perencanaan kebutuhan
SDM Kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas menyusun rencana kebutuhan SDM				Puskesmas mendokumentasikan perencanaan kebutuhan SDM (dibanding puskesmas yang menyusun rencana kebutuhan SDM)			
			Ya		Tidak		Ya		Tidak	
			n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	340	210	61,8	130	38,2	172	81,9	38	18,1
2	Sumatera Utara	571	351	61,5	220	38,5	245	69,8	106	30,2
3	Sumatera Barat	264	233	88,3	31	11,7	211	90,6	22	9,4
4	Riau	212	164	77,4	48	22,6	134	81,7	30	18,3
5	Jambi	176	142	80,7	34	19,3	137	96,5	5	3,5
6	Sumatera Selatan	322	291	90,4	31	9,6	271	93,1	20	6,9
7	Bengkulu	179	137	76,5	42	23,5	110	80,3	27	19,7
8	Lampung	291	262	90,0	29	10,0	252	96,2	10	3,8
9	Kep. Bangka Belitung	62	60	96,8	2	3,2	57	95,0	3	5,0
10	Kep. Riau	72	64	88,9	8	11,1	57	89,1	7	10,9
11	DKI Jakarta	314	150	47,8	164	52,2	136	90,1	15	9,9
12	Jawa Barat	1050	978	93,1	72	6,9	920	94,1	58	5,9
13	Jawa Tengah	875	835	95,4	40	4,6	809	96,9	26	3,1
14	DI Yogyakarta	121	121	100,0	0	,0	120	99,2	1	,8
15	Jawa Timur	960	914	95,2	46	4,8	881	96,4	33	3,6
16	Banten	233	202	86,7	31	13,3	186	92,1	16	7,9
17	Bali	120	120	100,0	0	,0	115	95,8	5	4,2
18	Nusa Tenggara Barat	158	141	89,2	17	10,8	120	85,1	21	14,9
19	Nusa Tenggara Timur	371	239	64,4	132	35,6	217	90,8	22	9,2
20	Kalimantan Barat	238	196	82,4	42	17,6	175	89,3	21	10,7
21	Kalimantan Tengah	195	156	80,0	39	20,0	136	87,2	20	12,8
22	Kalimantan Selatan	230	201	87,4	29	12,6	188	93,5	13	6,5
23	Kalimantan Timur	174	138	79,3	36	20,7	119	86,2	19	13,8
24	Kalimantan Utara	46	36	78,3	10	21,7	33	91,7	3	8,3
25	Sulawesi Utara	186	129	69,4	57	30,6	110	85,3	19	14,7
26	Sulawesi Tengah	189	146	77,2	43	22,8	93	63,7	53	36,3
27	Sulawesi Selatan	448	396	88,4	52	11,6	357	90,2	39	9,8
28	Sulawesi Tenggara	268	183	68,3	85	31,7	158	86,3	25	13,7
29	Gorontalo	93	86	92,5	7	7,5	74	86,0	12	14,0
30	Sulawesi Barat	94	72	76,6	22	23,4	62	86,1	10	13,9
31	Maluku	198	100	50,5	98	49,5	72	72,0	28	28,0
32	Maluku Utara	127	62	48,8	65	51,2	44	71,0	18	29,0
33	Papua Barat	150	84	56,0	66	44,0	61	72,6	23	27,4
34	Papua	372	139	37,4	233	62,6	94	67,6	45	32,4
INDONESIA		9.699	7.738	79,8	1.961	20,2	6.926	89,5	813	10,5

Tabel 4.2.
Distribusi puskesmas berdasarkan penyusunan dan pendokumentasian perencanaan kebutuhan
SDM Kesehatan menurut kategori Puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Puskesmas menyusun rencana kebutuhan SDM				Puskesmas mendokumentasikan perencanaan kebutuhan SDM			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat Inap	3.722	3.105	83,4	617	16,6	2.814	90,6	291	9,4
Non Rawat Inap	5.977	4.633	77,5	1.344	22,5	4.112	88,7	522	11,3
Wilayah Kerja									
Perkotaan	3.122	2.580	82,6	542	17,4	2.365	91,6	216	8,4
Perdesaan	4.813	4.047	84,1	766	15,9	3.669	90,7	378	9,3
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.111	63,0	653	37,0	892	80,3	219	19,7
Pola Pengelolaan Keuangan									
BLUD	2.540	2.107	83,0	433	17,0	1.950	92,5	157	7,5
Non BLUD	7.159	5.631	78,7	1.528	21,3	4.976	88,4	656	11,6
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	2.375	2.087	87,9	288	12,1	2.009	96,2	79	3,8
Tidak	7.324	5.651	77,2	1.673	22,8	4.917	87,0	734	13,0

Tabel 4.3.
Distribusi puskesmas berdasarkan cara perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Cara perhitungan kebutuhan SDM					
			Analisis Beban Kerja (WISN)		Analisis Beban Kerja (WISN) dan lainnya		Lainnya	
			n	%	n	%	n	%
1	Aceh	210	34	16,2	34	16,2	142	67,62
2	Sumatera Utara	351	101	28,8	52	14,8	198	56,41
3	Sumatera Barat	233	46	19,7	92	39,5	95	40,77
4	Riau	164	73	44,5	44	26,8	47	28,66
5	Jambi	142	52	36,6	41	28,9	49	34,51
6	Sumatera Selatan	291	116	39,9	72	24,7	103	35,40
7	Bengkulu	137	32	23,4	40	29,2	65	47,45
8	Lampung	262	123	46,9	68	26,0	71	27,10
9	Kep. Bangka Belitung	60	23	38,3	30	50,0	7	11,67
10	Kep. Riau	64	28	43,8	20	31,3	16	25,00
11	DKI Jakarta	151	78	52,0	43	28,7	29	19,33
12	Jawa Barat	978	375	38,3	333	34,0	270	27,61
13	Jawa Tengah	835	394	47,2	298	35,7	143	17,13
14	DI Yogyakarta	121	66	54,5	44	36,4	11	9,09
15	Jawa Timur	914	368	40,3	263	28,8	283	30,96
16	Banten	202	78	38,6	54	26,7	70	34,65
17	Bali	120	54	45,0	22	18,3	44	36,67
18	Nusa Tenggara Barat	141	65	46,1	45	31,9	31	21,99
19	Nusa Tenggara Timur	239	62	25,9	68	28,5	109	45,61
20	Kalimantan Barat	196	51	26,0	52	26,5	93	47,45
21	Kalimantan Tengah	156	60	38,5	40	25,6	56	35,90
22	Kalimantan Selatan	201	71	35,3	67	33,3	63	31,34
23	Kalimantan Timur	138	46	33,3	36	26,1	56	40,58
24	Kalimantan Utara	36	22	61,1	9	25,0	5	13,89
25	Sulawesi Utara	129	49	38,0	32	24,8	48	37,21
26	Sulawesi Tengah	146	66	45,2	37	25,3	43	29,45
27	Sulawesi Selatan	396	114	28,8	123	31,1	159	40,15
28	Sulawesi Tenggara	183	56	30,6	33	18,0	94	51,37
29	Gorontalo	86	18	20,9	36	41,9	32	37,21
30	Sulawesi Barat	72	16	22,2	7	9,7	49	68,06
31	Maluku	100	25	25,0	21	21,0	54	54,00
32	Maluku Utara	62	14	22,6	5	8,1	43	69,35
33	Papua Barat	84	21	25,0	17	20,2	46	54,76
34	Papua	139	23	16,5	10	7,2	106	76,26
INDONESIA		7739	2.820	29,6	2.188	23,0	2.730	0,29

Keterangan : Dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan (N=7739)

Tabel 4.4.

Distribusi puskesmas berdasarkan persepsi kondisi ketenagaan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Kondisi ketenagaan puskesmas (Persepsi)					
			Sesuai		Kurang		Berlebih	
			n	%	n	%	n	%
1	Aceh	210	38	18,1	144	68,6	28	13,3
2	Sumatera Utara	351	43	12,3	284	80,9	24	6,8
3	Sumatera Barat	233	21	9,0	206	88,4	6	2,6
4	Riau	164	24	14,6	129	78,7	11	6,7
5	Jambi	142	17	12,0	111	78,2	14	9,9
6	Sumatera Selatan	291	53	18,2	196	67,4	42	14,4
7	Bengkulu	137	14	10,2	111	81,0	12	8,8
8	Lampung	262	35	13,4	202	77,1	25	9,5
9	Kep. Bangka Belitung	60	11	18,3	49	81,7	0	0,0
10	Kep. Riau	64	8	12,5	54	84,4	2	3,1
11	DKI Jakarta	151	33	22,0	116	77,3	1	0,7
12	Jawa Barat	978	109	11,1	845	86,4	24	2,5
13	Jawa Tengah	835	108	12,9	723	86,6	4	0,5
14	DI Yogyakarta	121	13	10,7	108	89,3	0	0,0
15	Jawa Timur	914	96	10,5	801	87,6	17	1,9
16	Banten	202	19	9,4	177	87,6	6	3,0
17	Bali	120	21	17,5	94	78,3	5	4,2
18	Nusa Tenggara Barat	141	30	21,3	89	63,1	22	15,6
19	Nusa Tenggara Timur	239	41	17,2	185	77,4	13	5,4
20	Kalimantan Barat	196	27	13,8	163	83,2	6	3,1
21	Kalimantan Tengah	156	17	10,9	129	82,7	10	6,4
22	Kalimantan Selatan	201	19	9,5	178	88,6	4	2,0
23	Kalimantan Timur	138	19	13,8	116	84,1	3	2,2
24	Kalimantan Utara	36	6	16,7	29	80,6	1	2,8
25	Sulawesi Utara	129	15	11,6	108	83,7	6	4,7
26	Sulawesi Tengah	146	16	11,0	116	79,5	14	9,6
27	Sulawesi Selatan	396	43	10,9	322	81,3	31	7,8
28	Sulawesi Tenggara	183	21	11,5	149	81,4	13	7,1
29	Gorontalo	86	10	11,6	68	79,1	8	9,3
30	Sulawesi Barat	72	4	5,6	65	90,3	3	4,2
31	Maluku	100	12	12,0	79	79,0	9	9,0
32	Maluku Utara	62	5	8,1	52	83,9	5	8,1
33	Papua Barat	84	11	13,1	69	82,1	4	4,8
34	Papua	139	21	15,1	114	82,0	4	2,9
INDONESIA		7739	980	12,7	6.381	82,5	377	4,9

Tabel 4.5.
Distribusi puskesmas berdasarkan Institusi yang mendapat laporan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Institusi mendapat laporan dokumen							
			Dinkes Kab/Kota		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)		Dinkes Provinsi		Lainnya	
			n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	210	209	99.5	7	3.3	0	0	6	2.9
2	Sumatera Utara	351	348	99.1	6	1.7	0	0	7	2.0
3	Sumatera Barat	233	230	98.7	14	6.0	0	0	10	4.3
4	Riau	164	164	100	8	4.9	1	0.6	2	1.2
5	Jambi	142	142	100	16	11.3	0	0	6	4.2
6	Sumatera Selatan	291	290	99.7	5	1.7	2	0.7	6	2.1
7	Bengkulu	137	136	99.3	3	2.2	4	2.9	7	5.1
8	Lampung	262	258	98.5	5	1.9	1	0.4	19	7.3
9	Kep. Bangka Belitung	60	60	100	12	20	3	5	6	10
10	Kep. Riau	64	64	100	5	7.8	0	0	2	3.1
11	DKI Jakarta	151	94	62.2	5	3.3	1	0.7	77	51
12	Jawa Barat	978	944	96.5	53	5.4	8	0.8	108	11
13	Jawa Tengah	835	822	98.4	174	20.8	7	0.8	36	4.3
14	DI Yogyakarta	121	121	100	23	19.0	0	0	16	13.2
15	Jawa Timur	914	901	98.6	89	9.7	1	0.1	50	5.5
16	Banten	202	197	97.5	26	12.9	3	1.5	6	3.0
17	Bali	120	120	100	14	11.7	2	1.7	1	0.8
18	Nusa Tenggara Barat	141	138	97.9	16	11.3	1	0.7	8	5.7
19	Nusa Tenggara Timur	239	233	97.5	5	2.1	0	0	10	4.2
20	Kalimantan Barat	196	193	98.5	11	5.6	0	0	5	2.6
21	Kalimantan Tengah	156	153	98.1	3	1.9	0	0	7	4.5
22	Kalimantan Selatan	201	198	98.5	9	4.5	1	0.5	6	3.0
23	Kalimantan Timur	138	136	98.6	16	11.6	0	0	4	2.9
24	Kalimantan Utara	36	33	91.7	0	0	1	2.8	3	8.3
25	Sulawesi Utara	129	127	98.4	13	10.1	2	1.6	9	7.0
26	Sulawesi Tengah	146	145	99.3	7	4.8	0	0	2	1.4
27	Sulawesi Selatan	396	393	99.2	15	3.8	1	0.3	12	3.0
28	Sulawesi Tenggara	183	182	99.4	1	0.5	1	0.5	6	3.3
29	Gorontalo	86	85	98.8	8	9.3	5	5.8	1	1.2
30	Sulawesi Barat	72	71	98.6	2	2.8	0	0	1	1.4
31	Maluku	100	97	97	3	3	0	0	3	3
32	Maluku Utara	62	62	100	3	4.8	0	0	0	0
33	Papua Barat	84	83	98.8	1	1.2	0	0	3	3.6
34	Papua	139	136	97.8	2	1.4	1	0.7	4	2.9
INDONESIA		7739	7.565	97.8	580	7.5	46	0.6	449	5.8

Keterangan : Dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan (N=7739)

Tabel 4.6.
Distribusi puskesmas berdasarkan jenis pengajuan kebutuhan dengan menggunakan dokumen perencanaan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jenis pengajuan kebutuhan yang dilakukan											
			Tenaga		Anggaran		Pendidikan		Pelatihan		Sarpras		Lainnya	
			N	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	210	194	92,4	165	78,6	94	44,8	139	66,2	162	77,1	4	1,9
2	Sumatera Utara	351	313	89,2	226	64,4	150	42,7	201	57,3	257	73,2	10	2,8
3	Sumatera Barat	233	222	95,3	192	82,4	152	65,2	157	67,4	206	88,4	5	2,1
4	Riau	164	154	93,9	118	72,0	102	62,2	115	70,1	134	81,7	9	5,5
5	Jambi	142	137	96,5	118	83,1	85	59,9	98	69,0	123	86,6	11	7,7
6	Sumatera Selatan	291	267	91,8	216	74,2	170	58,4	176	60,5	246	84,5	2	0,7
7	Bengkulu	137	126	92,0	91	66,4	58	42,3	74	54,0	120	87,6	9	6,6
8	Lampung	262	236	90,1	216	82,4	162	61,8	180	68,7	221	84,4	5	1,9
9	Kep. Bangka Belitung	60	60	100,0	54	90,0	38	63,3	46	76,7	57	95,0	3	5,0
10	Kep. Riau	64	59	92,2	49	76,6	30	46,9	41	64,1	59	92,2	6	9,4
11	DKI Jakarta	151	146	97,3	110	73,3	101	67,3	118	78,7	123	82,0	2	1,3
12	Jawa Barat	978	923	94,4	849	86,8	596	60,9	741	75,8	880	90,0	31	3,2
13	Jawa Tengah	835	812	97,2	720	86,2	456	54,6	659	78,9	726	86,9	34	4,1
14	DI Yogyakarta	121	116	95,9	96	79,3	100	82,6	117	96,7	117	96,7	13	10,7
15	Jawa Timur	914	868	95,0	723	79,1	450	49,2	649	71,0	806	88,2	40	4,4
16	Banten	202	198	98,0	182	90,1	108	53,5	147	72,8	191	94,6	11	5,4
17	Bali	120	118	98,3	104	86,7	76	63,3	83	69,2	114	95,0	5	4,2
18	Nusa Tenggara Barat	141	130	92,2	117	83,0	85	60,3	86	61,0	121	85,8	6	4,3
19	Nusa Tenggara Timur	239	207	86,6	196	82,0	152	63,6	145	60,7	194	81,2	8	3,3
20	Kalimantan Barat	196	183	93,4	170	86,7	125	63,8	107	54,6	176	89,8	6	3,1
21	Kalimantan Tengah	156	148	94,9	132	84,6	108	69,2	100	64,1	143	91,7	6	3,8
22	Kalimantan Selatan	201	196	97,5	156	77,6	116	57,7	109	54,2	170	84,6	11	5,5
23	Kalimantan Timur	138	135	97,8	119	86,2	76	55,1	85	61,6	111	80,4	9	6,5
24	Kalimantan Utara	36	32	88,9	28	77,8	22	61,1	27	75,0	31	86,1	7	19,4
25	Sulawesi Utara	129	114	88,4	104	80,6	58	45,0	72	55,8	98	76,0	8	6,2
26	Sulawesi Tengah	146	136	93,2	108	74,0	69	47,3	75	51,4	104	71,2	2	1,4
27	Sulawesi Selatan	396	363	91,7	319	80,6	160	40,4	216	54,5	315	79,5	11	2,8
28	Sulawesi Tenggara	183	165	90,2	143	78,1	76	41,5	104	56,8	140	76,5	6	3,3
29	Gorontalo	86	79	91,9	72	83,7	40	46,5	56	65,1	66	76,7	2	2,3
30	Sulawesi Barat	72	65	90,3	49	68,1	25	34,7	41	56,9	60	83,3	2	2,8
31	Maluku	100	94	94,0	79	79,0	58	58,0	59	59,0	80	80,0	5	5,0
32	Maluku Utara	62	54	87,1	44	71,0	15	24,2	28	45,2	43	69,4	1	1,6
33	Papua Barat	84	78	92,9	68	81,0	46	54,8	48	57,1	67	79,8	4	4,8
34	Papua	139	120	86,3	96	69,1	77	55,4	62	44,6	99	71,2	5	3,6
INDONESIA		7739	7.248	93,7	6.229	80,5	4.236	54,7	5.161	66,7	6.560	84,8	295	3,9

Keterangan : Dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan (N=7739)

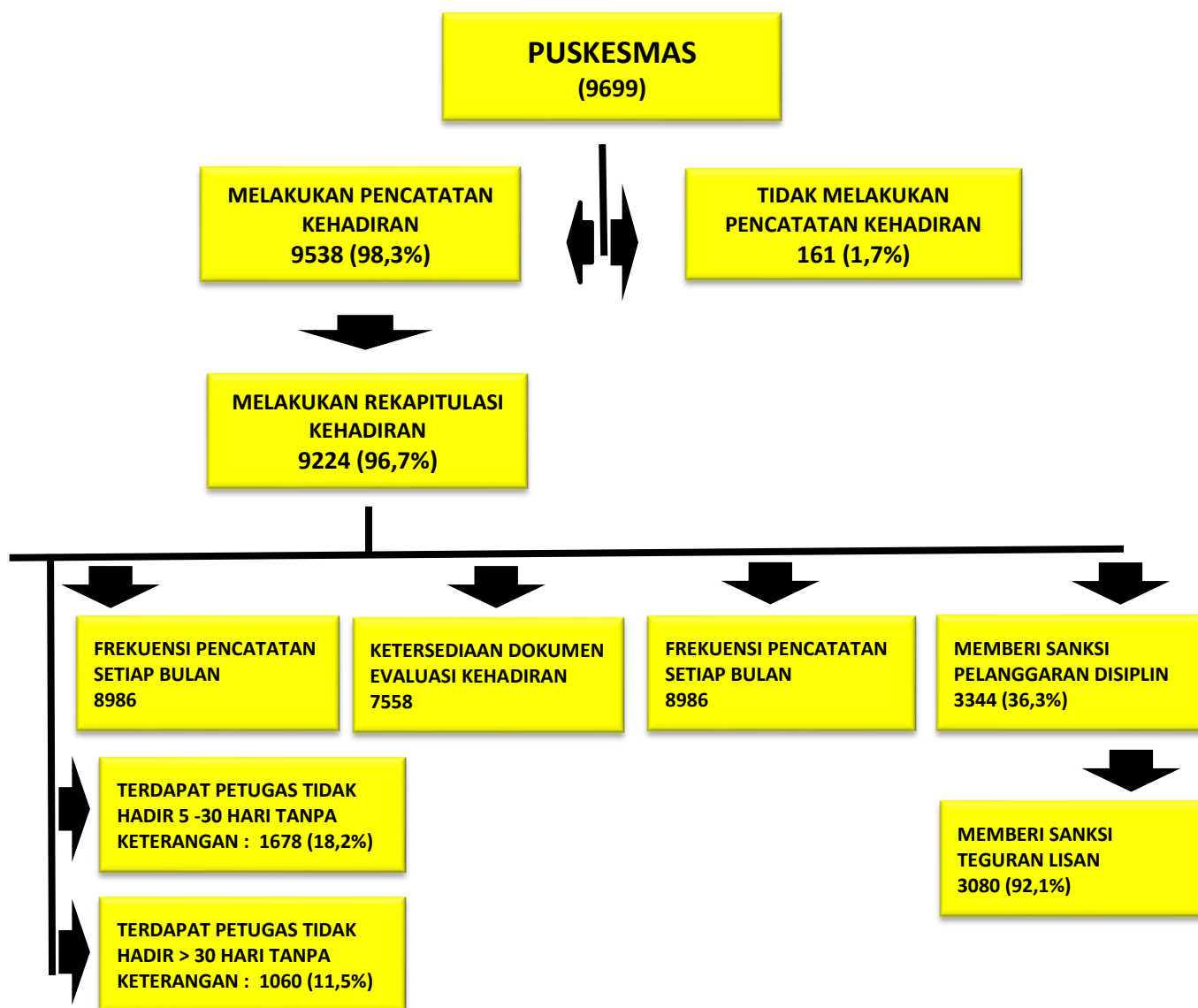
Tabel 4.7.
Distribusi puskesmas berdasarkan jenis perubahan positif yang didapatkan dari pengajuan
kebutuhan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jenis perubahan positif yang didapatkan											
			Tenaga		Anggaran		Pelatihan		Pendidikan		Sarpras		Lainnya	
			N	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	210	96	45.7	115	54.8	111	52.9	71	33.8	126	60	2	1.0
2	Sumatera Utara	351	138	39.3	155	44.2	147	41.9	95	27.1	178	50.7	5	1.4
3	Sumatera Barat	233	81	34.8	154	66.1	122	52.4	121	51.9	161	69.1	3	1.3
4	Riau	164	58	35.4	85	51.8	79	48.2	78	47.6	84	51.2	4	2.4
5	Jambi	142	52	36.6	90	63.4	69	48.6	56	39.4	77	54.2	7	4.9
6	Sumatera Selatan	291	115	39.5	170	58.4	127	43.6	123	42.3	183	62.9	2	0.7
7	Bengkulu	137	28	20.4	58	42.3	47	34.3	38	27.7	75	54.7	4	2.9
8	Lampung	262	93	35.5	160	61.1	135	51.5	119	45.4	178	67.9	3	1.1
9	Kep. Bangka Belitung	60	32	53.3	42	70	29	48.3	29	48.3	48	80	1	1.7
10	Kep. Riau	64	28	43.8	38	59.4	34	53.1	21	32.8	42	65.6	4	6.2
11	DKI Jakarta	151	109	72.2	96	63.6	98	64.9	84	55.6	105	69.5	2	1.3
12	Jawa Barat	978	462	47.2	721	73.7	594	60.7	437	44.7	724	74.0	20	2.0
13	Jawa Tengah	835	420	50.3	584	69.9	509	61.0	335	40.1	580	69.5	27	3.2
14	DI Yogyakarta	121	56	46.3	83	68.6	108	89.3	86	71.1	104	86.0	10	8.3
15	Jawa Timur	914	392	42.9	602	65.9	511	55.9	313	34.2	681	74.5	23	2.5
16	Banten	202	125	61.9	164	81.2	126	62.4	84	41.6	163	80.7	9	4.5
17	Bali	120	58	48.3	97	80.8	70	58.3	60	50	104	86.7	4	3.3
18	Nusa Tenggara Barat	141	78	55.3	95	67.4	67	47.5	65	46.1	92	65.2	6	4.3
19	Nusa Tenggara Timur	239	115	48.1	174	72.8	104	43.5	124	51.9	159	66.5	5	2.1
20	Kalimantan Barat	196	82	41.8	132	67.3	72	36.7	98	50	124	63.3	0	0
21	Kalimantan Tengah	156	83	53.2	105	67.3	69	44.2	90	57.7	108	69.2	1	0.6
22	Kalimantan Selatan	201	103	51.2	125	62.2	86	42.8	89	44.3	140	69.7	10	5.0
23	Kalimantan Timur	138	68	49.3	81	58.7	57	41.3	53	38.4	72	52.2	4	2.9
24	Kalimantan Utara	36	15	41.7	16	44.4	8	22.2	9	25	20	55.6	4	11.
25	Sulawesi Utara	129	48	37.2	71	55.0	48	37.2	39	30.2	63	48.9	4	3.1
26	Sulawesi Tengah	146	63	43.2	82	56.2	49	33.6	51	34.9	71	48.6	1	0.7
27	Sulawesi Selatan	396	178	44.9	253	63.9	155	39.1	108	27.3	250	63.1	7	1.8
28	Sulawesi Tenggara	183	84	45.9	101	55.2	75	41.0	52	28.4	94	51.4	2	1.1
29	Gorontalo	86	40	46.5	59	68.6	48	55.8	35	40.7	52	60.5	1	1.2
30	Sulawesi Barat	72	38	52.8	37	51.4	31	43.1	19	26.4	45	62.5	0	0
31	Maluku	100	46	46	59	59	44	44	40	40	48	48	2	2
32	Maluku Utara	62	24	38.7	31	50	14	22.6	7	11.3	30	48.4	0	0
33	Papua Barat	84	28	33.3	25	29.8	24	28.6	21	25	24	28.6	0	0
34	Papua	139	73	52.5	72	51.8	42	30.2	59	42.4	63	45.3	1	0.7
INDONESIA		7739	3.509	45.3	4.932	63.7	3.909	50.5	3.109	40.2	5.068	65.5	178	2.3

Keterangan : Dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan (N=7739)

4.2 Pengelolaan Ketenagaan

Kehadiran petugas di puskesmas menjadi hal yang penting. Dari data Risnakes 2017 diketahui bahwa puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran sebanyak 98,3%. Dari puskesmas yang mencatat kehadiran tersebut 96,7% nya membuat rekap kehadiran. Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual (58,1%), elektrik (7,4%) dan kombinasi manual dan elektrik (32,9%). Sebanyak 36,3% puskesmas dari puskesmas yang melakukan rekapitulasi kehadiran, memberi sanksi pelanggaran disiplin, dengan bentuk sanksi terbanyak berupa teguran lisan.



Skema 4.1.

Alur Hasil Risnakes 2017: Kehadiran pegawai puskesmas, Risnakes 2017

Secara nasional sebanyak 73,6% puskesmas memiliki data tenaga kesehatan dalam wilayah kerjanya. Rerata jumlah tenaga kesehatan di puskesmas sebanyak 42,73 orang. Provinsi NTB memiliki rerata tenaga kesehatan terbanyak yakni 67,81 orang. Sementara Provinsi Papua Barat memiliki rerata tenaga kesehatan paling sedikit yakni 25,79 orang. Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa rerata pegawai tetap (PNS dan CPNS) pensiun, keluar, meninggal, tidak mampu bekerja, dipecat atau keluar per puskesmas sebanyak 1,81 orang per puskesmas sejak tahun 2014, dengan rerata tertinggi pada Provinsi Kalimantan Utara (3,13 orang per puskesmas) sementara terendah adalah Provinsi Papua sebanyak 1,08 orang per

puskesmas. Rerata jumlah pegawai tetap (PNS/CPNS) baru sejak tahun 2014 sebanyak 3,15 orang per puskesmas dengan provinsi tertinggi yakni Kalimantan Utara (6,07 orang per puskesmas) dan provinsi terendah yakni Papua (1,99 orang per puskesmas). Rerata pegawai tidak tetap (non PNS/CPNS) yang pensiun, keluar, meninggal, tidak mampu bekerja atau keluar per puskesmas sebanyak 0,98 orang per puskesmas sejak tahun 2014, dengan provinsi tertinggi adalah NTB sebanyak 2,53 orang per puskesmas dan terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 0,27 orang per puskesmas. Rerata jumlah pegawai tidak tetap (Non PNS/CPNS) baru sejak tahun 2014 sebanyak 7,55 orang per puskesmas dengan provinsi tertinggi yakni NTB (19,02 orang per puskesmas) dan terendah yakni Sulawesi Utara (3,34 orang per puskesmas).

Tabel 4.8.

Distribusi puskesmas berdasarkan pencatatan kehadiran tenaga puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas melakukan pencatatan kehadiran			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	334	98,2	6	1,8
2	Sumatera Utara	571	566	99,1	5	0,9
3	Sumatera Barat	264	264	100,0	0	0,0
4	Riau	212	211	99,5	1	0,5
5	Jambi	176	175	99,4	1	0,6
6	Sumatera Selatan	322	317	98,4	5	1,6
7	Bengkulu	179	176	98,3	3	1,7
8	Lampung	291	288	99,0	3	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	62	62	100,0	0	0,0
10	Kep. Riau	72	72	100,0	0	0,0
11	DKI Jakarta	314	312	99,4	2	0,6
12	Jawa Barat	1.050	1.043	99,3	7	0,7
13	Jawa Tengah	875	872	99,7	3	0,3
14	DI Yogyakarta	121	120	99,2	1	0,8
15	Jawa Timur	960	956	99,6	4	0,4
16	Banten	233	232	99,6	1	0,4
17	Bali	120	120	100,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	157	99,4	1	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	371	369	99,5	2	0,5
20	Kalimantan Barat	238	235	98,7	3	1,3
21	Kalimantan Tengah	195	194	99,5	1	0,5
22	Kalimantan Selatan	230	230	100,0	0	0,0
23	Kalimantan Timur	174	174	100,0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	46	46	100,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	186	185	99,5	1	0,5
26	Sulawesi Tengah	189	185	97,9	4	2,1
27	Sulawesi Selatan	448	446	99,6	2	0,4
28	Sulawesi Tenggara	268	264	98,5	4	1,5
29	Gorontalo	93	93	100,0	0	0,0
30	Sulawesi Barat	94	92	97,9	2	2,1
31	Maluku	198	187	94,4	11	5,6
32	Maluku Utara	127	125	98,4	2	1,6
33	Papua Barat	150	131	87,3	19	12,7
34	Papua	372	305	82,0	67	18,0
INDONESIA		9.699	9.538	98,3	161	1,7

Tabel 4.9.
Distribusi puskesmas berdasarkan jenis pencatatan kehadiran tenaga menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jenis pencatatan kehadiran tenaga					
			Manual		Elektrik		Kombinasi keduanya	
			n	%	N	%	n	%
1	Aceh	334	265	79.3	19	5.7	50	15
2	Sumatera Utara	566	437	77.2	31	5.5	98	17.3
3	Sumatera Barat	264	118	44.7	21	8.0	125	47.3
4	Riau	211	138	65.4	20	9.5	53	25.1
5	Jambi	175	153	87.4	5	2.9	17	9.7
6	Sumatera Selatan	317	214	67.5	14	4.4	89	28.1
7	Bengkulu	176	138	78.4	13	7.4	25	14.2
8	Lampung	288	158	54.9	19	6.6	111	38.5
9	Kep. Bangka Belitung	62	27	43.5	2	3.2	33	53.2
10	Kep. Riau	72	44	61.1	2	2.8	26	36.1
11	DKI Jakarta	312	7	2.2	67	21.5	238	76.3
12	Jawa Barat	1.043	439	42.1	90	8.6	514	49.3
13	Jawa Tengah	872	408	46.8	82	9.4	382	43.8
14	DI Yogyakarta	120	38	31.7	22	18.3	60	50
15	Jawa Timur	956	453	47.4	93	9.7	410	42.9
16	Banten	232	47	20.3	9	3.9	176	75.9
17	Bali	120	66	55	12	10	42	35
18	Nusa Tenggara Barat	157	96	61.1	14	8.9	47	29.9
19	Nusa Tenggara Timur	369	286	77.5	16	4.3	67	18.2
20	Kalimantan Barat	235	160	68.1	15	6.4	60	25.5
21	Kalimantan Tengah	194	170	87.6	4	2.1	20	10.3
22	Kalimantan Selatan	230	164	71.3	10	4.3	56	24.3
23	Kalimantan Timur	174	88	50.6	21	12.1	65	37.4
24	Kalimantan Utara	46	28	60.9	1	2.2	17	37.0
25	Sulawesi Utara	185	116	62.7	18	9.7	51	27.6
26	Sulawesi Tengah	185	156	84.3	5	2.7	24	13.0
27	Sulawesi Selatan	446	216	48.4	39	8.7	191	42.8
28	Sulawesi Tenggara	264	185	70.1	17	6.4	62	23.5
29	Gorontalo	93	75	80.6	4	4.3	14	15.1
30	Sulawesi Barat	92	67	72.8	10	10.9	15	16.3
31	Maluku	187	179	95.7	2	1.1	6	3.2
32	Maluku Utara	125	122	97.6	2	1.6	1	0.8
33	Papua Barat	131	113	86.3	6	4.6	12	9.2
34	Papua	305	263	86.2	8	2.6	34	11.1
INDONESIA		9.538	5.634	59.1	713	7.5	3.191	33.5

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran (N=9538)

Tabel 4.10.

Distribusi puskesmas berdasarkan rekapitulasi kehadiran tenaga menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas melakukan rekapitulasi kehadiran			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	334	331	99,1	3	0,9
2	Sumatera Utara	566	542	95,8	24	4,2
3	Sumatera Barat	264	263	99,6	1	0,4
4	Riau	211	209	99,1	2	0,9
5	Jambi	175	172	98,3	3	1,7
6	Sumatera Selatan	317	315	99,4	2	0,6
7	Bengkulu	176	166	94,3	10	5,7
8	Lampung	288	257	89,2	31	10,8
9	Kep. Bangka Belitung	62	62	100,0	0	0,0
10	Kep. Riau	72	71	98,6	1	1,4
11	DKI Jakarta	312	303	97,1	9	2,9
12	Jawa Barat	1.043	1.019	97,7	24	2,3
13	Jawa Tengah	872	861	98,7	11	1,3
14	DI Yogyakarta	120	119	99,2	1	0,8
15	Jawa Timur	956	943	98,6	13	1,4
16	Banten	232	227	97,8	5	2,2
17	Bali	120	120	100,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	157	144	91,7	13	8,3
19	Nusa Tenggara Timur	369	362	98,1	7	1,9
20	Kalimantan Barat	235	230	97,9	5	2,1
21	Kalimantan Tengah	194	185	95,4	9	4,6
22	Kalimantan Selatan	230	230	100,0	0	0,0
23	Kalimantan Timur	174	169	97,1	5	2,9
24	Kalimantan Utara	46	45	97,8	1	2,2
25	Sulawesi Utara	185	185	100,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	185	177	95,7	8	4,3
27	Sulawesi Selatan	446	434	97,3	12	2,7
28	Sulawesi Tenggara	264	255	96,6	9	3,4
29	Gorontalo	93	92	98,9	1	1,1
30	Sulawesi Barat	92	87	94,6	5	5,4
31	Maluku	187	170	90,9	17	9,1
32	Maluku Utara	125	110	88,0	15	12,0
33	Papua Barat	131	111	84,7	20	15,3
34	Papua	305	258	84,6	47	15,4
INDONESIA		9.538	9.224	96,7	314	3,3

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran (N=9538)

Tabel 4.11.
Distribusi puskesmas berdasarkan frekuensi pencatatan kehadiran tenaga puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Frekuensi pencatatan kehadiran	
			Setiap bulan	Tidak setiap bulan
1	Aceh	331	323	8
2	Sumatera Utara	542	526	16
3	Sumatera Barat	263	260	3
4	Riau	209	209	0
5	Jambi	172	171	1
6	Sumatera Selatan	315	309	6
7	Bengkulu	166	165	1
8	Lampung	257	241	16
9	Kep. Bangka Belitung	62	59	3
10	Kep. Riau	71	71	0
11	DKI Jakarta	303	294	9
12	Jawa Barat	1.019	1.013	6
13	Jawa Tengah	861	854	7
14	DI Yogyakarta	119	116	3
15	Jawa Timur	943	923	20
16	Banten	227	226	1
17	Bali	120	103	17
18	Nusa Tenggara Barat	144	143	1
19	Nusa Tenggara Timur	362	356	6
20	Kalimantan Barat	230	223	7
21	Kalimantan Tengah	185	181	4
22	Kalimantan Selatan	230	230	0
23	Kalimantan Timur	169	162	7
24	Kalimantan Utara	45	44	1
25	Sulawesi Utara	185	182	3
26	Sulawesi Tengah	177	174	3
27	Sulawesi Selatan	434	424	10
28	Sulawesi Tenggara	255	249	6
29	Gorontalo	92	92	0
30	Sulawesi Barat	87	83	4
31	Maluku	170	160	10
32	Maluku Utara	110	105	5
33	Papua Barat	111	98	13
34	Papua	258	217	41
INDONESIA		9.224	8.986	238

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran dan melakukan rekapitulasi kehadiran (N=9224)

Tabel 4.12.
Distribusi puskesmas berdasarkan ketersediaan evaluasi kehadiran tenaga menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Evaluasi Kehadiran Tenaga		
			Ya, Ada Dokumen	Ya, Tidak ada dokumen	Tidak ada
1	Aceh	331	275	49	7
2	Sumatera Utara	542	379	140	23
3	Sumatera Barat	263	232	27	4
4	Riau	209	175	27	7
5	Jambi	172	159	8	5
6	Sumatera Selatan	315	262	47	6
7	Bengkulu	166	139	21	6
8	Lampung	257	198	43	16
9	Kep. Bangka Belitung	62	49	5	8
10	Kep. Riau	71	61	6	4
11	DKI Jakarta	303	261	33	9
12	Jawa Barat	1019	904	95	20
13	Jawa Tengah	861	734	101	26
14	DI Yogyakarta	119	100	16	3
15	Jawa Timur	943	805	90	48
16	Banten	227	200	23	4
17	Bali	120	106	11	3
18	Nusa Tenggara Barat	144	129	8	7
19	Nusa Tenggara Timur	362	280	69	13
20	Kalimantan Barat	230	185	31	14
21	Kalimantan Tengah	185	138	31	16
22	Kalimantan Selatan	230	192	26	12
23	Kalimantan Timur	169	135	28	6
24	Kalimantan Utara	45	36	6	3
25	Sulawesi Utara	185	168	15	2
26	Sulawesi Tengah	177	113	50	14
27	Sulawesi Selatan	434	361	60	13
28	Sulawesi Tenggara	255	203	48	4
29	Gorontalo	92	81	8	3
30	Sulawesi Barat	87	70	14	3
31	Maluku	170	106	51	13
32	Maluku Utara	110	77	26	7
33	Papua Barat	111	76	28	7
34	Papua	258	169	63	26
INDONESIA		9224	7.558	1.304	362

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran dan melakukan rekapitulasi kehadiran (N=9224)

Tabel 4.13.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas tidak masuk kerja tanpa keterangan 5-30 hari kerja pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dengan petugas tidak masuk kerja 5-30 hari	
			n	%
1	Aceh	331	91	27.5
2	Sumatera Utara	542	106	19.6
3	Sumatera Barat	263	37	14.1
4	Riau	209	40	19.1
5	Jambi	172	31	18.0
6	Sumatera Selatan	315	55	17.5
7	Bengkulu	166	27	16.3
8	Lampung	257	31	12.1
9	Kep. Bangka Belitung	62	6	9.7
10	Kep. Riau	71	11	15.5
11	DKI Jakarta	303	15	5.0
12	Jawa Barat	1.019	114	11.2
13	Jawa Tengah	861	64	7.4
14	DI Yogyakarta	119	4	3.4
15	Jawa Timur	943	76	8.1
16	Banten	227	24	10.6
17	Bali	120	5	4.2
18	Nusa Tenggara Barat	144	27	18.8
19	Nusa Tenggara Timur	362	138	38.1
20	Kalimantan Barat	230	66	28.7
21	Kalimantan Tengah	185	49	26.5
22	Kalimantan Selatan	230	14	6.1
23	Kalimantan Timur	169	35	20.7
24	Kalimantan Utara	45	15	33.3
25	Sulawesi Utara	185	43	23.2
26	Sulawesi Tengah	177	47	26.6
27	Sulawesi Selatan	434	79	18.2
28	Sulawesi Tenggara	255	73	28.6
29	Gorontalo	92	14	15.2
30	Sulawesi Barat	87	24	27.6
31	Maluku	170	66	38.8
32	Maluku Utara	110	46	41.8
33	Papua Barat	111	62	55.9
34	Papua	258	143	55.4
INDONESIA		9.224	1.678	18.2

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran dan melakukan rekapitulasi kehadiran (N=9224)

Tabel 4.14.
Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas tidak masuk kerja tanpa keterangan >30 hari kerja tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dengan petugas tidak masuk kerja > 30 hari	
			n	%
1	Aceh	331	56	16.9
2	Sumatera Utara	542	61	11.3
3	Sumatera Barat	263	23	8.7
4	Riau	209	24	11.5
5	Jambi	172	13	7.6
6	Sumatera Selatan	315	28	8.9
7	Bengkulu	166	13	7.8
8	Lampung	257	18	7.0
9	Kep. Bangka Belitung	62	2	3.2
10	Kep. Riau	71	10	14.1
11	DKI Jakarta	303	9	3.0
12	Jawa Barat	1.019	66	6,5
13	Jawa Tengah	861	37	4.3
14	DI Yogyakarta	119	0	0
15	Jawa Timur	943	53	5.6
16	Banten	227	9	4.0
17	Bali	120	6	5
18	Nusa Tenggara Barat	144	11	7.6
19	Nusa Tenggara Timur	362	73	20.2
20	Kalimantan Barat	230	40	17.4
21	Kalimantan Tengah	185	30	16.2
22	Kalimantan Selatan	230	10	4.3
23	Kalimantan Timur	169	23	13.6
24	Kalimantan Utara	45	10	22.2
25	Sulawesi Utara	185	24	13.0
26	Sulawesi Tengah	177	30	16.9
27	Sulawesi Selatan	434	51	11.8
28	Sulawesi Tenggara	255	48	18.8
29	Gorontalo	92	19	20.7
30	Sulawesi Barat	87	11	12.6
31	Maluku	170	41	24.1
32	Maluku Utara	110	25	22.7
33	Papua Barat	111	54	48.6
34	Papua	258	132	51.2
INDONESIA		9.224	1.060	11.5

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran dan melakukan rekapitulasi kehadiran (N=9224)

Tabel 4.15.
Distribusi puskesmas berdasarkan sanksi pelanggaran disiplin kehadiran petugas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas pernah memberi sanksi pelanggaran disiplin					
			Ya		Tidak		Tidak ada pelanggaran	
			n	%	N	%	n	%
1	Aceh	331	190	57,4	104	31,4	37	11,2
2	Sumatera Utara	542	237	43,7	177	32,7	128	23,6
3	Sumatera Barat	263	122	46,4	76	28,9	65	24,7
4	Riau	209	113	54,1	53	25,4	43	20,6
5	Jambi	172	60	34,9	56	32,6	56	32,6
6	Sumatera Selatan	315	97	30,8	115	36,5	103	32,7
7	Bengkulu	166	46	27,7	67	40,4	53	31,9
8	Lampung	257	104	40,5	83	32,3	70	27,2
9	Kep. Bangka Belitung	62	25	40,3	23	37,1	14	22,6
10	Kep. Riau	71	24	33,8	19	26,8	28	39,4
11	DKI Jakarta	303	51	16,8	97	32,0	155	51,2
12	Jawa Barat	1019	282	27,7	354	34,7	383	37,6
13	Jawa Tengah	861	188	21,8	348	40,4	325	37,7
14	DI Yogyakarta	119	38	31,9	40	33,6	41	34,5
15	Jawa Timur	943	270	28,6	305	32,3	368	39,0
16	Banten	227	80	35,2	66	29,1	81	35,7
17	Bali	120	20	16,7	30	25,0	70	58,3
18	Nusa Tenggara Barat	144	59	41,0	57	39,6	28	19,4
19	Nusa Tenggara Timur	362	180	49,7	112	30,9	70	19,3
20	Kalimantan Barat	230	106	46,1	72	31,3	52	22,6
21	Kalimantan Tengah	185	68	36,8	74	40,0	43	23,2
22	Kalimantan Selatan	230	49	21,3	76	33,0	105	45,7
23	Kalimantan Timur	169	65	38,5	45	26,6	59	34,9
24	Kalimantan Utara	45	28	62,2	11	24,4	6	13,3
25	Sulawesi Utara	185	86	46,5	70	37,8	29	15,7
26	Sulawesi Tengah	177	80	45,2	59	33,3	38	21,5
27	Sulawesi Selatan	434	153	35,3	153	35,3	128	29,5
28	Sulawesi Tenggara	255	83	32,5	106	41,6	66	25,9
29	Gorontalo	92	45	48,9	28	30,4	19	20,7
30	Sulawesi Barat	87	42	48,3	31	35,6	14	16,1
31	Maluku	170	90	52,9	46	27,1	34	20,0
32	Maluku Utara	110	55	50,0	34	30,9	21	19,1
33	Papua Barat	111	74	66,7	29	26,1	8	7,2
34	Papua	258	134	51,9	87	33,7	37	14,3
INDONESIA		9.224	3.344	36,3	3.103	33,6	2.777	30,1

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran dan melakukan rekapitulasi kehadiran (N=9224)

Tabel 4.16.

**Distribusi puskesmas berdasarkan jenis sanksi terhadap pelanggaran disiplin kehadiran petugas
pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jenis Sanksi											
			Teguran lisan		Teguran tertulis		Penundaan Kenaikan Pangkat		Pemutusan Hubungan Kerja		Penundaan Kenaikan Gaji berkala		Lainnya	
			n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	190	182	95.8	115	60.5	7	3.7	7	3.7	9	4.7	17	8.9
2	Sumatera Utara	237	203	85.7	135	57.0	10	4.2	3	1.3	3	1.3	19	8.0
3	Sumatera Barat	122	113	92.6	63	51.6	10	8.2	4	3.3	4	3.3	11	9.0
4	Riau	113	106	93.8	67	59.3	5	4.4	7	6.2	8	7.1	11	9.7
5	Jambi	60	57	95	40	66.7	2	3.3	7	11.7	1	1.7	7	11.7
6	Sumatera Selatan	97	83	85.6	60	61.9	1	1.0	6	6.2	2	2.1	5	5.2
7	Bengkulu	46	45	97.8	24	52.2	4	8.7	0	0	2	4.3	1	2.2
8	Lampung	104	98	94.3	43	41.3	3	2.9	3	2.9	3	2.9	11	10.6
9	Kep. Bangka Belitung	25	25	100	14	56	1	4	1	4	0	0	0	0
10	Kep. Riau	24	23	95.8	15	62.5	2	8.3	2	8.3	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	51	46	90.2	27	52.9	1	2.0	9	17.6	3	5.9	5	9.8
12	Jawa Barat	282	259	91.8	101	35.8	7	2.5	4	1.4	9	3.2	35	12.4
13	Jawa Tengah	188	176	93.6	58	30.9	9	4.8	9	4.8	5	2.7	16	8.5
14	DI Yogyakarta	38	27	71.1	9	23.7	0	0	1	2.6	0	0	9	23.7
15	Jawa Timur	270	238	88.1	111	41.1	11	4.1	9	3.3	9	3.3	31	11.5
16	Banten	80	69	86.3	36	45	4	5	4	5	1	1.3	8	10
17	Bali	20	20	100	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	59	56	94.9	23	39.0	2	3.4	1	1.7	1	1.7	4	6.8
19	Nusa Tenggara Timur	180	173	96.1	132	73.3	5	2.8	8	4.4	1	0.6	19	10.6
20	Kalimantan Barat	106	103	97.2	60	56.6	13	12.3	7	6.6	8	7.5	7	6.6
21	Kalimantan Tengah	68	64	94.1	49	72.1	5	7.4	5	7.4	7	10.3	7	10.3
22	Kalimantan Selatan	49	46	93.9	17	34.7	0	0	1	2.0	0	0	2	4.1
23	Kalimantan Timur	65	52	80	36	55.4	1	1.5	12	18.5	0	0	5	7.7
24	Kalimantan Utara	28	25	89.3	19	67.9	5	17.9	3	10.7	3	10.7	4	14.3
25	Sulawesi Utara	86	82	95.3	51	59.3	10	11.6	3	3.5	6	7.0	3	3.5
26	Sulawesi Tengah	80	76	95	43	53.8	3	3.8	4	5	4	5	4	5
27	Sulawesi Selatan	153	143	93.5	75	49.0	12	7.8	5	3.3	9	5.9	9	5.9
28	Sulawesi Tenggara	83	76	91.6	37	44.6	2	2.4	0	0	2	2.4	5	6.0
29	Gorontalo	45	43	95.6	23	51.1	1	2.2	3	6.7	1	2.2	8	17.8
30	Sulawesi Barat	42	40	95.2	22	52.4	3	7.1	1	2.4	1	2.4	1	2.4
31	Maluku	90	86	95.6	52	57.8	6	6.7	5	5.6	5	5.6	17	18.9
32	Maluku Utara	55	49	89.1	31	56.4	3	5.4	4	7.3	0	0	3	5.5
33	Papua Barat	74	70	94.6	40	54.1	7	9.5	5	6.8	11	14.9	5	6.8
34	Papua	134	126	94.02	67	50	11	8.2	6	4.5	15	11.2	19	14.2
INDONESIA		3344	3080	92.1	1699	50.8	166	5.0	149	4.5	133	4.0	308	9.2

Keterangan : Berdasarkan puskesmas yang melakukan pencatatan kehadiran, melakukan rekapitulasi kehadiran dan memberi sanksi pelanggaran disiplin kehadiran (N=3344)

Tabel 4.17.
Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan data jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas memiliki data tenaga kesehatan di wilayah kerja			
			Ya, memiliki		Tidak memiliki	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	252	74,1	88	25,9
2	Sumatera Utara	571	466	81,6	105	18,4
3	Sumatera Barat	264	200	75,8	64	24,2
4	Riau	212	196	92,5	16	7,5
5	Jambi	176	136	77,3	40	22,7
6	Sumatera Selatan	322	265	82,3	57	17,7
7	Bengkulu	179	126	70,4	53	29,6
8	Lampung	291	222	76,3	69	23,7
9	Kep. Bangka Belitung	62	54	87,1	8	12,9
10	Kep. Riau	72	56	77,8	16	22,2
11	DKI Jakarta	314	156	49,7	158	50,3
12	Jawa Barat	1.050	792	75,4	258	24,6
13	Jawa Tengah	875	586	67,0	289	33,0
14	DI Yogyakarta	121	46	38,0	75	62,0
15	Jawa Timur	960	761	79,3	199	20,7
16	Banten	233	154	66,1	79	33,9
17	Bali	120	70	58,3	50	41,7
18	Nusa Tenggara Barat	158	86	54,4	72	45,6
19	Nusa Tenggara Timur	371	332	89,5	39	10,5
20	Kalimantan Barat	238	185	77,7	53	22,3
21	Kalimantan Tengah	195	183	93,8	12	6,2
22	Kalimantan Selatan	230	175	76,1	55	23,9
23	Kalimantan Timur	174	116	66,7	58	33,3
24	Kalimantan Utara	46	37	80,4	9	19,6
25	Sulawesi Utara	186	128	68,8	58	31,2
26	Sulawesi Tengah	189	181	95,8	8	4,2
27	Sulawesi Selatan	448	231	51,6	217	48,4
28	Sulawesi Tenggara	268	235	87,7	33	12,3
29	Gorontalo	93	46	49,5	47	50,5
30	Sulawesi Barat	94	91	96,8	3	3,2
31	Maluku	198	137	69,2	61	30,8
32	Maluku Utara	127	90	70,9	37	29,1
33	Papua Barat	150	117	78,0	33	22,0
34	Papua	372	233	62,6	139	37,4
INDONESIA		9.699	7.141	73,6	2.558	26,4

Tabel 4.18.
Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan data jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja
menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Puskesmas memiliki data tenaga kesehatan di wilayah kerja			
		Ya, memiliki		Tidak memiliki	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	2.815	75,6	907	24,4
Non Rawat Inap	5.977	4.326	72,4	1.651	27,6
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	2.083	66,7	1.039	33,30
Perdesaan	4.813	3.655	75,9	1.158	24,10
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.403	79,5	361	20,50
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	1.738	68,4	802	31,6
Non BLUD	7.159	5.403	75,5	1.756	24,5
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	1.612	67,9	763	32,1
Tidak	7.324	5.529	75,5	1.795	24,5

Tabel 4.19.

Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas		
			Min	Maks	Rerata
1	Aceh	340	2	194	61,84
2	Sumatera Utara	571	2	98	47,63
3	Sumatera Barat	264	1	98	46,11
4	Riau	212	1	97	51,59
5	Jambi	176	4	97	52,16
6	Sumatera Selatan	322	3	98	53,24
7	Bengkulu	179	1	89	37,66
8	Lampung	291	1	97	44,71
9	Kep. Bangka Belitung	62	3	75	43,9
10	Kep. Riau	72	13	123	46,16
11	DKI Jakarta	314	1	194	26,93
12	Jawa Barat	1.050	1	98	35,52
13	Jawa Tengah	875	1	98	38,05
14	DI Yogyakarta	121	2	185	34,89
15	Jawa Timur	960	1	166	43,95
16	Banten	233	1	139	37,92
17	Bali	120	10	207	50,81
18	Nusa Tenggara Barat	158	10	98	67,81
19	Nusa Tenggara Timur	371	1	128	46,91
20	Kalimantan Barat	238	2	97	42,06
21	Kalimantan Tengah	195	1	90	38,35
22	Kalimantan Selatan	230	2	97	43,09
23	Kalimantan Timur	174	1	94	39,96
24	Kalimantan Utara	46	1	91	48,03
25	Sulawesi Utara	186	2	90	27,07
26	Sulawesi Tengah	189	2	97	50,71
27	Sulawesi Selatan	448	1	119	53,38
28	Sulawesi Tenggara	268	3	98	50,27
29	Gorontalo	93	4	82	32,78
30	Sulawesi Barat	94	1	97	51,05
31	Maluku	198	1	98	26,62
32	Maluku Utara	127	8	92	35,06
33	Papua Barat	150	1	97	25,79
34	Papua	372	1	96	26,27
INDONESIA		9.699	1	207	42,73

Tabel 4.20.
Distribusi puskesmas berdasarkan mutasi pegawai tetap (PNS dan CPNS) sejak tahun 2014
menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Rerata pegawai pensiun, keluar, meninggal, tidak mampu bekerja, dipecat atau keluar per puskesmas	Jumlah pegawai baru
				Rerata/pkm
1	Aceh	340	1,83	3,29
2	Sumatera Utara	571	2,12	3,78
3	Sumatera Barat	264	2,40	3,74
4	Riau	212	1,59	3,24
5	Jambi	176	1,74	3,12
6	Sumatera Selatan	322	2,06	4,22
7	Bengkulu	179	1,93	4,06
8	Lampung	291	1,21	4,46
9	Kep. Bangka Belitung	62	1,97	5,55
10	Kep. Riau	72	2,11	5,61
11	DKI Jakarta	314	1,74	2,08
12	Jawa Barat	1.050	1,53	2,11
13	Jawa Tengah	875	1,81	2,86
14	DI Yogyakarta	121	2,84	2,49
15	Jawa Timur	960	1,99	2,34
16	Banten	233	2,03	2,47
17	Bali	120	1,78	3,13
18	Nusa Tenggara Barat	158	2,47	3,94
19	Nusa Tenggara Timur	371	1,51	3,80
20	Kalimantan Barat	238	1,61	4,01
21	Kalimantan Tengah	195	1,62	3,78
22	Kalimantan Selatan	230	2,75	3,38
23	Kalimantan Timur	174	1,73	2,97
24	Kalimantan Utara	46	3,13	6,07
25	Sulawesi Utara	186	1,77	3,50
26	Sulawesi Tengah	189	1,42	2,91
27	Sulawesi Selatan	448	2,17	3,64
28	Sulawesi Tenggara	268	1,59	3,47
29	Gorontalo	93	1,42	4,02
30	Sulawesi Barat	94	1,53	4,46
31	Maluku	198	1,29	2,21
32	Maluku Utara	127	2,39	4,12
33	Papua Barat	150	1,17	3,32
34	Papua	372	1,08	1,99
INDONESIA		9.699	1,81	3,15

Tabel 4.21.

Distribusi puskesmas berdasarkan mutasi pegawai tidak tetap (selain PNS dan CPNS) sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Rerata jumlah pegawai pensiun, keluar, meninggal, tidak mampu bekerja, dipecat atau keluar per puskesmas	Rerata jumlah pegawai baru per puskesmas
1	Aceh	340	1,22	10,73
2	Sumatera Utara	571	0,6	6,01
3	Sumatera Barat	264	1,35	8
4	Riau	212	0,78	5,37
5	Jambi	176	1,16	7,99
6	Sumatera Selatan	322	1,4	9,86
7	Bengkulu	179	1,01	5,31
8	Lampung	291	0,7	7,56
9	Kep. Bangka Belitung	62	0,66	7,4
10	Kep. Riau	72	1,17	7,85
11	DKI Jakarta	314	0,81	8,93
12	Jawa Barat	1.050	0,68	4,99
13	Jawa Tengah	875	0,32	5,66
14	DI Yogyakarta	121	0,5	6,55
15	Jawa Timur	960	0,84	5,5
16	Banten	233	1,09	7,68
17	Bali	120	0,46	7,48
18	Nusa Tenggara Barat	158	2,53	19,02
19	Nusa Tenggara Timur	371	1,37	10,94
20	Kalimantan Barat	238	1,1	6,46
21	Kalimantan Tengah	195	0,83	6,72
22	Kalimantan Selatan	230	1,31	9,16
23	Kalimantan Timur	174	1,54	6,16
24	Kalimantan Utara	46	1,41	11,26
25	Sulawesi Utara	186	0,27	3,34
26	Sulawesi Tengah	189	1,47	9,13
27	Sulawesi Selatan	448	2,14	14,27
28	Sulawesi Tenggara	268	1,59	11,77
29	Gorontalo	93	0,82	8,14
30	Sulawesi Barat	94	1,93	14,85
31	Maluku	198	0,67	5,78
32	Maluku Utara	127	1,44	9,3
33	Papua Barat	150	0,8	6,38
34	Papua	372	0,59	4,02
INDONESIA		9699	0,98	7,55

Tabel 4.22.
Rerata jumlah pegawai tetap (PNS dan CPNS) dan tidak tetap (selain PNS dan CPNS) puskesmas
yang akan pensiun tahun 2018 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Rerata jumlah pegawai tetap yang akan pensiun tahun 2018 per puskesmas	Jumlah pegawai tidak tetap yang akan pensiun tahun 2018
1	Aceh	340	0,21	0,05
2	Sumatera Utara	571	0,39	0,19
3	Sumatera Barat	264	0,29	0,08
4	Riau	212	0,22	0,05
5	Jambi	176	0,15	0,01
6	Sumatera Selatan	322	0,34	0,03
7	Bengkulu	179	0,12	0,05
8	Lampung	291	0,21	0,09
9	Kep. Bangka Belitung	62	0,42	0,16
10	Kep. Riau	72	0,39	0,03
11	DKI Jakarta	314	0,77	0,06
12	Jawa Barat	1.050	0,43	0,04
13	Jawa Tengah	875	0,53	0,19
14	DI Yogyakarta	121	0,94	0,06
15	Jawa Timur	960	0,79	0,52
16	Banten	233	0,34	0
17	Bali	120	0,62	0,02
18	Nusa Tenggara Barat	158	0,25	0
19	Nusa Tenggara Timur	371	0,26	0,18
20	Kalimantan Barat	238	0,29	0,03
21	Kalimantan Tengah	195	0,26	0,11
22	Kalimantan Selatan	230	0,19	0,03
23	Kalimantan Timur	174	0,22	0,01
24	Kalimantan Utara	46	0,09	0
25	Sulawesi Utara	186	0,31	0,11
26	Sulawesi Tengah	189	0,18	0,02
27	Sulawesi Selatan	448	0,29	0,04
28	Sulawesi Tenggara	268	0,12	0,03
29	Gorontalo	93	0,03	0
30	Sulawesi Barat	94	0,26	0,13
31	Maluku	198	0,16	0,02
32	Maluku Utara	127	0,09	0
33	Papua Barat	150	0,13	0,19
34	Papua	372	0,35	0,07
INDONESIA		9.699	0,38	0,12

4.3 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri (dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian atau Lembaga Pemerintah lainnya, dan atau Rumah sakit sendiri) serta meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai. Sementara

Ijin belajar adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan puskesmas untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai tenaga kesehatan di puskesmas.

Berdasarkan hasil Risnakes 2017 diketahui bahwa puskesmas yang merencanakan kebutuhan tugas belajar (24,5%) lebih sedikit dari yang tidak merencanakan kebutuhan tugas belajar (75,5%). Sebanyak 64,1% puskesmas yang membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar menyatakan menerima manfaat dari tugas belajar. Jumlah puskesmas dengan SDM yang akan melaksanakan tugas belajar pada tahun 2018 sebanyak 1.426 puskesmas dari total sampel puskesmas 9.699. Rerata jumlah SDM per puskesmas yang tugas belajar sebanyak 1,68 orang/puskesmas, terbanyak terdapat di provinsi Maluku (3,32 orang/puskesmas). Jumlah tenaga kesehatan puskesmas yang mengikuti tugas belajar dari tahun 2014 sampai dengan saat pengumpulan data Risnakes 2017 untuk tenaga kesehatan adalah sebagai berikut : tugas belajar spesialis 992 orang, S3 39 orang, S2 1.594 orang, S1 10.799 orang, DIV 5.139 orang dan DIII 8.096 orang. Tenaga non tenaga kesehatan yang mengikuti tugas belajar S3 14 orang, S2 111 orang, S1 1.209 orang, DIV 134 orang dan DIII 373 orang. Tugas belajar spesialis terbanyak dari perkotaan sebanyak 372 tenaga kesehatan.

Jumlah pegawai yang mengikuti ijin belajar dari tahun 2014 sampai dengan sekarang untuk tenaga kesehatan adalah sbb: tugas belajar spesialis 248 orang, S3 23 orang, S2 1.136 orang, S1 9.401 orang, DIV 4.610 orang dan DIII 5.811 orang. Tenaga non tenaga kesehatan yang mengikuti tugas belajar sbb: S3 6 orang, S2 89 orang, S1 1.120 orang, DIV 120 orang dan DIII 240 orang. Tugas belajar spesialis terbanyak dari perdesaan sebanyak 128 tenaga kesehatan.

Sumber pendanaan tugas belajar bisa berasal dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan lainnya (swasta, yayasan atau donor lain). Sumber pendanaan dari Kemenkes terbanyak untuk tugas belajar tenaga spesialis (304 orang) dan DIII kesehatan (213 orang), sementara untuk non tenaga kesehatan terbanyak DIII (7 orang). Pendanaan terbanyak untuk tenaga dari puskesmas perdesaan (145 orang). Sumber pendanaan dari pemerintah daerah tenaga kesehatan terbanyak untuk tugas belajar DIII kesehatan (1.082 orang), demikian juga untuk non tenaga kesehatan terbanyak untuk tugas belajar DIII (81 orang). Sumber pendanaan lainnya untuk tenaga kesehatan terbanyak adalah tugas belajar S1 kesehatan (1.023 orang), demikian juga untuk non tenaga kesehatan terbanyak untuk tugas belajar S1 (65 orang).

Jumlah tenaga di puskesmas yang telah menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tahun 2014-2016 untuk dokter dan dokter gigi sebanyak 517 orang, tenaga kesehatan lain selain dokter dan dokter gigi sebanyak 1.488 orang dan non tenaga kesehatan sebanyak 676 orang. Dari yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut yang kembali berdinasi di puskesmas untuk dokter dan dokter gigi sebanyak 205 orang, tenaga kesehatan lain selain dokter dan dokter gigi sebanyak 1.344 orang dan non tenaga kesehatan sebanyak 660 orang.

Training analisis need dilakukan pada 40,6% puskesmas, sementara puskesmas yang membuat perencanaan anggaran pelatihan sebanyak 33,2% dan yang membuat perencanaan pegawai yang akan dilatih sebanyak 40%. Total tenaga puskesmas sebanyak 496.634 pegawai, yang mengikuti pelatihan di tahun 2015 sebanyak 9,3% PNS dan 2% non PNS.

Puskesmas melakukan pengawasan mutu tenaga kesehatan melalui inspeksi berkala kepemilikan STR/SIP (76,4%), mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya oleh pimpinan (73,3%), evaluasi kinerja secara berkala (82,3%) dan evaluasi penerapan bagi yang mengikuti diklat/seminar/workshop (terdapat dokumen 43,9% dan tanpa dokumen 40,8%).

Tabel 4.23.
Distribusi puskesmas berdasarkan pembuatan perencanaan kebutuhan tugas belajar pegawai menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	56	16,5	284	83,5
2	Sumatera Utara	571	101	17,7	470	82,3
3	Sumatera Barat	264	74	28,0	190	72,0
4	Riau	212	53	25,0	159	75,0
5	Jambi	176	48	27,3	128	72,7
6	Sumatera Selatan	322	111	34,5	211	65,5
7	Bengkulu	179	36	20,1	143	79,9
8	Lampung	291	94	32,3	197	67,7
9	Kep. Bangka Belitung	62	29	46,8	33	53,2
10	Kep. Riau	72	14	19,4	58	80,6
11	DKI Jakarta	314	52	16,6	262	83,4
12	Jawa Barat	1.050	285	27,1	765	72,9
13	Jawa Tengah	875	213	24,3	662	75,7
14	DI Yogyakarta	121	59	48,8	62	51,2
15	Jawa Timur	960	202	21,0	758	79,0
16	Banten	233	56	24,0	177	76,0
17	Bali	120	42	35,0	78	65,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	26	16,5	132	83,5
19	Nusa Tenggara Timur	371	126	34,0	245	66,0
20	Kalimantan Barat	238	73	30,7	165	69,3
21	Kalimantan Tengah	195	66	33,8	129	66,2
22	Kalimantan Selatan	230	75	32,6	155	67,4
23	Kalimantan Timur	174	48	27,6	126	72,4
24	Kalimantan Utara	46	11	23,9	35	76,1
25	Sulawesi Utara	186	39	21,0	147	79,0
26	Sulawesi Tengah	189	42	22,2	147	77,8
27	Sulawesi Selatan	448	66	14,7	382	85,3
28	Sulawesi Tenggara	268	40	14,9	228	85,1
29	Gorontalo	93	16	17,2	77	82,8
30	Sulawesi Barat	94	19	20,2	75	79,8
31	Maluku	198	57	28,8	141	71,2
32	Maluku Utara	127	21	16,5	106	83,5
33	Papua Barat	150	45	30,0	105	70,0
34	Papua	372	84	22,6	288	77,4
INDONESIA		9.699	2.379	24,5	7.320	75,5

Tabel 4.24.
Distribusi puskesmas berdasarkan pembuatan perencanaan kebutuhan tugas belajar pegawai menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Puskesmas membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	931	25,0	2.791	75,0
Non Rawat Inap	5.977	1.448	24,2	4.529	75,8
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	863	27,6	2.259	72,4
Perdesaan	4.813	1.161	24,1	3.652	75,9
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	355	20,10	1.409	79,9
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	705	27,8	1.835	72,2
Non BLUD	7.159	1.674	23,4	5.485	76,6
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	726	30,6	1.649	69,4
Tidak	7.324	1.653	22,6	5.671	77,4

Tabel 4.25.

Distribusi puskesmas berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kebutuhan tugas belajar pegawai dengan perencanaan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Pelaksanaan tugas belajar sudah sesuai dengan perencanaan			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	56	46	82,1	10	17,9
2	Sumatera Utara	101	69	68,3	32	31,7
3	Sumatera Barat	74	52	70,3	22	29,7
4	Riau	53	38	71,7	15	28,3
5	Jambi	48	37	75,5	12	24,5
6	Sumatera Selatan	111	84	75,7	27	24,3
7	Bengkulu	36	29	80,6	7	19,4
8	Lampung	94	71	75,5	23	24,5
9	Kep. Bangka Belitung	29	22	75,9	7	24,1
10	Kep. Riau	14	9	64,3	5	35,7
11	DKI Jakarta	52	41	78,8	11	21,2
12	Jawa Barat	285	213	74,7	72	25,3
13	Jawa Tengah	213	167	78,4	46	21,6
14	DI Yogyakarta	59	46	78,0	13	22,0
15	Jawa Timur	202	144	71,3	58	28,7
16	Banten	56	37	66,1	19	33,9
17	Bali	42	35	83,3	7	16,7
18	Nusa Tenggara Barat	26	18	69,2	8	30,8
19	Nusa Tenggara Timur	126	93	73,8	33	26,2
20	Kalimantan Barat	73	59	80,8	14	19,2
21	Kalimantan Tengah	66	53	80,3	13	19,7
22	Kalimantan Selatan	75	60	80,0	15	20,0
23	Kalimantan Timur	48	34	70,8	14	29,2
24	Kalimantan Utara	11	7	63,6	4	36,4
25	Sulawesi Utara	39	28	71,8	11	28,2
26	Sulawesi Tengah	42	37	88,1	5	11,9
27	Sulawesi Selatan	66	56	84,8	10	15,2
28	Sulawesi Tenggara	40	32	80,0	8	20,0
29	Gorontalo	16	13	81,2	3	18,8
30	Sulawesi Barat	19	18	94,7	1	5,3
31	Maluku	57	48	84,2	9	15,8
32	Maluku Utara	21	17	81,0	4	19,0
33	Papua Barat	45	33	73,3	12	26,7
34	Papua	84	65	77,4	19	22,6
INDONESIA		2.379	1.811	76,1	569	23,9

Keterangan : dihitung dari puskesmas yang membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar (N=2739)

Tabel 4.26.
Distribusi puskesmas berdasarkan penerimaan manfaat program tugas belajar menurut provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas menerima manfaat tugas belajar			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	56	37	66,1	19	33,9
2	Sumatera Utara	101	53	52,5	48	47,5
3	Sumatera Barat	74	46	62,2	28	37,8
4	Riau	53	28	52,8	25	47,2
5	Jambi	48	29	59,2	20	40,8
6	Sumatera Selatan	111	64	57,7	47	42,3
7	Bengkulu	36	19	52,8	17	47,2
8	Lampung	94	54	57,4	40	42,6
9	Kep. Bangka Belitung	29	13	44,8	16	55,2
10	Kep. Riau	14	9	64,3	5	35,7
11	DKI Jakarta	52	32	61,5	20	38,5
12	Jawa Barat	285	181	63,5	104	36,5
13	Jawa Tengah	213	153	71,8	60	28,2
14	DI Yogyakarta	59	41	69,5	18	30,5
15	Jawa Timur	202	120	59,4	82	40,6
16	Banten	56	28	50,0	28	50,0
17	Bali	42	37	88,1	5	11,9
18	Nusa Tenggara Barat	26	19	73,1	7	26,9
19	Nusa Tenggara Timur	126	90	71,4	36	28,6
20	Kalimantan Barat	73	55	75,3	18	24,7
21	Kalimantan Tengah	66	51	77,3	15	22,7
22	Kalimantan Selatan	75	44	58,7	31	41,3
23	Kalimantan Timur	48	29	60,4	19	39,6
24	Kalimantan Utara	11	5	45,5	6	54,5
25	Sulawesi Utara	39	22	56,4	17	43,6
26	Sulawesi Tengah	42	32	76,2	10	23,8
27	Sulawesi Selatan	66	42	63,6	24	36,4
28	Sulawesi Tenggara	40	25	62,5	15	37,5
29	Gorontalo	16	11	68,8	5	31,2
30	Sulawesi Barat	19	16	84,2	3	15,8
31	Maluku	57	37	64,9	20	35,1
32	Maluku Utara	21	14	66,7	7	33,3
33	Papua Barat	45	29	64,4	16	35,6
34	Papua	84	60	71,4	24	28,6
INDONESIA		2.379	1.525	64,1	855	35,9

Keterangan : dihitung dari puskesmas yang membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar
(N=2739)

Tabel 4.27.
Jumlah SDM Kesehatan puskesmas yang akan melaksanakan tugas belajar tahun 2018 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	N	Jumlah puskesmas dengan SDM yang akan tugas belajar		Rerata SDM yang akan tugas belajar per puskesmas
			n	%	
1	Aceh	56	31	55.4	1,75
2	Sumatera Utara	101	47	46.5	1,72
3	Sumatera Barat	74	36	48.6	1,12
4	Riau	53	32	60.4	1,36
5	Jambi	48	34	70.8	1,85
6	Sumatera Selatan	111	83	74.8	2,29
7	Bengkulu	36	24	66.7	2,89
8	Lampung	94	56	59.6	1,52
9	Kep. Bangka Belitung	29	19	65.5	2,14
10	Kep. Riau	14	10	71.4	1,43
11	DKI Jakarta	52	18	34.6	2,23
12	Jawa Barat	285	164	57.5	1,1
13	Jawa Tengah	213	109	51.2	1,19
14	DI Yogyakarta	59	31	52.5	1,22
15	Jawa Timur	202	111	55.0	1,15
16	Banten	56	23	41.1	1,25
17	Bali	42	27	64.3	2,19
18	Nusa Tenggara Barat	26	15	57.7	1,62
19	Nusa Tenggara Timur	126	103	81.7	2,37
20	Kalimantan Barat	73	46	63.0	1,99
21	Kalimantan Tengah	66	44	66.7	1,67
22	Kalimantan Selatan	75	45	60	1,96
23	Kalimantan Timur	48	29	60.4	1,44
24	Kalimantan Utara	11	7	63.6	1,36
25	Sulawesi Utara	39	23	59.0	1,56
26	Sulawesi Tengah	42	27	64.3	2,31
27	Sulawesi Selatan	66	39	59.1	1,62
28	Sulawesi Tenggara	40	21	52.5	1,64
29	Gorontalo	16	8	50	1,19
30	Sulawesi Barat	19	10	52.6	1,63
31	Maluku	57	43	75.4	3,32
32	Maluku Utara	21	15	71.4	1,76
33	Papua Barat	45	34	75.6	2,69
34	Papua	84	62	73.8	2,28
INDONESIA		2.379	1.426	59.9	1,68

Keterangan : dihitung dari puskesmas yang membuat perencanaan kebutuhan tugas belajar(N=2739)

Tabel 4.28.

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Spesialis	Jenjang pendidikan Tugas belajar									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
1	Aceh	48	0	4	44	5	649	73	117	12	400	18
2	Sumatera Utara	47	1	4	141	6	801	40	284	6	668	30
3	Sumatera Barat	23	0	0	49	0	435	12	363	0	274	1
4	Riau	43	3	0	42	7	241	49	109	2	107	12
5	Jambi	9	0	0	16	0	157	19	31	0	126	3
6	Sumatera Selatan	35	1	0	82	7	159	34	107	1	214	10
7	Bengkulu	13	0	0	22	4	165	4	88	7	130	1
8	Lampung	22	0	0	95	3	331	35	163	6	100	5
9	Kep. Bangka Belitung	24	0	0	10	0	46	1	10	0	66	0
10	Kep. Riau	17	1	0	10	0	54	9	31	0	18	0
11	DKI Jakarta	17	0	0	38	3	90	34	16	0	206	45
12	Jawa Barat	78	18	0	206	26	1552	187	1124	29	647	20
13	Jawa Tengah	67	0	1	118	11	878	209	473	16	690	29
14	DI Yogyakarta	27	0	0	14	0	43	13	57	2	109	2
15	Jawa Timur	90	1	0	114	11	817	130	590	15	531	32
16	Banten	15	0	0	61	1	295	51	437	3	124	5
17	Bali	33	0	0	20	1	120	36	20	0	190	3
18	Nusa Tenggara Barat	22	0	0	22	0	289	25	18	1	144	3

Tabel 4.28.
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Spesialis	Jenjang pendidikan Tugas belajar									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	11	0	0	41	1	211	24	84	1	808	76
20	Kalimantan Barat	19	2	0	19	7	115	28	126	2	395	7
21	Kalimantan Tengah	17	0	0	15	1	165	4	57	0	273	0
22	Kalimantan Selatan	32	0	0	24	2	210	19	37	0	139	4
23	Kalimantan Timur	32	4	4	46	8	109	36	38	8	142	7
24	Kalimantan Utara	18	0	0	1	1	13	7	1	0	56	0
25	Sulawesi Utara	38	0	0	36	0	295	3	69	0	161	0
26	Sulawesi Tengah	8	0	0	18	0	258	11	99	6	269	1
27	Sulawesi Selatan	79	4	1	164	3	851	31	284	6	91	3
28	Sulawesi Tenggara	32	1	0	68	0	446	20	111	4	123	17
29	Gorontalo	6	0	0	6	0	110	19	37	1	47	5
30	Sulawesi Barat	17	1	0	14	2	189	20	31	3	28	0
31	Maluku	7	0	0	11	0	236	6	5	0	200	15
32	Maluku Utara	17	0	0	7	1	122	7	31	2	11	1
33	Papua Barat	5	0	0	3	0	123	7	22	1	236	3
34	Papua	24	2	0	17	0	224	6	69	0	373	15
INDONESIA		992	39	14	1.594	111	10.799	1.209	5.139	134	8.096	373

Tabel 4.29.
Jumlah pegawai puskesmas yang mengikuti tugas belajar sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas,
Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Spesialis	Jenjang pendidikan Tugas belajar									
		S3		S2		S1		DIV		DIII	
		Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
Kemampuan Penyelenggaraan											
Rawat Inap	358	1	0	202	7	623	42	234	2	1,009	95
Non Rawat Inap	388	15	8	257	15	790	49	298	12	1,279	38
Wilayah Kerja											
Perkotaan	372	14	2	224	9	478	27	208	3	704	17
Perdesaan	295	2	6	186	12	580	49	198	11	958	27
Terpencil/ Sangat Terpencil	79	0	0	49	1	355	15	126	0	626	89
Pola Pengelolaan Keuangan											
BLUD	206	1	0	120	1	337	22	96	3	456	11
Non BLUD	540	15	8	339	21	1.076	69	436	11	1.832	122
Pengakuan Terhadap Mutu											
Ada	257	3	2	162	6	320	13	115	3	498	17
Tidak	489	13	6	297	16	1.093	78	417	11	1.790	116

Tabel 4.30.

Jumlah pegawai yang mengikuti ijin belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jenjang pendidikan ijin belajar										
		Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
1	Aceh	2	0	2	22	3	617	65	99	10	344	14
2	Sumatera Utara	15	1	0	119	6	749	35	265	6	545	30
3	Sumatera Barat	2	0	0	31	0	393	12	357	0	231	1
4	Riau	7	2	0	31	7	202	43	98	2	82	6
5	Jambi	1	0	0	5	0	120	19	21	0	81	2
6	Sumatera Selatan	10	0	0	63	6	138	27	87	1	115	7
7	Bengkulu	0	0	0	12	1	155	4	78	7	88	1
8	Lampung	8	0	0	87	3	316	30	160	6	74	5
9	Kep. Bangka Belitung	4	0	0	1	0	29	1	3	0	43	0
10	Kep. Riau	7	1	0	7	0	40	7	30	0	16	0
11	DKI Jakarta	1	0	0	16	3	79	34	16	0	193	44
12	Jawa Barat	34	10	0	182	23	1.473	176	1.089	28	465	16
13	Jawa Tengah	19	0	1	84	11	804	201	458	16	641	26
14	DI Yogyakarta	3	0	0	9	0	31	12	54	1	89	2
15	Jawa Timur	33	1	0	88	8	798	125	583	13	433	21
16	Banten	1	0	0	49	1	282	49	437	3	111	4
17	Bali	7	0	0	17	1	109	36	14	0	161	3
18	Nusa Tenggara Barat	5	0	0	10	0	261	23	12	1	116	2

Tabel 4.30
Jumlah pegawai yang mengikuti izin belajar sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Spesialis	Jenjang pendidikan izin belajar									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	19	0	75	13	11	1	366	1
20	Kalimantan Barat	1	0	0	7	6	91	27	90	1	253	7
21	Kalimantan Tengah	3	0	0	7	1	93	4	23	0	158	0
22	Kalimantan Selatan	2	0	0	14	2	169	19	28	0	89	3
23	Kalimantan Timur	6	2	2	24	4	82	34	28	5	97	3
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	1	5	0	0	27	0
25	Sulawesi Utara	18	0	0	22	0	237	3	56	0	138	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	7	0	175	10	51	3	187	1
27	Sulawesi Selatan	22	4	1	126	2	805	31	274	6	74	3
28	Sulawesi Tenggara	12	1	0	50	0	404	18	77	4	111	17
29	Gorontalo	0	0	0	4	0	90	19	36	1	32	2
30	Sulawesi Barat	8	0	0	7	1	171	20	28	3	27	0
31	Maluku	4	0	0	4	0	144	6	3	0	130	9
32	Maluku Utara	4	0	0	5	0	54	4	11	2	8	1
33	Papua Barat	4	0	0	2	0	90	3	16	0	140	2
34	Papua	4	1	0	5	0	124	5	17	0	146	7
INDONESIA		248	23	6	1.136	89	9.401	1.120	4.610	120	5.811	240

Tabel 4.31.

Jumlah pegawai yang mengikuti ijin belajar sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jenjang pendidikan ijin belajar										
	Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
		Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
Kemampuan Penyelenggaraan											
Rawat Inap	109	7	1	483	34	4.386	501	2.082	39	2.608	94
Non Rawat Inap	139	16	5	653	55	5.015	619	2.528	81	3.203	146
Wilayah Kerja											
Perkotaan	107	12	3	500	32	3.211	448	1.441	38	1.965	98
Perdesaan	128	10	3	544	50	5.218	585	2.921	73	3.040	118
Terpencil/ Sangat Terpencil	13	1	0	92	7	972	87	248	9	860	24
Pola Pengelolaan Keuangan											
BLUD	72	2	0	276	33	2.091	416	1.029	24	1.717	86
Non BLUD	176	21	6	860	56	7.310	704	3.581	96	4.094	154
Pengakuan Terhadap Mutu											
Ada	65	5	4	351	36	2.436	370	1.310	22	1.707	86
Tidak	183	18	2	785	53	6.965	750	3.300	98	4.104	154

Tabel 4.32.

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari Kemenkes sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan Kemenkes										
		Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
1	Aceh	16	0	2	2	2	3	2	0	2	2	2
2	Sumatera Utara	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	9	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
4	Riau	11	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0
5	Jambi	4	0	0	2	0	6	0	3	0	11	0
6	Sumatera Selatan	4	0	0	1	0	0	0	0	0	12	0
7	Bengkulu	8	0	0	3	0	7	0	5	0	13	0
8	Lampung	7	0	0	5	0	7	0	0	0	18	0
9	Kep. Bangka Belitung	10	0	0	5	0	6	0	2	0	9	0
10	Kep. Riau	5	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	17	8	0	3	0	2	0	0	0	9	0
13	Jawa Tengah	25	0	0	3	0	2	0	5	0	3	0
14	DI Yogyakarta	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	Jawa Timur	81	0	0	5	0	3	0	2	0	27	2
16	Banten	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	9	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	3	0	0	4	0	2	0	0	0	16	0

Tabel 4.32.
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari Kemenkes sejak tahun 2014
menurut provinsi, Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Spesialis	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan Kemenkes									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	0	3	0	22	0	4	0	49	1
20	Kalimantan Barat	2	2	0	8	0	0	0	6	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	3	0	0	0	0	4	0	1	0	8	0
22	Kalimantan Selatan	10	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
23	Kalimantan Timur	7	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2
24	Kalimantan Utara	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26	Sulawesi Tengah	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
27	Sulawesi Selatan	21	0	0	15	0	13	0	1	0	3	0
28	Sulawesi Tenggara	3	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
30	Sulawesi Barat	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31	Maluku	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
32	Maluku Utara	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
34	Papua	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
INDONESIA		304	12	4	73	4	92	4	36	4	213	7

Tabel 4.33.

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari Kemenkes sejak tahun 2014

Kategori puskesmas	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan Kemenkes										
	Spesialis		S3		S2		S1		DIV		DIII
	Nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	
Kemampuan Penyelenggaraan											
Rawat Inap	165	0	0	37	0	37	0	18	0	103	2
Non Rawat Inap	139	12	4	36	4	55	4	18	4	110	5
Wilayah Kerja											
Perkotaan	137	12	2	36	2	40	2	24	2	80	3
Perdesaan	145	0	2	35	2	36	2	8	2	97	4
Terpencil/ Sangat Terpencil	22	0	0	2	0	16	0	4	0	36	0
Pola Pengelolaan Keuangan											
BLUD	107	0	0	18	0	22	0	8	0	31	1
Non BLUD	197	12	4	55	4	70	4	28	4	182	6
Pengakuan Terhadap Mutu											
Ada	110	2	2	25	2	28	2	21	2	84	2
Tidak	194	10	2	48	2	64	2	15	2	129	5

Tabel 4.34.

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Spesialis	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan pemerintah daerah									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
1	Aceh	21	0	2	3	2	2	2	1	2	11	2
2	Sumatera Utara	22	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
3	Sumatera Barat	9	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	Riau	24	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0
5	Jambi	3	0	0	2	0	8	0	3	0	4	0
6	Sumatera Selatan	23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	6	0	0	6	1	2	0	5	0	16	0
8	Lampung	7	0	0	4	0	8	0	2	0	7	0
9	Kep. Bangka Belitung	10	0	0	4	0	11	0	4	0	37	0
10	Kep. Riau	7	0	0	2	0	9	2	1	0	2	0
11	DKI Jakarta	16	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	14	8	0	0	0	1	0	0	0	3	1
13	Jawa Tengah	14	0	0	2	0	1	0	0	0	3	2
14	DI Yogyakarta	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
15	Jawa Timur	15	0	0	3	0	8	0	0	0	15	0
16	Banten	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0
17	Bali	6	0	0	1	0	6	0	3	0	15	0
18	Nusa Tenggara Barat	11	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0

Tabel 4.34.
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sejak tahun 2014
menurut provinsi, Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Spesialis	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan pemerintah daerah									
			S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	8	0	0	13	1	102	11	60	0	419	74
20	Kalimantan Barat	16	0	0	0	0	20	0	23	0	87	0
21	Kalimantan Tengah	9	0	0	5	0	41	0	13	0	80	0
22	Kalimantan Selatan	17	0	0	2	0	6	0	1	0	9	0
23	Kalimantan Timur	15	2	2	4	2	5	1	3	2	4	2
24	Kalimantan Utara	12	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0
25	Sulawesi Utara	12	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0
26	Sulawesi Tengah	3	0	0	2	0	7	0	0	0	7	0
27	Sulawesi Selatan	24	0	0	21	1	18	0	6	0	9	0
28	Sulawesi Tenggara	9	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0
29	Gorontalo	5	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
30	Sulawesi Barat	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	4	0	0	1	0	4	0	1	0	21	0
32	Maluku Utara	8	0	0	0	1	8	0	0	0	1	0
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	29	0	5	0	73	0
34	Papua	16	2	0	12	0	99	0	49	0	230	0
INDONESIA		384	13	4	104	8	418	16	185	4	1,082	81

Tabel 4.35.

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari pemerintah daerah sejak tahun 2014

Kategori puskesmas	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan pemerintah daerah										
	Spesialis		S3		S2		S1		DIV		DIII
	Nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
Kemampuan Penyelenggaraan											
Rawat Inap	187	1	0	38	1	176	9	90	0	484	73
Non Rawat Inap	197	12	4	66	7	242	7	95	4	598	8
Wilayah Kerja											
Perkotaan	185	12	2	55	4	138	5	62	2	322	3
Perdesaan	154	1	2	43	3	124	3	51	2	325	4
Terpencil/ Sangat Terpencil	45	0	0	6	1	156	8	72	0	435	74
Pola Pengelolaan Keuangan											
BLUD	88	1	0	27	0	67	1	28	0	152	2
Non BLUD	296	12	4	77	8	351	15	157	4	930	79
Pengakuan Terhadap Mutu											
Ada	130	3	2	39	3	95	1	30	2	202	2
Tidak	254	10	2	65	5	323	15	155	2	880	79

Tabel 4.36.

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari swasta/yayasan/donor lain sejak tahun 2014 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan swasta/yayasan/donor lain										
		Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
1	Aceh	8	0	2	3	2	28	2	3	2	18	2
2	Sumatera Utara	4	0	0	1	0	23	0	14	0	0	0
3	Sumatera Barat	3	0	0	0	0	26	0	20	0	5	0
4	Riau	5	0	0	5	0	16	0	8	0	9	0
5	Jambi	1	0	0	2	0	24	2	4	0	19	0
6	Sumatera Selatan	12	0	0	4	0	4	0	16	0	1	0
7	Bengkulu	1	0	0	2	0	0	0	4	0	4	0
8	Lampung	6	0	0	19	0	53	1	6	0	11	0
9	Kep. Bangka Belitung	4	0	0	1	0	29	1	3	0	19	0
10	Kep. Riau	5	1	0	7	0	39	7	30	0	14	0
11	DKI Jakarta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0
12	Jawa Barat	22	8	0	5	0	47	2	41	0	17	0
13	Jawa Tengah	17	0	0	4	0	32	0	10	0	22	0
14	DI Yogyakarta	5	0	0	3	0	1	0	2	0	24	0
15	Jawa Timur	27	0	0	28	12	194	36	206	0	149	4
16	Banten	1	0	0	15	0	37	4	44	0	13	0
17	Bali	9	0	0	2	0	14	0	1	0	8	0
18	Nusa Tenggara Barat	2	0	0	1	0	64	0	1	0	0	0

Tabel 4.36.

Pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari swasta/yayasan/donor lain tahun 2014-2017 menurut provinsi, Risnakes 2017 (Lanjutan)

No	Provinsi	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan swasta/yayasan/donor lain										
		Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
			Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	2	0	0	10	0	18	6	6	0	74	1
20	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	6	0	7	0	21	0
21	Kalimantan Tengah	3	0	0	0	0	12	0	9	0	6	0
22	Kalimantan Selatan	2	0	0	2	0	25	1	6	0	7	0
23	Kalimantan Timur	12	2	2	6	2	15	2	2	2	15	2
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	19	0	0	8	0	45	0	8	0	14	0
26	Sulawesi Tengah	3	0	0	2	0	27	0	20	0	17	0
27	Sulawesi Selatan	17	0	0	5	0	27	0	7	0	7	0
28	Sulawesi Tenggara	13	1	0	12	0	28	0	5	0	11	0
29	Gorontalo	1	0	0	1	0	6	0	3	0	1	0
30	Sulawesi Barat	3	1	0	1	0	13	0	4	0	4	0
31	Maluku	1	0	0	1	0	53	1	1	0	29	1
32	Maluku Utara	1	0	0	0	0	33	0	4	0	1	0
33	Papua Barat	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0
34	Papua	5	0	0	3	0	82	0	8	0	88	0
INDONESIA		216	13	4	154	16	1.023	65	503	4	639	10

Tabel 4.37.

Pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dengan sumber pendanaan dari swasta/yayasan/donor lain sejak tahun 2014 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jenis pendidikan dengan sumber pendanaan swasta/yayasan/donor lain										
	Spesialis	S3		S2		S1		DIV		DIII	
		Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes	Nakes	Non nakes
Kemampuan Penyelenggaraan											
Rawat Inap	102	1	0	87	10	595	35	318	0	335	4
Non Rawat Inap	114	12	4	67	6	428	30	185	4	304	6
Wilayah Kerja											
Perkotaan	102	12	2	65	11	413	22	204	2	252	4
Perdesaan	99	1	2	76	5	516	36	277	2	271	6
Terpencil/ Sangat Terpencil	15	0	0	13	0	94	7	72	0	116	0
Pola Pengelolaan Keuangan											
BLUD	57	1	0	49	1	253	22	116	0	186	1
Non BLUD	159	12	4	105	15	770	43	387	4	453	9
Pengakuan Terhadap Mutu											
Ada	62	2	2	45	4	299	16	175	2	171	4
Tidak	154	11	2	109	12	724	49	328	2	468	6

Tabel 4.38.

Jumlah peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Status peserta tugas belajar					
		Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016)			Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016) dan kembali berdinasi di Puskesmas		
		dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes
1	Aceh	34	262	9	14	257	4
2	Sumatera Utara	38	366	2	19	293	2
3	Sumatera Barat	16	257	1	5	233	3
4	Riau	27	120	5	13	98	1
5	Jambi	2	121	5	1	103	7
6	Sumatera Selatan	14	137	2	3	126	1
7	Bengkulu	6	122	0	1	121	1
8	Lampung	7	144	3	1	88	3
9	Kep. Bangka Belitung	10	71	0	5	64	0
10	Kep. Riau	8	40	2	0	33	2
11	DKI Jakarta	28	25	4	6	23	4
12	Jawa Barat	31	747	37	14	605	29
13	Jawa Tengah	33	325	23	12	289	21
14	DI Yogyakarta	18	68	2	5	62	2
15	Jawa Timur	38	404	10	9	407	7
16	Banten	15	137	1	11	119	0
17	Bali	16	66	0	3	65	5
18	Nusa Tenggara Barat	8	181	4	2	150	4

Tabel 4.38.
Jumlah peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir menurut provinsi,
Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Status peserta tugas belajar								
		Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016)			Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016) dan kembali berdinass di Puskesmas			Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016) dan kembali berdinass tidak di Puskesmas		
		dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes
19	Nusa Tenggara Timur	13	487	4	11	452	5	2	49	0
20	Kalimantan Barat	12	302	8	4	238	9	8	76	6
21	Kalimantan Tengah	7	204	0	3	198	0	3	45	0
22	Kalimantan Selatan	12	102	5	4	103	4	10	26	0
23	Kalimantan Timur	25	133	1	9	99	0	24	34	0
24	Kalimantan Utara	9	37	2	6	34	1	8	5	0
25	Sulawesi Utara	23	145	0	13	112	0	1	35	0
26	Sulawesi Tengah	4	297	1	4	301	1	3	70	1
27	Sulawesi Selatan	32	273	2	13	250	2	18	56	1
28	Sulawesi Tenggara	4	189	1	2	193	0	1	32	0
29	Gorontalo	0	58	0	0	45	0	0	10	0
30	Sulawesi Barat	2	55	0	1	48	0	2	17	0
31	Maluku	4	129	0	3	117	0	1	17	0
32	Maluku Utara	6	79	1	2	74	1	3	26	0
33	Papua Barat	3	131	0	2	111	0	1	20	0
34	Papua	12	351	2	4	308	2	7	55	2
INDONESIA		517	1.488	676	205	1.344	660	287	303	579

Tabel 4.39.

Jumlah peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tiga tahun terakhir menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Status peserta tugas belajar								
	Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016)			Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016) dan kembali berdinass di Puskesmas			Telah menyelesaikan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016) dan kembali berdinass tidak di Puskesmas		
	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes	dokter dan dokter gigi	nakes selain dokter/dokter gigi	non nakes
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat Inap	226	657	327	70	604	311	122	120	286
Non Rawat Inap	291	831	349	135	740	349	165	183	293
Wilayah Kerja									
Perkotaan	275	2109	46	108	1.868	40	169	414	8
Perdesaan	198	3320	71	74	2.909	67	98	618	25
Terpencil/ Sangat Terpencil	44	1136	20	23	1.042	14	20	232	7
Pola Pengelolaan Keuangan									
BLUD	151	1373	44	51	1.163	38	94	230	3
Non BLUD	366	5192	93	154	4.656	83	193	1.034	37
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	196	1652	48	74	1.459	45	138	283	12
Tidak	321	4913	89	131	4.360	76	149	981	28

Tabel 4.40.
Distribusi puskesmas yang melakukan analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Melakukan training need analysis			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	103	30,3	237	69,7
2	Sumatera Utara	571	147	25,7	424	74,3
3	Sumatera Barat	264	86	32,6	178	67,4
4	Riau	212	73	34,4	139	65,6
5	Jambi	176	56	31,8	120	68,2
6	Sumatera Selatan	322	114	35,4	208	64,6
7	Bengkulu	179	63	35,2	116	64,8
8	Lampung	291	114	39,2	177	60,8
9	Kep. Bangka Belitung	62	34	54,8	28	45,2
10	Kep. Riau	72	24	33,3	48	66,7
11	DKI Jakarta	314	146	46,5	168	53,5
12	Jawa Barat	1.050	599	57,0	451	43,0
13	Jawa Tengah	875	594	67,9	281	32,1
14	DI Yogyakarta	121	111	91,7	10	8,3
15	Jawa Timur	960	590	61,5	370	38,5
16	Banten	233	120	51,5	113	48,5
17	Bali	120	62	51,7	58	48,3
18	Nusa Tenggara Barat	158	73	46,2	85	53,8
19	Nusa Tenggara Timur	371	90	24,3	281	75,7
20	Kalimantan Barat	238	74	31,1	164	68,9
21	Kalimantan Tengah	195	58	29,7	137	70,3
22	Kalimantan Selatan	230	67	29,1	163	70,9
23	Kalimantan Timur	174	73	42,0	101	58,0
24	Kalimantan Utara	46	18	39,1	28	60,9
25	Sulawesi Utara	186	35	18,8	151	81,2
26	Sulawesi Tengah	189	42	22,2	147	77,8
27	Sulawesi Selatan	448	125	27,9	323	72,1
28	Sulawesi Tenggara	268	44	16,4	224	83,6
29	Gorontalo	93	32	34,4	61	65,6
30	Sulawesi Barat	94	19	20,2	75	79,8
31	Maluku	198	47	23,7	151	76,3
32	Maluku Utara	127	18	14,2	109	85,8
33	Papua Barat	150	38	25,3	112	74,7
34	Papua	372	48	12,9	324	87,1
INDONESIA		9.699	3.937	40,6	5.762	59,4

Tabel 4.41.
Distribusi puskesmas yang melakukan analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Melakukan training need analysis			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	1.562	42,0	2.160	58,0
Non Rawat Inap	5.977	2.375	39,7	3.601	60,3
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	1.455	46,6	1.667	53,4
Perdesaan	4.813	2.110	43,8	2.703	56,2
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	372	21,1	1.392	78,9
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	1.329	52,3	1.210	47,7
Non BLUD	7.159	2.608	36,4	4.551	63,6
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	1.425	60,0	949	40,0
Tidak	7.324	2.512	34,3	4.812	65,7

Tabel 4.42.
Distribusi puskesmas yang membuat perencanaan anggaran pelatihan dan pegawai yang akan mengikuti pelatihan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Membuat perencanaan anggaran pelatihan				Membuat perencanaan pegawai yang akan pelatihan			
			Ya		Tidak		Ya		Tidak	
			n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	340	81	23,8	259	76,2	119	35,0	221	65,0
2	Sumatera Utara	571	99	17,3	472	82,7	174	30,5	397	69,5
3	Sumatera Barat	264	71	26,9	193	73,1	91	34,5	173	65,5
4	Riau	212	45	21,2	167	78,8	78	36,8	134	63,2
5	Jambi	176	41	23,3	135	76,7	50	28,4	126	71,6
6	Sumatera Selatan	322	89	27,6	233	72,4	106	32,9	216	67,1
7	Bengkulu	179	30	16,8	149	83,2	57	31,8	122	68,2
8	Lampung	291	100	34,4	191	65,6	117	40,2	174	59,8
9	Kep. Bangka Belitung	62	30	48,4	32	51,6	33	53,2	29	46,8
10	Kep. Riau	72	17	23,6	55	76,4	22	30,6	50	69,4
11	DKI Jakarta	314	93	29,6	221	70,4	128	40,8	186	59,2
12	Jawa Barat	1.050	564	53,7	486	46,3	588	56,0	462	44,0
13	Jawa Tengah	875	566	64,7	309	35,3	574	65,6	301	34,4
14	DI Yogyakarta	121	109	90,1	12	9,9	100	82,6	21	17,4
15	Jawa Timur	960	456	47,5	504	52,5	541	56,4	419	43,6
16	Banten	233	75	32,2	158	67,8	101	43,3	132	56,7
17	Bali	120	29	24,2	91	75,8	46	38,3	74	61,7
18	Nusa Tenggara Barat	158	69	43,7	89	56,3	63	39,9	95	60,1
19	Nusa Tenggara Timur	371	61	16,4	310	83,6	105	28,3	266	71,7
20	Kalimantan Barat	238	51	21,4	187	78,6	78	32,8	160	67,2
21	Kalimantan Tengah	195	33	16,9	162	83,1	54	27,7	141	72,3
22	Kalimantan Selatan	230	47	20,4	183	79,6	67	29,1	163	70,9
23	Kalimantan Timur	174	57	32,9	116	67,1	68	39,3	105	60,7
24	Kalimantan Utara	46	12	26,1	34	73,9	18	39,1	28	60,9
25	Sulawesi Utara	186	31	16,7	155	83,3	44	23,7	142	76,3
26	Sulawesi Tengah	189	36	19,0	153	81,0	48	25,4	141	74,6
27	Sulawesi Selatan	448	114	25,4	334	74,6	130	29,0	318	71,0
28	Sulawesi Tenggara	268	30	11,2	238	88,8	46	17,2	222	82,8
29	Gorontalo	93	33	35,5	60	64,5	36	38,7	57	61,3
30	Sulawesi Barat	94	19	20,2	75	79,8	31	33,0	63	67,0
31	Maluku	198	45	22,7	153	77,3	60	30,3	138	69,7
32	Maluku Utara	127	13	10,2	114	89,8	27	21,3	100	78,7
33	Papua Barat	150	22	14,7	128	85,3	47	31,3	103	68,7
34	Papua	372	48	12,9	324	87,1	72	19,4	300	80,6
INDONESIA		9.699	3.216	33	6.482	67	3.919	40	5.779	60

Tabel 4.43.

Distribusi puskesmas yang membuat perencanaan anggaran pelatihan dan pegawai yang akan mengikuti pelatihan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Membuat perencanaan anggaran pelatihan				Membuat perencanaan pegawai yang akan pelatihan			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		N	%	n	%	n	%	n	%
Kemampuan									
Penyelenggaraan									
Rawat Inap	3.722	1.274	34,2	2.448	65,8	1.540	41,4	2.182	58,6
Non Rawat Inap	5.977	1.942	32,5	4.034	67,5	2.379	39,8	3.597	60,2
Wilayah Kerja									
Perkotaan	3.122	1.165	37,3	1.957	62,7	1.404	45,0	1.718	55,0
Perdesaan	4.813	1.744	36,2	3.069	63,8	2.085	43,3	2.728	56,7
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	307	17,4	1.457	82,6	430	24,4	1.334	75,6
Pola Pengelolaan Keuangan									
BLUD	2.540	1.187	46,7	1.352	53,2	1.307	51,5	1.232	48,5
Non BLUD	7.159	2.029	28,3	5.130	71,7	2.612	36,5	4.547	63,5
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	2.375	1.117	47,0	1.257	52,9	1.294	54,5	1.080	45,5
Tidak	7.324	2.099	28,7	5.225	71,3	2.625	35,8	4.699	64,2

Tabel 4.44.

Distribusi puskesmas berdasarkan proses perencanaan pelatihan bagi pegawai puskesmas untuk puskesmas yang tidak membuat perencanaan pelatihan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Penugasan dari Dinas Kesehatan				Metode lain			
			Ya		Tidak		Ya		Tidak	
			n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	221	217	98,2	4	1,8	20	9,0	201	91,0
2	Sumatera Utara	397	384	96,7	13	3,3	14	3,5	383	96,5
3	Sumatera Barat	173	164	94,8	9	5,2	16	9,2	157	90,8
4	Riau	134	132	98,5	2	1,5	7	5,2	127	94,8
5	Jambi	126	124	98,4	2	1,6	10	7,9	116	92,1
6	Sumatera Selatan	216	210	97,2	6	2,8	7	3,2	209	96,8
7	Bengkulu	122	116	95,1	6	4,9	9	7,4	113	92,6
8	Lampung	174	169	97,1	5	2,9	15	8,6	159	91,4
9	Kep. Bangka Belitung	29	28	96,6	1	3,4	9	31,0	20	69,0
10	Kep. Riau	50	48	96,0	2	4,0	5	10,0	45	90,0
11	DKI Jakarta	186	65	34,9	121	65,1	127	68,3	59	31,7
12	Jawa Barat	462	426	92,2	36	7,8	56	12,1	406	87,9
13	Jawa Tengah	301	281	93,4	20	6,6	48	15,9	253	84,1
14	DI Yogyakarta	21	18	85,7	3	14,3	9	42,9	12	57,1
15	Jawa Timur	419	405	96,7	14	3,3	44	10,5	375	89,5
16	Banten	132	124	93,9	8	6,1	15	11,4	117	88,6
17	Bali	74	72	97,3	2	2,7	3	4,1	71	95,9
18	Nusa Tenggara Barat	95	91	95,8	4	4,2	15	15,8	80	84,2
19	Nusa Tenggara Timur	266	257	96,6	9	3,4	18	6,8	248	93,2
20	Kalimantan Barat	160	148	92,5	12	7,5	13	8,1	147	91,9
21	Kalimantan Tengah	141	140	99,3	1	0,7	10	7,1	131	92,9
22	Kalimantan Selatan	163	163	100,0	0	0,0	9	5,5	154	94,5
23	Kalimantan Timur	105	101	96,2	4	3,8	7	6,7	98	93,3
24	Kalimantan Utara	28	25	89,3	3	10,7	3	10,7	25	89,3
25	Sulawesi Utara	142	135	95,1	7	4,9	6	4,2	136	95,8
26	Sulawesi Tengah	141	135	95,7	6	4,3	3	2,1	138	97,9
27	Sulawesi Selatan	318	308	96,9	10	3,1	19	6,0	300	94,0
28	Sulawesi Tenggara	222	215	96,8	7	3,2	5	2,3	217	97,7
29	Gorontalo	57	49	86,0	8	14,0	12	21,1	45	78,9
30	Sulawesi Barat	63	62	98,4	1	1,6	1	1,6	62	98,4
31	Maluku	138	136	98,6	2	1,4	6	4,3	132	95,7
32	Maluku Utara	100	97	97,0	3	3,0	5	5,0	95	95,0
33	Papua Barat	103	99	96,1	4	3,9	8	7,8	95	92,2
34	Papua	300	230	76,7	70	23,3	10	3,3	290	96,7
INDONESIA		5.779	5.374	93,0	405	7,0	564	9,8	5.216	90,2

Keterangan : Dihitung dari jumlah puskesmas yang tidak membuat perencanaan pelatihan (N=5779)

Tabel 4.45.

Distribusi puskesmas berdasarkan proses perencanaan pelatihan bagi pegawai untuk puskesmas yang tidak membuat perencanaan pelatihan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Penugasan dari Dinas Kesehatan				Metode lain			
	Ya		Tidak		Ya		Tidak	
	n	%	n	%	n	%	N	%
Kemampuan Penyelenggaraan								
Rawat Inap	2.090	95,8	92	4,2	174	8,0	2.009	92,0
Non Rawat Inap	3.284	91,3	313	8,7	390	10,8	3.207	89,2
Wilayah Kerja								
Perkotaan	1.512	88,0	206	12,0	277	16,1	1.441	83,8
Perdesaan	2.618	96,0	110	4,0	203	7,4	2.525	92,6
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.245	93,3	89	6,7	84	6,3	1.250	93,7
Pola Pengelolaan Keuangan								
BLUD	1.042	84,6	190	15,4	248	20,1	984	79,9
Non BLUD	4.332	95,3	215	4,7	316	6,9	4.232	93,1
Pengakuan Terhadap Mutu								
Ada	937	86,8	143	13,2	217	20,1	863	79,9
Tidak	4.437	94,4	262	5,6	347	7,4	4.353	92,6

Tabel 4.46.

Distribusi pegawai puskesmas yang mengikuti pelatihan tahun 2015 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga Puskesmas	Mengikuti pelatihan di tahun 2015			
			PNS/CPNS		Non PNS	
			n	%	n	%
1	Aceh	32.228	2.695	8,4	598	1,9
2	Sumatera Utara	30.432	3.093	10,2	485	1,6
3	Sumatera Barat	14.719	1.768	12,0	264	1,8
4	Riau	12.849	1.424	11,1	407	3,2
5	Jambi	9.419	1.185	12,6	421	4,5
6	Sumatera Selatan	21.657	2.204	10,2	742	3,4
7	Bengkulu	7.123	795	11,2	118	1,7
8	Lampung	15.052	1.658	11,0	265	1,8
9	Kep. Bangka Belitung	3.376	763	22,6	163	4,8
10	Kep. Riau	3.741	483	12,9	173	4,6
11	DKI Jakarta	10.243	591	5,8	499	4,9
12	Jawa Barat	43.045	3.169	7,4	721	1,7
13	Jawa Tengah	41.803	4.029	9,6	427	1,0
14	DI Yogyakarta	5.790	830	14,3	89	1,5
15	Jawa Timur	52.594	4.345	8,3	1.225	2,3
16	Banten	10.753	1.253	11,7	458	4,3
17	Bali	6.787	875	12,9	100	1,5
18	Nusa Tenggara Barat	14.420	932	6,5	263	1,8
19	Nusa Tenggara Timur	19.656	1.613	8,2	457	2,3
20	Kalimantan Barat	10.717	1.042	9,7	165	1,5
21	Kalimantan Tengah	7.464	960	12,9	104	1,4
22	Kalimantan Selatan	11.393	908	8,0	113	1,0
23	Kalimantan Timur	8.201	615	7,5	169	2,1
24	Kalimantan Utara	2.399	153	6,4	18	0,8
25	Sulawesi Utara	6.120	1.607	26,3	21	0,3
26	Sulawesi Tengah	10.537	728	6,9	170	1,6
27	Sulawesi Selatan	32.841	1.860	5,7	414	1,3
28	Sulawesi Tenggara	15.063	962	6,4	238	1,6
29	Gorontalo	3.965	487	12,3	150	3,8
30	Sulawesi Barat	6.324	384	6,1	115	1,8
31	Maluku	6.285	973	15,5	98	1,6
32	Maluku Utara	4.863	613	12,6	79	1,6
33	Papua Barat	4.629	540	11,7	120	2,6
34	Papua	10.146	741	7,3	257	2,5
INDONESIA		496.634	46.278	9,3	10.106	2,0

Tabel 4.47.
Distribusi pegawai puskesmas yang mengikuti pelatihan tahun 2015 menurut kategori puskesmas,
Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Tenaga Puskesmas	Mengikuti pelatihan di tahun 2015	
		PNS/CPNS	Non PNS
Kemampuan Penyelenggaraan			
Rawat Inap	241.612	19.892	4.708
Non Rawat Inap	255.022	26.386	5.398
Wilayah Kerja			
Perkotaan	148.746	17.398	2.977
Perdesaan	265.097	22.575	4.983
Terpencil/ Sangat Terpencil	82.302	6.315	2.151
Pola Pengelolaan Keuangan			
BLUD	120.961	11.690	2.515
Non BLUD	375.673	34.588	7.591
Pengakuan Terhadap Mutu			
Ada	135.176	13.760	2.814
Tidak	361.458	32.518	7.292

Tabel 4.48.
Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2015 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Pelatihan jabatan fungsional tahun 2015								
		Jumlah tenaga jabatan fungsional	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisisionis	Sanitarian	Kesmas	Apoteker
1	Aceh	5.518	112	20	303	350	85	88	175	29
2	Sumatera Utara	10.042	168	47	349	528	67	49	119	45
3	Sumatera Barat	5.878	39	21	122	190	26	24	36	12
4	Riau	3.692	90	28	171	197	31	39	49	39
5	Jambi	3.348	74	22	123	156	24	23	58	5
6	Sumatera Selatan	4.456	69	15	215	310	50	57	104	23
7	Bengkulu	2.525	21	4	120	189	29	10	62	5
8	Lampung	4.477	67	11	190	238	13	17	63	9
9	Kep. Bangka Belitung	1.683	26	6	103	79	21	9	17	7
10	Kep. Riau	2.030	73	31	130	106	27	22	29	22
11	DKI Jakarta	3.520	205	58	217	195	23	18	13	18
12	Jawa Barat	15.765	263	102	562	984	98	99	111	44
13	Jawa Tengah	19.878	252	67	570	986	121	117	142	43
14	DI Yogyakarta	3.208	122	26	182	119	75	36	36	16
15	Jawa Timur	20.750	366	74	662	789	104	78	85	43
16	Banten	3.914	78	27	139	260	23	30	26	10
17	Bali	4.003	68	9	71	98	15	8	19	6
18	Nusa Tenggara Barat	4.230	83	20	184	218	61	61	59	30
19	Nusa Tenggara Timur	6.507	52	12	223	277	50	57	54	25
20	Kalimantan Barat	4.062	85	17	186	216	65	62	42	25
21	Kalimantan Tengah	3.621	30	7	153	163	21	23	23	16
22	Kalimantan Selatan	5.277	39	11	103	233	30	25	24	12
23	Kalimantan Timur	2.883	66	11	101	70	14	14	26	9
24	Kalimantan Utara	765	9	1	36	32	3	1	2	1
25	Sulawesi Utara	3.073	49	3	131	113	34	40	27	9
26	Sulawesi Tengah	3.443	14	4	102	120	19	14	58	4
27	Sulawesi Selatan	6.356	85	43	250	315	79	62	112	40
28	Sulawesi Tenggara	2.329	26	9	146	165	34	39	132	13
29	Gorontalo	1.332	23	1	70	59	15	23	33	3
30	Sulawesi Barat	598	11	2	38	39	17	10	20	4
31	Maluku	1.892	18	2	117	94	25	14	20	5
32	Maluku Utara	1.590	5	1	49	50	14	7	20	2
33	Papua Barat	2.073	16	6	143	125	20	7	17	9
34	Papua	3.609	45	5	149	116	30	31	25	17
INDONESIA		168.327	2.749	723	6.410	8.179	1.363	1.214	1.838	600

Tabel 4.49.
Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2015 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah tenaga jabatan fungsional	Pelatihan jabatan fungsional tahun 2015							
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Sanitarian	Kesmas	Apoteker
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat Inap	78.686	1.278	293	2.943	3.500	641	565	805	265
Non Rawat Inap	89.641	1.471	430	3.467	4.679	722	649	1.033	335
Wilayah Kerja									
Perkotaan	61.175	1.372	411	2.376	2.964	528	496	731	266
Perdesaan	86.156	1.085	258	3.032	4.171	631	555	856	242
Terpencil/ Sangat Terpencil	21.004	293	54	1.004	1.045	204	163	251	92
Pola Pengelolaan Keuangan									
BLUD	46.372	1.010	269	1.889	2.320	412	359	466	172
Non BLUD	121.955	1.739	454	4.521	5.859	951	855	1.372	428
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	51.689	1.084	301	1.965	2.403	399	326	498	189
Tidak	116.638	1.665	422	4.445	5.776	964	888	1.340	411

Tabel 4.50.
Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2016 menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah tenaga jabatan fungsional	Jumlah pelatihan jabatan fungsional tahun 2016						
			Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Sanitarian	Kesmas Apoteker
1	Aceh	5.518	112	20	256	317	83	85	170 35
2	Sumatera Utara	10.042	210	65	521	659	114	66	201 48
3	Sumatera Barat	5.878	48	18	137	210	26	27	49 13
4	Riau	3.692	111	32	246	286	41	47	67 33
5	Jambi	3.348	68	18	132	167	25	24	78 13
6	Sumatera Selatan	4.456	67	17	209	300	40	51	131 19
7	Bengkulu	2.525	30	5	119	173	21	10	69 4
8	Lampung	4.477	66	8	201	245	24	30	77 10
9	Kep. Bangka Belitung	1.683	37	11	104	100	17	10	12 14
10	Kep. Riau	2.030	109	47	204	145	35	37	46 30
11	DKI Jakarta	3.520	252	82	276	264	53	39	23 41
12	Jawa Barat	15.765	329	130	601	1320	135	130	124 83
13	Jawa Tengah	19.878	324	55	731	1374	107	157	147 67
14	DI Yogyakarta	3.208	134	52	264	209	44	53	27 29
15	Jawa Timur	20.750	475	121	929	1106	113	89	145 69
16	Banten	3.914	130	64	193	381	41	42	28 12
17	Bali	4.003	75	10	87	129	13	13	23 9
18	Nusa Tenggara Barat	4.230	96	12	224	268	67	71	66 24
19	Nusa Tenggara Timur	6.507	68	10	237	271	56	56	46 23
20	Kalimantan Barat	4.062	94	23	198	260	79	71	49 43
21	Kalimantan Tengah	3.621	40	14	217	204	42	25	40 11
22	Kalimantan Selatan	5.277	49	8	139	258	36	24	31 10
23	Kalimantan Timur	2.883	42	11	92	109	19	14	22 6
24	Kalimantan Utara	765	2	0	26	23	0	1	5 1
25	Sulawesi Utara	3.073	52	4	133	118	35	45	31 11
26	Sulawesi Tengah	3.443	14	1	66	111	24	16	56 2
27	Sulawesi Selatan	6.356	83	40	200	295	84	70	89 22
28	Sulawesi Tenggara	2.329	31	7	180	172	39	34	139 12
29	Gorontalo	1.332	11	0	62	76	17	13	29 4
30	Sulawesi Barat	598	14	2	52	45	17	13	24 8
31	Maluku	1.892	22	3	147	96	38	20	30 7
32	Maluku Utara	1.590	9	1	46	61	16	11	28 3
33	Papua Barat	2.073	23	6	172	123	24	9	13 10
34	Papua	3.609	39	4	158	133	33	31	35 16
INDONESIA		168.327	3.266	901	7.559	10.008	1.558	1.434	2.150 742

Tabel 4.51.
Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pegawai pada tahun 2016 menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah tenaga jabatan fungsional	Pelatihan jabatan fungsional tahun 2016							
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Sanitarian	Kesmas	Apoteker
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat Inap	78.686	1.477	343	3.436	4.373	709	666	948	356
Non Rawat Inap	89.641	1.789	558	4.123	5.635	849	768	1.202	386
Wilayah Kerja									
Perkotaan	61.175	1.708	571	2.888	3.724	638	574	891	339
Perdesaan	86.156	1.249	273	3.550	5.142	680	688	957	311
Terpencil/ Sangat Terpencil	21.004	309	57	1.121	1.143	240	172	302	92
Pola Pengelolaan Keuangan									
BLUD	46.372	1.175	348	2.371	3.023	456	485	537	269
Non BLUD	121.955	2.091	553	5.188	6.985	1.102	949	1.613	473
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	51.689	1.233	341	2.312	3.067	431	399	578	265
Tidak	116.638	2.033	560	5.247	6.941	1.127	1.035	1.572	477

Tabel 4.52.

Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan informasi mengenai peluang Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Menyediakan informasi mengenai peluang diklat bagi nakes			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	258	75,9	82	24,1
2	Sumatera Utara	571	364	63,7	207	36,3
3	Sumatera Barat	264	214	81,1	50	18,9
4	Riau	212	161	75,9	51	24,1
5	Jambi	176	142	80,7	34	19,3
6	Sumatera Selatan	322	245	76,1	77	23,9
7	Bengkulu	179	141	78,8	38	21,2
8	Lampung	291	232	79,7	59	20,3
9	Kep. Bangka Belitung	62	57	91,9	5	8,1
10	Kep. Riau	72	55	76,4	17	23,6
11	DKI Jakarta	314	227	72,3	87	27,7
12	Jawa Barat	1.050	864	82,3	186	17,7
13	Jawa Tengah	875	785	89,7	90	10,3
14	DI Yogyakarta	121	120	99,2	1	0,8
15	Jawa Timur	960	836	87,1	124	12,9
16	Banten	233	201	86,3	32	13,7
17	Bali	120	114	95,0	6	5,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	126	79,7	32	20,3
19	Nusa Tenggara Timur	371	261	70,4	110	29,6
20	Kalimantan Barat	238	183	76,9	55	23,1
21	Kalimantan Tengah	195	148	75,9	47	24,1
22	Kalimantan Selatan	230	198	86,1	32	13,9
23	Kalimantan Timur	174	145	83,3	29	16,7
24	Kalimantan Utara	46	27	58,7	19	41,3
25	Sulawesi Utara	186	121	65,1	65	34,9
26	Sulawesi Tengah	189	143	75,7	46	24,3
27	Sulawesi Selatan	448	313	69,9	135	30,1
28	Sulawesi Tenggara	268	161	60,1	107	39,9
29	Gorontalo	93	71	76,3	22	23,7
30	Sulawesi Barat	94	62	66,0	32	34,0
31	Maluku	198	121	61,1	77	38,9
32	Maluku Utara	127	67	52,8	60	47,2
33	Papua Barat	150	86	57,3	64	42,7
34	Papua	372	173	46,5	199	53,5
INDONESIA		9.699	7.422	76,5	2.276	23,5

Tabel 4.53.

Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Menyediakan informasi mengenai peluang diklat bagi nakes			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	2.948	79,2	774	20,8
Non Rawat Inap	5.977	4.474	74,8	1.502	25,1
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	2.513	80,5	609	19,5
Perdesaan	4.813	3.809	79,1	1.004	20,9
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.100	62,4	664	37,6
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	2.033	80,1	506	19,9
Non BLUD	7.159	5.389	75,3	1.770	24,7
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	2.024	85,2	350	14,7
Tidak	7.324	5.398	73,7	1.926	26,3

Tabel 4.54.
Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan pilihan program studi peserta tugas belajar sesuai dengan kebutuhan puskesmas menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Menyediakan pilihan program studi peserta tubel sesuai kebutuhan puskesmas			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	166	48,8	174	51,2
2	Sumatera Utara	571	213	37,3	358	62,7
3	Sumatera Barat	264	155	58,7	109	41,3
4	Riau	212	114	53,8	98	46,2
5	Jambi	176	103	58,5	73	41,5
6	Sumatera Selatan	322	171	53,1	151	46,9
7	Bengkulu	179	96	53,6	83	46,4
8	Lampung	291	173	59,5	118	40,5
9	Kep. Bangka Belitung	62	35	56,5	27	43,5
10	Kep. Riau	72	31	43,1	41	56,9
11	DKI Jakarta	314	167	53,2	147	46,8
12	Jawa Barat	1.050	641	61,0	409	39,0
13	Jawa Tengah	875	572	65,4	303	34,6
14	DI Yogyakarta	121	96	79,3	25	20,7
15	Jawa Timur	960	564	58,8	396	41,3
16	Banten	233	120	51,5	113	48,5
17	Bali	120	72	60,0	48	40,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	84	53,2	74	46,8
19	Nusa Tenggara Timur	371	240	64,7	131	35,3
20	Kalimantan Barat	238	153	64,3	85	35,7
21	Kalimantan Tengah	195	133	68,2	62	31,8
22	Kalimantan Selatan	230	171	74,3	59	25,7
23	Kalimantan Timur	174	110	63,2	64	36,8
24	Kalimantan Utara	46	23	50,0	23	50,0
25	Sulawesi Utara	186	107	57,5	79	42,5
26	Sulawesi Tengah	189	123	65,1	66	34,9
27	Sulawesi Selatan	448	228	50,9	220	49,1
28	Sulawesi Tenggara	268	98	36,6	170	63,4
29	Gorontalo	93	58	62,4	35	37,6
30	Sulawesi Barat	94	44	46,8	50	53,2
31	Maluku	198	100	50,5	98	49,5
32	Maluku Utara	127	55	43,3	72	56,7
33	Papua Barat	150	72	48,0	78	52,0
34	Papua	372	146	39,2	226	60,8
INDONESIA		9.699	5.434	56,0	4.265	44,0

Tabel 4.55.
Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan pilihan program studi peserta tugas belajar sesuai dengan kebutuhan puskesmas menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Menyediakan pilihan program studi peserta tubel sesuai kebutuhan puskesmas			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	2.164	58,1	1.558	41,9
Non Rawat Inap	5.977	3.270	54,7	2.706	45,3
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	1.850	59,3	1.272	40,7
Perdesaan	4.813	2.776	57,7	2.037	42,3
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	808	45,8	956	54,2
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	1.503	59,2	1.036	40,8
Non BLUD	7.159	3.931	54,9	3.228	45,1
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	1.499	63,1	875	36,9
Tidak	7.324	3.935	53,7	3.389	46,3

Tabel 4.56.

Distribusi puskesmas berdasarkan penyediaan kesempatan tenaga kesehatan mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah berdasarkan provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Memberikan kesempatan tenaga kesehatan mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	322	94,7	18	5,3
2	Sumatera Utara	571	501	87,7	70	12,3
3	Sumatera Barat	264	255	96,6	9	3,4
4	Riau	212	198	93,4	14	6,6
5	Jambi	176	170	96,6	6	3,4
6	Sumatera Selatan	322	295	91,6	27	8,4
7	Bengkulu	179	164	91,6	15	8,4
8	Lampung	291	274	94,2	17	5,8
9	Kep. Bangka Belitung	62	61	98,4	1	1,6
10	Kep. Riau	72	70	97,2	2	2,8
11	DKI Jakarta	314	275	87,6	39	12,4
12	Jawa Barat	1050	1003	95,5	47	4,5
13	Jawa Tengah	875	843	96,3	32	3,7
14	DI Yogyakarta	121	121	100,0	0	0
15	Jawa Timur	960	939	97,8	21	2,2
16	Banten	233	226	97,0	7	3,0
17	Bali	120	119	99,2	1	0,8
18	Nusa Tenggara Barat	158	149	94,3	9	5,7
19	Nusa Tenggara Timur	371	344	92,7	27	7,3
20	Kalimantan Barat	238	228	95,8	10	4,2
21	Kalimantan Tengah	195	183	93,8	12	6,2
22	Kalimantan Selatan	230	229	99,6	1	0,4
23	Kalimantan Timur	174	163	93,7	11	6,3
24	Kalimantan Utara	46	42	91,3	4	8,7
25	Sulawesi Utara	186	169	90,9	17	9,1
26	Sulawesi Tengah	189	178	94,2	11	5,8
27	Sulawesi Selatan	448	428	95,5	20	4,5
28	Sulawesi Tenggara	268	234	87,3	34	12,7
29	Gorontalo	93	82	88,2	11	11,8
30	Sulawesi Barat	94	85	90,4	9	9,6
31	Maluku	198	157	79,3	41	20,7
32	Maluku Utara	127	106	83,5	21	16,5
33	Papua Barat	150	114	76,0	36	24,0
34	Papua	372	199	53,5	173	46,5
INDONESIA		9.699	8.926	92,0	773	8,0

Tabel 4.57.

Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian kesempatan tenaga kesehatan mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah berdasarkan kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Memberikan kesempatan nakes mengikuti seminar/workshop/kegiatan ilmiah			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	3.493	93,8	229	6,2
Non Rawat Inap	5.977	5.433	90,9	543	9,1
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	2.940	94,2	182	5,8
Perdesaan	4.813	4.515	93,8	298	6,2
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.471	83,4	293	16,6
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	2.351	92,6	188	7,4
Non BLUD	7.159	6.575	91,8	584	8,2
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	2.276	95,9	98	4,1
Tidak	7.324	6.650	90,8	674	9,2

Tabel 4.58.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Mempunyai uraian tugas dan wewenang terdokumentasi			
			Ya		Tidak	
			n	%	N	%
1	Aceh	340	289	85,0	51	15,0
2	Sumatera Utara	571	425	74,4	146	25,6
3	Sumatera Barat	264	241	91,3	23	8,7
4	Riau	212	176	83,0	36	17,0
5	Jambi	176	157	89,2	19	10,8
6	Sumatera Selatan	322	276	85,7	46	14,3
7	Bengkulu	179	159	88,8	20	11,2
8	Lampung	291	265	91,1	26	8,9
9	Kep. Bangka Belitung	62	62	100,0	0	0
10	Kep. Riau	72	62	86,1	10	13,9
11	DKI Jakarta	314	282	89,8	32	10,2
12	Jawa Barat	1050	976	93,0	74	7,0
13	Jawa Tengah	875	833	95,2	42	4,8
14	DI Yogyakarta	121	119	98,3	2	1,7
15	Jawa Timur	960	935	97,4	25	2,6
16	Banten	233	220	94,4	13	5,6
17	Bali	120	117	97,5	3	2,5
18	Nusa Tenggara Barat	158	143	90,5	15	9,5
19	Nusa Tenggara Timur	371	308	83,0	63	17,0
20	Kalimantan Barat	238	217	91,2	21	8,8
21	Kalimantan Tengah	195	169	86,7	26	13,3
22	Kalimantan Selatan	230	221	96,1	9	3,9
23	Kalimantan Timur	174	159	91,4	15	8,6
24	Kalimantan Utara	46	37	80,4	9	19,6
25	Sulawesi Utara	186	158	84,9	28	15,1
26	Sulawesi Tengah	189	147	77,8	42	22,2
27	Sulawesi Selatan	448	416	92,9	32	7,1
28	Sulawesi Tenggara	268	203	75,7	65	24,3
29	Gorontalo	93	88	94,6	5	5,4
30	Sulawesi Barat	94	76	80,9	18	19,1
31	Maluku	198	139	70,2	59	29,8
32	Maluku Utara	127	93	73,2	34	26,8
33	Papua Barat	150	103	68,7	47	31,3
34	Papua	372	170	45,7	202	54,3
INDONESIA		9699	8,440	87,0	1,258	13,0

Tabel 4.59.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Mempunyai uraian tugas dan wewenang terdokumentasi			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	3.341	89,8	381	10,2
Non Rawat Inap	5.977	5.100	85,3	877	14,7
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	2.862	91,7	260	8,3
Perdesaan	4.813	4.271	88,7	542	11,3
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.308	74,1	456	25,9
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	2.283	89,9	257	10,1
Non BLUD	7.159	6.158	86,0	1.001	14,0
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	2.291	96,5	84	3,5
Tidak	7.324	6.150	84,0	1.174	16,0

Tabel 4.60.

Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian peringatan dan tindak lanjutnya terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR/SIP/SIK menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Memberikan peringatan dan tindak lanjut bagi tenaga kesehatan tanpa STR/SIP/SIK			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	296	87,1	44	12,9
2	Sumatera Utara	571	415	72,7	156	27,3
3	Sumatera Barat	264	206	78,0	58	22,0
4	Riau	212	164	77,4	48	22,6
5	Jambi	176	155	88,1	21	11,9
6	Sumatera Selatan	322	261	81,1	61	18,9
7	Bengkulu	179	146	81,6	33	18,4
8	Lampung	291	240	82,5	51	17,5
9	Kep. Bangka Belitung	62	48	77,4	14	22,6
10	Kep. Riau	72	59	81,9	13	18,1
11	DKI Jakarta	314	276	87,9	38	12,1
12	Jawa Barat	1.050	868	82,7	182	17,3
13	Jawa Tengah	875	777	88,8	98	11,2
14	DI Yogyakarta	121	113	93,4	8	6,6
15	Jawa Timur	960	874	91,0	86	9,0
16	Banten	233	207	88,8	26	11,2
17	Bali	120	106	88,3	14	11,7
18	Nusa Tenggara Barat	158	137	86,7	21	13,3
19	Nusa Tenggara Timur	371	293	79,0	78	21,0
20	Kalimantan Barat	238	194	81,5	44	18,5
21	Kalimantan Tengah	195	147	75,4	48	24,6
22	Kalimantan Selatan	230	171	74,3	59	25,7
23	Kalimantan Timur	174	146	83,9	28	16,1
24	Kalimantan Utara	46	39	84,8	7	15,2
25	Sulawesi Utara	186	158	84,9	28	15,1
26	Sulawesi Tengah	189	151	79,9	38	20,1
27	Sulawesi Selatan	448	400	89,3	48	10,7
28	Sulawesi Tenggara	268	218	81,3	50	18,7
29	Gorontalo	93	83	89,2	10	10,8
30	Sulawesi Barat	94	81	86,2	13	13,8
31	Maluku	198	124	62,6	74	37,4
32	Maluku Utara	127	101	79,5	26	20,5
33	Papua Barat	150	83	55,3	67	44,7
34	Papua	372	159	42,7	213	57,3
INDONESIA		9.699	7.895	81,4	1.803	18,6

Tabel 4.61.

Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian peringatan dan tindak lanjutnya terhadap tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR/SIP/SIK menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Memberikan peringatan dan tindak lanjut bagi tenaga kesehatan tanpa STR/SIP/SIK			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	3.098	83,2	624	16,8
Non Rawat Inap	5.977	4.798	80,3	1.179	19,7
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	2.642	84,6	480	15,4
Perdesaan	4.813	3.993	83,0	820	17,0
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.261	71,5	503	28,5
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	2.134	84,0	406	16,0
Non BLUD	7.159	5.762	80,5	1.397	19,5
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	2.129	89,6	246	10,4
Tidak	7.324	5.767	78,7	1.557	21,3

Tabel 4.62.

Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian sanksi berupa rekomendasi pencabutan SIP bagi tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Pemberian sanksi berupa rekomendasi pencabutan SIP bagi pelanggaran disiplin			
			Ya		Tidak	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	100	29,4	240	70,6
2	Sumatera Utara	571	139	24,3	432	75,7
3	Sumatera Barat	264	62	23,5	202	76,5
4	Riau	212	60	28,3	152	71,7
5	Jambi	176	80	45,5	96	54,5
6	Sumatera Selatan	322	128	39,8	194	60,2
7	Bengkulu	179	50	27,9	129	72,1
8	Lampung	291	121	41,6	170	58,4
9	Kep. Bangka Belitung	62	12	19,4	50	80,6
10	Kep. Riau	72	12	16,7	60	83,3
11	DKI Jakarta	314	152	48,4	162	51,6
12	Jawa Barat	1.050	347	33,0	703	67,0
13	Jawa Tengah	875	320	36,6	555	63,4
14	DI Yogyakarta	121	22	18,2	99	81,8
15	Jawa Timur	960	338	35,2	622	64,8
16	Banten	233	60	25,8	173	74,2
17	Bali	120	31	25,8	89	74,2
18	Nusa Tenggara Barat	158	60	38,0	98	62,0
19	Nusa Tenggara Timur	371	80	21,6	291	78,4
20	Kalimantan Barat	238	59	24,8	179	75,2
21	Kalimantan Tengah	195	49	25,1	146	74,9
22	Kalimantan Selatan	230	56	24,3	174	75,7
23	Kalimantan Timur	174	60	34,5	114	65,5
24	Kalimantan Utara	46	14	30,4	32	69,6
25	Sulawesi Utara	186	68	36,6	118	63,4
26	Sulawesi Tengah	189	31	16,4	158	83,6
27	Sulawesi Selatan	448	153	34,2	295	65,8
28	Sulawesi Tenggara	268	85	31,7	183	68,3
29	Gorontalo	93	24	25,8	69	74,2
30	Sulawesi Barat	94	32	34,0	62	66,0
31	Maluku	198	17	8,6	181	91,4
32	Maluku Utara	127	36	28,3	91	71,7
33	Papua Barat	150	20	13,3	130	86,7
34	Papua	372	54	14,5	318	85,5
INDONESIA		9.699	2.932	30,2	6.767	69,8

Tabel 4.63.

Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian sanksi rekomendasi pencabutan SIP bagi tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Pemberian sanksi berupa rekomendasi pencabutan SIP bagi pelanggaran disiplin			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan					
Rawat Inap	3.722	1.122	30,1	2.600	69,9
Non Rawat Inap	5.977	1.810	30,3	4.167	69,7
Wilayah Kerja					
Perkotaan	3.122	1.018	32,6	2.104	67,4
Perdesaan	4.813	1.526	31,7	3.287	68,3
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	388	22,0	1.376	78,0
Pola Pengelolaan Keuangan					
BLUD	2.540	824	32,4	1.716	67,6
Non BLUD	7.159	2.108	29,4	5.051	70,6
Pengakuan Terhadap Mutu					
Ada	2.375	861	36,3	1.514	63,7
Tidak	7.324	2.071	28,3	5.253	71,7

Tabel 4.64.
Distribusi puskesmas berdasarkan pengawasan mutu tenaga kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Inspeksi berkala kepemilikan STR/SIP				Ada mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya oleh pimpinan				Evaluasi kinerja secara berkala				Evaluasi penerapan ditempat kerja bagi yang mengikuti diklat /seminar/workshop					
			Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya, ada dokumen		Ya, tidak ada dokumen		Tidak ada	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Aceh	340	251	73,8	89	26,2	224	65,9	116	34,1	256	75,3	84	24,7	108	31,8	180	52,9	52	15,3
2	Sumatera Utara	571	408	71,5	163	28,5	287	50,3	284	49,7	386	67,6	185	32,4	115	20,1	340	59,5	116	20,3
3	Sumatera Barat	264	208	78,8	56	21,2	209	79,2	55	20,8	234	88,6	30	11,4	113	42,8	121	45,8	30	11,4
4	Riau	212	151	71,2	61	28,8	154	72,6	58	27,4	169	79,7	43	20,3	82	38,7	95	44,8	35	16,5
5	Jambi	176	150	85,2	26	14,8	149	84,7	27	15,3	159	90,3	17	9,7	92	52,3	63	35,8	21	11,9
6	Sumatera Selatan	322	246	76,4	76	23,6	238	73,9	84	26,1	275	85,4	47	14,6	148	46,0	125	38,8	49	15,2
7	Bengkulu	179	135	75,4	44	24,6	124	69,3	55	30,7	139	77,7	40	22,3	79	44,1	78	43,6	22	12,3
8	Lampung	291	242	83,2	49	16,8	240	82,5	51	17,5	269	92,4	22	7,6	147	50,5	117	40,2	27	9,3
9	Kep. Bangka Belitung	62	51	82,3	11	17,7	52	83,9	10	16,1	54	87,1	8	12,9	31	50,0	25	40,3	6	9,7
10	Kep. Riau	72	53	73,6	19	26,4	54	75,0	18	25,0	62	86,1	10	13,9	28	38,9	32	44,4	12	16,7
11	DKI Jakarta	314	279	88,9	35	11,1	245	78,0	69	22,0	259	82,5	55	17,5	165	52,5	106	33,8	43	13,7
12	Jawa Barat	1050	862	82,1	188	17,9	854	81,3	196	18,7	964	91,8	86	8,2	555	52,9	375	35,7	120	11,4
13	Jawa Tengah	875	789	90,2	86	9,8	788	90,1	87	9,9	812	92,8	63	7,2	532	60,8	262	29,9	81	9,3
14	DI Yogyakarta	121	113	93,4	8	6,6	115	95,0	6	5,0	119	98,3	2	1,7	70	57,9	40	33,1	11	9,1
15	Jawa Timur	960	885	92,2	75	7,8	864	90,0	96	10,0	898	93,5	62	6,5	585	60,9	282	29,4	93	9,7
16	Banten	233	207	88,8	26	11,2	201	86,3	32	513,7	216	92,7	17	7,3	153	65,7	62	26,6	18	7,7
17	Bali	120	96	80,0	24	20,0	111	92,5	9	7,5	115	95,8	5	4,2	70	58,3	44	36,7	6	5,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	128	81,0	30	19,0	118	74,7	40	25,3	124	78,5	34	21,5	71	44,9	66	41,8	21	13,3

Tabel 4.64.
Distribusi puskesmas berdasarkan pengawasan mutu tenaga kesehatan menurut provinsi, Risnakes 2017
(Lanjutan)

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Inspeksi berkala kepemilikan STR/SIP				Ada mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya oleh pimpinan				Evaluasi kinerja secara berkala				Evaluasi penerapan ditempat kerja bagi yang mengikuti diklat /seminar/workshop					
			Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya, ada dokumen		Ya, tidak ada dokumen		Tidak ada	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%	N	%	n	%	n	%
19	Nusa Tenggara Timur	371	231	62,3	140	37,7	257	69,3	114	30,7	292	78,7	79	21,3	134	36,1	160	43,1	77	20,8
20	Kalimantan Barat	238	158	66,4	80	33,6	175	73,5	63	26,5	204	85,7	34	14,3	93	39,1	119	50,0	26	10,9
21	Kalimantan Tengah	195	135	69,2	60	30,8	136	69,7	59	30,3	166	85,1	29	14,9	84	43,1	84	43,1	27	13,8
22	Kalimantan Selatan	230	166	72,2	64	27,8	180	78,3	50	21,7	203	88,3	27	11,7	100	43,5	97	42,2	33	14,3
23	Kalimantan Timur	174	144	82,8	30	17,2	121	69,5	53	30,5	149	85,6	25	14,4	75	43,1	73	42,0	26	14,9
24	Kalimantan Utara	46	29	63,0	17	37,0	26	56,5	20	43,5	38	82,6	8	17,4	11	23,9	18	39,1	17	37,0
25	Sulawesi Utara	186	123	66,1	63	33,9	132	71,0	54	29,0	164	88,2	22	11,8	82	44,1	80	43,0	24	12,9
26	Sulawesi Tengah	189	129	68,3	60	31,7	85	45,0	104	55,0	144	76,2	45	23,8	33	17,5	114	60,3	42	22,2
27	Sulawesi Selatan	448	367	81,9	81	18,1	351	78,3	97	21,7	386	86,2	62	13,8	189	42,2	189	42,2	70	15,6
28	Sulawesi Tenggara	268	199	74,3	69	25,7	161	60,1	107	39,9	201	75,0	67	25,0	81	30,2	128	47,8	59	22,0
29	Gorontalo	93	77	82,8	16	17,2	73	78,5	20	21,5	80	86,0	13	14,0	44	47,3	42	45,2	7	7,5
30	Sulawesi Barat	94	68	72,3	26	27,7	64	68,1	30	31,9	70	74,5	24	25,5	40	42,6	44	46,8	10	10,6
31	Maluku	198	91	46,0	107	54,0	99	50,0	99	50,0	118	59,6	80	40,4	38	19,2	109	55,1	51	25,8
32	Maluku Utara	127	77	60,6	50	39,4	69	54,3	58	45,7	79	62,2	48	37,8	35	27,6	59	46,5	33	26,0
33	Papua Barat	150	48	32,0	102	68,0	57	38,0	93	62,0	64	42,7	86	57,3	27	18,0	65	43,3	58	38,7
34	Papua	372	117	31,5	255	68,5	95	25,5	277	74,5	116	31,2	256	68,8	52	14,0	167	44,9	153	41,1
INDONESIA		9.699	7.413	76,4	2.286	23,6	7.108	73,3	2.591	26,7	7.984	82,3	1.715	17,7	4.262	43,9	3.961	40,8	1.476	15,2

Tabel 4.65.

Distribusi puskesmas berdasarkan pengawasan mutu tenaga kesehatan menurut kategori puskesmas, Risnakes 2017

Kategori puskesmas	Jumlah Puskesmas	Inspeksi berkala kepemilikan STR/SIP				Ada mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya oleh pimpinan				Evaluasi kinerja secara berkala				Evaluasi penerapan ditempat kerja bagi yang mengikuti diklat /seminar/workshop							
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya, ada dokumen hasil evaluasi		Ya, tidak ada dokumen hasil		Tidak ada			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%		
Kemampuan Penyelenggaraan																					
Rawat Inap	3.722	2.892	77,7	830	22,3	2.834	76,1	888	23,9	3.171	85,2	551	14,8	1.698	45,6	1.515	40,7	509	13,7		
Non Rawat Inap	5.977	4.521	75,6	1.456	24,4	4.274	71,5	1.703	28,5	4.813	80,5	1.164	19,5	2.564	42,9	2.446	40,9	967	16,2		
Wilayah Kerja																					
Perkotaan	3.122	2.563	82,1	559	17,9	2.474	79,2	648	20,8	2.680	85,8	442	14,2	1.564	50,1	1.144	36,6	414	13,3		
Perdesaan	4.813	3.822	79,4	991	20,6	3.654	75,9	1.159	24,1	4.088	84,9	725	15,1	2.194	45,6	1.957	40,7	662	13,8		
Terpencil/ Sangat Terpencil	1.764	1.028	58,3	736	41,7	980	55,6	784	44,4	1.216	68,9	548	31,1	504	28,6	860	48,8	400	22,7		
Pola Pengelolaan Keuangan																					
BLUD	2.540	2.042	80,4	498	19,6	1.992	78,4	548	21,6	2.179	85,8	361	14,2	1.312	51,7	898	35,4	330	13,0		
Non BLUD	7.159	5.371	75,0	1.788	25,0	5.116	71,5	2.043	28,5	5.805	81,1	1.354	18,9	2.950	41,2	3.063	42,8	1.146	16,0		
Pengakuan Terhadap Mutu																					
Ada	2.375	2.126	89,5	249	10,5	2.134	89,9	241	10,1	2.200	92,6	175	7,4	1.443	60,8	744	31,3	188	7,9		
Tidak	7.324	5.287	72,2	2.037	27,8	4.974	67,9	2.350	32,1	5.784	79,0	1.540	21,0	2.819	38,5	3.217	43,9	1.288	17,6		

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENUGASAN GANDA DI PUSKESMAS

5.1 Pendelegasian wewenang (*task shifting*) dan penugasan ganda (*multitasking*) di puskesmas

Pendelegasian wewenang (*task shifting*) merupakan suatu istilah yang diberikan terhadap suatu proses dimana suatu penugasan dialihkan kepada petugas kesehatan yang kurang terlatih dan kualifikasi yang lebih rendah. Melalui pengorganisasian tenaga melalui cara ini, *task shifting* dapat lebih efisien dalam mendayagunakan sumber daya manusia dan memecahkan berbagai permasalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Pendelegasian wewenang (*task shifting*) juga dapat melibatkan pendelegasian beberapa penugasan yang jelas kepada kader kesehatan baru yang menerima pelatihan spesifik dan berbasis kompetensi.

Beberapa pengaturan mengenai *task shifting* di Indonesia, antara lain Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pasal 23 (1) menyatakan “Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”. Masih dalam pasal yang sama, pada ayat 3, pelimpahan tindakan dilakukan dengan ketentuan: tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus. Belum ada petunjuk teknis maupun contoh format pelimpahan yang dimaksud.

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat (pasal 29 UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan). Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Perawat berwenang melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis; melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah. Perawat juga melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat (pasal 37).

Berdasarkan UU no.36 th 2014 tentang tenaga kesehatan (Pasal 63), dalam keadaan tertentu tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan diluar kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan diatur dengan peraturan menteri. Pada pasal 65 disebutkan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.

Pelimpahan tindakan dilakukan dengan ketentuan bahwa tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan pemberi pelimpahan dan pemberi pelimpahan tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan

Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 73 (3) memberi peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medik jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Hasil Risnakes 2017 terkait pendelegasian wewenang (*task shifing*) dan penugasan ganda (*multi tasking*).

Hasil Risnakes 2017 menunjukkan bahwa di sekitar 90,2% puskesmas terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki. Sebanyak 95,9% di antaranya mengakui adanya tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen dan 66,1% mengakui ada tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien.

Tindakan medis umum di puskesmas yang merupakan kompetensi dokter masih ditemukan dilakukan oleh tenaga farmasi, analis, gizi, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat ($\leq 5\%$). Sumber Daya Manusia yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien di puskesmas proporsi yang tertinggi sesuai kompetensinya adalah dokter (91,0%), kemudian perawat (83,8%), bidan (68,9%), dokter gigi (26,6%), dan perawat gigi (21,2%). Sedangkan tenaga lain seperti farmasi, analis, gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan

masyarakat proporsinya $\leq 5\%$. Tindakan menjahit luka (*hecting*) proporsi tertinggi dilakukan oleh perawat, dilakukandi 95,3% puskesmas, dokter (76,0%), dan bidan (65,0%). Tindakan injeksi obat/vaksin proporsi terbanyak dilakukan oleh perawat (94,1%), bidan (82,3%), dokter (68,7%), dokter gigi (13,8), dan perawat gigi (11,9%). Tindakan pemasangan dan pelepasan infus proporsi tertinggi adalah perawat (88,1%) kemudian bidan (71,6%), dokter (52,3%), perawat gigi (2,4%), dan dokter gigi (2,1%). Proporsi tindakan sirkumsisi yang tertinggi dilakukan oleh perawat (64,0%), dokter (50,6%), dan bidan (18,7%). Tindakan pengambilan benda asing di telinga proporsi SDM tertinggi adalah dokter (76,9%), kemudian perawat (71,9%), dan bidan (25,1%). Begitu juga tindakan pengambilan benda asing dari hidung, proporsi dokter (64,9%), perawat (51,7%) dan bidan (17,7%).

Proporsi tertinggi pelaksana tindakan medis gigi dilakukan oleh dokter gigi seperti pencabutan gigi dilakukan di 61,6% puskesmas, penambalan gigi (55,8%), pemasangan gigi palsu (22,0%), dan pemasangan kawat gigi (14,1%). Kemudian diikuti tenaga perawat gigi yaitu pencabutan gigi (53,8%), penambalan gigi (44,4%), pemasangan gigi palsu (11,4%), dan pemasangan kawat gigi (6,8%).

Tindakan KB proporsi tertinggi dilakukan oleh bidan, kemudian diikuti tenaga dokter, dan perawat. Tindakan persalinan normal, proporsi tertinggi dilakukan oleh bidan di 81,6% puskesmas, kemudian dokter (30,5%), dan perawat (10,4%). Persalinan dengan vakum proporsi tertinggi dilakukan oleh bidan di 12,8% puskesmas, dokter (8,0%), dan perawat (1,0%). Proporsi puskesmas dengan tindakan kuretase yang dilakukan bidan lebih tinggi (6,1%) dibandingkan dengan dokter (5,6%) sedang kuretase yang dilakukan tenaga perawat proporsinya kecil yaitu 0,8 persen. Suntik imunisasi proporsi tertinggi dilakukan oleh bidan (90,7%), perawat (68,4%) dan dokter (38,0%).

Tindakan meracik obat masih dilakukan oleh tenaga yang bukan tenaga farmasi. Meskipun demikian proporsi tertinggi meracik obat masih dilakukan oleh tenaga farmasi di 76,2% puskesmas, kemudian perawat (38,1%), bidan (30,1%), dokter (11,6%), dan tenaga kesehatan lain kurang dari 5 persen. Tindakan menyerahkan obat dan memberikan informasi obat proporsi tertinggi dilakukan oleh tenaga farmasi di 75,7% puskesmas, diikuti oleh perawat (46,9%), bidan (37,8%), dan dokter (16,9%). Sedang tenaga lain proporsinya sekitar lima persen atau kurang.

Proporsi SDM kesehatan yang melakukan pemeriksaan di laboratorium klinik proporsi tertinggi adalah tenaga analis, dilakukan di 63,5% puskesmas, kemudian perawat (20,6%), dan bidan (9,4%). Sedang proporsi tenaga lain yang melakukan pemeriksaan di laboratorium klinik proporsinya di bawah lima persen.

Seluruh tenaga kesehatan di puskesmas turut serta dalam kegiatan UKM. Kegiatan penyuluhan, proporsi tertinggi dilakukan oleh bidan, dilakukan di 82,2% puskesmas, perawat (81,6%), kesehatan masyarakat (72,3%), dokter (69,4%), kesehatan lingkungan (65,2%), dan gizi (58,9%). Sedang tenaga lain proporsinya di bawah lima puluh persen. Melakukan deteksi

dini/penemuan kasus gizi di masyarakat, proporsi tertinggi dilakukan tenaga gizi, dilakukan di 71,3%, dan bidan (61,1%). Deteksi dini/penemuan kasus TB di masyarakat, proporsi tertinggi dilakukan oleh perawat, dilakukan di 82,7% puskesmas. Pelatihan kader kesehatan proporsi tertinggi dilakukan tenaga bidan, dilakukan di 75,3% puskesmas, dan perawat (60,1%). Kegiatan *fogging*/abatisasi proporsi tertinggi dilakukan tenaga kesehatan lingkungan, dilakukan di 44,1% puskesmas dan perawat (33,5%).

Tabel 5.1.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas diluar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Jumlah (N)	Ada tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Aceh	340	271	79.7	69	20.3
Sumatera Utara	571	509	89.1	62	10.9
Sumatera Barat	264	256	97.0	8	3.0
Riau	212	197	92.9	15	7.1
Jambi	176	168	95.5	8	4.5
Sumatera Selatan	322	284	88.2	38	11.8
Bengkulu	179	163	91.1	16	8.9
Lampung	291	279	95.9	12	4.1
Bangka Belitung	62	60	96.8	2	3.2
Kepulauan Riau	72	72	100.0	0	0.0
DKI Jakarta	314	217	69.1	97	30.9
Jawa Barat	1,050	1,001	95.3	49	4.7
Jawa Tengah	875	826	94.4	49	5.6
DI Yogyakarta	121	110	90.9	11	9.1
Jawa Timur	960	905	94.3	55	5.7
Banten	233	230	98.7	3	1.3
Bali	120	120	100.0	0	0.0
Nusa Tenggara Barat	158	139	88.0	19	12.0
Nusa Tenggara Timur	371	340	91.6	31	8.4
Kalimantan Utara	238	225	94.5	13	5.5
Kalimantan Barat	195	180	92.3	15	7.7
Kalimantan Tengah	230	212	92.2	18	7.8
Kalimantan Selatan	173	152	87.9	21	12.1
Kalimantan Timur	46	35	76.1	11	23.9
Sulawesi Utara	186	157	84.4	29	15.6
Sulawesi Tengah	189	173	91.5	16	8.5
Sulawesi Selatan	448	426	95.1	22	4.9
Sulawesi Tenggara	268	203	75.7	65	24.3
Gorontalo	93	76	81.7	17	18.3
Sulawesi Barat	94	84	89.4	10	10.6
Maluku	198	180	90.9	18	9.1
Maluku Utara	127	113	89.0	14	11.0
Papua Barat	150	119	79.3	31	20.7
Papua	372	270	72.6	102	27.4
INDONESIA	9698	8752	90.2	946	9.8

Tabel 5.2.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi untuk penugasan manajemen dan tatalaksana pasien menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Jumlah (N)	Bidang Penugasan							
		Bidang Manajemen				Bidang tatalaksana pasien			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		N	%	n	%	n	%	n	%
Aceh	271	257	94,8	14	5,2	181	66,8	90	33,2
Sumatera Utara	509	481	94,5	28	5,5	350	68,8	159	31,2
Sumatera Barat	256	251	98,0	5	2,0	147	57,4	109	42,6
Riau	197	183	92,9	14	7,1	107	54,3	90	45,7
Jambi	168	166	98,8	2	1,2	113	67,3	55	32,7
Sumatera Selatan	284	273	96,1	11	3,9	182	64,1	102	35,9
Bengkulu	163	158	96,9	5	3,1	118	72,4	45	27,6
Lampung	279	275	98,6	4	1,4	191	68,5	88	31,5
Bangka Belitung	60	60	100,0	0	0,0	27	45,0	33	55,0
Kepulauan Riau	72	72	100,0	0	0,0	52	72,2	20	27,8
DKI Jakarta	217	168	77,4	49	22,6	143	65,9	74	34,1
Jawa Barat	1.001	970	96,9	31	3,1	706	70,5	295	29,5
Jawa Tengah	826	807	97,7	19	2,3	550	66,6	276	33,4
DI Yogyakarta	110	106	96,4	4	3,6	59	53,6	51	46,4
Jawa Timur	905	871	96,2	34	3,8	549	60,7	356	39,3
Banten	230	227	98,7	3	1,3	147	63,9	83	36,1
Bali	120	116	96,7	4	3,3	96	80,0	24	20,0
Nusa Tenggara Barat	139	137	98,6	2	1,4	64	46,0	75	54,0
Nusa Tenggara Timur	340	333	97,9	7	2,1	296	87,1	44	12,9
Kalimantan Utara	225	222	98,7	3	1,3	124	55,1	101	44,9
Kalimantan Barat	180	175	97,2	5	2,8	120	66,7	60	33,3
Kalimantan Tengah	212	210	99,1	2	0,9	143	67,5	69	32,5
Kalimantan Selatan	152	152	100,0	0	0,0	79	52,0	73	48,0
Kalimantan Timur	35	33	94,3	2	5,7	25	71,4	10	28,6
Sulawesi Utara	157	153	97,5	4	2,5	92	58,6	65	41,4
Sulawesi Tengah	173	166	96,0	7	4,0	117	67,6	56	32,4
Sulawesi Selatan	426	411	96,5	15	3,5	245	57,5	181	42,5
Sulawesi Tenggara	203	179	88,2	24	11,8	123	60,6	80	39,4
Gorontalo	76	69	90,8	7	9,2	46	60,5	30	39,5
Sulawesi Barat	84	77	91,7	7	8,3	51	60,7	33	39,3
Maluku	180	166	92,2	14	7,8	160	88,9	20	11,1
Maluku Utara	113	109	96,5	4	3,5	82	72,6	31	27,4
Papua Barat	119	113	95,0	6	5,0	95	79,8	24	20,2
Papua	270	245	90,7	25	9,3	209	77,4	61	22,6
INDONESIA	8.752	8.391	95,9	361	4,1	5.789	66,1	2.963	33,9

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki (N=8752)

Tabel 5.3.
Distribusi puskesmas berdasarkan bidang penugasan menurut karakteristik puskesmas,
Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	Jumlah (N)	Bidang penugasan							
		Bidang manajemen				Bidang tatalaksana pasien			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat inap	3,418	3,309	96.8	109	3.2	2,193	64.2	1,225	35.8
Rawat jalan	5,334	5,082	95.3	252	4.7	3,596	67.4	1,738	32.6
Wilayah Kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	2,543	2.436	95,8	107	4,2	1.518	59,7	1.025	40,3
Puskesmas Perdesaan	4,492	4.321	96,2	171	3,8	3.019	67,2	1.473	32,8
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,708	1.622	95,0	86	5,0	1.267	74,2	441	25,8
Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas									
BLUD	2,239	2,118	94.6	121	5.4	1,432	64.0	807	36.0
Non BLUD	6,513	6,273	96.3	240	3.7	4,357	66.9	2,156	33.1
Pengakuan terhadap mutu									
Ada	2,135	2,032	95.2	103	4.8	1,289	60.4	846	39.6
Tidak	6,617	6,359	96.1	258	3.9	4,500	68.0	2,117	32.0

Tabel 5.4.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang melakukan kegiatan tindakan medis umum, gigi, dan Keluarga Berencana menurut jenis tindakan, Risnakes 2017

JENIS TINDAKAN	Jenis SDM Kesehatan											
	Jumlah (N)	Dokter (%)	Dokter gigi (%)	Perawat (%)	Perawat gigi (%)	Bidan (%)	Farmasi (%)	Analisis (%)	Gizi (%)	Kesling (%)	Kemas (%)	Non Nakes (%)
TINDAKAN MEDIS UMUM												
a. Pemeriksaan dan pengobatan pasien	9698	91.0	26.6	83.8	21.2	68.9	5.4	5.0	4.6	2.9	2.7	0.2
b. Menjahit luka (<i>hecting</i>)	9698	76.0	5.0	95.3	3.5	65.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1
c. Injeksi obat/vaksin	9698	68.7	13.8	94.1	11.9	82.3	0.9	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2
d. pemasangan dan pelepasan infus	9698	52.3	2.1	88.1	2.4	71.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1
e. Sirkumsisi	9698	50.6	0.9	64.0	0.9	18.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
f. Pengambilan benda asing di telinga	9698	76.9	1.1	71.9	1.0	25.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
g. Pengambilan benda asing dari hidung	9698	64.9	3.7	51.7	1.9	17.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
TINDAKAN MEDIS GIGI												
a. Pencabutan gigi	9698	4.1	61.6	4.7	53.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
b. Penambalan gigi	9698	2.7	55.8	2.3	44.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Pemasangan gigi palsu	9698	0.9	22.0	0.6	11.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Pemasangan kawat gigi	9698	0.7	14.1	0.3	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TINDAKAN KB												
a. Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	9698	25.7	0.2	4.7	0.7	90.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Pemasangan implant	9698	25.3	0.1	6.5	0.7	92.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Suntik KB	9698	21.8	0.3	21.8	0.9	95.7	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TINDAKAN KIA												
a. Persalinan normal	9698	30.5	0.1	10.4	0.5	81.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
b. Persalinan dengan Vakum	9698	8.0	0.0	1.0	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Kuretase	9698	5.6	0.1	0.8	0.1	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Suntik Imunisasi	9698	38.0	0.9	68.4	1.3	90.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2

Tabel 5.5.
Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan sumber daya manusia kesehatan yang melakukan kegiatan tindakan farmasi, laboratorium, dan kesehatan masyarakat di puskesmas menurut jenis tindakan, Risnakes 2017

JENIS TINDAKAN	Jumlah (N)	Dokter (%)	Dokter gigi (%)	Perawat (%)	Perawat gigi (%)	Bidan (%)	Farmasi (%)	Analisis (%)	Gizi (%)	Kesling (%)	Kesmas (%)	Non Nakes (%)
Tindakan Farmasi												
a. Meracik obat	9698	11.6	2.6	38.1	3.4	30.1	76.2	1.5	1.2	1.2	1.2	2.3
b. Menyerahkan obat dan memberikan informasi obat	9698	16.9	5.1	46.9	6.4	37.8	75.7	2.8	2.8	2.3	2.6	3.5
Tindakan Laboratorium												
Melakukan pemeriksaan di laboratorium klinik	9698	4.5	0.5	20.6	0.6	9.4	1.8	63.5	1.1	0.9	0.6	1.1
Upaya Kesehatan Masyarakat												
a. Penyuluhan	9698	69.4	35.9	81.6	34.9	82.2	25.2	20.8	58.9	65.2	72.3	9.2
b. Melakukan deteksi dini/ penemuan kasus gizi di masyarakat	9698	37.9	3.6	46.2	3.8	61.1	2.7	3.3	71.3	14.4	23.8	2.7
c. Melakukan deteksi dini/ penemuan kasus TB di masyarakat	9698	48.5	3.0	82.7	3.4	42.4	2.9	16.8	10.7	15.4	23.8	3.1
d. Pelatihan kader kesehatan	9698	48.6	11.1	60.1	9.9	75.3	6.8	5.5	39.6	33.3	46.1	3.9
e. Fogging/abatesasi	9698	5.6	1.4	33.5	2.0	11.3	1.9	2.0	3.2	44.1	23.6	14.2

5.2.1. Penugasan Ganda (*Multitasking*)

Penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen umum dilakukan di 95,9% puskesmas di seluruh Indonesia. Hampir seluruh provinsi memiliki proporsi puskesmas dengan penugasan luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen > 90%, kecuali DKI Jakarta (77,4%). Hampir seluruh provinsi juga memiliki proporsi puskesmas dengan penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang tatalaksana pasien > 50%, kecuali Bangka Belitung (45,0%) dan Nusa Tenggara Barat (46,0%).

Penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen, umum terjadi di puskesmas (rawat inap dan rawat jalan) baik di perkotaan, di perdesaan maupun daerah terpencil/sangat terpencil. Persentase tugas sebagai bendahara puskesmas lebih sering terjadi pada puskesmas di daerah terpencil/sangat terpencil (93,7%), berstatus pola pengelolaan keuangan non BLUD (92,2%), dan puskesmas dengan tidak ada pengakuan terhadap mutu (92,1%). Proporsi penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi sebagai bendahara puskesmas relatif sama antara puskesmas rawat inap (90,1%) dan rawat jalan (90%). Maksud dari puskesmas dengan tidak ada pengakuan terhadap mutu adalah puskesmas yang belum terakreditasi atau ISO ataupun pengakuan mutu lainnya. Kondisi serupa juga terjadi pada penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi sebagai bendahara JKN.

Sebagian besar dari puskesmas yang memiliki tenaga dengan penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen telah diperkuat dengan keberadaan surat tugas/SK tertulis, 71,7% puskesmas menyebutkan penugasan tersebut seluruhnya dikukuhkan dengan surat tugas/surat keputusan, 22% sebagian ditetapkan dengan surat tugas/surat keputusan, dan 6,2% tidak didukung dengan surat tugas/surat keputusan. Puskesmas rawat inap, perkotaan, pola pengelolaan keuangan BLU, dan puskesmas dengan pengakuan terhadap mutu memiliki proporsi yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga yang kurang disebut sebagai salah satu penyebab penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen, proporsinya relatif sama menurut karakteristik puskesmas.

Sekitar 53,6% puskesmas dari puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen menyebutkan bahwa penandatanganan surat tugas/surat keputusan adalah Kepala Dinas Kesehatan. Berdasarkan karakteristik puskesmas, proporsi kepala puskesmas sebagai pejabat yang menandatangani surat tugas/surat keputusan (SK) penugasan cukup tinggi yaitu di atas 80 persen, kecuali puskesmas terpencil/sangat terpencil (74,7%). Sebagian besar penerima tugas tidak dapat menolak penugasan di bidang manajemen (82,55%). Bagi yang bisa menolak, maka alasan karena sudah terlalu banyak tugas merupakan salah satu alasan utama disamping karena merasa tidak kompeten.

Persentase keharusan memberikan laporan atas penugasan yang diemban cukup tinggi (91,6%) dibandingkan dengan jumlah puskesmas tenaga dengan penugasan di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang manajemen, demikian pula dengan supervisi yang dilakukan (96,7%). Terkait imbalan, sebagian besar puskesmas menyatakan bahwa atas penugasan tersebut diberikan imbalan, baik imbalan dalam bentuk honor tambahan, penambahan jasa kapitasi, dan atau lainnya.

Lebih dari separuh puskesmas menyatakan bahwa tenaga yang mendapat penugasan pernah memperoleh pelatihan terkait penugasan di bidang manajemen, namun umumnya pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala.

Tabel 5.6.

Distribusi puskesmas dengan keberadaan petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki berdasarkan bentuk penugasan bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

No	Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Bentuk penugasan di bidang manajemen													
			Bendahara puskesmas		Bendahara JKN		Panitia Pengadaan Barang dan Jasa		Administrasi, kepegawaian, registrasi pasien		Pencatatan dan pelaporan		Pembuat Laporan Program Lain		Lainnya	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1.	Kemampuan penyelenggaraan															
	Rawat inap	3,309	2.981	90.1	2,957	89.4	2,114	63.9	2,333	70.5	2,298	69.4	2,115	63.9	163	4.9
	Rawat jalan	5,082	4.572	90.0	4,440	87.4	3,084	60.7	3,800	74.8	3,669	72.2	3,311	65.2	296	5.8
2.	Wilayah kerja Puskesmas															
	Puskesmas Perkotaan	2,436	2.076	85.2	2,006	82.3	1,420	58.3	1,622	66.6	1,592	65.4	1,388	57.0	156	6.4
	Puskesmas Perdesaan	4,321	3.954	91.5	3,895	90.1	2,858	66.1	3,242	75.0	3,133	72.5	2,927	67.7	208	4.8
	Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,622	1.520	93.7	1,494	92.1	894	55.1	1,279	78.9	1,253	77.3	1,123	69.2	91	5.6
3.	Pola pengelolaan keuangan puskesmas															
	BLUD	2,118	1.770	83.6	1,569	74.1	1,320	62.3	1,435	67.8	1,370	64.7	1,288	60.8	142	6.7
	Non BLUD	6,273	5.783	92.2	5,828	92.9	3,878	61.8	4,698	74.9	4,597	73.3	4,138	66.0	317	5.1
4.	Pengakuan terhadap mutu															
	Ada	2,032	1.697	83.5	1,632	80.3	1,254	61.7	1,324	65.2	1,309	64.4	1,154	56.8	150	7.4
	Tidak	6,359	5.856	92.1	5,765	90.7	3,944	62.0	4,809	75.6	4,658	73.3	4,272	67.2	309	4.9

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.7.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen yang dikuatkan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) tertulis menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Penugasan dikuatkan dengan surat tugas/Surat Keputusan (SK) tertulis					
		Ya, seluruhnya		Ya, sebagian		Tidak	
		n	%	n	%	n	%
Aceh	257	173	67.3	65	25.3	19	7.4
Sumatera Utara	481	285	59.3	143	29.7	53	11.0
Sumatera Barat	251	208	82.9	40	15.9	3	1.2
Riau	183	139	76.0	32	17.5	12	6.6
Jambi	166	126	75.9	37	22.3	3	1.8
Sumatera Selatan	273	204	74.7	62	22.7	7	2.6
Bengkulu	158	140	88.6	16	10.1	2	1.3
Lampung	275	193	70.2	76	27.6	6	2.2
Kep. Bangka Belitung	60	52	86.7	8	13.3	-	-
-Kepulauan Riau	72	48	66.7	18	25.0	6	8.3
DKI Jakarta	168	83	49.4	24	14.3	61	36.3
Jawa Barat	970	775	79.9	151	15.6	44	4.5
Jawa Tengah	807	655	81.2	134	16.6	18	2.2
DI Yogyakarta	106	86	81.1	17	16.0	3	2.8
Jawa Timur	871	713	81.9	134	15.4	24	2.8
Banten	227	190	83.7	34	15.0	3	1.3
Bali	116	99	85.3	17	14.7	-	-
Nusa Tenggara Barat	137	105	76.6	27	19.7	5	3.6
Nusa Tenggara Timur	333	174	52.3	143	42.9	16	4.8
Kalimantan Barat	222	182	82.0	37	16.7	3	1.4
Kalimantan Tengah	175	127	72.6	42	24.0	6	3.4
Kalimantan Selatan	210	165	78.6	40	19.0	5	2.4
Kalimantan Timur	152	112	73.7	32	21.1	8	5.3
Kalimantan Utara	33	22	66.7	9	27.3	2	6.1
Sulawesi Utara	153	97	63.4	47	30.7	9	5.9
Sulawesi Tengah	166	104	62.7	46	27.7	16	9.6
Sulawesi Selatan	411	306	74.5	92	22.4	13	3.2
Sulawesi Tenggara	179	121	67.6	50	27.9	8	4.5
Gorontalo	69	62	89.9	5	7.2	2	2.9
Sulawesi Barat	77	52	67.5	25	32.5	-	-
Maluku	166	64	38.6	64	38.6	38	22.9
Maluku Utara	109	52	47.7	45	41.3	12	11.0
Papua Barat	113	40	35.4	44	38.9	29	25.7
Papua	245	63	25.7	91	37.1	91	37.1
INDONESIA	8391	6017	71,7	1847	22	527	6.2

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.8.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen yang dikuatkan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) tertulis menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Penugasan di bidang manajemen dikuatkan dengan surat tugas/surat keputusan (SK) tertulis					
		Ya seluruhnya		Ya, sebagian		Tidak	
		n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan							
Rawat inap	3,309	2,497	75.5	681	20.6	131	4.0
Rawat jalan	5,082	3,520	69.3	1,166	22.9	396	7.8
2. Wilayah kerja Puskesmas							
Puskesmas Perkotaan	2,436	1,833	75.2	443	18.2	160	6.6
Puskesmas Perdesaan	4,321	3,219	74.5	896	20.7	206	4.8
Puskesmas Terpenting/Sangat Terpenting	1,622	944	58.2	512	31.6	166	10.2
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas							
BLUD	2,118	1,550	73.2	405	19.1	163	7.7
Non BLUD	6,273	4,467	71.2	1,442	23.0	364	5.8
4. Pengakuan terhadap mutu							
Ada	2,032	1,643	80.9	301	14.8	88	4.3
Tidak	6,359	4,374	68.8	1,546	24.3	439	6.9

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.9.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penugasan menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Alasan					
		jumlah tenaga kurang		jumlah tenaga terlatih bidang tertentu kurang		Kombinasi	
		n	%	n	%	N	%
Aceh	257	131	51.0	78	30.4	123	47.9
Sumatera Utara	481	252	52.4	124	25.8	189	39.3
Sumatera Barat	251	115	45.8	58	23.1	88	35.1
Riau	183	92	50.3	64	35.0	52	28.4
Jambi	166	79	47.6	49	29.5	44	26.5
Sumatera Selatan	273	122	44.7	105	38.5	93	34.1
Bengkulu	158	64	40.5	41	25.9	73	46.2
Lampung	275	123	44.7	91	33.1	72	26.2
Kep.Bangka Belitung	60	27	45	16	26.7	16	26.7
Kepulauan Riau	72	38	52.8	17	23.6	12	16.7
DKI Jakarta	168	122	72.6	19	11.3	166	98.8
Jawa Barat	970	512	52.8	180	18.6	345	35.6
Jawa Tengah	807	477	59.1	124	15.4	267	33.1
DI Yogyakarta	106	59	55.7	9	8.5	49	46.2
Jawa Timur	871	533	61.2	135	15.5	281	32.3
Banten	227	108	47.6	63	27.8	56	24.7
Bali	116	44	37.9	46	39.7	30	25.9
Nusa Tenggara Barat	137	59	43.1	50	36.5	45	32.8
Nusa Tenggara Timur	333	129	38.7	94	28.2	145	43.5
Kalimantan Barat	222	90	40.5	52	23.4	94	42.3
Kalimantan Tengah	175	63	36	40	22.9	91	52
Kalimantan Selatan	210	95	45.2	34	16.2	92	43.8
Kalimantan Timur	152	82	53.9	31	20.4	57	37.5
Kalimantan Utara	33	15	45.5	9	27.3	22	66.7
Sulawesi Utara	153	84	54.9	28	18.3	74	48.4
Sulawesi Tengah	166	84	50.6	39	23.5	63	38
Sulawesi Selatan	411	196	47.7	99	24.1	144	35
Sulawesi Tenggara	179	82	45.8	59	33	123	68.7
Gorontalo	69	38	55.1	16	23.2	38	55
Sulawesi Barat	77	50	64.9	16	20.8	28	36.4
Maluku	166	54	32.5	51	30.7	90	54.2
Maluku Utara	109	51	46.8	24	22.0	52	47.7
Papua Barat	113	62	54.9	37	32.7	51	45.1
Papua	245	107	43.7	57	23.3	203	82.9
INDONESIA	8.391	4,239	50,5	1,955	23.3	3,368	40.1

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.10.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Alasan penugasan di bidang manajemen								
	Jumlah (N)	Jumlah tenaga kurang		Jumlah tenaga terlatih bidang tertentu kurang		Lainnya		Kombinasi	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	3,309	1,655	50	791	23.9	1,218	36.8	58	1.8
Rawat jalan	5,082	2,584	50.8	1,164	22.9	2,150	42.3	79	1.6
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	2,436	1,203	49.4	623	25.6	943	38.7	70	2.9
Puskesmas Perdesaan	4,321	2,207	51.1	1,027	23.8	1,616	37.4	52	1.2
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,622	811	50	303	18.7	834	51.4	16	1
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	2,118	1,132	53.4	433	20.4	938	44.3	37	1.7
Non BLUD	6,273	3,107	49.5	1,522	24.3	2,430	38.7	100	1.6
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	2,032	1,032	50.8	493	24.3	800	39.4	50	2.5
Tidak	6,359	3,207	50.4	1,462	23	2,568	40.4	87	1.4

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.11.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pejabat yang menandatangani Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) Penugasan menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Penandatanganan SK/Surat Tugas				
	Kepala Dinas Kesehatan		Kepala Puskesmas		
	N	n	%	n	%
Aceh	257	134	5,2	200	7,8
Sumatera Utara	481	265	5,5	356	7,4
Sumatera Barat	251	155	6,2	206	8,2
Riau	183	83	4,5	157	8,6
Jambi	166	94	5,7	158	9,5
Sumatera Selatan	273	127	4,7	256	9,4
Bengkulu	158	55	3,5	149	9,4
Lampung	275	153	5,6	259	9,4
Kep.Bangka Belitung	60	34	5,7	56	9,3
Kepulauan Riau	72	39	5,4	52	7,2
DKI Jakarta	168	26	1,5	118	7,0
Jawa Barat	970	505	5,2	860	8,9
Jawa Tengah	807	429	5,3	665	8,2
DI Yogyakarta	106	42	4,0	90	8,5
Jawa Timur	871	505	5,8	715	8,2
Banten	227	154	6,8	189	8,3
Bali	116	58	5,0	110	9,5
Nusa Tenggara Barat	137	84	6,1	109	8,0
Nusa Tenggara Timur	333	241	7,2	223	6,7
Kalimantan Barat	222	121	5,4	192	8,6
Kalimantan Tengah	175	124	7,1	147	8,4
Kalimantan Selatan	210	103	4,9	177	8,4
Kalimantan Timur	152	83	5,5	114	7,5
Kalimantan Utara	33	11	3,3	29	8,8
Sulawesi Utara	153	71	4,6	120	7,8
Sulawesi Tengah	166	96	5,8	127	7,7
Sulawesi Selatan	411	240	5,8	336	8,2
Sulawesi Tenggara	179	111	6,2	141	7,9
Gorontalo	69	28	4,1	60	8,7
Sulawesi Barat	77	36	4,7	75	9,7
Maluku	166	79	4,8	101	6,1
Maluku Utara	109	58	5,3	82	7,5
Papua Barat	113	46	4,1	73	6,5
Papua	245	105	4,3	123	5,0
INDONESIA	8,391	4,495	53.6	6,825	81.3

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.12.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pejabat yang menandatangani Surat Tugas/Surat Keputusan (SK) Penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Tugas, surat keputusan (SK), Penugasan menurut karakteristik puskesmas, Agustus 2021									
Karakteristik puskesmas	Penandatanganan surat tugas penugasan di bidang manajemen								
	Jumlah (N)	Kepala Dinas Kesehatan				Kepala puskesmas			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	3,309	1,838	55.5	1,471	44.5	2,752	83.2	557	16.8
Rawat jalan	5,082	2,657	52.3	2,425	47.7	4,073	80.1	1,009	19.9
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	2,436	1,235	50.7	1,201	49.3	1,958	80.4	478	19.6
Puskesmas Perdesaan	4,321	2,321	53.7	2,000	46.3	3,657	84.6	664	15.4
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,622	933	57.5	689	42.5	1,211	74.7	411	25.3
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	2,118	1,023	48.3	1,095	51.7	1,734	81.9	384	18.1
Non BLUD	6,273	3,472	55.3	2,801	44.7	5,091	81.2	1,182	18.8
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	2,032	1,042	51.3	990	48.7	1,723	84.8	309	15.2
Tidak	6,359	3,453	54.3	2,906	45.7	5,102	80.2	1,257	19.8

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.13.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan penolakan penerima tugas menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Penerima tugas dapat menolak			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Aceh	257	73	28.4	184	71.6
Sumatera Utara	481	76	15.8	405	84.2
Sumatera Barat	251	53	21.1	198	78.9
Riau	183	41	22.4	142	77.6
Jambi	166	35	21.1	131	78.9
Sumatera Selatan	273	31	11.4	242	88.6
Bengkulu	158	32	20.3	126	79.7
Lampung	275	48	17.5	227	82.5
Kep.Bangka Belitung	60	22	36.7	38	63.3
Kepulauan Riau	72	16	22.2	56	77.8
DKI Jakarta	168	19	11.3	149	88.7
Jawa Barat	970	150	15.5	820	84.5
Jawa Tengah	807	122	15.1	685	84.9
DI Yogyakarta	106	21	19.8	85	80.2
Jawa Timur	871	127	14.6	744	85.4
Banten	227	43	18.9	184	81.1
Bali	116	15	12.9	101	87.1
Nusa Tenggara Barat	137	18	13.1	119	86.9
Nusa Tenggara Timur	333	66	19.8	267	80.2
Kalimantan Barat	222	54	24.3	168	75.7
Kalimantan Tengah	175	50	28.6	125	71.4
Kalimantan Selatan	210	51	24.3	159	75.7
Kalimantan Timur	152	37	24.3	115	75.7
Kalimantan Utara	33	9	27.3	24	72.7
Sulawesi Utara	153	33	21.6	120	78.4
Sulawesi Tengah	166	23	13.9	143	86.1
Sulawesi Selatan	411	62	15.1	349	84.9
Sulawesi Tenggara	179	16	8.9	163	91.1
Gorontalo	69	10	14.5	59	85.5
Sulawesi Barat	77	11	14.3	66	85.7
Maluku	166	24	14.5	142	85.5
Maluku Utara	109	13	11.9	96	88.1
Papua Barat	113	17	15.0	96	85.0
Papua	245	46	18.8	199	81.2
INDONESIA	8391	1464	17.4	6927	82,55

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.14.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan penolakan penerima tugas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Puskesmas dengan penerima tugas menolak penugasan di bidang manajemen				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	3309	566	17.1	2,743	82.9
Rawat jalan	5082	898	17.7	4,184	82.3
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	2436	434	17.8	2,002	82.2
Puskesmas Perdesaan	4321	722	16.7	3,599	83.3
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1622	308	19.0	1,314	81.0
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	2118	358	16.9	1,760	83.1
Non BLUD	6273	1,106	17.6	5,167	82.4
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	2032	313	15.4	1,719	84.6
Tidak	6359	1,151	18.1	5,208	81.9

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.15.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penolakan penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Alasan Penolakan			
		Tidak Kompeten		Banyak tugas	
		N		n	
Aceh	73	43	58.9	60	82.2
Sumatera Utara	76	52	68.4	62	81.6
Sumatera Barat	53	34	64.2	47	88.7
Riau	41	27	65.9	34	82.9
Jambi	35	17	48.6	31	88.6
Sumatera Selatan	31	23	74.2	30	96.8
Bengkulu	32	18	56.3	23	71.9
Lampung	48	28	58.3	42	87.5
Kep.Bangka Belitung	22	17	77.3	19	86.4
Kepulauan Riau	16	14	87.5	12	75.0
DKI Jakarta	19	10	52.6	12	63.2
Jawa Barat	150	82	54.7	122	81.3
Jawa Tengah	122	66	54.1	107	87.7
DI Yogyakarta	21	13	61.9	18	85.7
Jawa Timur	127	59	46.5	113	89.0
Banten	43	26	60.5	37	86.0
Bali	15	10	66.7	14	93.3
Nusa Tenggara Barat	18	12	66.7	16	88.9
Nusa Tenggara Timur	66	35	53.0	52	78.8
Kalimantan Barat	54	39	72.2	52	96.3
Kalimantan Tengah	50	30	60.0	46	92.0
Kalimantan Selatan	51	28	54.9	44	86.3
Kalimantan Timur	37	15	40.5	32	86.5
Kalimantan Utara	9	5	55.6	7	77.8
Sulawesi Utara	33	21	63.6	26	78.8
Sulawesi Tengah	23	12	52.2	21	91.3
Sulawesi Selatan	62	31	50.0	54	87.1
Sulawesi Tenggara	16	9	56.3	15	93.8
Gorontalo	10	7	70.0	7	70.0
Sulawesi Barat	11	7	63.6	11	100.0
Maluku	24	8	33.3	21	87.5
Maluku Utara	13	6	46.2	10	76.9
Papua Barat	17	10	58.8	11	64.7
Papua	46	32	69.6	31	67.4
INDONESIA	1,464	846	57.8	1,2	84.6

Keterangan : Berdasarkan jumlah puskesmas yang memiliki petugas menolak penugasan lain (N=1464)

Tabel 5.16.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan alasan penolakan penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Alasan penolakan penugasan di bidang manajemen											
		Tidak kompeten				Sudah terlalu banyak tugas				Lainnya			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan													
Rawat inap	566	317	56.0	249	44.0	480	84.8	86	15.2	72	12.7	494	87.3
Rawat jalan	898	531	59.1	367	40.9	759	84.5	139	15.5	114	12.7	784	87.3
2. Wilayah kerja Puskesmas													
Puskesmas Perkotaan	434	241	55.5	193	44.5	368	84.80	66	15.20	58	13.4	376	86.6
Puskesmas Perdesaan	722	432	59.80	290	40.20	617	85.50	105	14.50	79	10.9	643	89.1
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	308	180	58.4	128	41.6	253	82.1	55	17.9	43	14.0	265	86.0
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas													
BLUD	358	207	57.8	151	42.2	296	82.7	62	17.3	54	15.1	304	84.9
Non BLUD	1,106	641	58.0	465	42.0	943	85.3	163	14.7	132	11.9	974	88.1
4. Pengakuan terhadap mutu													
Ada	313	171	54.6	142	45.4	262	83.7	51	16.3	40	12.8	273	87.2
Tidak	1,151	677	58.8	474	41.2	977	84.9	174	15.1	146	12.7	1,005	87.3

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen dan menolak penugasan tersebut (N=1464)

Tabel 5.17.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Keharusan melaporkan kembali		Supervisi	
		N	%	n	%
Aceh	257	226	87.9	218	84.8
Sumatera Utara	481	425	88.4	392	81.5
Sumatera Barat	251	230	91.6	226	90.0
Riau	183	165	90.2	160	87.4
Jambi	166	154	92.8	153	92.2
Sumatera Selatan	273	251	91.9	238	87.2
Bengkulu	158	145	91.8	135	85.4
Lampung	275	254	92.4	248	90.2
Kep.Bangka Belitung	60	54	90.0	55	91.7
Kepulauan Riau	72	64	88.9	60	83.3
DKI Jakarta	168	146	86.9	135	80.4
Jawa Barat	970	909	93.7	900	92.8
Jawa Tengah	807	767	95.0	762	94.4
DI Yogyakarta	106	103	97.2	102	96.2
Jawa Timur	871	824	94.6	803	92.2
Banten	227	218	96.0	214	94.3
Bali	116	106	91.4	113	97.4
Nusa Tenggara Barat	137	126	92.0	122	89.1
Nusa Tenggara Timur	333	312	93.7	309	92.8
Kalimantan Barat	222	205	92.3	195	87.8
Kalimantan Tengah	175	161	92.0	149	85.1
Kalimantan Selatan	210	197	93.8	189	90.0
Kalimantan Timur	152	138	90.8	134	88.2
Kalimantan Utara	33	22	66.7	26	78.8
Sulawesi Utara	153	130	85.0	125	81.7
Sulawesi Tengah	166	151	91.0	140	84.3
Sulawesi Selatan	411	369	89.8	368	89.5
Sulawesi Tenggara	179	163	91.1	163	91.1
Gorontalo	69	64	92.8	61	88.4
Sulawesi Barat	77	66	85.7	68	88.3
Maluku	166	156	94.0	145	87.3
Maluku Utara	109	100	91.7	92	84.4
Papua Barat	113	96	85.0	77	68.1
Papua	245	185	75.5	151	61.6
INDONESIA	8,391	7,682	91.6	7,428	96.7

Tabel 5.18.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Keharusan pelaporan, supervisi, dan imbalan terkait penugasan di bidang manajemen													
		Keharusan pelaporan						Supervisi						Imbalan	
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya, seluruhnya		Ya, sebagian		Lainnya	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan															
Rawat inap	3,309	3,060	92.5	249	7.5	2,987	90.3	322	9.7	1,288	38.9	1,242	37.5	779	23.5
Rawat jalan	5,082	4,622	90.9	460	9.1	4,441	87.4	641	12.6	1,900	37.4	1,747	34.4	1,435	28.2
2. Wilayah kerja Puskesmas															
Puskesmas Perkotaan	2,436	2,227	91.4	209	8.6	2,181	89.5	255	10.5	942	38.7	756	31.0	738	30.3
Puskesmas Perdesaan	4,321	3,998	92.5	323	7.5	3,882	89.8	439	10.2	1,696	39.3	1,561	36.1	1,064	24.6
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,622	1,441	88.8	181	11.2	1,349	83.2	273	16.8	551	34.0	659	40.6	412	25.4
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas															
BLUD	2,118	1,956	92.4	162	7.6	1,908	90.1	210	9.9	881	41.6	640	30.2	597	28.2
Non BLUD	6,273	5,726	91.3	547	8.7	5,520	88.0	753	12.0	2,307	36.8	2,349	37.4	1,617	25.8
4. Pengakuan terhadap mutu															
Ada	2,032	1,889	93.0	143	7.0	1,890	93.0	142	7.0	852	41.9	613	30.2	567	27.9
Tidak	6,359	5,793	91.1	566	8.9	5,538	87.1	821	12.9	2,336	36.7	2,376	37.4	1,647	25.9

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.19.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Imbalan atas tugas tambahan yang dibebankan					
		Ya, seluruhnya		Ya, sebagian		Lainnya (tidak)	
		n	%	n	%	n	%
Aceh	257	105	40.9	80	31.1	72	28.0
Sumatera Utara	481	140	29.1	194	40.3	147	30.6
Sumatera Barat	251	95	37.8	114	45.4	42	16.7
Riau	183	67	36.6	59	32.2	57	31.1
Jambi	166	52	31.3	87	52.4	27	16.3
Sumatera Selatan	273	84	30.8	116	42.5	73	26.7
Bengkulu	158	37	23.4	57	36.1	64	40.5
Lampung	275	103	37.5	102	37.1	70	25.5
Kep.Bangka Belitung	60	25	41.7	25	41.7	10	16.7
Kepulauan Riau	72	23	31.9	32	44.4	17	23.6
DKI Jakarta	168	10	6.0	5	3.0	153	91.1
Jawa Barat	970	413	42.6	305	31.4	252	26.0
Jawa Tengah	807	421	52.2	217	26.9	169	20.9
DI Yogyakarta	106	58	54.7	29	27.4	19	17.9
Jawa Timur	871	351	40.3	285	32.7	235	27.0
Banten	227	75	33.0	65	28.6	87	38.3
Bali	116	28	24.1	56	48.3	32	27.6
Nusa Tenggara Barat	137	73	53.3	48	35.0	16	11.7
Nusa Tenggara Timur	333	120	36.0	162	48.6	51	15.3
Kalimantan Barat	222	83	37.4	98	44.1	41	18.5
Kalimantan Tengah	175	67	38.3	80	45.7	28	16.0
Kalimantan Selatan	210	95	45.2	78	37.1	37	17.6
Kalimantan Timur	152	43	28.3	64	42.1	45	29.6
Kalimantan Utara	33	8	24.2	12	36.4	13	39.4
Sulawesi Utara	153	46	30.1	66	43.1	41	26.8
Sulawesi Tengah	166	68	41.0	62	37.3	36	21.7
Sulawesi Selatan	411	192	46.7	152	37.0	67	16.3
Sulawesi Tenggara	179	72	40.2	74	41.3	33	18.4
Gorontalo	69	34	49.3	19	27.5	16	23.2
Sulawesi Barat	77	20	26.0	34	44.2	23	29.9
Maluku	166	44	26.5	57	34.3	65	39.2
Maluku Utara	109	26	23.9	44	40.4	39	35.8
Papua Barat	113	32	28.3	24	21.2	57	50.4
Papua	245	78	31.8	87	35.5	80	32.7
INDONESIA	8,391	3,188	38.0	2,989	35.6	2,214	26.4

Tabel 5.20.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan jenis imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Bentuk Imbalan			
		Honor tambahan		Jasa Kapitasi	
		n	%	n	%
Aceh	185	101	54.6	150	81.1
Sumatera Utara	334	200	59.9	255	76.3
Sumatera Barat	209	143	68.4	164	78.5
Riau	126	65	51.6	103	81.7
Jambi	139	101	72.7	107	77.0
Sumatera Selatan	200	113	56.5	157	78.5
Bengkulu	94	56	59.6	68	72.3
Lampung	205	91	44.4	183	89.3
Kep.Bangka Belitung	50	28	56.0	46	92.0
Kepulauan Riau	55	44	80.0	45	81.8
DKI Jakarta	15	8	53.3	1	6.7
Jawa Barat	718	333	46.4	613	85.4
Jawa Tengah	638	355	55.6	491	77.0
DI Yogyakarta	87	53	60.9	57	65.5
Jawa Timur	636	364	57.2	490	77.0
Banten	140	56	40.0	117	83.6
Bali	84	43	51.2	61	72.6
Nusa Tenggara Barat	121	83	68.6	94	77.7
Nusa Tenggara Timur	282	196	69.5	239	84.8
Kalimantan Barat	181	126	69.6	145	80.1
Kalimantan Tengah	147	102	69.4	107	72.8
Kalimantan Selatan	173	127	73.4	117	67.6
Kalimantan Timur	107	71	66.4	74	69.2
Kalimantan Utara	20	14	70.0	16	80.0
Sulawesi Utara	112	76	67.9	92	82.1
Sulawesi Tengah	130	99	76.2	92	70.8
Sulawesi Selatan	344	236	68.6	279	81.1
Sulawesi Tenggara	146	113	77.4	114	78.1
Gorontalo	53	22	41.5	46	86.8
Sulawesi Barat	54	27	50.0	48	88.9
Maluku	101	60	59.4	78	77.2
Maluku Utara	70	40	57.1	48	68.6
Papua Barat	56	34	60.7	40	71.4
Papua	165	116	70.3	114	69.1
INDONESIA	6,177	3,696	59.8	4,851	78.5

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen dan mendapatkan imbalan (N=6177 : ya seluruhnya [3188] dan ya, sebagian [2989])

Tabel 5.21.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan imbalan yang diperoleh terkait penugasan di bidang manajemen menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Bentuk imbalan terkait penugasan di bidang manajemen											
		Honor tambahan				Penambahan jasa kapitasi				Lainnya			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan	6177	3696	59,8	2481	40,2	4851	78,5	1326	21,5	364	5,9	5813	94,1
Rawat inap	2,530	1,526	60.30	1,004	39.70	2,021	79.90	509	20.10	132	5.20	2,398	94.80
Rawat jalan	3,647	2,170	59.50	1,477	40.50	2,830	77.60	817	22.40	232	6.40	3,415	93.60
2. Wilayah kerja Puskesmas													
Puskesmas Perkotaan	1,698	995	58.60	703	41.40	1,282	75.50	416	24.50	117	6.90	1,581	93.10
Puskesmas Perdesaan	3,257	1,891	58.10	1,366	41.90	2,594	79.60	663	20.40	200	6.10	3,057	93.90
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,210	791	65.40	419	34.60	965	79.80	245	20.20	47	3.90	1,163	96.10
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas													
BLUD	1,521	866	56.90	655	43.10	1,161	76.30	360	23.70	115	7.60	1,406	92.40
Non BLUD	4,656	2,830	60.80	1,826	39.20	3,690	79.30	966	20.70	249	5.30	4,407	94.70
4. Pengakuan terhadap mutu													
Ada	1,465	871	59.50	594	40.50	1,114	76.00	351	24.00	114	7.80	1,351	92.20
Tidak	4,712	2,825	60.00	1,887	40.00	3,737	79.30	975	20.70	250	5.30	4,462	94.70

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen dan mendapatkan imbalan atas penugasan tersebut (N=6177)

Tabel 5.22

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Penerima penugasan pernah diberi pelatihan khusus terkait dengan tugas yang akan di terima			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Aceh	257	140	54.5	117	45.5
Sumatera Utara	481	268	55.7	213	44.3
Sumatera Barat	251	107	42.6	144	57.4
Riau	183	113	61.7	70	38.3
Jambi	166	100	60.2	66	39.8
Sumatera Selatan	273	188	68.9	85	31.1
Bengkulu	158	81	51.3	77	48.7
Lampung	275	191	69.5	84	30.5
Kep.Bangka Belitung	60	44	73.3	16	26.7
Kepulauan Riau	72	50	69.4	22	30.6
DKI Jakarta	168	89	53.0	79	47.0
Jawa Barat	970	650	67.0	320	33.0
Jawa Tengah	807	562	69.6	245	30.4
DI Yogyakarta	106	86	81.1	20	18.9
Jawa Timur	871	566	65.0	305	35.0
Banten	227	167	73.6	60	26.4
Bali	116	53	45.7	63	54.3
Nusa Tenggara Barat	137	61	44.5	76	55.5
Nusa Tenggara Timur	333	169	50.8	164	49.2
Kalimantan Barat	222	138	62.2	84	37.8
Kalimantan Tengah	175	101	57.7	74	42.3
Kalimantan Selatan	210	112	53.3	98	46.7
Kalimantan Timur	152	91	59.9	61	40.1
Kalimantan Utara	33	2	6.1	31	93.9
Sulawesi Utara	153	80	52.3	73	47.7
Sulawesi Tengah	166	95	57.2	71	42.8
Sulawesi Selatan	411	233	56.7	178	43.3
Sulawesi Tenggara	179	94	52.5	85	47.5
Gorontalo	69	52	75.4	17	24.6
Sulawesi Barat	77	52	67.5	25	32.5
Maluku	166	101	60.8	65	39.2
Maluku Utara	109	61	56.0	48	44.0
Papua Barat	113	49	43.4	64	56.6
Papua	245	85	34.7	160	65.3
INDONESIA	8,391	5,031	60.0	3,360	40.0

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.23.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Pernah diberikan pelatihan terkait penugasan di bidang manajemen				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	N	%
1. Kemampuan penyelenggaraan	8391	5031	60,0	3360	40,0
Rawat inap	3,309	2,021	61.10	1,288	38.90
Rawat jalan	5,082	3,010	59.20	2,072	40.80
2.Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	2,436	1,512	62.10	924	37.90
Puskesmas Perdesaan	4,321	2,641	61.10	1,680	38.90
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1,622	854	52.70	768	47.30
3.Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	2,118	1,363	64.40	755	35.60
Non BLUD	6,273	3,668	58.50	2,605	41.50
4.Pengakuan terhadap mutu					
Ada	2,032	1,307	64.30	725	35.70
Tidak	6,359	3,724	58.60	2,635	41.40

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.24.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Pelatihan					
		Sewaktu		Berkala		Keduanya	
		n	%	n	%	n	%
Aceh	140	95	67.9	22	15.7	23	16.4
Sumatera Utara	268	182	67.9	59	22.0	27	10.1
Sumatera Barat	107	74	69.2	19	17.8	14	13.1
Riau	113	72	63.7	15	13.3	26	23.0
Jambi	100	73	73.0	17	17.0	10	10.0
Sumatera Selatan	188	114	60.6	32	17.0	42	22.3
Bengkulu	81	64	79.0	8	9.9	9	11.1
Lampung	191	123	64.4	34	17.8	34	17.8
Kep.Bangka Belitung	44	28	63.6	11	25.0	5	11.4
Kepulauan Riau	50	35	70.0	10	20.0	5	10.0
DKI Jakarta	89	62	69.7	12	13.5	15	16.9
Jawa Barat	650	425	65.4	106	16.3	119	18.3
Jawa Tengah	562	345	61.4	128	22.8	89	15.8
DI Yogyakarta	86	52	60.5	17	19.8	17	19.8
Jawa Timur	566	353	62.4	133	23.5	80	14.1
Banten	167	106	63.5	46	27.5	15	9.0
Bali	53	38	71.7	6	11.3	9	17.0
Nusa Tenggara Barat	61	36	59.0	14	23.0	11	18.0
Nusa Tenggara Timur	169	121	71.6	22	13.0	26	15.4
Kalimantan Barat	138	88	63.8	29	21.0	21	15.2
Kalimantan Tengah	101	72	71.3	14	13.9	15	14.9
Kalimantan Selatan	112	90	80.4	12	10.7	10	8.9
Kalimantan Timur	91	72	79.1	12	13.2	7	7.7
Kalimantan Utara	2	2	100.0	-	-	-	-
Sulawesi Utara	80	49	61.3	16	20.0	15	18.8
Sulawesi Tengah	95	56	58.9	21	22.1	18	18.9
Sulawesi Selatan	233	156	67.0	35	15.0	42	18.0
Sulawesi Tenggara	94	58	61.7	15	16.0	21	22.3
Gorontalo	52	28	53.8	15	28.8	9	17.3
Sulawesi Barat	52	27	51.9	8	15.4	17	32.7
Maluku	101	66	65.3	22	21.8	13	12.9
Maluku Utara	61	40	65.6	14	23.0	7	11.5
Papua Barat	49	27	55.1	9	18.4	13	26.5
Papua	85	60	70.6	10	11.8	15	17.6
INDONESIA	5,031	3,289	65.4	943	18.7	799	15.9

Tabel 5.25.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	pelatihan khusus yang pernah diberikan terkait dengan penugasan di bidang manajemen						
	Jumlah (N)	Sewaktu		Berkala		Keduanya	
		n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan							
Rawat inap	2021	1,323	65.50	378	18.70	320	15.80
Rawat jalan	3010	1,966	65.30	565	18.80	479	15.90
2. Wilayah kerja Puskesmas							
Puskesmas Perkotaan	1512	965	63.80	299	19.80	248	16.40
Puskesmas Perdesaan	2641	1,736	65.70	513	19.40	392	14.80
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	854	569	66.60	131	15.30	154	18.00
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas							
BLUD	1363	876	64.30	253	18.60	234	17.20
Non BLUD	3668	2,413	65.80	690	18.80	565	15.40
4. Pengakuan terhadap mutu							
Ada	1307	840	64.30	248	19.00	219	16.80
Tidak	3724	2,449	65.80	695	18.70	580	15.60

Keterangan : dihitung berdasarkan jumlah puskesmas yang mengakui terdapat tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen dan mendapatkan pelatihan khusus (N=5031)

5.2.2. Pendelegasian Wewenang (*Task Shifting*)

Tabel 5.26. memperlihatkan persentase puskesmas dengan bentuk penugasan bidang tatalaksana pasien menurut karakteristik puskesmas. Persentase penugasan di bidang tindakan medis umum cukup tinggi (> 80%). Kemudian diikuti dengan tindakan farmasi(> 60%). Lebih dari separuh penugasan di bidang tindakan keluarga berencana dan tindakan kesehatan ibu dan anak (KIA).

Lebih dari 50% puskesmas menyebutkan bahwa seluruh penugasan di bidang tatalaksana ditetapkan dengan surat tugas/surat keputusan, 23,8% sebagian ditetapkan dengan surat tugas/surat keputusan, dan lebih dari 20% tidak ditetapkan dengan surat tugas/surat keputusan. Berdasarkan karakteristiknya, pada puskesmas rawat inap dan rawat jalan yang mendapat surat tugas/SK seluruhnya persentasenya di atas 50 persen. Sedang berdasarkan wilayah kerja puskesmas diketahui puskesmas terpencil/sangat terpencil yang mendapat surat tugas/SK seluruhnya persentasenya kecil (34,7%).

Persentase alasan penugasan karena jumlah tenaga kurang menurut karakteristik puskesmas cukup tinggi yaitu di atas 50 persen. Sedang menurut jumlah tenaga terlatih bidang tertentu kurang, persentasenya di bawah 20 persen.

Lebih dari 20% puskesmas dari yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien menyebutkan bahwa penugasan tersebut ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan. Umumnya penugasan ditetapkan oleh kepala puskesmas, yakni lebih dari 90% puskesmas dari yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien.

Penerima tugas tidak dapat menolak penugasan di bidang tatalaksana pasien, persentasenya cukup tinggi (> 80%). Alasan penolakan penugasan di bidang tatalaksana pasien di puskesmas rawat jalan karena sudah terlalu banyak tugas (82,1%) lebih tinggi daripada puskesmas rawat inap (81,6%). Berdasarkan wilayah didapatkan alasan penolakan karena sudah terlalu banyak tugas, puskesmas perdesaan persentasenya lebih tinggi (83,4%), dibandingkan dengan puskesmas terpencil/sangat terpencil (81,0%) dan puskesmas perkotaan (78,3%). Berdasarkan alasan tidak kompeten diketahui puskesmas rawat inap persentasenya lebih tinggi (63,9%) dibandingkan puskesmas rawat jalan (59,9%). Berdasarkan wilayah kerja puskesmas diketahui alasan penolakan karena tidak kompeten di puskesmas perdesaan (62,6%) relatif sama dengan puskesmas terpencil/sangat terpencil (62,6%) sedang puskesmas perkotaan (56,1%).

Keharusan pelaporan terkait penugasan di bidang tatalaksana pasien persentasenya cukup baik pada puskesmas rawat inap (87,2%) maupun rawat jalan (85,2%). Begitu juga berdasarkan wilayah didapatkan puskesmas perdesaan (86,9%), puskesmas perkotaan (85,4%), dan puskesmas terpencil/sangat terpencil (83,4%) persentase keharusan pelaporan baik. Supervisi dilakukan dan persentasenya pada puskesmas rawat inap (82,6%) dan puskesmas rawat jalan (79,8%). Terkait dengan imbalan didapatkan bahwa mendapat imbalan “Ya,seluruhnya” dan “Ya, sebagian” persentasenya di bawah 30 persen.

Bentuk imbalan yang diterima terkait penugasan di puskesmas rawat inap berupa penambahan jasa kapitasi (77,5%) sedang penerima honor tambahan sebesar (45,9%). Di puskesmas rawat jalan didapatkan penambahan jasa kapitasi (74,5%), dan penerima honor tambahan (45,9%). Berdasarkan wilayah juga diperoleh bahwa persentase penambahan jasa kapitasi lebih tinggi dibandingkan dengan penerima honor tambahan.

Petugas yang pernah diberikan pelatihan di bidang tatalaksana pasien baik di puskesmas rawat inap maupun puskesmas rawat jalan persentasenya di bawah 50 persen. Begitu juga berdasarkan wilayah kerja puskesmas pernah diberikan pelatihan persentasenya juga di bawah 50 persen.

Pelatihan khusus “sewaktu” umum dilakukan di puskesmas baik puskesmas rawat inap maupun rawat jalan begitu juga berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Sedang pelatihan secara berkala persentasenya rendah (< 20%) baik di puskesmas rawat inap maupun rawat jalan begitu juga menurut wilayah kerja puskesmas.

Persentase kasus yang tidak diharapkan terjadi akibat melaksanakan wewenang persentasenya di bawah 5 persen. Dampak dari kasus yang tidak diharapkan menyebabkan pasien meninggal di puskesmas rawat inap 13 persen dan di rawat jalan 11,4 persen. Berdasarkan wilayah kerja puskesmas persentase tertinggi di puskesmas terpencil/sangat terpencil (19,1%), puskesmas perkotaan (16,7%), dan puskesmas perdesaan (8,0%). Persentase pasien cacat atau cedera yang terjadi di puskesmas rawat inap (15,6%) relatif tidak berbeda dengan di puskesmas rawat jalan (15,8%), dan berdasarkan wilayah didapatkan puskesmas terpencil/sangat terpencil persentasenya tinggi (19,1%), puskesmas perkotaan (16,7%), dan perdesaan (8,0%). Akibat dari kelalaian tersebut, tenaga kesehatan mendapat sanksi administrasi berupa teguran, tidak naik pangkat, dipindahtugaskan.

Persentase kecelakaan kerja seperti tertular penyakit menular HIV, di puskesmas rawat jalan terdeteksi 2 orang (33,3%), dan di puskesmas rawat inap ada 1 orang (25%). Berdasarkan wilayah diketahui kejadian tertular HIV di puskesmas perkotaan (50%). Begitu juga dengan tertular penyakit hepatitis terjadi di puskesmas rawat jalan terdeteksi 3 orang (50%), di puskesmas rawat inap 1 orang (25%), dan terjadi di wilayah puskesmas perkotaan (66,7%). Kecelakaan kerja terkena luka tusuk jarum bekas persentasenya lebih tinggi di puskesmas rawat jalan (90,0%) dibandingkan dengan puskesmas rawat inap (85,0%). Sedang berdasarkan wilayah kerja diketahui bahwa persentase kecelakaan di wilayah di perkotaan lebih tinggi (100%), di puskesmas terpencil/sangat terpencil (92,3%), dan puskesmas perdesaan (78,3%). Hasil secara lengkap dapat dilihat pada tabel tersebut di atas.

Masih ada kasus yang tidak diharapkan tidak di laporkan, persentasenya lebih tinggi di puskesmas rawat jalan (39,1%) dan berada di wilayah puskesmas perdesaan (40,0%). Masih ada laporan kecelakaan kerja yang tidak ditindak lanjuti (21,4%), dan lokasinya di wilayah kerja puskesmas perkotaan (20%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (13,3%).

Akibat kecelakaan kerja di puskesmas berujung pada tuntutan hukum di puskesmas rawat inap persentasenya lebih tinggi (13,0%) dibandingkan dengan puskesmas rawat jalan (6,1%). Berdasarkan wilayah kerja puskesmas diketahui puskesmas terpencil/sangat terpencil

persentasenya tinggi (14,9%). Proporsi ketidaktersediaan jaminan pembiayaan pada kasus (complain) yang berujung pada tuntutan hukum.

Di puskesmas rawat inap persentase kelengkapan ada surat tugas dan pelatihan sebesar 59 persen sedang di puskesmas rawat jalan 56 persen. Berdasarkan wilayah kerja didapatkan persentase antara puskesmas perkotaan dan perdesaan relatif sama yaitu 59 persen.

Dalam hal pendelegasian wewenang terlihat bahwa ada surat tugas dan pelatihan baik di puskesmas rawat inap maupun rawat jalan persentase di bawah 50 persen. Berdasarkan wilayah kerja puskesmas juga terlihat persentase ada surat tugas dan pelatihan di bawah 50 persen.

Tabel 5.26.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penguatan Surat Tugas/Surat Keputusan tertulis menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Penugasan di bidang tatalaksana pasien dikuatkan dengan surat tugas/ surat keputusan (SK) tertulis							
Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Ya seluruhnya		Ya, sebagian		Tidak	
		n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan							
Rawat inap	2.193*	1.193	54,4	523	23,8	477	21,8
Rawat jalan	3.596*	1.838	51,1	855	23,8	903	25,1
2. Wilayah kerja Puskesmas							
Puskesmas Perkotaan	1.518*	859	56,6	345	22,7	314	20,7
Puskesmas Perdesaan	3.019*	1.717	56,9	694	23,0	608	20,1
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	440	34,7	363	28,7	464	36,6
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas							
BLUD	1.432*	810	56,60	309	21,60	313	21,90
Non BLUD	4.357*	2.221	51,00	1.069	24,50	1.067	24,50
4. Pengakuan terhadap mutu							
Ada	1.289*	865	67,10	246	19,10	178	13,80
Tidak	4.500*	2.166	48,10	1.132	25,20	1.202	26,70

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.27.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan alasan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Alasan penugasan di bidang tatalaksana pasien							
		Jumlah tenaga kurang		Jumlah tenaga terlatih bidang tertentu kurang		Lainnya		Kombinasi	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat inap	2.193	1.161	52,90	404	18,40	518	23,60	110	5,00
Rawat jalan	3.596	2.005	55,80	591	16,40	878	24,40	122	3,40
2. Wilayah Kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	1.518	829	54,6	281	18,5	307	20,2	101	6,7
Puskesmas Perdesaan	3.019	1.676	55,5	531	17,6	707	23,4	105	3,5
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267	666	52,6	193	15,2	383	30,2	25	2,0
3. Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas									
BLUD	1.432	830	58,0	199	13,9	334	23,3	69	4,8
Non BLUD	4.357	2.336	53,6	796	18,3	1.062	24,4	163	3,7
4. Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	1.289	722	56,0	223	17,3	253	19,6	91	7,1
Tidak	4.500	2.444	54,3	772	17,2	1.143	25,4	141	3,1

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.28.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penandatanganan surat tugas/Surat Keputusan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Penanda tangan surat tugas penugasan di bidang tatalaksana pasien									
Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Kepala Dinas Kesehatan				Kepala puskesmas			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	1.716*	424	24,70	1.292	75,30	1.612	93,90	104	6,10
Rawat jalan	2.693*	743	27,60	1.950	72,40	2.492	92,50	201	7,50
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	1204*	291	24,2	913	75,8	1.122	93,2	82	6,8
Puskesmas Perdesaan	2411*	641	26,6	1.770	73,4	2.273	94,3	138	5,7
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	803*	256	31,9	547	68,1	724	90,2	79	9,8
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	1119*	259	23,1	860	76,9	1.038	92,8	81	7,2
Non BLUD	3290*	908	27,6	2.382	72,4	3.066	93,2	224	6,8
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	1111*	226	20,30	885	79,70	1.054	94,90	57	5,10
Tidak	3298*	941	28,50	2.357	71,50	3.050	92,50	248	7,50

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki surat tugas/Surat Keputusan seluruhnya dan sebagian (N=4409)

Tabel 5.29.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penolakan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Penerima tugas dapat menolak penugasan di bidang tatalaksana pasien				
	Jumlah	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	2.193*	282	12,9	1.911	87,1
Rawat jalan	3.596*	491	13,7	3.105	86,3
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	1.518*	189	12,5	1.329	87,5
Puskesmas Perdesaan	3.019*	409	13,5	2.610	86,5
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	179	14,1	1.088	85,9
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	1.432*	176	12,3	1.256	87,7
Non BLUD	4.357*	597	13,7	3.760	86,3
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	1.289*	134	10,4	1.155	89,6
Tidak	4.500*	639	14,2	3.861	85,8

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.30.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan alasan penolakan penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah	Alasan penolakan penugasan di bidang tatalaksana pasien											
		Tidak kompeten				Sudah terlalu banyak tugas				Lainnya			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan													
Rawat inap	282	180	63,8	102	36,2	230	81,6	52	18,4	22	7,8	260	92,2
Rawat jalan	491	294	59,9	197	40,1	403	82,1	88	17,9	32	6,5	459	93,5
2. Wilayah kerja Puskesmas													
Puskesmas Perkotaan	189	106	56,1	83	43,9	148	78,3	41	21,7	15	7,9	174	92,1
Puskesmas Perdesaan	409	256	62,6	153	37,4	341	83,4	68	16,6	26	6,4	383	93,6
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	179	112	62,6	67	37,4	145	81,0	34	19,0	13	7,3	166	92,7
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas													
BLUD	176	93	52,8	83	47,2	138	78,4	38	21,6	16	9,1	160	90,9
Non BLUD	597	381	63,8	216	36,2	495	82,9	102	17,1	38	6,4	559	93,6
4. Pengakuan terhadap mutu													
Ada	134	78	58,2	56	41,8	106	79,1	28	20,9	11	8,2	123	91,8
Tidak	639	396	62,0	243	38,0	527	82,5	112	17,5	43	6,7	596	93,3

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang menolak penugasan di bidang tatalaksana pasien (N=773)

Tabel 5.31.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan keharusan pelaporan penugasan dan supervisi penugasan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Keharusan pelaporan, supervisi, dan imbalan terkait penugasan di bidang tatalaksana pasien													
		Keharusan pelaporan				Supervisi						Imbalan			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya, seluruhnya		Ya, sebagian		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan															
Rawat inap	2.193*	1.912	87,20	281	12,80	1.811	82,60	382	17,40	491	22,40	540	24,60	1.162	53,00
Rawat jalan	3.596*	3.062	85,20	534	14,80	2.871	79,80	725	20,20	754	21,00	849	23,60	1.993	55,40
2. Wilayah kerja Puskesmas															
Puskesmas Perkotaan	1.518*	1.297	85,40	221	14,60	1.225	80,70	293	19,30	273	18,00	306	20,20	939	61,90
Puskesmas Perdesaan	3.019*	2.625	86,90	394	13,10	2.483	82,20	536	17,80	721	23,90	769	25,50	1.529	50,60
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	1.057	83,40	210	16,60	967	76,30	300	23,70	258	20,4	345	27,2	664	52,4
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas															
BLUD	1.432*	1.244	86,90	188	13,10	1.175	82,10	257	17,90	307	21,40	291	20,30	834	58,20
Non BLUD	4.357*	3.730	85,60	627	14,40	3.507	80,50	850	19,50	938	21,50	1.098	25,20	2.321	53,30
4. Pengakuan terhadap mutu															
Ada	1.289*	1.119	86,80	170	13,20	1.089	84,50	200	15,50	277	21,50	241	18,70	771	59,80
Tidak	4.500*	3.855	85,70	645	14,30	3.593	79,80	907	20,20	968	21,50	1.148	25,50	2.384	53,00

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.32.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan bentuk imbalan menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Bentuk imbalan terkait penugasan di bidang tatalaksana pasien											
		Honor tambahan				Penambahan				Lainnya			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan													
Rawat inap	1031	473	45,90	558	54,10	799	77,50	232	22,50	47	4,60	984	95,40
Rawat jalan	1603	724	45,20	879	54,80	1.194	74,50	409	25,50	89	5,60	1.514	94,40
2. Wilayah kerja Puskesmas													
Puskesmas Perkotaan	579	241	41,60	338	58,40	409	70,60	170	29,40	38	6,60	541	93,40
Puskesmas Perdesaan	1490	663	44,50	827	55,50	1.142	76,60	348	23,40	80	5,40	1.410	94,60
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	603	319	52,90	284	47,10	468	77,60	135	22,40	19	3,20	584	96,80
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas													
BLUD	598	246	41,10	352	58,90	452	75,60	146	24,40	42	7,00	556	93,00
Non BLUD	2036	951	46,70	1.085	53,30	1.541	75,70	495	24,30	94	4,60	1.942	95,40
4. Pengakuan terhadap mutu													
Ada	518	223	43,10	295	56,90	382	73,70	136	26,30	39	7,50	479	92,50
Tidak	2116	974	46,00	1.142	54,00	1.611	76,10	505	23,90	97	4,60	2.019	95,40

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang memperoleh imbalan (N=2634)

Tabel 5.33.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Pernah diberikan pelatihan terkait penugasan di bidang tatalaksana pasien				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	2.193*	1.065	48,60	1.128	51,40
Rawat jalan	3.596*	1.603	44,60	1.993	55,40
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	1.518*	722	47,60	796	52,40
Puskesmas Perdesaan	3.019*	1.429	47,30	1.590	52,70
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	518	40,90	749	59,10
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	1.432*	731	51,00	701	49,00
Non BLUD	4.357*	1.937	44,50	2.420	55,50
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	1.289*	661	51,30	628	48,70
Tidak	4.500*	2.007	44,60	2.493	55,40

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.34.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan frekuensi pemberian pelatihan khusus menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Pelatihan khusus yang pernah diberikan terkait dengan penugasan di bidang tatalaksana pasien						
	Jumlah (N)	Sewaktu		Berkala		Keduanya	
		n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan							
Rawat inap	1065*	721	67,70	168	15,80	176	16,50
Rawat jalan	1603*	1.054	65,80	272	17,00	277	17,30
2. Wilayah kerja Puskesmas							
Puskesmas Perkotaan	722*	456	63,20	123	17,00	143	19,80
Puskesmas Perdesaan	1429*	959	67,10	247	17,30	223	15,60
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	518*	360	69,50	73	14,10	85	16,40
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas							
BLUD	731*	482	65,90	118	16,10	131	17,90
Non BLUD	1937*	1.293	66,80	322	16,60	322	16,60
4. Pengakuan terhadap mutu							
Ada	661*	429	64,90	100	15,10	132	20,00
Tidak	2007*	1.346	67,10	340	16,90	321	16,00

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang memperoleh pelatihan khusus (N=2668)

Tabel 5.35.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan adanya kasus yang tidak diharapkan yang terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	adanya kasus yang tidak diharapkan terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	2.193*	77	3,50	2.116	96,50
Rawat jalan	3.596*	114	3,20	3.482	96,80
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	1.518*	42	2,80	1.476	97,20
Puskesmas Perdesaan	3.019*	100	3,30	2.919	96,70
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	47	3,70	1.220	96,30
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	1.432*	54	3,80	1.378	96,20
Non BLUD	4.357*	137	3,10	4.220	96,90
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	1.289*	42	3,30	1.247	96,70
Tidak	4.500*	149	3,30	4.351	96,70

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.36.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis dampak dari kasus yang tidak diharapkan yang terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Dampak dari kasus yang tidak diharapkan																								
	Jumlah (N)	Pasien meninggal				Pasien cacat atau cedera				Kecelakaan Kerja (safety bagi nakes)				Tertular penyakit akibat dari kecelakaan Kerja (safety bagi nakes)				Sanksi administrasi (teguran, tidak naik pangkat, dipindahtugaskan)				Lainnya			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya	Tidak		
		n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
1. Kemampuan penyelenggaraan																									
Rawat inap	77*	10	13,00	67	87,00	12	15,60	65	84,40	20	26,00	57	74,00	4	5,20	73	94,80	27	35,10	50	64,90	18	23,40	59	76,60
Rawat jalan	114*	13	11,40	101	88,60	18	15,80	96	84,20	20	17,50	94	82,50	6	5,30	108	94,70	36	31,60	78	68,40	24	21,10	90	78,90
2. Wilayah kerja Puskesmas																									
Puskesmas Perkotaan	42*	7	16,70	35	83,30	12	28,60	30	71,40	5	11,90	37	88,10	6	14,30	36	85,70	12	28,60	30	71,40	12	28,60	30	71,40
Puskesmas Perdesaan	100*	8	8,00	92	92,00	13	13,00	87	87,00	23	23,00	77	77,00	3	3,00	97	97,00	31	31,00	69	69,00	23	23,00	77	77,00
Puskesmas Terencil/Sangat Terencil	47*	9	19,10	38	80,90	7	14,90	40	85,10	13	27,70	34	72,30	2	4,30	45	95,70	17	36,20	30	63,80	5	10,60	42	89,40
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas																									
BLUD	54*	6	11,10	48	88,90	8	14,80	46	85,20	10	18,50	44	81,50	4	7,40	50	92,60	17	31,50	37	68,50	19	35,20	35	64,80
Non BLUD	137*	17	12,40	120	87,60	22	16,10	115	83,90	30	21,90	107	78,10	6	4,40	131	95,60	46	33,60	91	66,40	23	16,80	114	83,20
4. Pengakuan terhadap mutu																									
Ada	42*	8	19,00	34	81,00	7	16,70	35	83,30	7	16,70	35	83,30	3	7,10	39	92,90	11	26,20	31	73,80	17	40,50	25	59,50
Tidak	149*	15	10,10	134	89,90	23	15,40	126	84,60	33	22,10	116	77,90	7	4,70	142	95,30	52	34,90	97	65,10	25	16,80	124	83,20

Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petuga syang mengerjakan tugas latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang mengalami adanya kasus yang tidak diharapkan terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang (N=191)

Tabel 5.37.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan akibat dari kecelakaan Kerja menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Jenis kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan											
		Kecelakaan kerja (keamanan bagi tenaga kesehatan)											
		Luka tusuk jarum bekas				Luka robek				Luka bakar			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan													
Rawat inap	20*	17	85,00	3	15,00	3	15,00	17	85,00	2	10,00	18	90,00
Rawat jalan	20*	18	90,00	2	10,00	9	45,00	11	55,00	5	25,00	15	75,00
2. Wilayah kerja Puskesmas													
Puskesmas Perkotaan	5*	5	100,00	0	0,00	3	60,00	2	40,00	3	60,00	2	40,00
Puskesmas Perdesaan	23*	18	78,30	5	21,70	5	21,70	18	78,30	2	8,70	21	91,30
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	13*	12	92,30	1	7,70	4	30,80	9	69,20	2	15,40	11	84,60
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas													
BLUD	10*	8	80,00	2	20,00	5	50,00	5	50,00	3	30,00	7	70,00
Non BLUD	30*	27	90,00	3	10,00	7	23,30	23	76,70	4	13,30	26	86,70
4. Pengakuan terhadap mutu													
Ada	7*	6	85,70	1	14,30	2	28,60	5	71,40	1	14,30	6	85,70
Tidak	33*	29	87,90	4	12,10	10	30,30	23	69,70	6	18,20	27	81,80

Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang mengalami kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan (N=20)

Tabel 5.38.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan jenis penyakit akibat dari kecelakaan Kerja menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Tertular penyakit akibat dari kecelakaan Kerja (keamanan bagi tenaga kesehatan)							
		Hepatitis						HIV	
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	N	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	4*	1	25,00	3	75,00	1	25,00	3	75,00
Rawat jalan	6*	3	50,00	3	50,00	2	33,30	4	66,70
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	6*	4	66,70	2	33,30	3	50,00	3	50,00
Puskesmas Perdesaan	3*	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	2*	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	4*	3	75,00	1	25,00	3	75,00	1	25,00
Non BLUD	6*	1	16,70	5	83,30	0	0,00	6	100,00
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	3*	2	66,70	1	33,30	2	66,70	1	33,30
Tidak	7*	2	28,60	5	71,40	1	14,30	6	85,70

Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang mengalami tertular penyakit akibat melaksanakan pendelegasian wewenang (N=10)

Tabel 5.39.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan keberadaan dampak yang berujung pada tuntutan hukum menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Dampak berujung pada tuntutan hukum				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	77*	10	13,00	67	87,00
Rawat jalan	114*	7	6,10	107	93,90
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	42*	3	7,10	39	92,90
Puskesmas Perdesaan	100*	9	9,00	91	91,00
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	47*	7	14,90	40	85,10
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	54*	5	9,30	49	90,70
Non BLUD	137*	12	8,80	125	91,20
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	42*	3	7,10	39	92,90
Tidak	149*	14	9,40	135	90,60

Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien yang mengalaminya kasus yang tidak diharapkan terjadi akibat melaksanakan pendelegasian wewenang (N=191)

Tabel 5.40.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien berdasarkan penyediaan bantuan pembiayaan pada kasus(komplain) yang berujung pada tuntutan hukum menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Tersedia jaminan pembiayaan pada kasus (komplain) yang berujung pada tuntutan hukum				
	Jumlah (N)	Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan					
Rawat inap	2.193*	180	8,20	2.013	91,80
Rawat jalan	3.596*	271	7,50	3.325	92,50
2. Wilayah kerja Puskesmas					
Puskesmas Perkotaan	1.518*	134	8,80	1.384	91,20
Puskesmas Perdesaan	3.019*	244	8,10	2.775	91,90
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.267*	72	5,70	1.195	94,30
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas					
BLUD	1.432*	134	9,40	1.298	90,60
Non BLUD	4.357*	317	7,30	4.040	92,70
4. Pengakuan terhadap mutu					
Ada	1.289*	133	10,30	1.156	89,70
Tidak	4.500*	318	7,10	4.182	92,90

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

Tabel 5.41.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang Pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam penugasan ganda menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	Jumlah (N)	Kelengkapan persyaratan dalam penugasan ganda di puskesmas							
		Ada surat tugas dan pelatihan		Ada surat tugas dan tidak ada pelatihan		Tidak ada surat tugas dan ada pelatihan		Tidak ada surat tugas dan tidak ada pelatihan	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	3.309*	1.970	59,50	1.208	36,50	51	1,50	80	2,40
Rawat jalan	5.082*	2.863	56,30	1.823	35,90	147	2,90	249	4,90
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	2.436*	1.451	59,60	825	33,90	61	2,50	99	4,10
Puskesmas Perdesaan	4.321*	2.562	59,30	1.553	35,90	79	1,80	127	2,90
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.622*	796	49,10	660	40,70	58	3,60	108	6,70
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	2.118*	1.298	61,30	657	31,00	65	3,10	98	4,60
Non BLUD	6.273*	3.535	56,40	2.374	37,80	133	2,10	231	3,70
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	2.032*	1.275	62,70	669	32,90	32	1,60	56	2,80
Tidak	6.359*	3.558	56,00	2.362	37,10	166	2,60	273	4,30

Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (N=8391)

Tabel 5.42.

Distribusi puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam pendelegasian wewenang menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik puskesmas	kelengkapan persyaratan terkait pendelegasian wewenang di puskesmas								
	Jumlah (N)	Ada surat tugas dan pelatihan		Ada surat tugas dan tidak ada pelatihan		Tidak ada surat tugas dan ada pelatihan		Tidak ada surat tugas dan tidak ada pelatihan	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1. Kemampuan penyelenggaraan									
Rawat inap	2193*	937	42,70	779	35,50	128	5,80	349	15,90
Rawat jalan	3596*	1.390	38,70	1.303	36,20	213	5,90	690	19,20
2. Wilayah kerja Puskesmas									
Puskesmas Perkotaan	1518*	638	42,00	566	37,30	84	5,50	230	15,20
Puskesmas Perdesaan	3019*	1.286	42,60	1.125	37,30	143	4,70	465	15,40
Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1267*	406	32,00	397	31,30	112	8,80	352	27,80
3. Pola pengelolaan keuangan puskesmas									
BLUD	1432*	645	45,00	474	33,10	86	6,00	227	15,90
Non BLUD	4357*	1.682	38,60	1.608	36,90	255	5,90	812	18,60
4. Pengakuan terhadap mutu									
Ada	1289*	618	47,90	493	38,20	43	3,30	135	10,50
Tidak	4500*	1.709	38,00	1.589	35,30	298	6,60	904	20,10

* Keterangan : Dari sejumlah puskesmas yang memiliki petugas yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (N=5789)

INSENTIF SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS

Insentif merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk bekerja dengan kemampuan optimal. Insentif merupakan suatu pendapatan ekstra diluar gaji atau upah yang ditentukan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. Tujuan pemberian sistem insentif dapat bermacam-macam, misalnya untuk memenuhi ketersediaan jenis tenaga kesehatan disuatu tempat, sebagai kompensasi wilayah kerja yang sulit, untuk memenuhi standar biaya hidup yang relatif mahal disuatu daerah atau sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan tenaga kesehatan. Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, memelihara keadilan internal dan eksternal atas besaran penghasilan yang diterima, serta memelihara kesejahteraan pegawai.

Tujuan pemberian insentif mempengaruhi bentuk, cara pemberian, dan besaran insentif yang akan diberikan. Insentif dapat berupa insentif non finansial dan finansial. Insentif non finansial adalah fasilitas non moneter yang diterima oleh tenaga kesehatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan seperti rumah dinas, kendaraan dinas, fasilitasi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan serta sarana sosial untuk kebutuhan keluarga seperti sekolah, tempat beribadah, sarana rekreasi dan olahraga serta sarana jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Menurut WHO (Adams & Hicks, 2000), insentif dapat didefinisikan sebagai *semua bentuk imbalan dan hukuman (punishments) yang diterima oleh para pemberi layanan (providers) sebagai konsekuensi dari organisasi tempat mereka bekerja, institusi yang mereka operasionalkan dan intervensi-intervensi yang mereka lakukan*. Definisi WHO ini menegaskan bahwa organisasi, pekerjaan yang dilakukan, dan situasi kondisi tempat kerja akan menentukan insentif yang digunakan dan dampak yang ditimbulkannya.

Menurut Keputusan Menkes RI No.132/Menkes/Per/IV/2006, insentif adalah *pemberian imbalan di luar gaji baik yang bersifat material maupun non material pada tenaga kesehatan sebagai kompensasi atas kesediannya ditempatkan pada suatu daerah, atau kesediannya melakukan pekerjaan tertentu, atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja dalam jangka waktu tertentu*.

Insentif berbentuk material yang diminati tenaga medis antara lain:

- Uang : tunjangan bulanan, asuransi jiwa, tunjangan cuti.
- Perumahan: rumah dinas, atau disediakan uang kontrak.
- Kendaraan: roda dua, roda empat, kendaraan dinas, kendaraan operasional.
- Fasilitas komunikasi: telepon, internet.
- Fasilitas hiburan: televisi, VCD player.

Sedangkan insentif non material yang paling diminati tenaga medis antara lain:

- Peluang pendidikan lanjutan atas biaya pemerintah
- Peluang mengikuti pendidikan dan latihan
- Peluang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa (untuk PNS)
- Peluang untuk diangkat menjadi PNS atau pegawai tetap
- Peluang peningkatan karier.

Pemberian insentif dalam bentuk kombinasi antara material dan non material adalah yang paling sering.

6.1 Faktor-faktor penentu kebijakan kompensasi (termasuk insentif)

Menurut Dessler (2006), ada empat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan atau rencana pemberian kompensasi pegawai yaitu: aspek legal, serikat pekerja, kebijakan perusahaan, dan keadilan. Aspek legal terkait dengan kebijakan atau peraturan tentang kompensasi atau upah. Aspek serikat pekerja terkait dengan proses tawar menawar penetapan kompensasi atau upah antara serikat pekerja dengan organisasi.

Terkait dengan studi ini, yang penting dicermati adalah aspek kebijakan perusahaan (organisasi, pemerintah) dan aspek keadilan. Dari aspek kebijakan menurut Dessler (2006), ada dua hal penting yang sering menimbulkan masalah yaitu *salary compression* (masalah ketidakadilan gaji, biasanya karena inflasi, yang mengakibatkan gaji pegawai lama lebih kecil daripada gaji pegawai baru dalam posisi yang sama) dan masalah geografi (perbedaan geografi akan berdampak pada perbedaan biaya hidup).

Aspek keadilan merupakan aspek yang sering dievaluasi oleh pegawai (Noe *et al*, 2006; Dessler, 2005; Mello, 2006). Pegawai akan selalu membandingkan kompensasi yang diterima baik dengan sesama pegawai dalam satu organisasi maupun dengan kompensasi yang diterima pegawai lain dalam organisasi yang berbeda. Fenomena ini sejalan dengan salah satu teori motivasi yaitu *the equity theory of motivation*.

6.2 Insentif dalam konteks manajemen SDM

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia (SDM), insentif bagi tenaga kesehatan diperlukan untuk mencapai tujuan sistem yang luas seperti keseimbangan distribusi tenaga kesehatan baik dalam keterampilan maupun geografis. Insentif juga penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas internal, misalnya terkait dengan tingkat pengalaman dan keterampilan para staf, kemampuan bekerja dalam sebuah tim, serta motivasi untuk mengidentifikasi dan membandingkan kinerja individu dengan kinerja organisasi.

Dalam konteks manajemen SDM, insentif bagi SDM kesehatan harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks dan saling terkait. Hal ini terjadi misalnya ketika insentif diberikan kepada kelompok profesional tertentu maka akan berdampak kepada seluruh sistem (Adams & Hicks, 2000).

6.3 Pengaruh insentif terhadap perilaku dan kinerja para dokter

Kajian literatur (Adams & Hicks, 2000) menunjukkan bahwa reaksi para dokter terhadap insentif ekonomi yang melekat pada mekanisme pembayaran sesuai dengan yang diharapkan teori. Hasil kajian terhadap dokter yang mendapat gaji tetap ditemukan bahwa:

- mereka lebih banyak merujuk pasien dibandingkan dengan dokter yang langsung menerima bayaran (*fee-for-service physicians*)
- mereka lebih sedikit kegiatannya
- mereka cenderung melakukan lebih sedikit kunjungan rumah (*home visits*) dan melakukan aktivitas hanya selama jam kerja di tempat kerja.

Dari hasil studi tersebut diketahui pula bahwa perilaku para dokter dipengaruhi oleh insentif-insentif seperti struktur gaji dalam organisasi, ketersediaan obat, prosedur pengobatan dan pengawasan teman sejawat (*peer review*). Selain itu perilaku para dokter dipengaruhi pula oleh insentif dari industri farmasi. Terkait dengan besaran insentif, studi lain menunjukkan bahwa para dokter lebih tertarik dengan jumlah gaji yang pasti.

Sementara itu dari hasil kajian Chaix-Couturier *et al* (Adams & Hicks, 2000) antara lain ditemukan bahwa:

- Perubahan perilaku para dokter terhadap insentif keuangan lebih disebabkan oleh pertimbangan faktor-faktor ekonomi daripada faktor motivasi profesional.
- Transparansi dalam penetapan insentif penting untuk mempertahankan kepercayaan antara dokter dan institusi yang membayarnya..

6.4 Penentuan paket insentif

Paket insentif mencakup hal-hal:

- Sarana dan tujuan pemberian paket insentif
- Lama masa tugas yang menerima paket insentif
- Cara pemberian insentif
- Hal-hal yang membatalkan insentif
- Dukungan peraturan daerah.

Pemberian insentif pada prinsipnya harus memenuhi kejelasan tujuan dan sasaran, prinsip keadilan dan prinsip kompensasi itu sendiri yang bersifat penghargaan dan keterbukaan, serta prinsip kejelasan skala waktu. Bila bentuk insentif sesuai dengan kebutuhan atau harapan tenaga kesehatan, serta dapat mengeliminir kekurangan pada kondisi geografis, sarana dan fasilitas, maka insentif tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi tenaga kesehatan untuk bekerja di lokasi daerah terpencil, tertinggal, rawan konflik dan bencana alam serta tidak diminati.

6.5 Hubungan persepsi keadilan dengan kepuasan, retensi, dan lainnya

Hasil studi menunjukkan bukti adanya hubungan positif antara persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan tingkat kepuasan terhadap gaji dan tunjangan,

kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, kepercayaan terhadap manajemen, serta komitmen untuk mendukung suatu keputusan (Kreitner & Kinicki, 1998). Studi lain juga menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kedua persepsi tersebut (distributif dan prosedural) dengan kemangkiran kerja, keinginan untuk berhenti kerja, dan pergantian atau keluar masuknya pegawai (*turnover*) (Kreitner & Kinicki, 1998).

Ketidakadilan yang terjadi sebagaimana yang dipersepsikan pegawai, akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Contoh konsekuensi yang terjadi jika timbul persepsi ketidakadilan dalam keadilan eksternal adalah munculnya ketidakpuasan dan hengkangnya pegawai, demikian juga sebaliknya pegawai akan betah atau bertahan (*retensi*), loyal dan cinta (*attachment*) terhadap organisasi jika mereka menganggap hal tersebut adil (Kreitner & Kinicki, 1998, Dessler, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan retensi di suatu lokasi antara lain:

- (1). Peluang mendapat penghasilan tambahan dan pengembangan profesionalisme seperti:
 - a. Adanya rumah sakit swasta
 - b. Kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat
 - c. Kemungkinan berpraktik sore
 - d. Perumahan yang disediakan
 - e. Kemungkinan melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah
 - f. Kemungkinan mengikuti seminar dengan biaya pemerintah
 - g. Kemungkinan mengikuti diklat
 - h. Kemungkinan diangkat menjadi PNS/pegawai tetap.
- (2). Fasilitas kerja yang tersedia
- (3). Sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia
- (4). Sarana hiburan yang tersedia
- (5). Kondisi geografis, iklim, dan jumlah penduduk
- (6). Risiko pekerjaan yang ada
- (7). Peraturan tentang ketenagaan yang ada, misalnya:
 - kebijakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian
 - bentuk ikatan kerja: PNS, PTT, honorer, tenaga kontrak
 - penggajian
 - tunjangan-tunjangan
 - hak pegawai: pendidikan, cuti, asuransi
 - kewajiban pegawai.
- (8). Kemampuan keuangan dan fasilitas yang dimiliki Pemda, seperti:
 - besar PAD
 - besar dan atau persentase alokasi anggaran kesehatan
 - kemungkinan penambahan alokasi anggaran kesehatan
 - upaya terobosan yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan anggaran kesehatan
 - asset perumahan fasilitas yang dimiliki daerah yang mungkin digunakan sebagai insentif

6.6 Kesejahteraan SDM Kesehatan.

Tujuan utama pemberian insentif adalah untuk memenuhi kesejahteraan SDM Kesehatan, blok insentif pada Risnakes bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan SDM Kesehatan, salah satunya adalah dengan melihat pendapatan pegawai puskesmas yang diterima setiap bulannya dan dibandingkan dengan upah minimum kabupaten di lokasi puskesmas berada.

Upah minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/walikota berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Bila tidak ada ketetapan Upah minimum kabupaten, maka dapat menggunakan upah minimum provinsi di wilayah puskesmas berada sebagai acuan, berdasarkan SK Pimpinan Daerah.

Adanya regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur pemberian insentif finansial SDM kesehatan, dukungan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan SDM kesehatan adalah salah satu bentuk dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan SDM kesehatan.

Regulasi pemberian insentif finansial SDM kesehatan dapat berupa ketetapan pemerintah daerah yang mengatur sistem insentif di wilayah tersebut, meliputi insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan; insentif untuk tenaga kesehatan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, insentif pembagian dana kapitasi, insentif tunjangan kinerja pegawai puskesmas, insentif jasa pelayanan dan lainnya terkait tambahan penghasilan diluar gaji/upah yang dibayarkan.

Regulasi terkait dukungan peningkatan kompetensi SDM kesehatan antara lain fasilitasi ataupun dukungan untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan berkelanjutan.

Regulasi fasilitas rumah dinas adalah bentuk dukungan pemerintah daerah terkait pengadaan ataupun pengaturan rumah dinas bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut

Regulasi fasilitas kendaraan dinas adalah bentuk dukungan pemerintah daerah terkait pengadaan ataupun pengaturan kendaraan dinas bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut
Regulasi penggantian biaya transport ke tempat kerja adalah bentuk dukungan pemerintah daerah terkait penggantian biaya transport ke tempat kerja ataupun tunjangan transportasi bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut

6.7 Kesenjangan Penghasilan

Kesenjangan dapat terjadi jika ada berbagai jenis status kepegawaian dengan jenis tenaga kesehatan yang sama di dalam satu puskesmas, dan dikaitkan dengan beban pekerjaan yang sama. Hal ini terjadi bila salah satu status SDM kesehatan memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding status SDM kesehatan lainnya pada jenis SDM kesehatan yang sama. Misalnya perbedaan pendapatan antara dokter yang berstatus PNS kabupaten/kota dengan nakes dokter yang berstatus PTT Pusat, atau antara perawat PNS dengan perawat honorer. Potensi masalah kesenjangan yang terjadi dapat berakibat pada penurunan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya di Puskesmas.

6.8 Insentif Non Finansial

Insentif non finansial adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan berupa fasilitas yang ditujukan untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan petugas. Pada Risnakes 2017, insentif finansial ini meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, pelatihan, pendidikan berkelanjutan dan jaminan kesehatan.

Fasilitas rumah dinas adalah rumah yang disediakan oleh puskesmas atau pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan bagi pegawai puskesmas. Selain itu, dilakukan penilaian kondisi layak huni rumah dinas berdasarkan persepsi responden. Informasi ketersediaan fasilitas komunikasi di rumah dinas juga dibutuhkan untuk mengetahui ketersediaan dukungan sarana komunikasi dan untuk memudahkan akses komunikasi dengan tenaga kesehatan di rumah dinas bila dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan puskesmas, bisa berupa telepon rumah, *handy talkie*, handphone berpulsa, maupun biaya pulsa.

Fasilitas kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan oleh puskesmas atau pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sebagai kendaraan operasional bagi petugas puskesmas, tidak termasuk ambulans. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri atas : susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Informasi alokasi dana pemeliharaan juga dibutuhkan untuk mengetahui keberlangsungan pemeliharaan kendaraan dinas.

Kebijakan pimpinan dalam memfasilitasi kebutuhan pendidikan/pelatihan seperti memberikan pendidikan lanjutan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di puskesmas sesuai kebutuhan dan menganggarkan pembiayaan untuk pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas ataupun mengirimkan tenaga puskesmas untuk mendapatkan pelatihan berdasarkan permintaan dinas kesehatan kabupaten/ provinsi merupakan salah satu insentif finansial yang diharapkan dapat diperoleh oleh SDM di puskesmas.

Dasar penetapan pemilihan SDM Merupakan dasar yang digunakan puskesmas untuk memilih SDM kesehatan yang akan diikutsertakan dalam pelatihan, yaitu:

1. Sesuai tupoksi, apabila pemilihan SDM yang diikutsertakan dalam pelatihan disesuaikan dengan tupoksi yang dikerjakan oleh petugas.
2. Masa kerja lama, apabila pemilihan SDM memperhitungkan masa kerja petugas puskesmas.

3. Kinerja baik, apabila pemilihan SDM didasarkan pada hasil penilaian kinerja petugas puskesmas, dan dasar penetapan lainnya.

Diharapkan dengan dasar penetapan yang obyektif, setiap SDM puskesmas memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Institusi memberikan dukungan pembiayaan kepesertaan jaminan kesehatan bagi tenaga non CPNS baik berupa JKN-KIS, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ataupun jaminan kesehatan lainnya, misalnya dengan pemberian penggantian biaya pengobatan dengan alokasi sejumlah tertentu dalam waktu setahun. Jaminan kesehatan dapat berasal dari puskesmas maupun dibiayai pemerintah termasuk pemerintah pusat dan daerah.

Informasi insentif finansial selain ditanyakan kepada kepala puskesmas juga ditanyakan kepada tenaga kesehatan yang turut serta sebagai responden dalam Risnakes 2017. Informasi yang dikumpulkan meliputi perolehan rumah dinas dan kondisi rumah dinas tersebut, kendaraan dinas dan bahan bakarnya, kesempatan mengikuti pelatihan ataupun seminar, serta pendidikan dan pelatihan, kesempatan mengikuti pendidikan berkelanjutan dan kepemilikan jaminan hari tua.

6.9 Insentif Finansial

Salah satu insentif finansial yang diperoleh oleh SDM Kesehatan adalah jasa medis. Pembagian jasa medis yang baik seharusnya ditetapkan berdasarkan aturan yang dibuat secara internal di puskesmas dengan menggunakan berbagai pertimbangan sebagai dasar penetapan pembagian jasa medis. Penerapan aturan pembagian jasa medis akan memberikan motivasi dan semangat bagi SDM kesehatan karena mendapatkan haknya sesuai dengan kesesuaian kinerja yang telah dilakukan.

Informasi insentif finansial pada riset ketenagaan di bidang kesehatan antara lain:

1. Tunjangan/insentif daerah terpencil/perbatasan, yaitu insentif yang diberikan oleh puskesmas, pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau perbatasan.
2. Insentif khusus tenaga kesehatan tertentu, yaitu insentif yang diberikan oleh puskesmas, pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan tertentu karena adanya kelangkaan profesi di fasilitas atau daerah tersebut.
3. Tunjangan kinerja daerah, yaitu insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai di Puskesmas berdasarkan capaian kinerja pegawai puskesmas.
4. Kapitasi, yaitu insentif yang diberikan oleh puskesmas kepada pegawai puskesmas yang berasal dari dana kapitasi dengan perhitungan tertentu yang telah ditetapkan.
5. Biaya transport, yaitu insentif yang diberikan kepada pegawai puskesmas untuk memenuhi kebutuhan transportasi pegawai puskesmas
6. Uang makan, yaitu insentif yang diberikan kepada pegawai puskesmas untuk memenuhi kebutuhan tambahan asupan makanan pegawai puskesmas

7. Tunjangan kemahalan, yaitu tunjangan untuk menutupi biaya kebutuhan sesuai dengan indeks harga daerah atau wilayah penugasan masing masing petugas; dan insentif lainnya.

Risnakes 2017 juga menggali informasi mengenai kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 bulan menurut persepsi SDM di puskesmas dan jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan dalam satu rumah tangga SDM Puskesmas.

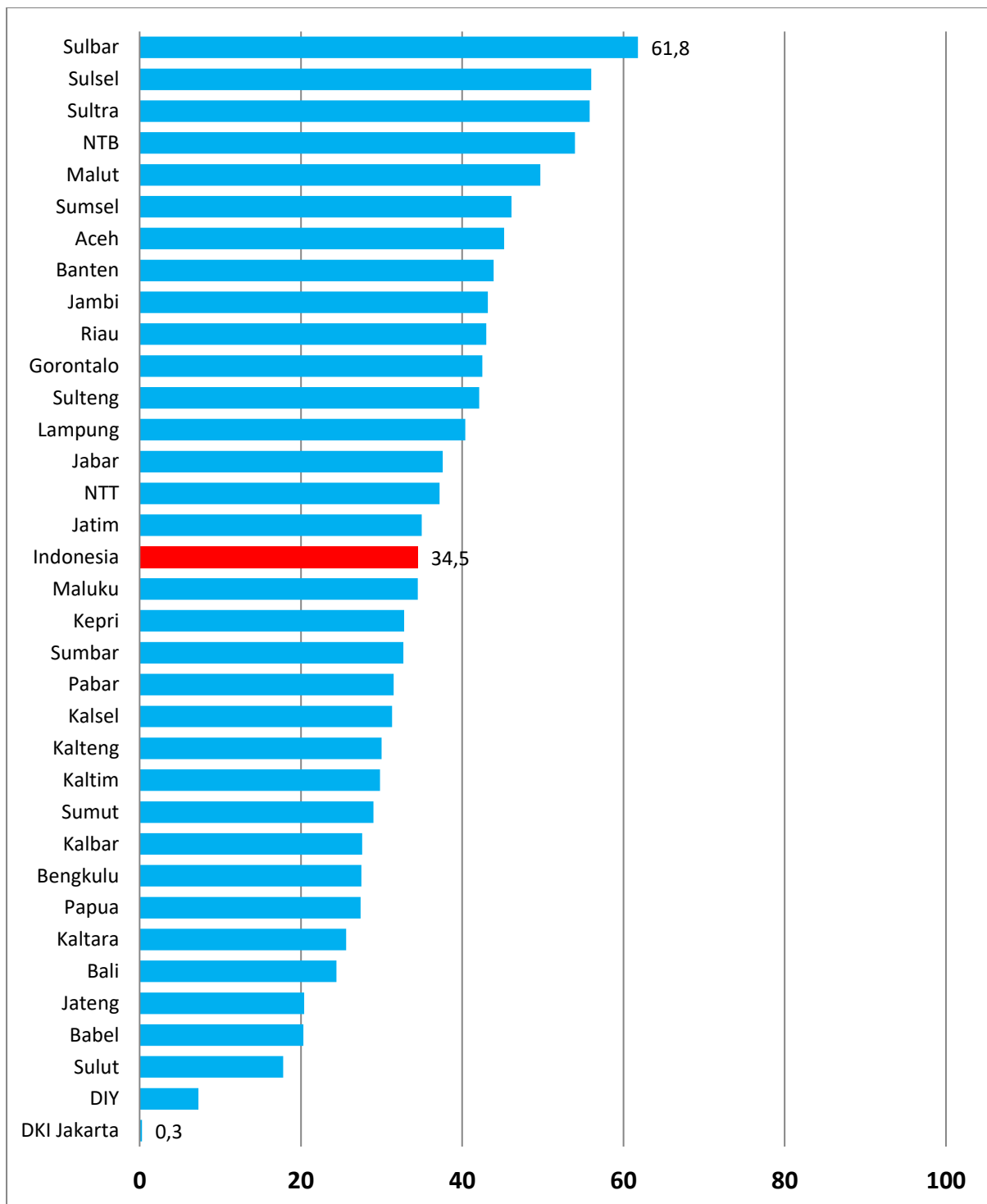
6.10 Hasil Risnakes 2017

6.10.1 Penghasilan pegawai dan insentif finansial

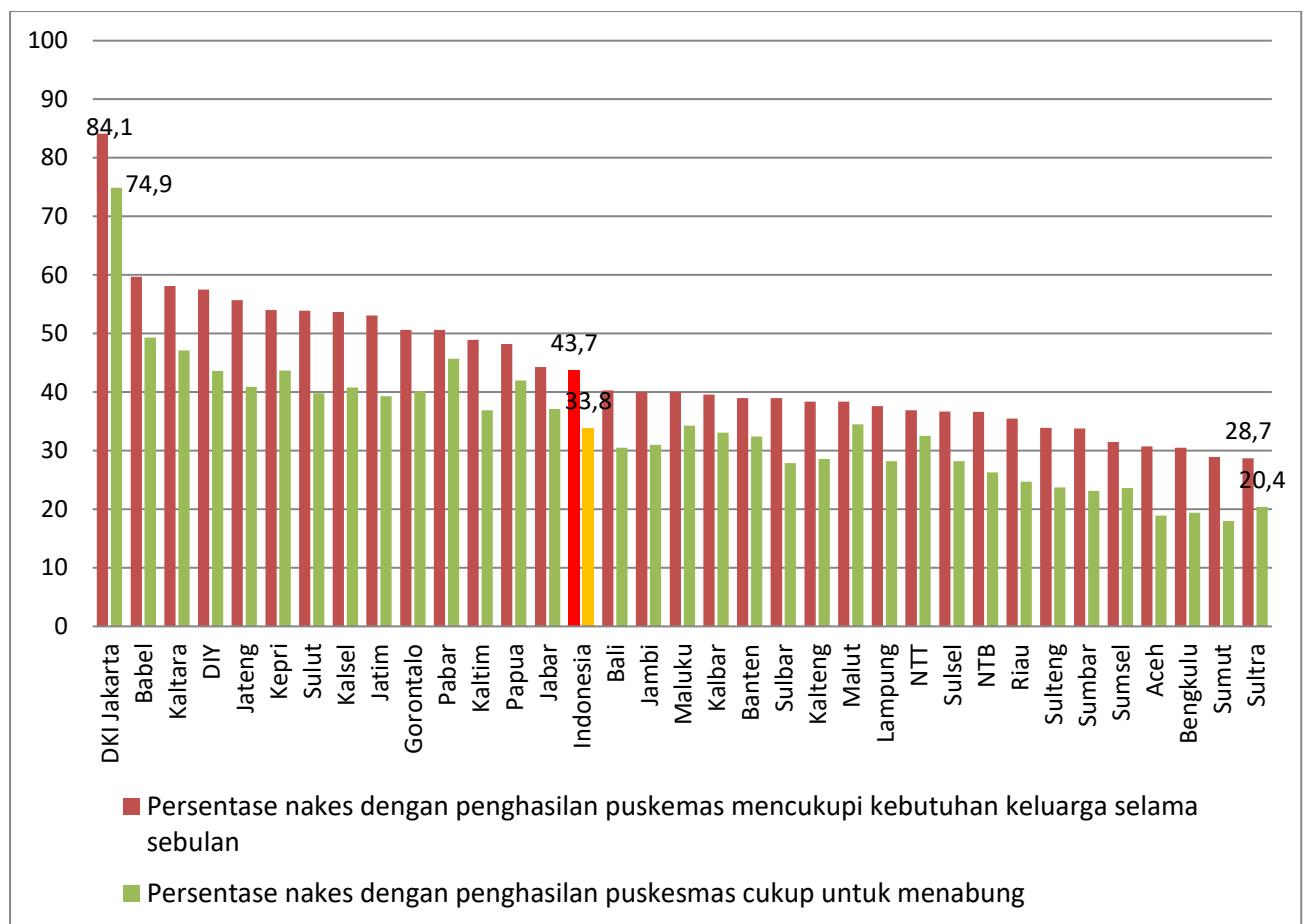
Data pada tabel 6.1. dan gambar 6.1. menunjukkan bahwa terdapat 34,5% pegawai puskesmas di Indonesia yang memperoleh penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan proporsi terbesar pegawai puskesmas yang memiliki penghasilan di bawah UMK (61,2%). Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan proporsi pegawai puskesmas terkecil yang memiliki penghasilan di bawah UMK. Kondisi ini sedikit banyak menimbulkan kesenjangan penghasilan yang kemudian tidak mustahil berpengaruh terhadap kinerja. Provinsi Sulawesi Barat juga merupakan salah satu provinsi dengan proporsi puskesmas yang menyatakan ada kesenjangan penghasilan (68,4%), sebaliknya dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan proporsi puskesmas yang paling sedikit menyatakan terdapat kesenjangan penghasilan (13,1%).

Berdasarkan hal tersebut, wajar pula bila Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan proporsi pegawai terbanyak yang menyatakan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebulan (gambar 6.2), sekaligus juga menjadi provinsi dengan proporsi pegawai terbanyak yang menyatakan penghasilannya dapat disisakan untuk menabung.

Ditinjau dari jumlah insentif per bulan yang diterima oleh pegawai puskesmas, Provinsi DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan rata-rata insentif SDM Kesehatan yang terbesar, untuk seluruh jenis tenaga kesehatan, disusul kemudian oleh Provinsi Papua.



Gambar 6.1.
Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan proporsi pegawai yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum kabupaten/kota menurut provinsi, Risnakes 2017



Gambar 6.2.
Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan proporsi pegawai yang memiliki penghasilan puskesmas mencukupi kebutuhan keluarga selama sebulan dan kemampuan menabung menurut provinsi, RSNs 2017

Tabel 6.1.
Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan penghasilan dibawah UMK dan diatas UMK menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Penghasilan pegawai puskesmas	
	Di bawah UMK	Di atas UMK
Aceh	45,2	54,8
Sumatera Utara	29,0	71,0
Sumatera Barat	32,7	67,3
Riau	43,0	57,0
Jambi	43,2	56,8
Sumatera Selatan	46,1	53,9
Bengkulu	27,5	72,5
Lampung	40,4	59,6
Kep.Bangka Belitung	20,3	79,7
Kepulauan Riau	32,8	67,2
DKI Jakarta	0,3	99,7
Jawa Barat	37,6	62,4
Jawa Tengah	20,4	79,6
DI Yogyakarta	7,3	92,7
Jawa Timur	35,0	65,0
Banten	43,9	56,1
Bali	24,4	75,6
Nusa Tenggara Barat	54,0	46,0
Nusa Tenggara Timur	37,2	62,8
Kalimantan Barat	27,6	72,4
Kalimantan Tengah	30,0	70,0
Kalimantan Selatan	31,3	68,7
Kalimantan Timur	29,8	70,2
Kalimantan Utara	25,6	74,4
Sulawesi Utara	17,8	82,2
Sulawesi Tengah	42,1	57,9
Sulawesi Selatan	56,0	44,0
Sulawesi Tenggara	55,8	44,2
Gorontalo	42,5	57,5
Sulawesi Barat	61,8	38,2
Maluku	34,5	65,5
Maluku Utara	49,7	50,3
Papua Barat	31,5	68,5
Papua	27,4	72,6
INDONESIA	34,5	65,5

Tabel 6.2.
Distribusi pegawai puskesmas berdasarkan penghasilan dibawah UMK dan diatas UMK menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	Penghasilan pegawai puskesmas	
	Dibawah UMK (%)	Di atas UMK (%)
Kemampuan penyelenggaraan		
1. Rawat Inap	46,9	53,1
2. Non Rawat Inap	43,6	56,4
SK Penetapan Puskesmas		
1. Puskesmas Perkotaan	40,6	59,4
2. Puskesmas Perdesaan	45,0	55,0
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	55,0	45,0
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi kepala puskesmas)		
1. Puskesmas Perkotaan	38,1	61,9
2. Puskesmas Perdesaan	45,9	54,1
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	53,4	46,6
4. Tidak tahu	45,3	54,7
Pola Pengelolaan Keuangan		
1. BLUD	48,9	51,1
2. Non BLUD	44,8	55,2

Tabel 6.3.

Distribusi puskesmas berdasarkan permasalahan kesenjangan penghasilan dan pengaruh terhadap kinerja petugas menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Ada permasalahan kesenjangan penghasilan (%)	Ada pengaruh terhadap kinerja (%)
Aceh	340	67,4	66,4
Sumatera Utara	571	49,7	49,6
Sumatera Barat	264	65,5	46,8
Riau	212	66,0	57,1
Jambi	176	60,8	54,2
Sumatera Selatan	322	56,5	54,4
Bengkulu	179	57,0	41,2
Lampung	291	69,4	58,4
Kep.Bangka Belitung	62	56,5	48,6
Kepulauan Riau	72	58,3	57,1
DKI Jakarta	314	13,4	33,3
Jawa Barat	1.050	59,0	46,1
Jawa Tengah	875	39,1	41,2
DI Yogyakarta	121	38,0	43,5
Jawa Timur	960	45,3	46,9
Banten	233	61,4	40,6
Bali	120	40,8	42,9
Nusa Tenggara Barat	158	49,4	53,8
Nusa Tenggara Timur	371	60,4	58,9
Kalimantan Barat	238	62,2	52,7
Kalimantan Tengah	195	53,8	53,3
Kalimantan Selatan	230	52,2	47,5
Kalimantan Timur	173	67,8	52,5
Kalimantan Utara	46	58,7	51,9
Sulawesi Utara	186	44,1	53,7
Sulawesi Tengah	189	55,6	51,4
Sulawesi Selatan	448	61,6	48,2
Sulawesi Tenggara	268	60,1	73,3
Gorontalo	93	46,2	55,8
Sulawesi Barat	94	68,1	43,8
Maluku	198	51,0	51,5
Maluku Utara	127	55,9	57,7
Papua Barat	150	58,0	66,7
Papua	372	56,7	64,5
INDONESIA	9698	53,6	51,7

Tabel 6.4.

Distribusi puskesmas berdasarkan permasalahan kesenjangan penghasilan dan pengaruh terhadap kinerja petugas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Ada permasalahan kesenjangan penghasilan	Ada Pengaruh terhadap kinerja
Kemampuan penyelenggaraan			
1. Rawat Inap	3.722	56,6	52,2
2. Non Rawat Inap	5.976	51,6	38,5
SK Penetapan puskesmas			
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	44,4	20,1
2. Puskesmas Perdesaan	4.902	56,0	29,1
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	61,9	37,3
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)			
1. Puskesmas Perkotaan	2.989	44,7	20,1
2. Puskesmas Perdesaan	4.890	55,5	28,8
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1.772	62,8	37,3
4. Tidak tahu	48	62,5	33,3
Pola Pengelolaan Keuangan			
1. BLUD	2.540	44,5	20,8
2. Non BLUD	7.159	56,8	30,1

Tabel 6.5.
Distribusi tenaga kesehatan berdasarkan kecukupan penghasilan tenaga kesehatan puskesmas
menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Persentase tenaga kesehatan dengan penghasilan puskesmas mencukupi kebutuhan keluarga selama sebulan	Persentase tenaga kesehatan dengan penghasilan puskesmas cukup untuk menabung	Persentase tenaga kesehatan dengan sumber penghasilan lebih dari 1 orang dalam keluarga
Kemampuan penyelenggaraan				
1. Rawat Inap	114.750	43,4	32,9	73,8
2. Non Rawat Inap	149.972	43,1	33,2	75,0
SK Penetapan puskesmas				
1. Puskesmas Perkotaan	72.957	49,9	39,3	80,0
2. Puskesmas Perdesaan	144.340	41,4	30,8	74,9
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	46.765	36,2	28,7	62,4
Karakteristik wilayah kerja				
1. Puskesmas Perkotaan	77.269	49,5	38,9	79,8
2. Puskesmas Perdesaan	144.760	41,6	31,0	75,1
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	41.414	35,7	28,2	61,7
4. Tidak tahu	1.279	41,6	33,6	73,3
Pola Pengelolaan Keuangan				
1. BLUD	64.346	49,3	38,2	77,0
2. Non BLUD	200.376	41,1	31,3	73,7

Tabel 6.6.
Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian jenis insentif finansial menurut provinsi,
Risnakes 2017

Provinsi	N	Tunjangan/ insentif daerah terpencil/ Perbatasan	Insentif khusus tenaga kesehatan tertentu	Tunjangan Kinerja daerah	Kapitasi	Biaya Transport	Uang makan	Tunjangan kemahalan
Aceh	340	14,1	26,2	71,5	97,4	30,0	19,7	0,3
Sumatera Utara	571	10,7	22,1	37,0	85,6	32,7	21,5	0,2
Sumatera Barat	264	18,6	16,3	82,2	97,3	35,2	11,0	-
Riau	212	22,6	46,7	68,4	88,7	34,0	5,2	1,9
Jambi	176	9,1	11,4	58,0	98,9	20,5	11,9	-
Sumatera Selatan	322	5,0	23,9	45,7	89,1	14,9	20,5	-
Bengkulu	179	4,5	17,9	19,0	95,0	14,5	3,4	-
Lampung	291	6,5	10,3	33,3	96,9	23,4	6,2	-
Bangka Belitung	62	14,5	24,2	40,3	100,0	53,2	38,7	-
Kepulauan Riau	72	33,3	29,2	73,6	100,0	9,7	30,6	1,4
DKI Jakarta	314	0,6	4,5	98,4	3,5	2,2	0,6	-
Jawa Barat	1050	8,0	14,2	64,4	91,8	36,9	15,9	0,4
Jawa Tengah	875	1,8	12,2	38,4	98,2	28,7	8,8	1,9
DI Yogyakarta	121	-	14,0	19,8	88,4	19,8	5,8	-
Jawa Timur	960	2,3	10,1	21,7	96,6	27,2	20,8	0,4
Banten	233	3,9	10,7	53,6	96,6	30,9	9,9	-
Bali	120	5,0	11,7	95,0	95,0	53,3	42,5	-
Nusa Tenggara Barat	158	11,4	17,7	82,9	100,0	62,0	19,0	1,9
Nusa Tenggara Timur	371	15,4	26,1	39,6	94,6	52,6	9,2	-
Kalimantan Utara	238	11,3	31,9	59,2	93,7	29,8	26,5	0,8
Kalimantan Barat	195	31,3	38,5	72,8	95,9	20,5	40,0	0,5
Kalimantan Tengah	230	45,2	28,7	86,1	97,8	27,0	19,6	-
Kalimantan Selatan	173	36,4	41,6	68,2	93,1	28,9	54,9	5,2
Kalimantan Timur	46	21,7	13,0	76,1	93,5	17,4	6,5	2,2
Sulawesi Utara	186	9,1	19,4	85,5	98,4	29,6	14,0	2,7
Sulawesi Tengah	189	19,6	18,0	48,7	96,3	30,7	4,8	1,1
Sulawesi Selatan	448	12,3	18,3	22,5	97,8	44,6	7,8	0,4
Sulawesi Tenggara	268	10,1	29,9	36,6	92,5	41,0	11,6	0,4
Gorontalo	93	8,6	12,9	96,8	97,8	44,1	10,8	-
Sulawesi Barat	94	19,1	8,5	51,1	97,9	52,1	19,1	3,2
Maluku	198	19,2	31,3	26,3	93,4	15,2	34,3	1,5
Maluku Utara	127	40,9	41,7	26,0	85,0	22,0	37,8	0,8
Papua Barat	150	56,0	45,3	52,7	80,7	6,7	54,7	2,7
Papua	372	54,8	40,1	47,6	72,6	14,2	59,7	9,1
INDONESIA	9698	13,6	20,4	50,6	90,6	29,9	18,7	1,1

Tabel 6.7.
Distribusi puskesmas berdasarkan pemberian insentif finansial menurut karakteristik puskesmas,
Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Tunjangan/insentif daerah terpencil/Perbatasan	Insentif khusus tenaga kesehatan tertentu	Tunjangan Kinerja daerah	Kapitasi	Biaya Transport	Uang makan	Tunjangan kemahalan
Kemampuan penyelenggaraan								
1. Rawat Inap	3722	20,2	24,4	55,9	92,1	30,0	20,8	2,8
2. Non Rawat Inap	5977	16,1	21,8	56,5	90,8	30,3	20,6	2,6
SK Penetapan puskesmas								
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	9,6	23,4	62,7	92,1	30,6	26,3	4,2
2. Puskesmas Perdesaan	4.902	17,2	22,9	54,4	93,7	30,3	20,8	2,4
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	32,5	25,8	51,4	94,2	32,1	23,0	4,3
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)								
1. Puskesmas Perkotaan	2989	9,8	23,0	62,2	92,3	30,1	26,6	4,2
2. Puskesmas Perdesaan	4890	16,8	23,7	62,2	94,0	30,9	20,4	2,4
3. Puskesmas Terpencil/Sangat terpencil	1772	34,8	25,8	62,2	94,5	32,7	21,2	4,8
4. Tidak tahu	48	74,0	75,0	62,2	98,6	59,2	60,4	16,7
Pola Pengelolaan Keuangan								
1. BLUD	2540	19,5	26,4	57,8	88,3	32,0	21,1	5,8
2. Non BLUD	7159	18,2	22,9	56,7	92,3	30,8	22,1	1,9

Tabel 6.8.
Distribusi besaran insentif total tenaga spesialis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Total Insentif	
		Mean	Median
Aceh	4	1,415,000.00	1,680,000.00
Sumatera Utara	38	1,533,789.47	950,000.00
Sumatera Barat	11	1,152,272.73	1,050,000.00
Riau	12	2,423,083.33	2,430,000.00
Jambi	5	2,602,496.00	1,719,580.00
Sumatera Selatan	17	1,661,482.35	300,000.00
Bengkulu	10	2,081,527.00	545,000.00
Lampung	14	1,114,357.14	1,075,000.00
Kep.Bangka Belitung	3	2,626,666.67	2,780,000.00
Kepulauan Riau	6	7,447,625.00	4,496,000.00
DKI Jakarta	3	10,000,000.00	5,000,000.00
Jawa Barat	56	4,570,767.86	3,650,000.00
Jawa Tengah	35	2,306,471.43	1,700,000.00
DI Yogyakarta	4	3,150,000.00	3,300,000.00
Jawa Timur	36	2,625,775.28	1,850,000.00
Banten	8	3,054,875.00	2,384,500.00
Bali	6	2,004,000.00	1,381,500.00
Nusa Tenggara Barat	6	1,188,333.33	1,050,000.00
Nusa Tenggara Timur	11	545,090.91	200,000.00
Kalimantan Barat	8	1,709,500.00	738,000.00
Kalimantan Tengah	2	728,500.00	728,500.00
Kalimantan Selatan	8	2,783,750.00	3,150,000.00
Kalimantan Timur	7	3,171,014.29	2,700,000.00
Kalimantan Utara*	-	.	.
Sulawesi Utara	5	3,752,400.00	2,800,000.00
Sulawesi Tengah	7	2,144,285.71	1,600,000.00
Sulawesi Selatan	12	2,318,333.33	1,500,000.00
Sulawesi Tenggara	12	1,562,291.67	700,000.00
Gorontalo	3	1,618,333.33	1,605,000.00
Sulawesi Barat	2	525,000.00	525,000.00
Maluku	11	2,089,825.73	400,000.00
Maluku Utara	9	960,000.00	590,000.00
Papua Barat	3	4,733,333.33	2,300,000.00
Papua	8	5,812,500.00	6,800,000.00

Keterangan: * Tidak ada tenaga spesialis yang menjadi sampel penelitian

Tabel 6.9.
Distribusi besaran insentif total tenaga dokter di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean)
dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Total insentif	
		Mean	Median
Aceh	452	2,107,917.67	1,537,500.00
Sumatera Utara	818	2,552,017.84	2,000,000.00
Sumatera Barat	355	2,382,202.85	2,106,250.00
Riau	431	3,263,451.16	2,800,000.00
Jambi	264	2,607,672.50	1,684,000.00
Sumatera Selatan	373	2,521,126.76	1,850,000.00
Bengkulu	180	1,299,212.72	900,000.00
Lampung	463	2,278,631.10	1,900,000.00
Kep.Bangka Belitung	145	2,440,849.96	2,000,000.00
Kepulauan Riau	172	3,902,011.81	3,500,000.00
DKI Jakarta	857	11,203,819.60	7,000,000.00
Jawa Barat	1,763	4,528,331.50	4,000,000.00
Jawa Tengah	1,466	3,318,923.42	2,800,000.00
DI Yogyakarta	341	2,302,669.67	2,000,000.00
Jawa Timur	1,782	3,030,950.43	2,340,000.00
Banten	476	4,130,967.75	3,000,000.00
Bali	346	3,770,599.54	2,199,000.00
Nusa Tenggara Barat	265	2,426,243.21	2,100,000.00
Nusa Tenggara Timur	333	3,616,969.71	2,500,000.00
Kalimantan Barat	281	3,324,614.88	3,000,000.00
Kalimantan Tengah	174	3,954,545.69	3,784,375.00
Kalimantan Selatan	359	2,828,555.31	3,100,000.00
Kalimantan Timur	352	3,082,046.22	2,702,340.00
Kalimantan Utara	69	4,667,900.61	4,700,000.00
Sulawesi Utara	361	2,977,023.38	2,500,000.00
Sulawesi Tengah	145	3,755,339.38	2,400,000.00
Sulawesi Selatan	493	2,660,150.92	2,050,000.00
Sulawesi Tenggara	191	2,861,714.03	2,000,000.00
Gorontalo	116	2,509,814.66	2,045,000.00
Sulawesi Barat	64	3,280,484.38	2,000,000.00
Maluku	88	4,215,628.11	3,760,000.00
Maluku Utara	100	3,307,420.00	1,595,000.00
Papua Barat	82	7,057,219.51	5,925,000.00
Papua	184	8,846,593.75	5,912,500.00

Tabel 6.10.
Distribusi besaran insentif total tenaga dokter gigi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	169	2,166,316.57	1,725,000.00
Sumatera Utara	354	2,307,946.24	1,787,500.00
Sumatera Barat	242	2,178,582.02	2,000,000.00
Riau	206	2,949,678.40	2,795,000.00
Jambi	106	3,283,653.17	2,216,495.00
Sumatera Selatan	114	2,453,386.84	1,850,000.00
Bengkulu	63	1,622,150.22	800,000.00
Lampung	124	2,438,527.42	2,000,000.00
Kep.Bangka Belitung	56	3,688,425.00	3,700,000.00
Kepulauan Riau	75	4,478,028.00	4,040,000.00
DKI Jakarta	376	18,875,764.38	21,000,000.00
Jawa Barat	728	4,940,247.43	4,176,000.00
Jawa Tengah	617	3,012,302.21	2,540,000.00
DI Yogyakarta	159	2,570,083.55	2,500,000.00
Jawa Timur	1,003	2,686,320.13	2,165,225.00
Banten	253	4,459,553.00	3,400,000.00
Bali	250	3,523,286.95	2,130,000.00
Nusa Tenggara Barat	93	2,842,530.54	2,500,000.00
Nusa Tenggara Timur	107	4,065,210.56	3,000,000.00
Kalimantan Barat	81	4,274,208.52	3,380,000.00
Kalimantan Tengah	60	3,712,197.90	3,600,000.00
Kalimantan Selatan	128	3,156,171.08	3,199,999.50
Kalimantan Timur	156	3,471,776.99	3,352,500.00
Kalimantan Utara	28	5,963,212.50	3,600,000.00
Sulawesi Utara	49	3,618,948.98	2,500,000.00
Sulawesi Tengah	69	4,929,577.54	4,750,000.00
Sulawesi Selatan	321	2,358,835.02	2,000,000.00
Sulawesi Tenggara	92	2,785,944.73	2,125,000.00
Gorontalo	39	2,261,794.87	2,000,000.00
Sulawesi Barat	47	3,769,468.09	2,500,000.00
Maluku	32	4,015,292.50	3,912,500.00
Maluku Utara	26	3,000,653.85	1,560,000.00
Papua Barat	23	4,955,152.17	5,500,000.00
Papua	41	6,126,246.34	5,125,000.00

Tabel 6.11.
Distribusi besaran insentif total tenaga bidan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	3,648	763,313.73	505,000.00
Sumatera Utara	6,697	707,351.20	461,800.00
Sumatera Barat	2,902	868,478.50	800,000.00
Riau	2,032	953,211.55	500,000.00
Jambi	1,656	1,085,797.91	400,000.00
Sumatera Selatan	3,601	613,253.12	220,000.00
Bengkulu	1,923	400,874.72	300,000.00
Lampung	3,639	703,102.28	500,000.00
Kep.Bangka Belitung	438	1,410,736.83	1,450,000.00
Kepulauan Riau	590	2,117,174.14	2,017,500.00
DKI Jakarta	909	7,595,708.32	3,100,000.00
Jawa Barat	10,279	1,800,799.56	1,300,000.00
Jawa Tengah	9,896	1,471,476.69	1,200,000.00
DI Yogyakarta	822	1,278,047.92	1,300,000.00
Jawa Timur	9,887	1,090,113.84	900,000.00
Banten	2,857	1,641,247.46	1,175,000.00
Bali	1,095	2,310,763.07	1,290,000.00
Nusa Tenggara Barat	1,491	732,506.26	543,000.00
Nusa Tenggara Timur	2,760	716,862.72	400,000.00
Kalimantan Barat	1,459	1,129,559.51	870,000.00
Kalimantan Tengah	1,013	859,294.63	609,800.00
Kalimantan Selatan	1,860	1,036,400.26	1,000,000.00
Kalimantan Timur	1,157	1,527,412.03	600,000.00
Kalimantan Utara	270	2,321,822.89	2,850,000.00
Sulawesi Utara	866	1,548,015.76	1,500,000.00
Sulawesi Tengah	1,458	941,667.96	500,000.00
Sulawesi Selatan	4,095	552,682.07	250,000.00
Sulawesi Tenggara	2,651	442,779.65	220,000.00
Gorontalo	834	1,066,044.84	900,000.00
Sulawesi Barat	808	543,218.94	247,500.00
Maluku	814	764,347.23	440,000.00
Maluku Utara	1,046	583,554.81	300,000.00
Papua Barat	609	2,693,623.65	1,700,000.00
Papua	1,176	4,289,517.28	2,456,830.00

Tabel 6.12.
Distribusi besaran insentif total tenaga perawat di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	2,953	797,229.27	680,000.00
Sumatera Utara	4,208	908,719.76	600,000.00
Sumatera Barat	1,979	953,750.38	850,000.00
Riau	1,839	1,315,113.46	1,100,000.00
Jambi	1,709	1,303,992.63	600,000.00
Sumatera Selatan	3,129	722,590.53	300,000.00
Bengkulu	1,502	501,126.60	300,000.00
Lampung	2,322	859,195.39	700,000.00
Kep.Bangka Belitung	675	1,496,128.65	1,600,000.00
Kepulauan Riau	675	2,113,347.73	1,980,000.00
DKI Jakarta	991	8,700,244.09	3,428,334.00
Jawa Barat	7,557	2,089,631.48	1,500,000.00
Jawa Tengah	6,118	1,594,193.26	1,280,350.00
DI Yogyakarta	822	1,492,156.26	1,500,000.00
Jawa Timur	9,018	1,092,034.17	864,500.00
Banten	1,726	1,734,979.29	1,107,500.00
Bali	956	2,689,393.94	1,700,000.00
Nusa Tenggara Barat	1,757	991,725.40	700,000.00
Nusa Tenggara Timur	3,513	809,481.66	500,000.00
Kalimantan Barat	2,256	1,124,898.31	800,000.00
Kalimantan Tengah	1,673	996,575.44	900,000.00
Kalimantan Selatan	1,896	1,156,321.10	1,073,500.00
Kalimantan Timur	1,411	1,902,746.11	1,500,000.00
Kalimantan Utara	441	2,623,959.46	3,000,000.00
Sulawesi Utara	1,759	1,760,980.68	1,650,000.00
Sulawesi Tengah	1,744	1,154,106.33	600,000.00
Sulawesi Selatan	4,480	767,227.50	500,000.00
Sulawesi Tenggara	2,367	477,528.00	300,000.00
Gorontalo	709	1,083,851.69	1,050,000.00
Sulawesi Barat	882	833,526.64	445,000.00
Maluku	1,719	932,602.44	500,000.00
Maluku Utara	831	757,084.97	500,000.00
Papua Barat	914	2,430,503.94	1,700,000.00
Papua	1,897	4,162,935.01	2,530,000.00

Tabel 6.13.

Distribusi besaran insentif total tenaga farmasi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	321	914,301.18	700,000.00
Sumatera Utara	433	1,227,783.70	800,000.00
Sumatera Barat	302	1,198,579.80	1,075,450.00
Riau	266	1,590,815.45	1,100,000.00
Jambi	185	1,802,676.09	1,135,500.00
Sumatera Selatan	281	1,049,772.24	600,000.00
Bengkulu	114	497,341.83	350,000.00
Lampung	205	1,078,995.61	800,000.00
Kep.Bangka Belitung	66	1,823,539.85	1,800,000.00
Kepulauan Riau	78	2,584,141.03	2,537,500.00
DKI Jakarta	323	6,257,053.71	3,000,000.00
Jawa Barat	1,065	1,764,204.05	1,200,000.00
Jawa Tengah	865	1,696,403.80	1,300,000.00
DI Yogyakarta	141	1,383,037.96	1,000,000.00
Jawa Timur	824	1,300,043.61	1,000,000.00
Banten	214	1,936,845.30	1,000,000.00
Bali	117	2,333,231.32	1,445,000.00
Nusa Tenggara Barat	152	971,721.45	900,000.00
Nusa Tenggara Timur	340	890,356.51	558,500.00
Kalimantan Barat	220	1,497,149.36	1,300,000.00
Kalimantan Tengah	158	1,107,679.11	1,000,000.00
Kalimantan Selatan	305	1,360,793.93	1,185,000.00
Kalimantan Timur	236	1,657,024.59	981,555.00
Kalimantan Utara	69	2,536,811.45	3,100,000.00
Sulawesi Utara	127	1,883,755.91	1,800,000.00
Sulawesi Tengah	213	1,175,971.92	400,000.00
Sulawesi Selatan	519	1,078,978.67	750,000.00
Sulawesi Tenggara	201	739,803.48	400,000.00
Gorontalo	81	1,174,346.91	800,000.00
Sulawesi Barat	97	1,266,647.53	800,000.00
Maluku	85	1,606,574.69	750,000.00
Maluku Utara	66	645,945.45	571,500.00
Papua Barat	67	2,651,992.54	1,750,000.00
Papua	144	3,396,571.53	2,170,000.00

Tabel 6.14.

Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	679	850,505.15	700,000.00
Sumatera Utara	731	1,349,468.56	800,000.00
Sumatera Barat	301	1,262,098.68	975,000.00
Riau	291	1,451,613.85	1,200,000.00
Jambi	234	1,807,089.00	1,235,000.00
Sumatera Selatan	493	1,039,222.29	500,000.00
Bengkulu	438	617,448.00	400,000.00
Lampung	319	1,740,948.84	1,000,000.00
Kep.Bangka Belitung	74	1,572,027.86	1,420,000.00
Kepulauan Riau	70	2,934,761.03	3,163,500.00
DKI Jakarta	40	11,587,691.25	13,459,500.00
Jawa Barat	1,003	2,451,948.26	1,600,000.00
Jawa Tengah	786	1,560,830.61	800,000.00
DI Yogyakarta	110	1,165,926.66	758,000.00
Jawa Timur	513	1,082,682.44	900,000.00
Banten	213	2,894,006.26	1,500,000.00
Bali	86	2,412,604.07	1,657,000.00
Nusa Tenggara Barat	137	976,905.11	800,000.00
Nusa Tenggara Timur	456	955,994.01	500,000.00
Kalimantan Barat	218	1,800,074.47	1,043,215.00
Kalimantan Tengah	176	1,183,423.18	831,000.00
Kalimantan Selatan	264	1,636,520.97	1,225,000.00
Kalimantan Timur	253	2,393,601.67	1,000,000.00
Kalimantan Utara	75	2,320,514.67	2,000,000.00
Sulawesi Utara	172	1,716,247.09	1,595,500.00
Sulawesi Tengah	424	981,102.83	500,000.00
Sulawesi Selatan	897	1,140,723.18	790,000.00
Sulawesi Tenggara	565	586,080.48	400,000.00
Gorontalo	222	1,030,052.70	725,000.00
Sulawesi Barat	133	1,055,681.95	600,000.00
Maluku	162	1,045,626.92	432,545.00
Maluku Utara	244	607,006.35	370,000.00
Papua Barat	93	2,229,902.47	1,400,000.00
Papua	217	3,607,384.01	2,000,000.00

Tabel 6.15.
Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	349	857,234.04	700,000.00
Sumatera Utara	251	1,168,979.44	800,000.00
Sumatera Barat	213	1,163,601.97	1,050,000.00
Riau	103	1,898,325.53	1,865,000.00
Jambi	153	1,700,617.63	1,166,600.00
Sumatera Selatan	290	997,262.07	571,500.00
Bengkulu	79	555,995.24	433,000.00
Lampung	244	964,780.98	800,000.00
Kep.Bangka Belitung	63	1,661,194.21	1,884,800.00
Kepulauan Riau	63	1,948,455.56	2,025,000.00
DKI Jakarta	155	6,418,007.39	3,000,000.00
Jawa Barat	693	2,957,224.79	2,180,000.00
Jawa Tengah	750	1,812,317.19	1,500,000.00
DI Yogyakarta	129	1,417,843.17	1,300,000.00
Jawa Timur	659	1,399,453.93	1,100,000.00
Banten	157	2,103,784.27	1,608,000.00
Bali	154	2,975,446.53	1,833,750.00
Nusa Tenggara Barat	161	1,811,937.89	1,200,000.00
Nusa Tenggara Timur	395	1,121,247.72	700,000.00
Kalimantan Barat	261	1,479,280.48	1,245,000.00
Kalimantan Tengah	112	1,445,229.91	1,275,000.00
Kalimantan Selatan	229	1,426,559.07	1,301,971.00
Kalimantan Timur	129	2,065,058.91	2,250,000.00
Kalimantan Utara	40	2,345,862.50	3,100,000.00
Sulawesi Utara	249	1,895,364.66	1,800,000.00
Sulawesi Tengah	198	1,392,735.56	750,000.00
Sulawesi Selatan	462	1,053,838.45	850,000.00
Sulawesi Tenggara	217	660,510.60	500,000.00
Gorontalo	93	1,258,720.43	1,200,000.00
Sulawesi Barat	64	1,025,437.50	700,000.00
Maluku	197	1,063,304.20	600,000.00
Maluku Utara	71	614,539.44	500,000.00
Papua Barat	55	2,473,365.45	2,260,000.00
Papua	148	3,085,549.19	2,275,000.00

Tabel 6.16.
Distribusi besaran insentif total tenaga gizi di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	261	957,946.36	800,000.00
Sumatera Utara	377	1,518,780.77	977,000.00
Sumatera Barat	241	1,100,467.72	1,000,000.00
Riau	137	1,763,132.04	1,700,000.00
Jambi	93	1,345,488.33	1,000,000.00
Sumatera Selatan	208	1,278,011.42	948,500.00
Bengkulu	111	684,291.95	425,000.00
Lampung	147	1,252,170.07	860,000.00
Kep.Bangka Belitung	66	1,663,462.12	1,943,500.00
Kepulauan Riau	44	3,010,886.36	2,550,000.00
DKI Jakarta	155	6,755,266.59	3,000,000.00
Jawa Barat	648	2,903,131.67	2,318,000.00
Jawa Tengah	740	1,839,086.43	1,500,000.00
DI Yogyakarta	137	1,701,432.57	1,228,000.00
Jawa Timur	795	1,368,330.19	1,040,000.00
Banten	143	2,598,503.50	2,000,000.00
Bali	120	2,905,156.05	1,828,500.00
Nusa Tenggara Barat	173	1,227,916.07	922,000.00
Nusa Tenggara Timur	409	1,100,955.72	500,000.00
Kalimantan Barat	257	1,529,656.63	1,300,000.00
Kalimantan Tengah	179	1,085,652.68	1,040,000.00
Kalimantan Selatan	323	1,317,480.57	1,212,000.00
Kalimantan Timur	94	2,337,824.68	2,586,250.00
Kalimantan Utara	31	2,696,095.48	3,300,000.00
Sulawesi Utara	182	2,022,555.05	1,800,000.00
Sulawesi Tengah	108	1,444,167.59	637,500.00
Sulawesi Selatan	452	1,157,353.01	977,500.00
Sulawesi Tenggara	288	661,764.59	542,000.00
Gorontalo	155	1,195,954.84	1,045,000.00
Sulawesi Barat	80	1,107,650.00	700,000.00
Maluku	221	1,081,110.05	717,816.00
Maluku Utara	133	743,319.55	500,000.00
Papua Barat	79	3,172,627.34	2,100,000.00
Papua	198	3,641,163.13	2,600,000.00

Tabel 6.17.
Distribusi besaran insentif total tenaga keterampilan fisik di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	46	584,934.78	300,000.00
Sumatera Utara	11	1,491,727.27	2,100,000.00
Sumatera Barat	13	688,461.54	750,000.00
Riau	10	938,850.00	645,000.00
Jambi*	-	-	-
Sumatera Selatan	11	595,818.18	500,000.00
Bengkulu*	-	.	.
Lampung	1	500,000.00	500,000.00
Kep.Bangka Belitung*	-	.	.
Kepulauan Riau	1	2,832,000.00	2,832,000.00
DKI Jakarta	3	4,277,777.67	3,000,000.00
Jawa Barat	15	1,106,768.60	606,529.00
Jawa Tengah	96	1,374,292.03	1,200,000.00
DI Yogyakarta	25	807,200.00	550,000.00
Jawa Timur	43	667,161.86	600,000.00
Banten	8	1,471,750.00	1,487,000.00
Bali	1	5,835,000.00	5,835,000.00
Nusa Tenggara Barat	1	350,000.00	350,000.00
Nusa Tenggara Timur	11	816,636.36	650,000.00
Kalimantan Barat	8	1,394,218.75	1,724,375.00
Kalimantan Tengah	1	300,000.00	300,000.00
Kalimantan Selatan	5	1,813,000.00	1,500,000.00
Kalimantan Timur*	-	-	-
Kalimantan Utara	1	3,400,000.00	3,400,000.00
Sulawesi Utara	12	1,665,000.00	1,550,000.00
Sulawesi Tengah	1	1,000,000.00	1,000,000.00
Sulawesi Selatan	16	692,187.50	450,000.00
Sulawesi Tenggara	2	250,000.00	250,000.00
Gorontalo*	-	.	.
Sulawesi Barat	3	766,666.67	800,000.00
Maluku*	-	.	.
Maluku Utara	2	555,000.00	555,000.00
Papua Barat	1	6,000,000.00	6,000,000.00
Papua	6	4,833,333.33	5,000,000.00

Keterangan: * Tidak ada tenaga keterampilan fisik yang menjadi sampel

Tabel 6.18.

Distribusi besaran insentif total tenaga keteknisan medis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	215	1,189,119.77	800,000.00
Sumatera Utara	218	1,251,641.74	864,000.00
Sumatera Barat	301	999,191.03	865,000.00
Riau	164	1,226,785.98	1,020,000.00
Jambi	182	1,846,663.52	1,089,000.00
Sumatera Selatan	185	1,091,886.49	700,000.00
Bengkulu	42	755,042.19	300,000.00
Lampung	191	899,348.43	700,000.00
Kep.Bangka Belitung	58	1,717,931.03	1,882,500.00
Kepulauan Riau	24	1,345,958.33	1,265,000.00
DKI Jakarta	90	7,010,493.13	3,000,000.00
Jawa Barat	628	1,835,564.40	1,390,000.00
Jawa Tengah	677	1,582,870.82	1,300,000.00
DI Yogyakarta	197	1,329,363.46	1,300,000.00
Jawa Timur	566	1,059,420.65	900,000.00
Banten	66	1,428,647.73	1,000,000.00
Bali	120	2,230,508.70	1,577,000.00
Nusa Tenggara Barat	109	980,158.17	750,000.00
Nusa Tenggara Timur	269	830,418.39	500,000.00
Kalimantan Barat	189	1,406,457.99	1,400,000.00
Kalimantan Tengah	106	1,086,765.38	1,000,000.00
Kalimantan Selatan	235	1,122,740.68	1,020,000.00
Kalimantan Timur	71	1,884,350.99	2,000,000.00
Kalimantan Utara	20	2,985,800.00	3,270,000.00
Sulawesi Utara	59	1,489,237.29	1,500,000.00
Sulawesi Tengah	41	1,165,536.59	450,000.00
Sulawesi Selatan	274	929,570.56	700,000.00
Sulawesi Tenggara	104	426,221.15	350,000.00
Gorontalo	16	1,355,125.00	1,487,500.00
Sulawesi Barat	30	747,133.33	600,000.00
Maluku	37	597,567.57	150,000.00
Maluku Utara	37	493,124.32	500,000.00
Papua Barat	32	2,747,612.50	2,150,000.00
Papua	95	2,389,415.79	1,730,000.00

Tabel 6.19.

Distribusi besaran insentif total tenaga teknis biomedis di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	154	972,814.94	800,000.00
Sumatera Utara	141	1,238,099.08	836,000.00
Sumatera Barat	176	1,074,806.82	1,000,000.00
Riau	52	1,299,392.31	800,000.00
Jambi	137	1,498,732.07	950,458.00
Sumatera Selatan	159	992,867.92	600,000.00
Bengkulu	79	398,767.29	300,000.00
Lampung	134	951,449.93	850,000.00
Kep.Bangka Belitung	45	1,781,093.78	2,050,000.00
Kepulauan Riau	39	2,646,358.97	2,550,000.00
DKI Jakarta	46	9,136,445.65	3,175,000.00
Jawa Barat	467	2,046,895.72	1,500,000.00
Jawa Tengah	566	1,679,700.18	1,395,000.00
DI Yogyakarta	73	1,129,939.04	1,000,000.00
Jawa Timur	575	1,211,465.95	940,000.00
Banten	124	2,190,191.53	1,475,000.00
Bali	80	1,584,050.00	787,500.00
Nusa Tenggara Barat	104	904,766.35	800,000.00
Nusa Tenggara Timur	288	658,113.37	400,000.00
Kalimantan Barat	163	1,405,549.82	1,250,000.00
Kalimantan Tengah	98	1,049,031.84	1,040,000.00
Kalimantan Selatan	194	1,277,589.78	1,129,739.50
Kalimantan Timur	134	1,523,439.85	676,000.00
Kalimantan Utara	25	2,196,000.00	3,100,000.00
Sulawesi Utara	12	2,331,250.00	2,650,000.00
Sulawesi Tengah	31	937,322.58	600,000.00
Sulawesi Selatan	256	797,486.98	600,000.00
Sulawesi Tenggara	76	554,513.16	300,000.00
Gorontalo	13	1,046,538.46	775,000.00
Sulawesi Barat	30	1,237,566.67	650,000.00
Maluku	25	1,005,560.00	200,000.00
Maluku Utara	66	366,803.03	250,000.00
Papua Barat	34	1,770,588.24	1,300,000.00
Papua	126	3,332,971.43	2,490,000.00

Tabel 6.20.

Distribusi besaran insentif total tenaga kesehatan tradisional di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh*	-	-	-
Sumatera Utara	1	1,000,000.00	1,000,000.00
Sumatera Barat	1	850,000.00	850,000.00
Riau	2	2,000,000.00	2,000,000.00
Jambi*	-	.	.
Sumatera Selatan	2	550,000.00	550,000.00
Bengkulu*	-	.	.
Lampung	1	745,000.00	745,000.00
Kep.Bangka Belitung*	-	.	.
Kepulauan Riau*	-	.	.
DKI Jakarta*	-	.	.
Jawa Barat	2	775,000.00	775,000.00
Jawa Tengah	3	616,666.67	550,000.00
DI Yogyakarta*	-	.	.
Jawa Timur	26	855,271.15	900,000.00
Banten*	-	.	.
Bali*	-	.	.
Nusa Tenggara Barat	1	1,670,000.00	1,670,000.00
Nusa Tenggara Timur*	-	.	.
Kalimantan Barat*	-	.	.
Kalimantan Tengah*	-	.	.
Kalimantan Selatan	1	1,080,000.00	1,080,000.00
Kalimantan Timur*	-	.	.
Kalimantan Utara*	-	.	.
Sulawesi Utara	2	295,000.00	295,000.00
Sulawesi Tengah	3	566,666.67	300,000.00
Sulawesi Selatan	2	1,592,500.00	1,592,500.00
Sulawesi Tenggara*	-	.	.
Gorontalo	1	950,000.00	950,000.00
Sulawesi Barat*	-	.	.
Maluku*	-	.	.
Maluku Utara	1	1,177,500.00	1,177,500.00
Papua Barat*	-	.	.
Papua*	-	.	.

Keterangan: * Tidak ada tenaga kesehatan tradisional yang menjadi sampel

Tabel 6.21.

Distribusi besaran insentif total tenaga non tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan median menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	n	Insentif	
		Mean	Median
Aceh	546	752,387.16	500,000.00
Sumatera Utara	446	586,681.19	285,000.00
Sumatera Barat	396	733,218.03	500,000.00
Riau	321	714,586.04	100,000.00
Jambi	273	1,667,309.78	600,000.00
Sumatera Selatan	466	666,469.91	307,500.00
Bengkulu	234	554,733.43	250,000.00
Lampung	563	526,625.63	400,000.00
Kep.Bangka Belitung	107	627,785.05	300,000.00
Kepulauan Riau	185	1,033,925.95	350,000.00
DKI Jakarta	875	2,832,593.09	1,500,000.00
Jawa Barat	2,940	1,441,719.06	700,000.00
Jawa Tengah	2,207	1,340,390.44	1,000,000.00
DI Yogyakarta	164	1,074,476.34	792,500.00
Jawa Timur	1,893	928,024.73	650,210.00
Banten	360	1,126,832.28	390,000.00
Bali	233	2,399,561.69	800,000.00
Nusa Tenggara Barat	205	851,670.00	620,000.00
Nusa Tenggara Timur	503	616,303.18	300,000.00
Kalimantan Barat	581	1,044,446.97	910,000.00
Kalimantan Tengah	422	569,466.40	233,400.00
Kalimantan Selatan	453	892,606.99	480,000.00
Kalimantan Timur	324	1,044,631.77	297,500.00
Kalimantan Utara	91	1,455,515.38	300,000.00
Sulawesi Utara	190	952,385.53	600,000.00
Sulawesi Tengah	225	767,691.11	300,000.00
Sulawesi Selatan	594	544,775.85	300,000.00
Sulawesi Tenggara	185	361,670.27	200,000.00
Gorontalo	241	707,095.44	500,000.00
Sulawesi Barat	131	533,328.24	370,000.00
Maluku	273	758,941.64	250,000.00
Maluku Utara	106	383,944.34	163,000.00
Papua Barat	134	1,550,403.72	1,000,000.00
Papua	263	2,952,186.31	1,200,000.00

Tabel 6.22.

Distribusi nominal penghasilan minimum dan median tenaga kesehatan tertentu (dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat) berdasarkan menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Dokter			Dokter gigi			Bidan			Perawat		
	n	Minimum	Median	n	Minimum	Median	n	Minimum	Median	n	Minimum	Median
Aceh	392	500.000	5.155.000	132	1.000.000	5.799.500	2.416	75.000	3.950.000	2.155	50.000	3.850.000
Sumatera Utara	794	500.000	6.000.000	342	1.085.000	5.926.500	5.757	50.000	3.400.000	3.760	100.000	3.816.000
Sumatera Barat	338	1.600.000	5.735.000	232	2.000.000	5.720.000	2.223	50.000	3.930.000	1.584	90.000	4.174.000
Riau	409	200.000	6.609.000	199	750.000	7.000.000	1.696	50.000	3.451.000	1.678	50.000	4.500.000
Jambi	243	800.000	5.350.000	96	900.000	6.150.000	1.145	100.000	3.850.000	1.230	180.000	4.148.779
Sumatera Selatan	359	500.000	5.200.000	111	200.000	5.700.000	2.634	50.000	3.250.000	2.420	50.000	3.621.000
Bengkulu	172	500.000	4.402.850	59	400.000	5.002.000	1.695	98.000	3.060.000	1.334	100.000	3.540.000
Lampung	436	1.150.000	5.535.500	119	2.600.000	5.988.300	2.831	50.000	3.400.000	1.883	60.000	4.100.000
Kep.Bangka Belitung	140	2.600.000	6.125.000	54	3.250.000	7.397.500	404	450.000	4.585.000	630	300.000	4.700.000
Kepulauan Riau	170	1.500.000	7.675.000	73	3.698.000	8.460.700	578	400.000	5.036.500	667	300.000	5.070.000
DKI Jakarta	800	2.839.700	12.100.000	362	3.200.000	27.000.000	872	2.800.000	7.600.000	952	2.560.000	8.125.000
Jawa Barat	1.657	450.000	8.050.000	694	550.000	8.415.250	8.658	50.000	4.557.440	6.337	100.000	5.467.000
Jawa Tengah	1.395	150.000	6.800.000	580	1.000.000	6.840.000	9.392	100.000	4.027.000	5.792	100.000	4.600.000
DI Yogyakarta	327	1.716.000	6.000.000	151	2.500.000	6.700.000	796	250.000	4.093.400	800	80.000	4.900.000
Jawa Timur	1.707	600.000	6.410.200	967	200.000	6.299.800	8.634	50.000	3.972.200	8.077	50.000	3.786.500
Banten	463	1.350.000	7.500.000	248	500.000	7.875.000	2.545	100.000	3.900.000	1.566	50.000	4.470.000
Bali	332	900.000	6.159.000	242	1.700.000	6.533.000	1.005	314.000	4.522.000	900	200.000	5.435.925
Nusa Tenggara Barat	243	2.048.480	5.350.200	87	2.700.000	5.996.800	921	100.000	3.350.000	1.146	100.000	3.700.000
Nusa Tenggara Timur	318	600.000	8.600.000	105	1.150.000	7.918.000	1.916	100.000	2.955.000	2.706	160.000	3.241.050
Kalimantan Barat	266	1.916.600	7.000.000	79	1.970.000	6.800.000	1.142	100.000	3.954.500	1.838	100.000	4.000.000
Kalimantan Tengah	171	300.000	8.000.000	58	2.112.960	7.830.000	904	200.000	3.650.000	1.501	150.000	4.000.000
Kalimantan Selatan	356	305.300	6.642.400	125	2.133.333	7.195.000	1.547	50.000	4.138.900	1.619	50.000	4.406.200
Kalimantan Timur	337	1.400.000	7.300.000	152	1.400.000	7.975.000	1.088	300.000	3.977.150	1.351	435.000	5.200.000
Kalimantan Utara	68	2.900.000	8.500.000	27	3.385.000	8.300.000	257	486.000	5.530.000	429	1.000.000	5.864.500
Sulawesi Utara	355	2.094.100	6.700.000	47	2.000.000	7.000.000	826	200.000	4.602.000	1.685	200.000	4.963.500
Sulawesi Tengah	122	400.000	8.600.000	59	1.800.000	10.850.000	975	50.000	3.261.000	1.291	50.000	3.913.700
Sulawesi Selatan	451	1.000.000	6.100.000	299	1.000.000	5.950.000	2.010	50.000	3.531.850	2.791	100.000	4.030.000
Sulawesi Tenggara	172	360.000	6.000.000	86	2.100.000	5.850.000	1.694	50.000	2.271.000	1.590	50.000	3.085.850
Gorontalo	109	2.000.000	6.800.000	39	3.243.000	6.050.000	667	400.000	3.426.000	568	150.000	4.200.000
Sulawesi Barat	59	1.400.000	6.000.000	41	2.100.000	6.550.000	522	80.000	2.840.110	673	50.000	3.600.000
Maluku	83	1.501.950	7.800.000	30	2.300.000	6.778.700	655	250.000	3.522.000	1.455	200.000	3.400.000
Maluku Utara	99	1.500.000	11.000.000	25	2.424.000	8.200.000	823	100.000	2.900.000	707	150.000	3.368.000
Papua Barat	80	1.050.000	15.000.000	21	3.300.000	11.385.000	517	320.000	5.200.000	834	320.000	4.859.500
Papua	159	1.100.000	12.030.000	36	1.000.000	9.800.000	1.001	300.000	6.050.000	1.697	250.000	5.916.000
INDONESIA	13.582	150.000	6.873.836	5.977	200.000	7.000.000	70.746	50.000	3.850.000	65.646	50.000	4.185.000

6.10.2 Insentif non finansial

Data pada tabel 6.6. menunjukkan bahwa secara Nasional terdapat 78,0% puskesmas yang memiliki rumah dinas. Seluruh puskesmas di Provinsi Bangka Belitung sudah memiliki rumah dinas, dan hanya 10% puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan rumah dinas. Sekitar 83% dari rumah dinas tersebut layak dihuni. Kendati demikian, hanya 37% saja yang sudah mencukupi kebutuhan di puskesmas. Sekitar 22,8% rumah dinas dilengkapi dengan fasilitas komunikasi. Bidan (56,2%), perawat (47,9%), dan dokter (38%) merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak menempati rumah dinas.

Sekitar 93,1% puskesmas memiliki kendaraan dinas, meliputi (salah satu atau lebih) mobil non ambulans, sepeda motor, sepeda, perahu. Hanya 48,1% puskesmas yang menyediakan alokasi dana pemeliharaan.

Dari sisi Pendidikan dan pelatihan, sekitar 63,9% puskesmas memiliki kebijakan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan proporsi puskesmas terbesar yang memiliki kebijakan memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan untuk stafnya. Keikutsertaan dalam Pendidikan dan pelatihan lebih dikarenakan pertimbangan kesesuaian dengan tupoksi (63,4%) dibandingkan dengan masa kinerja yang baik (3,3%) dan lamanya masa kerja (2,8%).

Khusus untuk kepemilikan jaminan kesehatan untuk tenaga non PNS, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan proporsi puskesmas dengan tenaga non PNS terbesar yang memiliki jaminan kesehatan (95,9%), disusul kemudian oleh Provinsi Aceh (71,2%).

Tabel 6.23.
Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas rumah dinas menurut provinsi,
Risnakes 2017

Provinsi	N	Fasilitas rumah dinas	Rata-rata Persentase Rumah Dinas layak huni*	Rumah dinas sesuai kebutuhan**	Fasilitas komunikasi rumah dinas**
Aceh	340	92,9	87,4	46,2	38,3
Sumatera Utara	571	84,2	85,8	41,0	20,2
Sumatera Barat	264	95,5	90,7	33,3	25,0
Riau	212	92,5	84,0	37,8	30,1
Jambi	176	93,8	85,5	40,0	17,0
Sumatera Selatan	322	82,0	88,6	43,9	26,1
Bengkulu	179	88,8	85,3	43,4	24,5
Lampung	291	78,4	81,2	42,1	20,2
Kep.Bangka Belitung	62	100,0	95,9	43,5	16,1
Kepulauan Riau	72	93,1	85,3	38,8	20,9
DKI Jakarta	314	10,2	92,1	46,9	15,6
Jawa Barat	1.050	47,4	77,0	40,4	27,1
Jawa Tengah	875	66,9	78,3	45,5	28,5
DI Yogyakarta	121	76,0	79,0	62,0	18,5
Jawa Timur	960	74,5	76,8	43,6	30,8
Banten	233	56,7	76,2	36,4	30,3
Bali	120	86,7	81,6	48,1	19,2
Nusa Tenggara Barat	158	85,4	84,2	45,9	31,1
Nusa Tenggara Timur	371	96,0	81,1	20,8	11,2
Kalimantan Barat	238	89,5	85,2	25,8	22,5
Kalimantan Tengah	195	96,9	83,3	30,2	17,5
Kalimantan Selatan	230	92,2	80,8	42,5	17,5
Kalimantan Timur	173	86,7	85,6	29,3	26,7
Kalimantan Utara	46	87,0	91,1	25,0	5,0
Sulawesi Utara	186	89,8	84,4	40,1	32,9
Sulawesi Tengah	189	96,8	76,9	31,1	13,7
Sulawesi Selatan	448	87,1	86,9	36,4	16,9
Sulawesi Tenggara	268	90,3	85,9	37,6	22,3
Gorontalo	93	96,8	91,5	44,4	13,3
Sulawesi Barat	94	94,7	84,5	27,0	21,3
Maluku	198	89,9	84,3	20,8	7,3
Maluku Utara	127	96,1	90,8	20,5	10,7
Papua Barat	150	91,3	81,9	23,4	18,2
Papua	372	86,6	82,5	21,1	16,5
INDONESIA	9698	78,0	83,0	37,4	22,8

Keterangan : * = dari sejumlah rumah dinas yang ada

** = dari sejumlah puskesmas yang memiliki rumah dinas

Tabel 6.24.
Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas rumah dinas menurut karakteristik,
Risnakes 2017

Provinsi	N	Fasilitas rumah dinas	Rumah dinas sesuai kebutuhan	Rata-rata Persentase Rumah Dinas layak huni	Fasilitas komunikasi rumah dinas
Kemampuan penyelenggaraan					
1. Rawat Inap	3.722	86,4	31,3	82,9	20,7
2. Non Rawat Inap	5.976	72,7	27,8	84,2	16,0
SK Penetapan puskesmas					
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	61,0	29,1	87,1	15,5
2. Puskesmas Perdesaan	4.901	82,0	31,4	82,3	20,2
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	93,1	23,7	83,1	15,7
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)					
1. Puskesmas Perkotaan	2.989	61,9	29,2	87,1	16,1
2. Puskesmas Perdesaan	4.889	82,1	31,8	82,0	20,0
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1.772	93,5	21,6	83,6	14,7
4. Tidak tahu	48	85,4	33,3	86,0	16,7
Pola Pengelolaan Keuangan					
1. BLUD	2.539	66,2	26,3	82,7	15,6
2. Non BLUD	7.159	82,1	30,1	83,8	18,6

Tabel 6.25.
Distribusi puskesmas berdasarkan tenaga kesehatan yang memanfaatkan rumah dinas menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	Dokter	Dokter gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	kesling	Gizi	Ahli teknologi lab medik	Kesmas
Aceh	59,2	13,6	64,6	50,9	4,4	7,9	5,7	2,2	10,4
Sumatera Utara	24,5	10,0	52,8	53,4	6,7	5,6	8,3	1,2	7,1
Sumatera Barat	50,0	22,6	56,0	49,2	9,5	8,3	13,9	8,7	3,6
Riau	40,3	15,3	60,7	46,4	10,7	5,1	9,2	5,6	5,1
Jambi	54,5	25,5	55,8	47,3	13,3	15,8	7,9	10,9	7,3
Sumatera Selatan	38,6	7,2	49,6	47,0	9,5	8,7	9,5	4,5	6,8
Bengkulu	25,2	3,8	49,1	50,3	5,0	4,4	9,4	6,3	12,6
Lampung	39,5	9,2	33,3	27,2	3,5	3,5	1,8	2,6	1,3
Kep.Bangka Belitung	67,7	30,6	75,8	58,1	22,6	16,1	12,9	17,7	9,7
Kepulauan Riau	56,7	20,9	74,6	56,7	16,4	10,4	13,4	6,0	13,4
DKI Jakarta	31,3	9,4	25,0	25,0	9,4	9,4	6,3	6,3	6,3
Jawa Barat	19,3	2,8	26,9	25,3	2,0	3,4	2,4	1,8	0,8
Jawa Tengah	15,9	7,2	24,3	27,9	3,4	2,9	2,4	3,2	1,7
DI Yogyakarta	17,4	5,4	38,0	33,7	5,4	7,6	6,5	3,3	1,1
Jawa Timur	18,5	8,0	35,7	29,7	2,7	2,1	2,0	1,8	1,3
Banten	12,9	2,3	27,3	27,3	0,8	2,3	5,3	2,3	0,0
Bali	15,4	11,5	39,4	53,8	1,9	2,9	6,7	3,8	1,9
Nusa Tenggara Barat	60,0	12,6	62,2	47,4	5,2	5,9	8,1	7,4	5,2
Nusa Tenggara Timur	55,1	16,6	81,5	76,1	22,2	29,5	28,1	17,4	21,1
Kalimantan Barat	60,1	16,0	72,8	59,2	21,6	21,6	26,8	21,6	15,0
Kalimantan Tengah	56,6	14,3	83,1	65,6	20,1	23,3	34,4	18,0	15,3
Kalimantan Selatan	44,8	15,6	61,3	44,8	13,2	12,7	16,5	10,8	6,6
Kalimantan Timur	59,3	26,7	73,3	63,3	19,3	18,7	14,0	18,0	12,0
Kalimantan Utara	77,5	42,5	90,0	77,5	40,0	25,0	50,0	22,5	35,0
Sulawesi Utara	40,1	6,6	78,4	53,3	7,2	18,0	13,8	3,6	10,2
Sulawesi Tengah	51,4	24,6	79,2	50,3	16,4	16,9	19,7	2,7	11,5
Sulawesi Selatan	50,3	20,5	66,4	52,1	8,7	7,2	10,5	5,1	11,3
Sulawesi Tenggara	39,3	17,8	70,2	58,7	11,6	11,2	14,0	3,3	14,9
Gorontalo	40,0	13,3	62,2	55,6	8,9	11,1	17,8	1,1	14,4
Sulawesi Barat	46,1	18,0	74,2	61,8	21,3	19,1	19,1	12,4	10,1
Maluku	29,8	6,2	75,8	52,8	11,8	25,8	19,7	5,6	11,2
Maluku Utara	62,3	14,8	76,2	70,5	23,0	20,5	30,3	22,1	36,9
Papua Barat	44,5	8,0	90,5	81,0	28,5	33,6	43,1	30,7	26,3
Papua	42,9	5,9	82,3	65,5	18,0	22,4	31,7	22,7	18,9
INDONESIA	38,0	12,3	56,2	47,9	10,0	11,0	12,6	7,6	8,9

Keterangan : Dihitung dari puskesmas yang memiliki rumah dinas

Tabel 6.26.

Distribusi puskesmas berdasarkan tenaga kesehatan yang memanfaatkan rumah dinas menurut karakteristik, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Dokter	Dokter gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	kesling	Gizi	Ahli teknologi lab medik	Kesmas
Kemampuan penyelenggaraan										
1. Rawat Inap	3.722	51,5	16,8	61,6	50,4	11,8	12,2	14,3	9,0	10,2
2. Non Rawat Inap	5.976	28,1	8,9	52,2	46,0	8,7	10,0	11,4	6,6	7,9
SK Penetapan puskesmas										
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	25,6	10,4	50,2	40,3	7,0	5,1	6,6	4,8	4,4
2. Puskesmas Perdesaan	4.901	37,7	11,7	50,9	44,1	7,4	8,4	9,1	5,7	6,5
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	52,6	15,2	75,5	65,4	19,3	22,9	27,1	14,9	19,5
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)										
1. Puskesmas Perkotaan	2.989	26,0	10,3	50,3	40,6	6,9	5,6	6,5	5,1	4,3
2. Puskesmas Perdesaan	4.889	37,6	12,1	50,7	43,8	7,2	8,0	9,3	5,4	6,3
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1.772	52,6	14,8	75,8	65,7	20,2	24,0	27,5	15,5	20,2
4. Tidak tahu	48	34,1	14,6	63,4	51,2	14,6	14,6	14,6	12,2	9,8
Pola Pengelolaan Keuangan										
1. BLUD	2.539	30,0	11,6	47,8	41,5	8,7	9,5	10,0	6,9	6,8
2. Non BLUD	7.159	40,3	12,5	58,6	49,7	10,4	11,4	13,4	7,8	9,5

Tabel 6.27.
Distribusi puskesmas berdasarkan kepemilikan fasilitas kendaraan dinas menurut provinsi,
Risnakes 2017

Provinsi	N	Fasilitas Kendaraan Dinas	Tersedia alokasi dana pemeliharaan*
Aceh	340	96,5	36,0
Sumatera Utara	571	92,1	33,1
Sumatera Barat	264	97,7	55,0
Riau	212	89,6	50,0
Jambi	176	98,3	59,5
Sumatera Selatan	322	95,0	40,2
Bengkulu	179	97,2	28,7
Lampung	291	95,5	42,1
Kep.Bangka Belitung	62	100,0	61,3
Kepulauan Riau	72	93,1	65,7
DKI Jakarta	314	65,9	69,6
Jawa Barat	1.050	96,8	62,4
Jawa Tengah	875	97,6	55,0
DI Yogyakarta	121	98,3	62,2
Jawa Timur	960	97,4	40,9
Banten	233	96,6	68,4
Bali	120	99,2	74,8
Nusa Tenggara Barat	158	99,4	43,9
Nusa Tenggara Timur	371	96,8	48,2
Kalimantan Barat	238	98,7	40,4
Kalimantan Tengah	195	98,5	42,7
Kalimantan Selatan	230	99,1	41,7
Kalimantan Timur	173	97,7	67,5
Kalimantan Utara	46	97,8	42,2
Sulawesi Utara	186	88,2	43,3
Sulawesi Tengah	189	94,2	60,7
Sulawesi Selatan	448	96,9	47,7
Sulawesi Tenggara	268	98,5	25,8
Gorontalo	93	98,9	33,7
Sulawesi Barat	94	95,7	25,6
Maluku	198	78,3	38,1
Maluku Utara	127	87,4	30,6
Papua Barat	150	63,3	38,9
Papua	372	58,9	47,9
INDONESIA	9698	93,1	48,1

Keterangan : Kendaraan dinas meliputi mobil non ambulans, sepeda motor, sepeda, perahu

* = dari sejumlah puskesmas yang memiliki kendaraan dinas

Tabel 6.28.
Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan fasilitas kendaraan dinas menurut karakteristik,
Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Fasilitas Kendaraan Dinas	Rata-rata persentase Kendaraan Dinas layak pakai	Tersedia alokasi dana pemeliharaan
Kemampuan penyelenggaraan				
1. Rawat Inap	3.722	96,6	81,2	45,8
2. Non Rawat Inap	5.976	90,8	85,0	49,6
SK Penetapan puskesmas				
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	92,5	85,8	54,9
2. Puskesmas Perdesaan	4.901	95,0	46,8	84,4
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	88,2	76,5	41,7
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)				
1. Puskesmas Perkotaan	2.989	92,7	86,1	54,6
2. Puskesmas Perdesaan	4.889	95,5	84,1	46,4
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1.772	87,4	76,0	41,4
4. Tidak tahu	48	81,3	86,9	56,4
Pola Pengelolaan Keuangan (P1 4011)				
1. BLUD	2.539	91,6	84,0	54,8
2. Non BLUD	7.159	93,6	83,0	45,8

Tabel 6.29.
Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan dan dasar penetapannya menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Memiliki kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan (%)	Dasar Penetapan			
			Sesuai tupoksi	Masa kerja lama	Kinerja baik	lainnya
Aceh	340	55,9	57,1	3,5	3,8	35,6
Sumatera Utara	571	41,2	68,1	3,5	2,5	25,9
Sumatera Barat	264	74,6	65,5	0,4	3,8	30,3
Riau	212	60,4	62,7	4,7	3,8	28,8
Jambi	176	71,0	65,3	1,1	1,7	31,8
Sumatera Selatan	322	55,6	65,2	3,1	2,5	29,2
Bengkulu	179	52,0	71,5	2,2	1,1	25,1
Lampung	291	68,0	66,0	1,4	2,4	30,2
Kep.Bangka Belitung	62	66,1	58,1	0,0	8,1	33,9
Kepulauan Riau	72	63,9	58,3	0,0	1,4	40,3
DKI Jakarta	314	62,4	69,7	0,3	2,5	27,4
Jawa Barat	1.050	75,8	61,3	2,7	3,3	32,7
Jawa Tengah	875	81,1	65,9	1,3	3,8	29,0
DI Yogyakarta	121	90,9	57,9	1,7	3,3	37,2
Jawa Timur	960	70,2	69,0	1,1	3,2	26,7
Banten	233	70,8	57,5	2,6	3,0	36,9
Bali	120	83,3	75,0	3,3	5,8	15,8
Nusa Tenggara Barat	158	60,1	55,1	2,5	1,3	41,1
Nusa Tenggara Timur	371	60,4	49,6	4,6	5,4	40,4
Kalimantan Barat	238	66,4	58,4	3,8	5,9	31,9
Kalimantan Tengah	195	65,6	56,4	2,1	6,2	35,4
Kalimantan Selatan	230	67,4	64,8	1,7	6,5	27,0
Kalimantan Timur	173	63,0	72,8	1,2	2,9	23,1
Kalimantan Utara	46	67,4	63,0	2,2	2,2	32,6
Sulawesi Utara	186	57,0	69,9	3,2	3,2	23,7
Sulawesi Tengah	189	64,0	66,1	4,2	2,6	27,0
Sulawesi Selatan	448	60,5	68,5	1,3	2,0	28,1
Sulawesi Tenggara	268	51,1	67,9	1,9	1,1	29,1
Gorontalo	93	63,4	66,7	1,1	3,2	29,0
Sulawesi Barat	94	56,4	72,3	1,1	2,1	24,5
Maluku	198	42,4	70,2	3,0	2,5	24,2
Maluku Utara	127	46,5	70,1	3,1	1,6	25,2
Papua Barat	150	48,7	48,0	8,7	4,0	39,3
Papua	372	41,7	38,2	14,0	4,3	43,5
INDONESIA	9698	63,9	63,4	2,8	3,3	30,5

Tabel 6.30.
Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan dan dasar penetapannya menurut karakteristik, Risnakes 2017

penetapannya menurut karakteristik, riskades 2017						
Karakteristik Puskesmas	N	Memiliki kebijakan fasilitasi pendidikan pelatihan (%)	Dasar Penetapan			
			Sesuai tupoksi	Masa kerja lama	Kinerja baik	lainnya
Kemampuan penyelenggaraan						
1. Rawat Inap	3722	64,4	61,5	3,7	4,2	30,6
2. Non Rawat Inap	5977	62,0	64,5	3,7	4,3	27,5
SK Penetapan puskesmas						
1. Puskesmas Perkotaan	2839	63,5	65,2	2,9	3,9	28,0
2. Puskesmas Perdesaan	4.902	62,9	64,5	3,4	3,7	28,4
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	58,5	63,6	5,0	4,5	26,9
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)						
1. Puskesmas Perkotaan	2989	66,9	64,9	3,1	4,0	28,0
2. Puskesmas Perdesaan	4890	63,6	62,8	4,9	4,9	27,5
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1772	57,6	62,8	3,1	3,6	30,4
4. Tidak tahu	48	71,6	83,8	6,2	4,3	5,6
Pola Pengelolaan Keuangan						
1. BLUD	2540	23,7	63,8	5,7	4,0	26,6
2. Non BLUD	7159	76,3	62,4	3,1	4,0	30,4

Tabel 6.31.

Distribusi puskesmas berdasarkan kebijakan pemberian jaminan kesehatan bagi tenaga non PNS dan jenis pembiayaannya menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Kepemilikan jaminan kesehatan	Pembiayaan premi jaminan kesehatan		
			Seluruh tenaga non PNS dibiayai Pemda/Puskesmas	Sebagian tenaga non PNS dibiayai Pemda/puskesmas	Seluruh tenaga non PNS membiayai sendiri
Aceh	340	71,2	74,0	17,2	8,8
Sumatera Utara	571	27,7	22,5	26,0	51,5
Sumatera Barat	264	30,3	17,0	25,0	58,0
Riau	212	11,8	14,6	25,5	59,9
Jambi	176	9,1	2,6	21,9	75,5
Sumatera Selatan	322	12,4	4,4	18,0	77,7
Bengkulu	179	23,5	7,9	26,4	65,7
Lampung	291	16,8	7,2	15,3	77,5
Kep.Bangka Belitung	62	51,6	27,3	27,3	45,5
Kepulauan Riau	72	59,7	41,2	39,7	19,1
DKI Jakarta	314	95,9	46,0	15,3	38,7
Jawa Barat	1050	34,0	14,2	23,6	62,2
Jawa Tengah	875	38,1	18,4	22,0	59,6
DI Yogyakarta	121	59,5	35,2	39,0	25,7
Jawa Timur	960	24,7	11,0	18,3	70,7
Banten	233	35,2	7,7	21,6	70,7
Bali	120	44,2	11,2	23,3	65,5
Nusa Tenggara Barat	158	12,7	10,7	22,3	66,9
Nusa Tenggara Timur	371	14,0	9,1	26,3	64,6
Kalimantan Barat	238	35,7	35,3	28,9	35,8
Kalimantan Tengah	195	26,7	21,6	35,8	42,6
Kalimantan Selatan	230	19,1	6,3	25,2	68,4
Kalimantan Timur	173	43,4	31,6	19,4	49,0
Kalimantan Utara	46	47,8	9,3	23,3	67,4
Sulawesi Utara	186	30,6	17,8	22,5	59,7
Sulawesi Tengah	189	10,1	6,9	25,7	67,4
Sulawesi Selatan	448	14,3	8,9	52,3	38,8
Sulawesi Tenggara	268	4,9	9,8	39,2	51,0
Gorontalo	93	29,0	14,9	56,3	28,7
Sulawesi Barat	94	9,6	7,9	52,8	39,3
Maluku	198	10,6	16,7	32,4	51,0
Maluku Utara	127	3,9	10,5	59,2	30,3
Papua Barat	150	30,7	23,3	36,7	40,0
Papua	372	18,8	26,0	27,8	46,3
INDONESIA	9698	29,3	25,1	24,1	

Tabel 6.32.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan kepemilikan jaminan kesehatan dan pembiayaan premi jaminan kesehatan untuk tenaga non PNS menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Pembiayaan premi jaminan kesehatan					
Karakteristik Puskesmas	N	Kepemilikan jaminan kesehatan	Seluruh tenaga non PNS dibiayai Pemda/ Puskesmas	Sebagian tenaga non PNS dibiayai Pemda/puskes mas	Seluruh tenaga non PNS membiayai sendiri
Kemampuan penyelenggaraan					
1. Rawat Inap	3.722	79,2	15,7	28,7	55,6
2. Non Rawat Inap	5.976	80,7	20,4	24,6	55,0
SK Penetapan puskesmas					
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	85,3	24,7	23,3	52,0
2. Puskesmas Perdesaan	4.902	79,2	15,4	24,8	59,7
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.447	73,7	18,0	35,1	46,9
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)					
1. Puskesmas Perkotaan	1.357	47,9	24,7	23,3	52,1
2. Puskesmas Perdesaan	1.169	39,7	14,8	24,9	60,3
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	302	53,8	18,6	35,1	46,2
4. Tidak tahu	15	48,8	12,2	36,6	51,2
Pola Pengelolaan Keuangan					
1. BLUD	2.540	83,8	23,4	23,5	53,1
2. Non BLUD	7.159	78,8	16,8	27,1	56,0

Tabel 6.33.

Distribusi puskesmas berdasarkan keberadaan aturan tertulis pembagian jasa medis dan penerapan pembagian jasa medis menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Ada aturan tertulis pembagian jasa medis	Penerapan aturan pembagian jasa medis		
			Belum diterapkan*	Diterapkan keseluruhan*	Diterapkan dengan modifikasi*
Aceh	340	88,8	6,0	70,2	23,8
Sumatera Utara	571	76,9	9,6	72,9	17,5
Sumatera Barat	264	89,0	5,5	78,3	16,2
Riau	212	79,2	6,0	66,1	28,0
Jambi	176	83,5	5,4	70,7	23,8
Sumatera Selatan	322	70,8	4,4	61,8	33,8
Bengkulu	179	69,3	4,0	69,4	26,6
Lampung	291	92,4	3,0	49,8	47,2
Kep.Bangka Belitung	62	91,9	5,3	73,7	21,1
Kepulauan Riau	72	86,1	-	83,9	16,1
DKI Jakarta	314	24,2	10,5	59,2	30,3
Jawa Barat	1050	86,2	6,6	68,5	24,9
Jawa Tengah	875	93,8	4,8	73,9	21,3
DI Yogyakarta	121	96,7	1,7	54,7	43,6
Jawa Timur	960	91,9	7,4	68,4	24,3
Banten	233	89,7	4,8	74,6	20,6
Bali	120	97,5	2,6	57,3	40,2
Nusa Tenggara Barat	158	86,7	2,9	81,8	15,3
Nusa Tenggara Timur	371	88,9	2,7	67,9	29,4
Kalimantan Barat	238	85,3	3,4	72,9	23,6
Kalimantan Tengah	195	86,2	4,8	69,6	25,6
Kalimantan Selatan	230	88,3	5,4	70,0	24,6
Kalimantan Timur	173	86,1	4,0	77,9	18,1
Kalimantan Utara	46	93,5	2,3	88,4	9,3
Sulawesi Utara	186	85,5	4,4	78,0	17,6
Sulawesi Tengah	189	78,3	12,8	68,2	18,9
Sulawesi Selatan	448	91,1	3,9	70,3	25,7
Sulawesi Tenggara	268	78,7	5,7	63,0	31,3
Gorontalo	93	93,5	5,7	75,9	18,4
Sulawesi Barat	94	90,4	3,5	70,6	25,9
Maluku	198	75,3	10,7	68,5	20,8
Maluku Utara	127	79,5	3,0	76,2	20,8
Papua Barat	150	70,0	10,5	73,3	16,2
Papua	372	53,8	13,0	60,0	27,0
INDONESIA	9698	82,9	5,8	69,5	24,7

Keterangan : * = dihitung dari puskesmas yang memiliki aturan tertulis pembagian jasa medis

Tabel 6.34.

Distribusi puskesmas dengan keberadaan aturan pembagian jasa medis dan penerapan aturan pembagian jasa medis menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

pembagian jasa medis menurut karakteristik puskesmas, Rishakes 2017					
Karakteristik Puskesmas	N	Ada aturan pembagian jasa medis	Penerapan aturan pembagian jasa medis		
			Belum diterapkan	Diterapkan keseluruhan	Diterapkan dengan modifikasi
Kemampuan penyelenggaraan					
1. Rawat Inap	3.722	87,0	5,9	68,2	25,9
2. Non Rawat Inap	5.977	80,4	5,8	70,4	23,8
SK Penetapan puskesmas					
1. Puskesmas Perkotaan	2.839	81,3	5,7	73,1	21,2
2. Puskesmas Perdesaan	4.902	85,7	5,9	68,0	26,1
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1.964	78,0	6,0	67,5	26,5
Karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)					
1. Puskesmas Perkotaan	2.989	81,7	5,5	72,5	22,0
2. Puskesmas Perdesaan	4.889	85,9	5,7	68,7	25,6
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	1.772	77,3	6,6	66,9	26,5
4. Tidak tahu	48	66,7	12,5	59,4	28,1
Pola Pengelolaan Keuangan					
1. BLUD	2.539	79,1	6,3	68,0	25,7
2. Non BLUD	7.159	84,3	5,7	70,0	24,3

Tabel 6.35.

Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan perolehan insentif non finansial menurut provinsi, Risnakes 2017

Provinsi	N	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan rumah dinas	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan rumah dinas layak huni	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan kendaraan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan biaya bahan bakar kendaraan dinas	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat/seminar/pelatihan	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki jaminan hari tua/pensiun
Aceh	9,798	9,9	83,7	11,3	10,4	47,2	3,6	57,8
Sumatera Utara	14,724	11,1	80,3	12,4	9,0	40,5	6,2	69,9
Sumatera Barat	7,433	15,8	85,0	12,9	21,3	45,6	11,7	70,5
Riau	5,865	12,0	85,0	6,6	6,2	41,4	5,2	59,1
Jambi	5,000	10,7	82,8	8,8	26,5	48,2	4,0	55,3
Sumatera Selatan	9,330	10,2	80,4	7,5	4,8	41,9	3,0	55,6
Bengkulu	4,774	13,7	81,7	12,3	8,7	41,2	5,9	71,4
Lampung	8,367	7,7	81,2	13,9	3,4	41,7	7,4	64,2
Bangka Belitung	1,796	21,0	81,2	21,2	6,6	58,0	5,5	69,8
Kepulauan Riau	2,022	14,8	90,6	8,7	5,1	60,7	3,4	59,1
DKI Jakarta	4,823	1,9	87,1	2,0	33,7	58,7	5,2	67,4
Jawa Barat	27,844	3,8	77,1	9,8	11,7	45,7	9,0	61,0
Jawa Tengah	24,822	8,4	74,8	11,5	9,6	48,2	11,6	79,6
DI Yogyakarta	3,124	5,8	79,6	16,1	13,7	73,8	20,2	80,2
Jawa Timur	27,620	8,0	77,6	13,5	9,3	48,6	7,3	65,0
Banten	6,605	4,5	76,8	8,2	16,5	55,7	7,2	57,6
Bali	3,564	5,6	85,0	12,2	26,8	59,9	16,1	78,2
Nusa Tenggara Barat	4,655	8,7	81,9	10,8	8,8	43,1	4,9	44,4
Nusa Tenggara Timur	9,394	25,1	81,2	12,8	12,2	41,4	7,9	47,0
Kalimantan Utara	1,160	19,8	81,1	17,2	5,1	49,7	11,0	64,7
Kalimantan Barat	5,982	25,4	83,8	20,4	8,2	46,0	11,6	62,6
Kalimantan Tengah	4,174	18,4	82,4	17,9	4,4	49,5	8,2	66,0
Kalimantan Selatan	6,259	17,2	78,3	14,2	20,6	46,6	10,8	58,4
Kalimantan Timur	4,325	26,5	83,1	11,1	10,1	40,6	6,5	55,2
Sulawesi Utara	4,044	18,8	83,0	12,5	10,1	51,7	7,7	80,1
Sulawesi Tengah	4,667	19,9	79,4	15,3	15,6	40,5	5,3	53,6
Sulawesi Selatan	12,873	9,6	87,0	13,7	6,2	40,7	5,9	51,6
Sulawesi Tenggara	6,951	14,7	82,7	12,6	5,0	33,2	2,5	45,1
Gorontalo	2,523	21,1	89,1	15,7	5,1	57,6	3,9	55,3
Sulawesi Barat	2,371	16,0	83,7	20,2	5,2	45,0	5,9	48,0
Maluku	3,664	17,2	78,9	8,0	24,7	44,1	5,1	55,3
Maluku Utara	2,738	26,3	85,5	10,8	11,5	38,0	3,8	49,8
Papua Barat	2,126	35,3	83,4	4,7	22,0	43,7	8,9	48,0
Papua	4,503	32,4	83,1	9,2	14,3	40,4	7,8	48,1
INDONESIA	9,698	12,6	80,8	11,7	11,6	46,1	7,6	61,9

Tabel 6.36.
Distribusi tenaga kesehatan puskesmas berdasarkan perolehan insentif non finansial menurut karakteristik, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Persentase nakes yang mendapatkan rumah dinas	Persentase nakes yang mendapatkan rumah dinas layak huni	Persentase nakes yang mendapatkan kendaraan dinas	Persentase nakes yang mendapatkan biaya bahan bakar kendaraan dinas	Persentase nakes yang mengikuti diklat/seminar /pelatihan	Persentase nakes yang mengikuti pendidikan lanjutan/beasiswa	Persentase nakes yang memiliki jaminan hari tua/pensiun
Kemampuan penyelenggaraan								
1. Rawat Inap	114.750	13,5	81,8	12,1	7,5	45,8	6,4	60,1
2. Non Rawat Inap	149.972	10,7	81,2	11,9	12,3	46,3	6,7	63,9
SK Penetapan puskesmas								
1. Puskesmas Perkotaan	72.957	5,9	83,4	10,1	16,4	51,3	7,7	71,7
2. Puskesmas Perdesaan	144.340	11,7	80,8	12,5	7,4	44,4	6,5	61,9
3. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	46.765	23,9	81,6	13,3	9,9	51,2	4,2	45,7
Karakteristik wilayah kerja								
1. Puskesmas Perkotaan	77.269	6,0	83,2	10,2	10,2	51,2	7,7	71,6
2. Puskesmas Perdesaan	144.760	11,7	80,7	12,5	12,5	44,6	6,6	62,1
3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil	41.414	24,7	81,9	13,8	13,8	41,1	4,1	43,9
4. Tidak tahu	1.279	14,4	76,0	9,1	9,1	43,3	7,3	61,3
Pola Pengelolaan Keuangan								
1. BLUD	64.346	9,4	80,1	11,2	11,2	50,0	8,3	67,3
2. Non BLUD	200.376	12,8	81,8	12,2	12,2	44,8	6,0	60,6

7.1 Ketanggapan pelayanan kesehatan (*Responsiveness*)

Ketanggapan (*responsiveness*) adalah seberapa baik sistem kesehatan memenuhi harapan standar masyarakat pada aspek non klinis yang mempengaruhi sistem kesehatan.

Responsiveness meliputi delapan domain yaitu:

1. **Ramah dan sikap sopan (*dignity*)**, hak seseorang untuk diperlakukan sesuai haknya tidak hanya sebagai pasien, meliputi antara lain:
 - Perlindungan terhadap HAM seperti kebebasan bergerak/berpindah
 - Penghargaan dalam perlakuan yang diberikan penyedia layanan kesehatan
 - Hak untuk bertanya dan mendapat informasi selama konsultasi dan pengobatan
 - Privasi selama pemeriksaan dan pengobatan
2. **Kerahasiaan (*confidentiality*)**, informasi mengenai pasien tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan pasien kecuali dalam hal-hal khusus.
 - Melakukan konsultasi dengan cara yang melindungi privasi pasien
 - Penjagaan kerahasiaan informasi yang diberikan pasien dan penyakitnya kecuali bila diperlukan atau bila dengan persetujuan pasien
3. **Hak memilih pengobatan/perawatan (*autonomy*)**, kebebasan menentukan sesuatu.
 - Hak mendapat informasi mengenai penyakit dan alternatif pengobatan
 - Hak mendapatkan konsultasi tentang pengobatannya
 - Hak pasien untuk menyampaikan keberatan atau menolak pengobatan
4. **Komunikasi petugas kesehatan**, kejelasan penyampaian informasi dan membangun pemahaman.
 - Pemberi layanan menjelaskan dengan terang mengenai penyakit dan detail penanganan yang diperlukan beserta pilihannya kepada pasien dan keluarganya
 - Menyediakan waktu untuk pasien agar memahami gejala dan bertanya
5. **Kecepatan mendapatkan pelayanan (*prompt attention*)**, terdiri dari 3 karakteristik, yakni:
 - Pasien diberikan penanganan cepat dalam hal darurat
 - Pasien diberikan penanganan dalam periode waktu yang wajar termasuk dalam hal non *emergency* dan pembedahan, daftar tunggu tidak boleh terlalu lama
 - Pasien yang mencari pelayanan di fasilitas kesehatan tidak boleh menunggu lama untuk konsultasi dan pengobatan
6. **Kelengkapan dasar/kualitas tempat pelayanan kesehatan (*basic amenities*)**, penyediaan sarana fisik dan lingkungan yang mendukung.

- Kebersihan lingkungan
 - Prosedur rutin untuk kebersihan dan perawatan bangunan
 - Perlengkapan mebelair yang cukup
 - Ventilasi yang cukup
 - Air bersih
 - Kamar mandi yang bersih
 - Seprei dan selimut yang bersih
 - Makanan yang sehat
7. **Hak memilih pelayanan kesehatan** (*choice of provider*), kebebasan memilih jenis dan pemberi layanan kesehatan
8. **Akses terhadap keluarga dan dukungan masyarakat**, dimensi ini hanya berlaku untuk pasien yang menjalani perawatan. Proses perawatan pasien harus memberikan kesempatan dukungan sosial seperti:
- Kunjungan keluarga dan teman
 - Penyediaan makanan atau bahan konsumsi lainnya oleh keluarga dan teman bila tidak disediakan oleh fasilitas kesehatan
 - Kegiatan keagamaan yang tidak mengganggu pelayanan kesehatan atau pasien lain

7.1.1. Pengukuran ketanggapan pelayanan kesehatan

Ketanggapan (*responsiveness*) adalah seberapa baik sistem kesehatan memenuhi harapan standar masyarakat pada aspek non klinis yang mempengaruhi sistem kesehatan. Ketanggapan meliputi tujuh aspek yaitu :

1. Harga diri (*dignity*), hak seseorang untuk diperlakukan sesuai haknya tidak hanya sebagai pasien:
 - Perlindungan terhadap HAM seperti kebebasan bergerak/berpindah
 - Penghargaan dalam perlakuan yang diberikan penyedia layanan kesehatan
 - Hak untuk bertanya dan mendapat informasi selama konsultasi dan pengobatan
 - Privasi selama pemeriksaan dan pengobatan
2. Kerahasiaan (*confidentiality*), informasi mengenai pasien tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pasien kecuali dalam hal-hal khusus:
 - Melakukan konsultasi dengan cara yang melindungi privasi pasien
 - Penjagaan kerahasiaan informasi yang diberikan pasien dan penyakitnya kecuali bila diperlukan atau bila dengan persetujuan pasien
3. Otonomi (*autonomy*), kebebasan untuk menentukan sesuatu:
 - Hak mendapat informasi mengenai penyakit dan alternative pengobatan
 - Hak mendapatkan konsultasi tentang pengobatannya
 - Hak pasien untuk menyampaikan keberatan atau menolak pengobatan
4. Perhatian yang cepat (*prompt attention*), terdiri dari 3 karakteristik:
 - Pasien diberikan penanganan cepat dalam hal darurat
 - Pasien diberikan penanganan dalam periode waktu yang wajar termasuk dalam hal non *emergency* dan pembedahan, daftar tunggu tidak boleh terlalu lama

- Pasien yang mencari pelayanan di fasilitas kesehatan tidak boleh menunggu lama untuk konsultasi dan pengobatan
5. Dukungan sosial (*social support*), perawatan pasien harus memberikan kesempatan dukungan sosial seperti:
 - Kunjungan keluarga dan teman
 - Penyediaan makanan atau bahan konsumsi lainnya oleh keluarga dan teman bila tidak disediakan oleh fasilitas kesehatan
 - Kegiatan keagamaan yang tidak mengganggu pelayanan kesehatan atau pasien lain
 6. Kelengkapan dasar (*basic amenities*) : penyediaan sarana fisik dan lingkungan yang mendukung
 - Kebersihan lingkungan
 - Prosedur rutin untuk kebersihan dan perawatan bangunan
 - Perlengkapan mebelair yang cukup
 - Ventilasi yang cukup
 - Air bersih
 - Kamar mandi yang bersih
 - Seprei dan selimut yang bersih
 - Makanan yang sehat
 7. Pilihan pemberi layanan (*choice of provider*) : kebebasan memilih jenis dan pemberi layanan kesehatan

Ketanggapan berbeda dengan kepuasan (*satisfaction*) dalam hal :

- (1) **Scope** : kepuasan pasien fokus pada interaksi klinik di lokasi pelayanan kesehatan spesifik, ketanggapan mengevaluasi sistem kesehatan sebagai keseluruhan.
- (2) **Range** : kepuasan pasien mencakup aspek medis dan non medis sedangkan ketanggapan hanya fokus pada aspek non medis
- (3) **Rationale** : kepuasan menggambarkan kombinasi dari persepsi kebutuhan, ekspektasi individu, dan pengalaman pelayanan sedangkan ketanggapan mengevaluasi persepsi individu terhadap sistem kesehatan dibandingkan dengan ekspektasi umum.

WHO menentukan cara pengukuran responsiveness dengan pengumpulan data primer melalui survei rumah tangga dengan mewawancarai anggota rumah tangga. Jumlah sampel bervariasi antara 5000-10000 rumah tangga untuk setiap negara. WHO juga mengembangkan cara pengumpulan data dengan survey pos. Pengumpulan data secara langsung dari masyarakat merupakan sumber informasi terbaik, tetapi selain itu bisa juga dilakukan pengumpulan data dari informan kunci serta data sekunder. Survei fasilitas dapat dilakukan untuk melakukan validasi data rumah tangga.

Berikut adalah berbagai metode pengukuran ketanggapan :

	PSQ ¹	CAHPS ²	CTS ³	Hadad et al ⁴	ERS ⁵	Picker Survey ⁶	QUOTE ⁷
Respect for dignity	X	X	X	X	X	X	
Respect for autonomy						X	X
Respect for confidentiality						X	
Access to prompt attention	X	X	X		X		X
Access to social support networks		X					X
Basic amenities				X	X		X
Choice of institution/care provider	X	X	X		X		X

Catatan :

1. Patient Satisfaction Questionnaire – introduced by John Ware (1976).
2. CAHPS questionnaire relates to health plans and is administered by AHCPH.
3. Community Tracking Study, conducted by the Centre for Studying Health SistemChange at the Robert Wood Johnson Foundation, in conjunction with RAND.
4. Hadad, Fournier and Potvin (1998) in the International Journal for Quality in HealthCare, Vol. 10 No. 2
5. Evaluation Ranking Scale – Pascoe and Attkisson (1983).
6. Picker Commonwealth Survey of Patient Centred Care reported in Cleary et al (1991)
7. QUOTE surveys used in the context of specific diseases (i.e. Rheumaticpatients) presented inVan Hampen, Sixma et al (1998) in the British Journalof Rheumatology, Vol. 37.

7.1.2. Analisis Ketanggapan (*Responsiveness*)

Analisis *responsiveness* dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Mengidentifikasi variabel domain di setiap jenis fasilitas kesehatan
2. Melakukan pembobotan untuk masing-masing variabel
3. Menghitung skor dan rerata komposit setiap domain
4. Menghitung *Responsiveness Level* di setiap jenis fasilitas kesehatan dengan menjumlahkan skor dengan bobot pada setiap domain.

Dalam analisis variabel ketanggapan (*responsiveness*), dilakukan perhitungan indeks melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Pilih pertanyaan overall** pada setiap domain di semua pelayanan kesehatan baik Rawat Jalan maupun rawat inap Puskesmas, meliputi Prompt Attention (PA), Dignity (DIG), Communication (COM), Autonomy (AUT), Confidentiality (CON/CI), Choice of Provider (CH), Quality Basic Amenities (ENV), Access Social Network (SS).
2. Melakukan pembobot untuk masing-masing variabel, antara lain:
 - Sangat baik = 5
 - Baik= 4
 - Sedang= 3
 - Buruk= 2
 - Sangat buruk= 1

3. Membuat **variabel baru** dengan skala 10 dari skor buruk ke baik. Jadi pertanyaan dengan pilihan jawabannya 4 dikalikan dengan 2,5 dan jika pertanyaan dengan pilihan jawabannya 5 dikalikan dengan 2.
4. Membuat *cut off point*:
Responden dengan skor 1-6 = buruk; skor 7-10 = Baik
5. Menghitung **Skor setiap komponen responsiveness** untuk seluruh pelayanan kesehatan
 1. $\bar{X}_{PA}$
 2. $\bar{X}_{DIG}$
 3. $\bar{X}_{COM}$
 4. $\bar{X}_{AUT}$
 5. $\bar{X}_{CI}$
 6. $\bar{X}_{CH}$
 7. $\bar{X}_{ENV}$
 8. $\bar{X}_{SS}$
6. Menghitung **RerataSkor Responsiveness Setiap Elemen** dengan rumus :

$$Si = \sum Xi \times Ni / N \quad \rightarrow \text{(menggunakan perintah frekuensi di SPSS)}$$

Xi adalah skor item responsiveness yang terkandung dalam setiap elemen
 Ni adalah jumlah responden yang memperoleh skor sama
 N adalah total responden

 1. $Si_{PA} =$
 2. $Si_{DIG} =$
 3. $Si_{COM} =$
 4. $Si_{AUT} =$
 5. $Si_{CI} =$
 6. $Si_{CH} =$
 7. $Si_{ENV} =$
 8. $Si_{SS} =$
7. Menghitung **Responsiveness Level** setiap responden masing-masing pelayanan dengan menjumlahkan skor dengan bobot pada setiap komponen (domain) responsiveness :
 Rumus : $Re Sp = \sum_{i=0}^n Wi Si$
 S adalah *score responsiveness*
 W adalah bobot koefisien untuk setiap komponen responsiveness

7.2 Kepuasan Pasien

Salah satu model yang banyak dipakai untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah model *SERVQUAL (Service Quality)* dengan cara membuat survey penilaian kepuasan pelanggan secara komprehensif bagi pelayanan di bidang barang dan jasa yang mengutamakan aspek pelayanan. Analisis kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas layanan, yakni *responsiveness, reliability, assurance, empathy, dan tangible*.

1. **Responsiveness** (ketanggapan) adalah keinginan petugas membantu pelanggan untuk memberikan pelayanan dengan cepat seperti kecepatan petugas loket melayani pasien, kecepatan pelayanan obat, dan kelengkapan informasi obat yang diberikan kepada pasien.
2. **Reliability** (kehandalan) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan seperti kemudahan prosedur administrasi pelayanan.
3. **Assurance** (jaminan), adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kompetensi *front-linestaff* dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan seperti ketersediaan obat di apotek dan seluruh obat yang diresepkan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
4. **Empathy** (empati) dalam pelayanan antara lain keramahan petugas.
5. **Tangible** (bukti nyata) antara lain keterjangkauan lokasi fasilitas kesehatan, kecukupan tempat duduk di ruang tunggu, kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu.

Sarwono menyatakan bahwa kepuasan pasien dipengaruhi atas dua aspek yakni aspek pelanggan dan aspek pelayanan kesehatan. Aspek pelanggan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan aspek pelayanan kesehatan terdiri dari dua sistem, yaitu aspek medis seperti tersedianya peralatan yang memadai, dan aspek non medis yang mencakup layanan petugas kesehatan, kenyamanan dan kebersihan ruang tunggu, serta biaya yang murah.

7.3 Hasil Analisis

Pada puskesmas rawat jalan, jumlah responden yang berhasil diwawancarai sebanyak 11.550 responden, sementara responden untuk kasus rawat inap puskesmas sebanyak 597 responden. Rendahnya jumlah responden pada kasus rawat inap puskesmas karena sebagian besar puskesmas di Indonesia adalah puskesmas non keperawatan, dan juga salah satu kriteria inklusi adalah sudah dirawat minimal dua hari. Padahal kasus yang masuk ke puskesmas rawat inap adalah kasus-kasus persalinan dimana rata-rata lama rawat inap tidak terlalu lama.

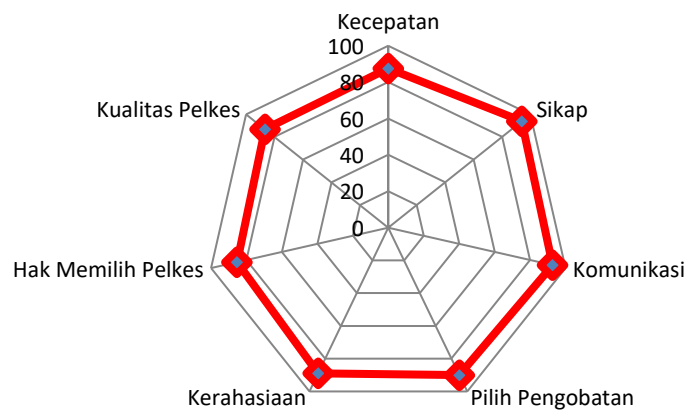
Hasil analisa menunjukkan proporsi terbesar responden dalam memilih puskesmas sebagai tempat berobat adalah dikarenakan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau, baik untur responden rawat jalan (85,3%), maupun rawat inap (86,1%). Sebagian besar menggunakan kendaraan roda dua untuk mencapai puskesmas (rawat jalan 76,5%, rawat inap 63,8%). Terbanyak menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan atau BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tabel 7.1.
Distribusi responden menurut kemampuan pelayanan puskesmas berdasarkan alasan memilih fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, dan sumber biaya, Risnakes 2017

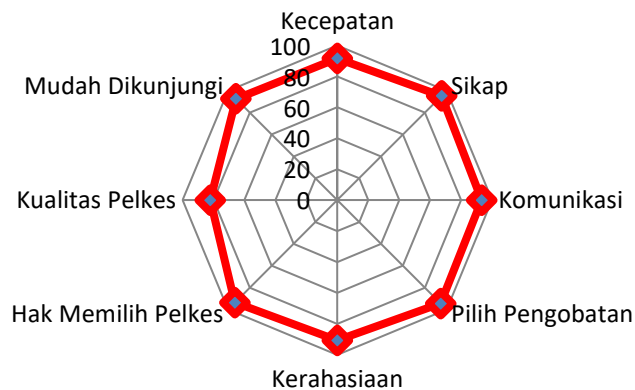
Variabel	Rawat Jalan Puskesmas (N=11550)	Rawat Inap Puskesmas (N=597)
	%	%
Alasan Memilih Fasilitas Kesehatan		
Rekomendasi	34,0	51,6
Reputasi	20,1	24,3
Lokasi mudah dijangkau	85,3	86,1
Fasilitas Lengkap	35,0	43,7
Harga terjangkau	46,2	46,7
Dijamin Asuransi	41,7	53,1
Kecocokan Dokter	47,4	45,6
Lainnya	6,2	5,9
Akses ke fasilitas kesehatan		
Jalan kaki	21,4	10,4
Roda dua (sepeda, motor)	76,5	63,8
Roda tiga (becak, bemo, dll)	4,4	7,0
Roda empat (mobil, dll)	10,5	38,0
Sampan/perahu/getek	0,8	2,0
Lainnya	0,3	0
Sumber Biaya		
Jamkesda	7,1	9,4
KIS/BPJS Kesehatan	64,2	69,2
Biaya Sendiri	27,9	24,1
Asuransi Kesehatan Swasta	0,7	1,0
Lainnya	4,9	1,2

7.3.1. Hasil analisis ketanggapan pelayanan puskesmas

Analisa terhadap 7 (tujuh) aspek penyusun konstruk ketanggapan yang dikategorikan baik yakni Harga diri (*dignity-DIG*), Kerahasiaan (*confidentiality-CON*), Otonomi (*autonomy-AUT*), Perhatian yang cepat (*prompt attention-PA*), Dukungan sosial (*social support*), Kelengkapan dasar (*basic amenities-BA*), Pilihan pemberi layanan (*choice of provider-COP*, *Komunikasi (Communication-COM)*) menunjukkan seluruh aspek tersebut sudah di atas 85%. Artinya > 85% responden menyatakan bahwa implementasi 7 aspek tersebut baik. Kondisi ini terjadi baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap puskesmas.



Gambar 7.1.
Ketanggapan pasien rawat jalan puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017



Gambar 7.2.
Ketanggapan pasien rawat inap puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017

Tidak terdapat kecenderungan karakteristik responden terhadap aspek-aspek ketanggapan pelayanan, baik pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap puskesmas.

Tabel 7.2.
Distribusi responden rawat inap puskesmas dengan penilaian ketanggapan kategori baik menurut karakteristik, Risnakes 2017

Karakteristik	N	SKOR BAIK (SKOR 7-10)						
		PA	DIG	COM	AUT	CON	COP	BA
Kelompok Umur								
0 – 14 tahun	2	00,0	00,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
15 – 24 tahun	126	91,3	94,4	95,2	93,7	88,1	93,7	84,1
25 – 34 tahun	143	93,7	95,8	94,4	96,5	95,8	95,8	80,4
35 – 44 tahun	84	92,9	96,4	90,5	91,7	86,9	96,4	79,8
45 – 54 tahun	119	91,6	97,5	94,1	95,0	92,4	92,4	79,8
>= 55 tahun	123	88,6	92,7	91,1	94,3	87,8	90,2	86,2
Status Kawin								
Kawin	447	91,5	95,1	93,1	94,6	91,3	92,6	81,2
Tidak Kawin	150	92,0	96,0	94,0	94,0	88,7	96,7	84,7
Jenis Kelamin								
Laki-laki	192	90,1	93,8	90,6	95,3	88,0	92,2	83,9
Perempuan	405	92,3	96,0	94,6	94,1	91,9	94,3	81,2
Pendidikan								
Tidak Pernah Sekolah	47	93,6	97,9	95,7	97,9	93,6	95,7	74,5
Tidak Tamat SD	73	90,4	94,5	90,4	90,4	90,4	93,2	76,7
Tamat SD	166	92,8	95,8	92,2	95,2	88,0	91,6	89,2
Tamat SMP	127	92,9	95,3	92,9	94,5	88,2	94,5	78,7
Tamat SMA	160	88,8	93,8	95,0	94,4	93,1	94,4	81,9
Tamat D1/D2/PT	24	95,8	100,0	95,8	95,8	100,0	95,8	83,3
Pekerjaan								
Tidak Bekerja	342	92,7	96,2	95,0	95,3	91,5	95,3	80,7
Pegawai	41	92,7	92,7	87,8	95,1	90,2	95,1	73,2
Wiraswasta	53	84,9	94,3	86,8	88,7	88,7	88,7	84,9
Petani/nelayan/buruh	30	93,3	93,3	93,3	90,0	90,0	100,0	96,7
Lainnya	18	94,4	88,9	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4

Keterangan:

PA = Prompt Attention

DIG = Dignity

COM = Communication

AUT = Autonomy

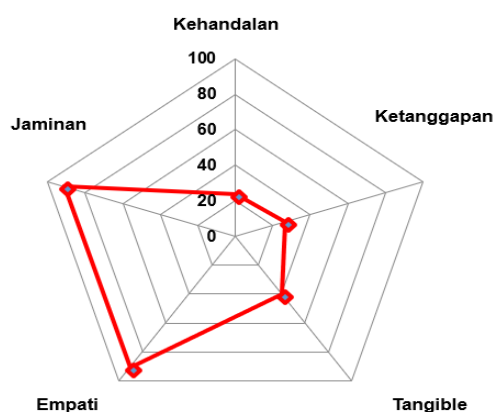
COP = Choice of Provider

BA = Basic Amenities

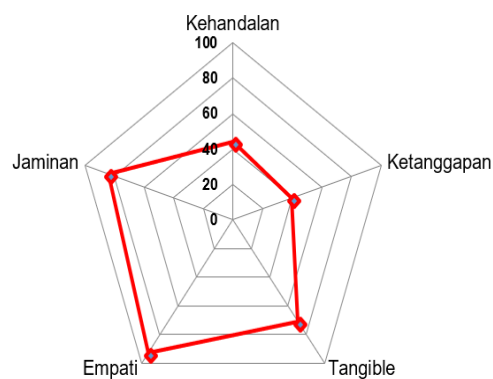
CON = Confidentiality

7.3.2. Hasil analisis kepuasan pasien puskesmas

Analisa terhadap domain yang menyusun kepuasan pasien yang dikategorikan baik, menunjukkan di antara 5 (lima) dimensi yang dinilai sebagai pembentuk konstruk kepuasan pasien rawat jalan puskesmas, dimensi kehandalan dan ketanggapan menempati proporsi terendah dibandingkan dimensi lainnya. Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada kepuasan pasien rawat inap puskesmas, namun secara umum kepuasan pasien rawat inap puskesmas lebih baik daripada kepuasan pasien rawat jalan puskesmas.



Gambar 7.3.
Kepuasan pasien rawat jalan puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017



Gambar 7.4.
Kepuasan pasien rawat inap puskesmas dengan kategori baik, Risnakes 2017

Pada pasien rawat jalan puskesmas, terdapat kecenderungan responden yang berstatus kawin lebih puas dengan pelayanan puskesmas dibandingkan dengan responden yang tidak kawin dalam semua domain kecuali dominan Jaminan. Untuk karakteristik yang lain, nampaknya tidak ada pola kecenderungan khusus. Khusus untuk pelayanan rawat inap puskesmas, tidak ada pola kecenderungan khusus untuk semua karakteristik yang dinilai.

Tabel 7.3.

Distribusi responden rawat jalan puskesmas dengan penilaian kepuasan kategori baik berdasarkan karakteristik, Risnakes 2017

Karakteristik		N	SKOR BAIK (skor 7-10) (%)				
			Kehandalan	Ketanggapan	Tangible	Empati	Jaminan
Umur							
0-14 Tahun	64	7,8	14,1	34,4	98,4	93,8	
15-24 Tahun	1.939	22,5	25,6	39,1	89,5	90,9	
25-34 Tahun	2.850	24,6	26,4	39,8	90,5	89,9	
35-44 Tahun	1.894	25,5	28,8	42,4	91,1	90,9	
45-54 Tahun	2.582	24,9	26,0	40,8	91,4	90,2	
>=55 Tahun	2.220	26,2	30,1	42,8	92,5	91,8	
Status Kawin							
Kawin	8.989	25,3	27,8	41,8	91,2	90,6	
Tidak Kawin	2.560	22,6	25,4	37,9	90,6	90,9	
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	3.513	23,0	24,7	37,2	90,6	89,6	
Perempuan	8.036	25,4	28,3	42,5	91,2	91,2	
Pendidikan							
Tidak pernah sekolah	709	21,4	29,2	37,7	91,3	91,7	
Tidak tamat SD	1.280	25,0	27,3	42,1	93,0	91,7	
Tamat SD	2.414	25,8	28,1	42,8	91,8	91,9	
Tamat SMP	2.463	23,8	26,5	41,9	91,1	90,5	
Tamat SMA	3.661	24,6	26,6	40,2	90,2	90,3	
Tamat D1/D2/PT	1.022	26,4	27,9	37,2	89,4	87,8	
Pekerjaan							
Tidak bekerja	6.420	24,8	26,9	42,1	91,4	91,2	
Pegawai	1.254	24,8	28,8	39,6	88,9	89,4	
Wiraswasta	1.245	26,7	29,7	40,4	91,2	92,3	
Petani/nelayan/buruh	482	23,0	23,9	37,6	90,9	91,7	
Lainnya	431	25,8	29,2	38,1	91,0	87,0	

Tabel 7.4.
Distribusi responden rawat inap puskesmas dengan penilaian kepuasan kategori baik berdasarkan karakteristik, Risnakes 2017

	N	SKOR BAIK (skor 7-10) (%)				
Karakteristik		Kehandalan	Ketanggapan	Tangible	Empati	Jaminan
Umur						
0-14 Tahun	2	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
15-24 Tahun	126	42,9	38,9	69,0	88,9	79,4
25-34 Tahun	143	36,4	35,0	68,5	98,6	89,5
35-44 Tahun	84	46,4	41,7	65,5	92,9	88,1
45-54 Tahun	119	49,6	39,5	68,9	93,3	91,6
>=55 Tahun	123	44,7	42,3	74,0	95,9	84,6
Status Kawin						
Kawin	447	43,0	38,3	67,6	95,1	88,8
Tidak Kawin	150	45,3	41,3	74,7	90,7	79,3
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	192	45,3	38,5	68,8	92,2	86,5
Perempuan	405	42,7	39,3	69,6	94,8	86,4
Pendidikan						
Tidak pernah sekolah	47	48,9	51,1	66,0	95,7	83,0
Tidak tamat SD	73	50,7	38,4	65,8	94,5	89,0
Tamat SD	166	38,6	39,8	75,9	92,2	88,0
Tamat SMP	127	42,5	33,9	70,1	90,6	81,9
Tamat SMA	160	45,0	40,0	63,8	97,5	87,5
Tamat D1/D2/PT	24	41,7	33,3	75,0	95,8	91,7
Pekerjaan						
Tidak bekerja	342	47,1	41,2	68,7	92,7	86,0
Pegawai	41	41,5	34,1	61,0	95,1	85,4
Wiraswasta	53	43,4	37,7	67,9	92,5	86,8
Petani/nelayan/buruh	30	40,0	36,7	73,3	93,3	90,0
Lainnya	18	38,9	27,8	83,3	100,0	83,3

8.1 Motivasi Kerja

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Samsudin (2005) menyatakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal (Mangkunegara, 2005).

Systematic review yang dilakukan oleh Shattuck, dkk (2008), menyatakan terdapat 7 (tujuh) faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan yaitu finansial (gaji/insentif/imbalan jasa), pengembangan karir (kesempatan untuk memperoleh spesialisasi/keahlian tertentu dan promosi), pendidikan berkelanjutan (kesempatan mengikuti pendidikan dan menghadiri seminar), infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan (lingkungan kerja), sumberdaya (peralatan dan perlengkapan dalam melakukan pekerjaan), manajemen fasilitas pelayanan kesehatan (hubungan kerja yang baik dan positif dengan manajemen tempat bekerja dan rekan kerja), rekognisi dan apresiasi personal (dari pimpinan, rekan kerja)

Review atas 20 penelitian dari rentang tahun 1998 sampai 2008, dari 7 komponen tersebut ditemukan bahwa 90% penelitian menyatakan faktor finansial (gaji/insentif/imbalan jasa) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan, diikuti pengembangan karir (85%) dan manajemen Fasyankes (80%), sumber daya (peralatan dan perlengkapan dalam melakukan pekerjaan) dan pendidikan berkelanjutan (kesempatan mengikuti pendidikan dan menghadiri seminar) masing-masing 75%, Rekognisi dan apresiasi personal (dari pimpinan, rekan kerja) 70% dan infrastruktur Fasyankes (lingkungan kerja) 45%.

Insentif finansial yang diterima oleh tenaga kesehatan seharusnya terintegrasi dengan insentif lainnya (insentif non finansial), karena insentif finansial saja tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk membuat tenaga kesehatan bekerja di satu Fasyankes dalam waktu yang cukup lama. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa gaji yang rendah merupakan faktor demotivasi yang paling umum ditemukan, karena tenaga kesehatan merasa ketrampilan yang dimiliki tidak dihargai sebagaimana mestinya. Solusi yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait finansial ini adalah dengan berpraktik ganda (bekerja di 2-3 Fasyankes) yang menyebabkan tenaga kesehatan kelebihan beban kerja, kelelahan, dan lain-lain yang menyebabkan kualitas kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi menurun.

Pada faktor pengembangan karir, penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan enggan bekerja di daerah pedesaan karena menilai bahwa pengembangan karir di daerah

pedesaan lebih kecil kesempatannya dibandingkan dengan bekerja di daerah perkotaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa tenaga kesehatan lebih bangga dan termotivasi ketika mereka merasa memiliki kesempatan untuk berkembang. Penelitian juga menyebutkan pentingnya definisi pekerjaan yang jelas, tidak hanya berpengaruh terhadap pengakuan secara umum juga pengakuan dan komitmen organisasi terutama dalam hal supervisi dan bagaimana tenaga kesehatan dinilai selama bekerja di Fasyankes.

Faktor manajemen fasilitas pelayanan kesehatan mengindikasikan peranan yang penting atas motivasi kerja tenaga kesehatan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dan keterampilan kepemimpinan supervisor tenaga kesehatan yang tidak adekuat dapat menyebabkan demotivasi tenaga kesehatan. Hal ini terjadi karena seorang manajer diharapkan memiliki keterampilan yang baik untuk memotivasi pekerja/tenaga kesehatan bahkan di fasyankes yang miskin sumber daya yang menyebabkan tenaga kesehatan tidak dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Manajer yang baik dan efektif juga bertanggungjawab untuk dapat melakukan pendekatan khusus untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan (aspirasi) tenaga kesehatan kepada pimpinan fasyankes.

8.1.1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Perilaku pegawai didasari oleh kebutuhan. Abraham Maslow dalam Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar
2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup
3. Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai
4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain
5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, gagasan dan kritik terhadap sesuatu

8.1.2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, jadi perusahaan harus bertindak adil terhadap setiap karyawannya. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku karyawan harus dilakukan secara obyektif. Teori ini melihat perbandingan seseorang dengan orang lain sebagai referensi berdasarkan input dan juga hasil atau kontribusi masing-masing karyawan (Robbins, 2007).

8.1.3. Teori dua Faktor Herzberg

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dengan asumsi bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap individu terhadap pekerjaan bias sangat baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. (Robbins, 2007)

Herzberg memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsik. Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi : (1) Upah, (2) Kondisi kerja, (3) Keamanan kerja, (4) Status, (5) Prosedur perusahaan, (6) Mutu penyeliaan, (7) Mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan karyawan tidak selalu memotivasi mereka. Tetapi ketidakberadaannya menyebabkan ketidakpuasan bagi karyawan, karena mereka perlu mempertahankan setidaknya suatu tingkat "tidak ada kepuasan", kondisi ekstrinsik disebut ketidakpuasan, atau faktor *hygiene*. Faktor Intrinsik meliputi : (1) Pencapaian prestasi, (2) Pengakuan, (3) Tanggung Jawab, (4) Kemajuan, (5) Pekerjaan itu sendiri, (6) Kemungkinan berkembang. Tidak adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat tidak puas. Tetapi jika ada, akan membentuk motivasi yang kuat yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh karena itu, faktor ekstrinsik tersebut disebut sebagai pemuas atau motivator.

8.1.4. Teori Kebutuhan McClelland

Teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David McClelland dan kawan-kawannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu (Robbins, 2007) :

- a) Kebutuhan pencapaian (*need for achievement*) : Dorongan untuk berprestasi dan mengungguli, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil
- b) Kebutuhan akan kekuatan (*need for power*) : kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya.
- c) Kebutuhan hubungan (*need for affiliation*) : Hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab.

McClelland dalam Mangkunegara (2005) mengemukakan 6 (enam) karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu : (1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi, (2) Berani mengambil dan memikul resiko, (3) Memiliki tujuan realistik, (4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, (5) Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang dilakukan, dan (6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Edward Murray dalam Mangkunegara (2005) berpendapat bahwa karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut : (1) Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, (2) Melakukan sesuatu dengan mencapai kesuksesan, (3) Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan, (4) Berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu, (5) Melakukan hal yang sukar dengan

hasil yang memuaskan, (6) Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti, dan (7) Melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain.

Motivasi kerja SDMK berpotensi mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan. Moral SDMK yang rendah dapat memperburuk kualitas pelayanan dan menggiring SDMK jauh dari tanggung jawab profesinya. Sementara staf yang termotivasi dan berkualitas tinggi merupakan aspek kunci dalam kinerja sistem kesehatan (Mutale *et.al.*, 2013). Penelitian Mutale (2013) menunjukkan bahwa ada perbedaan skor motivasi antar jenis kelamin, tipe pekerjaan (klinis dan non-klinis), pelatihan dan lama menduduki jabatan.

Tabel 8. 1.
Contoh pertanyaan proksi beberapa definisi terkait motivasi

Category	Description
General motivation	Feel motivated to work hard
	Only do this job to get paid
	I do this job as it provides long-term security for me
Burnout	I feel emotionally drained at the end of the day
	Sometimes when I get up in the morning, I dread having to face another day at work
Job satisfaction	Overall, I am very satisfied with my job
	I am not satisfied with my colleagues in my work
	I am satisfied with my supervisor
Intrinsic job satisfaction	I am satisfied with the opportunity to use my abilities in this job
	I am satisfied that I accomplish something worthwhile in this job
	I do not think that my work in this health facility is valuable these days
Organization commitment	I am proud to be working for this health facility
	I find that my values and this health facility are very similar
	I am glad that I work for this facility rather than other facilities in the country
	I feel very little commitment to this health facility
Conscientiousness	This health facility really inspires me to do my very best on the job
	I cannot be relied on by my colleagues at work
	I always complete my tasks efficiently and correctly
	I am a hard worker
Timeliness	Do things that need doing without being asked or told
	I am punctual about coming to work
	I am often absent from work
	It is not a problem if I sometimes come late for work

8.1.5. The Equity Theory of Motivation

Dasar teori ini adalah teori disonansi kognitif (*cognitive dissonance theory*) yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1950-an, kemudian diaplikasikan dalam lingkup kerja oleh J. Stacy Adams sehingga teori tersebut lebih dikenal sebagai *Adam's Equity Theory of Motivation* (Kreitner & Kinicki, 1998).

Teori keadilan (*equity theory*) ini secara umum didefinisikan sebagai suatu model motivasi yang menjelaskan bagaimana orang menilai kewajaran dan keadilan dalam

pertukaran sosial (*social exchanges*) atau hubungan timbal balik. Dalam lingkup organisasi, hubungan timbal balik terjadi antara pegawai dengan organisasi. Dalam hal ini menurut Adams, ada dua komponen utama yang terkait yaitu input-input dan hasil-hasil (*outcomes*). Input-input yang dimiliki dan diberikan pegawai (seperti pendidikan, pengalaman, keahlian, dan upaya) kepada organisasi, diharapkan akan mendapat hasil (*outcomes*) (seperti gaji, bonus, tunjangan, dan pengakuan) yang sepadan dari organisasi. Hal ini akan dievaluasi oleh pegawai bersangkutan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan *outcomes* yang diterimanya dengan *outcomes* yang diterima pegawai lain dalam satu organisasi maupun dengan *outcomes* yang diterima pegawai lain dalam organisasi yang berbeda (Kreitner & Kinicki, 1998, Noe *et al*, 2006; Dessler, 2005; Mello, 2006).

Berdasarkan evaluasi tersebut, ada tiga kemungkinan persepsi pegawai yang akan muncul yaitu (1). *An equitable situation* (pegawai menilai sudah terjadi keadilan); (2). *Negative inequity* (pegawai menilai pegawai lain menerima *outcomes* yang lebih besar dengan input sama); dan (3). *Positive inequity* (pegawai menilai pegawai lain menerima *outcomes* yang lebih kecil dengan input sama). Dari ketiga kemungkinan ini, *negative inequity* adalah persepsi utama yang harus diwaspadai manajer (Kreitner & Kinicki, 1998).

Menurut Dessler (2006), ada empat bentuk keadilan (*equity*) yang perlu diperhatikan manajer yaitu: eksternal, internal, individual, dan prosedural. Keadilan eksternal (*external equity*) terkait dengan bagaimana tingkat gaji dalam suatu organisasi dibandingkan dengan tingkat gaji dalam organisasi lain dalam pekerjaan yang sama. Keadilan internal (*internal equity*) terkait dengan seberapa wajar perbedaan tingkat gaji dari pekerjaan yang berbeda dalam satu organisasi. Keadilan individual (*individual equity*) terkait dengan seberapa wajar perbedaan tingkat gaji dari individu yang berbeda dalam pekerjaan yang sama dalam satu organisasi berdasarkan kinerja masing-masing. Keadilan prosedural (*procedural equity*) terkait dengan persepsi kewajaran terhadap proses dan prosedur yang digunakan dalam penetapan alokasi upah. Selain keempat bentuk keadilan tersebut, menurut Kreitner & Kinicki (1998). Kategori lainnya yaitu keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan distributif adalah persepsi keadilan bagaimana sumber daya dan imbalan didistribusikan.

8.1.6. Pengukuran motivasi

Pengukuran motivasi dalam Risnakes mengacu pada penelitian Mutale, *et.al.* (2013) yang mengukur motivasi pada SDM kesehatan di Zambia. Instrumen dengan 23 pertanyaan ini juga pernah digunakan di Kenya untuk mengukur motivasi SDM Kesehatan di rumah sakit. Instrumen berupa *self-administered questionnaire* yang diberikan kepada SDM Kesehatan yang ada di fasyankes pada saat pengumpulan data. SDM Kesehatan dikatakan *eligible* apabila sudah bekerja di fasyankes tersebut selama minimal 1 bulan dan melayani pasien.

Sebelum mengisi kuesioner, responden diminta untuk terlebih dahulu menandatangani *informed consent* serta diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang cara pengisian kuesioner dan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi maksud dari pertanyaan yang tidak dimengerti. Kuesioner terdiri dari 23 pertanyaan dengan pilihan jawaban skala 1-5 (sangat setuju hingga sangat tidak setuju). Pertanyaan dengan pernyataan negatif diberikan kode yang berlawanan saat skoring. Skor kemudian dikonversi ke skala 100 agar dapat dilakukan perbandingan terhadap masing-masing kategori pertanyaan. Skor total dihitung dengan menjumlahkan semua kategori. Selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk menentukan determinan dari motivasi.

Langkah analisis blok Motivasi:

1. Dilakukan pengkodean jawaban responden untuk Sembilan pernyataan negatif, yaitu pertanyaan 7002, 7004, 7005, 7007, 7011, 7015, 7017, 7022, 7023.
2. Dibuat skor untuk setiap konstruk motivasi, yaitu (1) motivasi kerja secara umum; (2) Kelelahan emosional yang berhubungan dengan pekerjaan; (3) kepuasan kerja terhadap pekerjaan; (4) kepuasan kerja intrinsik; (5) kebanggaan terhadap pekerjaan; (6) kemampuan dan kesungguhan terhadap pekerjaan; dan (7) kedisiplinan dalam bekerja. Komponen skoring masing-masing konstruk terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 8. 2.
Variabel konstruk dan variabel pembentuk motivasi kerja

Konstruk	Variabel Pembentuk
1. Motivasi kerja secara umum	Pertanyaan 7001, 7002, 7003
2. Kelelahan emosional yang berhubungan dengan pekerjaan	Pertanyaan 7004, 7005
3. Kepuasan kerja terhadap pekerjaan	Pertanyaan 7006, 7007, 7008
4. kepuasan kerja intrinsik	Pertanyaan 7009, 7010, 7011
5. Kebanggaan terhadap pekerjaan	Pertanyaan 7012, 7013, 7014, 7015, 7016
6. kemampuan dan kesungguhan terhadap pekerjaan	Pertanyaan 7017, 7018, 7019, 7020
7. Kedisiplinan dalam bekerja	Pertanyaan 7021, 7022, 7023

3. Skor konstruk tersebut kemudian dikonversi ke dalam skala seratus sesuai dengan banyaknya jumlah variabel pembentuk. Misalnya untuk variabel konstruk “motivasi kerja secara umum” yang terdiri dari 15 variabel pembentuk, maka konversinya menjadi:

$$\frac{\text{Skor konstruk "motivasi kerja secara umum"} \times 100}{15}$$

4. Demikian pula halnya untuk skor total motivasi, dihitung dengan cara:

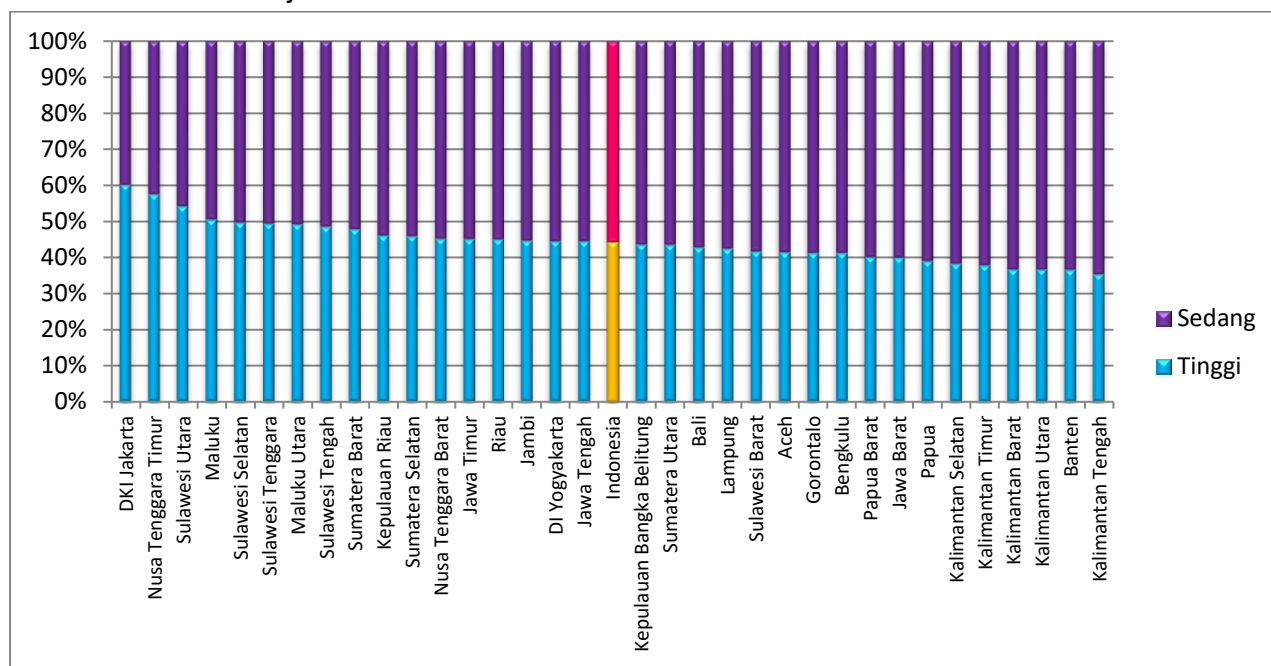
$$\frac{\text{Skor total motivasi} \times 100}{115}$$

5. Membuat **variabel baru kategori skor motivasi** (Variabel "kat_motiv")

konv_st ≤ 25	: motivasi rendah	kode "1"
konv_st 26-74	: motivasi sedang	kode "2"
konv_st ≥ 75	: motivasi tinggi	kode "3"

8.1.7. Hasil analisa motivasi staf Risnakes 2017

Hasil Risnakes 2017 menunjukkan, lima provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori motivasi kerja “tinggi” dari staf puskesmas, secara berurutan adalah: DKI (60,1%), NTT, Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Persentase terendah secara berurutan ada pada provinsi: Kalimantan Tengah (35,9%), Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sebanyak 55,7 persen staf puskesmas di Indonesia mempunyai motivasi kerja “sedang”, dan 44,3 persen bermotivasi kerja “tinggi”. Tidak ada provinsi yang memiliki motivasi kerja rendah.

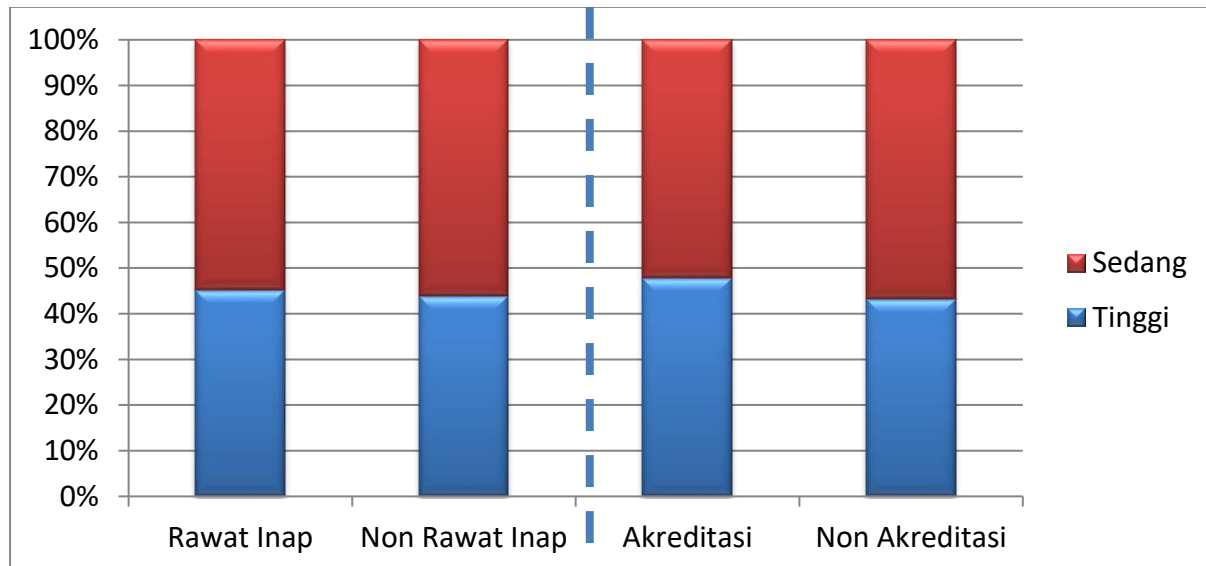


Gambar 8.1.
Distribusi persentase motivasi kerja staf puskesmas menurut klasifikasi motivasi (sedang dan tinggi) berdasarkan provinsi, Risnakes 2017

Tabel 8. 3.
Motivasi kerja tenaga bidang kesehatan yang bekerja di puskesmas berdasarkan provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	N	Mean ± SD	Motivasi Kerja Individu							
				Rendah		Sedang		Tinggi		N	%
				n	%	n	%				
1	Aceh	9,798	73.8 ± 6.2	0	0.0	5,749	58.7%	4,049	41.3%		
2	Sumatera Utara	14,724	74.2 ± 5.9	0	0.0	8,331	56.6%	6,393	43.4%		
3	Sumatera Barat	7,432	74.8 ± 6.5	0	0.0	3,880	52.2%	3,552	47.8%		
4	Riau	5,865	74.4 ± 6.2	0	0.0	3,230	55.1%	2,635	44.9%		
5	Jambi	5,000	74.5 ± 6.1	0	0.0	2,771	55.4%	2,229	44.6%		
6	Sumatera Selatan	9,330	74.4 ± 6.1	0	0.0	5,053	54.2%	4,277	45.8%		
7	Bengkulu	4,774	73.8 ± 6.3	0	0.0	2,808	58.8%	1,966	41.2%		
8	Lampung	8,367	74.1 ± 6.3	0	0.0	4,824	57.7%	3,543	42.3%		
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,796	74.4 ± 5.8	0	0.0	1,014	56.5%	782	43.5%		
10	Kepulauan Riau	2,022	74.7 ± 6.4	0	0.0	1,093	54.1%	929	45.9%		
11	DKI Jakarta	4,822	76.7 ± 6.2	0	0.0	1,926	39.9%	2,896	60.1%		
12	Jawa Barat	27,844	73.9 ± 5.9	0	0.0	16,748	60.1%	11,096	39.9%		
13	Jawa Tengah	24,822	74.5 ± 6.0	0	0.0	13,794	55.6%	11,028	44.4%		
14	DI Yogyakarta	3,124	74.3 ± 6.0	0	0.0	1,736	55.6%	1,388	44.4%		
15	Jawa Timur	27,620	74.6 ± 6.1	0	0.0	15,179	55.0%	12,441	45.0%		
16	Banten	6,605	73.2 ± 6.0	0	0.0	4,197	63.5%	2,408	36.5%		
17	Bali	3,564	74.3 ± 5.7	0	0.0	2,041	57.3%	1,523	42.7%		
18	Nusa Tenggara Barat	4,655	74.7 ± 6.0	0	0.0	2,555	54.9%	2,100	45.1%		
19	Nusa Tenggara Timur	9,393	76.4 ± 6.6	0	0.0	3,997	42.6%	5,396	57.4%		
20	Kalimantan Barat	5,981	73.4 ± 6.3	0	0.0	3,791	63.4%	2,190	36.6%		
21	Kalimantan Tengah	4,174	73.1 ± 6.2	0	0.0	2,703	64.8%	1,471	35.2%		
22	Kalimantan Selatan	6,259	73.6 ± 5.9	0	0.0	3,868	61.8%	2,391	38.2%		
23	Kalimantan Timur	4,325	73.4 ± 6.4	0	0.0	2,693	62.3%	1,632	37.7%		
24	Kalimantan Utara	1,160	73.4 ± 6.3	0	0.0	736	63.4%	424	36.6%		
25	Sulawesi Utara	4,045	76.0 ± 6.3	0	0.0	1,853	45.8%	2,192	54.2%		
26	Sulawesi Tengah	4,667	75.1 ± 6.2	0	0.0	2,406	51.6%	2,261	48.4%		
27	Sulawesi Selatan	12,873	75.2 ± 6.0	0	0.0	6,480	50.3%	6,393	49.7%		
28	Sulawesi Tenggara	6,951	75.2 ± 6.2	0	0.0	3,529	50.8%	3,422	49.2%		
29	Gorontalo	2,523	74.0 ± 6.5	0	0.0	1,483	58.8%	1,040	41.2%		
30	Sulawesi Barat	2,371	74.2 ± 6.0	0	0.0	1,385	58.4%	986	41.6%		
31	Maluku	3,664	75.4 ± 6.3	0	0.0	1,817	49.6%	1,847	50.4%		
32	Maluku Utara	2,738	75.0 ± 6.2	0	0.0	1,394	50.9%	1,344	49.1%		
33	Papua Barat	2,126	74.1 ± 6.3	0	0.0	1,274	59.9%	852	40.1%		
34	Papua	4,503	73.6 ± 6.5	0	0.0	2,751	61.1%	1,752	38.9%		
Indonesia		249,917	74.4 ± 6.2	0	0.0	139,089	55.7%	110,828	44.3%		

Analisa berdasarkan karakteristik puskesmas menunjukkan bahwa motivasi kerja staf di puskesmas rawat inap lebih tinggi dibandingkan di puskesmas non rawat inap. Puskesmas dengan status terakreditasi juga memiliki motivasi kerja staf yang lebih tinggi daripada puskesmas yang tidak terakreditasi.



Gambar 8.2.
Distribusi proporsi motivasi kerja staf puskesmas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Tabel 8. 4.
Motivasi kerja tenaga bidang kesehatan yang bekerja di puskesmas berdasarkan karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

No	Provinsi	N	Mean ± SD			Motivasi Kerja Individu					
						Rendah		Sedang		Tinggi	
						n	%	n	%	n	%
1	Kemampuan Penyelenggaraan										
	Rawat Inap	103,896	74.5	±	6.2	0	0.0	56,995	54.9%	46,901	45.1%
	Non Rawat Inap	146,021	74.3	±	6.1	0	0.0	82,094	56.2%	63,927	43.8%
2	Wilayah kerja puskesmas berdasarkan SK										
	Berdasarkan SK penetapan puskesmas										
	Perkotaan	80,680	74.5	±	6.2	0	0.0	44,309	54.9%	36,371	45.1%
	Perdesaan	131,204	74.3	±	6.1	0	0.0	73,901	56.3%	57,303	43.7%
	Terpencil/ Sangat Terpencil	37,706	74.5	±	6.5	0	0.0	20,668	54.8%	17,038	45.2%
	Berdasarkan persepsi kepala puskesmas										
	Perkotaan	78,117	74.6	±	6.1	0	0.0	42,764	54.7%	35,353	45.3%
	Perdesaan	133,116	74.3	±	6.1	0	0.0	74,999	56.3%	58,117	43.7%
	Terpencil/ Sangat Terpencil	37,525	74.5	±	6.5	0	0.0	20,630	55.0%	16,895	45.0%
	Tidak tahu	1,159	73.7	±	6.7	0	0.0	696	60.1%	463	39.9%
3	Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas										
	BLUD	64,350	74.5	±	6.2	0	0.0	35,376	55.0%	28,974	45.0%
	Non BLUD	185,567	74.4	±	6.2	0	0.0	103,713	55.9%	81,854	44.1%
4	Pengakuan Terhadap Mutu										
	Ada	64,067	74.9	±	6.1	0	0.0	33,506	52.3%	30,561	47.7%
	Tidak	185,850	74.3	±	6.2	0	0.0	105,583	56.8%	80,267	43.2%

8.2 Kepuasan kerja staf puskesmas

Instrumen kepuasan kerja individu mengacu pada *Minnesota Satisfaction Questionnaire (Short Form)* untuk mengukur kepuasan kerja. Kepuasan didefinisikan sebagai suatu keadaan emosional yang menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja.

Kuesioner kepuasan terdiri dari 35 pernyataan yang diisi langsung (*self-administered*) oleh staf puskesmas dengan 5 pilihan jawaban dari skala 1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas). Dua puluh pernyataan pertama mewakili 20 skala kepuasan yaitu: Kemampuan (*Ability Utilization*), Pencapaian (*Achievement*), Kegiatan (*Activity*), Kemungkinan Pengembangan Diri (*Advancement*), Wewenang (*Authority*), Kebijakan Institusi (*Company Policies*), Pendapatan (*Compensation*), Interaksi dengan Rekan Kerja (*Coworkers*), Kreatifitas (*Creativity*), Kemandirian (*Independence*), Kemapanan/Keamanan (*Security*), Kesempatan untuk melakukan hal bermanfaat untuk orang lain (*Social Service*), Status Sosial (*Social Status*), Nilai-nilai Moral (*Moral Values*), Pengakuan (*Recognition*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Supervisi/Pengawasan (*Supervision-Human Relation*), Pengawasan secara teknis (*Supervision-Technical*), Variasi/Keberagaman (*Variety*) dan Kondisi/Lingkungan Kerja (*Working Conditions*).

Tabel 8. 5.

Skala dan pertanyaan *Minnesota Satisfaction Questionnaire (Short Form)*

No.	20 skala MSQ long form	20 items pertanyaan MSQ short form (dalam bahasa Indonesia)	20 items pertanyaan MSQ short form (dalam bahasa Inggris)
1	Activity	Saya dapat sibuk sepanjang waktu.	Being able to keep busy all the time
2	Independence	Kesempatan bekerja sendiri saat melakukan pekerjaan.	The chance to work alone on the job
3	Variety	Kesempatan melakukan pekerjaan lain yang bervariasi.	The chance to do different things from time to time .
4	Social Status	Kesempatan untuk menjadi seseorang yang dihargai di lingkungan kerja.	The chance to be "somebody" in the community .
5	Supervision-Human Relation	Cara atasan saya menangani staf-nya.	The way my boss handles his/her workers
6	Supervision-Technical	Kemampuan atasan saya dalam membuat keputusan.	The competence of my supervisor in making decisions
7	Moral Values	Saya dapat melakukan hal-hal yang tidak berlawanan dengan hati nurani.	Being able to do things that don't go against my conscience
8	Security	Kestabilan pekerjaan saya.	The way my job provides for steady employment
9	Social Service	Kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain.	The chance to do things for other people
10	Authority	Kesempatan untuk mengatakan kepada orang lain tentang apa yang harus dikerjakannya.	The chance to tell people what to do
11	Ability Utilization	Kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan yang saya miliki.	The chance to do something that makes use of my abilities
12	Company Policies and practices	Cara institusi menerapkan kebijakan.	The way company policies are put into practice
13	Compensation	Penghasilan yang saya peroleh sepadan dengan beban kerja.	My pay and the amount of work I do
14	Advancement	Kesempatan untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan.	The chances for advancement on this job
15	Responsibility	Kebebasan untuk menggunakan pertimbangan/penilaian sendiri.	The freedom to use my own judgment
16	Creativity	Kesempatan untuk mencoba cara sendiri dalam melakukan pekerjaan.	The chance to try my own methods of doing the job
17	Working Conditions	Kondisi pekerjaan saya.	The working conditions
18	Coworkers	Cara mitra kerja saya bekerja sama satu sama lain.	The way my co-workers get along with each other
19	Recognition	Penghargaan yang saya peroleh bila mengerjakan pekerjaan dengan baik.	The praise I get for doing a good job
20	Achievement	Pencapaian atas hasil kerja	The feeling of accomplishment I get from the job

Analisa juga dilakukan untuk menilai variable kepuasan kerja staf puskesmas ke dalam Konstruk Kepuasan intrinsik, kepuasan kerja ekstrinsik, dan kepuasan kerja secara umum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 8.6 berikut.

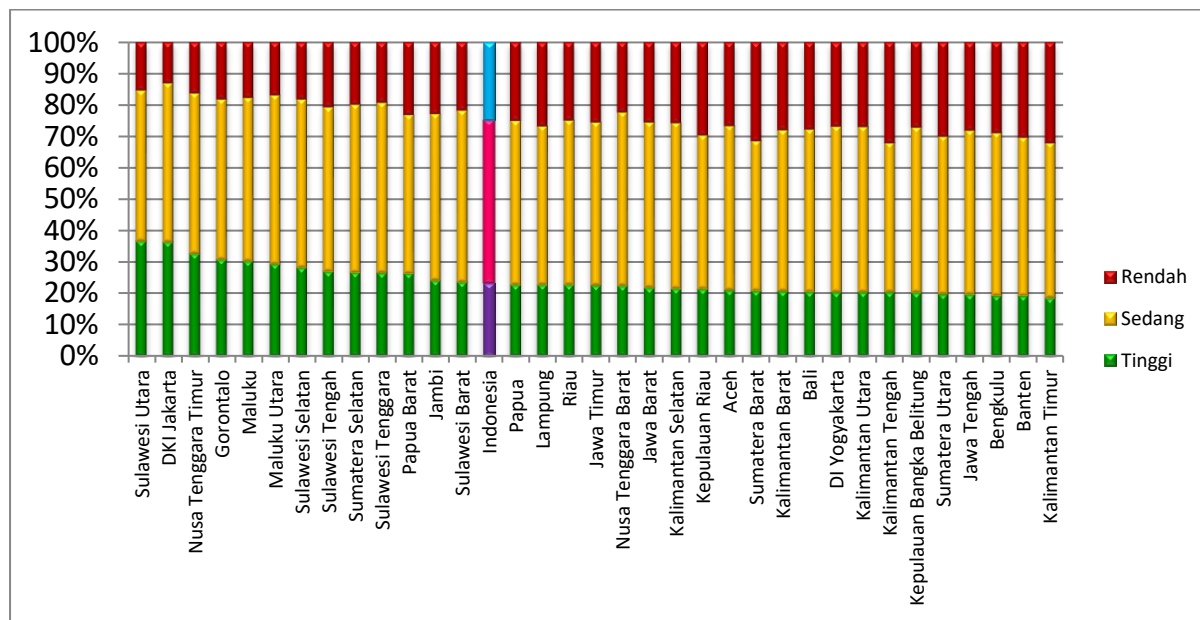
Tabel 8. 6.
Pengukuran skala kepuasan kerja staf puskesmas

Konstruk Kepuasan	Nama Variabel Baru	Rumus skor
Kepuasan intrinsik	spuas_in	P7001+P7002+P7003+P7004+P7007+P7008+P7009+P7010+P7011+P7015+P7016+P7020 (12 item pertanyaan)
Kepuasan ekstrinsik	spuas_eks	P7005+P7006+P7012+P7013+P7014+P7019 (6 item pertanyaan)
Kepuasan secara umum	spuas_um	Jumlah dari P7001 sampai P7020 (20 item pertanyaan)

Selanjutnya, membagi kepuasan staf menjadi 3 kategori, kepuasan rendah (skor $\leq$ persentil 25), kepuasan sedang (persentil 25 < skor < persentil 75), dan kepuasan tinggi (Skor $\geq$ persentil 75).

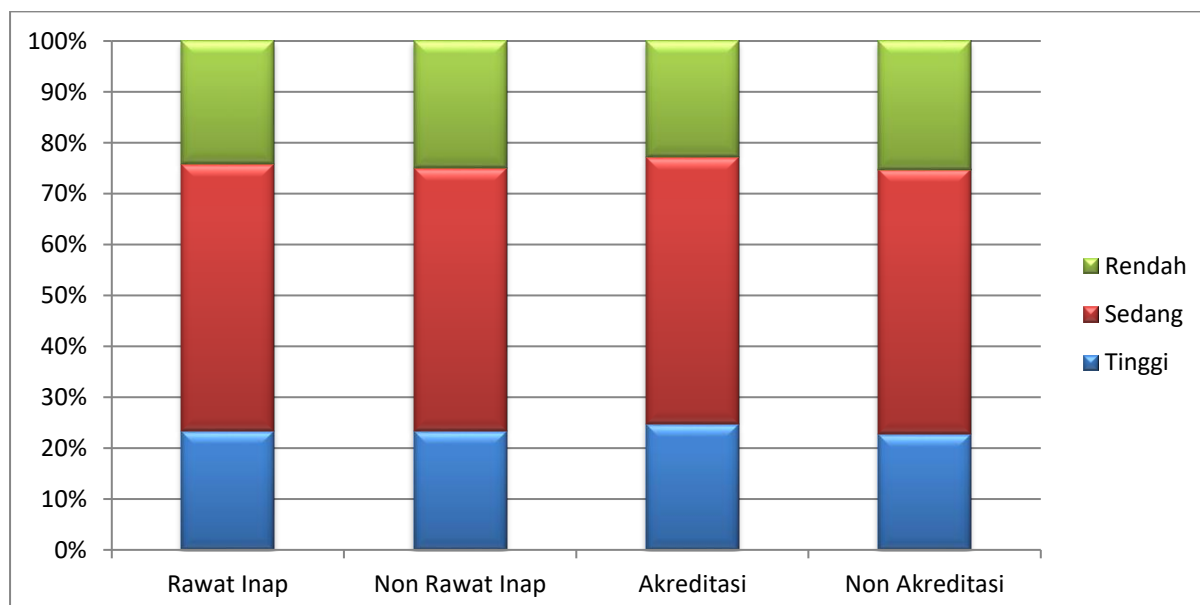
8.2.1. Hasil Risnakes untuk Kepuasan Kerja Staf Puskesmas

Secara Nasional skor kepuasan kerja staf adalah 72,0. Provinsi dengan rata-rata skor kepuasan kerja staf tertinggi adalah DKI Jakarta (73,4), terendah Provinsi Banten (68,9%). Proporsi terbesar kepuasan kerja staf puskesmas ada pada kepuasan kerja sedang (52%), diikuti oleh kepuasan kerja rendah (24,7%), dan tinggi (23,2%).



Gambar 8.3.

Distribusi persentase kepuasan kerja staf puskesmas menurut klasifikasi kepuasan kerja (rendah, sedang dan tinggi) berdasarkan provinsi, Risnakes 2017



Gambar 8.4. Distribusi proporsi kepuasan kerja staf puskesmas menurut karakteristik puskesmas, Risnakes 2017

Tabel 8. 7.
Kepuasan kerja tenaga bidang kesehatan yang bekerja di puskesmas berdasarkan provinsi,
Risnakes 2017

No	Provinsi	N	Skor		Kepuasan Kerja Staf					
			Mean	SD	Rendah		Sedang		Tinggi	
					n	%	n	%	n	%
1	Aceh	9798	69,6	8,5	2601	26,5	5147	52,5	2050	20,9
2	Sumatera Utara	14724	69,1	8,5	4404	29,9	7409	50,3	2911	19,8
3	Sumatera Barat	7432	68,8	9,1	2331	31,4	3556	47,8	1545	20,8
4	Riau	5865	69,9	8,5	1457	24,8	3079	52,5	1329	22,7
5	Jambi	5000	70,5	8,4	1140	22,8	2661	53,2	1199	24,0
6	Sumatera Selatan	9329	71,3	7,9	1846	19,8	5002	53,6	2481	26,6
7	Bengkulu	4774	69,1	8,4	1372	28,7	2482	52,0	920	19,3
8	Lampung	8367	69,9	8,5	2232	26,7	4233	50,6	1902	22,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	1796	69,6	8,2	486	27,1	946	52,7	364	20,3
10	Kepulauan Riau	2022	69,4	8,8	597	29,5	993	49,1	432	21,4
11	DKI Jakarta	4822	73,4	7,8	628	13,0	2450	50,8	1744	36,2
12	Jawa Barat	27844	69,9	8,2	7067	25,4	14712	52,8	6065	21,8
13	Jawa Tengah	24822	69,4	8,1	6939	28,0	13013	52,4	4870	19,6
14	DI Yogyakarta	3124	69,6	8,0	834	26,7	1654	52,9	636	20,4
15	Jawa Timur	27618	70,0	8,3	7014	25,4	14400	52,1	6204	22,5
16	Banten	6605	68,9	8,5	1996	30,2	3342	50,6	1267	19,2
17	Bali	3564	69,7	8,0	987	27,7	1848	51,9	729	20,5
18	Nusa Tenggara Barat	4655	70,3	8,1	1035	22,2	2579	55,4	1041	22,4
19	Nusa Tenggara Timur	9392	72,5	8,9	1525	16,2	4816	51,3	3051	32,5
20	Kalimantan Barat	5982	69,3	8,6	1669	27,9	3077	51,4	1236	20,7
21	Kalimantan Tengah	4174	68,9	8,8	1333	31,9	1993	47,7	848	20,3
22	Kalimantan Selatan	6259	69,8	8,2	1601	25,6	3317	53,0	1341	21,4
23	Kalimantan Timur	4325	68,8	8,7	1381	31,9	2142	49,5	802	18,5
24	Kalimantan Utara	1160	69,4	8,9	312	26,9	612	52,8	236	20,3
25	Sulawesi Utara	4045	73,0	8,4	618	15,3	1950	48,2	1477	36,5
26	Sulawesi Tengah	4667	71,1	8,4	962	20,6	2450	52,5	1255	26,9
27	Sulawesi Selatan	12873	71,6	8,0	2344	18,2	6910	53,7	3619	28,1
28	Sulawesi Tenggara	6951	71,4	8,2	1336	19,2	3772	54,3	1843	26,5
29	Gorontalo	2523	71,8	8,4	459	18,2	1289	51,1	775	30,7
30	Sulawesi Barat	2371	70,8	8,2	512	21,6	1302	54,9	557	23,5
31	Maluku	3664	72,0	8,5	647	17,7	1912	52,2	1105	30,2
32	Maluku Utara	2738	72,0	8,6	460	16,8	1477	53,9	801	29,3
33	Papua Barat	2126	70,9	9,1	491	23,1	1076	50,6	559	26,3
34	Papua	4503	70,0	8,8	1123	24,9	2356	52,3	1024	22,7
Indonesia		249914	70,2	8,4	61739	24,7	129957	52,0	58218	23,3

Lima provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori kepuasan kerja “tinggi” dari staf puskesmas, secara berurutan adalah: Sulawesi Utara (36,5%), DKI, NTT, Gorontalo, dan Maluku. Lima provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori kepuasan kerja “rendah” ada pada provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (31,9%), Sumatera Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Sebanyak 23,3% staf puskesmas di Indonesia mempunyai kepuasan kerja kategori “tinggi” dan 52,0% dengan kategori “sedang”, namun masih ada 24,7% dengan kategori “rendah”.

Tabel 8. 8.
Rerata skor kepuasan staf puskesmas menurut skala kepuasan (N= 249.914),
Risnakes 2017

Konstruk Kepuasan	Mean Skor Kepuasan	Nilai max skor kepuasan
Kepuasan intrinsik	42,75	60
Kepuasan ekstrinsik	20,20	30
Kepuasan umum	70,20	100

Tabel 8. 9.
Kepuasan kerja tenaga bidang kesehatan yang bekerja di puskesmas berdasarkan karakteristik
puskesmas, Risnakes 2017

Karakteristik Puskesmas	N	Skor		Kepuasan Kerja Individu					
		Mean	SD	Rendah		Sedang		Tinggi	
				n	%	n	%	n	%
Kemampuan Penyelenggaraan									
Rawat Inap	103894	70,2	8,4	25183	24,2	54427	52,4	24284	23,4
Non Rawat Inap	146020	70,2	8,4	36556	25,0	75530	51,7	33934	23,2
Total	249914	70,2	8,4	61739	24,7	129957	52,0	58218	23,3
Wilayah Kerja Puskesmas									
Perkotaan	80680	70,4	8,4	19530	24,2	41780	51,8	19370	24,0
Perdesaan	131203	70,0	8,3	33146	25,3	68670	52,3	29387	22,4
Terpencil/ Sangat Terpencil	37704	70,5	8,9	8981	23,8	19333	51,3	9390	24,9
Total	249587	70,2	8,4	61657	24,7	129783	52,0	58147	23,3
Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas									
BLUD	64350	70,1	8,5	16216	25,2	33209	51,6	14925	23,2
Non BLUD	185564	70,2	8,4	45523	24,5	96748	52,1	43293	23,3
Total	249914	70,2	8,4	61739	24,7	129957	52,0	58218	23,3
Pengakuan Terhadap Mutu									
Ada	64067	70,6	8,2	14669	22,9	33530	52,3	15868	24,8
Tidak	185847	70,1	8,5	47070	25,3	96427	51,9	42350	22,8
Total	249914	70,2	8,4	61739	24,7	129957	52,0	58218	23,3%

Time study bertujuan untuk mengetahui waktu kerja produktif tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, diukur melalui pengamatan (*time study*) selama satu hari kerja terhadap masing-masing jenis tenaga kesehatan terpilih. Beberapa data yang disajikan berupa data ketenagaan di puskesmas antara lain tenaga dokter, dokter gigi, perawat dan bidan, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan gizi.

9.1 Waktu kerja

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X. Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bagian Kesatu Perlindungan pasal 77 bahwa jumlah waktu kerja yaitu :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pada riset ini juga mengacu Peraturan Menteri Kesehatan 53 tahun 2012 yang dimaksud dengan waktu kerja efektif (menit) adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang. Jam kerja efektif per hari = 1 hari x 5 jam = 300 menit.

9.2 Sampel Time Study

Jumlah sampel *time study* ditetapkan dengan memperhitungkan *margin of error* (MoE) 5%, dan *non response* 10%, maka terdapat 380 RS dan 425 puskesmas. Cara pengambilan sampel dilakukan 2 tahap :

- a. Membagi jumlah sampel secara proporsional untuk setiap provinsi. Sampel RS, diklasifikasikan lagi berdasarkan kepemilikan RS Pemerintah dan Swasta.
- b. Pemilihan sampel Fasyankes dalam provinsi, dilakukan dengan menggunakan *Systematic Random Sampling*.

9.3 Hasil Risnakes 2017

Puskesmas yang menjadi lokasi *time study* Risnakes adalah sejumlah 425 puskesmas, dengan sampel tenaga dokter 218 orang, 66 dokter gigi, 141 bidan, 139 perawat, 207 tenaga farmasi, 189 tenaga kesehatan masyarakat, 201 tenaga kesehatan lingkungan, dan 269 tenaga gizi. Dari seluruh tenaga kesehatan tersebut dokter mempunyai waktu kerja sesuai fungsional terbesar yaitu 62,69 %, sedangkan tenaga kesehatan masyarakat mempunyai waktu kerja paling banyak di penugasan, dibanding tenaga kesehatan lainnya yaitu 23,3%. Menarik untuk

dilihat bahwa tenaga-tenaga yang dikategorikan sebagai tenaga pelaksana utama Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga farmasi secara umum memiliki proporsi penggunaan waktu kerja sesuai fungsional yang lebih besar daripada tenaga-tenaga yang dikategorikan ke dalam tenaga pelaksana utama Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), seperti tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi.

Dikatakan sesuai dengan fungsional adalah bila penggunaan waktu kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Sesuai dengan penugasan bila tenaga kesehatan tersebut menggunakan waktu kerjanya tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan dan kompetensinya, namun masih dalam ranah (koridor) penugasan yang diembannya dalam menunjang operasional puskesmas.

Tabel 9.1.

Distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas menurut waktu kerja yang digunakan, Risnakes 2017

JENIS TENAGA	N	Waktu kerja yang digunakan sesuai fungsional (%)	Waktu kerja yang digunakan sesuai penugasan (%)	Waktu kerja yang digunakan diluar fungsional dan penugasan (%)	Total waktu kerja produktif (%)
Dokter	218	62,69	9,75	27,56	72,44
Dokter gigi	66	52,93	14,97	32,10	67,9
Bidan	141	54,93	12,91	32,57	67,84
Perawat	139	54,99	17,92	27,09	72,91
Tenaga Farmasi	207	66	10	24	76
Kesehatan Masyarakat	189	42,4	23,3	34,3	65,7
Kesehatan Lingkungan	201	47,6	18,5	33,9	66,1
Gizi	269	52,4	16,2	31,4	68,6

Dari hasil pengamatan, median jumlah pasien dalam gedung yang dilayani oleh dokter dalam satu hari adalah yang terbanyak dibanding tenaga kesehatan puskesmas yang dikategorikan sebagai tenaga UKP (dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat). Seluruh jenis tenaga kesehatan memiliki median jumlah pasien luar gedung yang dilayani dalam satu hari yang sama, yakni 0 pasien.

Tabel 9.2.

Median jumlah pasien dalam gedung dan luar Gedung yang dilayani setiap jenis tenaga kesehatan UKP puskesmas, Risnakes 2017

Jenis Tenaga	N	Jumlah Pasien Dalam Gedung Yang Dilayani Dalam 1 Hari	Jumlah Pasien Luar Gedung Yang Dilayani Dalam 1 Hari
		Median	Median
Dokter	218	18	0
Dokter gigi	66	5	0
Bidan	141	5	0
Perawat	139	7	0

Ditinjau dari kemampuan penyelenggaraannya, tenaga kesehatan UKP di puskesmas non rawat inap memiliki median waktu kerja produktif yang lebih lama daripada puskesmas

rawat inap. Demikian pula bila ditinjau dari median jumlah pasien dalam Gedung yang dilayani dalam satu hari (tabel 9.3).

Bila ditinjau dari Surat Keputusan mengenai penetapan status puskesmas, maka puskesmas perkotaan memiliki median waktu kerja produktif yang lebih lama daripada puskesmas perdesaan dan puskesmas terpencil/sangat terpencil (tabel 9.4). Demikian pula bila ditinjau dari median jumlah pasien dalam gedung yang dilayani dalam satu hari.

Dari Pola Pengelolaan Keuangan puskesmas, terdapat kecenderungan puskesmas dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki median waktu kerja produktif yang lebih lama daripada puskesmas non BLUD (tabel 9.5). Demikian pula bila ditinjau dari median jumlah pasien dalam gedung yang dilayani dalam satu hari.

Tabel 9.3.
Distribusi Jenis tenaga kesehatan puskesmas rawat inap dan non rawat inap (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien, Risnakes 2017

		Kemampuan penyelenggaraan							
Jenis Tenaga	N	Rawat Inap				Non Rawat Inap			
		n	waktu	jumlah	jumlah	n	waktu	jumlah	jumlah
			kerja	pasien	pasien		kerja	pasien	pasien
			dalam	dalam	luar		dalam	dalam	luar
		menit	gedung	gedung		menit	gedung	gedung	
		(median)	(median)	(median)		(median)	(median)	(median)	
Dokter	218	95	353	17	0	123	355	18	0
Dokter gigi	66	8	340	5	0	8	370	6	0
Bidan	141	47	365	5	0	94	373	4	0
Perawat	139	56	363	7	0	83	369	8	0

Tabel 9.4.

Distribusi Jenis tenaga kesehatan puskesmas perkotaan, perdesaan, terpencil/sangat terpencil (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien, Risnakes 2017

SK Penetapan Puskesmas													
JENIS TENAGA	N	Perkotaan					Perdesaan			Terpencil/Sangat Terpencil			
		n	waktu kerja dalam menit	jumlah pasien dalam gedung	jumlah pasien luar gedung	n	waktu kerja dalam menit	jumlah pasien dalam gedung	jumlah pasien luar gedung	N	waktu kerja dalam menit	jumlah pasien dalam gedung	jumlah pasien luar gedung
			(median)	(median)	(median)		(median)	(median)	(median)		(median)	(median)	(median)
Dokter	218	62	389	30	0	123	341	17	0	32	338,5	9	0
Dokter gigi	66	28	360	7	0	33	335	4	0	6	350	1	10
Bidan	141	46	397	9	0	59	360	5	0	34	345	2	0
Perawat	139	35	405	10	0	68	360	6	0	40	356	6	0

Tabel 9.5.

Distribusi jenis tenaga kesehatan puskesmas BLUD dan non BLUD (dokter, dokter gigi, bidan, perawat) menurut median waktu kerja dan jumlah pasien, Risnakes 2017

JENIS TENAGA	N	Pola Pengelolaan Keuangan							
		N	BLUD				Non BLUD		
			waktu kerja dalam menit (median)	jumlah pasien dalam gedung (median)	jumlah pasien luar gedung (median)	n	waktu kerja dalam menit (median)	jumlah pasien dalam gedung (median)	jumlah pasien luar gedung (median)
Dokter	218	54	360	26	0	164	350,5	16	0
Dokter gigi	66	13	359	5	0	53	357	5	0
Bidan	141	37	405	6	0	104	360	4	0
Perawat	139	31	375	9	0	108	360	6	0

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan salah satu program utama pembangunan kesehatan untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan mendatangi keluarga. PIS-PK dimulai tahun 2015, yang diharapkan pada tahun 2019 semua Puskesmas sudah melaksanakan kegiatan PIS-PK.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bertanggung jawab atas satu wilayah administrasi pemerintahan, yakni kecamatan atau bagian dari kecamatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 juga menegaskan adanya dua fungsi Puskesmas berikut:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama, yakni kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama, yakni kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Fungsi UKM dan UKP harus seimbang, agar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. Upaya Kesehatan Perorangan saja dengan program JKN yang diikuti oleh seluruh rakyat pun belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas mencakupi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pendataan kesehatan keluarga menggunakan formulir Prokesga oleh Pembina Keluarga (dapat dibantu Kader Kesehatan).
- b. pembuatan dan pengelolaan pangkalan data Puskesmas serta pengolahan data oleh tenaga pengelola data Puskesmas.
- c. analisis, perumusan intervensi masalah kesehatan, dan penyusunan rencana Puskesmas oleh tim manajemen Puskesmas.
- d. pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah oleh Pembina Keluarga.
- e. pelaksanaan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM.
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) oleh tenaga kesehatan Puskesmas.

Data keluarga dikumpulkan dengan menggunakan formulir Prokesga (kuesioner PIS PK), yang berbentuk tercetak atau elektronik (aplikasi). Profil Kesehatan Keluarga mengacu kepada indikator keluarga sehat, yang untuk saat ini ditetapkan sebanyak dua belas indikator sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan.
6. Penderita Tuberkulosis mendapat pengobatan sesuai standar.
7. Penderita hipertensi mendapatkan pengobatan teratur.
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantar.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok.
10. Keluarga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Keluarga mempunyai akses air bersih.
12. Keluarga mempunyai akses jamban sehat.

Tujuan Umum :

Tersedianya informasi dasar tentang kesiapan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Tujuan Khusus :

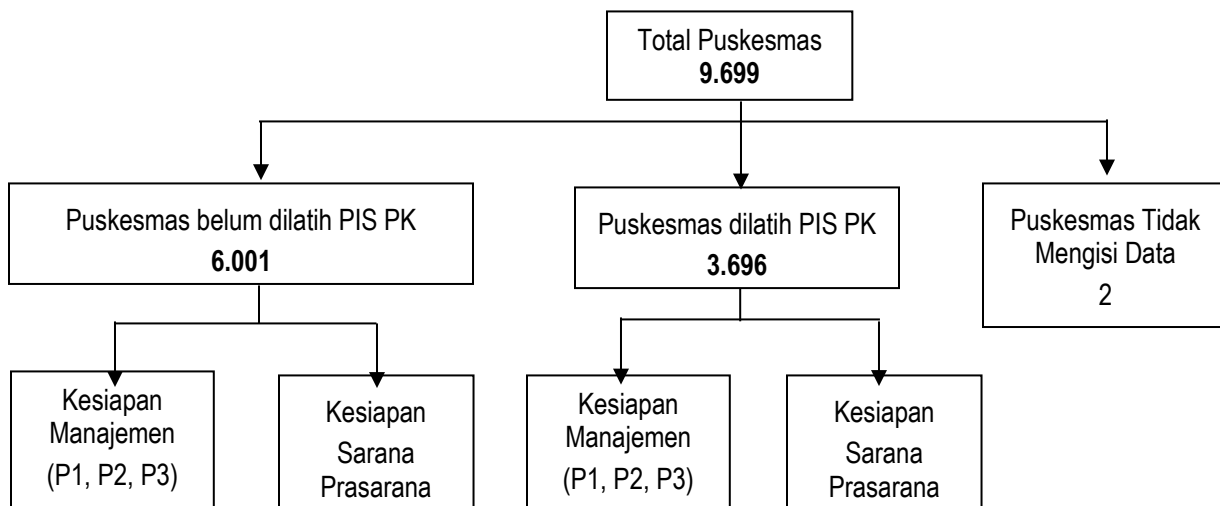
1. Mengetahui kesiapan manajemen Puskesmas dalam menjalankan PIS-PK
2. Mengetahui kesiapan sarana prasarana Puskesmas dalam menjalankan PIS-PK.

10.1 Sampel

Total Puskesmas yang menjadi sampel dalam Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tahun 2017 adalah 9.699 Puskesmas. Namun, untuk analisis kesiapan Puskesmas dalam menjalankan PIS-PK jumlah Puskesmas yang dianalisis sebanyak 9.697 Puskesmas karena ada 2 Puskesmas yang tidak mengisi data sama sekali. Responden dalam blok ini adalah Penanggung jawab program PIS-PK atau Keluarga Sehat/ Kepala Puskesmas/ Kepala Bagian Tata Usaha/ Petugas Puskesmas lain yang mengerti tentang PIS-PK.

10.2 Analisis Kesiapan Puskesmas menjalankan PIS-PK

Berikut alur analisis kesiapan Puskesmas menjalankan PIS-PK :



Gambar 1. Alur analisis kesiapan Puskesmas menjalankan PIS-PK

Dari 9.697 puskesmas, dibagi ke dalam dua kelompok yaitu Puskesmas yang dilatih PIS-PK dan Puskesmas yang belum dilatih PIS-PK. Puskesmas dikatakan sudah dilatih PIS-PK jika Puskesmas sudah

dilatih oleh Bapelkes Nasional/ BBPK, Bapelkes Daerah atau Dinas Kesehatan Provinsi dan dilaksanakan pada rentang tahun 2016-2017.

Puskesmas baik yang sudah dilatih PIS-PK maupun yang belum dilatih PIS-PK dinilai kesiapannya dalam menjalankan PIS-PK melalui 2 indikator yaitu kesiapan manajemen dan kesiapan sarana prasarana.

- **Kesiapan Manajemen Puskesmas**

Manajemen program/pelayanan kesehatan Puskesmas dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Perencanaan (P1) adalah tahap menyusun rencana usulan kegiatan (RUK) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) yang didasari oleh fakta dan data.
2. Penggerakan-Pelaksanaan (P2) adalah tahap melaksanakan hal-hal yang sudah tercantum dalam RPK dan mendorong pencapaiannya melalui lokakarya mini (lokmin) secara berkala.
3. Pengawasan-Pengendalian-Penilaian (P3) adalah tahap memantau perkembangan pencapaian (yang juga dilakukan melalui lokmin berkala), melakukan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan menilai pencapaian kegiatan pada pertengahan dan akhir tahun.

Penguatan manajemen Puskesmas melalui pendekatan keluarga akan terjadi baik dalam tahap P1, tahap P2, maupun tahap P3. (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Setiap tahapan P1, P2, dan P3 dinilai kesiapan dengan kategori :

1. Siap
2. Kurang siap

- **Kesiapan sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menilai kesiapan Puskesmas dalam menjalankan PIS-PK ada 5 prasarana yaitu sarana prasarana dasar dan esensial yang berkaitan dengan indikator PIS-PK, sebagai berikut :

1. Sarana prasarana pelayanan hipertensi yang meliputi stetoskop, tensimeter air raksa yang masih berfungsi, tensimeter digital yang masih berfungsi, dan memiliki salah satu obat anti hipertensi Amlodipine 5 mg, amlodipine 10 mg, captopril 12,5 mg atau captopril 25 mg.
2. Sarana prasarana pelayanan TB yang meliputi laboratorium Puskesmas yang dapat melakukan pemeriksaan dahak, mempunyai obat TB kombipak atau FDC (Fixed Dose Combination) dengan jumlah cukup, dan mempunyai anggaran untuk melakukan pendampingan minum obat TB.
3. Sarana prasarana pelayanan gangguan jiwa yang meliputi ketersediaan obat gangguan jiwa yaitu Antipsikotik (chlorpromazine – CPZ, haloperidol – Haldol, Serenase), Anti Parkinson (levodopa, trihexifenidil), Anti depresan (trisklik, MAO inhibitor, amitriptyline), Anti mania (lithium carbonate), Antianxietas – anti cemas (diazepam – chlordiazepoxide), Anti insomnia (phenobarbital), Anti obsesif kompulsif (clomipramine), dan Anti panik (imipramine).
4. Sarana prasarana pelayanan tumbuh kembang yang meliputi alat ukur tinggi badan dewasa, alat ukur timbang badan bayi, alat ukur panjang badan bayi, dan ketersediaan Kartu Menuju Sehat (KMS).

Setiap sarana prasarana dinilai kesiapannya menjadi dua kategori yaitu:

1. Siap
2. Kurang siap

Berikut ini tabel-tabel dari blok Kesiapan Keluarga Sehat (Kesiapan PIS-PK):

Tabel 10.1
Persentase Puskesmas dilatih PIS PK dan Puskesmas belum dilatih PIS PK berdasarkan provinsi, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dilatih PIS PK		Puskesmas belum dilatih PIS PK	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	195	57,4	145	42,6
2	Sumatera Utara	571	292	51,1	279	48,9
3	Sumatera Barat	264	109	41,3	155	58,7
4	Riau	212	88	41,5	124	58,5
5	Jambi	176	79	44,9	97	55,1
6	Sumatera Selatan	322	128	39,8	194	60,2
7	Bengkulu	179	51	28,5	128	71,5
8	Lampung	291	210	72,2	81	27,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	26	41,9	36	58,1
10	Kepulauan Riau	72	48	66,7	24	33,3
11	DKI Jakarta	314	93	29,6	221	70,4
12	Jawa Barat	1050	352	33,5	698	66,5
13	Jawa Tengah	875	474	54,2	401	45,8
14	DI Yogyakarta	121	35	28,9	86	71,1
15	Jawa Timur	960	481	50,1	479	49,9
16	Banten	233	97	41,6	136	58,4
17	Bali	120	50	41,7	70	58,3
18	Nusa Tenggara Barat	158	95	60,1	63	39,9
19	Nusa Tenggara Timur	371	42	11,3	329	88,7
20	Kalimantan Barat	238	61	25,6	177	74,4
21	Kalimantan Tengah	195	29	14,9	166	85,1
22	Kalimantan Selatan	230	81	35,2	149	64,8
23	Kalimantan Timur	173	53	30,6	120	69,4
24	Kalimantan Utara	46	15	32,6	31	67,4
25	Sulawesi Utara	185	48	25,9	137	74,1
26	Sulawesi Tengah	189	80	42,3	109	57,7
27	Sulawesi Selatan	448	204	45,5	244	54,5
28	Sulawesi Tenggara	268	42	15,7	226	84,3
29	Gorontalo	93	24	25,8	69	74,2
30	Sulawesi Barat	94	28	29,8	66	70,2
31	Maluku	198	24	12,1	174	87,9
32	Maluku Utara	127	22	17,3	105	82,7
33	Papua Barat	150	20	13,3	130	86,7
34	Papua	372	20	5,4	352	94,6
INDONESIA		9.697	3.696	38,1	6.001	61,9

Terdapat 3.696 Puskesmas yang sudah dilatih PIS PK dan 6.001 Puskesmas yang belum dilatih PIS PK. Puskesmas sudah dilatih PIS PK yaitu Puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan PIS PK yang diselenggarakan oleh Bapelkes nasional, provinsi ataupun daerah pada tahun $\geq$ 2016.

Tabel 10.2
Persentase Puskesmas dengan sumber informasi tentang PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Kemenkes	Dinkes Propinsi	Dinkes Kab/Kota	Organisasi Profesi	Media elektronik	Media cetak	Masyarakat	Lain-lain
1	Aceh	293	50,85	66,21	88,74	19,80	53,92	36,18	5,46	2,73
2	Sumatera Utara	505	49,50	60,99	87,52	20,79	43,56	29,90	8,91	5,15
3	Sumatera Barat	241	57,26	70,12	95,44	26,14	52,28	33,20	8,71	4,15
4	Riau	179	48,60	57,54	90,50	27,93	54,75	35,75	9,50	4,47
5	Jambi	139	50,36	67,63	92,09	21,58	49,64	31,65	10,79	3,60
6	Sumatera Selatan	280	53,21	66,79	96,07	30,71	49,29	33,57	14,29	3,57
7	Bengkulu	132	49,24	53,79	85,61	28,03	52,27	39,39	14,39	4,55
8	Lampung	283	55,83	69,61	92,93	33,92	51,59	35,69	6,36	1,77
9	Kepulauan Bangka Belitung	61	50,82	77,05	95,08	14,75	44,26	31,15	8,20	3,28
10	Kepulauan Riau	70	68,57	74,29	91,43	31,43	50,00	32,86	8,57	4,29
11	DKI Jakarta	212	67,92	62,26	52,36	21,70	23,11	16,51	4,72	8,96
12	Jawa Barat	929	45,43	44,89	92,14	26,48	44,89	31,75	8,50	5,60
13	Jawa Tengah	800	44,50	53,88	88,00	24,50	36,50	25,50	7,00	6,00
14	DI Yogyakarta	116	48,28	62,93	98,28	30,17	52,59	45,69	5,17	6,03
15	Jawa Timur	900	40,44	50,11	93,89	22,11	40,11	25,11	6,89	3,44
16	Banten	212	51,42	67,45	86,32	16,04	32,08	21,70	6,60	1,89
17	Bali	116	45,69	71,55	89,66	20,69	51,72	33,62	3,45	3,45
18	Nusa Tenggara Barat	137	55,47	72,26	88,32	27,01	47,45	29,93	8,03	2,92
19	Nusa Tenggara Timur	307	42,02	43,32	87,62	30,29	56,68	34,53	9,45	5,21
20	Kalimantan Barat	194	43,30	49,48	86,60	24,23	57,22	36,60	9,28	6,70
21	Kalimantan Tengah	132	39,39	52,27	79,55	17,42	46,21	28,03	6,06	3,79
22	Kalimantan Selatan	216	37,96	62,50	93,06	17,13	39,35	25,00	4,17	1,85
23	Kalimantan Timur	130	43,85	48,46	85,38	20,00	43,08	24,62	6,15	4,62
24	Kalimantan Utara	41	53,66	56,10	92,68	26,83	48,78	31,71	0,00	9,76
25	Sulawesi Utara	155	55,48	70,97	88,39	21,29	52,26	40,00	7,74	3,23
26	Sulawesi Tengah	162	36,42	56,79	83,95	10,49	29,63	17,28	8,02	4,32
27	Sulawesi Selatan	400	45,75	58,50	85,75	23,50	50,00	34,00	11,25	6,50
28	Sulawesi Tenggara	215	45,12	64,65	86,51	23,26	57,67	38,60	12,09	3,26
29	Gorontalo	87	41,38	65,52	91,95	25,29	36,78	28,74	3,45	2,30
30	Sulawesi Barat	87	37,93	51,72	81,61	16,09	59,77	37,93	16,09	9,20
31	Maluku	155	34,84	45,81	80,00	16,77	40,00	21,94	3,87	6,45
32	Maluku Utara	107	44,86	61,68	82,24	22,43	50,47	28,04	9,35	6,54
33	Papua Barat	102	34,31	50,98	73,53	16,67	42,16	15,69	5,88	6,86
34	Papua	135	30,37	28,15	73,33	8,89	45,19	25,19	5,93	3,70
INDONESIA		8230	46,45	56,79	88,19	23,32	45,24	29,98	8,01	4,67

Tabel 10.3
Persentase Puskesmas yang memiliki penanggung jawab PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Penanggung jawab PIS PK	
			n	%
1	Aceh	340	228	67,06
2	Sumatera Utara	571	384	67,25
3	Sumatera Barat	264	154	58,33
4	Riau	212	123	58,02
5	Jambi	176	97	55,11
6	Sumatera Selatan	322	199	61,80
7	Bengkulu	179	86	48,04
8	Lampung	291	241	82,82
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	51	82,26
10	Kepulauan Riau	72	64	88,89
11	DKI Jakarta	314	110	35,03
12	Jawa Barat	1050	641	61,05
13	Jawa Tengah	875	639	73,03
14	DI Yogyakarta	121	80	66,12
15	Jawa Timur	960	779	81,15
16	Banten	233	151	64,81
17	Bali	120	64	53,33
18	Nusa Tenggara Barat	158	108	68,35
19	Nusa Tenggara Timur	371	148	39,89
20	Kalimantan Barat	238	111	46,64
21	Kalimantan Tengah	195	84	43,08
22	Kalimantan Selatan	230	140	60,87
23	Kalimantan Timur	173	83	47,98
24	Kalimantan Utara	46	26	56,52
25	Sulawesi Utara	185	64	34,59
26	Sulawesi Tengah	189	105	55,56
27	Sulawesi Selatan	448	309	68,97
28	Sulawesi Tenggara	268	117	43,66
29	Gorontalo	93	49	52,69
30	Sulawesi Barat	94	49	52,13
31	Maluku	198	70	35,35
32	Maluku Utara	127	33	25,98
33	Papua Barat	150	44	29,33
34	Papua	372	65	17,47
INDONESIA		9.697	5.696	58,74

Tabel 10.4
Persentase Puskesmas menurut penyelenggara pelatihan PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Penyelenggara Pelatihan			
			Bapelkes Nasional	Bapelkes Daerah	Dinkes Provinsi	Lain-lain
1	Aceh	202	23,27	50,50	60,89	4,46
2	Sumatera Utara	315	41,27	47,94	34,29	6,35
3	Sumatera Barat	122	28,69	50,00	31,15	12,30
4	Riau	102	22,55	55,88	44,12	13,73
5	Jambi	81	7,41	44,44	66,67	3,70
6	Sumatera Selatan	142	28,17	50,70	43,66	7,04
7	Bengkulu	53	22,64	67,92	43,40	1,89
8	Lampung	234	20,94	57,26	50,85	5,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	0,00	81,48	22,22	11,11
10	Kepulauan Riau	53	32,08	47,17	35,85	9,43
11	DKI Jakarta	116	34,48	46,55	14,66	14,66
12	Jawa Barat	430	19,30	47,91	37,44	21,63
13	Jawa Tengah	525	31,62	47,05	32,19	8,38
14	DI Yogyakarta	45	20,00	44,44	42,22	33,33
15	Jawa Timur	592	16,22	53,04	30,24	23,14
16	Banten	122	6,56	63,93	18,03	26,23
17	Bali	50	26,00	70,00	30,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	98	32,65	67,35	39,80	7,14
19	Nusa Tenggara Timur	60	35,00	50,00	43,33	10,00
20	Kalimantan Barat	79	20,25	44,30	35,44	27,85
21	Kalimantan Tengah	45	13,33	42,22	22,22	35,56
22	Kalimantan Selatan	93	27,96	38,71	48,39	17,20
23	Kalimantan Timur	61	16,39	49,18	45,90	16,39
24	Kalimantan Utara	21	0,00	23,81	52,38	38,10
25	Sulawesi Utara	49	18,37	61,22	46,94	4,08
26	Sulawesi Tengah	85	16,47	57,65	35,29	2,35
27	Sulawesi Selatan	239	39,75	41,42	32,64	16,74
28	Sulawesi Tenggara	47	17,02	74,47	27,66	12,77
29	Gorontalo	32	12,50	50,00	28,13	37,50
30	Sulawesi Barat	32	40,63	50,00	12,50	15,63
31	Maluku	27	22,22	59,26	25,93	11,11
32	Maluku Utara	23	21,74	73,91	17,39	4,35
33	Papua Barat	25	24,00	64,00	36,00	8,00
34	Papua	28	25,00	39,29	35,71	35,71
INDONESIA		4.255	24,72	51,14	36,50	14,08

Tabel 10.5
Persentase Puskesmas menurut tahun pelaksanaan pelatihan PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tahun pelaksanaan pelatihan	
			dibawah 2016	2016 -2017
1	Aceh	202	0,99	99,01
2	Sumatera Utara	315	2,86	97,14
3	Sumatera Barat	122	0,82	99,18
4	Riau	102	1,96	98,04
5	Jambi	81	0,00	100,00
6	Sumatera Selatan	142	6,34	93,66
7	Bengkulu	53	3,77	96,23
8	Lampung	234	6,84	93,16
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	0,00	100,00
10	Kepulauan Riau	53	1,89	98,11
11	DKI Jakarta	116	7,76	92,24
12	Jawa Barat	430	1,86	98,14
13	Jawa Tengah	525	4,38	95,62
14	DI Yogyakarta	45	0,00	100,00
15	Jawa Timur	592	2,70	97,30
16	Banten	122	0,82	99,18
17	Bali	50	0,00	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	98	0,00	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	60	21,67	78,33
20	Kalimantan Barat	79	3,80	96,20
21	Kalimantan Tengah	45	0,00	100,00
22	Kalimantan Selatan	93	0,00	100,00
23	Kalimantan Timur	61	3,28	96,72
24	Kalimantan Utara	21	0,00	100,00
25	Sulawesi Utara	49	0,00	100,00
26	Sulawesi Tengah	85	4,71	95,29
27	Sulawesi Selatan	239	3,77	96,23
28	Sulawesi Tenggara	47	2,13	97,87
29	Gorontalo	32	3,13	96,88
30	Sulawesi Barat	32	0,00	100,00
31	Maluku	27	3,70	96,30
32	Maluku Utara	23	4,35	95,65
33	Papua Barat	25	16,00	84,00
34	Papua	28	3,57	96,43
INDONESIA		4.255	3,27	96,73

Tabel 10.6

Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut keikutsertaan petugas dalam pelatihan PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Persentase Petugas yang mengikuti pelatihan PIS PK								Total Petugas yang dilatih	Rata-rata petugas per Puskesmas
			Dokter	Bidan	Perawat	Kesling	Gizi	Kemas	Farmasi	Lain-lain		
1	Aceh	195	11,4	26,0	20,5	10,2	9,4	17,6	2,1	2,9	1113	5,71
2	Sumatera Utara	292	4,6	44,2	24,6	4,7	6,6	11,4	1,5	2,5	2043	7
3	Sumatera Barat	109	14,6	25,7	20,0	9,4	9,7	12,6	1,7	6,2	595	5,46
4	Riau	88	14,3	24,3	27,6	11,2	8,5	8,6	2,9	2,6	544	6,18
5	Jambi	79	12,4	26,2	25,7	8,0	5,1	15,0	1,2	6,3	412	5,22
6	Sumatera Selatan	128	10,2	21,0	26,2	10,7	11,9	13,7	2,2	4,1	629	4,91
7	Bengkulu	51	11,0	22,4	21,9	8,9	8,4	21,9	1,3	4,2	237	4,65
8	Lampung	210	4,6	33,1	26,6	9,8	6,1	12,1	2,6	5,0	1096	5,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	2,5	22,3	38,9	9,6	10,2	11,5	2,5	2,5	157	6,04
10	Kepulauan Riau	48	9,6	31,0	29,9	7,5	7,8	7,1	1,1	6,0	281	5,85
11	DKI Jakarta	93	32,6	24,3	27,9	5,0	4,3	3,1	1,7	1,0	699	7,52
12	Jawa Barat	352	8,2	29,5	27,8	8,2	7,1	13,2	1,9	4,1	2334	6,63
13	Jawa Tengah	474	6,9	32,9	24,9	10,8	9,7	10,1	1,3	3,4	2517	5,31
14	DI Yogyakarta	35	13,0	19,9	25,5	5,6	9,7	11,1	0,5	14,8	216	6,17
15	Jawa Timur	481	7,6	37,5	29,1	7,1	6,1	6,9	1,2	4,4	3173	6,6
16	Banten	97	6,1	34,2	25,4	7,2	7,0	9,0	0,4	10,8	556	5,73
17	Bali	50	14,9	18,4	22,4	13,3	14,1	12,5	2,0	2,4	255	5,1
18	Nusa Tenggara Barat	95	10,4	25,4	26,7	9,2	13,7	10,0	1,7	3,0	599	6,31
19	Nusa Tenggara Timur	42	7,4	24,1	29,6	11,3	10,5	14,8	1,2	1,2	257	6,12
20	Kalimantan Barat	61	1,6	20,4	29,7	15,8	13,6	11,7	1,6	5,4	367	6,02
21	Kalimantan Tengah	29	6,7	22,1	30,8	8,2	10,6	9,1	1,4	11,1	208	7,17
22	Kalimantan Selatan	81	9,6	27,2	22,9	9,6	9,6	11,4	3,1	6,7	481	5,94
23	Kalimantan Timur	53	13,7	19,6	19,0	12,1	10,0	15,3	4,4	5,9	321	6,06
24	Kalimantan Utara	15	10,0	7,5	27,5	10,0	6,3	28,8	5,0	5,0	80	5,33
25	Sulawesi Utara	48	15,6	20,7	23,6	13,1	11,4	11,0	1,7	3,0	237	4,94
26	Sulawesi Tengah	80	3,5	23,9	25,4	13,1	9,9	17,1	2,8	4,2	426	5,33
27	Sulawesi Selatan	204	3,1	26,4	28,3	12,0	12,8	13,7	1,1	2,5	1703	8,35
28	Sulawesi Tenggara	42	4,3	11,6	18,2	39,6	8,6	14,2	1,7	2,0	303	7,21
29	Gorontalo	24	10,7	22,7	20,0	10,7	12,0	18,7	1,3	4,0	150	6,25
30	Sulawesi Barat	28	4,5	21,8	27,8	12,8	13,5	14,3	3,8	1,5	133	4,75
31	Maluku	24	1,5	25,5	36,8	12,7	15,2	5,9	1,5	1,0	204	8,5
32	Maluku Utara	22	5,7	17,9	18,7	24,4	12,2	14,6	3,3	3,3	123	5,59
33	Papua Barat	20	15,2	22,2	35,4	9,1	9,1	5,1	2,0	2,0	99	4,95
34	Papua	20	10,8	19,2	24,6	11,5	10,8	10,0	4,6	8,5	130	6,5
INDONESIA		3.696	8,5	29,8	26,2	9,6	8,7	11,4	1,7	4,0	22678	6,14

Tabel 10.7
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang memiliki penanggung jawab yg sudah dilatih PIS PK,
Risnakes 2017

No.	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Penanggung -jawab yang dilatih PIS PK	Penanggung- jawab yang tidak dilatih PIS PK	Penanggungjawab yang tidak dilatih PIS PK	
					Kepala Puskesmas	Petugas kesehatan yg lain
1	Aceh	195	90,8	9,2	72,2	27,8
2	Sumatera Utara	292	89,7	10,3	90,0	16,7
3	Sumatera Barat	109	91,7	8,3	88,9	11,1
4	Riau	88	81,8	18,2	87,5	18,8
5	Jambi	79	93,7	6,3	60,0	60,0
6	Sumatera Selatan	128	82,0	18,0	69,6	21,7
7	Bengkulu	51	98,0	2,0	0,0	100,0
8	Lampung	210	85,7	14,3	40,0	53,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	73,1	26,9	71,4	57,1
10	Kepulauan Riau	48	95,8	4,2	50,0	0,0
11	DKI Jakarta	93	71,0	29,0	14,8	51,9
12	Jawa Barat	352	80,7	19,3	60,3	29,4
13	Jawa Tengah	474	88,2	11,8	55,4	42,9
14	DI Yogyakarta	35	91,4	8,6	66,7	33,3
15	Jawa Timur	481	85,7	14,3	63,8	37,7
16	Banten	97	83,5	16,5	62,5	31,3
17	Bali	50	88,0	12,0	50,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	89,5	10,5	50,0	20,0
19	Nusa Tenggara Timur	42	85,7	14,3	83,3	16,7
20	Kalimantan Barat	61	86,9	13,1	75,0	12,5
21	Kalimantan Tengah	29	75,9	24,1	100,0	14,3
22	Kalimantan Selatan	81	85,2	14,8	58,3	33,3
23	Kalimantan Timur	53	86,8	13,2	57,1	28,6
24	Kalimantan Utara	15	86,7	13,3	50,0	50,0
25	Sulawesi Utara	48	77,1	22,9	63,6	45,5
26	Sulawesi Tengah	80	90,0	10,0	75,0	37,5
27	Sulawesi Selatan	204	94,1	5,9	50,0	50,0
28	Sulawesi Tenggara	42	92,9	7,1	100,0	0,0
29	Gorontalo	24	83,3	16,7	25,0	75,0
30	Sulawesi Barat	28	92,9	7,1	50,0	0,0
31	Maluku	24	91,7	8,3	100,0	0,0
32	Maluku Utara	22	59,1	40,9	77,8	22,2
33	Papua Barat	20	90,0	10,0	100,0	50,0
34	Papua	20	85,0	15,0	0,0	66,7
INDONESIA		3.696	86,60	13,40	61,5	33,8

Tabel 10.8
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan sosialisasi PIS PK,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Sosialisasi PIS PK	
			Ya (%)	Tidak (%)
1	Aceh	195	82,1	17,9
2	Sumatera Utara	292	90,4	9,6
3	Sumatera Barat	109	99,1	0,9
4	Riau	88	84,1	15,9
5	Jambi	79	77,2	22,8
6	Sumatera Selatan	128	93,8	6,3
7	Bengkulu	51	92,2	7,8
8	Lampung	210	90,5	9,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	88,5	11,5
10	Kepulauan Riau	48	95,8	4,2
11	DKI Jakarta	93	62,4	37,6
12	Jawa Barat	352	84,7	15,3
13	Jawa Tengah	474	95,6	4,4
14	DI Yogyakarta	35	100,0	0,0
15	Jawa Timur	481	91,7	8,3
16	Banten	97	79,4	20,6
17	Bali	50	92,0	8,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	90,5	9,5
19	Nusa Tenggara Timur	42	100,0	0,0
20	Kalimantan Barat	61	75,4	24,6
21	Kalimantan Tengah	29	93,1	6,9
22	Kalimantan Selatan	81	91,4	8,6
23	Kalimantan Timur	53	75,5	24,5
24	Kalimantan Utara	15	80,0	20,0
25	Sulawesi Utara	48	93,8	6,3
26	Sulawesi Tengah	80	82,5	17,5
27	Sulawesi Selatan	204	92,2	7,8
28	Sulawesi Tenggara	42	97,6	2,4
29	Gorontalo	24	83,3	16,7
30	Sulawesi Barat	28	82,1	17,9
31	Maluku	24	79,2	20,8
32	Maluku Utara	22	86,4	13,6
33	Papua Barat	20	95,0	5,0
34	Papua	20	85,0	15,0
INDONESIA		3.696	88,9	11,1

Tabel 10.9
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah memasukkan PIS PK dalam RUK dan RPK
Puskesmas, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	PIS PK Masuk RUK dan RPK	
			Ya (%)	Tidak (%)
1	Aceh	195	50,8	49,2
2	Sumatera Utara	292	48,6	51,4
3	Sumatera Barat	109	50,5	49,5
4	Riau	88	42,0	58,0
5	Jambi	79	63,3	36,7
6	Sumatera Selatan	128	78,1	21,9
7	Bengkulu	51	54,9	45,1
8	Lampung	210	81,9	18,1
	Kepulauan Bangka			
9	Belitung	26	80,8	19,2
10	Kepulauan Riau	48	62,5	37,5
11	DKI Jakarta	93	36,6	63,4
12	Jawa Barat	352	66,8	33,2
13	Jawa Tengah	474	77,6	22,4
14	DI Yogyakarta	35	80,0	20,0
15	Jawa Timur	481	76,5	23,5
16	Banten	97	59,8	40,2
17	Bali	50	44,0	56,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	65,3	34,7
19	Nusa Tenggara Timur	42	52,4	47,6
20	Kalimantan Barat	61	49,2	50,8
21	Kalimantan Tengah	29	62,1	37,9
22	Kalimantan Selatan	81	54,3	45,7
23	Kalimantan Timur	53	47,2	52,8
24	Kalimantan Utara	15	60,0	40,0
25	Sulawesi Utara	48	43,8	56,3
26	Sulawesi Tengah	80	56,3	43,8
27	Sulawesi Selatan	204	77,0	23,0
28	Sulawesi Tenggara	42	54,8	45,2
29	Gorontalo	24	66,7	33,3
30	Sulawesi Barat	28	53,6	46,4
31	Maluku	24	66,7	33,3
32	Maluku Utara	22	45,5	54,5
33	Papua Barat	20	60,0	40,0
34	Papua	20	35,0	65,0
INDONESIA		3.696	64,4	35,6

Tabel 10.10
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut sumber anggaran PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tersedia Anggaran	Sumber Anggaran PIS PK						
				DAK	BOK	JKN	APBD	CSR	Lainnya	
1	Aceh	195	65,1	6,1	95,4	25,2	3,1	0,8	1,5	
2	Sumatera Utara	292	76,4	8,7	95,5	17,4	7,4	0,0	0,4	
3	Sumatera Barat	109	81,7	14,3	87,8	20,4	10,2	1,0	1,0	
4	Riau	88	63,6	22,6	88,7	22,6	8,1	3,2	6,5	
5	Jambi	79	74,7	8,2	100,0	18,0	18,0	3,3	0,0	
6	Sumatera Selatan	128	85,2	6,8	96,6	17,1	4,3	0,0	1,7	
7	Bengkulu	51	62,7	12,1	97,0	9,1	3,0	0,0	3,0	
8	Lampung	210	86,2	4,0	95,0	18,1	5,0	0,5	1,0	
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	92,3	16,0	72,0	24,0	0,0	0,0	4,0	
10	Kepulauan Riau	48	77,1	27,5	87,5	17,5	10,0	2,5	0,0	
11	DKI Jakarta	93	44,1	42,6	14,9	2,1	42,6	0,0	48,9	
12	Jawa Barat	352	75,3	12,1	90,7	24,1	9,3	0,3	6,8	
13	Jawa Tengah	474	88,2	8,2	90,8	15,3	12,0	0,9	8,6	
14	DI Yogyakarta	35	82,9	5,3	81,6	13,2	10,5	0,0	18,4	
15	Jawa Timur	481	87,3	6,2	92,1	29,2	10,4	1,0	3,1	
16	Banten	97	72,2	11,8	94,1	27,1	12,9	1,2	2,4	
17	Bali	50	70,0	22,9	71,4	42,9	17,1	2,9	11,4	
18	Nusa Tenggara Barat	95	75,8	13,3	78,7	44,0	8,0	2,7	10,7	
19	Nusa Tenggara Timur	42	61,9	20,6	91,2	50,0	8,8	0,0	0,0	
20	Kalimantan Barat	61	60,7	15,1	86,8	13,2	11,3	1,9	9,4	
21	Kalimantan Tengah	29	72,4	2,9	94,1	14,7	5,9	0,0	2,9	
22	Kalimantan Selatan	81	76,5	8,5	93,0	19,7	25,4	2,8	7,0	
23	Kalimantan Timur	53	62,3	19,5	80,5	24,4	2,4	4,9	2,4	
24	Kalimantan Utara	15	60,0	21,4	100,0	0,0	7,1	0,0	0,0	
25	Sulawesi Utara	48	62,5	19,4	87,1	32,3	6,5	0,0	0,0	
26	Sulawesi Tengah	80	67,5	8,9	94,6	10,7	7,1	1,8	5,4	
27	Sulawesi Selatan	204	87,7	2,9	95,2	20,5	5,2	0,0	1,0	
28	Sulawesi Tenggara	42	81,0	5,3	100,0	23,7	2,6	0,0	0,0	
29	Gorontalo	24	66,7	28,6	85,7	23,8	14,3	0,0	0,0	
30	Sulawesi Barat	28	75,0	4,3	100,0	21,7	8,7	0,0	0,0	
31	Maluku	24	83,3	0,0	100,0	8,7	0,0	4,3	4,3	
32	Maluku Utara	22	68,2	6,3	100,0	0,0	12,5	0,0	0,0	
33	Papua Barat	20	80,0	5,3	89,5	31,6	0,0	0,0	0,0	
34	Papua	20	60,0	15,8	89,5	10,5	15,8	5,3	21,1	
INDONESIA		3.696	77,7	9,7	90,8	21,5	9,5	0,9	4,8	

Tabel 10.11
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan dan jenis instrumen pendataan
PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tersedia Instrumen	Jenis Instrumen	
				Kuesioner manual	Aplikasi berbasis web
1	Aceh	195	80	98,7	58,3
2	Sumatera Utara	292	92,1	99,6	59,1
3	Sumatera Barat	109	98,2	99,1	65,4
4	Riau	88	81,8	97,2	54,2
5	Jambi	79	84,8	100,0	44,8
6	Sumatera Selatan	128	89,8	99,1	51,3
7	Bengkulu	51	90,2	95,7	32,6
8	Lampung	210	88,6	97,3	65,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	96,2	100,0	80,0
10	Kepulauan Riau	48	93,8	97,8	80,0
11	DKI Jakarta	93	69,9	73,8	75,4
12	Jawa Barat	352	81,0	97,2	62,1
13	Jawa Tengah	474	96,2	99,1	69,7
14	DI Yogyakarta	35	97,1	100,0	58,8
15	Jawa Timur	481	89,6	98,6	70,8
16	Banten	97	70,1	94,1	72,1
17	Bali	50	84,0	100,0	61,9
18	Nusa Tenggara Barat	95	92,6	97,7	68,2
19	Nusa Tenggara Timur	42	85,7	94,4	77,8
20	Kalimantan Barat	61	75,4	100,0	32,6
21	Kalimantan Tengah	29	100,0	96,6	58,6
22	Kalimantan Selatan	81	85,2	100,0	68,1
23	Kalimantan Timur	53	77,4	97,6	65,9
24	Kalimantan Utara	15	93,3	92,9	42,9
25	Sulawesi Utara	48	89,6	97,7	60,5
26	Sulawesi Tengah	80	85,0	98,5	50,0
27	Sulawesi Selatan	204	95,1	98,5	52,6
28	Sulawesi Tenggara	42	95,2	100,0	72,5
29	Gorontalo	24	79,2	94,7	57,9
30	Sulawesi Barat	28	71,4	90,0	50,0
31	Maluku	24	75,0	100,0	38,9
32	Maluku Utara	22	72,7	100,0	50,0
33	Papua Barat	20	85,0	100,0	35,3
34	Papua	20	95,0	94,7	31,6
INDONESIA		3.696	87,8	97,8	62,3

Tabel 10.12

Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan PINKESGA dan sumber pengadaannya, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Tersedia PINKESGA	Sumber Pengadaan				
				Puskesmas	Dinkes Kabupaten	Dinkes Provinsi	Kemenkes	Lainnya
1	Aceh	195	45,1	54,5	43,2	33,0	18,2	6,8
2	Sumatera Utara	292	46,2	42,2	51,1	28,1	24,4	11,1
3	Sumatera Barat	109	65,1	47,9	29,6	56,3	31,0	7,0
4	Riau	88	59,1	61,5	46,2	36,5	26,9	3,8
5	Jambi	79	39,2	41,9	51,6	38,7	16,1	3,2
6	Sumatera Selatan	128	60,9	67,9	44,9	25,6	23,1	9,0
7	Bengkulu	51	54,9	64,3	28,6	42,9	14,3	10,7
8	Lampung	210	53,8	67,3	53,1	25,7	28,3	5,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	57,7	33,3	20,0	60,0	20,0	0,0
10	Kepulauan Riau	48	66,7	59,4	9,4	25,0	21,9	3,1
11	DKI Jakarta	93	50,5	68,1	19,1	29,8	34,0	14,9
12	Jawa Barat	352	50,6	54,5	59,0	24,7	14,0	8,4
13	Jawa Tengah	474	64,3	63,3	44,6	24,3	20,0	5,9
14	DI Yogyakarta	35	68,6	75,0	29,2	16,7	12,5	12,5
15	Jawa Timur	481	73,2	63,1	49,4	17,0	13,6	8,2
16	Banten	97	58,8	35,1	52,6	38,6	17,5	7,0
17	Bali	50	68,0	67,6	23,5	23,5	8,8	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	71,6	54,4	36,8	51,5	17,6	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	42	50,0	57,1	14,3	33,3	23,8	4,8
20	Kalimantan Barat	61	52,5	46,9	43,8	25,0	12,5	3,1
21	Kalimantan Tengah	29	72,4	57,1	47,6	42,9	4,8	4,8
22	Kalimantan Selatan	81	74,1	56,7	43,3	31,7	8,3	11,7
23	Kalimantan Timur	53	50,9	70,4	25,9	18,5	11,1	7,4
24	Kalimantan Utara	15	73,3	45,5	36,4	45,5	9,1	0,0
25	Sulawesi Utara	48	62,5	53,3	36,7	33,3	36,7	13,3
26	Sulawesi Tengah	80	60,0	47,9	58,3	47,9	18,8	4,2
27	Sulawesi Selatan	204	56,9	56,9	54,3	26,7	19,0	5,2
28	Sulawesi Tenggara	42	69,0	72,4	27,6	34,5	17,2	3,4
29	Gorontalo	24	54,2	69,2	38,5	38,5	15,4	23,1
30	Sulawesi Barat	28	57,1	62,5	50,0	25,0	25,0	0,0
31	Maluku	24	50,0	41,7	50,0	58,3	33,3	8,3
32	Maluku Utara	22	40,9	55,6	0,0	44,4	22,2	0,0
33	Papua Barat	20	60,0	83,3	33,3	33,3	25,0	0,0
34	Papua	20	35,0	28,6	85,7	14,3	28,6	0,0
INDONESIA		3.696	58,8	58,1	44,8	29,0	19,1	7,0

Tabel 10.13
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan pembagian wilayah binaan, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ada pembagian wilayah	Tersedia pembina wilayah	Tersedia SK pembina wilayah
1	Aceh	195	78,5	48,2	37,2
2	Sumatera Utara	292	74,7	57,2	40,7
3	Sumatera Barat	109	93,6	80,7	62,5
4	Riau	88	78,4	64,8	64,9
5	Jambi	79	77,2	64,6	58,8
6	Sumatera Selatan	128	82,8	60,2	68,8
7	Bengkulu	51	78,4	64,7	69,7
8	Lampung	210	81,9	68,6	68,8
	Kepulauan Bangka				
9	Belitung	26	84,6	65,4	58,8
10	Kepulauan Riau	48	81,3	77,1	56,8
11	DKI Jakarta	93	73,1	48,4	44,4
12	Jawa Barat	352	84,4	62,2	56,2
13	Jawa Tengah	474	86,9	65,0	53,9
14	DI Yogyakarta	35	94,3	65,7	73,9
15	Jawa Timur	481	86,3	68,6	57,3
16	Banten	97	81,4	58,8	49,1
17	Bali	50	84,0	44,0	50,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	75,8	60,0	59,6
19	Nusa Tenggara Timur	42	85,7	54,8	47,8
20	Kalimantan Barat	61	68,9	50,8	51,6
21	Kalimantan Tengah	29	79,3	62,1	55,6
22	Kalimantan Selatan	81	75,3	59,3	50,0
23	Kalimantan Timur	53	66,0	54,7	48,3
24	Kalimantan Utara	15	73,3	40,0	66,7
25	Sulawesi Utara	48	91,7	58,3	60,7
26	Sulawesi Tengah	80	68,8	61,3	51,0
27	Sulawesi Selatan	204	81,9	63,7	52,3
28	Sulawesi Tenggara	42	88,1	83,3	42,9
29	Gorontalo	24	83,3	50,0	66,7
30	Sulawesi Barat	28	75,0	50,0	57,1
31	Maluku	24	79,2	62,5	20,0
32	Maluku Utara	22	77,3	59,1	38,5
33	Papua Barat	20	65,0	55,0	54,5
34	Papua	20	60,0	45,0	44,4
INDONESIA		3.696	81,5	62,1	54,7

Tabel 10.14

Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan pengumpulan data dan petugas pengumpul data PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Dilakukan Pengumpulan Data	Petugas Pengumpul Data PIS PK						
				Petugas Puskesmas	Bidan Desa	Kader	Mahasiswa Kesehatan	Mahasiswa non kesehatan	Tim NS	Lainnya
1	Aceh	195	96,4	4,6	69,7	54,4	2,6	69,7	5,1	4,6
2	Sumatera Utara	292	93,5	8,6	72,3	42,8	3,4	72,3	2,1	4,5
3	Sumatera Barat	109	98,2	9,2	89,0	45,9	11,0	89,0	0,9	0,9
4	Riau	88	95,5	13,6	73,9	61,4	10,2	73,9	6,8	1,1
5	Jambi	79	97,5	7,6	77,2	48,1	3,8	77,2	1,3	1,3
6	Sumatera Selatan	128	97,7	7,0	82,8	68,8	8,6	82,8	3,1	6,3
7	Bengkulu	51	94,1	0,0	70,6	78,4	5,9	70,6	0,0	5,9
8	Lampung	210	97,1	9,5	84,3	52,4	3,3	84,3	4,3	2,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	100,0	0,0	88,5	57,7	7,7	88,5	0,0	19,2
10	Kepulauan Riau	48	93,8	8,3	77,1	43,8	18,8	77,1	4,2	4,2
11	DKI Jakarta	93	86,0	1,1	8,6	38,7	6,5	8,6	0,0	8,6
12	Jawa Barat	352	92,9	6,5	61,6	52,3	11,1	61,6	3,1	7,1
13	Jawa Tengah	474	93,0	6,5	74,1	59,7	10,5	74,1	0,0	12,5
14	DI Yogyakarta	35	100,0	11,4	48,6	48,6	14,3	48,6	0,0	17,1
15	Jawa Timur	481	94,6	9,6	79,6	62,0	13,9	79,6	4,2	8,9
16	Banten	97	89,7	7,2	76,3	60,8	14,4	76,3	0,0	10,3
17	Bali	50	92,0	2,0	62,0	54,0	12,0	62,0	0,0	14,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	98,9	7,4	60,0	32,6	1,1	60,0	5,3	1,1
19	Nusa Tenggara Timur	42	97,6	7,1	78,6	52,4	9,5	78,6	9,5	7,1
20	Kalimantan Barat	61	86,9	4,9	55,7	39,3	13,1	55,7	6,6	9,8
21	Kalimantan Tengah	29	96,6	3,4	69,0	44,8	0,0	69,0	3,4	3,4
22	Kalimantan Selatan	81	96,3	7,4	82,7	56,8	27,2	82,7	4,9	6,2
23	Kalimantan Timur	53	94,3	13,2	49,1	50,9	17,0	49,1	9,4	15,1
24	Kalimantan Utara	15	100,0	6,7	53,3	40,0	0,0	53,3	6,7	6,7
25	Sulawesi Utara	48	100,0	4,2	60,4	58,3	12,5	60,4	6,3	6,3
26	Sulawesi Tengah	80	95,0	6,3	72,5	57,5	6,3	72,5	2,5	1,3
27	Sulawesi Selatan	204	98,5	8,8	74,5	49,0	4,4	74,5	4,9	3,4
28	Sulawesi Tenggara	42	97,6	7,1	69,0	42,9	14,3	69,0	9,5	4,8
29	Gorontalo	24	100,0	4,2	91,7	54,2	4,2	91,7	4,2	16,7
30	Sulawesi Barat	28	96,4	0,0	78,6	50,0	7,1	78,6	21,4	3,6
31	Maluku	24	100,0	0,0	45,8	33,3	0,0	45,8	12,5	4,2
32	Maluku Utara	22	95,5	0,0	77,3	40,9	0,0	77,3	9,1	0,0
33	Papua Barat	20	90,0	10,0	40,0	30,0	5,0	40,0	10,0	10,0
34	Papua	20	95,0	15,0	30,0	20,0	10,0	30,0	20,0	5,0
INDONESIA		3.696	94,9	7,3	71,1	53,2	9,0	71,1	4,1	6,3

Tabel 10.15
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK menurut ketersediaan petugas khusus untuk analisis data PIS PK,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Petugas Analisis Data PIS PK	Jenis Petugas Analisis Data PIS PK				
				Petugas Puskesmas Yang Dilatih PIS PK	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Mahasiswa Kesehatan	Mahasiswa non kesehatan	Lainnya
1	Aceh	195	61,0	98,3	26,1	1,7	0,8	1,7
2	Sumatera Utara	292	56,5	97,0	28,5	3,0	1,2	3,6
3	Sumatera Barat	109	57,8	98,4	23,8	1,6	3,2	4,8
4	Riau	88	60,2	100,0	30,2	7,5	3,8	1,9
5	Jambi	79	54,4	100,0	20,9	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	128	66,4	97,6	30,6	1,2	0,0	1,2
7	Bengkulu	51	74,5	100,0	15,8	0,0	0,0	7,9
8	Lampung	210	69,5	99,3	25,3	4,1	2,1	2,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	53,8	100,0	28,6	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	48	75,0	100,0	25,0	2,8	8,3	2,8
11	DKI Jakarta	93	34,4	96,9	15,6	0,0	0,0	3,1
12	Jawa Barat	352	57,7	99,0	30,0	3,0	2,0	2,5
13	Jawa Tengah	474	71,7	97,1	16,5	2,9	0,9	5,3
14	DI Yogyakarta	35	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	481	66,3	97,5	19,1	3,4	0,9	3,1
16	Banten	97	55,7	96,3	24,1	0,0	1,9	3,7
17	Bali	50	66,0	97,0	9,1	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	78,9	96,0	26,7	4,0	0,0	2,7
19	Nusa Tenggara Timur	42	76,2	96,9	15,6	3,1	3,1	0,0
20	Kalimantan Barat	61	44,3	100,0	11,1	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	29	69,0	100,0	35,0	0,0	5,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	81	70,4	100,0	19,3	12,3	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	53	58,5	80,6	22,6	9,7	0,0	16,1
24	Kalimantan Utara	15	73,3	100,0	27,3	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Utara	48	75,0	94,4	13,9	0,0	0,0	2,8
26	Sulawesi Tengah	80	66,3	100,0	7,5	1,9	1,9	1,9
27	Sulawesi Selatan	204	67,6	98,6	15,2	1,4	1,4	2,9
28	Sulawesi Tenggara	42	66,7	100,0	21,4	3,6	0,0	0,0
29	Gorontalo	24	45,8	100,0	36,4	9,1	0,0	0,0
30	Sulawesi Barat	28	78,6	95,5	18,2	0,0	0,0	0,0
31	Maluku	24	66,7	100,0	0,0	0,0	6,3	0,0
32	Maluku Utara	22	63,6	100,0	7,1	7,1	0,0	7,1
33	Papua Barat	20	65,0	100,0	23,1	0,0	7,7	0,0
34	Papua	20	50,0	90,0	50,0	10,0	20,0	10,0
INDONESIA		3.696	63,8	97,8	21,5	2,9	1,4	3,0

Tabel 10.16
Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang telah melakukan interpretasi data,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Dilakukan Interpretasi Data PIS PK	Petugas Interpretasi dan penentuan prioritas masalah	
				Penanggungjawab kegiatan PIS PK	Petugas Puskesmas yg dilatih
1	Aceh	195	77,4	86,8	88,1
2	Sumatera Utara	292	74,7	78,4	80,7
3	Sumatera Barat	109	76,1	75,9	84,3
4	Riau	88	71,6	79,4	82,5
5	Jambi	79	65,8	69,2	84,6
6	Sumatera Selatan	128	79,7	83,3	88,2
7	Bengkulu	51	82,4	71,4	88,1
8	Lampung	210	83,8	78,4	84,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	80,8	57,1	90,5
10	Kepulauan Riau	48	77,1	86,5	91,9
11	DKI Jakarta	93	69,9	61,5	86,2
12	Jawa Barat	352	72,7	81,3	84,4
13	Jawa Tengah	474	80,8	84,1	79,1
14	DI Yogyakarta	35	62,9	72,7	90,9
15	Jawa Timur	481	76,3	77,4	83,9
16	Banten	97	75,3	82,2	87,7
17	Bali	50	82,0	75,6	87,8
18	Nusa Tenggara Barat	95	63,2	81,7	93,3
19	Nusa Tenggara Timur	42	78,6	69,7	84,8
20	Kalimantan Barat	61	67,2	78,0	82,9
21	Kalimantan Tengah	29	65,5	94,7	73,7
22	Kalimantan Selatan	81	66,7	83,3	88,9
23	Kalimantan Timur	53	66,0	71,4	74,3
24	Kalimantan Utara	15	86,7	76,9	92,3
25	Sulawesi Utara	48	81,3	84,6	82,1
26	Sulawesi Tengah	80	76,3	77,0	90,2
27	Sulawesi Selatan	204	84,8	77,5	89,6
28	Sulawesi Tenggara	42	88,1	67,6	83,8
29	Gorontalo	24	83,3	80,0	85,0
30	Sulawesi Barat	28	78,6	63,6	95,5
31	Maluku	24	79,2	84,2	84,2
32	Maluku Utara	22	68,2	66,7	86,7
33	Papua Barat	20	75,0	73,3	53,3
34	Papua	20	65,0	76,9	53,8
INDONESIA		3.696	76,3	78,9	84,3

Tabel 10.17

Persentase Puskesmas sudah dilatih PIS PK yang melaksanakan lokakarya mini bulanan, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Lokakarya Mini Bulanan	
			Ada dokumen	Tidak ada dokumen
1	Aceh	195	87,2	11,3
2	Sumatera Utara	292	86,0	11,6
3	Sumatera Barat	109	90,8	7,3
4	Riau	88	67,0	11,4
5	Jambi	79	96,2	3,8
6	Sumatera Selatan	128	93,0	7,0
7	Bengkulu	51	88,2	11,8
8	Lampung	210	95,2	2,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	92,3	0,0
10	Kepulauan Riau	48	89,6	2,1
11	DKI Jakarta	93	84,9	7,5
12	Jawa Barat	352	93,2	5,7
13	Jawa Tengah	474	94,3	4,2
14	DI Yogyakarta	35	94,3	2,9
15	Jawa Timur	481	95,6	3,1
16	Banten	97	90,7	5,2
17	Bali	50	94,0	6,0
18	Nusa Tenggara Barat	95	92,6	3,2
19	Nusa Tenggara Timur	42	95,2	2,4
20	Kalimantan Barat	61	86,9	6,6
21	Kalimantan Tengah	29	89,7	6,9
22	Kalimantan Selatan	81	95,1	4,9
23	Kalimantan Timur	53	77,4	17,0
24	Kalimantan Utara	15	86,7	6,7
25	Sulawesi Utara	48	91,7	8,3
26	Sulawesi Tengah	80	66,3	30,0
27	Sulawesi Selatan	204	96,1	3,9
28	Sulawesi Tenggara	42	97,6	0,0
29	Gorontalo	24	95,8	0,0
30	Sulawesi Barat	28	100,0	0,0
31	Maluku	24	75,0	12,5
32	Maluku Utara	22	86,4	9,1
33	Papua Barat	20	80,0	20,0
34	Papua	20	80,0	10,0
INDONESIA		3.696	90,9	6,5

Tabel 10.18
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan rencana kerja tahunan,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Rencana kerja tahunan Puskesmas
1	Aceh	138	62,3
2	Sumatera Utara	256	73,0
3	Sumatera Barat	142	81,7
4	Riau	110	77,3
5	Jambi	95	87,4
6	Sumatera Selatan	180	82,8
7	Bengkulu	126	81,7
8	Lampung	57	75,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	82,9
10	Kepulauan Riau	19	78,9
11	DKI Jakarta	198	52,5
12	Jawa Barat	620	77,9
13	Jawa Tengah	350	81,4
14	DI Yogyakarta	76	65,8
15	Jawa Timur	368	89,1
16	Banten	111	64,9
17	Bali	70	87,1
18	Nusa Tenggara Barat	60	65,0
19	Nusa Tenggara Timur	311	84,2
20	Kalimantan Barat	159	80,5
21	Kalimantan Tengah	150	76,7
22	Kalimantan Selatan	137	74,5
23	Kalimantan Timur	112	71,4
24	Kalimantan Utara	25	68,0
25	Sulawesi Utara	136	75,0
26	Sulawesi Tengah	104	82,7
27	Sulawesi Selatan	209	82,8
28	Sulawesi Tenggara	221	73,3
29	Gorontalo	61	70,5
30	Sulawesi Barat	62	80,6
31	Maluku	171	86,0
32	Maluku Utara	104	65,4
33	Papua Barat	125	56,0
34	Papua	344	47,4
INDONESIA		5.442	75,1

Tabel 10.19
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan dokumen perencanaan tahunan,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Dokumen perencanaan tahunan Puskesmas	
			RUK	RPK
1	Aceh	86	90,7	81,4
2	Sumatera Utara	187	65,8	64,7
3	Sumatera Barat	116	92,2	87,1
4	Riau	85	91,8	90,6
5	Jambi	83	96,4	91,6
6	Sumatera Selatan	149	94,0	88,6
7	Bengkulu	103	88,3	86,4
8	Lampung	43	95,3	93,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	96,6	89,7
10	Kepulauan Riau	15	66,7	66,7
11	DKI Jakarta	104	82,7	80,8
12	Jawa Barat	483	95,4	93,4
13	Jawa Tengah	285	93,7	93,7
14	DI Yogyakarta	50	96,0	98,0
15	Jawa Timur	328	96,3	96,0
16	Banten	72	97,2	95,8
17	Bali	61	98,4	98,4
18	Nusa Tenggara Barat	39	82,1	87,2
19	Nusa Tenggara Timur	262	98,1	89,7
20	Kalimantan Barat	128	94,5	91,4
21	Kalimantan Tengah	115	96,5	91,3
22	Kalimantan Selatan	102	90,2	89,2
23	Kalimantan Timur	80	91,3	82,5
24	Kalimantan Utara	17	88,2	88,2
25	Sulawesi Utara	102	81,4	76,5
26	Sulawesi Tengah	86	76,7	68,6
27	Sulawesi Selatan	173	95,4	94,2
28	Sulawesi Tenggara	162	93,2	90,7
29	Gorontalo	43	93,0	95,3
30	Sulawesi Barat	50	86,0	94,0
31	Maluku	147	88,4	84,4
32	Maluku Utara	68	91,2	89,7
33	Papua Barat	70	78,6	67,1
34	Papua	163	79,8	77,9
INDONESIA		4.086	90,8	88,0

Tabel 10.20

Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sumber anggaran kegiatan Puskesmas, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Sumber anggaran					
			DAK	BOK	JKN	APBD	CSR	Lain-lain
1	Aceh	86	40,7	94,2	83,7	50,0	-	2,3
2	Sumatera Utara	187	35,3	90,9	81,8	29,9	2,1	1,1
3	Sumatera Barat	116	56,9	91,4	94,0	79,3	2,6	3,4
4	Riau	85	34,1	89,4	75,3	51,8	5,9	3,5
5	Jambi	83	44,6	96,4	83,1	71,1	6,0	10,8
6	Sumatera Selatan	149	30,9	99,3	77,2	37,6	3,4	3,4
7	Bengkulu	103	30,1	96,1	83,5	38,8	4,9	1,9
8	Lampung	43	23,3	97,7	86,0	41,9	4,7	7,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	34,5	100,0	62,1	58,6	3,4	6,9
10	Kepulauan Riau	15	53,3	100,0	80,0	66,7	-	-
11	DKI Jakarta	104	75,0	34,6	30,8	55,8	3,8	18,3
12	Jawa Barat	483	46,4	93,6	82,4	60,0	5,6	5,8
13	Jawa Tengah	285	46,7	94,0	86,0	71,2	2,8	9,1
14	DI Yogyakarta	50	48,0	98,0	46,0	56,0	6,0	28,0
15	Jawa Timur	328	36,6	96,3	75,3	55,2	5,8	6,1
16	Banten	72	40,3	90,3	75,0	59,7	6,9	11,1
17	Bali	61	44,3	98,4	91,8	78,7	1,6	8,2
18	Nusa Tenggara Barat	39	38,5	94,9	79,5	35,9	-	7,7
19	Nusa Tenggara Timur	262	58,8	91,2	91,6	46,9	5,0	4,6
20	Kalimantan Barat	128	43,8	96,9	81,3	71,1	3,9	4,7
21	Kalimantan Tengah	115	50,4	94,8	76,5	62,6	7,0	3,5
22	Kalimantan Selatan	102	65,7	83,3	80,4	82,4	8,8	4,9
23	Kalimantan Timur	80	66,3	87,5	75,0	82,5	8,8	3,8
24	Kalimantan Utara	17	58,8	88,2	88,2	76,5	5,9	-
25	Sulawesi Utara	102	52,9	98,0	87,3	65,7	1,0	3,9
26	Sulawesi Tengah	86	39,5	98,8	82,6	36,0	2,3	10,5
27	Sulawesi Selatan	173	46,8	96,0	90,2	53,8	4,0	6,9
28	Sulawesi Tenggara	162	36,4	96,9	82,7	50,6	3,7	3,1
29	Gorontalo	43	62,8	95,3	95,3	67,4	4,7	2,3
30	Sulawesi Barat	50	20,0	98,0	80,0	20,0	2,0	-
31	Maluku	147	23,8	95,9	82,3	46,9	2,7	1,4
32	Maluku Utara	68	19,1	98,5	69,1	57,4	2,9	1,5
33	Papua Barat	70	30,0	90,0	72,9	42,9	10,0	5,7
34	Papua	163	39,9	93,3	79,8	51,5	4,9	8,0
INDONESIA		4.086	43,7	92,8	80,5	55,9	4,4	5,8

Tabel 10.21
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sumber data yang digunakan untuk perencanaan kegiatan Puskesmas, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Sumber data	
			Dinkes Kab/Kota	Hasil analisis Puskesmas
1	Aceh	86	69,8	87,2
2	Sumatera Utara	187	65,2	79,7
3	Sumatera Barat	116	78,4	87,9
4	Riau	85	74,1	85,9
5	Jambi	83	73,5	92,8
6	Sumatera Selatan	149	69,8	83,2
7	Bengkulu	103	66,0	86,4
8	Lampung	43	65,1	95,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	69,0	89,7
10	Kepulauan Riau	15	60,0	86,7
11	DKI Jakarta	104	50,0	82,7
12	Jawa Barat	483	64,4	90,7
13	Jawa Tengah	285	71,6	91,2
14	DI Yogyakarta	50	60,0	86,0
15	Jawa Timur	328	64,9	91,2
16	Banten	72	59,7	80,6
17	Bali	61	77,0	90,2
18	Nusa Tenggara Barat	39	66,7	92,3
19	Nusa Tenggara Timur	262	50,8	91,6
20	Kalimantan Barat	128	74,2	88,3
21	Kalimantan Tengah	115	80,9	82,6
22	Kalimantan Selatan	102	78,4	91,2
23	Kalimantan Timur	80	81,3	86,3
24	Kalimantan Utara	17	70,6	100,0
25	Sulawesi Utara	102	67,6	82,4
26	Sulawesi Tengah	86	65,1	83,7
27	Sulawesi Selatan	173	57,8	91,9
28	Sulawesi Tenggara	162	51,9	87,7
29	Gorontalo	43	41,9	97,7
30	Sulawesi Barat	50	62,0	92,0
31	Maluku	147	51,7	89,8
32	Maluku Utara	68	36,8	88,2
33	Papua Barat	70	58,6	68,6
34	Papua	163	64,4	69,9
INDONESIA		4.086	64,5	87,4

Tabel 10.22

Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut tenaga pengumpul data PIS PK, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Pengumpul data					
			Petugas Puskesmas	Bidan desa	Kader	Mahasiswa	Tim NS	Lainnya
1	Aceh	86	98,7	78,7	44,0	2,7	5,3	6,7
2	Sumatera Utara	187	98,0	5,8	50,3	1,3	6,7	1,3
3	Sumatera Barat	116	99,0	86,3	49,0	8,8	4,9	3,9
4	Riau	85	95,9	78,1	57,5	1,4	4,1	2,7
5	Jambi	83	100,0	85,7	66,2	1,3	-	1,3
6	Sumatera Selatan	149	100,0	82,3	61,3	2,4	2,4	3,2
7	Bengkulu	103	100,0	64,0	42,7	3,4	4,5	2,2
8	Lampung	43	100,0	70,7	51,2	2,4	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	100,0	73,1	53,8	7,7	3,8	3,8
10	Kepulauan Riau	15	100,0	76,9	53,8	7,7	15,4	7,7
11	DKI Jakarta	104	100,0	11,6	31,4	1,2	-	3,5
12	Jawa Barat	483	98,9	73,1	48,2	4,6	1,8	2,3
13	Jawa Tengah	285	96,5	77,3	55,4	5,0	3,8	7,3
14	DI Yogyakarta	50	93,0	51,2	60,5	9,3	4,7	7,0
15	Jawa Timur	328	97,7	81,3	51,2	4,0	3,0	5,0
16	Banten	72	94,8	53,4	43,1	8,6	1,7	6,9
17	Bali	61	100,0	90,9	50,9	5,5	1,8	9,1
18	Nusa Tenggara Barat	39	100,0	61,1	38,9	-	-	2,8
19	Nusa Tenggara Timur	262	99,2	86,3	62,1	2,1	10,8	6,7
20	Kalimantan Barat	128	99,1	74,3	49,6	5,3	7,1	8,0
21	Kalimantan Tengah	115	100,0	81,1	48,4	2,1	1,1	4,2
22	Kalimantan Selatan	102	98,9	76,3	45,2	6,5	7,5	3,2
23	Kalimantan Timur	80	100,0	56,5	52,2	4,3	1,4	1,4
24	Kalimantan Utara	17	100,0	52,9	52,9	5,9	29,4	5,9
25	Sulawesi Utara	102	98,8	59,5	47,6	4,8	7,1	-
26	Sulawesi Tengah	86	98,6	80,6	43,1	1,4	-	-
27	Sulawesi Selatan	173	96,9	62,9	42,8	2,5	2,5	3,8
28	Sulawesi Tenggara	162	99,3	77,5	51,4	3,5	4,2	1,4
29	Gorontalo	43	100,0	71,4	52,4	-	2,4	7,1
30	Sulawesi Barat	50	100,0	91,3	63,0	-	13,0	4,3
31	Maluku	147	99,2	53,0	47,0	6,8	12,9	2,3
32	Maluku Utara	68	100,0	78,3	43,3	5,0	5,0	3,3
33	Papua Barat	70	100,0	47,9	31,3	-	16,7	6,3
34	Papua	163	96,5	49,1	36,0	2,6	8,8	2,6
INDONESIA		4.086	98,5	72,0	49,9	3,8	4,8	3,9

Tabel 10.23

Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK menurut ketersediaan petugas khusus analisis data PIS PK dan keterlibatan PJ program dalam perencanaan, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Petugas khusus analisis data	Keterlibatan PJ program dalam penyusunan perencanaan
1	Aceh	86	55,8	93,0
2	Sumatera Utara	187	1,7	90,4
3	Sumatera Barat	116	29,3	95,7
4	Riau	85	50,6	91,8
5	Jambi	83	44,6	95,2
6	Sumatera Selatan	149	50,3	91,9
7	Bengkulu	103	41,7	95,1
8	Lampung	43	48,8	95,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	51,7	100,0
10	Kepulauan Riau	15	46,7	86,7
11	DKI Jakarta	104	25,0	86,5
12	Jawa Barat	483	49,1	95,4
13	Jawa Tengah	285	55,1	96,5
14	DI Yogyakarta	50	64,0	92,0
15	Jawa Timur	328	61,0	97,9
16	Banten	72	48,6	94,4
17	Bali	61	50,8	96,7
18	Nusa Tenggara Barat	39	64,1	87,2
19	Nusa Tenggara Timur	262	41,2	95,0
20	Kalimantan Barat	128	44,5	94,5
21	Kalimantan Tengah	115	47,0	93,9
22	Kalimantan Selatan	102	54,9	95,1
23	Kalimantan Timur	80	53,8	91,3
24	Kalimantan Utara	17	35,3	100,0
25	Sulawesi Utara	102	35,3	83,3
26	Sulawesi Tengah	86	48,8	91,9
27	Sulawesi Selatan	173	57,8	98,3
28	Sulawesi Tenggara	162	47,5	93,2
29	Gorontalo	43	62,8	95,3
30	Sulawesi Barat	50	56,0	96,0
31	Maluku	147	41,5	91,8
32	Maluku Utara	68	35,3	95,6
33	Papua Barat	70	38,6	78,6
34	Papua	163	31,3	77,3
INDONESIA		4.086	47,5	93,2

Tabel 10.24
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan pembahasan perencanaan kegiatan
Puskesmas, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Dibahas saat Musrenbang	Dibahas dengan perencanaan Dinkes Kab/Kota
1	Aceh	86	68,6	86,0
2	Sumatera Utara	187	66,3	87,7
3	Sumatera Barat	116	80,2	94,8
4	Riau	85	74,1	89,4
5	Jambi	83	84,3	90,4
6	Sumatera Selatan	149	69,8	85,9
7	Bengkulu	103	68,0	86,4
8	Lampung	43	74,4	83,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	89,7	96,6
10	Kepulauan Riau	15	66,7	73,3
11	DKI Jakarta	104	76,0	70,2
12	Jawa Barat	483	87,8	90,9
13	Jawa Tengah	285	86,3	83,9
14	DI Yogyakarta	50	84,0	88,0
15	Jawa Timur	328	84,8	91,2
16	Banten	72	83,3	88,9
17	Bali	61	85,2	91,8
18	Nusa Tenggara Barat	39	69,2	79,5
19	Nusa Tenggara Timur	262	80,5	90,5
20	Kalimantan Barat	128	76,6	85,2
21	Kalimantan Tengah	115	76,5	80,9
22	Kalimantan Selatan	102	74,5	85,3
23	Kalimantan Timur	80	57,5	82,5
24	Kalimantan Utara	17	76,5	76,5
25	Sulawesi Utara	102	77,5	87,3
26	Sulawesi Tengah	86	77,9	83,7
27	Sulawesi Selatan	173	83,2	95,4
28	Sulawesi Tenggara	162	66,7	88,3
29	Gorontalo	43	83,7	93,0
30	Sulawesi Barat	50	78,0	92,0
31	Maluku	147	55,1	76,9
32	Maluku Utara	68	63,2	94,1
33	Papua Barat	70	51,4	77,1
34	Papua	163	49,7	76,7
INDONESIA		4.086	76,0	86,9

Tabel 10.25
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan kegiatan apel pagi dan apel sore,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Apel pagi	Apel sore
1	Aceh	138	92,0	39,9
2	Sumatera Utara	256	73,0	36,3
3	Sumatera Barat	142	86,6	13,4
4	Riau	110	90,0	50,0
5	Jambi	95	89,5	54,7
6	Sumatera Selatan	180	73,9	22,8
7	Bengkulu	126	70,6	39,7
8	Lampung	57	71,9	14,0
	Kepulauan Bangka			
9	Belitung	35	77,1	51,4
10	Kepulauan Riau	19	63,2	31,6
11	DKI Jakarta	198	35,9	0,5
12	Jawa Barat	620	81,1	30,5
13	Jawa Tengah	350	96,0	31,7
14	DI Yogyakarta	76	98,7	26,3
15	Jawa Timur	368	89,9	25,8
16	Banten	111	75,7	5,4
17	Bali	70	85,7	17,1
18	Nusa Tenggara Barat	60	80,0	48,3
19	Nusa Tenggara Timur	311	76,5	35,0
20	Kalimantan Barat	159	52,8	27,7
21	Kalimantan Tengah	150	52,0	19,3
22	Kalimantan Selatan	137	67,2	30,7
23	Kalimantan Timur	112	58,9	11,6
24	Kalimantan Utara	25	84,0	20,0
25	Sulawesi Utara	136	78,7	61,8
26	Sulawesi Tengah	104	82,7	76,0
27	Sulawesi Selatan	209	64,1	40,2
28	Sulawesi Tenggara	221	54,8	33,9
29	Gorontalo	61	93,4	57,4
30	Sulawesi Barat	62	61,3	32,3
31	Maluku	171	62,0	45,0
32	Maluku Utara	104	49,0	32,7
33	Papua Barat	125	27,2	14,4
34	Papua	344	20,3	8,4
INDONESIA		5442	70,1	30,1

Tabel 10.26
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang membahas kegiatan PIS-PK dalam lokakarya mini bulanan dan triwulan,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Lokakarya Mini Bulanan			Lokakarya Mini Triwulan			
			Ya, ada dokumen	Ya, tidak ada dokumen	Terdapat materi PIS-PK	Ya, ada dokumen	Ya, tidak ada dokumen	Melibatkan lintas sektor	Terdapat pembahasan PIS-PK
1	Aceh	138	74,6	14,5	40,7	73,2	15,2	73,8	27,8
2	Sumatera Utara	256	80,1	16,4	46,2	38,3	16,8	51,8	35,0
3	Sumatera Barat	142	93,7	4,2	42,4	81,7	5,6	80,6	38,2
4	Riau	110	79,1	11,8	39,0	67,3	13,6	67,4	44,9
5	Jambi	95	94,7	3,2	33,3	77,9	5,3	91,1	29,3
6	Sumatera Selatan	180	92,8	3,3	59,0	56,7	9,4	73,9	50,0
7	Bengkulu	126	94,4	5,6	39,7	69,8	7,9	86,7	33,3
8	Lampung	57	94,7	3,5	42,9	68,4	14,0	83,0	34,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	94,3	0,0	75,8	82,9	2,9	83,3	69,2
10	Kepulauan Riau	19	68,4	5,3	57,1	68,4	10,5	73,3	23,1
11	DKI Jakarta	198	81,8	12,1	33,3	45,5	8,6	58,9	35,9
12	Jawa Barat	620	93,9	5,0	58,6	82,6	7,3	85,3	52,4
13	Jawa Tengah	350	94,6	3,4	49,9	84,9	4,0	91,3	42,4
14	DI Yogyakarta	76	100,0	0,0	65,8	97,4	2,6	97,4	58,1
15	Jawa Timur	368	97,0	1,4	70,4	90,5	1,1	94,7	62,1
16	Banten	111	94,6	2,7	50,9	91,0	2,7	92,3	44,1
17	Bali	70	97,1	2,9	47,1	95,7	2,9	97,1	27,5
18	Nusa Tenggara Barat	60	81,7	15,0	20,7	48,3	16,7	61,5	20,6
19	Nusa Tenggara Timur	311	97,1	1,9	46,4	74,9	5,5	80,0	37,7
20	Kalimantan Barat	159	75,5	13,2	44,0	76,7	10,1	81,9	38,2
21	Kalimantan Tengah	150	79,3	6,7	39,5	78,0	10,0	82,6	27,5
22	Kalimantan Selatan	137	96,4	3,6	48,9	74,5	3,6	91,6	39,2
23	Kalimantan Timur	112	83,0	10,7	39,0	62,5	12,5	66,7	41,1
24	Kalimantan Utara	25	88,0	8,0	29,2	72,0	20,0	78,3	28,6
25	Sulawesi Utara	136	86,8	5,9	36,5	63,2	15,4	64,5	31,8
26	Sulawesi Tengah	104	76,0	22,1	58,8	39,4	21,2	52,4	50,0
27	Sulawesi Selatan	209	97,1	2,4	51,0	89,5	3,3	91,8	47,1
28	Sulawesi Tenggara	221	89,6	9,5	43,8	62,0	11,3	71,0	37,6
29	Gorontalo	61	90,2	9,8	44,3	85,2	8,2	91,2	33,3
30	Sulawesi Barat	62	85,5	11,3	56,7	79,0	9,7	89,1	40,4
31	Maluku	171	62,0	15,8	30,8	54,4	17,0	47,5	24,1
32	Maluku Utara	104	90,4	8,7	21,4	61,5	16,3	65,4	23,9
33	Papua Barat	125	66,4	18,4	24,5	51,2	24,0	52,1	19,4
34	Papua	344	45,9	21,8	18,9	30,8	24,4	37,9	20,1
INDONESIA		5.442	85,8	8,2	46,4	69,4	10,0	77,9	41,0

Tabel 10.27
Persentase Puskesmas belum dilatih PIS PK yang melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas,
Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Supervisi/ Bimbingan teknis	Umpan balik dari Dinkes Kab/Kota	Pertemuan monev di Dinkes Kab/Kota	Penilaian kinerja	Pembahasan hasil penilaian kinerja	Hasil penilaian kinerja dikirim ke Dinkes Kab/Kota	Umpan balik dari Dinkes Kab/Kota tentang hasil penilaian kinerja Puskesmas
1	Aceh	138	85,5	87,3	91,3	84,8	95,7	86,3	74,4
2	Sumatera Utara	256	77,7	79,4	82,4	77,3	89,9	81,8	68,7
3	Sumatera Barat	142	93,7	84,2	97,9	93,7	90,2	88,0	66,2
4	Riau	110	91,8	82,2	90,9	87,3	90,6	84,4	66,7
5	Jambi	95	93,7	88,8	96,8	93,7	95,5	88,8	79,8
6	Sumatera Selatan	180	92,8	86,2	92,2	86,1	94,2	90,3	78,7
7	Bengkulu	126	93,7	83,1	92,9	81,7	93,2	90,3	74,8
8	Lampung	57	94,7	83,3	91,2	89,5	88,2	82,4	60,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	94,3	93,9	94,3	88,6	90,3	83,9	64,5
10	Kepulauan Riau	19	78,9	86,7	73,7	84,2	93,8	81,3	56,3
11	DKI Jakarta	198	67,2	80,5	71,2	82,8	88,4	68,3	58,5
12	Jawa Barat	620	92,7	91,1	96,0	93,2	93,3	95,5	78,9
13	Jawa Tengah	350	93,1	90,8	94,6	92,9	94,2	95,4	71,7
14	DI Yogyakarta	76	98,7	86,7	100,0	98,7	98,7	100,0	82,7
15	Jawa Timur	368	92,7	93,0	95,7	96,7	98,0	96,6	85,1
16	Banten	111	95,5	99,1	97,3	95,5	97,2	89,6	80,2
17	Bali	70	90,0	85,7	94,3	94,3	90,9	93,9	65,2
18	Nusa Tenggara Barat	60	78,3	85,1	83,3	66,7	92,5	92,5	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	311	96,5	88,7	96,8	83,6	95,8	89,2	78,5
20	Kalimantan Barat	159	89,9	94,4	92,5	87,4	84,2	84,2	65,5
21	Kalimantan Tengah	150	93,3	86,4	90,0	82,0	83,7	86,2	64,2
22	Kalimantan Selatan	137	97,1	85,0	97,1	81,0	85,6	91,9	61,3
23	Kalimantan Timur	112	84,8	85,3	87,5	80,4	88,9	86,7	60,0
24	Kalimantan Utara	25	68,0	76,5	76,0	76,0	94,7	100,0	63,2
25	Sulawesi Utara	136	91,2	91,1	97,1	91,2	91,1	88,7	76,6
26	Sulawesi Tengah	104	93,3	75,3	88,5	79,8	80,7	74,7	53,0
27	Sulawesi Selatan	209	97,6	91,7	98,1	94,7	96,0	95,5	73,7
28	Sulawesi Tenggara	221	93,7	87,0	94,6	80,5	88,8	75,3	64,6
29	Gorontalo	61	88,5	92,6	90,2	86,9	92,5	90,6	75,5
30	Sulawesi Barat	62	96,8	91,7	98,4	82,3	90,2	82,4	72,5
31	Maluku	171	88,9	83,6	90,6	71,3	92,6	85,2	70,5
32	Maluku Utara	104	97,1	88,1	97,1	85,6	89,9	92,1	74,2
33	Papua Barat	125	67,2	73,8	73,6	56,8	83,1	84,5	70,4
34	Papua	344	59,9	79,6	65,7	46,8	81,4	73,3	68,9
INDONESIA		5.442	88,4	87,4	90,6	84,0	91,7	88,5	72,3

Tabel 10.28
Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan peralatan dasar yang masih berfungsi, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Peralatan Dasar Puskesmas Dan Masih Berfungsi						
			Alat ukur timbang badan dewasa	Alat ukur tinggi badan dewasa	Alat ukur timbang badan bayi	Alat ukur panjang badan bayi	Alat ukur suhu badan	Stetoskop	Alat ukur tekanan darah air raksa
1	Aceh	340	99,7	98,5	98,2	98,2	97,6	99,4	93,5
2	Sumatera Utara	571	97,2	95,8	97,0	93,0	94,9	98,6	91,8
3	Sumatera Barat	264	100,0	99,2	99,2	99,6	97,0	98,9	97,3
4	Riau	212	100,0	100,0	98,6	99,1	98,1	99,5	95,3
5	Jambi	176	99,4	98,9	98,9	98,3	98,3	100,0	97,7
6	Sumatera Selatan	322	99,1	97,8	97,5	96,3	97,5	98,1	91,0
7	Bengkulu	179	98,9	97,8	97,2	95,5	97,8	99,4	92,7
8	Lampung	291	99,3	99,0	100,0	97,6	99,0	99,7	96,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	95,2
10	Kepulauan Riau	72	95,8	94,4	94,4	94,4	95,8	95,8	83,3
11	DKI Jakarta	314	99,7	99,4	99,7	99,7	99,4	99,4	98,1
12	Jawa Barat	1050	99,0	98,8	99,0	98,3	98,1	99,8	95,4
13	Jawa Tengah	875	99,4	99,0	99,3	97,8	99,0	99,4	98,9
14	DI Yogyakarta	121	100,0	99,2	100,0	99,2	100,0	100,0	98,3
15	Jawa Timur	960	99,7	99,4	99,7	98,2	99,5	99,8	97,9
16	Banten	233	100,0	98,7	100,0	98,3	99,6	100,0	94,0
17	Bali	120	99,2	99,2	100,0	99,2	99,2	100,0	98,3
18	Nusa Tenggara Barat	158	96,8	95,6	96,2	91,8	95,6	96,8	94,9
19	Nusa Tenggara Timur	371	98,4	98,4	98,7	97,8	97,3	99,5	93,3
20	Kalimantan Barat	238	97,1	97,1	97,1	97,5	95,4	97,5	90,3
21	Kalimantan Tengah	195	99,0	99,0	99,5	97,9	99,0	98,5	87,2
22	Kalimantan Selatan	230	99,6	99,6	99,6	99,1	97,8	100,0	90,4
23	Kalimantan Timur	173	96,0	94,8	94,8	94,8	94,2	95,4	91,3
24	Kalimantan Utara	46	100,0	100,0	100,0	100,0	93,5	100,0	95,7
25	Sulawesi Utara	185	96,8	94,1	96,8	94,1	94,6	99,5	87,0
26	Sulawesi Tengah	189	95,8	94,2	95,8	94,2	94,7	97,9	93,1
27	Sulawesi Selatan	448	99,3	98,4	99,1	97,1	97,3	99,3	96,4
28	Sulawesi Tenggara	268	97,8	97,8	97,8	95,5	92,2	95,9	85,1
29	Gorontalo	93	100,0	98,9	98,9	95,7	95,7	100,0	98,9
30	Sulawesi Barat	94	96,8	95,7	97,9	98,9	97,9	97,9	92,6
31	Maluku	198	96,5	94,4	96,5	96,0	91,9	97,5	86,9
32	Maluku Utara	127	98,4	98,4	96,9	97,6	94,5	99,2	81,9
33	Papua Barat	150	95,3	92,0	92,7	89,3	88,7	94,0	76,7
34	Papua	372	89,2	78,8	86,6	78,0	81,7	84,7	77,7
INDONESIA		9.697	98,4	97,3	98,0	96,4	96,7	98,4	93,3

Tabel 10.29
Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan peralatan dasar yang masih berfungsi, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Peralatan Dasar Puskesmas Dan Masih Berfungsi						
			Alat ukur tekanan darah digital	Desinfektan	Disposable/ auto-disable syringe	Air mengalir, sabun, alkohol	Hand-scoon	Masker medis	Kartu Menuju Sehat dengan jumlah cukup
1	Aceh	340	78,2	86,8	83,2	83,8	98,5	100,0	87,6
2	Sumatera Utara	571	62,3	89,1	91,4	91,4	97,4	98,9	90,0
3	Sumatera Barat	264	74,6	94,7	96,6	94,3	99,2	99,6	90,5
4	Riau	212	75,5	90,6	89,2	92,0	97,6	99,5	78,3
5	Jambi	176	58,5	91,5	88,6	94,9	98,9	95,5	87,5
6	Sumatera Selatan	322	71,7	91,6	93,8	91,3	97,8	98,8	87,3
7	Bengkulu	179	75,4	91,1	93,3	88,8	96,6	98,3	84,4
8	Lampung	291	75,9	97,3	98,6	98,3	98,3	99,0	90,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	79,0	91,9	93,5	98,4	98,4	98,4	91,9
10	Kepulauan Riau	72	77,8	91,7	94,4	91,7	95,8	95,8	90,3
11	DKI Jakarta	314	84,7	96,5	98,4	98,4	100,0	100,0	96,8
12	Jawa Barat	1050	76,5	93,1	97,9	97,9	99,0	99,1	89,9
13	Jawa Tengah	875	78,9	95,9	98,1	98,5	99,3	99,4	95,1
14	DI Yogyakarta	121	90,1	96,7	99,2	100,0	100,0	100,0	97,5
15	Jawa Timur	960	78,9	93,2	98,9	99,2	99,7	99,8	97,3
16	Banten	233	86,7	97,9	99,6	100,0	100,0	100,0	94,8
17	Bali	120	70,8	97,5	99,2	100,0	100,0	100,0	95,8
18	Nusa Tenggara Barat	158	72,8	88,6	92,4	92,4	95,6	92,4	85,4
19	Nusa Tenggara Timur	371	67,4	91,4	97,6	90,6	97,0	97,6	89,8
20	Kalimantan Barat	238	71,4	89,9	94,1	93,7	97,1	97,1	80,7
21	Kalimantan Tengah	195	68,2	87,2	95,4	94,4	96,9	98,5	86,7
22	Kalimantan Selatan	230	70,9	92,2	99,1	98,7	99,6	99,1	94,8
23	Kalimantan Timur	173	74,0	90,2	94,8	95,4	93,6	94,2	86,7
24	Kalimantan Utara	46	60,9	84,8	91,3	95,7	100,0	100,0	87,0
25	Sulawesi Utara	185	64,9	89,2	97,3	91,4	98,4	98,4	85,9
26	Sulawesi Tengah	189	61,4	88,4	93,7	88,9	96,8	95,8	84,7
27	Sulawesi Selatan	448	66,7	88,4	94,2	94,4	98,2	98,7	88,2
28	Sulawesi Tenggara	268	56,3	81,3	86,2	91,8	98,5	99,3	78,0
29	Gorontalo	93	67,7	94,6	100,0	95,7	98,9	100,0	94,6
30	Sulawesi Barat	94	58,5	89,4	92,6	93,6	98,9	100,0	86,2
31	Maluku	198	55,6	83,3	91,4	70,2	91,4	96,0	80,8
32	Maluku Utara	127	51,2	85,0	88,2	80,3	98,4	92,9	66,9
33	Papua Barat	150	47,3	82,7	86,0	62,7	92,0	96,0	80,0
34	Papua	372	53,0	70,4	74,5	65,1	82,0	85,8	69,1
INDONESIA		9.697	71,4	90,7	94,3	92,8	97,6	98,1	88,8

Tabel 10.30
Persentase seluruh Puskesmas menurut kemampuan pemeriksaan laboratorium,
Risnakes 2017

No .	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium					
			Pemeriksaan protein dalam urin		Pemeriksaan dahak untuk TB		Pemeriksaan kreatinin dalam urin	
			n	%	n	%	n	%
1	Aceh	340	189	55,6	223	65,6	108	31,8
2	Sumatera Utara	571	189	33,1	335	58,7	104	18,2
3	Sumatera Barat	264	236	89,4	239	90,5	118	44,7
4	Riau	212	157	74,1	179	84,4	87	41,0
5	Jambi	176	133	75,6	154	87,5	57	32,4
6	Sumatera Selatan	322	189	58,7	245	76,1	110	34,2
7	Bengkulu	179	78	43,6	126	70,4	40	22,3
8	Lampung	291	243	83,5	260	89,3	122	41,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	50	80,6	55	88,7	12	19,4
10	Kepulauan Riau	72	57	79,2	64	88,9	25	34,7
11	DKI Jakarta	314	72	22,9	80	25,5	53	16,9
12	Jawa Barat	1050	816	77,7	798	76,0	408	38,9
13	Jawa Tengah	875	841	96,1	823	94,1	412	47,1
14	DI Yogyakarta	121	120	99,2	114	94,2	49	40,5
15	Jawa Timur	960	897	93,4	840	87,5	492	51,3
16	Banten	233	202	86,7	221	94,8	110	47,2
17	Bali	120	102	85,0	86	71,7	27	22,5
18	Nusa Tenggara Barat	158	142	89,9	140	88,6	82	51,9
19	Nusa Tenggara Timur	371	246	66,3	310	83,6	109	29,4
20	Kalimantan Barat	238	175	73,5	215	90,3	72	30,3
21	Kalimantan Tengah	195	117	60,0	151	77,4	52	26,7
22	Kalimantan Selatan	230	206	89,6	214	93,0	89	38,7
23	Kalimantan Timur	173	148	85,5	163	94,2	68	39,3
24	Kalimantan Utara	46	35	76,1	42	91,3	14	30,4
25	Sulawesi Utara	185	54	29,2	98	53,0	27	14,6
26	Sulawesi Tengah	189	84	44,4	107	56,6	35	18,5
27	Sulawesi Selatan	448	361	80,6	319	71,2	189	42,2
28	Sulawesi Tenggara	268	109	40,7	162	60,4	54	20,1
29	Gorontalo	93	73	78,5	61	65,6	35	37,6
30	Sulawesi Barat	94	69	73,4	76	80,9	32	34,0
31	Maluku	198	26	13,1	129	65,2	11	5,6
32	Maluku Utara	127	43	33,9	98	77,2	15	11,8
33	Papua Barat	150	53	35,3	73	48,7	37	24,7
34	Papua	372	84	22,6	172	46,2	56	15,1
INDONESIA		9.697	6596	68,0	7372	76,0	3311	34,1

Tabel 10.31
Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan obat tuberkulosis, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Obat Tuberkulosis			
			Kombipak atau <i>Fixed Dose Combination</i> (FDC) dengan jumlah cukup		Memiliki anggaran pendampingan minum obat TB	
			n	%	n	%
1	Aceh	340	290	85,3	238	70,0
2	Sumatera Utara	571	471	82,5	231	40,5
3	Sumatera Barat	264	256	97,0	167	63,3
4	Riau	212	196	92,5	105	49,5
5	Jambi	176	158	89,8	102	58,0
6	Sumatera Selatan	322	294	91,3	159	49,4
7	Bengkulu	179	144	80,4	89	49,7
8	Lampung	291	285	97,9	169	58,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	59	95,2	30	48,4
10	Kepulauan Riau	72	67	93,1	22	30,6
11	DKI Jakarta	314	283	90,1	124	39,5
12	Jawa Barat	1050	1001	95,3	647	61,6
13	Jawa Tengah	875	847	96,8	477	54,5
14	DI Yogyakarta	121	118	97,5	70	57,9
15	Jawa Timur	960	936	97,5	500	52,1
16	Banten	233	225	96,6	119	51,1
17	Bali	120	108	90,0	66	55,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	144	91,1	117	74,1
19	Nusa Tenggara Timur	371	323	87,1	207	55,8
20	Kalimantan Barat	238	219	92,0	131	55,0
21	Kalimantan Tengah	195	172	88,2	91	46,7
22	Kalimantan Selatan	230	225	97,8	113	49,1
23	Kalimantan Timur	173	159	91,9	86	49,7
24	Kalimantan Utara	46	41	89,1	22	47,8
25	Sulawesi Utara	185	155	83,8	97	52,4
26	Sulawesi Tengah	189	153	81,0	88	46,6
27	Sulawesi Selatan	448	406	90,6	286	63,8
28	Sulawesi Tenggara	268	205	76,5	185	69,0
29	Gorontalo	93	86	92,5	65	69,9
30	Sulawesi Barat	94	85	90,4	67	71,3
31	Maluku	198	147	74,2	85	42,9
32	Maluku Utara	127	92	72,4	61	48,0
33	Papua Barat	150	83	55,3	49	32,7
34	Papua	372	176	47,3	113	30,4
INDONESIA		9.697	8609	88,8	5178	53,39

Tabel 10.32
Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan obat anti hipertensi, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan dan Kecukupan Obat Anti Hipertensi							
			Amlodipine 5 mg		Amlodipine 10 mg		Captopril 12,5 mg		Captopril 25 mg	
			Ada	%	Ada	%	Ada	%	Ada	%
1	Aceh	340	286	84,1	224	65,9	270	79,4	306	90,0
2	Sumatera Utara	571	422	73,9	349	61,1	521	91,2	507	88,8
3	Sumatera Barat	264	220	83,3	187	70,8	255	96,6	255	96,6
4	Riau	212	187	88,2	143	67,5	203	95,8	198	93,4
5	Jambi	176	146	83,0	117	66,5	159	90,3	169	96,0
6	Sumatera Selatan	322	275	85,4	158	49,1	270	83,9	295	91,6
7	Bengkulu	179	138	77,1	99	55,3	155	86,6	146	81,6
8	Lampung	291	255	87,6	251	86,3	259	89,0	255	87,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	37	59,7	40	64,5	48	77,4	61	98,4
10	Kepulauan Riau	72	59	81,9	43	59,7	69	95,8	66	91,7
11	DKI Jakarta	314	261	83,1	274	87,3	258	82,2	292	93,0
12	Jawa Barat	1050	841	80,1	655	62,4	813	77,4	982	93,5
13	Jawa Tengah	875	686	78,4	607	69,4	636	72,7	819	93,6
14	DI Yogyakarta	121	113	93,4	64	52,9	90	74,4	121	100,0
15	Jawa Timur	960	723	75,3	599	62,4	565	58,9	926	96,5
16	Banten	233	196	84,1	155	66,5	177	76,0	223	95,7
17	Bali	120	87	72,5	49	40,8	97	80,8	114	95,0
18	Nusa Tenggara Barat	158	109	69,0	100	63,3	84	53,2	146	92,4
19	Nusa Tenggara Timur	371	236	63,6	179	48,2	258	69,5	290	78,2
20	Kalimantan Barat	238	163	68,5	171	71,8	180	75,6	198	83,2
21	Kalimantan Tengah	195	145	74,4	120	61,5	172	88,2	180	92,3
22	Kalimantan Selatan	230	140	60,9	171	74,3	212	92,2	229	99,6
23	Kalimantan Timur	173	140	80,9	131	75,7	131	75,7	152	87,9
24	Kalimantan Utara	46	36	78,3	24	52,2	22	47,8	42	91,3
25	Sulawesi Utara	185	131	70,8	150	81,1	150	81,1	171	92,4
26	Sulawesi Tengah	189	137	72,5	138	73,0	109	57,7	165	87,3
27	Sulawesi Selatan	448	336	75,0	312	69,6	209	46,7	393	87,7
28	Sulawesi Tenggara	268	181	67,5	156	58,2	195	72,8	227	84,7
29	Gorontalo	93	82	88,2	77	82,8	64	68,8	82	88,2
30	Sulawesi Barat	94	56	59,6	53	56,4	46	48,9	91	96,8
31	Maluku	198	108	54,5	106	53,5	148	74,7	162	81,8
32	Maluku Utara	127	86	67,7	65	51,2	103	81,1	114	89,8
33	Papua Barat	150	87	58,0	69	46,0	134	89,3	137	91,3
34	Papua	372	157	42,2	142	38,2	202	54,3	268	72,0
INDONESIA		9.697	7262	74,9	6178	63,7	7264	74,9	8782	90,6

Tabel 10.33

Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan dan kecukupan obat gangguan jiwa berat, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan dan Kecukupan Obat Gangguan Jiwa Berat							
			Antipsikotik (chlorpromazine-CPZ, haloperidol-Haldol, Serenase)		Anti Parkinson (levodepo, tryhexifenidil)		Anti depresan (trisiklik, MAO inhibitor, amitriptyline)		Anti mania (lithium carbonate)	
			Ada	%	Ada	%	Ada	%	Ada	%
1	Aceh	340	327	96,2	185	54,4	264	77,6	61	17,9
2	Sumatera Utara	571	316	55,3	101	17,7	170	29,8	63	11,0
3	Sumatera Barat	264	254	96,2	190	72,0	224	84,8	40	15,2
4	Riau	212	161	75,9	91	42,9	113	53,3	27	12,7
5	Jambi	176	141	80,1	80	45,5	104	59,1	26	14,8
6	Sumatera Selatan	322	290	90,1	163	50,6	170	52,8	31	9,6
7	Bengkulu	179	115	64,2	38	21,2	72	40,2	18	10,1
8	Lampung	291	203	69,8	122	41,9	129	44,3	24	8,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	57	91,9	40	64,5	44	71,0	3	4,8
10	Kepulauan Riau	72	56	77,8	34	47,2	33	45,8	7	9,7
11	DKI Jakarta	314	176	56,1	120	38,2	109	34,7	20	6,4
12	Jawa Barat	1050	745	71,0	466	44,4	497	47,3	100	9,5
13	Jawa Tengah	875	624	71,3	411	47,0	403	46,1	81	9,3
14	DI Yogyakarta	121	119	98,3	101	83,5	111	91,7	3	2,5
15	Jawa Timur	960	875	91,1	663	69,1	721	75,1	112	11,7
16	Banten	233	172	73,8	137	58,8	138	59,2	37	15,9
17	Bali	120	101	84,2	66	55,0	35	29,2	7	5,8
18	Nusa Tenggara Barat	158	147	93,0	92	58,2	112	70,9	35	22,2
19	Nusa Tenggara Timur	371	118	31,8	31	8,4	61	16,4	18	4,9
20	Kalimantan Barat	238	183	76,9	122	51,3	138	58,0	25	10,5
21	Kalimantan Tengah	195	158	81,0	87	44,6	94	48,2	13	6,7
22	Kalimantan Selatan	230	206	89,6	153	66,5	153	66,5	18	7,8
23	Kalimantan Timur	173	110	63,6	66	38,2	78	45,1	14	8,1
24	Kalimantan Utara	46	30	65,2	17	37,0	20	43,5	3	6,5
25	Sulawesi Utara	185	67	36,2	19	10,3	17	9,2	7	3,8
26	Sulawesi Tengah	189	106	56,1	40	21,2	68	36,0	10	5,3
27	Sulawesi Selatan	448	356	79,5	177	39,5	227	50,7	35	7,8
28	Sulawesi Tenggara	268	81	30,2	45	16,8	42	15,7	12	4,5
29	Gorontalo	93	83	89,2	33	35,5	40	43,0	8	8,6
30	Sulawesi Barat	94	77	81,9	35	37,2	47	50,0	2	2,1
31	Maluku	198	95	48,0	18	9,1	41	20,7	11	5,6
32	Maluku Utara	127	79	62,2	39	30,7	47	37,0	7	5,5
33	Papua Barat	150	38	25,3	14	9,3	19	12,7	6	4,0
34	Papua	372	50	13,4	28	7,5	38	10,2	14	3,8
INDONESIA		9.697	6716	69,3	4024	41,5	4579	47,2	898	9,3

Tabel 10.33

Persentase seluruh Puskesmas menurut ketersediaan dan kecukupan obat gangguan jiwa berat, Risnakes 2017 (lanjutan)

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan dan Kecukupan Obat Gangguan Jiwa Berat							
			Antianxietas - anti cemas (diazepam-chlordiazepoxide)		Anti insomnia (phenobarbital)		Anti obsesif kompulsif (clomipramine)		Anti panik (imipramine)	
			Ada	%	Ada	%	Ada	%	Ada	%
1	Aceh	340	272	80,0	201	59,1	92	27,1	61	17,9
2	Sumatera Utara	571	316	55,3	217	38,0	121	21,2	48	8,4
3	Sumatera Barat	264	222	84,1	175	66,3	73	27,7	31	11,7
4	Riau	212	170	80,2	134	63,2	53	25,0	25	11,8
5	Jambi	176	131	74,4	108	61,4	41	23,3	24	13,6
6	Sumatera Selatan	322	243	75,5	212	65,8	81	25,2	39	12,1
7	Bengkulu	179	92	51,4	77	43,0	35	19,6	15	8,4
8	Lampung	291	172	59,1	141	48,5	47	16,2	19	6,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	56	90,3	35	56,5	3	4,8	2	3,2
10	Kepulauan Riau	72	54	75,0	53	73,6	11	15,3	4	5,6
11	DKI Jakarta	314	219	69,7	131	41,7	28	8,9	23	7,3
12	Jawa Barat	1050	799	76,1	553	52,7	165	15,7	89	8,5
13	Jawa Tengah	875	745	85,1	535	61,1	117	13,4	85	9,7
14	DI Yogyakarta	121	111	91,7	80	66,1	10	8,3	12	9,9
15	Jawa Timur	960	815	84,9	542	56,5	166	17,3	107	11,1
16	Banten	233	173	74,2	124	53,2	63	27,0	39	16,7
17	Bali	120	102	85,0	95	79,2	16	13,3	7	5,8
18	Nusa Tenggara Barat	158	127	80,4	98	62,0	47	29,7	21	13,3
19	Nusa Tenggara Timur	371	198	53,4	123	33,2	41	11,1	16	4,3
20	Kalimantan Barat	238	178	74,8	105	44,1	47	19,7	19	8,0
21	Kalimantan Tengah	195	138	70,8	82	42,1	31	15,9	10	5,1
22	Kalimantan Selatan	230	179	77,8	149	64,8	34	14,8	13	5,7
23	Kalimantan Timur	173	119	68,8	79	45,7	30	17,3	16	9,2
24	Kalimantan Utara	46	22	47,8	18	39,1	7	15,2	1	2,2
25	Sulawesi Utara	185	87	47,0	38	20,5	20	10,8	8	4,3
26	Sulawesi Tengah	189	127	67,2	71	37,6	20	10,6	8	4,2
27	Sulawesi Selatan	448	321	71,7	184	41,1	75	16,7	29	6,5
28	Sulawesi Tenggara	268	147	54,9	127	47,4	45	16,8	17	6,3
29	Gorontalo	93	82	88,2	45	48,4	16	17,2	9	9,7
30	Sulawesi Barat	94	73	77,7	55	58,5	17	18,1	4	4,3
31	Maluku	198	92	46,5	76	38,4	22	11,1	4	2,0
32	Maluku Utara	127	69	54,3	39	30,7	19	15,0	8	6,3
33	Papua Barat	150	58	38,7	42	28,0	19	12,7	4	2,7
34	Papua	372	129	34,7	93	25,0	36	9,7	14	3,8
INDONESIA		9.697	6838	70,5	4837	49,9	1648	17,0	831	8,6

Tabel 10.34

Persentase Puskesmas dilatih PIS PK menurut kesiapan P1. P2. P3 dan kesiapan manajemen. Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas dilatih PIS PK	Kesiapan P1		Kesiapan P2		Kesiapan P3		Kesiapan Manajemen	
			Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap
1	Aceh	195	58.5	41.5	65.1	34.9	81	18.9	69.7	30.2
2	Sumatera Utara	292	62.7	37.3	63.4	36.6	65.8	34.3	65.8	34.2
3	Sumatera Barat	109	79.8	20.2	78.9	21.1	85.3	14.7	86.2	13.8
4	Riau	88	63.6	36.4	55.7	44.3	86.4	13.6	70.5	29.6
5	Jambi	79	58.2	41.8	72.2	27.8	82.3	17.7	72.2	27.9
6	Sumatera Selatan	128	77.3	22.7	75.8	24.2	84.4	15.6	85.2	14.8
7	Bengkulu	51	74.5	25.5	68.6	31.4	74.5	25.5	84.3	15.7
8	Lampung	210	78.1	21.9	87.1	12.9	79	21	85.7	14.3
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	84.6	15.4	65.4	34.6	73.1	26.9	73.1	26.9
10	Kepulauan Riau	48	79.2	20.9	64.6	35.5	85.4	14.6	81.3	18.8
11	DKI Jakarta	93	44.1	55.9	35.5	64.5	87.1	12.9	47.3	52.7
12	Jawa Barat	352	67.3	32.6	75	25	87.5	12.5	76.7	23.3
13	Jawa Tengah	474	84.2	15.8	84.6	15.4	89.9	10.1	92.2	7.8
14	DI Yogyakarta	35	82.9	17.1	80	20	97.1	2.9	94.3	5.7
15	Jawa Timur	481	81.3	18.7	81.7	18.3	89.6	10.4	87.3	12.7
16	Banten	97	57.7	42.3	81.4	18.6	88.7	11.3	73.2	26.8
17	Bali	50	72	28	80	20	98	2	86	14
18	Nusa Tenggara Barat	95	70.5	29.5	64.2	35.8	85.3	14.7	72.6	27.4
19	Nusa Tenggara Timur	42	61.9	38.1	76.2	23.8	76.2	23.8	73.8	26.2
20	Kalimantan Barat	61	52.5	47.5	60.7	39.3	83.6	16.4	63.9	36
21	Kalimantan Tengah	29	72.4	27.6	69	31	72.4	27.5	72.4	27.5
22	Kalimantan Selatan	81	71.6	28.4	76.5	23.5	90.1	9.9	85.2	14.8
23	Kalimantan Timur	53	54.7	45.3	54.7	45.3	79.2	20.8	60.4	39.6
24	Kalimantan Utara	15	66.7	33.4	46.7	53.3	93.3	6.7	80	20
25	Sulawesi Utara	48	70.8	29.2	77.1	22.9	91.7	8.3	85.4	14.6
26	Sulawesi Tengah	80	61.3	38.8	57.5	42.5	70	30	66.3	33.8
27	Sulawesi Selatan	204	77.9	22.1	82.4	17.6	82.4	17.7	85.8	14.2
28	Sulawesi Tenggara	42	69	31	83.3	16.7	78.6	21.4	88.1	11.9
29	Gorontalo	24	58.3	41.7	79.2	20.9	87.5	12.5	66.7	33.4
30	Sulawesi Barat	28	64.3	35.7	82.1	17.9	82.1	17.9	78.6	21.4
31	Maluku	24	54.2	45.9	58.3	41.6	58.3	41.7	58.3	41.6
32	Maluku Utara	22	63.6	36.3	59.1	40.9	68.2	31.8	59.1	40.9
33	Papua Barat	20	60	40	85	15	50	50	70	30
34	Papua	20	25	75	50	50	70	30	35	65
INDONESIA		3.696	71	28.9	74	26	83.4	16.6	78.8	21.2

Tabel 10.35

Persentase puskesmas belum dilatih PIS PK menurut kesiapan P1. P2. P3 dan kesiapan manajemen. Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas belum dilatih PIS PK	Kesiapan P1		Kesiapan P2		Kesiapan P3		Kesiapan Manajemen	
			Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap
1	Aceh	145	50.3	49.7	60	40	71.7	28.3	37.9	62
2	Sumatera Utara	279	56.6	43.4	26.5	73.5	55.2	44.8	35.1	64.9
3	Sumatera Barat	155	65.2	34.9	67.1	32.9	78.1	21.9	63.2	36.8
4	Riau	124	58.1	42	54	45.9	72.6	27.4	51.6	48.4
5	Jambi	97	77.3	22.6	72.2	27.8	86.6	13.4	73.2	26.8
6	Sumatera Selatan	194	64.9	35.1	40.7	59.3	73.7	26.3	54.1	45.9
7	Bengkulu	128	73.4	26.5	50	50	74.2	25.8	53.9	46.1
8	Lampung	81	49.4	50.6	34.6	65.4	59.3	40.8	38.3	61.7
9	Kepulauan Bangka Belitung	36	72.2	27.7	61.1	38.9	80.6	19.5	66.7	33.3
10	Kepulauan Riau	24	54.2	45.8	33.3	66.7	54.2	45.9	41.7	58.3
11	DKI Jakarta	221	35.3	64.7	14	86	46.2	53.9	16.7	83.2
12	Jawa Barat	698	62.2	37.8	62.6	37.4	77.5	22.5	60.3	39.6
13	Jawa Tengah	401	66.6	33.4	70.6	29.4	76.6	23.5	65.1	35
14	DI Yogyakarta	86	51.2	48.9	84.9	15.1	86	13.9	55.8	44.2
15	Jawa Timur	479	63.9	36.1	61.8	38.2	68.5	31.6	63	36.9
16	Banten	136	43.4	56.7	55.1	44.9	76.5	23.5	45.6	54.4
17	Bali	70	82.9	17.2	84.3	15.7	85.7	14.3	77.1	22.8
18	Nusa Tenggara Barat	63	54	46	42.9	57.2	60.3	39.7	39.7	60.3
19	Nusa Tenggara Timur	329	72	28	53.8	46.2	76.6	23.4	65.7	34.3
20	Kalimantan Barat	177	65.5	34.5	36.2	63.8	74	26	50.8	49.2
21	Kalimantan Tengah	166	59.6	40.3	35.5	64.4	67.5	32.6	48.2	51.8
22	Kalimantan Selatan	149	59.7	40.3	47.7	52.3	72.5	27.5	49.7	50.4
23	Kalimantan Timur	120	57.5	42.5	35.8	64.2	64.2	35.9	38.3	61.7
24	Kalimantan Utara	31	54.8	45.2	51.6	48.4	45.2	54.9	35.5	64.5
25	Sulawesi Utara	137	59.1	40.8	51.1	48.9	85.4	14.6	56.9	43.1
26	Sulawesi Tengah	109	69.7	30.3	35.8	64.2	67.9	32.1	47.7	52.2
27	Sulawesi Selatan	244	66.8	33.2	51.6	48.4	79.1	20.9	65.2	34.9
28	Sulawesi Tenggara	226	64.2	35.8	36.7	63.2	75.2	24.8	46	54
29	Gorontalo	69	62.3	37.7	69.6	30.4	73.9	26	49.3	50.7
30	Sulawesi Barat	66	71.2	28.7	39.4	60.7	74.2	25.8	59.1	40.9
31	Maluku	174	73	27	23.6	76.5	62.6	37.3	43.1	56.9
32	Maluku Utara	105	58.1	41.9	35.2	64.8	81.9	18.1	43.8	56.2
33	Papua Barat	130	37.7	62.4	14.6	85.4	39.2	60.8	10.8	89.2
34	Papua	352	29.5	70.5	9.1	90.9	34.7	65.3	11.6	88.4
INDONESIA		6.001	59.7	40.3	47.2	52.8	69.2	30.8	49.9	50.1

Tabel 10.36
Persentase Puskesmas dilatih PIS PK menurut sarana prasarana, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas dilatih PIS PK	Kesiapan Sarana Prasarana	
			Siap	Kurang Siap
1	Aceh	195	1.5	98.5
2	Sumatera Utara	292	1.4	98.6
3	Sumatera Barat	109	4.6	95.4
4	Riau	88	4.5	95.4
5	Jambi	79	0	100
6	Sumatera Selatan	128	2.3	97.7
7	Bengkulu	51	3.9	96.1
8	Lampung	210	1.9	98.1
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	0	100
10	Kepulauan Riau	48	0	100.1
11	DKI Jakarta	93	2.2	97.8
12	Jawa Barat	352	2.8	97.2
13	Jawa Tengah	474	3	97
14	DI Yogyakarta	35	2.9	97.1
15	Jawa Timur	481	1.7	98.3
16	Banten	97	4.1	95.9
17	Bali	50	10	90
18	Nusa Tenggara Barat	95	10.5	89.5
19	Nusa Tenggara Timur	42	0	100
20	Kalimantan Barat	61	1.6	98.3
21	Kalimantan Tengah	29	0	100
22	Kalimantan Selatan	81	3.7	96.3
23	Kalimantan Timur	53	1.9	98.1
24	Kalimantan Utara	15	0	100
25	Sulawesi Utara	48	0	100
26	Sulawesi Tengah	80	1.3	98.8
27	Sulawesi Selatan	204	4.4	95.6
28	Sulawesi Tenggara	42	0	100
29	Gorontalo	24	0	100
30	Sulawesi Barat	28	0	100
31	Maluku	24	0	100
32	Maluku Utara	22	4.5	95.5
33	Papua Barat	20	10	90
34	Papua	20	10	90
INDONESIA		3.696	2.6	97.3

Tabel 10.37

Persentase puskesmas belum dilatih PIS PK menurut sarana prasarana, Risnakes 2017

No.	Nama Provinsi	Jumlah Puskesmas belum dilatih PIS PK	Kesiapan Sarana Prasarana	
			Siap	Kurang Siap
1	Aceh	145	4.8	95.2
2	Sumatera Utara	279	0.4	99.7
3	Sumatera Barat	155	1.9	98
4	Riau	124	1.6	98.3
5	Jambi	97	6.2	93.9
6	Sumatera Selatan	194	0.5	99.5
7	Bengkulu	128	1.6	98.5
8	Lampung	81	0	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	36	0	100
10	Kepulauan Riau	24	4.2	95.9
11	DKI Jakarta	221	2.3	97.7
12	Jawa Barat	698	2.9	97.2
13	Jawa Tengah	401	4.7	95.2
14	DI Yogyakarta	86	0	100
15	Jawa Timur	479	2.9	97.1
16	Banten	136	5.1	94.9
17	Bali	70	0	100
18	Nusa Tenggara Barat	63	6.3	93.6
19	Nusa Tenggara Timur	329	0.3	99.7
20	Kalimantan Barat	177	1.1	98.8
21	Kalimantan Tengah	166	0	100
22	Kalimantan Selatan	149	1.3	98.7
23	Kalimantan Timur	120	3.3	96.6
24	Kalimantan Utara	31	0	100
25	Sulawesi Utara	137	1.5	98.6
26	Sulawesi Tengah	109	0	100
27	Sulawesi Selatan	244	0	100
28	Sulawesi Tenggara	226	0.4	99.5
29	Gorontalo	69	1.4	98.5
30	Sulawesi Barat	66	0	100
31	Maluku	174	0	100
32	Maluku Utara	105	1	99
33	Papua Barat	130	0	100
34	Papua	352	0	100
INDONESIA		6.001	1.8	98.2

Tabel 10.38
Persentase Puskesmas Dilatih PIS PK dan Belum Dilatih PIS PK Berdasarkan Kesiapan
Penyelenggaraan PIS-PK (Manajemen dan Sarana Prasarana Puskesmas), Risnakes 2017

Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Belum Dilatih PIS PK			
		Puskesmas Dilatih PIS PK		PK	
		Siap	Kurang Siap	Siap	Kurang Siap
Aceh	340	1.0	99.0	2.1	97.9
Sumatera Utara	571	1.4	98.6	0.0	100.0
Sumatera Barat	264	2.8	97.2	1.9	98.1
Riau	212	3.4	96.6	0.8	99.2
Jambi	176	0.0	100.0	5.2	94.8
Sumatera Selatan	322	2.3	97.7	0.5	99.5
Bengkulu	179	3.9	96.1	1.6	98.4
Lampung	291	1.9	98.1	0.0	100.0
Kep.Bangka Belitung	62	0.0	100.0	0.0	100.0
Kepulauan Riau	72	0.0	100.0	0.0	100.0
DKI Jakarta	314	1.1	98.9	0.9	99.1
Jawa Barat	1050	2.0	98.0	1.1	98.9
Jawa Tengah	875	3.0	97.0	2.2	97.8
DI Yogyakarta	121	2.9	97.1	0.0	100.0
Jawa Timur	960	1.5	98.5	1.5	98.5
Banten	233	4.1	95.9	3.7	96.3
Bali	120	10.0	90.0	0.0	100.0
Nusa Tenggara Barat	158	8.4	91.6	3.2	96.8
Nusa Tenggara Timur	371	0.0	100.0	0.0	100.0
Kalimantan Barat	238	1.6	98.4	0.0	100.0
Kalimantan Tengah	195	0.0	100.0	0.0	100.0
Kalimantan Selatan	230	3.7	96.3	0.7	99.3
Kalimantan Timur	173	1.9	98.1	1.7	98.3
Kalimantan Utara	46	0.0	100.0	0.0	100.0
Sulawesi Utara	185	0.0	100.0	0.7	99.3
Sulawesi Tengah	189	1.3	98.8	0.0	100.0
Sulawesi Selatan	448	4.4	95.6	0.0	100.0
Sulawesi Tenggara	268	0.0	100.0	0.4	99.6
Gorontalo	93	0.0	100.0	0.0	100.0
Sulawesi Barat	94	0.0	100.0	0.0	100.0
Maluku	198	0.0	100.0	0.0	100.0
Maluku Utara	127	0.0	100.0	1.0	99.0
Papua Barat	150	10.0	90.0	0.0	100.0
Papua	372	5.0	95.0	0.0	100.0
INDONESIA	9697	2.3	97.7	0.9	99.1

WMA resolution on Task Shifting from the medical profession (2009). New Delhi, Diunduh 18 Oktober 2014, dari <http://www.WMA.com>.

WHO (2007), Task shifting to tackle health worker shortages, diunduh tanggal 17 oktober 2014, dari www.who.int/task_shifting_booklet_.pdf.

WHO, PEPFAR and UNAIDS (2008) , Task Shifting Global Recommendations and Guidelines, diunduh tanggal 18 Oktober 2014 dari www.WHO.int/wprkforcealliance/knowledge/resorce/task2007.

Campbell , C. Retreat from Alma Alta The WHO report on task shifting to community health workers for AIDS care in poor countries, PubMed, glob Public Health, 2011;6(2):125-38, diunduh 19 Okt. 2014, jam 9 wib dari www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19916089.

WHO: The world health report 2006: working together for health. Geneva: World Health Organization; 2006.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan nomor HK.01.07/I/01215/2015 tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing Bidang Manajerial Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDMK

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDMK

Republik Indonesia, 2016. *Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2016*: Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDMK

Republik Indonesia, 2016. *Buku Manual Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sdm Kesehatan (Revisi)*: Kementerian Kesehatan RI Badan PPSDMK

Gary Dessler. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kesepuluh Jilid 1*. PT Indeks Permata Puri Media. Jakarta 2010

Gary Dessler. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kesepuluh Jilid 2*. PT Indeks Permata Puri Media. Jakarta 2010

Stephen M. Shortell and Arnold D. Kaluzny. 1996. *Essentials Of Health Care Management*. Delmar Publishers An International Thomson Publishing Company. 1996

Amala Da Silva. *A Framework for Measuring Responsiveness*. GPE Discussion Paper Series: No. 32 EIP/GPE/EBD World Health Organization

Anwar Prabu Mangkunegara. 2005, *Evaluasi Kinerja*. Bandung : Refika Aditama

Charles Darby. Nicole Valentine, Christopher JL Murray, Amala de Silva. *Strategy On Measuring Responsiveness*. GPE Discussion Paper Series: No. 23. EIP/GPE/FAR World Health Organization

Mutale et al, 2013. *Measuring health workers' motivation in rural health facilities: baseline results from three study districts in Zambia*. Human Resources for Health 2013 11:8. (doi:10.1186/1478-4491-11-8)

Robbbins dan Judge, 2007. *Perilaku Organisasi*. Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat

Sadili Samsudin, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung Pustaka Setia.

Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Petunjuk Teknis Penguatan Manajemen Puskesmas Melalui Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

1. SK
2. Persetujuan Etik
3. Kuesioner
4. Daftar sampel puskesmas
5. Tim Penyusun

TIM PENYUSUN :

1. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
2. Heny Lestary, SKM., MKM
3. dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
4. Tinexcellly M. Simamora, SKM., MKM
5. dr. Siti Nurhasanah
6. dr. Sefrina Werni
7. dr. Hadi Siswoyo, M.Epid
8. Dr. Ingan Ukur Tarigan, SKM., M.Epid
9. drh. Raflizar
10. drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS
11. Mukhlisul Faatih, M.Biotech
12. dr. Srilaning Driyah, M.Si.,Med., Sp.PK
13. dr. Fitriana, Sp.MK
14. Timor Utama, S.Kom., MMSI
15. Emmilya Rosa, SKM., MKM
16. Rosita, SKM., MPH
17. lin Nurlinawati, SKM., MKM
18. drg. Rudi Hendro Putranto, M.Si
19. Desy Aprina, SKM., MKM
20. Ariestya Anggraeni, SKM
21. Roy Nusa R. Edo Sartya, SKM., M.Si
22. Andi Leny Susyanty, S.Si., Apt., MKM
23. Dr. drg. Tati Suryati, M.Kes
24. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
25. Enung Nurkhotimah, SKM., MKM
26. drh. Harli Novriani, M.Si
27. Drs. Max Josep Herman, Apt., M.Kes
28. Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, M.Kes., Apt
29. dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.Ok
30. Dra. Marice Sihombing, M.Si
31. Mieska Despitasi, S.Si., MKM
32. Galih Ajeng Kencana Ayu, S.Pd., M.Si
33. drg. Lely Andayasari, M.Kes
34. dr. Delima, M.Kes
35. Dr. drg. Indirawaty TN, Sp.Perio
36. drg. Made Ayu Lely Suratri, M.Kes
37. Yuyun Yuniar, S.Si., Apt., MA
38. Dr. Dra. Raharni, Apt., M.Kes
39. Ir. Vita Kartika M., M.Kes
40. Ratna Widyasari, S.Sos., M.Si
41. dr. Widiyanto
42. dr. Danny Fajar Mogsa M
43. drg. Tince Arniati Jovina, MKM
44. dr. Rossa Avrina, M.Epid
45. Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes

46. dr. Armaji Kamaludin Syarif
47. Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
48. dr. Makassar Dewi
49. dr. Made Dewi Susilawati
50. dr. Nova Sri Hartati
51. dr. Nurrahmiati, MKM
52. Siti Masitoh, SKM
53. Sugiharti, SKM., MKM
54. Eva Laelasari, S.Si., MKKK
55. Mujiati, SKM., M.Kes

TIM MANAJEMEN DATA :

1. Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM., M.Kes
2. Olwin Nainggolan, S.Si., MKM
3. Antonius Yudi Kristanto, S.Si., MKM
4. Khadijah Azhar, SKM
5. Ika Dharmayanti, SKM., M.Env
6. Prisca Petty Arfines, S.Gz
7. Puti Sari Hidayangsih, SKM., M.Sc.PH
8. Lely Indrawati, S.Sos., MKM
9. Sri Muljati, SKM., M.Kes
10. Ir. Sri Prihatini, M.Kes
11. Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
12. Rianto Purnama, S.Kom
13. Basuki Rachmat, ST
14. Nurhayati, SKM., MKM
15. Amir Suudi, SKM
16. Astridya Paramitha, SKM
17. Zainul Khaqiqi Nantabah, S.Si
18. Lusi Kristiana, S.Si., Apt
19. Nailul Izza, Amd
20. dr. Pramita Andarwati
21. Narendro Arifia, S.Kom
22. Eddy Purwanto, ST., MKM
23. Djunaedi, SKM
24. Nur Aeni Amaliah, SKM
25. Ina Kusriani, SKM
26. Hadi Ashar, SKM
27. Muhammad Arif Musoddaq, S.Si
28. Tri Wurisastuti, S.Stat
29. Rika Mayasari, S.Si
30. Milana Salim, S.Si
31. Yusup, S.Kom
32. Ritawati, S.Si
33. Zumrotus Sholichah, SKM
34. Nur Sholihatin, S.Sos

35. Mara Ipa, SKM., M.Sc
36. Mutiara Widawati, S.Si
37. Yuniarti Suryatinah, Apt
38. Sri Sulasmi, S.Si
39. Irawati Wike, AMAK
40. Windarti Fauziah, S.Si
41. Made Agus Nurjana, SKM
42. Meiske Elisabeth Koraang, S.Si
43. Abidah Nur, S.Gz
44. Marya Ulfa
45. Umi Syarifah, A.Md
46. Dewi Rahayu

Editor:

1. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
2. Heny Lestary, SKM., MKM
3. Nirmala Ahmad Ma'ru, SKM., M.Si

LAYOUT :

1. Nurul Puspasari, SKM., MKM
2. Deasy Pristi Retnani, Am.Keb



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/60/2017

TENTANG

TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh gambaran ketenagaan bidang kesehatan di fasilitas Kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagaan dibidang kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan riset ketenagaan dibidang Kesehatan yang efisien, efektif, terpadu, dan terintegrasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga perlu membentuk Tim Riset Ketenagaan Bidang Kesehatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Risnakes terdiri atas Penasehat, Penanggungjawab, Pengarah, Pakar, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Risnakes sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat:
 1. memberikan nasehat, saran dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.
 - b. Penanggungjawab:
 1. menetapkan metodologi penelitian;
 2. mengatur pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
 3. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 4. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.
 - c. Pengarah:
 1. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.

d. Pakar:

1. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
2. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tetap ditegakkan.

e. Pelaksana:

1. Bidang Teknis:

- a) menyusun rencana kerja penelitian;
- b) menyusun metodologi Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan;
- c) menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
- d) menyusun protokol;
- e) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data ketenagaan dibidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- f) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data;
- g) melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
- h) melaksanakan pelatihan berjenjang;
- i) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- j) melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- k) menyusun laporan kegiatan;
- l) melaporkan dan bertanggungjawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan kepada Penanggungjawab dan Pengarah; dan

- m) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggungjawab dan Pengarah.

2. Bidang Manajemen

- a) melakukan perencanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- b) melakukan pengorganisasian Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- d) melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data dan informasi hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- e) melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tata usaha Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- f) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Ketenagaan; dan
- g) melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik dan penyimpanan logistik Riset Ketenagaan.

3. Riset Wilayah:

- a) menyusun rencana kerja dan pedoman kerja;
- b) merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
- c) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- d) melakukan pelatihan bagi enumerator atau pengumpul data;
- e) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- f) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpulan data;
- g) menyusun laporan kegiatan;
- h) melaporkan kegiatan dan hasil riset; dan
- i) menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk pelaksanaan kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan, Tim Risnakes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Risnakes memiliki kewajiban:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Risnakes selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEENAM : Pendanaan dari pelaksanaan kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/60/2017
TENTANG
TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN

- A. PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- B. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- C. PENGARAH :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Kepala Pusat Kesehatan TNI
 8. Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas
 9. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik
 10. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
 11. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan

12. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
13. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
14. Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
15. Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
16. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia
17. Direktur Pengembangan Metodologi dan Survei, Badan Pusat Statistik
18. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
19. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan
20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
21. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
22. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
23. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
24. Sekretaris Badan Pengembangan dan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
25. Kepala Pusat Perencanaan dan Penggunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
26. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
27. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
28. Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
29. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

D. PAKAR

- Ketua : Dr. dr. Trihono, M.Sc
- Anggota :
1. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH
 2. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS
 3. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH)
 4. Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH
 5. dr. Adang Bachtiar, MPH., ScD
 6. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc
 7. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si
 8. Yogi Suwarno, SIP., M.A
 9. DR. Falih Suaedi
 10. Dr. Fridawaty Rivai, SKM., M.Kes

E. PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Litbangkes

Sekretaris : Dr. Muhammad Karyana, M.Kes

1. Bidang Teknis

Ketua : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes

Wakil Ketua : Heny Lestari, SKM., MKM

Bidang Pemetaan : dr. Tetra Fajarwati, M.Giz

Ketenagaan

Bidang Pengelolaan SDM Kesehatan : Tinexcellly Simamora, SKM, M.Kes

Bidang Insentif : Dr. Siti Nur Hasanah

Bidang Task Shifting : dr. Sefrina Werni

Bidang Motivasi : dr. Hadi Siswoyo, M.Kes

Bidang Ketanggapan Pelayanan : Dr. Ingan Ukur Tarigan, SKM, M.Kes

Bidang *Time Study* : drh. Raflizar

Bidang Keluarga Sehat : Drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS

2. Bidang Manajemen

- Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
- Wakil Ketua : dr. Jehezkiel Panjaitan
- Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum dan Kerja Sama : Bambang Widodo, SE, M.Sc
- Bidang Diseminasi, Publikasi : Pattah, SIP
- Bidang Kesekretariatan dan Umum : Isminah, SKM, MAP
- Bidang Keuangan dan Logistik : Mustafa Arif, SE, MKM
- Bidang Manajemen Data : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

3. Riset Wilayah

a) Koordinator Wilayah I

- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Wakil Ketua : Dra. Raharni, M.Kes., Apt.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Koordinator Wilayah 2

- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Wakil Ketua : Dr. Joko Irianto, SKM, M.Kes
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

c) Koordinator Wilayah 3

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil Ketua : dr. Tri Juni Angkasawati, M.Sc

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

d) Koordinator Wilayah 4

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu

Wakil Ketua : Junediyono, SKM, MKM

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Koordinator Wilayah 5

Ketua

- : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Wakil Ketua

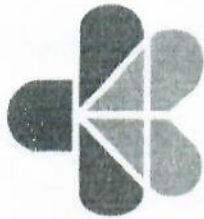
- : dr. Bagus Febrianto

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



GERMAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/I/1110/2017

TENTANG

PELAKSANA RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang efisien, efektif, terpadu dan terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Pelaksana Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/60/2017 tentang Tim Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PELAKSANA RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Pelaksana Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelaksana Risnakes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Risnakes terdiri dari Bidang Teknis, Bidang Manajemen, dan Riset Wilayah yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Teknis:
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
 2. menyusun rencana kerja;
 3. menyusun metodologi Risnakes;
 4. menyusun desain dan kerangka sampel Risnakes;
 5. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;

6. penyusunan protokol;
7. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data kesehatan masyarakat dan data biomedis;
8. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data;
9. melaksanakan manajemen data;
10. melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
11. melaksanakan pelatihan berjenjang;
12. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan Risnakes, mulai dari persiapan sampai dengan analisis dan pelaporan;
13. melakukan diseminasi dan utilisasi Risnakes kepada Tim Penanggungjawab dan Pengarah;
14. menyusun laporan kegiatan;
15. melaporkan dan bertanggungjawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelola dan analisis data dan evaluasi hasil kegiatan Risnakes kepada Tim Penanggungjawab dan Pengarah; dan
16. mengusulkan kepada Tim Penanggungjawab dan Pengarah suatu rekomendasi teknis.

b. Bidang Manajemen:

1. melakukan perencanaan Risnakes;
2. melakukan pengorganisasian Risnakes;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Risnakes;
4. melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi hasil Risnakes;
5. melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tatausaha Risnakes;
6. melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Risnakes; dan
7. melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik, penyimpanan logistik Risnakes.

c. Riset Wilayah, yang terdiri dari Koordinator Wilayah 1, Koordinator Wilayah 2, Koordinator Wilayah 3, Koordinator Wilayah 4 dan Koordinator Wilayah 5.

- KETIGA : Keanggotaan serta tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c akan ditetapkan oleh masing-masing Ketua Koordinator Wilayah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Risnakes bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- KELIMA : Masa tugas Pelaksana Risnakes selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEENAM : Pendanaan dari pelaksanaan kegiatan Pelaksana Risnakes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Februari 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/I/1110/2017
TENTANG PELAKSANA RISET KETENAGAAN
DI BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA RISET KETENAGAAN
DI BIDANG KESEHATAN

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- II. Pakar
Ketua : Dr.dr. Trihono, M.Kes
- Anggota : 1. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH
2. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc., Ph.D
3. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS
4. Prof. Dr.dr. Lestari Handayani, M.Med(PH)
5. Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH
6. dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD
7. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc
8. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si
9. Yogi Suwarno, SIP., M.A
10. Dr. Falih Suaedi
11. Dr. Fridawaty, SKM., M.Kes
12. dr. Fedri Ruluwendrata Rinawan, M.Sc. PH. Ph.D
- III. PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- A. Bidang Teknis
- Ketua : Dr.dr. Harimat Hendarwan, SKM, M.Kes
- Wakil Ketua : Heny Lestary, SKM, MKM

1. Pemetaan
Ketenagaan

- Ketua : dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
- Anggota : 1. Ns. Welly Vitriawan, M.Kep, Sp.KMB
2. dr. Luana Lidwina, M.Gizi
3. Supriyono Pangribowo, SKM., MKM
4. Letkol Kes M. Washiludin AR, SKM., MKKK
5. Letkol CKM Eko Yulianto, SE., M.Si
6. Letkol Laut (K) drg. Eko Priambodo
7. Letkol Kes Dwi Ambarwati
8. AKBP dr. Sumarsono
9. Laurensia Lawintono, M.Sc.
10. Ridwan Setiawan, SKp., M.Kes
11. Aliyus Kusumaningrum, SKM., MPH
12. Hery Hermawanto, SKM., M.Kes
13. Timor Utama, S.Kom., MMSI
14. Mukhlisul Faatih, M.Biotech
15. Asep Hermawan, S.Kep., NERS., MPH
16. dr. Srilaning Driyah, M.Si., Med., SpPK
17. dr. Fitriana, Sp.MK

2. Pengelolaan
SDM kesehatan

- Ketua : Tinexcellly M. Simamora, SKM, MKM
- Anggota : 1. Emmilya Rosa, SKM., MKM
2. Rosita, SKM., MPH
3. Iin Nurlinawati, SKM., MKM
4. drg. Rudi Hendro Putranto, M.Si
5. Desy Aprina, SKM., MKM
6. Ariestya Anggraeni, SKM
7. Zaeni Dahlan, S.Si., MPH
8. Bety, SKM., M.Si
9. Aditya Bayu Sasmita, A.Md

c. Insentif

- Ketua : dr. Siti Nur Hasanah
- Anggota :
1. Lis Prifina, S.Si, Apt, M.Kes
 2. Roy Nusa R. Edo Sartya, SKM, M.Si
 3. Andi Leny Susyanty, S.Si, Apt, MKM
 4. Dr. drg. Tati Suryati, M.Kes
 5. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
 6. Radinal Husen, MKM

d. Task Shifting

- Ketua : dr. Sefrina Werni
- Anggota :
1. Enung Nurkhotimah, SKM, MKM
 2. Wibowo, SKM, M.Kes
 3. drh. Harli Novriani, M.Si
 4. Drs. Max Josep Herman, Apt., M.Kes
 5. Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, M.Kes., Apt
 6. dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK
 7. Dra. Marice Sihombing, M.Si

e. Motivasi

- Ketua : dr. Hadi Siswoyo, M.Epid
- Anggota :
1. Mieska Despitasi, S.Si, MKM
 2. Galih Ajeng Kencana Ayu, S.Pd., M.Si
 3. drg. Lelly Andayasari, M.Kes
 4. dr. Delima, M.Kes
 5. Dr. drg. Indirawaty TN, Sp.Perio
 6. drg. Made Ayu Lely Suratri, M.Kes

g. Ketanggapan
Pelayanan

- Ketua : Dr. Ingan Ukur Tarigan, SKM, M.Epid
- Anggota :
1. Yuyun Yuniar, S.Si, Apt., MA
 2. Dr. Dra. Raharni, Apt., M.Kes
 3. Ir. Vita Kartika M., M.Kes
 4. Ratna Widyasari, S.Sos., M.Si

5. dr. Widiyanto
6. dr. Danny Fajar Mogsa M
7. drg. Tince Arniati Jovina, MKM
8. dr. Rossa Avrina, M.Epid

h. Time Study

- Ketua : drh. Raflizar
- Anggota
1. dr. Made Dewi Susilawati
 2. Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
 3. dr. Nova Sri Hartati
 4. dr. Armaji Kamaludin Syarif
 5. dr. Nurrahmiati, MKM
 6. dr. Makassar Dewi
 7. Dr. Matia Holly Herawati, SKM, M.Kes

i. Keluarga Sehat

- Ketua : drg. Hendrianto T Wibowo, MARS
- Anggota
1. Dra. Euis Mariani, SMIP., M.Kes
 2. Dr. Ana Sunita, M.Epid
 3. dr. Yuslely Usman
 4. Siti Masitoh, SKM
 5. Sugiharti, SKM, MKM
 6. Eva Laelasari, S.Si., MKKK
 7. Mujiati, SKM, M.Kes
 8. Eka Satriyani Sakti, SKM

B. Bidang Manajemen

- Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
- Wakil Ketua : dr. Jehezkiel Panjaitan
- Sekretaris : Nurul Puspasari, SKM, MKM

1. Sumber Daya Manusia , Hukum dan Kerjasama

- Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
- Anggota
1. Siti Maimunah, SH, MH
 2. Joni Pahridi, SE, MIP

3. Bagus Ramadian, SH

4. Lintang Krina Ermaya, SH

2. Diseminasi dan Publikasi

Ketua : Pattah, SIP

Anggota : 1. Cahaya Indriaty Rajagukguk, SKM, M.Kes
2. Ahdiyat Firmana, S.Sn

3. Kesekretariatan dan Umum

Ketua : Isminah, SKM, MAP

Anggota : 1. Bayu Aribowo, SE, M.Ak
2. Eka Sri Setyaningsih
3. Fajar Chairudin, A.Md
4. Fadila Ovia Retno, AMKL

4. Keuangan dan Logistik

Ketua : Mustafa Arif, SE, MKM

Anggota : 1. Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, M.Kes
2. Yuni Nuraini, SE, MKM
3. Subini
4. Ciptadi
5. Meli Damayanti, SKM
6. Saefulloh, SE
7. Subagio
8. Titin Delia, SKM
9. Ardhy Pramono, SE

5. Manajemen Data

Ketua : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

Anggota : 1. Khadijah Azhar, SKM, MKM
2. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
3. Dr. Nurhayati, SKM, MKM
4. Amir Suudi, SKM, MKM

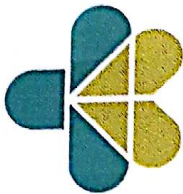
5. Prisca Petty Arfines, SGz, MSc
6. Nur Aeni Amaliah, SKM
7. Puti Sari Hidayaningsih, SKM, MSc.Ph
8. Eddy Purwanto, ST, MKM
9. Djunaedi, SKM
10. Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
11. Lely Indrawati, S.Sos, MKM
12. Sri Muljati, SKM, M.Kes
13. Ina Kusrini, SKM, MKM
14. Tri Wuriastuti, S.Stat
15. Ir. Sri Prihatini, M.Kes
16. Aris Yulianto, S.Si
17. Mutiara Widawati, S.Si
18. Astridya Paramitha, SKM, M.Kes
19. Nailul Izza, SKM
20. Lusi Kristiana, S.Si, M.Kes, Apt
21. dr. Paramita
22. Zumrotus Sholichah, SKM
23. Nur Sholihtin, S.Sos
24. Rika Mayasari, S.Si
25. Milana Salim, MSc
26. Yusup, S.Kom
27. Ritawati, S.Si
28. Hadi Ashar, SKM, MPH
29. Arif Musoddaq, S.Si, MKM
30. Abidah Nur, SGz
31. Marya Ulfa, S.Si

32. Umi Syarifah, S.Si
33. Dewi Rahayu, Amd.Kep
34. Zainul Khaqiqi, S.Si
35. Sri Sulasmi, S.Si
36. Yuniarti Suryatinah, S.Farm, Apt
37. Irawati Wike, S.Si
38. Windarti Fauziah, S.Si
39. Mara Ipa, SKM, MSc
40. Meiske Koraang, S.Si
41. Made Agus Nurjana, SKM, M.Epid
42. Merry Budiarti S, M.Sc
43. Revi Rosavika Kinansi, S.Si

IV. Tim Riset Wilayah

1. Ketua Koordinator Wilayah 1 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
2. Ketua Koordinator Wilayah 2 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Ketua Koordinator Wilayah 3 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
4. Ketua Koordinator Wilayah 4 : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu
5. Ketua Koordinator Wilayah 5 : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga





KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, Website: <http://www.litbang.depkes.go.id>

PERSETUJUAN ETIK (ETHICAL APPROVAL)

Nomor : LB.02.01/2/KE. 130 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbang Kesehatan, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

"Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan Nasional (Risnakes)"

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana / Peneliti Utama :

Dr. Nana Mulyana

dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Selama penelitian berlangsung, laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana), laporan *Serious Adverse Event/SAE* (bila ada) harus diserahkan kepada KEPK-BPPK. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK-BPPK. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Jakarta, 5 April 2017

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Badan Litbang Kesehatan,

Prof. Dr. M. Sudomo



KUESIONER INDUK PUSKESMAS

RAHASIA

P1

I. PENGENALAN TEMPAT				
1001.	Nama Puskesmas			
1002.	Kode Puskesmas			
1003.	Alamat Puskesmas			
1004.	Provinsi			
1005.	Kabupaten/Kota			
1006.	Nama Kepala Puskesmas (dengan gelar lengkap)			
1007.	Nomor Hp Ka Puskesmas	-		
1008.	Nomor telepon Puskesmas	-		
1009.	Alamat e-mail/website			
1010.	Jumlah kuesioner individu petugas puskesmas			
1011.	Jumlah kuesioner individu tanggapan pelayanan kesehatan rawat jalan puskesmas			
1012.	Jumlah kuesioner individu tanggapan pelayanan kesehatan rawat inap puskesmas			
1013.	Jumlah kuesioner pengamatan time study staf puskesmas			
II. PENGUMPUL DATA				
2001.	Tanggal Pengumpulan data	- -		
2002.	Nama Pengumpul Data			
2003.	Nama PJT Kab/Kota			
2004.	Tandatangan Pengumpul Data		2005. Tandatangan PJT Kab/Kota	
III. KARAKTERISTIK PUSKESMAS				
3001.	Persentase aktifitas penduduk pada sektor non agraris (industri, perdagangan dan jasa)	1. > 50%	2. ≤ 50%	
3002.	Jarak ke fasilitas terdekat dari puskesmas			
	a. Sekolah	1. ≤ 2,5 km	2. > 2,5 km	
	b. Pasar	1. ≤ 2 km	2. > 2 km	
	c. Rumah sakit	1. ≤ 5 km	2. > 5 km	
	d. Bioskop	1. ≤ 5 km	2. > 5 km	
	e. Hotel	1. ≤ 5 km	2. > 5 km	

3003	Proporsi rumah tangga memiliki listrik		1. > 90%	2. ≤ 90%	☐
3004	Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada P.3002		1. Ya	2. Tidak	☐
3005	Kondisi geografis (ISIKAN KODE "1" JIKA "YA", DAN KODE "2" JIKA TIDAK)				
	a. Pedalaman	☐	d. Pulau kecil		☐
	b. Pegunungan	☐	e. Gugus pulau		☐
	c. Pesisir	☐			
3006	Rawan bencana alam (ISIKAN KODE "1" JIKA "YA", DAN KODE "2" JIKA TIDAK) :				
	a. Tanah longsor	☐	c. Banjir		☐
	b. Gunung api	☐	d. Kebakaran hutan		☐
3007	Terdapat akses transportasi umum rutin dari kota/ibukota kabupaten ke puskesmas		1. Ya	2. Tidak → P.3009	☐
3008	Jenis transportasi umum dimaksud				
	a. Darat	1. Ya 2. Tidak	☐	c. Udara	1. Ya 2. Tidak ☐
	b. Laut	1. Ya 2. Tidak	☐		
3009	Frekuensi transportasi umum dari kota/kota kabupaten ke puskesmas		1. ≥ 1 kali/seminggu	2. < 1 kali seminggu	☐
3010	Waktu tempuh menggunakan transportasi umum rutin dari puskesmas ke ibukota kabupaten/ kota (pulang pergi)		1. > 6 jam	2. ≤ 6 jam	☐
3011	Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim/cuaca		1. Ya	2. Tidak	☐
3012	Kesulitan pemenuhan bahan pokok		1. Ya	2. Tidak	☐
3013	Kondisi keamanan yang tidak stabil		1. Ya	2. Tidak	☐
3014	Keberadaan Listrik		1. Ya	2. Tidak → P.3016	☐
3015	Lamanya keberadaan listrik dalam sehari		1. 18 – 24 jam 2. 12 – < 18 jam	3. 6 - < 12 jam 4. > 0 - < 6 jam	☐
3016	Keberadaan air bersih untuk keperluan sehari-hari puskesmas di lingkungan puskesmas		1. Ya	2. Tidak	☐
3017	Keberadaan sinyal handphone yang kuat di lingkungan kecamatan		1. Ya	2. Tidak	☐
3018	Keberadaan sinyal Internet yang kuat di lingkungan kecamatan		1. Ya	2. Tidak	☐
IV. DATA UMUM					
4001.	Ijin Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan		1. Ada, bukti dokumen 2. Ada, tidak ada dokumen	3. Tidak ada	☐
4002.	Kategori puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan		1. Rawat Inap	2. Non Rawat Inap	☐
4003.	SK Penetapan puskesmas sebagai :				
	a. Puskesmas Perkotaan	1. Ya	2. Tidak		☐
	b. Puskesmas Perdesaan	1. Ya	2. Tidak		☐
	c. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1. Ya	2. Tidak		☐
4004.	Kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja (Persepsi Kepala Puskesmas)	1. Puskesmas Perkotaan 2. Puskesmas Perdesaan	3. Puskesmas Terpencil/ Sangat terpencil 4. Tidak tahu		☐
4005.	Tahun berdiri puskesmas			☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

4006.	Pengakuan terhadap mutu (Akreditasi, ISO)	1. Ya	2. Tidak →P.4011	☐
4007.	Mendapatkan pengakuan mutu ISO	1, Ya	2. Tidak →P.4009	☐
4008.	Tahun memperoleh pengakuan mutu ISO		☐ ☐ ☐ ☐	
4009.	Mendapatkan pengakuan mutu akreditasi	1. Ya	2. Tidak →P.4011	☐
4010.	Tahun memperoleh pengakuan mutu akreditasi		☐ ☐ ☐ ☐	
4011.	Status Pola Pengelolaan Keuangan	1. BLUD	2. Non BLUD	☐
4012.	Hari kerja puskesmas dalam seminggu	1. 6 hari kerja→P.4014 2. 5 hari kerja→P.4014	3. Lain-lain	☐
4013.	Bila jawaban P.4012 adalah 3 (Lain-lain), jelaskan :			
4014.	Pembagian shift kerja	1. Satu shift→P.4016 2. Dua shift→P.4016	3. Tiga shift→P.4016 4. Lain-lain	☐
4015.	Bila jawaban P.4014 adalah 4 (Lain-lain), jelaskan :			
4016.	Lama kerja puskesmas dalam sehari	 Jam		☐ ☐
		 menit		☐ ☐
	a. Status puskesmas dalam kemampuan tatalaksana penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak	1. Puskesmas Mampu PONED 2. Puskesmas Tidak mampu PONED (Non PONED) →P.4017		☐
	b. Bila jawaban P.4016a adalah 1, apakah memberikan pelayanan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu?	1. Ya 2. Tidak		☐
4017.	Jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas	jiwa		
4018.	Jumlah desa di wilayah kerja	☐ ☐		
4019.	Jumlah kelurahan di wilayah kerja	☐ ☐		
4020.	Jumlah puskesmas pembantu di wilayah kerja	☐ ☐		
4021.	Jumlah puskesmas pembantu (PUSTU) yang berfungsi (JIKA SEMUA PUSTU BERFUNGSI (>" 0") LANJUT KE P.4023)	☐ ☐		
4022.	Jumlah Puskesmas Pembantu yang tidak berfungsi berdasarkan alasan			
	a. Bangunan tidak layak huni	☐ ☐	d. Dipalang/konflik	☐ ☐
	b. Rawan gangguan keamanan	☐ ☐	e. Tidak ada tenaga	☐ ☐
	c. Jauh dari pemukiman	☐ ☐	f. Lain-lain	☐ ☐
4.1. ÚPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM)				
4023.	Jumlah posyandu aktif	☐ ☐ ☐		
4024.	Jumlah pos kesehatan desa (poskesdes) di wilayah kerja	☐ ☐		
4025.	Pos kesehatan pesantren (poskestren)	☐ ☐		
4026.	Kelompok donor darah	☐ ☐		
4027.	Bina Keluarga Balita (BKB)	☐ ☐		

4028.	Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)				
4029.	Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD)				
4030.	Jumlah pondok bersalin desa (polindes) di wilayah kerja				
4031.	Jumlah desa dengan keberadaan Polindes				
4032.	Jumlah polindes yang dalam kondisi layak huni				
4033.	Jumlah polindes yang ditempati (BILA SEMUA POLINDES DITEMPATI) MAKA LANJUT P.4035)				
4034.	Jumlah polindes yang tidak ditempati berdasarkan alasan				
	a. Bangunan tidak layak huni		d. Dipalang/konflik		
	b. Rawan gangguan keamanan		e. Tidak ada tenaga		
	c. Jauh dari pemukiman		f. Lain-lain		
4035.	Jumlah posyandu lanjut usia (lansia)				
4036.	Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)				
4037.	Jumlah pos malaria desa				
4038.	Jumlah pos pembinaan terpadu (posbindu)				
4039.	Jumlah pos obat desa				
4.2. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS					
4040.	Jumlah Rumah Sakit				
	a. RSU Pemerintah		b. RS Khusus Pemerintah		
	c. RSU Swasta		d. RS Khusus Swasta		
4041.	Jumlah Klinik				
	a. Klinik Pratama		b. Klinik Utama		
4042.	Jumlah Praktek Perorangan				
	a. Tempat praktik mandiri dokter spesialis		b. Tempat praktik mandiri bidan		
	c. Tempat praktik mandiri dokter umum		d. Tempat praktik mandiri perawat		
	e. Tempat praktik mandiri dokter gigi				
4043.	Laboratorium klinik				
4044.	Apotek				
4045.	Toko obat berijin				
4.3. TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA)					
4046.	Terdapat tenaga kesehatan warga negara asing (TK WNA) di wilayah kerja			1. Ya 2. Tidak → P.4049 3. Tidak tahu → P. 4049	
4047.	Memiliki data tenaga kesehatan warga negara asing (TK WNA) di wilayah kerja			1. Ya 2. Tidak → P.4049	
4048.	Jumlah tenaga kesehatan warga negara asing di wilayah kerja				

4.4. OUTPUT PUSKESMAS (data yang diambil adalah data tahun 2016)						
4049.	Jumlah total kunjungan rawat jalan tahun 2016	. .				
4050.	Apakah puskesmas memberikan pelayanan rawat inap tahun 2016	1. Ya	2. Tidak → P.4052			
4051.	Jumlah total kunjungan rawat inap tahun 2016	. .				
4052.	Jumlah pasien kunjungan rumah	.				
4.5. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL						
4053.	Apakah puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	1. Ya	2. Tidak → Blok 4.6			
4054.	Apakah ada SK yang ditetapkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	1. Ada	2. Tidak			
4055.	Waktu hari buka pelayanan kesehatan tradisional	1. Setiap hari kerja	2. Waktu tertentu			
4056.	Jenis pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan di puskesmas					
	a. Akupresur	1. Ya	2. Tidak			
	b. Herbal	1. Ya	2. Tidak			
	c. Lainnya, sebutkan	1. Ya	2. Tidak			
4057.	Terdapat data penyehat tradisional yang berpraktek di wilayah kerja	1. Ya	2. Tidak			
4058.	Apakah puskesmas melakukan pembinaan terhadap penyehat tradisional di wilayah kerja	1. Ya	2. Tidak			
4059.	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas					
4060.	Jenis tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah	Latar belakang pendidikan			
	(1)	(2)	D-III (3)	D-IV (4)	S 1 Profesi (5)	Lainnya (6)
	a. Perawat/bidan					
	b. Fisioterapis					
	c. Dokter					
	d. Lainnya (sebutkan)					
4061.	Jenis tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah	Status kepegawaian tenaga pelaksana pelayanan kesehatan tradisional			
			PNS/ CPNS/ Tetap Swasta	Kontrak/ PPPK/ PTT/BLU	Sukarela	Lainnya
	a. Perawat/bidan					
	b. Fisioterapis					
	c. Dokter					
	d. Lainnya (sebutkan)					
4062.	Keilmuan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional didapat dari					
	a. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	 orang				
	b. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Non Pemerintah	 orang				
	c. Pendidikan formal di perguruan tinggi	 orang				
	d. Tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus	 orang				

4063.	BILA JAWABAN P4062a dan P4062b ADALAH ≥ 1 ORANG Bila keilmuan didapat dari hasil pelatihan, apakah memiliki sertifikat pelatihan	1. Ya, semua tenaga 2. Ya, sebagian tenaga 3. Tidak ada semuanya 4. Tidak tahu	☐	
4064.	Jumlah pasien yankestrad rata-rata dalam sehari pelayanan			
4065.	Bagaimana mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan tradisonal			
	a. Bayar sendiri	1. Ya 2. Tidak	☐	
	b. Ditanggung oleh BPJS	1. Ya 2. Tidak	☐	
	c. Ditanggung oleh Jamkesda	1. Ya 2. Tidak	☐	
	d. Lain-lain, sebutkan	1. Ya 2. Tidak	☐	
4.6. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM				
No	PROGRAM	Penanggungjawab 1. Ada 2. Tidak → baris berikutnya	Pendidikan 1. Sesuai 2. Tidak sesuai	STR. 1. Ada 2. Tidak ada
	(1)	(2)	(3)	(4)
4066.	Promosi kesehatan	☐	☐	☐
4067.	Tuberkulosis	☐	☐	☐
4068.	Penyakit Tidak Menular	☐	☐	☐
4069.	Kesehatan jiwa	☐	☐	☐
4070.	Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana	☐	☐	☐
4071.	Gizi	☐	☐	☐
4072.	Kesehatan lingkungan	☐	☐	☐
4073.	Imunisasi	☐	☐	☐
4074.	Pengobatan	☐	☐	☐
4075.	Laboratorium	☐	☐	☐

V. STATUS KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

5001.	Jumlah seluruh tenaga puskesmas									
No	Jenis Tenaga	Jumlah	PNS/ CPNS	PTT Pusat	PTT Daerah	BLU	Kontrak	Sukarela	Nusantara Sehat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.1 Tenaga Kesehatan										
5002.	Tenaga Medis									
	a. Dokter umum									
	b. Dokter gigi									
	c. Dokter spesialis									
	d. Dokter gigi spesialis									
5003.	Psikologi klinis									
5004.	Perawat									
	a. Vokasi (D3/D4)									
	b. Profesi (Ners)									
5005.	Bidan									
	a. Vokasi (D3/D4)									
	b. Sarjana Kebidanan									
5006.	Farmasi									
	a. Apoteker									
	b. Sarjana/Magister farmasi Non Apoteker									
	c. Ahli madya farmasi									
	d. Analis farmasi dan makanan									

V. STATUS KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status Kepegawaian							
			PNS/ CPNS	PTT Pusat	PTT Daerah	BLU	Kontrak	Sukarela	Nusantara Sehat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5007.	Tenaga Kesehatan Masyarakat									
	a. Epidemiolog									
	b. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku									
	c. Pembimbing kesehatan kerja									
	d. Administrasi dan kebijakan kesehatan									
	e. Biostatistika dan kependudukan									
	f. Kesehatan reproduksi dan keluarga									
	g. Informatika Kesehatan									
	h. Tenaga Kesmas lainnya									
5008.	Kesehatan Lingkungan									
	a. Sanitasi lingkungan									
	b. Entomolog kesehatan									
	c. Mikrobiolog kesehatan									
5009.	Tenaga gizi									
	a. Nutrisionis									
	b. Dietisien									

V. STATUS KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status Kepegawaian							
			PNS/ CPNS	PTT Pusat	PTT Daerah	BLU	Kontrak	Sukarela	Nusantara Sehat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5010.	Keterampilan fisik									
	a. Fisioterapis									
	b. Okupasi terapis									
	c. Terapis wicara									
	d. Akupunktur									
5011.	Keteknisian medis									
	a. Perekam medis dan informasi kesehatan									
	b. Teknik kardiovaskuler									
	c. Teknisi pelayanan darah									
	d. Refraksionis optisien/optometris									
	e. Teknisi gigi									
	f. Penata anestesi									
	g. Terapis gigi dan mulut									
	h. Audiologis									

V. STATUS KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status Kepegawaian							
			PNS/ CPNS	PTT Pusat	PTT Daerah	BLU	Kontrak	Sukarela	Nusantara Sehat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5012.	Teknik biomedika									
	a. Radiografer									
	b. Elektromedis									
	c. Ahli teknologi laboratorium medik									
	d. Fisikawan medik									
	e. Radioterapis									
	f. Ortotik prostetik									
5013.	Tenaga kesehatan tradisional ramuan									
5014.	Tenaga kesehatan tradisional ketrampilan									
5.2. NON TENAGA KESEHATAN										
5.2.1. PENDIDIKAN TINGGI										
5015.	Hukum									
5016.	Ekonomi									
5017.	Ilmu sosial dan Ilmu Politik									
5018.	Kesekretariatan									
5019.	Ilmu Komunikasi									
5020.	Informasi, Teknologi, Komputer									
5021.	Ilmu Kependidikan									
5022.	Lain-lain									

V. STATUS KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status Kepegawaian							
			PNS/ CPNS	PTT Pusat	PTT Daerah	BLU	Kontrak Daerah	Kontrak Sukarela	Nusantara Sehat	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.2 SDM KESEHATAN DI BAWAH D3										
5023.	SPK									
5024.	PPB-A/D1 Bidan									
5025.	SPRG									
5026.	SPAG									
5027.	SPPH									
5028.	SMAK									
5029.	SMA + Pelatihan Rekam Medis									
5030.	SMF									
5.2.3 PENDIDIKAN MENENGAH										
5031.	SMK Kesehatan									
	a. Keperawatan									
	b. Keperawatan Gigi									
	c. Analis Kesehatan									
	d. Farmasi									
	e. Farmasi industry									
5032.	SMA / MA sederajat									
5033.	SMP/MTs sederajat									
5034.	SD/MI Sederajat/Tidak sekolah									

VI. LOKASI PENUGASAN DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERTINGGI

No	Jenis tenaga	Jumlah	PENUGASAN		Lulusan Poltekkes Kemenkes	PENDIDIKAN TERTINGGI SAAT INI						
			Dalam gedung Puskesmas	Luar gedung puskesmas		Spesialis	S2Kes	S2 Non Kes	S1/D4 Kes	S1/D4 Non Kes	D3	< D3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6001.	Dokter Puskesmas											
6002.	Dokter gigi											
6003.	Perawat											
6004.	Bidan											
6005.	Tenaga Farmasi											
6006.	Kesehatan masyarakat											
6007.	Gizi											
6008.	Kesehatan lingkungan											
6009.	Keterampilan Fisik											
6010.	Keteknisian Medis											
6011.	Teknik Biomedika											
6012.	SMK Kesehatan											

VII. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
7.1. PERENCANAAN				
7001.	Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1. Ya 2. Tidak → P.7009	☐	
7002.	Puskesmas mendokumentasikan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (memiliki dokumen perencanaan)	1. Ya 2. Tidak	☐	
7003.	Cara perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan (JIKA JAWABAN LEBIH DARI 1, JUMLAHKAN KODE JAWABAN) 01. Analisis Beban Kerja (WISN) 08. Tidak menggunakan metode tertentu 02. Rasio tenaga kesehatan 16. Perhitungan lain, sebutkan 04. Standar Ketenagaan Minimal sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014		☐ ☐	
JIKA JAWABAN BERKODE "2" SAJA ATAU "4" SAJA, LANJUT KE P.7005 JIKA JAWABAN BERKODE "8" SAJA ATAU "16" SAJA, LANJUT KE P.7006				
7004.	Bila menggunakan perhitungan menggunakan metode ABK, regulasi apa yang menjadi acuan 1. Permenkes 33 tahun 2015 3. Permenpan no 26 tahun 2011 5. Tidak tahu 2. Permendagri No 12 tahun 2008 4. Perka BKN no 19 tahun 2011			☐
7005.	Berdasar hasil perhitungan yang dilakukan bagaimana kondisi ketenagaan saat ini di Puskesmas	1. Sesuai 3. Berlebih 2. Kurang	☐	
7006.	Menurut saudara secara umum apakah tenaga kesehatan yang tersedia sudah cukup	1. Sesuai 3. Berlebih 2. Kurang	☐	
7007.	Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah disusun dilaporkan kepada siapa			
	a. Dinkes Kab/Kota	1. Ya 2. Tidak	☐	
	b. Lainnya	1. Ya 2. Tidak	☐	
7008.	Dokumen perencanaan digunakan dalam pengajuan kebutuhan dan bagaimana respon terhadap pengajuan	Pengajuan kebutuhan 1 = Ya 2 = Tidak → lanjut baris berikutnya	Apakah ada perubahan positif 1 = Ya 2 = Tidak	
	(1)	(2)	(3)	
	a. Tenaga	☐	☐	
	b. Anggaran	☐	☐	
	c. Pelatihan	☐	☐	
	d. Pendidikan	☐	☐	
	e. Sarana dan prasarana	☐	☐	
	f. Lainnya, sebutkan	☐	☐	
7.2. PENGELOLAAN KETENAGAAN				
7.2.1 KEHADIRAN				
7009.	Pencatatan kehadiran tenaga puskesmas tahun 2016	1. Ada 2. Tidak → P.7017	☐	
7010.	Jika dilakukan pencatatan apa jenisnya	1. Manual 2. Elektronik 3. Kombinasi kedua	☐	
7011.	Apakah terdapat rekapitulasi kehadiran	1. Ya 2. Tidak → P.7017	☐	
7012.	Frekuensi rekapitulasi	1. Setiap bulan 2. Tidak setiap bulan	☐	
7013.	Terdapat evaluasi kehadiran	1. Ya, ada dokumen 3. Tidak ada 2. Ya, tidak ada dokumen	☐	
7014.	Jumlah petugas yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 - 30 hari tahun 2016			☐ ☐
7015.	Jumlah petugas yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama > 30 hari tahun 2016			☐ ☐

7016.	a. Apakah pernah diberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin kehadiran yang dilakukan oleh petugas pada tahun 2016	1. Ya 2. Tidak → P.7017 3. Tidak ada pelanggaran disiplin → P.7017	☐
b. Sanksi terhadap pelanggaran disiplin kehadiran			
Jenis Sanksi		ISIKAN KODE 1. Ada 2. Tidak ada	JUMLAH
(1)		(2)	(3)
1. Teguran lisan		☐	☐ ☐
2. Teguran tertulis		☐	☐ ☐
3. Penundaan kenaikan pangkat		☐	☐ ☐
4. Pemutusan hubungan kerja		☐	☐ ☐
5. Penundaan Kenaikan Gaji Bekala		☐	☐ ☐
6. Lainnya.....		☐	☐ ☐
7.2.2 KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KERJA			
7017.	Memiliki data mengenai jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja	1. Ya 2. Tidak → P.7019	☐
7018.	Jumlah tenaga kesehatan	☐ ☐	
7019.	Jumlah bidan desa	☐ ☐	
7020.	Jumlah desa dengan bidan desa menetap di desa	☐ ☐	
7021.	Jumlah desa tanpa bidan desa	☐ ☐	
7022.	Jumlah desa/kelurahan dengan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) menetap di desa/kelurahan, baik tenaga kesehatan yang berdinis di puskesmas ataupun yang tidak.	☐ ☐	
7023.	Jumlah puskesmas pembantu dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang menetap	☐ ☐	
7.2.3 MUTASI DAN PENSIUN			
7024.	Jumlah pegawai yang pensiun, keluar, meninggal, tidak mampu bekerja karena sakit/cacat, dipecat atau keluar dengan alasan apapun sejak tahun 2014 – sekarang		
	a. Tetap (PNS/CPNS)	☐ ☐	b. Tidak Tetap (selain PNS/CPNS) ☐ ☐
7025.	Jumlah pegawai baru yang masuk ke puskesmas sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang		
	a. Tetap (PNS/CPNS)	☐ ☐	b. Tidak Tetap (selain PNS/CPNS) ☐ ☐
7026.	Jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun 2018		
	a. Tetap (PNS/CPNS)	☐ ☐	b. Tidak Tetap (selain PNS/CPNS) ☐ ☐
7.3 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
7.3.1 PENDIDIKAN			
7027.	Apakah dilakukan perencanaan kebutuhan tugas belajar bagi pegawai di puskesmas	1. Ya 2. Tidak → P.7031	☐
7028.	Apakah tugas belajar yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan	1. Ya 2. Tidak	☐
7029.	Apakah saudara sudah menerima manfaat dari program tubel dalam peningkatan mutu puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
7030.	Jumlah SDM kesehatan yang direncanakan akan melaksanakan tugas belajar di tahun 2018	☐ ☐	

DATA JENIS PENDIDIKAN DAN SUMBER PENDANAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN 3 TAHUN TERAKHIR						
7031.	Jml tenaga kesehatan yg mengikuti pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (termasuk yg selesai pada periode 2014– 2016)					
	Jenjang pendidikan	Jenis Pendidikan		Sumber Pendanaan		
		Tugas Belajar	Ijin Belajar	Kemenkes	Pemerintah Daerah	Swasta/ yayasan/ donor lain
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Spesialis					
	b. S3					
	c. S2					
	d. S1					
	e. DIV					
	f. DIII					
7032.	Jumlah tenaga Non Kesehatan yang mengikuti pendidikan Lanjutan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (termasuk yang selesai pada periode 2014 – 2016)					
	Jenjang pendidikan	Jenis Pendidikan		Sumber Pendanaan		
		Tugas Belajar	Ijin Belajar	Kemenkes	Pemerintah Daerah	Swasta/ yayasan lain
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. S3					
	b. S2					
	c. S1					
	d. DIV					
	e. DIII					
7033.	Jumlah peserta tugas belajar					
	Jenis Nakes	Selesai pendidikan dalam 3 tahun terakhir (2014 – 2016)	Selesai pendidikan dalam 3 tahun terakhir dan kembali berdinis di puskesmas	Selesai pendidikan dalam 3 tahun terakhir dan kembali berdinis di lingkungan pemerintah kab/kota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	a. Dokter					
	b. Dokter gigi					
	c. Perawat					
	d. Bidan					
	e. Farmasi					
	f. Kesling					
	g. Gizi					
	h. Ahli teknologi laboratorium medik					
	i. Kesmas					
	j. Nakes Lainnya.....					
	k. Non nakes					

7.3.2 PELATIHAN									
7034.	Apakah puskesmas melakukan analisis kebutuhan pelatihan (Traning Need Analysis)						1. Ya	2. Tidak	☐
7035.	Apakah dibuat perencanaan anggaran pelatihan						1. Ya	2. Tidak	☐
7036.	Apakah dibuat perencanaan pegawai yang akan mengikuti pelatihan						1. Ya → P.7038	2. Tidak	☐
7037.	Jika tidak, bagaimana proses perencanaan pelatihan								
	a. Penugasan dari Dinas Kesehatan						1. Ya	2. Tidak	☐
	b. Metode lain, sebutkan						1. Ya	2. Tidak	☐
7038.	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tahun 2015 dan 2016 berdasarkan jenis pegawai								
	a. Tahun 2015					b. Tahun 2016			
	PNS/CPNS	Non PNS		Jumlah		PNS/ CPNS	Non PNS		Jumlah
	(1)	(2)		(3)		(1)	(2)		(3)
7039.	Jumlah pelatihan yang diikuti oleh pegawai pada tahun 2015 - 2016 berdasarkan penyelenggara pelatihan								
	a. Jumlah pelatihan tahun 2015					b. Jumlah pelatihan tahun 2016			
	Pusat	Provinsi	Kab/kota	Lainnya	Pusat	Provinsi	Kab/kota	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
7040.	Jumlah pelatihan teknis program yang diikuti pada tahun 2015								
	Jumlah	KIA-KB	Gizi	Kesling	P2P - Imunisasi	Lab	Promkes	Pencatatan dan Pelaporan	Kedinasan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7041.	Jumlah pelatihan teknis program yang diikuti pada tahun 2016								
	Jumlah	KIA-KB	Gizi	Kesling	P2P - Imunisasi	Lab	Promkes	Pencatatan dan Pelaporan	Kedinasan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7042.	Jumlah tenaga jabatan fungsional pada tahun 2016								
7043.	Jumlah pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pada tahun 2015								
	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Sanitarian	Kesmas	Apoteker	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7044.	Jumlah pelatihan jabatan fungsional yang diikuti pada tahun 2016								
	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Sanitarian	Kesmas	Apoteker	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

8004.	Apakah ada permasalahan kesenjangan penghasilan yang pernah dikeluhkan oleh : (ISIKAN KODE "1" JIKA "YA" ATAU KODE "2" JIKA TIDAK).		
	a. PNS/CPNS kabupaten/kota	☐	c. Tenaga sukarelawan
	b. Tenaga honorer/ kontrak puskesmas	☐	d. Status kepegawaian lainnya, sebutkan.....
JIKA SELURUH JAWABAN BERKODE 2 (TIDAK) → P.8006			
8005.	Apakah permasalahan kesenjangan penghasilan tersebut berpengaruh pada kinerja petugas	1. Ya 2. Tidak	☐
8.2 INSENTIF NON FINANSIAL			
8006.	Adakah fasilitas rumah dinas untuk tenaga puskesmas?	1. Ya 2. Tidak → P.8013	☐
8007.	Jumlah rumah dinas	 buah	☐ ☐
8008.	Jumlah yang kondisinya layak huni	 buah	☐ ☐
8009.	Jumlah rumah dinas yang dimanfaatkan oleh pegawai puskesmas	 buah	☐ ☐
8010.	Siapa yang memanfaatkan rumah dinas:		
	a. Kepala puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Dokter	1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Dokter gigi	1. Ya 2. Tidak	☐
	d. Perawat	1. Ya 2. Tidak	☐
	e. Bidan	1. Ya 2. Tidak	☐
	f. Farmasi	1. Ya 2. Tidak	☐
	g. Kesling	1. Ya 2. Tidak	☐
	h. Gizi	1. Ya 2. Tidak	☐
	i. Ahli teknologi laboratorium medik	1. Ya 2. Tidak	☐
	j. Kesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
	k. Lainnya.....	1. Ya 2. Tidak	☐
8011.	Apakah rumah dinas sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
8012.	Apakah ada fasilitas komunikasi antara puskesmas dengan rumah dinas?	1. Ada 2. Tidak	☐
8013.	Adakah fasilitas kendaraan dinas?	1. Ya 2. Tidak → P.8018	☐
8014.	Jumlah kendaraan dinas	 buah	☐ ☐
8015.	Jumlah kendaraan dinas yang kondisinya layak pakai	 buah	☐ ☐
8016.	Alokasi dana untuk pemeliharaan	1. Ada 2. Tidak	☐
8017.	Jenis kendaraan dinas (JIKA JAWABAN LEBIH DARI 1, JUMLAHKAN KODE JAWABAN)	01. Mobil non ambulans 02. Sepeda motor 04 .Sepeda	08. Perahu 16. Lainnya ☐ ☐

8018.	Adakah kebijakan pimpinan dalam hal memfasilitasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan	1. Ya 2. Tidak	☐
8019.	Dasar penetapan pemilihan SDM Kesehatan yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan (JIKA JAWABAN LEBIH DARI 1, JUMLAHKAN KODE JAWABAN)	01. Sesuai tupoksi 02. Masa kerja lama 04. Kinerja baik 08. Lainnya.....	☐ ☐
8020.	Apakah tenaga non PNS memiliki jaminan kesehatan?	1. Ya, seluruhnya 2. Ya, Sebagian 3. Tidak → P.8022	☐
8021.	Pembayaran premi Jaminan Kesehatan 1.Seluruh tenaga non PNS dibiayai oleh Pemerintah/ perusahaan/ RS/ Yayasan 2.Sebagian tenaga non PNS dibiayai Pemerintah/ perusahaan/ RS /Yayasan 3.Seluruh tenaga non PNS membiayai sendiri (Mandiri)		☐
8022.	Apakah ada aturan tertulis pembagian jasa medik/pelayanan di antara berbagai jenis karyawan Puskesmas	1. Ya 2. Tidak → P.8024	☐
8023.	Bagaimana penerapan aturan tersebut	1. Belum diterapkan 2. Diterapkan keseluruhan 3. Diterapkan dengan modifikasi	☐
8.3 INSENTIF FINANSIAL			
8024.	Apakah petugas puskesmas mendapatkan insentif sebagai berikut:		
	Jenis Insentif Finansial	Ketersediaan 1. Ya 2. Tidak	Termin pembayaran (lihat kode)
	(1)	(2)	(3)
	a. Tunjangan/ insentif daerah terpencil/ Perbatasan	☐	☐
	b. Insentif khusus tenaga kesehatan tertentu	☐	☐
	c. Tunjangan Kinerja daerah	☐	☐
	d. Kapitasi	☐	☐
	e. Biaya transport	☐	☐
	f. Uang makan	☐	☐
	g. Tunjangan kemahalan	☐	☐
	h. Lain-lain	☐	☐
Kode kolom (3) 1. Setiap bulan 4. Setiap setahun 2. Setiap triwulan 5. Per kegiatan 3. Setiap 6 bulan		Kode kolom (4) : jumlahkan kode jika jawaban lebih dari satu 01. Kelangkaan profesi 08. Tempat/ Lokasi kerja 02. Beban Kerja 16. Kondisi kerja 04. Prestasi kerja	

IX. PENUGASAN GANDA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG												
KEGIATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PUSKESMAS (ISIKAN "1" JIKA YA, DAN "2" JIKA TIDAK ADA, KODE 3 "TIDAK BERLAKU")												
No	JENIS TINDAKAN	JENIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
		Dokter	Dokter gigi	Perawat	Perawat gigi	Bidan	Farmasi	Analisis	Gizi	Kesling	Kesmas	Non Nakes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9001.	Tindakan Medis Umum											
	a. Pemeriksaan dan pengobatan pasien	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Menjahit luka (hecting)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Injeksi obat/vaksin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. pemasangan dan pelepasan infus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	e. Sirkumsisi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	f. Pengambilan benda asing di telinga/ hidung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	g. Tindakan bedah minor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9002.	Tindakan medis gigi											
	a. Pencabutan gigi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Penambalan gigi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Pemasangan gigi palsu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Pemasangan kawat gigi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9003.	Tindakan KB											
	a. Pemasangan/ pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Pemasangan/ pelepasan implan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Suntik KB	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Kontrasepsi mantap : MOP, MOW	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

KEGIATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PUSKESMAS (ISIKAN "1" JIKA YA, DAN "2" JIKA TIDAK ADA, KODE 3 "TIDAK BERLAKU")												
No	JENIS TINDAKAN	JENIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
		Dokter	Dokter gigi	Perawat	Perawat gigi	Bidan	Farmasi	Analisis	Gizi	Kesling	Kesmas	Non Nakes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9004.	Tindakan KIA											
	a. Persalinan normal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Persalinan dengan Vakum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Sectio Caesarea (SC)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Kuretase	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	e. Suntik Imunisasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9005.	Tindakan Farmasi											
	a. Meracik obat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Menyerahkan obat dan memberikan informasi obat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9006.	Tindakan Laboratorium											
	Melakukan pemeriksaan di laboratorium klinik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9007.	Upaya Kesehatan Masyarakat											
	a. Penyuluhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	b. Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	c. Melakukan deteksi dini/penemuan kasus TB di masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	d. Pelatihan kader kesehatan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	e. Fogging/abatesasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9008.	Apakah di Puskesmas ada tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki?	1. Ya 2. Tidak→BLOK X	☐
9009.	Penugasan tersebut berupa penugasan di bidang apa?		
	a. Bidang manajemen	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Bidang tatalaksana pasien	1. Ya 2. Tidak	☐
JIKA JAWABAN P.9009a BERKODE 1 = "YA", LANJUT KE P.9010 JIKA JAWABAN P.9009a BERKODE 2 = "TIDAK" DAN JAWABAN P.9009b BERKODE 1 = "YA", LANJUT KE P.9022 JIKA JAWABAN P.9009a BERKODE 2 = "TIDAK" DAN JAWABAN P.9009b BERKODE 2 = "TIDAK", LANJUT KE BLOK X			
A. PENUGASAN GANDA			
9010.	Bentuk penugasan di bidang manajemen sebagai : (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")		
	a. Bendahara puskesmas	☐	e. Recording dan Reporting (pencatatan dan pelaporan)
	b. Bendahara JKN	☐	f. Pembuat laporan Program Lain di luar latar belakang pendidikan yang dimiliki
	c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	☐	g. Lainnya.....
	d. Administrasi, kepegawaian, registrasi pasien	☐	
9011	Apakah penugasan tersebut dikuatkan dengan surat tugas/ surat keputusan (SK) tertulis?	1. Ya, seluruhnya 3. Tidak 2. Ya, sebagian	☐
9012	Alasan Penugasan (Jumlahkan jika jawaban lebih dari 1)	1. Jumlah tenaga kurang 2. Jumlah tenaga terlatih bidang tertentu kurang 4. Lainnya.....	☐
9013	Surat tugas/ Surat keputusan (SK) ditandatangani/dikeluarkan oleh siapa?		
	a. Kepala dinas kesehatan	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Kepala puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
9014	Adakah penerima tugas yang menolak?	1. Ya 2. Tidak→P.9016	☐
9015	Alasan penolakan		
	a. Tidak kompeten	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Sudah terlalu banyak tugas	1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Lainnya, sebutkan	1. Ya 2. Tidak	☐
9016	Apakah ada keharusan untuk melaporkan kembali hasil penugasan tersebut?	1. Ya 2. Tidak	☐
9017	Apakah ada supervisi dari pemberi tugas?	1. Ya 2. Tidak	☐
9018	Apakah ada imbalan atas tugas tambahan yang diberikan?	1. Ya, seluruhnya 3. Tidak→P.9020 2. Ya, sebagian	☐
9019	Apa bentuk imbalannya?		
	a. Honor tambahan	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Penambahan pembagian jasa kapitasi	1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Lainnya, sebutkan	1. Ya 2. Tidak	☐
9020	Apakah penerima penugasan tersebut pernah diberi pelatihan khusus terkait dengan tugas yang akan di terimanya?	1. Ya 2. Tidak→P.9022	☐
9021	Pelatihan yang diberikan	1. Sewaktu 2. Berkala 3. Keduanya	☐

B. PENDELEGASIAN WEWENANG

9022	Bentuk penugasan di bidang tata laksana pasien sebagai : (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")			
	a. Tindakan medis umum	☐	e. Tindakan farmasi	☐
	b. Tindakan medis gigi	☐	f. Tindakan laboratorium	☐
	c. Tindakan Keluarga Berencana (KB)	☐	g. Lainnya.....	☐
	d. Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	☐		
9023	Apakah penugasan tersebut dikuatkan dengan surat tugas/ surat keputusan (SK) tertulis?		1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak	☐
9024	Alasan Penugasan (Jumlahkan jika jawaban lebih dari 1)		1. Jumlah tenaga kurang 2. Jumlah tenaga terlatih kurang 4. Lainnya.....	☐
9025	Surat tugas / Surat keputusan (SK) ditandatangani/dikeluarkan oleh siapa?			
	a. Kepala dinas kesehatan	1. Ya 2. Tidak		☐
	b. Kepala puskesmas	1. Ya 2. Tidak		☐
9026	Apakah penerima tugas dapat menolak?		1. Ya 2. Tidak → P.9028	☐
9027	Alasan penolakan			
	a. Tidak kompeten	1. Ya 2. Tidak		☐
	b. Sudah terlalu banyak tugas	1. Ya 2. Tidak		☐
	c. Lainnya, sebutkan	1. Ya 2. Tidak		☐
9028	Apakah ada keharusan untuk melaporkan kembali hasil penugasan tersebut?		1. Ya 2. Tidak	☐
9029	Apakah ada supervise dari pemberi tugas?		1. Ya 2. Tidak	☐
9030	Apakah ada imbalan atas tugas tambahan yang diberikan?		1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak → P.9032	☐
9031	Apa bentuk imbalannya?			
	a. Honor tambahan	1. Ya 2. Tidak		☐
	b. Penambahan pembagian jasa kapitasi	1. Ya 2. Tidak		☐
	c. Lainnya, sebutkan	1. Ya 2. Tidak		☐
9032	Apakah penerima penugasan tersebut pernah diberi pelatihan khusus terkait dengan tugas yang akan di terimanya?		1. Ya 2. Tidak → P.9034	☐
9033	Pelatihan yang diberikan		1. Sewaktu 2. Berkala 3. Keduanya	☐
9034	Pernahkah ada kasus yang tidak diharapkan terjadi akibat melaksanakan pendelegasian tugas tersebut?		1. Ya 2. Tidak → P.9039	☐

9035	Apakah dampak dari kasus yang tidak diharapkan tersebut (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")		
	a. Pasien meninggal	☐	d. Tertular penyakit ☐
	b. Pasien cacat atau cedera	☐	1) Hepatitis ☐
	c. Kecelakaan Kerja (safety bagi nakes)	☐	2) HIV ☐
	1) Luka tusuk jarum bekas	☐	e. Sanksi administrasi (teguran, tidak naik pangkat, dipindahtugaskan, dipecat) ☐
	2) Luka robek	☐	f. Lainnya, sebutkan ☐
	3) Luka bakar	☐	
9036	Apabila terjadi kecelakaan kerja pada petugas yang diberi wewenang, apakah kejadian tersebut dilaporkan?		1. Ya 2. Tidak → P.9038 ☐
9037	Apakah ada tindak lanjut dari laporan kecelakaan kerja tersebut?		1. Ya 2. Tidak ☐
9038	Apakah dampak berujung pada tuntutan hukum?		1. Ya 2. Tidak ☐
9039	Adakah disediakan bantuan pembiayaan pada kasus (komplain) yang berujung pada tuntutan hukum?		1. Ya 2. Tidak ☐
X. PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA			
10001.	Nama Responden		
10002.	Jabatan Responden	1. Penanggungjawab KS 2. Kepala Puskesmas	3. Kepala Bagian Tata Usaha 4. Lainnya, sebutkan ☐
10003.	Telepon dan e-mail Responden		
	a. Telepon		
	b. Nomor HP		
	c. E-mail		
10.1. KESIAPAN PUSKESMAS MENJALANKAN PIS-PK			
10004.	Puskesmas pernah mendengar tentang pendekatan keluarga sehat (KS)	1. Ya 2. Tidak → P.10006	☐
10005.	Informasi tersebut berasal dari : (ISI KODE "1" YA ATAU "2" TIDAK)		
	a.Kemenkes	☐	e. Media elektronik ☐
	b.Dinkes Propinsi	☐	f. Media cetak ☐
	c.Dinkes Kab/Kota	☐	g. Masyarakat ☐
	d.Organisasi Profesi	☐	h. Lain-lain ☐
10006.	Puskesmas melaksanakan pendekatan KS	1. Ya 2. Tidak	☐
10007.	Terdapat penanggungjawab KS di Puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐
10008.	Puskesmas pernah mengikuti pelatihan keluarga sehat (CEK DOKUMEN)	1. Ya 2. Tidak → P.10044	☐
10009.	Penyelenggara pelatihan Keluarga Sehat : (ISI KODE "1" BILA YA, KODE "2" TIDAK)		
	a. Bapelkes Nasional/BBPK	☐	b. Dinkes Provinsi ☐
	c. Bapelkes Daerah	☐	d. Lain-lain ☐

10010.	Tahun pelaksanaan pelatihan terakhir						
10011.	Jumlah petugas puskesmas yang pernah mengikuti pelatihan KS :						
	a. Dokter			d. Kesehatan Lingkungan			g. Farmasi
	b. Bidan			e. Tenaga Gizi			h. Lain-lain
	c. Perawat			f. Kesehatan Masyarakat			
10012.	Apakah penanggungjawab KS adalah petugas yang dilatih KS?				1. Ya → P.10014 2. Tidak		
10013.	Jika tidak, siapa penanggungjawabnya						
	a. Kepala Puskesmas				1. Ya 2. Tidak		
	b. Petugas kesehatan yang lain				1. Ya 2. Tidak		
10014.	Apakah sudah dibentuk tim KS di tingkat Puskesmas				1. Ya 2. Tidak → P.10016		
10015.	Apakah sudah ada SK Kepala Puskesmas mengenai Tim KS Puskesmas				1. Ya 2. Tidak		
10016.	Puskesmas melakukan sosialisasi mengenai keluarga sehat				1. Ya 2. Tidak → P.10018		
10017.	Sasaran sosialisasi KS: (ISI KODE "1" BILA YA, KODE "2" TIDAK)						
	a. Jejaring puskesmas			f. RT/RW			
	b. Jaringan puskesmas			g. PKK			
	c. UKBM			h. Tokoh agama			
	d. Kecamatan			i. Tokoh masyarakat			
	e. Desa/Kelurahan			j. Lintas sektor lainnya			
10018.	Apakah KS sudah masuk dalam RUK dan RPK tahunan di Puskesmas? (cek dokumen)				1. Ya 2. Tidak		
10019.	Apakah tersedia anggaran yang dapat digunakan oleh Puskesmas untuk pendataan keluarga sehat?				1. Ya 2. Tidak → P.10021		
10020.	Sumber anggaran : (ISI KODE "1" BILA YA, KODE "2" TIDAK)						
	a. DAK			d. APBD			
	b. BOK			e. CSR			
	c. JKN			f. Lainnya			
10021.	Tersedia instrumen pendataan keluarga sehat				1. Ya 2. Tidak → P.10023		
10022.	Jenis instrumen pendataan keluarga sehat						
	a. Kuesioner manual				1. Ya 2. Tidak		
	b. Aplikasi berbasis web				1. Ya 2. Tidak		
10023.	Apakah tersedia Paket Informasi Kesehatan Keluarga (PINKESGA)				1. Ya 2. Tidak → P.10025		

10024.	Jika Ya, sumber pengadaan PINKESGA			
	a. Puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐	
	b. Dinas kesehatan kabupaten/kota	1. Ya 2. Tidak	☐	
	c. Dinas Kesehatan provinsi	1. Ya 2. Tidak	☐	
	d. Kementerian Kesehatan	1. Ya 2. Tidak	☐	
	e. Lain-lain	1. Ya 2. Tidak	☐	
10025.	Puskesmas melakukan pembagian wilayah binaan	1. Ya 2. Tidak	☐	
10026.	Puskesmas menetapkan pembina keluarga	1. Ya 2. Tidak → P.10028	☐	
10027.	Apakah sudah ada SK penunjukkan untuk pembina keluarga sehat	1. Ya 2. Tidak	☐	
10028.	Apakah Puskesmas sudah menyusun jadwal kegiatan KS	1. Ya 2. Tidak	☐	
10029.	Puskesmas melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengumpulan data Puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐	
10030.	Siapa yang akan melakukan pengumpulan data KS (ISIKAN KODE "1" BILA YA, KODE "2" TIDAK)			
	a. Petugas puskesmas	☐	b. Mahasiswa non kesehatan	☐
	c. Bidan desa	☐	d. Tim NS	☐
	e. Kader	☐	f. Lainnya	☐
	g. Mahasiswa kesehatan	☐		
10031.	Apakah ada petugas khusus untuk melakukan analisis data KS	1. Ya 2. Tidak → P.10033	☐	
10032.	Siapa yang melakukan analisis data KS? (ISI KODE "1" BILA YA, KODE "2" TIDAK)			
	a. Petugas puskesmas yang sudah dilatih KS	☐	b. Mahasiswa Non Kesehatan	☐
	c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	☐	d. Lainnya	☐
	e. Mahasiswa Kesehatan	☐		
10033.	Puskesmas mempunyai komputer dengan akses internet	1. Ya 2. Tidak	☐	
10034.	Apakah Puskesmas dapat melakukan interpretasi data dan penentuan prioritas masalah	1. Ya 2. Tidak → P.10036	☐	
10035.	Siapa yang melakukan interpretasi dan penentuan prioritas masalah (ISIKAN KODE "1" YA, KODE "2" TIDAK)			
	a. Penanggungjawab kegiatan KS	☐	b. Petugas puskesmas yang sudah dilatih KS	☐
10036.	Apakah tersedia sistem yang memungkinkan data KS terintegrasi dengan SIMPUS dan berfungsi?	1. Ya 2. Tidak	☐	
10037.	Puskesmas mampu menyusun rencana intervensi untuk pemecahan masalah	1. Ya 2. Tidak	☐	
10038.	Puskesmas melaksanakan lokakarya mini bulanan	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.10041	☐	
10039.	Apakah dalam lokakarya mini Puskesmas membahas tentang kegiatan KS?	1. Ya 2. Tidak → P.10042	☐	

10040.	Apa saja rencana yang akan dibahas mengenai KS? (ISIKAN KODE “1” YA, KODE “2” TIDAK)			
	a. Pencapaian KS	☐	c. Langkah-langkah pemecahan masalah	☐
	b. Kendala dan peluang dalam KS	☐	d. Langkah-langkah memanfaatkan peluang	☐
10041.	Puskesmas melaksanakan lokakarya mini triwulanan		1. Ya 2. Tidak → P.10063	☐
10042.	Apakah dalam lokakarya mini triwulanan Puskesmas membahas tentang kegiatan KS ?		1. Ya 2. Tidak → P.10063	☐
10043.	Apa saja rencana yang dibahas mengenai KS? (ISIKAN KODE “1”YA, KODE “2” TIDAK)			
	a. Pencapaian KS	☐	c. Langkah-langkah pemecahan masalah	☐
	b. Kendala dan peluang dalam KS	☐	d. Langkah-langkah memanfaatkan peluang	☐
LANJUTKAN KE BLOK 10.3 (P.10063)				
10.2. KESIAPAN MANAJEMEN PUSKESMAS MENJALANKAN PIS-PK				
10.2.1. PERENCANAAN (P1)				
10044.	Apakah ada rencana kerja tahunan (2017)?		1. Ya 2. Tidak → 10.2.2	☐
10045.	Apakah terdapat dokumen perencanaan tahunan(2017)? (Cek dokumen)			
	a. RUK (Rencana Usulan Kegiatan)	1. Ya 2. Tidak		☐
	b. RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)	1. Ya 2. Tidak		☐
10046.	Sumber anggaran kegiatan puskesmas			
	a. DAK	1. Ya 2. Tidak	☐	d. APBD
	b. BOK	1. Ya 2. Tidak	☐	e. CSR
	c. JKN	1. Ya 2. Tidak	☐	f. Lain-lain
10047.	Sumber data yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut?			
	a. Data dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota		1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Data hasil analisis Puskesmas		1. Ya 2. Tidak → P.10049	☐
10048.	Data perencanaan di puskesmas dikumpulkan oleh			
	a. Petugas Puskesmas	1. Ya 2. Tidak	☐	d. Mahasiswa
	b. Bidan Desa	1. Ya 2. Tidak	☐	e. Tim NS
	c. Kader	1. Ya 2. Tidak	☐	f. Lainnya
10049.	Apakah ada petugas khusus untuk melakukan analisis data		1. Ya 2. Tidak	☐
10050.	Apakah penanggungjawab program dilibatkan dalam penyusunan perencanaan tersebut?		1. Ya 2. Tidak	☐
10051.	Apakah perencanaan puskesmas dibahas dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Kecamatan?		1. Ya 2. Tidak	☐
10052.	Apakah perencanaan puskesmas dibahas dalam rapat perencanaan Dinas Kesehatan Kab/Kota?		1. Ya 2. Tidak	☐

10.2.2. PENGGERAKAN PELAKSANAAN (P2) TAHUN 2017			
10053.	Apel Pagi		
	a. Apakah Puskesmas ini melaksanakan apel pagi disertai pengarahan	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Apakah Puskesmas ini melaksanakan apel sore disertai pengarahan	1. Ya 2. Tidak	☐
10054.	Lokakarya Mini Bulanan		
	a. Apakah ada lokakarya mini bulanan?	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.10055	☐
	b. Apakah dalam lokakarya mini bulanan dibahas juga materi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga	1. Ya 2. Tidak	☐
10055.	Lokakarya Mini Triwulan		
	a. Apakah ada lokakarya mini triwulan?	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.10056	☐
	b. Apakah Puskesmas melaksanakan Lokakarya Mini Triwulan pertama dengan lintas sektor	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.10056	☐
	c. Apakah dalam lokakarya mini triwulan dibahas juga materi Informasi kebijakan PIS-DPK	1. Ya 2. Tidak	☐
10.2.3. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (P3) (CEK DOKUMEN)			
10056.	Apakah ada kunjungan petugas dinas kesehatan untuk melakukan supervisi atau bimbingan teknis program pada tahun 2016?	1. Ya 2. Tidak → P.10058	☐
10057.	Apakah ada umpan balik laporan cakupan selama setahun terakhir (2016) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota.	1. Ada 2. Tidak ada	☐
10058.	Apakah pada tahun 2016 pernah dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi program di dinas kesehatan?	1. Ada 2. Tidak ada	☐
10059.	Apakah ada penilaian kinerja?	1. Ya 2. Tidak → P.10063	☐
10060.	Apakah ada pembahasan hasil penilaian kinerja dengan staf Puskesmas?	1. Ya 2. Tidak	☐
10061.	Apakah hasil penilaian kinerja puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan kabupaten/Kota?	1. Ya 2. Tidak	☐
10062.	Apakah ada umpan balik dari penilaian kinerja Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota?	1. Ya 2. Tidak	☐
10.3. KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PIS-PK			
10.3.1. KETERSEDIAAN PERALATAN DASAR PUSKESMAS (OBSERVASI)			
10063.	Puskesmas mempunyai alat ukur timbang badan dewasa yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10064.	Puskesmas mempunyai alat ukur tinggi badan dewasa yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10065.	Puskesmas mempunyai alat ukur timbang badan bayi yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10066.	Puskesmas mempunyai alat ukur panjang badan bayi yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10067.	Puskesmas mempunyai alat ukur suhu badan yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10068.	Puskesmas mempunyai stetoskop yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10069.	Puskesmas mempunyai alat pengukur tekanan darah air raksa yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐
10070.	Puskesmas mempunyai alat pengukur tekanan darah digital yang masih berfungsi	1. Ya 2. Tidak	☐

10071.	Puskesmas mempunyai desinfektan	1. Ya 2. Tidak	☐
10072.	Puskesmas mempunyai disposable atau auto-disable syringe	1. Ya 2. Tidak	☐
10073.	Puskesmas mempunyai air mengalir, sabun, dan alkohol	1. Ya 2. Tidak	☐
10074.	Puskesmas mempunyai handschoen	1. Ya 2. Tidak	☐
10075.	Puskesmas mempunyai masker medis	1. Ya 2. Tidak	☐
10076.	Ketersediaan Kartu Menuju Sehat dan jumlahnya cukup	1. Ya 2. Tidak	☐
10.3.2. KEMAMPUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM (OBSERVASI)			
10077.	Laboratorium puskesmas dapat memeriksa kadar protein dalam urine	1. Ya 2. Tidak	☐
10078.	Laboratorium puskesmas dapat melakukan pemeriksaan dahak untuk Tb	1. Ya 2. Tidak	☐
10079.	Laboratorium puskesmas dapat memeriksa kadar kreatinin dalam urine	1. Ya 2. Tidak	☐
10.3.3. KETERSEDIAAN OBAT TUBERKULOSIS (OBSERVASI)			
10080.	Mempunyai Kombipak atau FDC (<i>Fixed Dose Combination</i>) jumlahnya cukup	1. Ya 2. Tidak	☐
10081.	Mempunyai anggaran untuk melakukan pendampingan minum obat tuberculosis	1. Ya 2. Tidak	☐
10.3.4. KETERSEDIAAN OBAT ANTI HIPERTENSI (OBSERVASI)			
	Obat Anti hipertensi	1. Ada 2. Tidak ada → Baris berikutnya	1. Cukup 2. Tidak cukup
	(1)	(2)	(3)
10082.	Amlodipine 5 mg	☐	☐
10083.	Amlodipin 10 mg	☐	☐
10084.	Captopril 12,5 mg	☐	☐
10085.	Captopril 25 mg	☐	☐
10.3.5. KETERSEDIAAN OBAT GANGGUAN JIWA BERAT (OBSERVASI)			
	Obat Gangguan Jiwa	1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	1. Cukup 2. Tidak cukup
	(1)	(2)	(3)
10086.	Antipsikotik (chlorpromazine – CPZ, haloperidol – Haldol, Serenase)	☐	☐
10087.	Anti Parkinson (levodepo, tryhexifenidil)	☐	☐
10088.	Anti depresan (trisklik, MAO inhibitor, amitriptyline)	☐	☐
10089.	Anti mania (lithium carbonate)	☐	☐
10090.	Antianxietas – anti cemas (diazepam – chlordiazepoxide)	☐	☐
10091.	Anti insomnia (phenobarbital)	☐	☐
10092.	Anti obsesif kompulsif (clomipramine)	☐	☐
10093.	Anti panik (imipramine)	☐	☐

KUESIONER PETUGAS PUSKESMAS

RAHASIA

P2

I. PENGENALAN TEMPAT															
PROV		KAB/ KOTA		REGISTRASI PUSKESMAS										NO. URUT RESP	

BLOK II. PENGUMPUL DATA				
2001.	Tanggal Pengumpulan data	□□-□□-□□□□		
2002.	Nama Pengumpul Data		2004. Nama PJT kab/kota	
2003.	Tandatangan Pengumpul Data		2005. Tandatangan PJT Kab/ Kota	

III. IDENTIFIKASI RESPONDEN				
3001.	Nama Responden			
3002.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	□□□□□□□□□□□□□□□□		
3003.	Jabatan responden	1. Kepala Puskesmas 4. Non Nakes manajemen 2. Dokter/drg/dr. sp/drg. sp fungsional 5. Non Nakes kebersihan/keamanan 3. Nakes staf Puskesmas 6. Lain-lain		
3004.	Tanggal lahir	□□-□□-□□□□		
3005.	Umur	 tahun		□□
3006.	Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan		□
3007.	Jenis Tenaga Kesehatan	01. Dokter spesialis 06. Farmasi 11. Keteknisan medis 02. Dokter 07. Kesehatan Masyarakat 12. Teknis biomedis 03. Dokter gigi 08. Kesehatan Lingkungan 13. Kesehatan tradisional 04. Bidan 09. Gizi 14. Non tenaga kesehatan 05. Perawat 10. Keterampilan Fisik		
3008.	Status kepegawaian :	01. PNS/ CPNS 04. PTT Daerah 07. Sukarela 09. Internsip 02. PPPK 05. BLU 08. Nusantara Sehat 10. Lain - lain 03. PTT Pusat 06. Kontrak Daerah		
3009.	Jenjang pendidikan saat mulai bekerja :	01. S3/Dokter 04. S1/ D4 07. D1 10. SMA/ sederajat 02. Spesialis 05. D3 08. SPK 11. SMP/ sederajat 03. S2 06. D2 09. SMK Kesehatan 12. SD/ sederajat/ tidak sekolah		

3010	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan 01. S3 04. S1 07. D1 10. SMA/ sederajat 02. Spesialis 05. D3 08. SPK 11. SMP/ sederajat 03. S2 06. D2 09. SMK 12. SD/ sederajat/ tidak sekolah	☐ ☐
3011	Alumni saat pertama kali bekerja	
	a. Program studi/ Peminatan/ SMK/ SLTA	
	b. Jurusan/ Departemen	
	c. Fakultas/ Universitas/ Sekolah	
	d. Jenjang pendidikan (D1, D2, D3, S1, S2, Spesialis)	
3012	Apakah lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan?	1. Ya 2. Tidak → P.3013
	a. Program Studi	
	b. Jurusan	
	c. Politeknik Kemenkes	
	d. Tahun kelulusan	
3013	Lama kerja bekerja di fasilitas kesehatan	 tahun ☐ ☐
3014	Lama kerja di puskesmas ini	 Tahun ☐ ☐
3015	Status kawin	1. Belum kawin 4. Cerai hidup 2. Kawin 5. Hidup terpisah 3. Hidup bersama 6. Cerai mati ☐
3016	Jumlah anak kandung dan/atau anak angkat dan/atau anak tiri yang masih menjadi tanggungan	 orang ☐ ☐
3017	Waktu tempuh menggunakan alat transportasi rutin dari rumah ke puskesmas	 menit ☐ ☐ ☐ ☐
3018	Kemudahan akses transportasi menuju tempat kerja	1. Sangat mudah 3. Sulit 2. Mudah 4. Sangat sulit ☐
3019	Apa status penguasaan bangunan tempat tinggal Anda saat ini?	1. Milik sendiri 4. Milik keluarga 2. Kontrak/sewa 5. Lain-lain ☐
3020	Kepuasan terhadap tempat tinggal saat ini dan fasilitasnya	1. Sangat tidak puas 4. Puas 2. Tidak puas 5. Sangat puas 3. Biasa saja ☐
3021	Memiliki STR	1. Ya, masih berlaku 3. Tidak 2. Ya, sudah tidak berlaku ☐
3022	Memiliki SIP	1. Ya 2. Tidak → Blok IV ☐
3023	Jumlah Tempat Praktek yang memiliki SIP	1. 1 Tempat 3. 3 Tempat 2. 2 Tempat 4. > 3 tempat ☐

JIKA RESPONDEN BUKAN DOKTER, DOKTER SPESIALIS, ATAU DOKTER GIGI → BLOK IV

3024	Tempat Praktik		
	3024a. Lokasi Tempat praktek	3024b. Bentuk legalitas : 1. SIP 2. SIP sedang dalam proses 3. Surat Tugas khusus 4. Tidak ada	3024c. Pihak yang mengeluarkan Ijin Praktek
	(1)	(2)	(3)
	a.	☐	a.
	b.	☐	b.
	c.	☐	c.
	d.	☐	d.
	e.	☐	e.
V. INSENTIF			
4.1. KESEJAHTERAAN DAN INSENTIF NON FINANSIAL			
4001.	Jumlah orang yang berpenghasilan dalam 1 keluarga	 orang	☐ ☐
4002.	Apakah penghasilan anda dari Puskesmas bisa mencukupi kebutuhan keluarga selama 1 bulan	1. Ya 2. Tidak	☐
4003.	Apakah selama ini penghasilan dari Puskesmas dapat Anda sisihkan untuk menabung?	1. Ya 2. Tidak	☐
4004.	Adakah Anda mendapatkan fasilitas rumah dinas?	1. Ya 2. Tidak → P.4007	☐
4005.	Apakah kondisinya layak huni?	1. Ya 2. Tidak	☐
4006.	Adakah dukungan biaya renovasi rumah	1. Ya 2. Tidak	☐
4007.	Apakah anda mendapatkan fasilitas kendaraan dinas?	1. Ya 2. Tidak → P.4011	☐
4008.	Jenis kendaraan dinas (JUMLAHKAN KODE JAWABAN JIKA JAWABAN LEBIH DARI SATU) 1. Roda empat Non ambulans 4. Sepeda 16. Lainnya 2. Sepeda motor 8. Perahu		☐ ☐
4009.	Adakah dukungan biaya bahan bakar kendaraan dinas?	1. Ya 2. Tidak	☐
4010.	Adakah dukungan biaya pemeliharaan kendaraan dinas?	1. Ya 2. Tidak	☐
4011.	Apakah anda pernah difasilitasi mengikuti diklat/seminar/pelatihan?	1. Ya 2. Tidak → P.4013	☐
4012.	Sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, berapa kali diklat/seminar/ pelatihan yang pernah anda ikuti	 Kali	☐ ☐
4013.	Apakah Anda pernah mendapatkan fasilitas untuk mengikuti pendidikan lanjutan/beasiswa?	1. Ada, 1 kali 3. Ada, lebih dari 2 kali 2. Ada, 2 kali 4. Tidak → P.4016	☐
4014.	Dukungan peningkatan pendidikan lanjutan yang diberikan		
	a. Tugas belajar dalam negeri	1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Tugas belajar luar negeri	1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Ijin belajar	1. Ya 2. Tidak	☐

4015.	Apakah pendidikan lanjutan yang anda tempuh mendukung penugasan anda?			1. Ya 2. Tidak	☐
4016.	Apakah anda memiliki jaminan kesehatan?			1. Ya 2. Tidak → P.4018	☐
4017.	Jenis jaminan kesehatan yang dimiliki:			Sumber pembiayaan Jaminan Kesehatan JUMLAHKAN KODE JAWABAN JIKA JAWABAN LEBIH DARI 1	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. BPJS/Jamkesda	1. Ya 2. Tidak → ke b	☐	1. Pemerintah 2. Institusi 4. Mandiri 8. Lainnya	☐ ☐
	b. Asuransi swasta lainnya	1. Ya 2. Tidak → ke c	☐	1. Pemerintah 2. Institusi 4. Mandiri 8. Lainnya	☐ ☐
	c. Lainnya :	1. Ya 2. Tidak	☐	1. Pemerintah 2. Institusi 4. Mandiri 8. Lainnya	☐ ☐
4018.	Apakah Anda memiliki jaminan hari tua/pensiun?			1. Ya 2. Tidak → P.4020	☐
4019.	Sumber pembiayaan jaminan hari tua:				
	a. Pemerintah (pensiunan PNS/TNI/POLRI)			1. Ya 2. Tidak	☐
	b. Institusi tempat kerja			1. Ya 2. Tidak	☐
	c. Mandiri/Asuransi swasta			1. Ya 2. Tidak	☐
4020.	Apakah anda mendapat asupan makanan penambah daya tahan tubuh			1. Ya 2. Tidak	☐
4.2. Insentif Finansial					
4021.	Apakah menerima gaji pokok rutin tetap setiap bulan			1. Ya 2. Tidak	☐
4022.	Berapa besar gaji yang diterima setiap bulan			Rp. . .	
4023.	Apakah Anda mendapatkan insentif sebagai berikut :				
	Jenis Insentif Finansial	1. Ada 2. Tidak	Termin pembayaran (LIHAT KODE)	Besaran rata-rata per bulan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	a. Tunjangan daerah terpencil/ perbatasan	☐	☐	Rp. . .	
	b. Insentif khusus tenaga kesehatan tertentu	☐	☐	Rp. . .	
	c. Tunjangan Kinerja	☐	☐	Rp. . .	
	d. Kapitasi	☐	☐	Rp. . .	
	e. Biaya transport	☐	☐	Rp. . .	
	f. Uang makan	☐	☐	Rp. . .	
	g. Tunjangan kemahalan	☐	☐	Rp. . .	
	h. Lain-lain sebutkan :	☐	☐	Rp. . .	
Kode Kolom (3) : Termin Pembayaran 1. Setiap bulan 2. Setiap triwulan 3 = Setiap 6 bulan 4 = Setiap setahun 5. Per Kegiatan					

4024.	Tambahan pendapatan lainnya (pendapatan yang bersumber dari luar pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas)		
	Jenis pendapatan	1. Ada 2. Tidak	Termin Pendapatan [LIHAT KODE]
	(1)	(2)	(3)
	(4)		
a.	Praktik mandiri	☐	Rp. . .
b.	Usaha sampingan (misal bengkel, warung)	☐	Rp. . .
c.	Hasil perkebunan	☐	Rp. . .
d.	Hasil peternakan	☐	Rp. . .
e.	Hasil sewa kontrakan	☐	Rp. . .
f.	Lain-lain, sebutkan	☐	Rp. . .

Kode kolom 3: Termin pendapatan	1 = setiap bulan 2 = triwulan	3 = per 6 bulan 4 = setahun	5 = per kegiatan
--	----------------------------------	--------------------------------	------------------

BLOK V. RETENSI

5001.	Apakah [NAMA] betah bertugas disini?	1. Ya 2. Tidak → P.5004	☐
-------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

5002.	Alasan betah : (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")		
a.	Dekat dengan keluarga besar (01)	☐	k. Penerimaan masyarakat dan tokoh masyarakat baik (11)
b.	Daerah asal (kampung halaman) sendiri/pasangan (02)	☐	l. Fasilitas/rumah ibadah dekat (12)
c.	Aman (03)	☐	m. Niat mengabdikan (13)
d.	Kebutuhan pokok mudah diperoleh/dekat pasar (04)	☐	n. Suasana kerja baik (14)
e.	Penghasilan cukup (05)	☐	o. Saluran televisi mudah diakses (15)
f.	Sarana sekolah/pendidikan tersedia relatif mudah dijangkau dan berkualitas (06)	☐	p. Karir baik (16)
g.	Sarana rekreasi tersedia (07)	☐	q. Kualitas air baik (17)
h.	Tersedia listrik (08)	☐	r. Kualitas udara baik (18)
i.	Komunikasi mudah (09)	☐	s. Tidak rawan bencana alam (19)
j.	Tersedia jaringan internet (10)	☐	

5003.	Alasan Utama betah: ISIKAN KODE YANG TERTULIS DIBELAKANG ALASAN UTAMA BETAH	
-------	--	---

LANJUT BLOK VI

5004.	Alasan tidak betah : (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")			
a. Jauh dari keluarga besar (01)	☐	k. Penerimaan masyarakat dan tokoh masyarakat tidak baik (11)	☐	
b. Bukan daerah asal (kampung halaman) sendiri/ pasangan (02)	☐	l. Fasilitas/rumah ibadah sulit (12)	☐	
c. Tidak aman (03)	☐	m. Pengembangan diri sulit (13)	☐	
d. Kebutuhan pokok sulit diperoleh/jauh dari pasar (04)	☐	n. Suasana kerja buruk (14)	☐	
e. Penghasilan kurang (05)	☐	o. Saluran televisi sulit (15)	☐	
f. Sarana sekolah/pendidikan sulit dijangkau dan atau kurang berkualitas (06)	☐	p. Karir sulit (16)	☐	
g. Sarana rekreasi tidak tersedia (07)	☐	q. Kualitas air buruk(17)	☐	
h. Tidak tersedia listrik (08)	☐	r. Kualitas udara buruk(18)	☐	
i. Komunikasi sulit (09)	☐	s. Rawan bencana alam(19)	☐	
j. Tidak tersedia jaringan internet (10)	☐			
5005.	Alasan Utama tidak betah: ISIKAN KODE YANG TERTULIS DI BELAKANG ALASAN UTAMA TIDAK BETAH			☐ ☐

VI. MOTIVASI

KUESIONER INI TERDIRI ATAS 23 PERNYATAAN. BACALAH SETIAP PERNYATAAN DENGAN SEKSAMA. TENTUKAN SEBERAPA SETUJU ANDA TERHADAP SETIAP PERNYATAAN DI BAWAH INI TERKAIT PEKERJAAN ANDA BERIKAN PENDAPAT ANDA SECARA JUJUR. SEMUA JAWABAN DAN INFORMASI ANDA AKAN DIJAGA KERAHASIAANNYA

Lingkarilah salah satu dari lima kode pilihan jawaban yang sesuai dan isikan kode ke dalam kotak di sebelah kanan :

Kode 1= sangat tidak setuju (STS). Kode 4= setuju (S)
 Kode 2= tidak setuju (TS). Kode 5= sangat setuju (SS)
 Kode 3= kurang setuju (KS).

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	KODE
6001.	Saya merasa termotivasi untuk bekerja keras.	1	2	3	4	5	☐
6002.	Saya bekerja di sini hanya untuk mendapatkan upah/ gaji.	1	2	3	4	5	☐
6003.	Saya melakukan pekerjaan ini karena memberikan keamanan jangka panjang bagi saya.	1	2	3	4	5	☐
6004.	Saya mengalami kelelahan emosional setiap selesai bekerja.	1	2	3	4	5	☐
6005.	Kadang-kadang saat saya bangun di pagi hari, saya takut karena harus menghadapi pekerjaan hari ini di tempat kerja.	1	2	3	4	5	☐
6006.	Secara umum, saya sangat puas dengan pekerjaan saya.	1	2	3	4	5	☐
6007.	Saya tidak puas dengan rekan-rekan kerja saya.	1	2	3	4	5	☐
6008.	Saya puas dengan atasan/ supervisor saya.	1	2	3	4	5	☐
6009.	Saya merasa puas dengan kesempatan untuk menggunakan kemampuan saya dalam pekerjaan ini.	1	2	3	4	5	☐
6010.	Saya merasa puas akan pencapaian saya dalam pekerjaan ini.	1	2	3	4	5	☐

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	KODE
6011.	Saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan di fasilitas kesehatan saat ini berharga.	1	2	3	4	5	☐
6012.	Saya bangga dapat bekerja di fasilitas kesehatan ini.	1	2	3	4	5	☐
6013.	Saya merasa bahwa nilai-nilai yang saya anut sama dengan yang dianut oleh fasilitas kesehatan ini.	1	2	3	4	5	☐
6014.	Saya bersyukur bahwa saya bekerja di fasilitas kesehatan ini dibandingkan dengan fasilitas kesehatan lain di negara ini.	1	2	3	4	5	☐
6015.	Komitmen saya rendah terhadap fasilitas kesehatan ini.	1	2	3	4	5	☐
6016.	Pekerjaan saya di fasilitas kesehatan ini benar-benar menginspirasi saya untuk memberikan yang terbaik.	1	2	3	4	5	☐
6017.	Saya merasa tidak dapat diandalkan oleh rekan kerja saya.	1	2	3	4	5	☐
6018.	Saya selalu menyelesaikan tugas saya secara benar dan efisien.	1	2	3	4	5	☐
6019.	Saya adalah pekerja keras.	1	2	3	4	5	☐
6020.	Saya melakukan hal yang perlu dilakukan tanpa diminta atau diberitahu terlebih dahulu.	1	2	3	4	5	☐
6021.	Saya datang ke tempat kerja tepat waktu.	1	2	3	4	5	☐
6022.	Saya sering tidak masuk kerja.	1	2	3	4	5	☐
6023.	Tidak menjadi masalah apabila sesekali saya datang terlambat ke tempat kerja.	1	2	3	4	5	☐

VII. KEPUASAN KERJA

KUESIONER INI MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA ANDA UNTUK MENYATAKAN TINGKAT KEPUASAN ANDA TERHADAP PEKERJAAN SAAT INI. KUESIONER TERDARI ATAS 35 PERNYATAAN. BACALAH SETIAP PERNYATAAN DENGAN SEKSAMA. TENTUKAN SEBERAPA PUAS ANDA TERHADAP DIMENSI PEKERJAAN TERSEBUT.

BERIKAN PENDAPAT ANDA SECARA JUJUR. SEMUA JAWABAN DAN INFORMASI ANDA AKAN DIJAGA KERAHASIAANNYA.

Lingkarilah satu dari lima kode pilihan jawaban mengenai tingkat kepuasan anda dan isikan kode ke dalam kotak di sebelah kanan.

Kode 1= sangat tidak puas (STP), jika anda merasa pernyataan terkait memberikan sangat kurang dari apa yang anda harapkan.

Kode 2= tidak puas (TP), jika anda merasa pernyataan terkait memberikan kurang dari apa yang anda harapkan.

Kode 3= biasa saja (BS), jika anda tidak dapat menentukan apakah pernyataan terkait memberikan apa yang anda harapkan atau tidak.

Kode 4= puas (P), jika anda merasa pernyataan terkait memberikan apa yang anda harapkan.

Kode 5= sangat puas (SP), jika anda merasa pernyataan terkait memberikan lebih dari yang anda harapkan.

No.	PERNYATAAN	STP	TP	BS	P	SP	Kode
7001.	Saya dapat sibuk sepanjang waktu.	1	2	3	4	5	☐
7002.	Kesempatan bekerja sendiri saat melakukan pekerjaan.	1	2	3	4	5	☐
7003.	Kesempatan melakukan pekerjaan lain yang bervariasi.	1	2	3	4	5	☐
7004.	Kesempatan untuk menjadi seseorang yang dihargai di lingkungan kerja.	1	2	3	4	5	☐
7005.	Cara atasan saya menangani staf-nya.	1	2	3	4	5	☐
7006.	Kemampuan atasan saya dalam membuat keputusan.	1	2	3	4	5	☐
7007.	Saya dapat melakukan hal-hal yang tidak berlawanan dengan hati nurani.	1	2	3	4	5	☐

No.	PERNYATAAN	STP	TP	BS	P	SP	Kode
7008.	Kestabilan pekerjaan saya.	1	2	3	4	5	☐
7009.	Kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain.	1	2	3	4	5	☐
7010.	Kesempatan untuk mengatakan kepada orang lain tentang apa yang harus dikerjakannya.	1	2	3	4	5	☐
7011.	Kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan yang saya miliki.	1	2	3	4	5	☐
7012.	Cara institusi menerpakan kebijakan.	1	2	3	4	5	☐
7013.	Penghasilan yang saya peroleh sepadan dengan beban kerja.	1	2	3	4	5	☐
7014.	Kesempatan untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan.	1	2	3	4	5	☐
7015.	Kebebasan untuk menggunakan pertimbangan/penilaian sendiri.	1	2	3	4	5	☐
7016.	Kesempatan untuk mencoba cara sendiri dalam melakukan pekerjaan.	1	2	3	4	5	☐
7017.	Kondisi pekerjaan saya.	1	2	3	4	5	☐
7018.	Cara mitra kerja saya bekerja sama satu sama lain.	1	2	3	4	5	☐
7019.	Penghargaan yang saya peroleh bila mengerjakan pekerjaan dengan baik.	1	2	3	4	5	☐
7020.	Pencapaian atas hasil kerja	1	2	3	4	5	☐
7021.	Kondisi kesehatan fisik saya dalam 6 bulan terakhir ini.	1	2	3	4	5	☐
7022.	Kondisi kesehatan mental saya dalam 6 bulan terakhir ini.	1	2	3	4	5	☐
7023.	Kemampuan beraktivitas sehari-hari.	1	2	3	4	5	☐
7024.	Kesempatan melakukan upaya menjaga kesehatan (termasuk olahraga, mengatur pola makan, istirahat cukup, konsumsi suplemen, pemeriksaan kesehatan berkala, mengkonsumsi obat sesuai aturan).	1	2	3	4	5	☐
7025.	Kondisi kesehatan saya secara umum.	1	2	3	4	5	☐
7026.	Pendidikan yang diperoleh/difasilitasi oleh institusi tempat kerja.	1	2	3	4	5	☐
7027.	Waktu luang bersama keluarga dan diri sendiri.	1	2	3	4	5	☐
7028.	Keharmonisan keluarga saya.	1	2	3	4	5	☐
7029.	Keharmonisan dalam kehidupan sosial di tempat kerja.	1	2	3	4	5	☐
7030.	Keharmonisan dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal/ bertetangga.	1	2	3	4	5	☐
7031.	Kesempatan menggunakan hak pilih (PEMILU, Pilkada) secara bebas tanpa khawatir pengaruhnya terhadap pekerjaan saya di fasilitas kesehatan ini?	1	2	3	4	5	☐
7032.	Kondisi pekerjaan saya secara umum.	1	2	3	4	5	☐
7033.	Pendapatan saya dari tempat kerja ini.	1	2	3	4	5	☐
7034.	Kondisi kehidupan saya secara keseluruhan.	1	2	3	4	5	☐
7035.	Kebahagiaan terhadap kehidupan saya secara keseluruhan.	1	2	3	4	5	☐

KUESIONER *TIME STUDY* PUSKESMAS

RAHASIA

P3

I. PENGENALAN TEMPAT																		
PROV		KAB/KOTA		NOMOR KODE PUSKESMAS										KODE KUES		NO. URUT		
															P	3		

II. IDENTIFIKASI SUBYEK TERAMATI																		
2001.	Nama teramati [NAMA INISIAL]																	
2002.	Tanggal lahir										[] [] - [] [] - [] [] [] []							
2003.	Umur										 tahun [] []							
2004.	Jeniskelamin										1. Laki-laki 2. Perempuan []							
2005.	Jenis Tenaga Kesehatan										1. Dokter spesialis 6. Kefarmasian 11. Keteknisan medis 2. Dokter 7. Kesehatan masyarakat 12. Teknis biomedis 3. Dokter gigi 8. Kesehatan lingkungan 13. Kesehatan tradisional 4. Bidan 9. Gizi 14. Lain-lain..... 5. Perawat 10. Keterampilan Fisik [] []							
2006.	Status kepegawaian										1. PNS/ CPNS 4. PTT Daerah 2. PPPK 5. BLU 7. Sukarela 9. Intersip 3. PTT Pusat 6. Kontrak Daerah 8. Nusantara Sehat 10. Lain-lain [] []							
2007.	Lama kerja di puskesmas ini										[] [] tahun [] [] bulan							

III. PENGUMPUL DATA																		
3001.	Tanggal Pengumpulan Data										[] [] - [] [] - [] [] [] []							
3002.	Nama Pengumpul Data										3004. Nama PJT kab/kota 							
3003.	Tandatangan Pengumpul Data										3005. Tandatangan PJT 							

IV. HASIL PENGAMATAN																		
4001.	Catatan pengamatan:										1. Kondisi alam (tanah longsor, gempa, banjir, dll), Sebutkan 2. Kondisi sosial (perang suku, tawuran, panen raya, pesta rakyat dll), sebutkan 3. Tidak ada masalah []							
4002.	Jam buka puskesmas :										[] [] - [] []							
4003.	Jam tutup Puskesmas :										[] [] - [] []							
4004.	Jam istirahat puskesmas :										[] [] - [] []							

ISIKAN KOLOM (5) DENGAN KODE : 1 = SESUAI PENUGASAN, SESUAI JABATAN FUNGSIONAL 2 = SESUAI PENUGASAN, DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL 3 = TIDAK SESUAI					
No	Kegiatan	Waktu mulai	Waktu selesai	Waktu dibutuhkan (menit)	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4005.		-	-		
4006.		-	-		
4007.		-	-		
4008.		-	-		
4009.		-	-		
4010.		-	-		
4011.		-	-		
4012.		-	-		
4013.		-	-		
4014.		-	-		
4015.		-	-		
4016.		-	-		
4017.		-	-		
4018.		-	-		
4019.		-	-		
4020.		-	-		
4021.		-	-		
4022.		-	-		
4023.		-	-		
4024.		-	-		
4025.		-	-		
4026.		-	-		

ISIKAN KOLOM (5) DENGAN KODE : 1 = SESUAI PENUGASAN, SESUAI JABATAN FUNGSIONAL 2 = SESUAI PENUGASAN, DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL 3 = TIDAK SESUAI					
No	Kegiatan	Waktu mulai	Waktu selesai	Waktu dibutuhkan (menit)	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4027.		-	-		
4028.		-	-		
4029.		-	-		
4030.		-	-		
4031.		-	-		
4032.		-	-		
4033.		-	-		
4034.		-	-		
4035.		-	-		
4036.		-	-		
4037.		-	-		
4038.		-	-		
4039.		-	-		
4040.		-	-		
4041.		-	-		
4042.		-	-		
4043.		-	-		
4044.		-	-		
4045.		-	-		
4046.		-	-		
4047.		-	-		

ISIKAN KOLOM (5) DENGAN KODE : 1 = SESUAI PENUGASAN, SESUAI JABATAN FUNGSIONAL 2 = SESUAI PENUGASAN, DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL 3 = TIDAK SESUAI					
No	Kegiatan	Waktu mulai	Waktu selesai	Waktu dibutuhkan (menit)	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4048.		-	-		
4049.		-	-		
4050.		-	-		
4051.		-	-		
4052.		-	-		
4053.		-	-		
4054.		-	-		
BLOK V. OUTPUT PENGAMATAN					
A. Pelayanan UKP					
	Jenis tenaga	Output	Jumlah output per hari		
			Dalam gedung	Luar gedung	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
5001.	Dokter spesialis/ dokter/ dokter gigi/ perawat/ bidan/ psikologi klinis	a. Jumlah pasien yang dilayani			
		b. Jumlah kelompok yang dikunjungi/ diundang			
		c. Jumlah dokumen yang dihasilkan			
5002.	Tenaga kefarmasian/ keterampilan fisik/ keteknisan medis/ teknis biomedis	a. Jumlah pasien yang dilayani			
		b. Jumlah dokumen yang dihasilkan			
B. Pelayanan UKM					
	Jenis tenaga	Output	Jumlah output per bulan		
			Dalam gedung	Luar gedung	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
5003	Tenaga gizi	a. Jumlah pasien yang dilayani			
		b. Jumlah kelompok yang dikunjungi			
		c. Jumlah dokumen yang dihasilkan			
5004	Tenaga kesehatan masyarakat/ tenaga kesehatan lingkungan	a. Jumlah kelompok yang dikunjungi			
		b. Jumlah dokumen yang dihasilkan			

I. PENGENALAN TEMPAT									
1001.	Nama Puskesmas								
1002.	Nomor Kode Puskesmas								
1003.	Provinsi								
1004.	Kabupaten/Kota ^{*)}								
1005.	Kecamatan								
1006.	Desa/Kelurahan ^{*)}	1. Perkotaan 2. Perdesaan							
1007.	Alamat Fasilitas Kesehatan								
II. KETERANGAN PENGUMPUL DATA									
2001.	Nama Pengumpul Data:				2004.	Nama PJT Kab/Kota :			
2002.	Tgl. Pengumpulan data: (tgl-bln-thn)	- -			2005.	Tgl. Pengecekan: (tgl-bln-thn)	- -		
2003.	Tandatangan Pengumpul Data :				2006.	Tandatangan PJT Kab/Kota:			
III. KETERANGAN RESPONDEN									
3001.	Nomor urut responden								
3002.	Nama responden (INISIAL)								
3003.	Tanggal lahir responden	- -							
3004.	Usia responden	 tahun							
3005.	Status Perkawinan	1. Belum kawin 3. Hidup bersama 5. Hidup terpisah 2. Kawin 4. Cerai hidup 6. Cerai mati							
3006.	Jenis kelamin responden	1. Laki – laki 2.Perempuan							
3007.	Pendidikan terakhir responden	1. Tidak pernah sekolah 3. Tamat SD/MI 5. Tamat SLTA/MA 2. Tidak Tamat SD/MI 4. Tamat SLTP/MTS 6. Tamat D1/D2/D3 7. Tamat PT D4/S1/S2/S3							
3008.	Status pekerjaan	1. Tidak bekerja → P.3010 2. Bekerja 3. Sekolah → P.3010							
3009.	Jenis pekerjaan utama	1. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 3. Wiraswasta 5. Nelayan 2. Pegawai swasta 4. Petani 6. Buruh 7. Lainnya, sebutkan							
3010.	Jenis pelayanan yang diterima saat ini (sesuai keluhan utama)	1. Poli Umum 3. Poli Bedah 5. Poli Anak 2. Poli Kebidanan 4. Poli Penyakit Dalam 6. Lainnya, sebutkan.....							
3011.	Apakah pertama kali berobat ke puskesmas ini	1. Ya 2. Tidak							

3012.	Mengapa Anda memilih puskesmas ini untuk berobat? ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK					
	a. Rekomendasi teman/ keluarga	☐	d. Fasilitas lengkap	☐	f. Di jamin asuransi	☐
	b. Reputasi	☐	e. Harga terjangkau	☐	g. Kecocokan dokter	☐
	c. Lokasi mudah dijangkau dari rumah/tempat bekerja			☐	h. Lainnya ☐	
3013.	Berapa menit dari rumah ke puskesmas			 Menit	☐ ☐ ☐	
3014.	Lokasi puskesmas mudah dicapai?			1. Ya 2. Tidak		☐
3015.	Alat transportasi yang dipakai untuk pergi ke puskesmas (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")					
	a. Jalan kaki	☐	c. Roda tiga (becak, bemo, dll)	☐	e. Sampan/perahu/getek	☐
	b. Roda dua (sepeda, motor)	☐	d. Roda empat (mobil, dll)	☐	f. Lainnya, sebutkan	☐
3016.	Darimana sumber biaya untuk berobat? ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK					
	a. BPJS kesehatan PBI	☐	d. Kartu Indonesia Sehat (KIS)	☐	g. Lainnya	☐
	b. BPJS kesehatan non-PBI	☐	e. Biaya sendiri	☐		
	c. Jamkesda	☐	f. Asuransi kesehatan swasta	☐		
IV. KETANGGAPAN DAN KEPUASAN						
DITANYAKAN PADA PASIEN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN RAWAT JALAN PUSKESMAS DAN AKAN PULANG PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT ADALAH TENTANG PENGALAMAN BPK/IBU/SDR DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN INI						
4.1. KECEPATAN MENDAPATKAN PELAYANAN						
4001.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mendapatkan pelayanan rawat jalan di puskesmas ini?			1. Ya 2. Tidak		☐
4002.	Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (sejak mendaftar sampai mendapat pelayanan)?			dalam menit	☐ ☐ ☐	
4003.	Bila membutuhkan pelayanan kesehatan, apakah Bapak/Ibu/Saudara memperoleh pelayanan dengan cepat seperti yang diharapkan?			1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak		☐
4004.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mendapatkan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lain? (contoh: pemeriksaan darah, rontgen, scan, radiologi)			1. Ya 2. Tidak → P.4009		☐
4005.	Apakah pemeriksaan tersebut dilakukan di puskesmas ini?			1. Ya seluruhnya 2. Ya sebagian 3. Tidak		☐
4006.	Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan		1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju		☐	
4007.	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr menunggu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lainnya?		1. Pada hari yang sama 2. 1-2 hari 3. 3-5 hari 4. 6-10 hari 5. Lebih dari 10 hari, sebutkan.....		☐	
4008.	Menurut Bapak/Ibu/Sdr, waktu tunggu hasil pemeriksaan penunjang tidak lama		1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju		☐	
4009.	Berapa lama biasanya Bapak/Ibu/Saudara harus menunggu untuk mulai dari penyerahan resep sampai mendapatkan obat?			menit	☐ ☐ ☐	
4010.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr. tentang kecepatan mendapatkan pelayanan di puskesmas?		1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang 4. Buruk 5. Sangat buruk		☐	
4011.	Puskesmas relatif MUDAH DICAPAI dari tempat tinggal pasien		1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju		☐	
4012.	Loket pendaftaran buka dan tutup sesuai jadwal		1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju 5. Tidak tahu		☐	
4013.	Proses pendaftaran/ penyerahan berkas rujukan di loket mudah		1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju		☐	
4014.	Berapa menit waktu menunggu proses pendaftaran			menit	☐ ☐ ☐	

4015.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, waktu tunggu proses pendaftaran ini tidak lama	1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐
4016.	Terdapat petunjuk yang cukup untuk mencari ruang pemeriksaan/ pemeriksaan laboratorium/ pengambilan obat di puskesmas	1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐
4017.	Lama waktu menunggu dari mulai berada di ruang tunggu sampai diperiksa petugas kesehatan	 menit		☐ ☐ ☐
4018.	Bpk/Ibu/Sdr tidak menunggu lama untuk diperiksa petugas kesehatan	1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐
4.2. RAMAH DAN SIKAP SOPAN PETUGAS KESEHATAN				
4019.	Pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah Bpk/Ibu/Sdr diperlakukan secara sopan dan hormat?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4020.	Apakah petugas pelayanan kesehatan (petugas loket/ tenaga adminstrasi) melayani Bpk/Ibu/Sdr dengan sopan dan ramah?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4021.	Apakah pada saat dokter/ petugas kesehatan melakukan pemeriksaan, dilakukan dengan menjaga privacy/ kerahasiaan pribadi Bpk/Ibu/Sdr?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4022.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr. dengan sikap sopan dan ramah petugas kesehatan ketika melayani pasien?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4.3. KOMUNIKASI PETUGAS KESEHATAN DENGAN PASIEN				
4023.	Siapa yang memeriksa Saudara?	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan	4. Nakes lainnya, sebutkan..... 5. Tidak tahu	☐
4024.	Berapa lama waktu yang dialokasikan oleh pemeriksa saat menangani keluhan Anda	 menit		☐ ☐ ☐
4025.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Bpk/Ibu/Sdr memeriksakan kesehatan?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak		☐
4026.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan menerangkan dengan jelas tentang kesehatan, pengobatan dan obatnya kepada Bapak/Ibu/Saudara dengan cara yang dapat dimengerti	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak		☐
4027.	Apakah dokter/perawat/petugas pelayanan kesehatan memberi kesempatan kepada Bpk/Ibu/Sdr untuk bertanya tentang masalah kesehatan dan pengobatannya (termasuk obatnya)?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak		☐
4028.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr tentang komunikasi dari dokter/perawat/petugas kesehatan?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
UNTUK PERTANYAAN NOMOR 4029a SAMPAI DENGAN 4030b, ISIKAN KODE: 1 "SANGAT SETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"				
4029.	a. Pemeriksa meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan/ pengobatan	☐		
	b. Petugas kesehatan memberi informasi yang jelas tentang biaya pengobatan	☐		
	c. Dokter yan diperlukan selalu ada di tempat	☐		
4030.	a. Pemeriksa menenangkan rasa cemas pasien terhadap penyakit yang diderita	☐		
	b. Petugas kesehatan memberi dorongan, semangat atau doa kepada pasien supaya cepat sembuh	☐		
4.4 HAK MEMILIH PENGobatan/PERAWATAN				
4031.	Apakah ada keputusan yang dibuat tentang cara pengobatan/pemeriksaan ketika Bpk/Ibu/Sdr memperoleh pelayanan kesehatan?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4032.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan lainnya, melibatkan Bpk/Ibu/Sdr dalam memutuskan cara pengobatan dan pemeriksaan yang sesuai dengan Bpk/Ibu/Sdr kehendaki?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4033.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan/pengobatan?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐
4034.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr dalam mengambil keputusan tentang pelayanan/ pengobatan/ pemeriksaan yang Bpk/Ibu/Sdr inginkan?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐

4.5. KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN				
4035.	Apakah ketika petugas kesehatan memeriksa/berbicara kepada Bapak/Ibu/Saudara dilakukan di ruangan konsultasi dan/atau tanpa didengar orang lain?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak		☐
4036.	Apakah petugas kesehatan menyimpan informasi kesehatan Bpk/Ibu/Sdr. secara rahasia?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak 4. Tidak tahu	☐
4037.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/sdr. tentang penyimpanan catatan medis (informasi kesehatan) secara rahasia?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4.6 HAK MEMILIH PELAYANAN KESEHATAN				
4038.	Seberapa sulit Bpk/Ibu/Sdr. untuk memperoleh pelayanan tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan pilihan Bpk/Ibu/Sdr.?	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang	4. Sulit 5. Sangat sulit	☐
4039.	Seberapa sulit Bpk/Ibu/Sdr. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan lain yang tidak biasanya digunakan? (misalnya pasien biasa berobat di puskesmas ini, sedangkan ada puskesmas/ klinik lain di kab tersebut maka ditanyakan seberapa sulit responden memperoleh pelayanan kesehatan dari puskesmas/ klinik lain selain puskesmas ini)	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang	4. Sulit 5. Sangat sulit 6. Tidak pernah mencoba	☐
4040.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr saat menggunakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/ Saudara?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4.7 KUALITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN				
4041.	Bagaimana penilaian Bpk/Ibu/Sdr. tentang kualitas ruang tunggu misal: luas, tempat duduk, udara segar (ventilasi udara)?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4042.	Bagaimana penilaian Bpk/Ibu/Sdr. tentang kebersihan tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4043.	Secara keseluruhan bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara tentang kualitas lingkungan dari pelayanan kesehatan yang dikunjungi?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
4044.	Terdapat ruang tunggu khusus pasien	1. Ya 2. Tidak → P.4046		☐
UNTUK PERNYATAAN NOMOR 4045a SAMPAI DENGAN 4046e, ISIKAN KODE: 1 "SANGAT SETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"				
4045.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang tunggu bersih	☐		
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang tunggu nyaman	☐		
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia cukup tempat duduk di ruang tunggu	☐		
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tempat sampah tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tunggu	☐		
	e. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ventilasi udara di ruang tunggu cukup	☐		
4046.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang periksa rawat jalan bersih	☐		
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang periksa rawat jalan nyaman	☐		
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tempat cuci tangan tersedia di ruang periksa rawat jalan	☐		
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tempat sampah tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang periksa rawat jalan	☐		
	e. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ventilasi udara di ruang periksa cukup	☐		
4047.	Anda pernah menggunakan/melihat kamar mandi/ WC pasien?	1. Ya 2. Tidak → P. 4049		☐

UNTUK NOMOR 4048a SAMPAI DENGAN 4051h, ISIKAN KODE: 1 "SANGATSETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"			
4048.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia air cukup di kamar mandi/WC		☐
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia saluran pembuangan keluar dari kamar mandi/WC		☐
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, kamar mandi tidak bau		☐
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, kamar mandi/WC nyaman		☐
4049.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, alat pemeriksaan yang digunakan bersih		☐
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, alat pemeriksaan (stetoskop, tensimeter, termometer, timbangan) di puskesmas ini tersedia lengkap		☐
4050.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, secara umum penampilan petugas kesehatan bersih dan rapih		☐
4051.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia informasi dalam bentuk media poster/ video/ audio, atau lainnya di puskesmas		☐
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas menjelaskan prosedur administrasi		☐
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas melayani dengan ramah		☐
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, pemeriksa memeriksa pasien denganteliti		☐
	e. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, pemeriksaan penunjang (rontgen, USG, CT sca, MRI, EKG, dll) yang diperlukan tersedia cukup lengkap di puskesmas ini		☐
	f. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, semua obat yang diresepkan tersedia		☐
	g. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, semua pelayanan yang diterima, tidak ada lagi biaya tambahan		☐
	h. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas farmasi/apotek menjelaskan cara pemakaian/minum obat kepada pasien/ keluarganya		☐
4052.	Berapa menit Bpk/Ibu/Sdr menunggu di ruang farmasi/obat?	 menit	☐ ☐ ☐
UNTUK PERTANYAAN NOMOR 4053 SAMPAI DENGAN 4055, ISIKAN KODE 1 "SANGATSETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"			
4053.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, waktu tunggu obat tidak lama		☐
4054.	Secara keseluruhan, Bapak/Ibu/Sdr sebagai pasien puas dengan pelayanan yang diberikan di puskesmas ini		☐
4055.	Bapak/Ibu/sdr sebagai pasien berkeinginan untuk kembali berobat ke puskesmas ini lagi di lain waktu		☐
4056.	Apakah merupakan pasien JKN (Konfirmasi ke Blok III P.3016 Keterangan Responden, Jika salah satu pilihan jawaban a, b, c, d adalah Ya)	1. Ya 2. Bukan →SELESAI	☐
4057.	Apakah ada biaya tambahan untuk semua pemeriksaan laboratorium	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐
4058.	Apakah ada biaya tambahan untuk pemeriksaan penunjang lainnya (rontgen, USG, MRI, dll)	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐
4059.	Semua obat yang diresepkan teredia dan masuk dalam paket pelayanan JKN (tidak ada biaya tambahan)	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐

RAHASIA

P5

I. PENGENALAN TEMPAT					
1001.	Provinsi				
1002.	Kabupaten/Kota ^{*)}				
1003.	Kecamatan				
1004.	Desa/Kelurahan ^{*)}				
1005.	Nama Puskesmas				
1006.	Nomor Kode Puskesmas				
1007.	Alamat Fasilitas Kesehatan				
II. KETERANGAN PENGUMPUL DATA					
2001.	Nama Pengumpul Data:			2004.	Nama Ketua PJT Kab/Kota
2002.	Tgl. Pengumpulan data: (tgl-bln-thn)	- -		2005.	Tgl. Pengecekan: (tgl-bln-thn)
2003.	Tandatangan Pengumpul Data			2006.	Tandatangan PJT Kab/Kota
III. KETERANGAN RESPONDEN					
3001.	Nomor Urut Responden				
3002.	Nama responden (inisial)				
3003.	Tanggal lahir responden	- -			
3004.	Usia responden	 tahun			
3005.	Status Perkawinan	1. Belum kawin 2. Kawin	3. Hidup bersama 4. Cerai hidup	5. Hidup terpisah 6. Cerai mati	
3006.	Jenis kelamin responden	1. Laki – laki 2. Perempuan			
3007.	Pendidikan terakhir responden	1. Tidak pernah sekolah 4. Tamat SLTP/MTS 6. Tamat D1/D2/D3 2. Tidak Tamat SD/MI 5. Tamat SLTA/MA 7. Tamat PT D4/S1/S2/S3 3. Tamat SD/MI			
3008.	Status pekerjaan	1. Tidak bekerja → P.3010 2. Bekerja 3. Sekolah → P.3010			
3009.	Jenis pekerjaan utama	1. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 4. Petani 7. Lainnya, sebutkan 2. Pegawai swasta 5. Nelayan 3. Wiraswasta 6. Buruh			
3010.	Apakah pertama kali dirawat di puskesmas ini	1. Ya 2. Tidak			
3011.	Mengapa Anda memilih puskesmas ini untuk berobat? ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK"				
	a. Rekomendasi teman/keluarga		d. Fasilitas lengkap		f. Dijamin asuransi
	b. Reputasi		e. Harga terjangkau		g. Kecocokan dokter
	c. Lokasi mudah dijangkau dari rumah/tempat bekerja				h. Lainnya
3012.	Berapa menit dari rumah ke puskesmas	 Menit			

3013.	Lokasi puskesmas mudah dicapai?			1. Ya	2. Tidak	☐	
3014.	Alat transportasi yang dipakai untuk pergi ke puskesmas (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")						
	a. Jalan kaki	☐	c. Roda tiga (becak, bemo, dll)	☐	e. Sampan/perahu/getek	☐	
	b. Roda dua (sepeda, motor)	☐	d. Roda empat (mobil, dll)	☐	f. Lainnya, sebutkan	☐	
3015.	Darimana sumber biaya untuk berobat? (ISIKAN KODE 1"YA" ATAU 2"TIDAK")						
	a. BPJS kesehatan PBI	☐	d. Kartu Indonesia Sehat (KIS)	☐	f. Asuransi kesehatan swasta	☐	
	b. BPJS kesehatan non-PBI	☐	e. Biaya sendiri	☐	g. Lainnya	☐	
	c. Jamkesda	☐					
IV. KETANGGAPAN DAN KEPUASAN							
DITANYAKAN PADA PASIEN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN RAWAT INAP MINIMAL SATU HARI ATAU AKAN PULANG							
PERTANYAAN BLOK IV ADALAH TENTANG PENGALAMAN BPK/IBU/SDR DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN INI							
4.1 KECEPATAN MENDAPATKAN PELAYANAN							
4001.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr dapat menjalani rawat inap seperti yang diharapkan?				1. Ya	2. Tidak	☐
4002.	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan rawat inap (sejak mendaftar sampai mendapat kamar untuk rawat inap)?				 menit	☐	☐
4003.	Selama Bpk/Ibu/Sdr dirawat, apakah sering dokter/perawat memberikan perhatian secepat yang Bpk/Ibu/Sdr harapkan?			1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐	
4004.	Selama Bpk/Ibu/Sdr dirawat, apakah dokter visit (melakukan kunjungan) kepada Bpk/Ibu/Sdr setiap hari			1. Ya	2. Tidak	☐	
4005.	Menurut pengalaman Bpk/Ibu/Sdr bagaimana keterjangkauan lokasi selama Bpk/Ibu/Sdr dirawat?			1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4006.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr. dalam memperoleh pelayanan secepatnya di puskesmas?			1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4007.	Puskesmas relatif mudah dicapai dari tempat tinggal pasien			1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐	
4008.	Proses administrasi untuk masuk rawat inap mudah (tidak berbelit-belit)			1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐	
4009.	Berapa lama menunggu proses masuk rawat inap sejak ditentukan harus menjalani rawat inap?			 hari		☐	
				 menit		☐	
4010.	Menurut Bapak/Ibu/Saudara, waktu tunggu tersebut tidak lama			1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐	
4011.	Terdapat petunjuk yang cukup untuk mencari ruang : administrasi BPJS, periksa/ pemeriksaan lab/ radiologi/ pengambilan obat di RS			1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐	
4012.	Lama waktu menunggu dari mulai berada di ruang tunggu sampai diperiksa petugas kesehatan				 menit	☐	
4013.	Penyebab waktu tunggu						
	a. Kamar penuh	1. Ya				2. Tidak	☐
	b. Proses administrasi	1. Ya				2. Tidak	☐
	c. Keluarga/ pasien belum siap	1. Ya				2. Tidak	☐
4014.	Dilakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang medis lainnya (Rontgen, USG, MRI, dan sebagainya)			1. Ya	2. Tidak → P.4019	☐	
4015.	Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan			1. Sangat setuju 2. Setuju	3. Tidak setuju 4. Sangat tidak setuju	☐	

4016.	Apakah pemeriksaan tersebut dilakukan di puskesmas ini?	1. Ya 2. Tidak	☐
4017.	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr menunggu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium/ pemeriksaan lainnya? 1. Pada hari yang sama 3. 3-5 hari 5. Lebih dari 10 hari, 2. 1-2 hari 4. 6-10 hari sebutkan.....		☐
4018.	Menurut Bapak/Ibu/Saudara waktu tunggu hasil pemeriksaan tersebut tidak lama	1. Sangat setuju 3. Tidak setuju 2. Setuju 4. Sangat tidak setuju	☐
4.2 RAMAH DAN SIKAP SOPAN PETUGAS KESEHATAN			
4019.	Ketika Bpk/Ibu/Sdr mendapatkan pelayanan rawat inap, apakah Bpk/Ibu/Sdr diperlakukan secara ramah dan sopan?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4020.	Apakah petugas pelayanan rawat inap (perawat/dokter/ahli gizi/petugas obat) melayani Bpk/Ibu/Sdr dengan ramah dan sopan?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4021.	Menurut pengalaman Bpk/Ibu/Sdr apakah petugas kesehatan menjaga privacy (kerahasiaan) pada saat dilakukan pemeriksaan selama di rawat?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4022.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr. dalam mendapatkan perlakuan secara ramah dan sopan oleh petugas puskesmas?	1. Sangat baik 4. Buruk 2. Baik 5. Sangat buruk 3. Sedang	☐
4.3 KOMUNIKASI PETUGAS KESEHATAN DENGAN PASIEN			
4023.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Bpk/Ibu/Sdr dirawat inap?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4024.	Apakah dokter/perawat/petugas pelayanan rawat inap menerangkan dengan jelas tentang kesehatan, pengobatan dan obatnya kepada Bpk/Ibu/Sdr dengan cara yang dapat dimengerti?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4025.	Apakah dokter/perawat/petugas pelayanan rawat inap memberi kesempatan kepada Bpk/Ibu/Sdr untuk bertanya tentang masalah kesehatan dan pengobatannya?	1. Ya 3. Tidak 2. Kadang-kadang	☐
4026.	Bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dari petugas kesehatan selama Bpk/Ibu/Sdr dirawat?	1. Sangat baik 4. Buruk 2. Baik 5. Sangat buruk 3. Sedang	☐
4027.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr tentang cara petugas kesehatan berkomunikasi dengan baik selama bpk/ibu/ sdr dirawat?	1. Sangat baik 4. Buruk 2. Baik 5. Sangat buruk 3. Sedang	☐
4028.	Apakah Bpk/Ibu/Sdr diperiksa oleh dokter?	1. Ya 2. Tidak	☐
UNTUK PERTANYAAN NOMOR 4029a SAMPAI DENGAN 4030b, ISIKAN KODE: 1 "SANGAT SETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"			
4029.	a. Pemeriksa meminta izin sebelum melakukan pemeriksaan/pengobatan		☐
	b. Petugas kesehatan memberi informasi yang jelas tentang biaya pengobatan		☐
	c. Dokter selalu ada di tempat bila diperlukan pasien		☐
4030.	a. Pemeriksa menenangkan rasa cemas pasien terhadap penyakit yang diderita		☐
	b. Petugas kesehatan memberi dorongan, semangat atau doa kepada pasien supaya cepat sembuh		☐
4031.	Pasien diperiksa secara rutin setiap hari oleh petugas kesehatan	1. Ya 2. Tidak	☐
4.4 HAK MEMILIH PENGobatan/PERAWATAN			
4032.	Apakah ada keputusan dari petugas kesehatan tentang cara pengobatan/pemeriksaan Bpk/Ibu/Sdr ketika memperoleh pelayanan kesehatan?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak	☐
4033.	Apakah dokter/perawat/petugas kesehatan lainnya melibatkan Bpk/Ibu/Sdr di dalam memutuskan cara pengobatan dan pemeriksaan yang sesuai dengan Bpk/Ibu/Sdr kehendaki?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak	☐
4034.	Menurut pengalaman Bpk/Ibu/Sdr apakah petugas kesehatan ikut mengintervensi atau menghalang-halangi dalam memilih perawatan atau pengobatan selama Bpk/Ibu/Sdr dirawat?	1. Ya 2. Kadang-kadang 3. Tidak	☐
4035.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan selama dirawat?	1. Sangat baik 4. Buruk 2. Baik 5. Sangat buruk 3. Sedang	☐

4.5 KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN					
4036.	Apakah petugas kesehatan berbicara kepada Bpk/Ibu/Sdr yang dilakukan tanpa didengar orang lain selama dirawat inap?	1. Ya 2. Kadang-kadang	3. Tidak	☐	
4037.	Apakah petugas kesehatan menyimpan informasi kesehatan seperti riwayat medis Bpk/Ibu/Sdr. secara rahasia selama dirawat inap?	1. Ya 2. Tidak	3. Tidak tahu	☐	
4038.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/sdr.tentang cara petugas menjaga kerahasiaan informasi kesehatan Bpk/Ibu/Sdr.?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4.6 HAK MEMILIH PELAYANAN KESEHATAN					
4039.	Seberapa sulit masalah yang Bpk/Ibu/Sdr. alami dalam memperoleh ruang rawat inap yang sesuai dengan pilihan Bpk/Ibu/Sdr selama dirawat?	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang	4. Sulit 5. Sangat sulit	☐	
4040.	Seberapa sulit masalah yang Bpk/Ibu/Sdr alami dalam memperoleh pelayanan dokter dan tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan pilihan Bpk/Ibu/Sdr selama dirawat?	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang	4. Sulit 5. Sangat sulit	☐	
4041.	Seberapa berat masalah yang Bpk/Ibu/Sdr alami dalam memperoleh pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan yang tidak biasa digunakan? (Misalnya pasien biasa berobat di puskesmas ini, sedangkan ada RS atau puskesmas rawat inap lain di kabupaten tsb, maka ditanyakan seberapa sulit responden memperoleh pelayanan rawat inap dari RS atau puskesmas rawat inap lain selain puskesmas ini)	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang	4. Sulit 5. Sangat sulit 6. Tidak pernah mencoba	☐	
4042.	Secara keseluruhan, bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr tentang kesempatan untuk memilih puskesmas untuk perawatan?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4.7 KUALITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN					
4043.	Bagaimana penilaian Bpk/Ibu/Sdr. tentang kebersihan ruang rawat inap?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4044.	Menurut pendapat Bpk/Ibu/Sdr apakah kualitas makanan yang diberikan selama dirawat sudah cukup dan baik?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4045.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr apakah kualitas obat-obatan yang diberikan selama dirawat sudah cukup dan baik?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4046.	Secara keseluruhan di tempat perawatan yang Bpk/Ibu/Sdr kunjungi, bagaimana kualitas lingkungan (seperti ruangan, tempat duduk, udara segar dan kebersihannya)?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang	4. Buruk 5. Sangat buruk	☐	
4047.	Terdapat ruang tunggu keluarga pasien		1. Ya 2. Tidak	☐	
UNTUK PERTANYAAN NOMOR 4048a SAMPAI DENGAN 4049e, ISIKAN KODE: 1 "SANGAT SETUJU"; 2 "SETUJU"; 3 "TIDAK SETUJU"; 4 "SANGAT TIDAK SETUJU"					
4048.	a.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang tunggu keluarga pasien bersih			☐
	b.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang tunggu keluarga pasien nyaman			☐
	c.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia cukup tempat duduk di ruang tunggu keluarga pasien			☐
	d.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tempat sampah tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tunggu keluarga pasien			☐
	e.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ventilasi udara di ruang tunggu keluarga pasien cukup			☐
4049.	a.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang perawatan bersih			☐
	b.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ruang perawatan nyaman			☐
	c.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tempat cuci tangan tersedia di ruang perawatan			☐
	d.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, terdapat tempat sampah dalam jumlah yang cukup di ruang perawatan			☐
	e.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ventilasi udara di ruang perawatan cukup			☐

4050.	Anda pernah menggunakan/melihat kamar mandi/WC pasien?	1. Ya 2. Tidak →P. 4052	☐
UNTUK NOMOR 4051 SAMPAI DENGAN 4055h, ISIKAN KODE: 1 “SANGATSETUJU”; 2 “SETUJU”; 3 “TIDAK SETUJU”; 4 “SANGAT TIDAK SETUJU”			
4051.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia air cukup di kamar mandi/WC	☐	
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, ada saluran pembuangan keluar dari kamar mandi/WC	☐	
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, kamar mandi tidak bau	☐	
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, kamar mandi/WC nyaman	☐	
4052.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, alat pemeriksaan yang digunakan bersih	☐	
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, alat pemeriksaan (stetoskop, tensimeter, termometer, timbangan) di puskesmas ini tersedia lengkap	☐	
4053.	Menurut Bpk/Ibu/Sdr, secara umum penampilan petugas kesehatan bersih dan rapih	☐	
4054.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, makanan bervariasi	☐	
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, sebagian besar makanan yang diberikan habis dimakan pasien	☐	
4055.	a. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, tersedia informasi dalam bentuk media poster/ video/ audio, atau lainnya di puskesmas	☐	
	b. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas menjelaskan prosedur administrasi	☐	
	c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas melayani dengan ramah	☐	
	d. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, pemeriksa memeriksa pasien dengan teliti	☐	
	e. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, pemeriksaan penunjang (rontgen, USG, EKG, dll) yang diperlukan tersedia cukup lengkap di puskesmas ini	☐	
	f. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, semua obat yang di resepkan tersedia	☐	
	g. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, semua pelayanan yang diterima, tidak ada lagi biaya tambahan	☐	
	h. Menurut Bpk/Ibu/Sdr, petugas menjelaskan cara pemakaian/minum obat kepada pasien/keluarganya	☐	
4.8 KEMUDAHAN DIKUNJUNGI KELUARGA ATAU TEMAN			
4056.	Selama dirawat di puskesmas, apakah ada kesulitan untuk memperoleh izin bagi keluarga dan teman untuk melayani kebutuhan pribadi Bpk/Ibu/Sdr (misal: membawa makanan kesukaan dan kebutuhan sehari-hari)?	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang 4. Sulit 5. Sangat sulit	☐
4057.	Selama Bpk/Ibu/Sdr. dirawat di puskesmas, apakah ada kesulitan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan yang Bpk/Ibu/Sdr inginkan?	1. Tidak ada 2. Sedikit 3. Sedang 4. Sulit 5. Sangat sulit	☐
4058.	Secara keseluruhan bagaimana pengalaman Bpk/Ibu/Sdr. dalam melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan selama dirawat di puskesmas?	1. Sangat baik 2. Baik 3. Sedang 4. Buruk 5. Sangat buruk	☐
UNTUK PERTANYAAN NOMOR 4059 SAMPAI DENGAN 4060, ISIKAN KODE 1 “SANGATSETUJU”; 2 “SETUJU”; 3 “TIDAK SETUJU”; 4 “SANGAT TIDAK SETUJU”			
4059.	Secara keseluruhan, Bapak/Ibu/Sdr sebagai pasien puas dengan pelayanan yang diberikan di puskesmas ini	☐	
4060.	Bapak/Ibu/sdr sebagai pasien berkeinginan untuk kembali berobat ke puskesmas ini lagi di lain waktu	☐	
4061.	Apakah merupakan pasien JKN (Konfirmasi ke Blok III P.3015 Keterangan Responden, Jika salah satu pilihan jawaban a, b, c, d adalah Ya)	1. Ya 2. Bukan →SELESAI	☐
4062.	Apakah ada biaya tambahan untuk semua pemeriksaan laboratorium?	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐
4063.	Apakah ada biaya tambahan untuk pemeriksaan penunjang lainnya (rontgen, USG, MRI, dll)	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐
4064.	Semua obat yang diresepkan tersedia dan masuk dalam paket JKN (tidak ada biaya tambahan)	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak berlaku	☐